



WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2021-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2021-2026.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros, Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
24. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar;

25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
26. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
37. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
38. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
39. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 3);
40. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar Tahun 2015-2034 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2015, Nomor 4);
41. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR
dan
WALIKOTA MAKASSAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Walikota adalah Walikota Makassar.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar yang selanjutnya disingkat DPRD Kota Makassar adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota Makassar sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan.
9. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
10. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada
11. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
12. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang Daerah.
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah rencana pembangunan Nasional yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah rencana pembangunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yakni tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.
18. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra- Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode rencana 5 (lima) tahun yakni tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.
19. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana pembangunan tahunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja- Perangkat Daerah adalah rencana pembangunan tahunan Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
22. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

23. Pokok pikiran adalah kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui Reses.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-Undang.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Walikota dengan Peraturan Daerah.
26. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
27. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai Visi dan Misi Walikota serta target Pembangunan Nasional.
28. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan Pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimasa yang akan datang.
29. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
30. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
31. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
32. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran secara terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang atau jasa.
33. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun yang dikeluarkan dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
34. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan
35. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian keluaran, hasil, dan dampak.
36. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
37. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil program Perangkat Daerah.
38. Dampak adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil beberapa program.
39. Hasil adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
40. Keluaran adalah suatu produk akhir berupa barang dan jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil dapat terwujud.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Walikota Makassar yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah serta program Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang Bersifat Indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yakni tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.
- (2) Kerangka pendanaan digunakan untuk menghitung kapasitas riil keuangan Daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah Daerah 5 (lima) tahun ke depan.
- (3) RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, RENSTRA Perangkat Daerah dan RENJA Perangkat Daerah.

BAB III TATA CARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 3

Perencanaan pembangunan Daerah berorientasi pada proses dengan menggunakan pendekatan:

- a. teknokratik;
- b. partisipatif;
- c. politis; dan
- d. atas bawah dan bawah atas.

Pasal 4

Perencanaan pembangunan daerah berorientasi pada substansi dengan pengarusutamaan:

- a. holistik tematik;
- b. integratif; dan
- c. spasial.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 5

- (1) Sistematika RPJMD meliputi :
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
 - c. BAB III : GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH;
 - d. BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH;
 - e. BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN;
 - f. BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH;
 - g. BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH;
 - h. BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH; dan
 - i. BAB IX : PENUTUP.
- (2) Isi dan uraian sistematika RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
PELAKSANAAN RPJMD

Pasal 6

- (1) RPJMD sebagai pedoman penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) Tahun terhitung sejak 2021-2026.
- (4) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah penanggungjawab Unsur Penunjang Urusan Perencanaan.
- (2) Pengendalian dan Evaluasi terhadap RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RENSTRA Perangkat Daerah.
- (4) Perangkat Daerah penanggungjawab utama unsur penunjang urusan perencanaan melaksanakan Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

BAB VII
PERUBAHAN RPJMD

Pasal 8

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan mendasar yang mencakup antara lain bencana alam, dinamika politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah atau perubahan kebijakan Nasional.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka RKPD tahun 2021 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) RPJMD dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026.

Pasal 10

Apabila dalam pelaksanaan RPJMD terdapat kebijakan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berimplikasi terhadap dokumen RPJMD ini, maka akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian pada dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 26 Agustus 2021

WALIKOTA MAKASSAR,

ttd.

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 26 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

ttd.

M. ANSAR

LEMBAR DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2021 NOMOR 5
NOREG B.HK.05.108.21 PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR, PROVINSI
SULAWESI SELATAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt Kepala Bagian Hukum dan HAM
Pada Sekretariat Daerah Kota Makassar



Andi Hikma Rezkiani Nur, SH. M.SP
NIP: 19861125 201001 2 022

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah mengamanahkan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyebutkan bahwa bahwa proses perencanaan mencakup lima pendekatan yaitu: pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah dan bawah-atas. Selain itu, pendekan perencanaan pembangunan juga dilaksanakan dengan pengarusutamaan pendekatan substantif yakni: pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial. Pengarusutamaan ini merupakan penjabaran tema pembangunan daerah kedalam perencanaan yang menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam keterpaduan pemangku kepentingan dan pendanaan, serta dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah.

Pasal 3

Perencanaan pembangunan Daerah berorientasi pada proses dengan menggunakan pendekatan:

- e. teknokratik;
- f. partisipatif;
- g. politis; dan
- h. atas bawah dan bawah atas.

Pasal 4

Perencanaan pembangunan daerah berorientasi pada substansi dengan pengarusutamaan:

- a. tematik;
- b. holistik;
- c. integratif; dan
- d. spasial.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Pendekatan Teknokratik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, adalah perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir Ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Huruf b

Pendekatan Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, adalah perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan melibatkan pembagian pemangku kepentingan.

Huruf c

Pendekatan Politis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, adalah perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan menerjemahkan Visi, Misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan Pembangunan Jangka Menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.

Huruf d

Pendekatan atas bawah dan bawah atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, adalah perencanaan pembangunan merupakan hasil dari perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Kelurahan, Kecamatan, Daerah Kota, Daerah Provinsi, hingga Nasional.

Pasal 4

Huruf a

Tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, adalah perencanaan pembangunan Daerah merupakan penentuan tema prioritas dalam suatu jangka waktu perencanaan.

Huruf b

Holistik sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b, merupakan penjabaran tematik program pembangunan ke dalam perencanaan yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir suatu rangkaian kegiatan.

Huruf c

Integratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c, merupakan upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program pembangunan yang dilihat dari keterpaduan peran Satuan Kerja Perangkat Daerah serta pemangku kepentingan lainnya dan upaya keterpaduan berbagai sumber pendanaan.

Huruf d

Spasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Huruf d, merupakan penjabaran program pembangunan dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah (dimensi keruangan).

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2021 NOMOR 5

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua baik berupa kesehatan lahir dan batin maupun nikmat kekuatan dan kesempatan sehingga penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar 2021 – 2026 dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Penyusunan RPJMD merupakan amanah pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana RPJMD merupakan dokumen perencanaan daerah sebagai penjabaran visi dan misi kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

RPJMD Kota Makassar tahun 2021 – 2026 disusun oleh dengan melibatkan seluruh SKPD dan stakeholder terkait, serta telah melalui tahapan dan proses mulai dari konsultasi publik, Musrenbang, pembahasan dengan DPRD Kota Makassar serta berdasarkan hasil konsultasi dan evaluasi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan penetapan Peraturan daerah (Perda) RPJMD Kota Makassar tahun 2021-2026 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh SKPD, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kota Makassar sesuai dengan visi, misi, dan program pembangunan Walikota dan Wakil Walikota Makassar terpilih.

Melalui kesempatan ini juga, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap jajaran pemerintah Kota Makassar, DPRD Kota Makassar dan seluruh Narasumber yang telah membantu penyusunan RPJMD Kota Makassar tahun 2021-2026 ini, semoga apa yang telah kita lakukan ini bermanfaat bagi kemajuan Kota Makassar serta dapat bernilai ibadah dimata Allah SWT. Amin, Amin Ya Rabbal'amin.

Makassar, Agustus 2021

WALIKOTA MAKASSAR,



MOH. RAMDHAN POMANTO

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Gambar.....	xvii
I PENDAHULUAN	I-1
1.1 LATAR BELAKANG	I-1
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN	I-4
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN	I-8
1.3.1 Hubungan Antara RPJMD Kota Makassar dengan RPJPD Kota Makassar	I-10
1.3.2 Hubungan Antara RPJMD Kota Makassar dengan RENSTRA Perangkat Daerah	I-11
1.3.3 Hubungan antara RPJMD Kota Makassar dengan RKPD	I-11
1.3.4 Hubungan Antara RPJMD Kota Makassar dengan RPJMD Kabupaten di Sekitarnya	I-12
1.4 MAKSUD DAN TUJUAN	I-12
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN	I-13
II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1 ASPEK GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS	II-1
2.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi	II-1
2.1.2 Letak dan Kondisi Geografis	II-3
2.1.2.1 Letak Astronomis	II-3
2.1.2.2 Posisi Geostrategis	II-3
2.1.2.3 Kondisi Kawasan	II-3
2.1.2.4 Topografi dan Geologi	II-7
2.1.2.5 Hidrologi dan Klimatologi	II-8
2.1.3 Penggunaan Lahan	II-9
2.1.3.1 Kawasan Lindung	II-9
2.1.3.1.1 Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahnya	II-9
2.1.3.1.2 Kawasan Perlindungan Setempat	II-10
2.1.3.1.3 Ruang Terbuka Hijau Kota	II-11
2.1.3.1.4 Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Kawasan Cagar Budaya	II-12
2.1.3.1.5 Kawasan Rawan Bencana	II-13
2.1.3.1.6 Kawasan Ruang Evakuasi Bencana	II-20
2.1.3.1.7 Kawasan Lindung Lainnya	II-21
2.1.3.2 Kawasan Budidaya	II-21
2.1.3.2.1 Kawasan Peruntukan Perumahan	II-21
2.1.3.2.2 Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa	II-22
2.1.3.2.3 Kawasan Peruntukan Perkantoran	II-22
2.1.3.2.4 Kawasan Peruntukan Industri	II-22
2.1.3.2.5 Kawasan Peruntukan Pergudangan	II-23
2.1.3.2.6 Kawasan Peruntukan Pariwisata	II-23
2.1.3.2.7 Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)	II-25
2.1.3.2.8 Kawasan Peruntukan Ruang bagi Sektor Informal	II-25
2.1.3.2.9 Kawasan Peruntukan Lainnya	II-26

2.1.4	Potensi Pengembangan Wilayah	II-28
2.1.4.1	Pusat Pelayanan Kota (PPK)	II-28
2.1.4.2	Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK)	II-29
2.1.4.3	Pusat Lingkungan (PL)	II-30
2.1.5	Demografi	II-32
2.2	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	II-35
2.2.1	Pertumbuhan Ekonomi	II-35
2.2.2	Inflasi	II-40
2.2.3	PDRB Per Kapita	II-40
2.2.4	Indeks Gini	II-41
2.2.5	Angka Kemiskinan	II-42
2.2.6	Indeks Pembangunan Manusia	II-43
2.2.7	Angka Melek Huruf	II-44
2.2.8	Angka Harapan Hidup	II-45
2.2.9	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	II-46
2.2.10	Status Gizi Balita	II-47
2.2.11	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	II-47
2.2.12	Tingkat Pengangguran Terbuka	II-48
2.2.13	Rasio Penduduk Yang Bekerja	II-50
2.2.14	Indeks Kepuasan Masyarakat	II-50
2.2.15	Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah	II-51
2.3	ASPEK PELAYANAN UMUM	II-52
2.3.1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	II-52
2.3.1.1	Pendidikan	II-52
2.3.1.2	Kesehatan	II-58
2.3.1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-63
2.3.1.4	Penataan Ruang	II-67
2.3.1.5	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	II-69
2.3.1.6	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	II-71
2.3.1.7	Sosial	II-74
2.3.2	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	II-78
2.3.2.1	Ketenagakerjaan	II-78
2.3.2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-82
2.3.2.3	Pangan	II-86
2.3.2.4	Pertanahan	II-88
2.3.2.5	Lingkungan Hidup	II-89
2.3.2.6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II-98
2.3.2.7	Pemberdayaan Masyarakat	II-101
2.3.2.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	II-104
2.3.2.9	Perhubungan	II-115
2.3.2.10	Komunikasi dan Informatika	II-118
2.3.2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	II-119
2.3.2.12	Penanaman Modal	II-121
2.3.2.13	Kepemudaan dan Olahraga	II-124
2.3.2.14	Statistik	II-126
2.3.2.15	Kebudayaan	II-127

2.3.2.16	Perpustakaan	II-128
2.3.2.17	Kearsipan	II-130
2.3.3	Layanan Urusan Pilihan	II-131
2.3.3.1	Pariwisata	II-131
2.3.3.2	Pertanian	II-133
2.3.3.3	Perdagangan	II-134
2.3.3.4	Perindustrian	II-135
2.3.3.5	Kelautan dan Perikanan	II-135
2.3.4	Layanan Penunjang Urusan	II-138
2.3.4.1	Perencanaan Pembangunan	II-138
2.3.4.2	Keuangan	II-140
2.3.4.3	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	II-142
2.3.4.4	Penelitian dan Pengembangan	II-145
2.3.4.5	Pengawasan	II-147
2.3.4.6	Sekretariat Dewan	II-148
2.4	ASPEK DAYA SAING DAERAH	II-150
2.4.1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita	II-150
2.4.2	Nilai Tukar Petani	II-151
2.4.3	Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita	II-151
2.4.4	Produktivitas Total Daerah	II-152
2.4.5	Rasio Ekspor dan Impor Terhadap PDB	II-153
2.4.6	Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di Bank Umum	II-155
2.4.7	Angka Kriminalitas yang Tertangani	II-156
2.4.8	Rasio Ketergantungan	II-157
III	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1	KINERJA KEUANGAN MASA LALU TAHUN 2016 – 2020	III-1
3.1.1	Kinerja Pelaksanaan APBD	III-2
3.1.1.1	Pendapatan Daerah	III-2
3.1.1.2	Belanja Daerah	III-11
3.1.1.3	Pembiayaan Daerah	III-14
3.1.2	Neraca Daerah	III-16
3.2	KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN TAHUN 2016 – 2020	III-21
3.2.1	Proporsi Penggunaan Anggaran	III-22
3.2.2	Analisis Pembiayaan Daerah	III-23
3.3	KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2021 – 2026	III-26
3.3.1	Asumsi Ekonomi, Sosial dan Fiskal	III-26
3.3.2	Proyeksi Pendapatan dan Belanja	III-31
3.3.2.1	Pendapatan	III-31
3.3.2.2	Belanja	III-34
3.3.2.3	Pembiayaan	III-40
3.3.3	Perhitungan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 – 2026	III-41
3.3.4	Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pendapatan Tahun 2020	III-43
IV	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH	IV-1
4.1	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1.1	Permasalahan Pembangunan Untuk Penentuan Prioritas Daerah	IV-1
4.1.1.1	Belum Maksimalnya Tata Kelola Pemerintahan	IV-1

4.1.1.2	Menurunnya Pertumbuhan Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19	IV-3
4.1.1.3	Naiknya Angka Kemiskinan	IV-4
4.1.1.4	Bertambahnya Jumlah Pengangguran	IV-5
4.1.1.5	Naiknya Tingkat Ketimpangan Pendapatan Masyarakat	IV-5
4.1.1.6	Terbatasnya Ketersediaan Infrastruktur Perkotaan	IV-6
4.1.2	Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	IV-7
4.1.2.1	Pendidikan	IV-7
4.1.2.2	Kesehatan	IV-7
4.1.2.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	IV-7
4.1.2.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	IV-8
4.1.2.5	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	IV-8
4.1.2.6	Sosial	IV-8
4.1.2.7	Tenaga Kerja	IV-8
4.1.2.8	Pemberdayaan Perempuan	IV-8
4.1.2.9	Pangan	IV-9
4.1.2.10	Pertanahan	IV-9
4.1.2.11	Lingkungan Hidup	IV-9
4.1.2.12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	IV-9
4.1.2.13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	IV-9
4.1.2.14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	IV-9
4.1.2.15	Perhubungan	IV-10
4.1.2.16	Komunikasi dan Informatika	IV-10
4.1.2.17	Koperasi dan UKM	IV-10
4.1.2.18	Penanaman Modal	IV-10
4.1.2.19	Kepemudaan dan Olahraga	IV-10
4.1.2.20	Statistik	IV-11
4.1.2.21	Persandian	IV-11
4.1.2.22	Kebudayaan	IV-11
4.1.2.23	Perpustakaan	IV-11
4.1.2.24	Kearsipan	IV-11
4.1.2.25	Pariwisata	IV-11
4.1.2.26	Pertanian, Perikanan	IV-11
4.1.2.27	Perdagangan dan Perindustrian	IV-11
4.1.2.28	Perencanaan Pembangunan	IV-12
4.1.2.29	Keuangan	IV-12
4.1.2.30	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	IV-12
4.1.2.31	Penelitian dan Pengembangan	IV-12
4.1.2.32	Pengawasan	IV-12
4.1.2.33	Sekretariat Dewan	IV-12
4.1.2.34	Kesatuan Bangsa dan Politik	IV-13
4.2	ISU STRATEGIS	IV-13
4.2.1	Isu Strategis Global	IV-13
4.2.1.1	Pandemi <i>Corona Virus Disease-2019</i> (Covid-19)	IV-13
4.2.1.2	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)	IV-14
4.2.1.3	Perubahan Iklim	IV-15

	4.2.1.4 Transformasi Digital	IV-15
	4.2.2 Isu Strategis Nasional	IV-16
	4.2.2.1 Standar Pelayanan Minimal (SPM)	IV-16
	4.2.2.2 Bonus Demografi	IV-17
	4.2.2.3 Kawasan Perkotaan Mamminasata	IV-17
	4.2.3 Isu Strategis Daerah	IV-18
	4.2.3.1 Isu Strategis Provinsi Sulawesi Selatan	IV-18
	4.2.3.2 Isu Strategis Kota Makassar	IV-21
V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	V-1
	5.1 VISI	V-1
	5.2 MISI	V-3
	5.3 TUJUAN DAN SASARAN	V-5
	5.4 KETERKAITAN RPJMD KOTA MAKASSAR DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINYA	V-10
	5.4.1 Hubungan Antara RPJMD Kota Makassar dengan RPJMN Tahun 2020 – 2024	V-10
	5.4.2 Hubungan Antara RPJMD Kota Makassar dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023	V-11
	5.4.3 Hubungan Antara RPJMD Kota Makassar dengan RPJPD Kota Makassar Tahun 2005 – 2025	V-12
	5.4.4 Hubungan Antara RPJMD Kota Makassar dengan RTRW Kota Makassar Tahun 2018 – 2023	V-12
	5.4.5 Hubungan Antara RPJMD Kota Makassar dengan RPJMD Kabupaten Di Sekitar	V-22
VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VI-1
	6.1 STRATEGI	VI-1
	6.2 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VI-8
VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VII-1
	7.1 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN	VII-1
	7.1.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja	VII-1
	7.1.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan	VII-6
	7.1.3 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil	VII-6
	7.2 PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VII-7
VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VIII-1
	8.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA	VIII-1
	8.2 INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)	VIII-2
	8.3 INDIKATOR KINERJA KUNCI	VIII-5
IX	PENUTUP	IX-19
	9.1 KAIDAH PELAKSANAAN	IX-19
	9.2 PEDOMAN TRANSISI	IX-20

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Misi RPJMN Tahun 2020 – 2024, Perubahan RPJMD Tahun 2018 – 2023 Provinsi Sulawesi Selatan, dan RPJMD Tahun 2021 – 2026 Kota Makassar.....	I-9
Tabel 2.1	Luas Wilayah dan Persentase terhadap Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Makassar Tahun 2020	II-2
Tabel 2.2	Kondisi Eksisting Ruang Terbuka Hijau Tahun 2020 Kota Makassar	II-12
Tabel 2.3	Potensi Luas Daerah Terdampak Bencana Banjir Tahun 2020 Kota Makassar	II-14
Tabel 2.4	Potensi Luas Daerah Terdampak Bencana Kekeringan Tahun 2020 Kota Makassar	II-16
Tabel 2.5	Potensi Luas Daerah Terdampak Gelombang Ekstrem dan Abrasi Tahun 2020 Kota Makassar.....	II-17
Tabel 2.6	Potensi Luas Daerah Terdampak Bencana Tsunami Tahun 2020 Kota Makassar	II-19
Tabel 2.7	Potensi Luas Daerah Terdampak Bencana Pandemi dan Wabah Penyakit Kota Makassar Tahun 2020	II-20
Tabel 2.8	Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Kecamatan Kota Makassar Tahun 2016-2020.	II-32
Tabel 2.9	Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan Kota Makassar Tahun 2018-2020	II-33
Tabel 2.10	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 -2020 Kota Makassar	II-37
Tabel 2.11	Nilai dan Pertumbuhan Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 - 2020 Kota Makassar	II-39
Tabel 2.12	Laju dan Rata-Rata Inflasi Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-40
Tabel 2.13	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2016 - 2020 Kota Makassar	II-43
Tabel 2.14	Angka Melek Huruf Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-44
Tabel 2.15	Prevalensi Balita Gizi Kurang Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-47
Tabel 2.16	Prevalensi Balita Gizi Buruk Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-47
Tabel 2.17	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-48
Tabel 2.18	Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-49
Tabel 2.19	Rasio Penduduk Yang Bekerja Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-50
Tabel 2.20	Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-50
Tabel 2.21	Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-51
Tabel 2.22	Persentase Angka Partisipasi Anak Usia 4 – 6 Tahun yang Mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-52
Tabel 2.23	Angka Partisipasi Kasar Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-53
Tabel 2.24	Angka Partisipasi Murni Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-53
Tabel 2.25	Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-54
Tabel 2.26	Angka Kelulusan Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-55
Tabel 2.27	Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs dan SMP/MTs ke SMA/MA Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-55
Tabel 2.28	Angka Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-56
Tabel 2.29	Angka Putus Sekolah Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-56
Tabel 2.30	Sekolah dengan Kondisi Bangunan Baik Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-57
Tabel 2.31	Rasio Ketersediaan Sekolah Per Penduduk Usia Sekolah Tingkat Pendidikan Dasar	II-57
Tabel 2.32	Rasio Guru Per Murid Sekolah Pendidikan Dasar Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-58
Tabel 2.33	Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-58

Tabel 2.34	Angka Kematian Neonatal per 1.000 Kelahiran Hidup Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-59
Tabel 2.35	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Tahun 2016 s.d 2020 Kota Makassar	II-59
Tabel 2.36	Rasio Posyandu Per Satuan Balita Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-60
Tabel 2.37	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar.....	II-60
Tabel 2.38	Rasio Rumah Sakit Per SatuanPenduduk Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-60
Tabel 2.39	Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-61
Tabel 2.40	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar ...	II-62
Tabel 2.41	Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-63
Tabel 2.42	Persentase Jalan Kota Dalam Kondisi Baik (> 40 Km/Jam) Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar.....	II-63
Tabel 2.43	Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase > 1,5 Meter Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-64
Tabel 2.44	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-64
Tabel 2.45	Persentase Sempadan Sungai yang Digunakan oleh Bangunan Liar Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-65
Tabel 2.46	Persentase Penduduk Berakses Sumber Air Minum Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-65
Tabel 2.47	Persentase Area Kawasan Kumuh Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-66
Tabel 2.48	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan Tahun 2016 s.d 2020 Kota Makassar.....	II-66
Tabel 2.49	Rasio Tempat Pemakaman Umum Persatuan Penduduk Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-67
Tabel 2.50	Jumlah Rumah Ibadah Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar.....	II-67
Tabel 2.51	Rasio Rumah Ibadah Per Satuan Penduduk Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-67
Tabel 2.52	Luas Ruang Terbuka Hijau Publik Per Luas Wilayah Kota Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-68
Tabel 2.53	Rasio Bangunan ber-IMB Per Satuan Bangunan Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-68
Tabel 2.54	Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW.....	II-69
Tabel 2.55	Rasio Rumah Layak Huni Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar.....	II-69
Tabel 2.56	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar.....	II-69
Tabel 2.57	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-70
Tabel 2.58	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar ..	II-70
Tabel 2.59	Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-70
Tabel 2.60	Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-71
Tabel 2.61	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar ...	II-71
Tabel 2.62	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-72
Tabel 2.63	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-72
Tabel 2.64	Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-73
Tabel 2.65	Persentase Penegakan PERDA Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-73
Tabel 2.66	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-74
Tabel 2.67	Persentase PMKS yang Tertangani Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-74

Tabel 2.68	Persentase PMKS Skala yang Memperoleh Bantuan Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-75
Tabel 2.69	Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-75
Tabel 2.70	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-76
Tabel 2.71	Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-76
Tabel 2.72	Persentase Korban Bencana Yang Dievakuasi Dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-77
Tabel 2.73	Persentase Penyandang Disabilitas Dan Orang Dengan Gangguan Jiwa, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-77
Tabel 2.74	Angka Sengketa Pengusaha – Pekerja Tahun 2016 – 202 Kota Makassar	II-78
Tabel 2.75	Besaran Kasus Ketenagakerjaan yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-78
Tabel 2.76	Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-79
Tabel 2.77	Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	II-79
Tabel 2.78	Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-80
Tabel 2.79	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-80
Tabel 2.80	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-81
Tabel 2.81	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-81
Tabel 2.82	Rasio Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-81
Tabel 2.83	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-82
Tabel 2.84	Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan di DPRD Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-82
Tabel 2.85	Rasio KDRT Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-83
Tabel 2.86	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-83
Tabel 2.87	Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tata Laksana KTP/A Dan PPT/PKT di Rumah Sakit Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-84
Tabel 2.88	Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-84
Tabel 2.89	Cakupan Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-85
Tabel 2.90	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-85
Tabel 2.91	Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-86
Tabel 2.92	Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-86
Tabel 2.93	Ketersediaan Pangan Utama Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-87

Tabel 2.94	Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar ...	II-87
Tabel 2.95	Pengawasan dan Pembinaan Ketahanan Pangan Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-88
Tabel 2.96	Penyelesaian Kasus Tanah Negara Tahun 2016 – 2021 Kota Makassar	II-88
Tabel 2.97	Penyelesaian Izin Lokasi Tahun 2016 – 2020 Kota Makasar.....	II-89
Tabel 2.98	Persentase Luas Lahan Bersertifikat Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar.....	II-89
Tabel 2.99	Tersusunnya RPPLH Kota Makassar Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar.....	II-90
Tabel 2.100	Terintegrasinya RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kota Tahun 2016 - 2020	II-90
Tabel 2.101	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Kota	II-90
Tabel 2.102	Pengukuran Indeks Kualitas Air Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar.....	II-90
Tabel 2.103	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	II-91
Tabel 2.104	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	II-91
Tabel 2.105	Pembinaan dan Pengawasan Ketaatan Terhadap Izin Lingkungan (PPLH dan PUULH) Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-92
Tabel 2.106	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar.....	II-92
Tabel 2.107	Terfasilitasinya Pendampingan Pengakuan MHA Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-92
Tabel 2.108	Terverifikasinya MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-93
Tabel 2.109	Terverifikasinya Hak Kearifan Lokal atau Hak Pengetahuan Tradisional Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-93
Tabel 2.110	Penetapan Hak MHA Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-94
Tabel 2.111	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar.....	II-94
Tabel 2.112	Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-94
Tabel 2.113	Timbulan Sampah yang Ditangani Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-95
Tabel 2.114	Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-95
Tabel 2.115	Persentase Cakupan Area Pelayanan Pengelolaan Sampah Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar.....	II-95
Tabel 2.116	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar...	II-96
Tabel 2.117	Operasional TPA/TPST/SPA Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-96
Tabel 2.118	Persentase Izin Pengelolaan Sampah oleh Swasta yang Diterbitkan Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-96
Tabel 2.119	Rasio Penduduk ber-KTP Per Satuan Penduduk Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-98
Tabel 2.120	Jumlah Penduduk yang Telah Melakukan Perekaman KTP Elektronik Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-98
Tabel 2.121	Rasio Bayi Berakte Kelahiran Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar.....	II-99
Tabel 2.122	Rasio Pasangan Berakte Nikah Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-99
Tabel 2.123	Ketersediaan Database Kependudukan Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-99
Tabel 2.124	Penerapat KTP Nasional Berbasis NIK Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar.....	II-100
Tabel 2.125	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar ..	II-100
Tabel 2.126	Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar.....	II-100
Tabel 2.127	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang Baik Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-101
Tabel 2.128	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-101

Tabel 2.129	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-102
Tabel 2.130	Persentase LSM Aktif Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-102
Tabel 2.131	Persentase LPM Berprestasi Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-102
Tabel 2.132	Persentase PKK Aktif Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-103
Tabel 2.133	Persentase Posyandu Aktif Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-103
Tabel 2.134	Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-103
Tabel 2.135	Persentase Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-104
Tabel 2.136	Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-104
Tabel 2.137	<i>Total Fertility Rate</i> Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-104
Tabel 2.138	Dokumen Rencana Induk Pengendalian Penduduk Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-105
Tabel 2.139	Persentase Sektor yang Tersosialisasi Konsep Pembangunan Yang Berwawasan Kependudukan dan Alat Ukurnya (IPBK/Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan) Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-105
Tabel 2.140	Persentase Perangkat Daerah yang Berperan Aktif dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-106
Tabel 2.141	Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-106
Tabel 2.142	Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang Mengatur Tentang Pengendalian Kuantitas dan Kualitas Penduduk Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-106
Tabel 2.143	Jumlah Sektor Yang Menyepakati dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter dan Proyeksi Penduduk) untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-107
Tabel 2.144	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-107
Tabel 2.145	Rasio Akseptor KB Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-108
Tabel 2.146	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49 Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-108
Tabel 2.147	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15 – 19) Per 1.000 Perempuan Usia 15–19 Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-108
Tabel 2.148	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya di Bawah 20 Tahun Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-109
Tabel 2.149	Cakupan Pasangan Usia Subur yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-109
Tabel 2.150	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-110
Tabel 2.151	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-110
Tabel 2.152	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita ber-KB Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-110
Tabel 2.153	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-111
Tabel 2.154	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-111
Tabel 2.155	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-111
Tabel 2.156	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-112

Tabel 2.157	Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-112
Tabel 2.158	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB Mandiri Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-113
Tabel 2.159	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-113
Tabel 2.160	Cakupan Ketersediaan Dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi di Gudang Kabupaten / Kota Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-113
Tabel 2.161	Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-114
Tabel 2.162	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-114
Tabel 2.163	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-115
Tabel 2.164	Rasio Izin Trayek Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-115
Tabel 2.165	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-116
Tabel 2.166	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar ...	II-116
Tabel 2.167	Persentase Layanan Angkutan Darat Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-116
Tabel 2.168	Persentase Pemasangan Rambu-Rambu Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-117
Tabel 2.169	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-117
Tabel 2.170	Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-117
Tabel 2.171	Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/ Terminal Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar.....	II-118
Tabel 2.172	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-118
Tabel 2.173	Cakupan Layanan Telekomunikasi Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-118
Tabel 2.174	Persentase Koperasi Aktif Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar.....	II-119
Tabel 2.175	Persentase UKM non BPR/LKM Aktif Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-120
Tabel 2.176	Persentase BPR/LKM Aktif Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-120
Tabel 2.177	Persentase Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-120
Tabel 2.178	Jumlah Investor Berskala Nasional Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar.....	II-122
Tabel 2.179	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-122
Tabel 2.180	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-123
Tabel 2.181	Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar...	II-124
Tabel 2.182	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-124
Tabel 2.183	Persentase Wirausaha Muda Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-124
Tabel 2.184	Cakupan Pembinaan Olahraga Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-125
Tabel 2.185	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-125
Tabel 2.186	Cakupan Pembinaan Atlet Muda Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-125
Tabel 2.187	Jumlah Atlet Berprestasi Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-126
Tabel 2.188	Jumlah Prestasi Olahraga Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-126
Tabel 2.189	Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar.....	II-126
Tabel 2.190	Ketersediaan Buku “Daerah Dalam Angka” Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar.....	II-126
Tabel 2.191	Ketersediaan Buku “PDRB” Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-127
Tabel 2.192	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-127
Tabel 2.193	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar.....	II-127
Tabel 2.194	Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Diinventarisasi Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar.....	II-128

Tabel 2.195	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-128
Tabel 2.196	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-129
Tabel 2.197	Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-129
Tabel 2.198	Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar..	II-129
Tabel 2.199	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai yang Memiliki Sertifikat Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-130
Tabel 2.200	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-130
Tabel 2.201	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-130
Tabel 2.202	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Nusantara Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar.....	II-131
Tabel 2.203	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Mancanegara Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-132
Tabel 2.204	Lama Kunjungan Wisata Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-132
Tabel 2.205	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pariwisata Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-133
Tabel 2.206	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar.....	II-133
Tabel 2.207	Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-133
Tabel 2.208	Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-134
Tabel 2.209	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-134
Tabel 2.210	Ekspor Bersih Perdagangan Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar.....	II-135
Tabel 2.211	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-135
Tabel 2.212	Produksi Perikanan Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-135
Tabel 2.213	Konsumsi Ikan Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-136
Tabel 2.214	Cakupan Bina Kelompok Nelayan Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-136
Tabel 2.215	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-137
Tabel 2.216	Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-137
Tabel 2.217	Nilai Tukar Nelayan Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-137
Tabel 2.218	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA Tahun 2016 – 2020	II-138
Tabel 2.219	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA/PERKADA Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-138
Tabel 2.220	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang Telah Ditetapkan dengan PERKADA Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-139
Tabel 2.221	Tersedianya Dokumen RTRW yang Telah Ditetapkan dengan PERDA Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-139
Tabel 2.222	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar.....	II-139
Tabel 2.223	Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-140
Tabel 2.224	Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-140
Tabel 2.225	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-141
Tabel 2.226	Persentase SILPA Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-141
Tabel 2.227	Persentase Belanja Pendidikan (20%) Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-141

Tabel 2.228	Persentase Belanja Kesehatan (10%) Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-142
Tabel 2.229	Perbandingan Antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-142
Tabel 2.230	Penetapan APBD Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-142
Tabel 2.231	Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-143
Tabel 2.232	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-143
Tabel 2.233	Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar.....	II-144
Tabel 2.234	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar.....	II-144
Tabel 2.235	Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-144
Tabel 2.236	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-145
Tabel 2.237	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-145
Tabel 2.238	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-146
Tabel 2.239	Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-146
Tabel 2.240	Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar.....	II-147
Tabel 2.241	Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-147
Tabel 2.242	Persentase Pelanggaran Pegawai Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar.....	II-148
Tabel 2.243	Jumlah Temuan BPK Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-148
Tabel 2.244	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-148
Tabel 2.245	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-149
Tabel 2.246	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-149
Tabel 2.247	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-150
Tabel 2.248	Indeks Keyakinan Konsumen Kota Makassar	II-151
Tabel 2.249	Nilai Tukar Petani Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-151
Tabel 2.250	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar.....	II-152
Tabel 2.251	Produktivitas Total Daerah Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-153
Tabel 2.252	Perkembangan Ekspor dan Impor Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-154
Tabel 2.253	Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di Bank Umum Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-155
Tabel 2.254	Grafik Kondisi LDR Perbankan Umum di Kota Makassar	II-155
Tabel 2.255	Angka Kriminalitas Kota Makassar 2016 – 2020 Kota Makassar	II-156
Tabel 2.256	Rasio Ketergantungan Kota Makassar Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-157
Tabel 2.257	Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimum (SPM) Tahun 2018 – 2020 Kota Makassar	II-160
Tabel 2.258	Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kota Makassar.....	II-165

Tabel 2.259	Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang Terlaksana dan Mencapai Target di Kota Makassar	II-166
Tabel 2.260	Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang Terlaksana dan Belum Mencapai Target di Kota Makassar	II-178
Tabel 2.261	Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang Belum Terealisasi di Kota Makassar	II-193
Tabel 2.262	Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	II-199
Tabel 3.1	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	III-3
Tabel 3.2	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	III-4
Tabel 3.3	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	III-7
Tabel 3.4	Target dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	III-9
Tabel 3.5	Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	III-10
Tabel 3.6	Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	III-12
Tabel 3.7	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	III-13
Tabel 3.8	Rata-Rata Pertumbuhan Pembiayaan Neto Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	III-15
Tabel 3.9	Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	III-17
Tabel 3.10	Rata-Rata Pertumbuhan Kewajiban dan Ekuitas Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	III-19
Tabel 3.11	Analisa Rasio Keuangan Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	III-20
Tabel 3.12	Analisis Proporsi Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	III-22
Tabel 3.13	Defisit Riil Anggaran Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	III-23
Tabel 3.14	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	III-24
Tabel 3.15	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar	III-25
Tabel 3.16	Asumsi Indikator Makro Ekonomi Tahun 2022 - 2026 Kota Makassar	III-27
Tabel 3.17	Asumsi Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2022 – 2026 Kota Makassar	III-30
Tabel 3.18	Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2022 – 2026 Kota Makassar	III-33
Tabel 3.19	Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2022 - 2026 Kota Makassar	III-39
Tabel 3.20	Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2022 – 2026 Kota Makassar	III-40
Tabel 3.21	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2022 – 2026 Kota Makassar	III-42
Tabel 3.22	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2022 – 2026 Kota Makassar	III-42
Tabel 4.1	Pemetaan Permasalahan Belum Maksimalnya Tata Kelola Pemerintahan	IV-3
Tabel 4.2	Pemetaan Permasalahan Melambatnya Pertumbuhan Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19	IV-4
Tabel 4.3	Pemetaan Permasalahan Naiknya Angka Kemiskinan	IV-4
Tabel 4.4	Pemetaan Permasalahan Bertambahnya Jumlah Pengangguran	IV-5
Tabel 4.5	Pemetaan Permasalahan Naiknya Tingkat Ketimpangan Masyarakat	IV-6
Tabel 4.6	Pemetaan Permasalahan Terbatasnya Ketersediaan Infrastruktur Perkotaan	IV-7
Tabel 5.1	Penjelasan Visi RPJMD Tahun 2021 – 2026 Kota Makassar	V-2
Tabel 5.2	Perumusan Penjelasan Misi RPJMD Tahun 2021 – 2026 Kota Makassar	V-4
Tabel 5.3	Tujuan dan Sasaran Misi 1 RPJMD Tahun 2021 – 2026 Kota Makassar	V-6
Tabel 5.4	Tujuan dan Sasaran Misi 2 RPJMD Tahun 2021 – 2026 Kota Makassar	V-6

Tabel 5.5	Tujuan dan Sasaran Misi 3 RPJMD Tahun 2021 – 2026 Kota Makassar	V-7
Tabel 5.6	Penjabaran Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021 – 2026 Kota Makassar.....	V-8
Tabel 5.7	Hubungan Visi RPJMD Tahun 2021 – 2026 Kota Makassar dengan Agenda Pembangunan (Prioritas Nasional) Tahun 2020 – 2025.....	V-10
Tabel 5.8	Keterkaitan Antara Misi RPJMD Tahun 2021 – 2026 Kota Makassar dengan Misi RPJMN Tahun 2020 – 2024.....	V-11
Tabel 5.9	Keterkaitan Antara Misi RPJMD Tahun 2021 – 2026 Kota Makassar dengan Misi RPJMD Tahun 2018 – 2023 Provinsi Sulawesi Selatan.....	V-11
Tabel 5.10	Keterkaitan antara Misi RPJMD Tahun 2021 – 2026 dengan Misi RPJPD Tahun 2005 – 2025 Kota Makassar	V-12
Tabel 5.11	Hubungan antara Kebijakan Strategi Struktur Ruang Tahun 2015 – 2034 Kota Makassar dengan Sasaran RPJMD Tahun 2021 – 2026 Kota Makassar.....	V-13
Tabel 4.7	Sinergitas antara Dokumen RPJMD Kota Makassar dengan RPJMD Daerah Lain...	V-22
Tabel 6.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kota Makassar Tahun 2021-2026.....	VI-2
Tabel 6.2	Arah Kebijakan Pembangunan Kota Makassar Tahun 2021 - 2026 Kota Makassar .	VI-4
Tabel 6.3	Pemetaan 8 (delapan) Program Strategis “Makassar Dua Kali Terus Tambah Baik” dengan Nomenklatur Program Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020.....	VI-9
Tabel 6.4	Pemetaan Standar Pelayanan Minimal dengan Nomenklatur Program Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020.....	VI-12
Tabel 6.5	Pemetaan Isu Strategis KLHS RPJMD dengan Nomenklatur Program Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020.....	VI-16
Tabel 6.6	Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Tahun 2022 – 2026 Kota Makassar.....	VI-18
Tabel 6.7	Rencana Strategis Tahun 2022 – 2026 Kota Makassar	VI-40
Tabel 7.1	Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2022 – 2026 Kota Makassar .	VII-3
Tabel 7.2	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Tahun 2022 – 2026 Kota Makassar	VII-6
Tabel 7.3	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2022 – 2026 Kota Makassar	VII-6
Tabel 7.4	Program dan Pagu Indikatif SKPD Tahun 2022 – 2026 Kota Makassar	VII-8
Tabel 8.1	Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 – 2026 Kota Makassar	VIII-1
Tabel 8.2	Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2022 – 2026 Kota Makassar	VIII-2
Tabel 8.3	Indikator Kinerja Kunci Tahun 2022 – 2026 Kota Makassar	VIII-6

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 | Proses Penyusunan RPJMD Kota Makassar I-3

Gambar 1.2 | Hubungan RPJMD Kota Makassar dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya I-10

Gambar 1.3 | Hubungan RPJMD Kota Makassar dengan RENSTRA SKPD I-11

Gambar 1.4 | Hubungan RPJMD Kota Makassar dengan RKPD Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 I-12

Gambar 2.1 | Peta Administrasi Kota Makassar II-1

Gambar 2.2 | Peta Sebaran Pulau-Pulau Kota Makassar Tahun 2020 II-2

Gambar 2.3 | Peta Geologi Kota Makassar II-8

Gambar 2.4 | Peta Tutupan Lahan Tahun 2020 Kota Makassar II-11

Gambar 2.5 | Peta Bahaya Banjir Tahun 2020 Kota Makassar II-15

Gambar 2.6 | Peta Bahaya Kekeringan Tahun 2020 Kota Makassar II-16

Gambar 2.7 | Peta Bahaya Gelombang Ekstrem dan Abrasi Tahun 2020 Kota Makassar II-18

Gambar 2.8 | Peta Bahaya Tsunami Tahun 2020 Kota Makassar II-19

Gambar 2.9 | Peta Bahaya Epidemi dan Wabah Penyakit Tahun 2020 Kota Makassar II-20

Gambar 2.10 | Peta Pola Ruang Kota Makassar II-28

Gambar 2.11 | Peta Struktur Ruang Kota Makassar II-31

Gambar 2.12 | Peta Kepadatan Penduduk Kota Makassar II-33

Gambar 2.13 | Peta Kepadatan Penduduk Kota Makassar II-34

Gambar 2.14 | Grafik Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2016-2020 Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional II-35

Gambar 2.15 | Grafik PDRB Kota Makassar Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2016-2020 Kota Makassar II-36

Gambar 2.16 | Grafik Pertumbuhan PDBR Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar II-36

Gambar 2.17 | Grafik Laju Inflasi Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar II-40

Gambar 2.18 | Grafik PDRB Per Kapita ADHB Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar II-41

Gambar 2.19 | Grafik Indeks Gini Tahun 2015 - 2019 Kota Makassar II-42

Gambar 2.20 | Grafik Persentase penduduk di atas garis kemiskinan Tahun 2016 - 2020 Kota Makassar II-42

Gambar 2.21 | Grafik Indeks Kedalaman Kemiskinan Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar II-43

Gambar 2.22 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar II-44

Gambar 2.23 | Angka Melek Huruf Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar II-45

Gambar 2.24 | Grafik Angka Harapan Hidup Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar II-46

Gambar 2.25 | Grafik Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar II-46

Gambar 2.26 | Grafik Kunjungan Wisata Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar II-131

Gambar 3.1 | Postur Pendapatan Daerah Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar III-5

Gambar 3.2 | Postur Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar III-8

Gambar 3.3 | Postur Dana Perimbangan Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar III-9

Gambar 3.4 | Analisis Proyeksi Pendapatan III-26

Gambar 3.5 | Analisis Proyeksi Belanja Daerah III-34

Gambar 3.6 | Pemetaan Klasifikasi / Belanja Daerah III-37

Gambar 3.7 | Analisis Proyeksi Pembiayaan Daerah III-40

I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Pemerintah Daerah (Pemda) menyusun perencanaan pembangunan daerah, di mana perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Lebih lanjut, pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanahkan pemerintah daerah untuk menyusun rencana pembangunan daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, yang terdiri atas: 1). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu dua puluh tahun; 2). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu lima tahun; dan 3). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu satu tahun.

Proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Makassar tahun 2020 yang lalu telah menghasilkan Bapak **Ir. Moh. Ramdhan Pomanto** dan Ibu **Fatmawati Rusdi** sebagai Walikota Makassar dan Wakil Walikota Makassar periode 2021-2026 setelah dilantik oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 26 Februari 2021. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, Pemerintah Kota Makassar kemudian menyusun RPJMD Tahun 2021-2026 Kota Makassar sebagai penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Terkait dengan periodisasi masa jabatan dan dokumen perencanaan, Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota mengatur bahwa waktu menjabat bagi kepala daerah hasil pemilihan tahun 2020 adalah sampai tahun 2024 sebagai konsekuensi yuridis dari akan diadakannya pemilihan serentak nasional pada tahun 2024 mendatang. Namun demikian, berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ penyusunan dokumen RPJMD bagi daerah yang melaksanakan Pilkada serentak tahun 2020 tetap mengikuti masa jabatan lima tahun, yaitu tahun 2021 – 2026.

Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sistematis, terarah, terpadu, inovatif, dan responsif, maka proses penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2021 – 2026 Kota Makassar memedomani dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025 Kota Makassar, khususnya pada tahap IV atau bagian terakhir dari perencanaan jangka panjang daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005 – 2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota

Makassar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025. Selain itu, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar Tahun 2015 – 2034 menjadi landasan penting lainnya dalam penyusunan RPJMD Tahun 2021 – 2026 Kota Makassar beserta dengan dokumen perencanaan lainnya.

Penyusunan dokumen RPJMD juga memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. KLHS dipakai sebagai dasar dalam penyusunan permasalahan dan isu strategis daerah serta tujuan dan sasaran strategis. Permasalahan dan isu strategis daerah merupakan identifikasi terhadap isu pembangunan berkelanjutan. Telaah KLHS dilaksanakan untuk mengidentifikasi dan menentukan skenario pembangunan berdasarkan visi dan misi kepala daerah menggunakan Analisis Teknis dan Analisis Pembangunan Berkelanjutan. Skenario pembangunan adalah alternatif pelaksanaan pembangunan beserta gambaran potensi dampak yang ditimbulkan, hal ini penting mengingat analisis pembangunan berkelanjutan memastikan bahwa pembangunan daerah mengedepankan asas keberlanjutan.

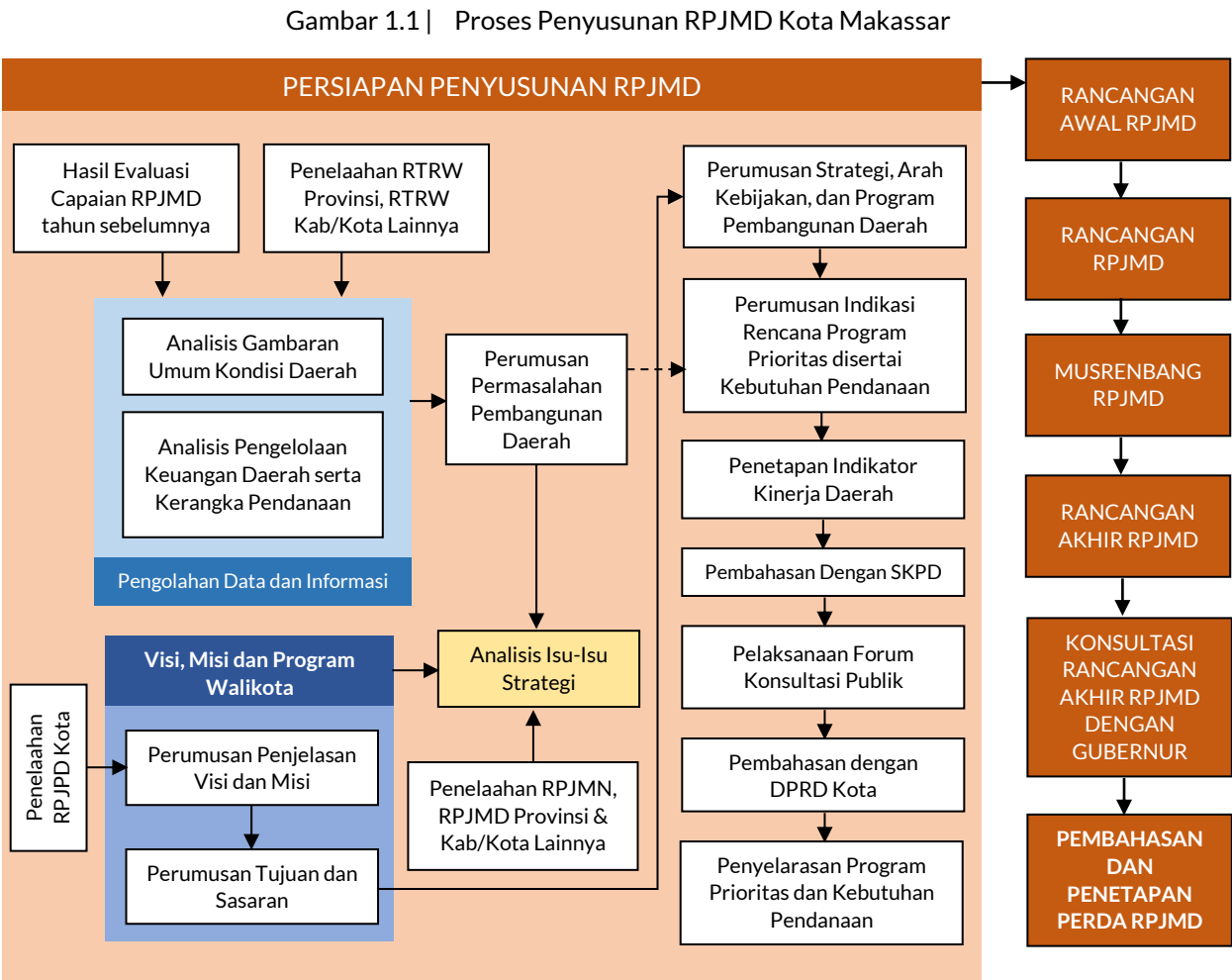
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, proses penyusunan dokumen RPJMD menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan teknokratik, yaitu pendekatan yang dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.
- b. Pendekatan politis, yakni dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- c. Pendekatan partisipatif, yaitu penyusunan perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
- d. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan secara berjenjang serta memperhatikan perencanaan pemerintah pusat (K/L).

Dalam empat tahun terakhir, ekonomi Kota Makassar tumbuh konsisten di atas 8% per tahun, dan jika dilihat secara nasional, Kota Makassar termasuk salah satu kota di Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, selalu melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya rata-rata 5 persen per tahun dan Provinsi Sulawesi Selatan yang rata-rata 7 persen per tahun. Seperti diketahui pandemi covid-19 telah menekan kondisi perekonomian dibanyak negara didunia termasuk Indonesia yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi minus di bawah nol persen. Tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kota Makassar mengalami kontraksi cukup tajam, dengan pertumbuhan -1,27%, untuk itu pertumbuhan ekonomi daerah Kota Makassar dalam lima tahun ke depan diharapkan dapat berangsur-angsur tumbuh positif, dengan pelonggaran kembali pembatasan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Upaya ini, tentunya juga sejalan dengan penegakan keprotokolan kesehatan yang baik serta

berjalannya program vaksinasi oleh pemerintah pusat, sehingga diharapkan nantinya proses tatanan kehidupan dan aktivitas masyarakat secara bertahap dapat berjalan normal kembali. Dengan optimisme tersebut diharapkan untuk tahun 2022 proyeksi pertumbuhan ekonomi Kota Makassar bertumbuh sebesar 4%, dengan asumsi bahwa kondisi penanganan pandemi Covid-19 di Kota Makassar jauh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

Dokumen RPJMD Tahun 2021 – 2026 Kota Makassar selanjutnya menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk lima tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Substansi yang termuat dalam dokumen RPJMD juga akan dijabarkan dalam dokumen rencana tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya. Proses penyusunan RPJMD Kota Makassar berdasarkan alur penyusunan dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Integrasi RPJMD Kota Makassar dengan RPJMN mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Kota Makassar sesuai dengan kewenangannya. Sementara integrasi dengan dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan yaitu mempertimbangkan tujuan dan sasaran pembangunan yang

menggambarkan bahwa prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah pada RPJMD Kota Makassar harus sinkron dan sejalan dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 Kota Makassar didasarkan pada sejumlah landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar;
22. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
24. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

- dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 38. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
 39. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
 40. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006) sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 3);

41. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar Tahun 2015-2034 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2015, Nomor 4);
42. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, rencana pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sehingga harus dikoordinasikan, disinergikan dan diharmonisasikan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan ketentuan perundangan, dokumen RPJMD memedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005 – 2025 sesuai dengan penahapan yang berkenaan. Dalam hal penyusunan RPJMD Tahun 2021 – 2026, tujuan dan sasaran pada tahap IV atau tahapan terakhir pembangunan jangka panjang daerah menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan pembangunan lima tahunan dalam dokumen jangka menengah. Selain itu, dokumen RPJMD juga disusun dengan memedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu dokumen perencanaan spasial lainnya seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota juga menjadi acuan.

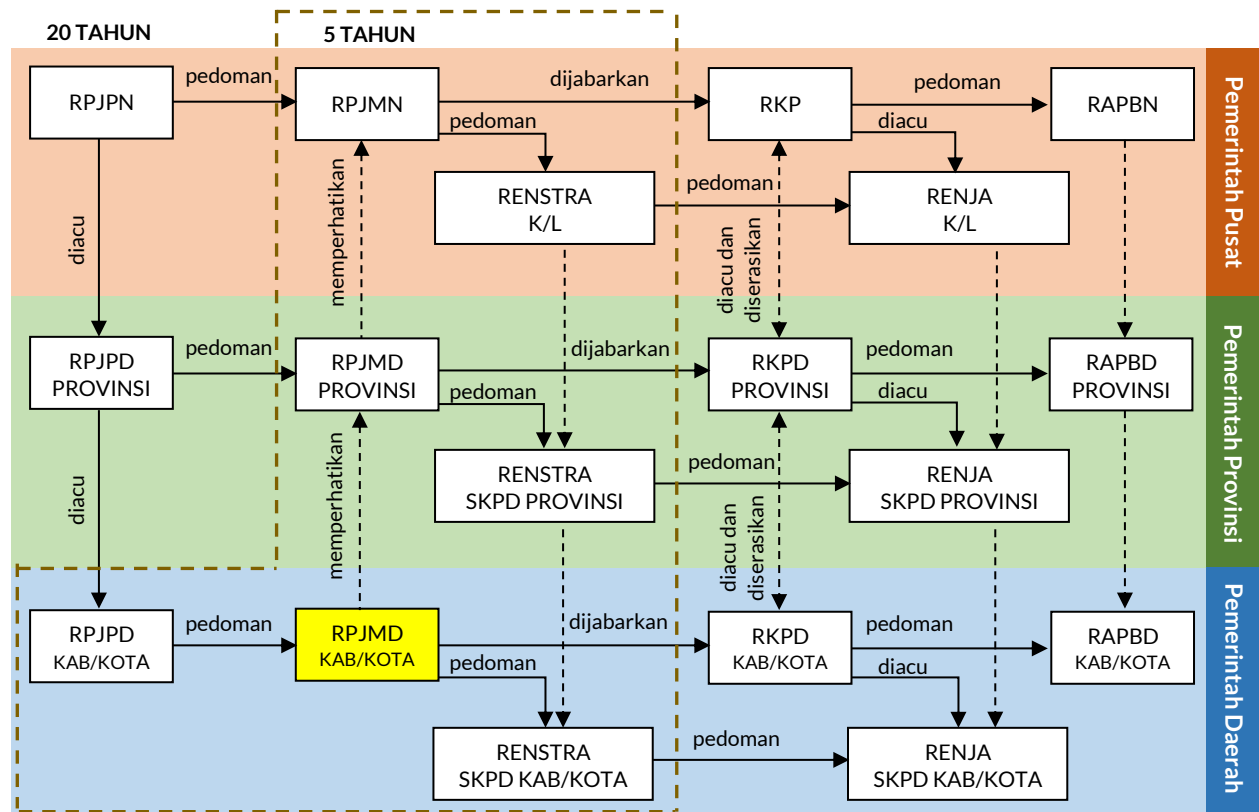
Selanjutnya RPJMD juga menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Secara umum, Renstra Perangkat Daerah berisi rancangan kebijakan dan program perangkat daerah yang disertai target dan pagu indikatif yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima (5) tahun. Kemudian RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Dalam penyusunan RKPD, prioritas dan sasaran pembangunan daerah secara tahunan diselaraskan dengan kebijakan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJPD.

Tabel 1.1| Misi RPJMN Tahun 2020 – 2024, Perubahan RPJMD Tahun 2018 – 2023 Provinsi Sulawesi Selatan, dan RPJMD Tahun 2021 – 2026 Kota Makassar

No	Misi Pembangunan (Nawacita) tahun 2020-2024	Misi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023	Misi Kota Makassar Tahun 2021-2026
1	Peningkatan kualitas manusia Indonesia	Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif	Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM Kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi
2	Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing	Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel;	Rekonstruksi Kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi dan kesehatan kota yang kuat untuk semua
3	Pembangunan yang merata dan berkeadilan	Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif;	Restorasi ruang kota yang inklusif menuju kota nyaman kelas dunia yang “sombere’ dan smart city” untuk semua
4	Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan	Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter	
5	Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan	
6	Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya		
7	Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga		
8	Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya		
9	Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan		

Adapun pola hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut

Gambar 1.2 | Hubungan RPJMD Kota Makassar dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

1.3.1 Hubungan Antara RPJMD Kota Makassar dengan RPJPD Kota Makassar

Sebagaimana diketahui RPJMD merupakan Dokumen perencanaan strategis kerangka menengah suatu pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pasal 263 ayat (3) yang menyebutkan bahwa RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN, maka dalam perumusannya (terutama visi-misi Kepala Daerah), RPJMD Tahun 2021 – 2026 Kota Makassar kemudian wajib berpedoman pada RPJPD Kota Makassar Tahun 2005 – 2025.

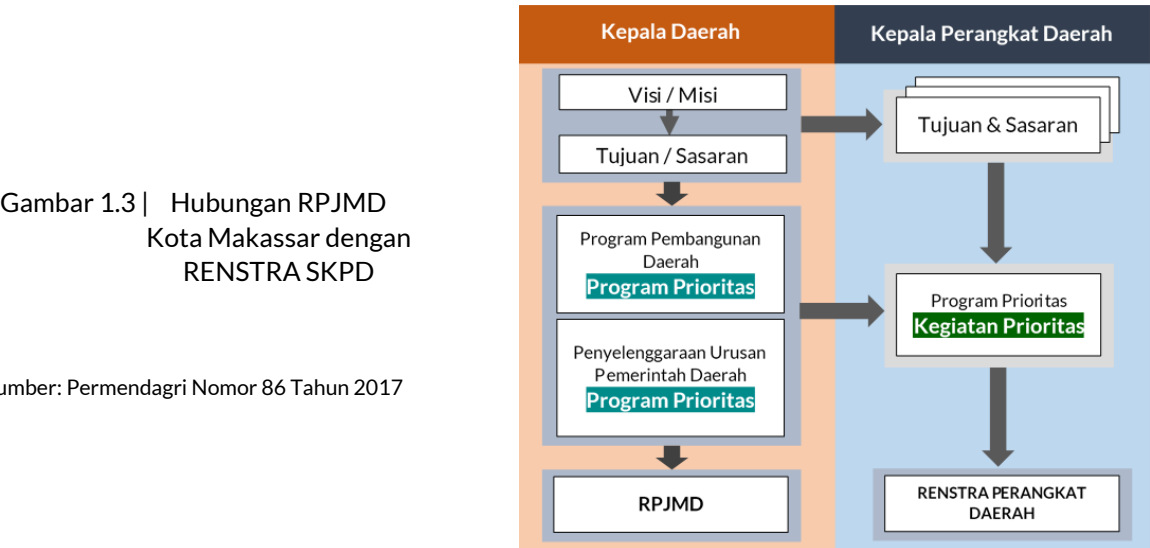
Substansi penyelarasan antara RPJMD Kota Makassar dengan RPJPD diarahkan pada sinkronisasi Penjelasan Visi dan Misi RPJMD Tahun 2021 – 2026 Kota Makassar dengan Sasaran Pokok sebagaimana diamanatkan pada RPJPD Kota Makassar Tahun 2005 – 2025 yang dijabarkan dalam program pembangunan daerah sesuai arah kebijakan pembangunan daerah periode 5 (lima) tahun.

Dalam perumusannya, program pembangunan daerah harus menjabarkan dengan baik sasaran-sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dan tujuan dan sasaran dari visi dan misi rencana pembangunan 5 (lima) tahun. Untuk itu, diperlukan identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah untuk menjabarkan pencapaian sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dan mencapai tujuan dan sasaran RPJMD.

1.3.2 Hubungan Antara RPJMD Kota Makassar dengan RENSTRA Perangkat Daerah

Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. RENSTRA Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat daerah disusun oleh setiap Perangkat Daerah dengan berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Perangkat Daerah melakukan perumusan Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program perangkat daerah RENSTRA Perangkat Daerah, berpedoman kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Makassar dalam kerangka mikro sektoral. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

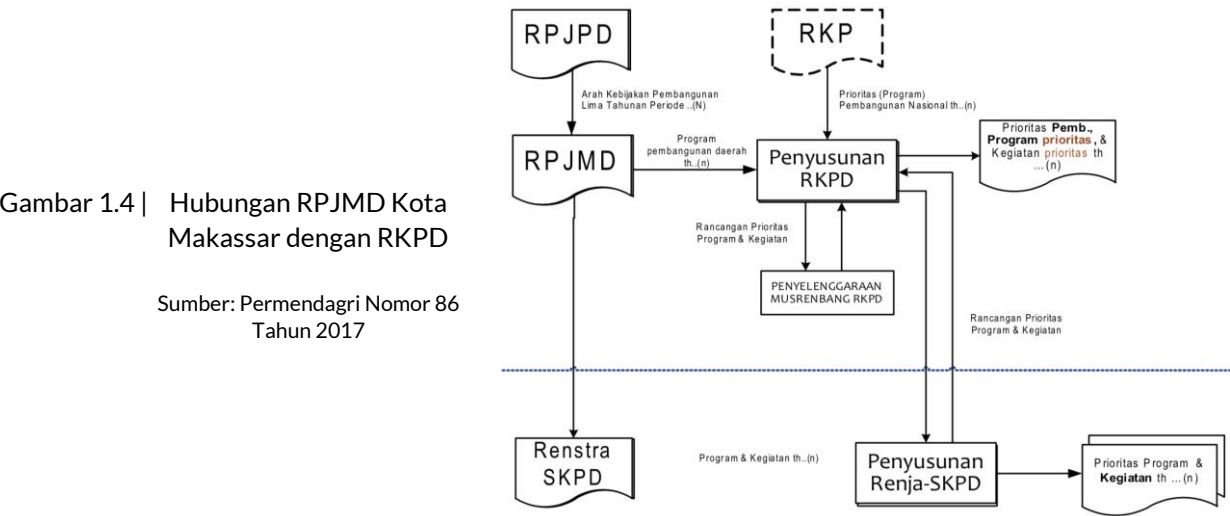


1.3.3 Hubungan antara RPJMD Kota Makassar dengan RKPD

Dalam kerangka Operasional setiap tahunnya, RPJMD Tahun 2021 – 2026 Kota Makassar kemudian dijabarkan ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan daerah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD). Rancangan Awal RKPD yang diperoleh dari RPJMD untuk tahun berkenaan, menjadi acuan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga Kota.

Prioritas dan sasaran pembangunan pada RKPD harus berpedoman pada RPJMD Kota Makassar, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, serta RPJM Nasional. Berpedoman pada RPJMD mengisyaratkan bahwa prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah harus selaras dan sejalan dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD. Selain itu, rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah juga harus selaras serta sejalan dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD.

Prioritas Pembangunan Daerah yang tercantum di dalam RKPD, menjadi prioritas penganggaran dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Pagu Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya wajib dipedomani dalam penyusunan RAPBD setiap tahunnya.



1.3.4 Hubungan Antara RPJMD Kota Makassar dengan RPJMD Kabupaten di Sekitarnya

Sebagai pengejawantahan dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka proses perencanaan pembangunan didasari oleh pendekatan teknokratik. Pendekatan ini memerlukan berbagai pertimbangan teknokratik dari dokumen perencanaan lainnya termasuk diantaranya Dokumen Perencanaan (RPJMD) daerah di sekitarnya selain daripada dokumen RTRW Kota Makassar, guna tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar kabupaten/kota serta keterpaduan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan kabupaten/kota, dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Dalam konteks ini RPJMD Tahun 2021 – 2026 Kota Makassar juga melakukan penelaahan pada dokumen, sebagai berikut :

1. RPJMD Kabupaten Gowa
2. RPJMD Kabupaten Maros
3. RPJMD Kabupaten Takalar

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 Kota Makassar dimaksudkan untuk menjabarkan RPJPD Kota Makassar Tahun 2005-2025 dan menerjemahkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Makassar serta sebagai pedoman dalam penentuan kebijakan pembangunan di Kota Makassar untuk periode 5 (lima) tahun bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pemangku kepentingan sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang memuat tujuan, sasaran, indikator tujuan dan indikator sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan dan keuangan daerah, serta program pembangunan dan program SKPD yang disertai kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Sementara itu RPJMD Tahun 2021-2026 Kota Makassar disusun dengan tujuan:

1. Sebagai pedoman bagi seluruh SKPD lingkup Pemerintah Kota Makassar dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD tahun 2021-2026;
2. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar, dalam 5 (lima) tahun ke depan;
3. Sebagai pedoman penyusunan kebutuhan pendanaan Rencana Pembangunan Tahunan dan Rencana Kerja SKPD;
4. Sebagai parameter penilaian keberhasilan maupun ketidakberhasilan Pemerintah Kota Makassar pada periode 2021-2026 melalui Indikator Kinerja yang telah ditetapkan;
5. Sebagai parameter penilaian kinerja SKPD Pemerintah Kota Makassar dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam rangka pelaksanaan urusan.
6. Menjadi instrumen bagi DPRD Kota Makassar dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja pelaksanaan pemerintah daerah dalam mendukung aspirasi masyarakat serta pencapaian target kinerja program prioritas pembangunan daerah.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

RPJMD Tahun 2021-2026 Kota Makassar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan; menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan RPJMD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Adapun bab satu berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan RPJMD.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah; adalah bagian yang menjelaskan dan menyajikan gambaran kondisi umum daerah dijabarkan berdasarkan hasil analisis dan kajian pada tahap perumusan berupa informasi yang relevan dan penting yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi/misi kepala daerah, dan kebutuhan perumusan strategi. Gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi terkait dengan potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana. Penjelasan dilengkapi dengan tabel, grafik, dan gambar/peta yang mendukung setiap potensi kawasan budaya yang dimiliki daerah. Selanjutnya aspek kesejahteraan masyarakat menjelaskan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Menampilkan indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat Kota Makassar meliputi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olah raga. Sementara pada aspek pelayanan umum menjelaskan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Menampilkan indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek pelayanan umum Kota Makassar meliputi urusan layanan wajib dan urusan pelayanan pilihan. Untuk aspek daya saing daerah menjelaskan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan menampilkan yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek daya saing Kota Makassar meliputi kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi, dan sumber daya manusia.

Bab III Gambaran Keuangan Daerah; menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah, meliputi: kinerja keuangan masa lalu menjelaskan gambaran kinerja keuangan daerah yang mencakup uraian kinerja pelaksanaan APBD (perkembangan pendapatan dan belanja, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi belanja daerah), uraian neraca daerah (perkembangan neraca daerah, analisis rasio likuiditas, analisis rasio solvabilitas dan analisis rasio aktivitas; kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu menjelaskan gambaran kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terkait proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan yang mencakup proporsi penggunaan anggaran (proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan proporsi realisasi belanja) dan analisis pembiayaan ; kerangka pendanaan Menjelaskan kerangka pendanaan dari hasil analisis yang mencakup proyeksi pendapatan dan belanja terkait proyeksi data masa lalu dan asumsi yang digunakan dan kebijakan-kebijakan yang mempengaruhinya, serta Penghitungan Kerangka Pendanaan yang memuat penghitungan kerangka pendanaan dengan tujuan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya.

Bab IV Permasalahan dan Isu Strategis Daerah; menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah, sehingga analisisnya harus dapat menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; menguraikan tentang visi dan misi kepala daerah terpilih dan penjelasan kata-kata kunci dari pernyataan visi, selanjutnya pernyataan misi merupakan penjabaran dari visi dengan bahasa yang jelas, ringkas dan mudah dipahami, serta penjelasan masing-masing misi. Pada perumusan tujuan dan sasaran yang akan hendak dicapai Walikota dan Wakil Walikota hingga akhir periode RPJMD yang menguraikan mengenai apa itu tujuan dan apa itu sasaran serta bagaimana merumuskannya, pernyataan tujuan-tujuan dengan bahasa yang jelas, ringkas dan mudah dipahami, pernyataan sasaran-sasaran dengan bahasa yang jelas, ringkas dan mudah dipahami, serta menggambarkan keterkaitan elemen-elemen perencanaan.

Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah; menjelaskan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan guna perumusan program pembangunan daerah dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas.

Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah; Memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang akan dirumuskan dalam Renstra-SKPD beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, SKPD penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; memuat penetapan indikator kinerja guna memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan indikator TPB, pada akhir periode masa jabatan.

BAB IX Penutup; menguraikan pedoman transisi yang disusun untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah dengan memasukkan program-program yang diarahkan pada pencapaian target kinerja yang belum dicapai selama periode perencanaan sebelumnya berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.

II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 ASPEK GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS

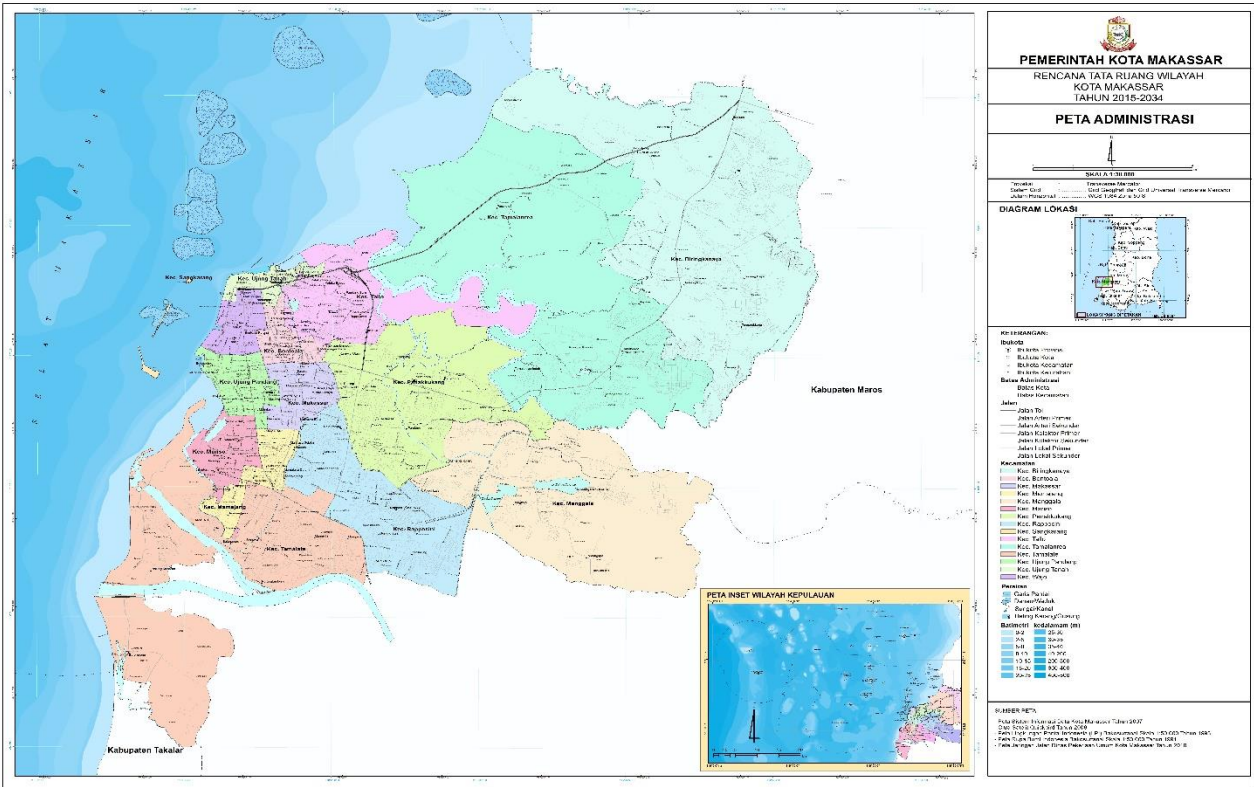
2.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Luas Wilayah Kota layak huni Makassar tercatat 175,77 km persegi, dengan batas-batas wilayah administratif sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Maros
- Sebelah Selatan : Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar
- Sebelah Timur : Kabupaten Gowa dan Maros
- Sebelah Barat : Selat Makassar

Secara administratif Kota Makassar terbagi atas 15 Kecamatan dan 153 Kelurahan. Bagian utara kota terdiri atas Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Tallo, Kecamatan Ujung Tanah dan Kecamatan Kepulauan Sangkarrang. Di bagian selatan terdiri atas Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Rappocini. Di bagian Timur terbagi atas Kecamatan Manggala dan Kecamatan Panakkukang. Bagian barat adalah Kecamatan Wajo, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Makassar, Kecamatan Mamajang, dan Kecamatan Mariso. Secara administrasi, 15 Kecamatan dan 153 Kelurahan di Kota Makassar dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 2.1 | Peta Administrasi Kota Makassar



Sumber: Perda Nomor 4 Tahun 2015 Tentang RTRW Kota Makassar 2015-2034

Rincian luas masing-masing kecamatan, diperbandingkan dengan persentase luas wilayah Kota Makassar sebagai berikut :

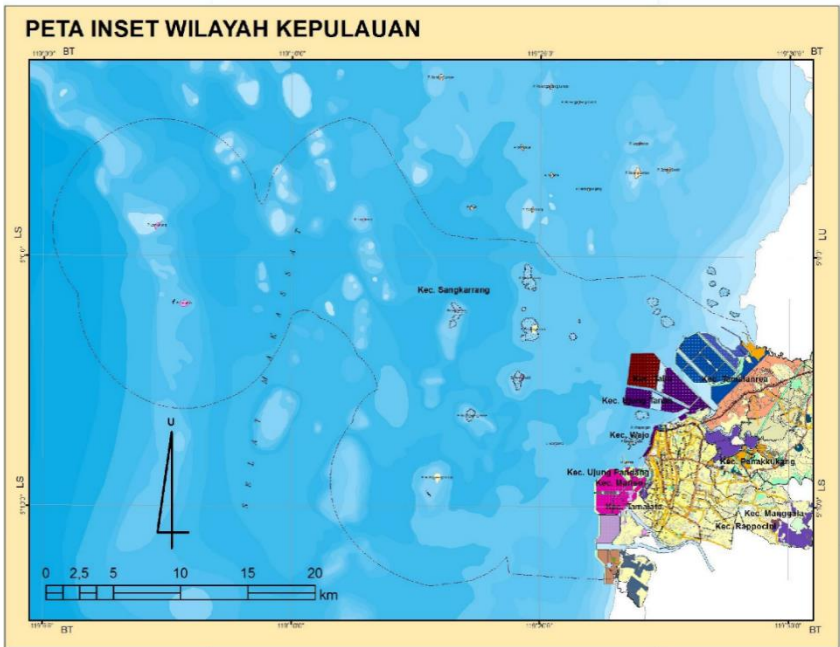
Tabel 2.1 | Luas Wilayah dan Persentase terhadap Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Makassar Tahun 2020

Kode Kemendagri	Kode BPS	Kecamatan	Luas Area (km2)	Persentase Terhadap Luas Kota Makassar
73.71.11	110	Biringkanaya	48,22	27,43
73.71.06	070	Bontoala	2,1	1,19
73.71.03	040	Makassar	2,52	1,43
73.71.02	020	Mamajang	2,25	1,28
73.71.12	101	Manggala	24,14	13,73
73.71.01	010	Mariso	1,82	1,04
73.71.09	100	Panakkukang	17,05	9,7
73.71.13	031	Rappocini	9,23	5,25
73.71.07	090	Tallo	5,83	3,32
73.71.14	111	Tamalanrea	31,84	18,11
73.71.10	030	Tamalate	20,21	11,5
73.71.04	050	Ujung Pandang	2,63	1,5
73.71.08	080	Ujung Tanah	4,4	2,5
73.71.05	060	Wajo	1,99	1,13
73.71.15	081	Kepulauan Sangkarrang	1,54	0,88
73.71	7371	Kota Makassar	175,77	100

Sumber: BPS Kota Makassar 2021 dan Permendagri 72 Tahun 2019

Selain memiliki wilayah daratan, Kota Makassar juga memiliki wilayah kepulauan yang dapat dilihat sepanjang garis pantai Kota Makassar. Pulau ini merupakan gugusan pulau-pulau karang sebanyak 12 pulau, bagian dari gugusan Pulau-Pulau Sangkarrang, atau disebut juga Pulau- Pulau Pabbiring, atau lebih dikenal dengan nama Kepulauan Spermonde. Pulau-pulau tersebut adalah Pulau Lanjukang (terjauh), Pulau Langkai, Pulau Lumu-Lumu, Pulau Bonetambung, Pulau Kodingareng Lompo, Pulau Barrang Lompo, Pulau Barrang Caddi, Pulau Kodingareng Keke, Pulau Samalona, Pulau Lae-Lae, Pulau Lae-Lae Kecil (gusung) dan Pulau Kayangan (terdekat). Wilayah Kepulauan Kota Makassar dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.2 | Peta Sebaran Pulau-Pulau Kota Makassar Tahun 2020



Perda Nomor 4 Tahun 2015 Tentang RTRW Kota Makassar 2015-2034

2.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

2.1.2.1 Letak Astronomis

Secara astronomis Kota Makassar, terletak di Pantai Barat pulau Sulawesi antara berada pada koordinat $119^{\circ}4'29,038''$ – $119^{\circ}32'35,781''$ Bujur Timur dan $4^{\circ}58'30,052''$ – $5^{\circ}14'0,146''$ Lintang Selatan dengan luasan $175,77 \text{ km}^2$.

2.1.2.2 Posisi Geostrategis

Makassar sebagai pintu gerbang dan sebagai kota metropolitan terbesar di kawasan timur Indonesia mempunyai posisi strategis karena berada di persimpangan jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam provinsi di Sulawesi, dari wilayah kawasan Barat ke wilayah kawasan Timur Indonesia dan dari wilayah utara ke wilayah selatan Indonesia.

2.1.2.3 Kondisi Kawasan

Kota Makassar merupakan daerah pantai yang datar dengan kemiringan 0 - 5 derajat ke arah barat, diapit dua muara sungai yakni sungai Tallo yang bermuara di bagian utara kota dan sungai Jeneberang yang bermuara di selatan kota.

Sesuai dengan karakteristik fisik dan perkembangannya, berikut ini deskripsi wilayah tiap kecamatan yaitu :

Kecamatan Biringkanaya

Kecamatan Biringkanaya merupakan kecamatan terluas di antara kecamatan-kecamatan lain yang ada di Kota Makassar, luasnya $48,22 \text{ km}^2$ atau sekitar 27,43% dari luas keseluruhan Kota Makassar dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Maros. Kecamatan Biringkanaya merupakan Kecamatan yang mempunyai jumlah penduduk terbesar di Kota Makassar yakni 209.048 jiwa tahun 2020 dengan kepadatan penduduk 4.335 jiwa/km^2 . Topografi wilayah kecamatan ini mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi dengan ketinggian elevasi 1-19 m di atas permukaan laut. Potensi sumber daya alam yang ada di kecamatan ini antara lain di sektor pertanian dan perikanan. Secara umum, Pantai Kecamatan Biringkanaya sebagian besar merupakan pantai berlumpur dan bervegetasi mangrove serta merupakan pantai yang landai. Hanya sebagian kecil pantai ini tergolong cadas. Dilihat dari segi stabilitas pantai, maka pantai ini dapat dikatakan relatif stabil dan tenang, namun cenderung maju ke arah laut akibat sedimentasi dari Sungai Mandai.

Kecamatan Bontoala

Luas wilayah Kecamatan Bontoala adalah $2,10 \text{ km}^2$ atau 1,19% dari keseluruhan luas Kota Makassar yang terdiri atas 12 kelurahan. Kecamatan Bontoala termasuk dalam kategori kecamatan terpadat (urutan ke-4) yakni 26.189 jiwa/km^2 dan jumlah penduduk 54.996 jiwa tahun 2020. Topografi di kecamatan ini dataran rendah dengan elevasi 1-4 m di atas permukaan laut, sebagian daerah di kecamatan ini berpotensi banjir utamanya daerah yang dialiri anak Sungai Tallo. Penggunaan lahan di kecamatan ini lebih diperuntukkan sebagai pemukiman.

Kecamatan Makassar

Kecamatan Makassar merupakan kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan terbesar yakni 32.566 jiwa/km^2 , dengan jumlah penduduk 82.067 jiwa tahun 2020 dan luas wilayah $2,52 \text{ km}^2$ atau 1,43% dari keseluruhan luas wilayah Kota Makassar. Penggunaan lahan di Kecamatan Makassar lebih diperuntukkan bagi kawasan pemukiman, pertokoan dan perkantoran. Kecamatan ini sangat minim dan bahkan tidak memiliki potensi sumber daya alam.

Kecamatan Mamajang

Luas wilayah Kecamatan Mamajang adalah 2,25 km² atau 1,28% luas keseluruhan wilayah Kota Makassar dengan jumlah penduduk sebanyak 56.049 jiwa tahun 2020 dengan kepadatan penduduk 24.911 jiwa/km². Topografi wilayah yang merupakan dataran rendah dengan elevasi 1-5 m di atas permukaan laut yang memungkinkan pengembangan lahan kecamatan sebagai kawasan pemukiman. Kecamatan Mamajang merupakan salah satu kecamatan yang memiliki laju infiltrasi tinggi sehingga potensi ancaman banjir sangat kecil.

Kecamatan Manggala

Kecamatan Manggala merupakan salah satu kecamatan di Kota Makassar yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Gowa. Luas wilayah sebesar 24,14 km² atau sekitar 13,73% dari luas keseluruhan wilayah Kota Makassar dengan jumlah penduduk sebanyak 146.724 jiwa tahun 2020 dengan kepadatan penduduk 6,078 jiwa/km². Topografi wilayah kecamatan ini berelief dataran rendah hingga dataran tinggi, dengan elevasi 2-22 m di atas permukaan laut. Penggunaan lahan untuk pertanian sawah dan tegalan/kebun merupakan yang terluas dibandingkan kecamatan lain. Pada sektor perikanan darat memiliki potensi yang kecil, namun di sektor peternakan kecamatan ini memiliki populasi ternak besar dan kecil dalam jumlah yang sangat besar.

Kecamatan Mariso

Kecamatan Mariso merupakan kecamatan yang memiliki luas wilayah yang paling kecil yakni hanya 1,04% dari luas wilayah Kota Makassar atau sekitar 1,82 km², Jumlah penduduk di Kecamatan Mariso sebanyak 57.426 jiwa tahun 2020 dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 31.553 jiwa/km². Potensi sumber daya alam di Kecamatan ini yaitu sub sektor perikanan laut. Penggunaan lahan di kecamatan ini sebagian besar diperuntukkan pada pemukiman, pertokoan, dan perkantoran. Untuk potensi bencana alam di kecamatan ini berupa abrasi pantai.

Kecamatan Panakkukang

Kecamatan Panakkukang merupakan kecamatan yang terletak ditengah-tengah Kota Makassar dan merupakan pusat pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan. Luas wilayah 17,05 km² atau sekitar 9,70% dari luas keseluruhan wilayah Kota Makassar, jumlah penduduk sebanyak 139.590 jiwa tahun 2020 dengan kepadatan penduduk 8.187 jiwa/km². Topografi wilayahnya memiliki elevasi 1-13 m di atas permukaan laut. Penggunaan lahan di kecamatan ini lebih diarahkan pada perkantoran dan pemukiman.

Kecamatan Rappocini

Jumlah penduduk di Kecamatan Rappocini sebanyak 144.587 jiwa tahun 2020 dengan kepadatan penduduk 15.665 jiwa/km². Penggunaan lahan di kecamatan ini hampir seluruhnya diperuntukkan sebagai kawasan pemukiman. Luas wilayahnya 9,23 km² atau sekitar 5,25% dari luas keseluruhan Kota Makassar. Topografi wilayahnya dataran rendah dengan elevasi 2-6 m di atas permukaan laut sehingga peruntukan lahan di kecamatan ini dominan pemukiman.

Kecamatan Tallo

Kecamatan Tallo merupakan yang memiliki jumlah kelurahan terbanyak (15 kelurahan), dengan luas wilayahnya 5,83 km² atau 3,32% dari luas keseluruhan wilayah Kota Makassar. Jumlah penduduk merupakan kecamatan yang mempunyai jumlah penduduk terbesar kelima dengan 144.977 jiwa tahun 2020 dengan kepadatan penduduk sebanyak 24.867 jiwa/km². Topografi wilayahnya merupakan dataran rendah dengan elevasi 1- 3 m di atas permukaan laut. Potensi bencana di Kecamatan Tallo berupa banjir, karena kecamatan ini merupakan Daerah Aliran Sungai Tallo yang berpotensi terjadinya luapan

Sungai Tallo ke pemukiman sekitarnya. Potensi pencemaran dan pendangkalan pada muara Sungai Tallo sebagai akibat limbah buangan industri yang tidak terkontrol pada anak-anak Sungai Tallo. Pantai Kecamatan Tallo merupakan pantai yang berbatasan dengan laut dan bagian muara Sungai Tallo. Sebagian besar tipe pantai di lokasi ini merupakan pantai berlumpur dan vegetasi mangrove-nya sangat minim serta merupakan pantai yang landai. Pada bagian barat pantai kecamatan ini sudah ada kegiatan reklamasi pantai sekitar sepanjang 200 m sebagai lahan kegiatan industri pengolahan kayu. Dilihat dari segi stabilitas pantai, maka pantai ini dapat dikatakan relatif stabil dan tenang, sekalipun cenderung maju ke arah laut memperpanjang Tanjung Tallo akibat sedimentasi di muara Sungai Tallo. Ditinjau dari pemanfaatannya maka pantai ini sebagian dimanfaatkan untuk kegiatan industri galangan kapal dan pemukiman pantai (pinggir muara Sungai Tallo) dan pantai paling barat Kelurahan Tallo.

Kecamatan Tamalanrea

Kecamatan Tamalanrea adalah Kecamatan terluas kedua sesudah Kecamatan Biringkanaya, dengan luas 31,84 km². Jumlah penduduk 103.177 jiwa tahun 2020 dengan kepadatan penduduk 3.240 jiwa/km². Topografi wilayah kecamatan dimulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi dengan ketinggian elevasi 1 – 22 m di atas permukaan laut. Penggunaan lahan di kecamatan ini sangat bervariasi mulai permukiman, perkantoran, pertokoan hingga gedung pendidikan. Salah satunya adalah Universitas Hasanuddin, sebagai universitas terbesar di Kawasan Indonesia Timur. Ke arah selatan kecamatan ini mengalir Sungai Tallo sehingga masyarakat yang bermukim di sekitar tepi sungai memiliki tambak. Selain di tepi Sungai Tallo, kawasan tambak juga ditemukan di sisi utara kecamatan yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai Kecamatan Tamalanrea merupakan pantai yang berbatasan dengan laut dan bagian muara Sungai Tallo. Sebagian besar tipe pantai di lokasi ini merupakan pantai berlumpur dan bervegetasi mangrove serta merupakan pantai yang landai. Namun demikian terdapat pula Pantai Cadas di sebelah selatan Lantebung (Kelurahan Parang Loe).

Kecamatan Tamalate

Berdasarkan data BPS menunjukkan bahwa konsentrasi penduduk terbesar kedua terdapat di Kecamatan Tamalate yang tersebar pada 10 kelurahan, dengan jumlah penduduk yakni 180.824 jiwa tahun 2020. Luas wilayah kecamatan ini 20,21 km² dengan kepadatan penduduk 8.947 jiwa/km². Topografi wilayah kecamatan ini termasuk dalam kategori dataran rendah dengan elevasi ketinggian 1-6 meter di atas permukaan laut dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Gowa. Di sektor pertambangan, bahan galian C terutama pasir, batu dan sirtu terdapat di Kelurahan Mangasa. Kecamatan Tamalate mempunyai pantai terpanjang di antara kecamatan-kecamatan yang mempunyai pantai di Kota Makassar, yaitu sepanjang sekitar 10 km (panjang pantai Kota Makassar sekitar 35 km). Dengan panjang pantai 31,25% dari panjang pantai Kota Makassar, dengan pantai berpasir dengan lebar pantai sekitar 10-30 meter serta kelandaiannya 3%. Secara umum pantai ini dapat dikatakan relatif stabil sekalipun cenderung maju ke arah laut akibat sedimentasi pasir halus dari Sungai Jeneberang maupun dari arah selatan. Dengan kondisi pantai tersebut, maka sebagian besar pantai ini digunakan sebagai areal pariwisata pantai.

Kecamatan Ujung Pandang

Kecamatan Ujung Pandang merupakan kecamatan yang dijadikan sebagai tempat area publik karena adanya Pantai Losari yang menjadi ikon Kota Makassar. Luas wilayahnya 2,63 km² atau 1,50% dari luas keseluruhan wilayah Kota Makassar. Kecamatan Ujung Pandang memiliki jumlah penduduk terendah yakni 24.526 jiwa tahun 2020 dengan kepadatan penduduk berkisar 9.325 jiwa/km². Pantai Kecamatan Ujung Pandang

umumnya juga sudah mengalami pengerasan dengan tembok pematang pantai, khususnya pada Daerah Rekreasi Pantai Losari dan sekitarnya. Hanya sebagian lokasi di sebelah utara pantai kecamatan ini merupakan kompleks perhotelan, serta dermaga penyeberangan Kayu Bangkoa ke Pulau Lae-Lae, Pulau Kayangan dan pulau-pulau lainnya di wilayah Kota Makassar. Selain itu, Kecamatan Ujung Pandang juga berpotensi terhadap pencemaran air laut dan air tanah karena penggunaan lahan yang lebih diarahkan pada pembangunan hotel. Selain itu juga restoran merupakan usaha paling besar memberikan kontribusi terhadap pencemaran air di kecamatan ini.

Kecamatan Ujung Tanah

Kecamatan Ujung Tanah memiliki luas wilayahnya 4,40 km² atau 2,5% dari luas keseluruhan Kota Makassar, dengan jumlah penduduk 35.789 jiwa tahun 2020 dengan kepadatan penduduk 8.134 jiwa/km². Kondisi sosial masyarakat di kecamatan ini terdiri atas dua kelompok, yakni masyarakat perkotaan dan masyarakat nelayan dimana potensi perikanan yang sangat besar. Guna menjaga kestabilan pantai di Kecamatan Ujung Tanah, sebagian besar sudah mengalami pengerasan dengan tembok yang berfungsi sebagai pelindung pantai. Hal ini mengingat pantai tersebut mempunyai nilai penting karena perairan pantainya dimanfaatkan untuk pangkalan pendaratan ikan (TPI Paotere), pelabuhan dan *docking* kapal TNI AL, Pelabuhan Pertamina Instalasi Makassar dan Bogasari. Kecamatan ini berada pada wilayah pesisir bagian utara Kota Makassar.

Kecamatan Wajo

Salah satu kecamatan yang terletak di pesisir barat Kota Makassar dan wilayah pantainya merupakan kompleks Pelabuhan Soekarno-Hatta (Pelabuhan Umum dan Peti Kemas), dengan luas wilayah 1,99 km² atau 1,13% dari luas keseluruhan wilayah Kota. Jumlah penduduk di Kecamatan Wajo 29.972 jiwa tahun 2020 dengan kepadatan 15.061 jiwa/km². Secara topografi, kecamatan ini termasuk dalam kategori dataran rendah dengan elevasi 1-4 m di atas permukaan laut sehingga berpotensi terjadi abrasi.

Kecamatan Kepulauan Sangkarrang

Kecamatan Kepulauan Sangkarrang merupakan pemekaran dari Kecamatan Ujung Tanah. Luas wilayah Kecamatan Kepulauan Sangkarrang sebesar 1,54 km² atau sekitar 0,88% dari luas wilayah kota. Jumlah penduduk di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang sebanyak 14.125 jiwa tahun 2020 dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 9.172 jiwa/km². Kondisi sosial masyarakat di kecamatan ini yaitu masyarakat nelayan yang mendiami 11 pulau di kecamatan ini. Selain potensi perikanan yang sangat besar, potensi pariwisata bawah air dapat menjadi andalan di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang dengan 5 pulau yang menyajikan keindahan bawah laut yang kaya akan keragaman hayatinya sebagai suatu poin menarik bagi para wisatawan.

2.1.2.4 Topografi dan Geologi

Secara topografi Kota Makassar dicirikan dengan keadaan dan kondisi sebagai berikut: tanah relatif datar, bergelombang, dan berbukit serta berada pada ketinggian 0-25 meter di atas permukaan laut (dpl) dengan tingkat kemiringan lereng (elevasi) 0-15%. Sementara itu, dilihat dari klasifikasi kelerengannya, sebagian besar berada pada kemiringan 0-5%. Dari hasil penelitian yang ada menunjukkan bahwa untuk kondisi ruang seperti ini Kota Makassar sangat berpotensi untuk pengembangan kegiatan permukiman, perdagangan, jasa, industri, rekreasi, pelabuhan laut dan fasilitas penunjang lainnya.

Secara geologis Kota Makassar terbentuk dari batuan hasil letusan gunung api (vulkanik) dan endapan dari angkutan sedimen sungai Jeneberang dan sungai Tello. Batuan dasar yang mengalami pengendapan di kawasan tersebut merupakan sedimen marine kompak berumur moisen atas berupa: tufa, breksi, batu pasir, batu gamping.

Blok penampang Kota Makassar secara garis besarnya dibedakan atas 4 satuan endapan yaitu:

1. Endapan marine di sebelah utara kota membentuk tanah *alluvial hydromorf* kelabu, pembentukan ini dipengaruhi oleh rendahnya elevasi dan oleh aliran Sungai Tallo.
2. Endapan *alluvial* di sebelah Selatan kota terbentuk dari lumpur yang terangkut oleh aliran Sungai Jeneberang. Sebagian besar daerah yang dilalui oleh sungai tersebut adalah daerah batuan vulkanik basa intermedier, hal ini mengendalikan sifat-sifat bahan endapan di bawahnya.
3. Endapan regosol terbentuk sepanjang pantai sebagai akumulasi dan pelapukan bahan organik membentuk struktur *top soil* yang gembur. Endapan ini berkembang di daerah kota lama Makassar dan sepanjang pantai sebelah Selatan.
4. Endapan tufa vulkanik asam sampai intermedier yang tersingkap ke permukaan sebelah utara dan timur laur, perkembangannya sangat dipengaruhi oleh bentuk wilayah dan fluktuasi debit air Sungai Tallo. Berdasarkan kemiringan, tanah dibedakan atas :

Tanah litosol terbentuk pada daerah dengan tingkat Kemiringan yang tinggi dan sering tergenang luapan Sungai Tallo, tingkat erosi tinggi akibat banjir.

Tanah latosol terbentuk pada daerah yang relatif datar, tumbuh tanah cukup dalam proses latosolisasi ini merupakan tahap awal dari perkembangan tanah mediteranian.

Gambar 2.3 | Peta Geologi Kota Makassar



Sumber: Perda Nomor 4 Tahun 2015 Tentang RTRW Kota Makassar 2015-2034

2.1.2.5 Hidrologi dan Klimatologi

Hidrologi

Kota Makassar adalah kota yang letak dan posisinya berada dekat dengan pantai, membentang sepanjang koridor Barat dan Utara, yang biasa juga dikenal sebagai kota dengan ciri “*waterfront city*”, di dalamnya mengalir beberapa sungai yang semuanya bermuara ke dalam kota (Sungai Tallo, Jeneberang, Pampang). Sungai Je’neberang misalnya, yang mengalir melintasi wilayah Kabupaten Gowa dan bermuara di bagian Selatan Kota Makassar merupakan sungai dengan kapasitas sedang (debit air 1 – 2 m³/detik). Sedangkan Sungai Tallo dan Pampang yang bermuara di bagian Utara Makassar adalah sungai dengan kapasitas rendah berdebit kira-kira hanya mencapai 0 – 5 m³/detik di musim kemarau.

Sebagai kota yang sebagian besar wilayahnya membentang dengan dataran rendah, dimulai dari tepi pantai sebelah Barat dan melebar ke arah Timur sejauh kurang lebih 20 kilometer dan memanjang dari arah Selatan ke arah Utara merupakan koridor-koridor utama kota dalam pengembangan pemukiman, pertokoan, perkantoran, pendidikan dan pusat kegiatan industri di Makassar. Ke depan, dengan segala potensi dan keunggulan yang dimilikinya, diharapkan kota ini bisa tumbuh dan berkembang jauh lebih baik dan berbudaya serta berbasis pada kepentingan masyarakat dan juga bisa menjadi ruang tamu Indonesia Timur.

Klimatologi

Sebagai kota yang sebagian besar wilayahnya membentang dengan dataran rendah, dimulai dari tepi pantai sebelah Barat dan melebar ke arah Timur sejauh kurang lebih 20 kilometer dan memanjang dari arah Selatan ke arah Utara merupakan koridor-koridor utama kota dalam pengembangan pemukiman, pertokoan, perkantoran, pendidikan dan pusat kegiatan industri di Makassar. Ke depan, dengan segala potensi dan keunggulan yang dimilikinya, diharapkan kota ini bisa tumbuh dan berkembang jauh lebih baik dan berbudaya serta berbasis pada kepentingan masyarakat dan juga bisa menjadi ruang tamu Indonesia Timur.

Secara garis besar Kota Makassar beriklim tropis karena wilayah ini dipengaruhi monsoon barat dan pola curah hujan ekuatorial karena letak geografisnya di dekat ekuator. Temperatur udara rata-rata bulanan Kota Makassar berkisar antara 25,3 – 26,13° C. Temperatur udara rata-rata bulanan tertinggi terjadi pada bulan Oktober dan November, dan terendah pada bulan Agustus. Suhu udara minimum rata-rata bulanan berkisar antara 25,3° C yang terjadi pada bulan Agustus dan tertinggi 28,4° C pada bulan Oktober. Suhu udara maksimum rata-rata bulanan berkisar antara 30,1° C pada bulan Oktober dan minimum 22,3° C pada bulan September.

Curah hujan rata-rata bulanan terjadi di musim hujan dan musim kemarau, dengan curah hujan rata-rata bulanan lebih besar dari 200 mm terjadi pada bulan Desember sampai April. Musim kemarau dengan curah hujan rata-rata bulanan lebih kecil dari 200 mm terjadi pada bulan Mei sampai November. Besar curah hujan rata-rata bulanan berkisar antara 10 sampai 664 mm dengan curah hujan terendah terjadi pada bulan September dan tertinggi pada bulan Februari.

Kelembapan udara yang relatif tinggi yaitu berkisar antara 71,8 sampai 87,4%. Kelembapan udara tertinggi terjadi pada bulan Januari kemudian menurun sampai terendah pada bulan September dan naik lagi sampai pada bulan Desember.

Penyinaran matahari rata-rata bulanan di kota Makassar berkisar antara 43,7 sampai 92%. Penyinaran matahari cenderung meningkat dari bulan Mei sampai mencapai maksimum pada bulan September, kemudian menurun sampai bulan Desember. Kecepatan berkisar antara 8 sampai 14 knot.

2.1.3 Penggunaan Lahan

Secara umum, konteks pola ruang Kota Makassar mencakup wilayah kota yang memiliki 15 (lima belas) kecamatan dimana di dalamnya mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya.

2.1.3.1 Kawasan Lindung

2.1.3.1.1 Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahnya

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya bertujuan untuk memperbaiki dan menjaga iklim mikro, meresapkan air, menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kawasan, dan mendukung pelestarian keanekaragaman hayati. Kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya mencakup kawasan resapan air. Daerah resapan air di Kota Makassar berada di Kawasan Danau Balang Tonjong dan sekitarnya di Kecamatan Manggala yang selama ini menjadi kawasan budidaya.

Namun, jika dilihat dari segmen ataupun peran dari kawasan, tidak hanya daerah tersebut yang dapat diperuntukkan sebagai area resapan air, tetapi kawasan lain juga dapat difungsikan. Dalam arah perencanaannya segmen daerah tersebut adalah daerah sekitar sungai Tallo (bagian hulu DAS Tallo) yang berada di sebagian wilayah Kecamatan Manggala, sebagian wilayah Kecamatan Panakkukang, sebagian wilayah Kecamatan Tamalanrea, dan sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya, serta di Kawasan Danau Balang Baru/Tanjung Bunga di Kecamatan Tamalate.

Bila dilihat dari Peta Morfologi lahan Kota Makassar, kawasan bagian timur kota merupakan kawasan dengan kualitas morfologi tinggi yang memberi pengaruh cukup kuat terhadap pola aliran air permukaan di daerah sekitarnya. Penataan daerah rawa dan atau daerah genangan perlu memperhatikan keadaan dari morfologi ruang sekitarnya sehingga jalan air dan ruang

air menjadi lebih optimal dan berfungsi baik sesuai dengan daya dukungnya. Untuk itu dalam arah pemanfaatan maupun kebijakan dalam pengembangan kota ke depannya harus mendapat perhatian, sehingga tercipta keseimbangan antara manusia dan lingkungan yang dinamis.

2.1.3.1.2 Kawasan Perlindungan Setempat

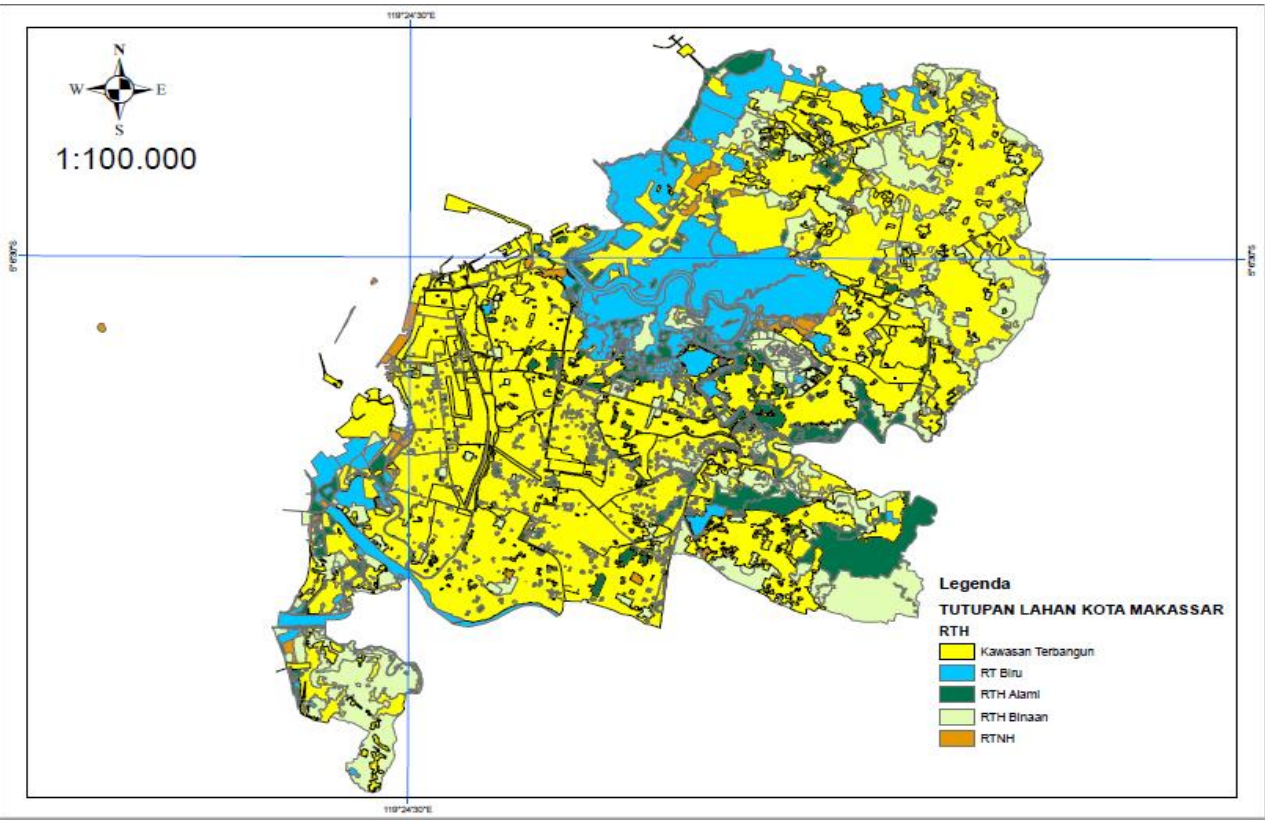
Kawasan perlindungan setempat bertujuan untuk melindungi keberlangsungan sumber air baku, ekosistem daratan, keseimbangan lingkungan kawasan, menciptakan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat, serta meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih. Kawasan perlindungan setempat meliputi kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai, dan kawasan sempadan danau atau waduk. Kawasan perlindungan setempat dalam wilayah Kota Makassar diuraikan sebagai berikut:

- Sempadan pantai Kota Makassar dengan lintasan sempadan pantai dari pesisir bagian utara kota hingga ke pesisir bagian barat kota. Kawasan sempadan pantai merupakan kawasan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ruang terbuka hijau, pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah bencana pesisir, kegiatan rekreasi, wisata bahari dan ekowisata, penelitian dan pendidikan, kepentingan adat dan kearifan lokal, pertahanan dan keamanan, perhubungan, ataupun komunikasi.
- Kawasan sempadan pantai Kota Makassar merupakan daerah tepian pantai yang membentang sepanjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) kilometer dari kawasan pesisir bagian utara kota hingga ke kawasan pesisir bagian barat dan selatan Kota Makassar. Secara fungsi, bagian dari kawasan sempadan pantai di Kota Makassar adalah kawasan hutan mangrove yang lokasinya berada di wilayah pesisir laut bagian utara (Pantai Untia) dan merupakan habitat alami hutan bakau yang berfungsi memberi perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan. Hutan mangrove pada umumnya berada di muara sungai, daerah pasang surut atau tepi laut.
- Kawasan sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai, ekosistem sungai dan sekitarnya serta mengamankan aliran sungai, sesuai Peraturan menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2015 tentang penetapan garis sempadan sungai dan danau. Dalam arah rencana penetapannya, sempadan sungai ditetapkan di sepanjang koridor Sungai Jeneberang, Sungai Tallo, dan sungai-sungai yang berada dalam wilayah Kota Makassar.
- Kawasan sempadan Danau atau Waduk ditetapkan sekurang-kurangnya 50 meter dari tepi muka air tertinggi. Pada kawasan riset dan pendidikan ditetapkan di Danau Universitas Hasanuddin (UNHAS) di Kecamatan Tamalanrea dan pada kawasan permukiman ditetapkan di Danau Balang Tonjong di Kecamatan Manggala, Danau Balang Baru/Tanjung Bunga di Kecamatan Tamalate, Waduk Bitowa di Kecamatan Manggala, dan Waduk Tallo.

2.1.3.1.3 Ruang Terbuka Hijau Kota

Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah kawasan atau areal permukaan tanah yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan atau sarana kota/lingkungan, dan atau pengaman jaringan prasarana, dan atau budidaya pertanian. Ruang terbuka hijau kota dapat berfungsi secara ekologis, sosial, ekonomi, arsitektural, dan nilai estetika yang dimilikinya (objek dan lingkungan). Dalam kepentingan perencanaan pengembangan, ruang terbuka hijau yang selanjutnya disebut juga sebagai kawasan hijau di Kota Makassar dibagi berdasarkan bobot kealamiannya yaitu kawasan hijau lindung dan binaan. Kawasan Hijau Lindung adalah bagian dari kawasan hijau yang memiliki karakteristik alamiah yang perlu dilestarikan untuk tujuan perlindungan habitat setempat maupun untuk tujuan perlindungan wilayah yang lebih luas. Sementara Kawasan Hijau Binaan adalah bagian dari kawasan hijau di luar kawasan hijau lindung untuk tujuan penghijauan yang dibina melalui penanaman, pengembangan, pemeliharaan maupun pemulihan vegetasi yang diperlukan dan didukung fasilitasnya yang diperlukan baik untuk sarana ekologis maupun sarana sosial kota yang dapat didukung fasilitas sesuai keperluan untuk fungsi penghijauan tersebut. Rencana pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) disesuaikan amanat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dikelompokkan ke dalam beberapa jenis berdasarkan tipologinya, yakni dari segi fisik, fungsi, struktur, dan kepemilikan. Berdasarkan kepemilikan ruang terbuka hijau terbagi atas ruang terbuka hijau privat dan ruang terbuka hijau publik. Untuk ruang terbuka hijau privat merupakan RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan. Sedangkan ruang terbuka hijau publik merupakan RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan masyarakat.

Gambar 2.4 | Peta Tutupan Lahan Tahun 2020 Kota Makassar



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar Tahun 2020

Kondisi eksisting ruang terbuka hijau Kota Makassar saat ini masih jauh dari yang ditetapkan oleh pemerintah dari alokasi total ruang terbuka hijau yang mencapai 30%. Untuk luasan RTH eksisting Kota Makassar dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.2 | Kondisi Eksisting Ruang Terbuka Hijau Tahun 2020 Kota Makassar

No	Kecamatan	Ketersediaan RTH Eksisting (Ha)							Jumlah RTH (Ha)	Luas Kecamatan (Ha)	Presentase RTH terhadap Luas Kota (%)
		Hutan Kota	Jalur Hijau	Lapangan	Taman	Pemukaman	Bakau	Sempadan			
1	Biringkanaya	60,68	13,05	74,53	68,09	12,75	10,1		239,2	4.822	1,36
2	Bontoala		0,45		5,29	1,2			6,94	210	0,04
3	Makassar		8,15	0,29	3,96	1,93		0,01	14,34	252	0,08
4	Manggala		0,32	0,26	2,83	4,44		0,35	8,2	2.414	0,05
5	Mamajang		2,18	13,9	10,19	37,05		4,7	68,02	225	0,39
6	Mariso	0,54	1,95	5,63	2,8				10,92	182	0,06
7	Panakkukang	17,9	10,31	21,06	16,08	13,4	1,1		79,85	1.705	0,45
8	Rappocini		7,67	11,8	7,69	2,14			29,3	923	0,17
9	Tallo		4,4	4,52	13,87	13,8	364,1		400,65	583	2,28
10	Tamalanrea	61,75	16,17	15,59	12,99	5,03	34,62	74,53	220,681	3.184	1,26
11	Tamalate	0,76	6,43	19,3	14,37	5,07		161,83	207,76	2.021	1,18
12	Ujung Pandang		4,17	8,46	3,57				16,2	263	0,09
13	Ujung Tanah		4,34	2,76	1,59				8,69	440	0,05
14	Wajo		1,63	0,02	0,85	0,04			2,54	199	0,01
15	Kepulauan Sangkarrang			0,39	0,32	0,31			1,02	154	0,01
	Total	141,6	81,22	178,51	164,49	97,16	409,9	241,42	1.314,31	17.577	7,48

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar Tahun 2020

Sesuai arahan dari undang-undang penataan ruang dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 yang mengalokasikan luasan RTH sebesar 30% dengan alokasi persentase untuk RTH publik 20% dan RTH privat 10%, maka pengembangan RTH Kota Makassar didorong untuk memenuhi luasan minimal tersebut.

2.1.3.1.4 Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Kawasan Cagar Budaya

Kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan kawasan cagar budaya ditetapkan dalam rangka melindungi keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan, dan pembangunan pada umumnya serta melindungi kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan sejarah yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia. Kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan kawasan cagar budaya, terdiri atas: Kawasan pantai berhutan bakau, dan Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

Kawasan pantai berhutan bakau meliputi : kawasan pembentuk ekosistem hutan bakau dan tempat berkembang biaknya berbagai biota laut di samping sebagai perlindungan pantai dan pengikisan air laut, serta pelindung usaha budi daya di belakangnya. Kawasan pantai berhutan bakau di Makassar berada di sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya, sebagian wilayah Kecamatan Manggala, sebagian wilayah Kecamatan Panakkukang, sebagian wilayah Kecamatan Tallo, dan sebagian wilayah Kecamatan Tamalanrea dengan luas 558,93 hektar.

Kawasan cagar budaya bertujuan untuk melestarikan dan melindungi keanekaragaman dan/atau keunikan alam serta situs-situs purbakala sebagai peninggalan budaya serta melindungi budaya bangsa yang bernilai tinggi untuk kepentingan ilmu pengetahuan berupa

bangunan dan lingkungan peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, dan monumen. Kawasan cagar budaya ditetapkan dengan ketentuan-ketentuan sebagai hasil budi daya manusia yang bernilai tinggi yang dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan sejarah. Cagar budaya di Kota Makassar meliputi lingkungan bangunan non gedung dan lingkungan bangunan gedung serta halamannya yang perlu dijaga kelestariannya. Cagar budaya yang ditetapkan dalam wilayah Kota Makassar antara lain:

- a. Benteng *Fort Rotterdam* yang berada di Kecamatan Ujung Pandang;
- b. Benteng Somba Opu di Kecamatan Tamalate;
- c. Makam raja-raja Tallo di Kecamatan Tallo;
- d. Kawasan Makam Lajangiru di Kecamatan Bontoala;
- e. Kawasan Makam Lomo Ri Antang di Kecamatan Manggala.

2.1.3.1.5 Kawasan Rawan Bencana

Sebagai upaya menanggulangi jika terjadi bencana, maka diperlukan perencanaan kawasan rawan bencana alam, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan semaksimal mungkin atas kemungkinan bencana terhadap fungsi lingkungan hidup dan kegiatan lainnya. Berdasarkan topografinya, kota Makassar dikategorikan sebagai dataran landai dengan ketinggian mencapai 1-22 m dpl. Kondisi tersebut dapat memicu terjadinya banjir atau luapan air yang juga didukung oleh sistem drainase kota yang belum optimal. Kawasan yang sering mengalami banjir terkonsentrasi di daerah dengan elevasi 1-4 m dpl serta pada daerah dengan sistem drainase yang tidak memadai. Selain itu Kota Makassar juga sangat dipengaruhi oleh proses sungai yang bersumber dari sungai utama yang melewati kota ini, yaitu Sungai Tallo, dan Sungai Je'neberang. Kondisi morfologi ini berperan penting dan sekaligus menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya banjir di kota Makassar. Berdasarkan DIBI, Kota Makassar berpotensi terhadap 5 (lima) jenis bencana yaitu bencana banjir, kegagalan teknologi, kekeringan, epidemi dan wabah penyakit dan cuaca ekstrem. Bencana yang pernah terjadi tersebut tidak tertutup kemungkinan akan terjadi lagi. Kawasan Rawan Bencana di Kota Makassar, terdiri atas :

a. Kawasan Rawan Bencana Banjir

Banjir merupakan salah satu bencana disebabkan oleh faktor hidrometeorologi yang paling sering terjadi di Kota Makassar. Salah satu penyebab terjadinya bencana tersebut adalah akibat rusaknya daerah hulu sungai akibat ulah manusia seperti perambahan hutan secara liar serta pendirian bangunan yang tidak mengikuti kaidah tata ruang yang ada, yang mengurangi daerah resapan air (*catchment area*). Selain itu, aspek cuaca turut berpengaruh terhadap potensi bencana tersebut.

Hampir setiap tahunnya beberapa bagian kota di Kota Makassar mengalami banjir. Banjir itu pada umumnya terjadi pada bulan Desember- Februari, yaitu pada saat curah hujan tertinggi pada setiap tahunnya. Beberapa banjir besar yang pernah terjadi sepuluh tahun di antaranya adalah pada tahun 2013, 2015 dan 2017. Banjir yang cukup besar yang terjadi pada tahun 2013 dan 2017 di Kota Makassar, dimana sebagian besar wilayah kota mengalami kebanjiran.

Daerah-daerah yang menjadi langganan banjir pada umumnya merupakan daerah rendah, dahulu berupa empang atau daerah rawa-rawa yang kemudian berkembang menjadi daerah permukiman. Daerah-daerah itu terletak di sepanjang daerah aliran Sungai Tello dan daerah aliran Sungai Je'neberang serta sepanjang Sungai Pampang.

Daerah langganan banjir selanjutnya adalah daerah-daerah hulu atau bagian tengah dari suatu daerah layanan (*catchment* 46aka), daerah tersebut seperti kawasan Antang, Minasa Upa dan lain-lain. Langganan banjir lainnya adalah sekitar Pelabuhan dan sekitar Jalan Tol dan beberapa kawasan kota lainnya.

Kawasan rawan banjir yang ditetapkan di sebagian Kecamatan Wajo, sebagian Kecamatan Biringkanaya, sebagian Kecamatan Tamalanrea, sebagian Kecamatan Tallo, Kecamatan Bontoala, sebagian Kecamatan Manggala, sebagian Kecamatan Tamalate, sebagian Kecamatan Panakkukang, sebagian Kecamatan Rappocini, dan sebagian Kecamatan Ujung Tanah. Kawasan rawan bencana sedimentasi sungai dan banjir dalam wilayah Kota Makassar terletak di sebagian Kecamatan Tamalanrea, sebagian Kecamatan Tallo, Kecamatan Bontoala, sebagian Kecamatan Manggala, sebagian Kecamatan Tamalate, sebagian Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Ujung Tanah dan area sekitar kawasan sungai Jeneberang. Selain itu kota Makassar juga sering terjadi luapan air terkhusus di daerah yang padat penduduk, daerah kumuh, dan daerah yang belum jelas sistem drainasenya.

Pengkajian bahaya banjir dilakukan untuk mengetahui luasan daerah terdampak dan kelas bahaya banjir. Parameter yang digunakan dalam menentukan kajian bahaya banjir, yaitu: daerah rawan banjir, kemiringan lereng, jarak dari sungai, serta curah hujan. Berdasarkan parameter bahaya tersebut, maka dapat ditentukan kelas bahaya dan luasan daerah terdampak bencana banjir di Kota Makassar. Adapun rekapitulasi pengkajian bahaya banjir di Kota Makassar dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini:

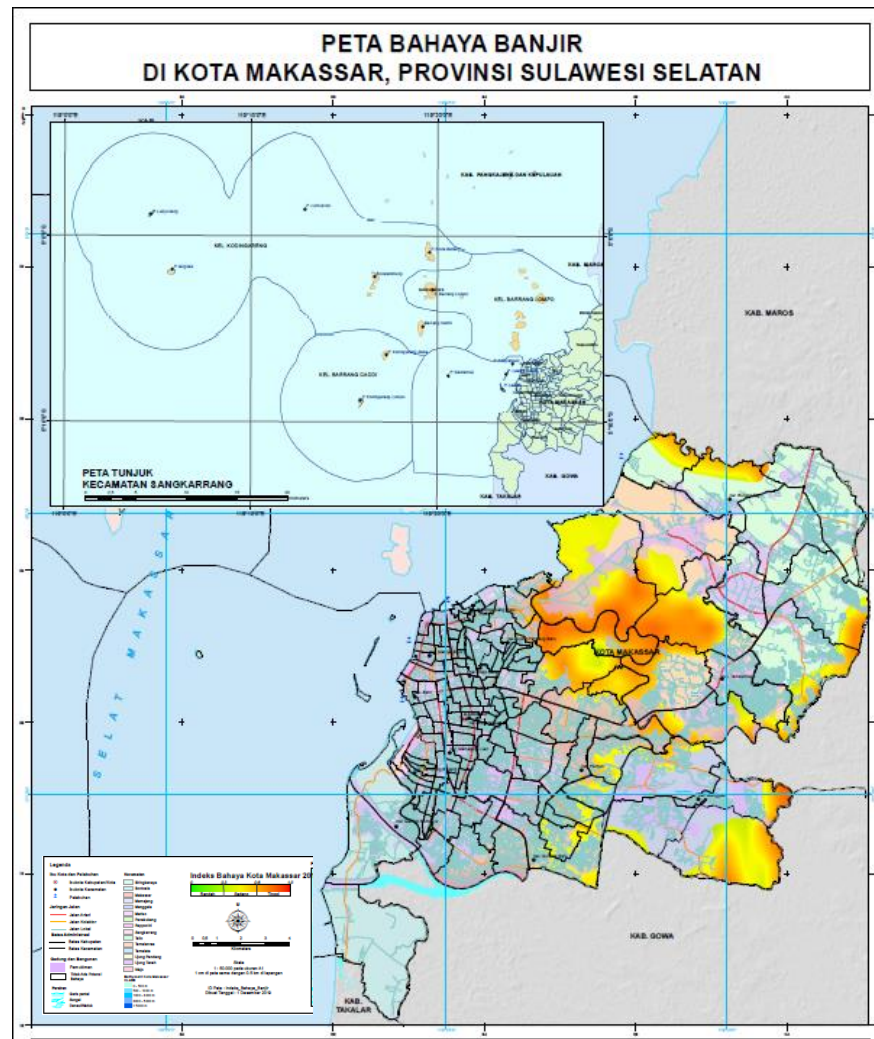
Tabel 2.3 | Potensi Luas Daerah Terdampak Bencana Banjir Tahun 2020 Kota Makassar

No	Kecamatan	Potensi Banjir Sedang		Pontensi Banjir Tinggi		Total Kelurahan	Total Luas (Ha)
		Jumlah Kelurahan	Luas (Ha)	Jumlah Kelurahan	Luas (Ha)		
1	Biringkanaya	5	599	1	8	6	607
2	Manggala	3	320	3	729	6	1.049
3	Panakkukang	11	1.073	1	9	12	1.082
4	Rappocini	6	496	-	-	6	496
5	Tallo	7	185	1	115	8	300
6	Tamalanrea	5	1.376	1	418	6	1.794
7	Tamalate	3	310	1	10	4	320
	Grand Total	40	4.359	8	1.289	48	5.648

Sumber: BPBD Kota Makassar Tahun 2020

Berdasarkan Tabel 2.3 terlihat bahwa total luas bahaya untuk bencana banjir di Kota Makassar yaitu : 5.638 Ha yang berada 7 (tujuh) kecamatan dan 40 (empat puluh) kelurahan. Kelas bahaya banjir untuk Kota Makassar diperoleh dari kelas tingkat rawan jumlah kejadian yang terjadi di seluruh wilayah Kecamatan dan Kelurahan.

Gambar 2.5 | Peta Bahaya Banjir Tahun 2020 Kota Makassar



Sumber: BPBD Kota Makassar Tahun 2020

b. Kawasan Rawan Bencana Kekeringan

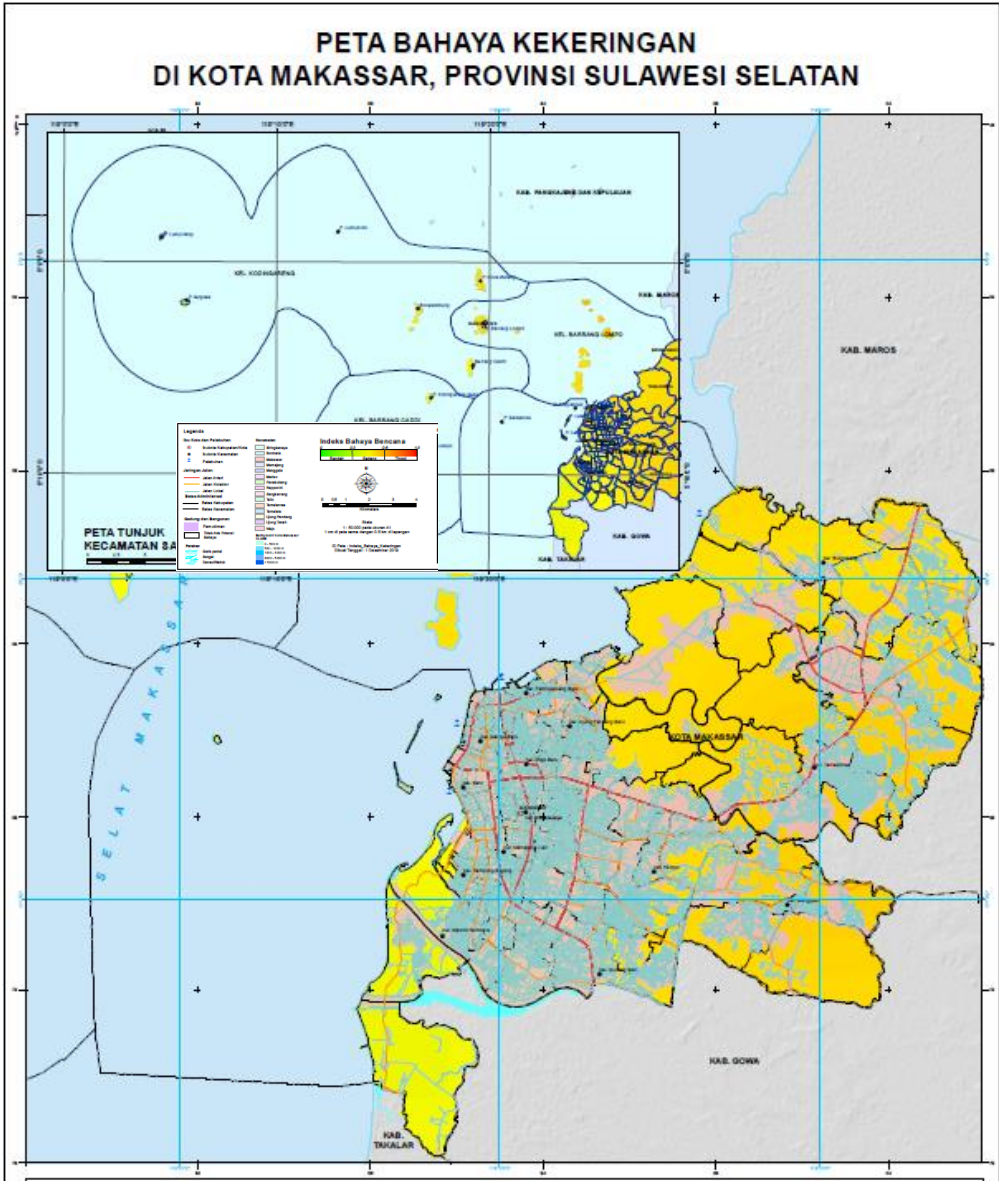
Pengkajian bahaya kekeringan dilakukan untuk memperoleh luas daerah terdampak serta indeks dan kelas bahaya kekeringan. Parameter yang digunakan dalam menentukan kajian bahaya kekeringan, yaitu faktor kekeringan meteorologi (indeks presipitasi terstandarisasi). Berdasarkan parameter bahaya kekeringan tersebut, maka dapat ditentukan kelas bahaya dan luas daerah terdampak bencana kekeringan di Kota Makassar. Adapun rekapitulasi pengkajian bahaya kekeringan di Kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4 | Potensi Luas Daerah Terdampak Bencana Kekeringan Tahun 2020 Kota Makassar

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas (Ha)	Potensi Bahaya Kekeringan
1	Biringkanaya	11	4.822	Sedang
2	Bontoala	12	210	Sedang
3	Makassar	14	252	Sedang
4	Mamajang	13	225	Sedang
5	Manggala	8	2.414	Sedang
6	Mariso	9	182	Sedang
7	Panakkukang	11	1.705	Sedang
8	Rappocini	11	923	Sedang
9	Kepulauan Sangkarrang	3	154	Sedang
10	Tallo	15	583	Sedang
11	Tamalanrea	8	3.184	Sedang
12	Tamalate	11	2.021	Sedang
13	Ujung Pandang	10	263	Sedang
14	Ujung Tanah	9	440	Sedang
15	Wajo	8	199	Sedang
	Grand Total	153	17.577	

Sumber: BPBD Kota Makassar Tahun 2020

Gambar 2.6 | Peta Bahaya Kekeringan Tahun 2020 Kota Makassar



Sumber: BPBD Kota Makassar Tahun 2020

c. **Kawasan Rawan Bencana Gelombang Ekstrem dan Abrasi**

Gelombang ekstrem dan abrasi memiliki kerentanan untuk beberapa wilayah yang berada di pinggir pantai. Ini disebabkan karena gelombang ekstrem dan abrasi umumnya terjadi karena gelombang angin yang timbul akibat tiupan angin di permukaan laut. Gelombang dapat menimbulkan energi untuk membentuk pantai, menimbulkan arus dan transpor sedimen dalam arah tegak lurus di sepanjang pantai. Angin yang bertiup dengan kecepatan dan arah tertentu di permukaan laut akan menimbulkan riakan (gerakan) air yang semula kecil menjadi besar dan kemudian menjadi gelombang. Energi gelombang yang datang tegak lurus dari arah utara pantai mengikis kawasan tersebut sehingga menimbulkan abrasi yang terjadi secara terus-menerus dapat mengakibatkan perubahan garis pantai.

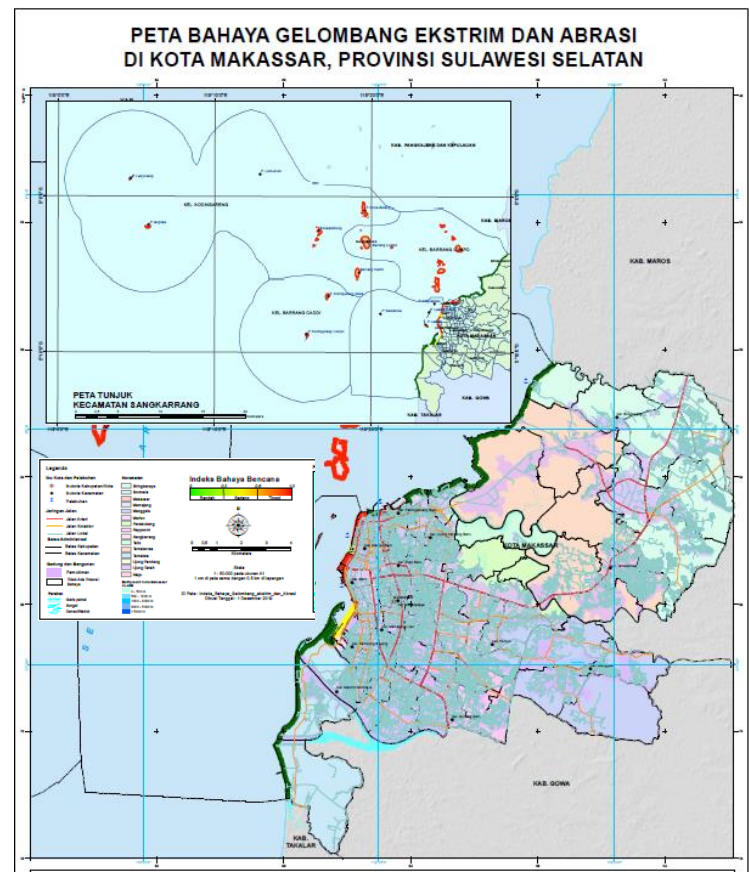
Pengkajian bahaya gelombang ekstrem dan abrasi dilakukan untuk memperoleh luas daerah terdampak serta indeks dan kelas bahaya gelombang ekstrem dan abrasi. Parameter yang digunakan dalam menentukan kajian bahaya gelombang ekstrem dan abrasi, yaitu tinggi gelombang, arus, tipologi pantai, tutupan vegetasi, dan bentuk garis pantai. Adapun rekapitulasi pengkajian bahaya gelombang ekstrem dan abrasi di Kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5 | Potensi Luas Daerah Terdampak Gelombang Ekstrem dan Abrasi Tahun 2020 Kota Makassar

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah Keluraha n	Potensi Bahaya Gelombang Ekstrem dan Abrasi
1	Biringkanaya	36,45	1	Sedang
2	Mariso	35,73	7	Sedang
3	Tallo	70,02	4	Sedang
4	Tamalanrea	118,53	2	Sedang
5	Tamalate	196,11	3	Sedang
6	Ujung Pandang	52,70	4	Sedang
7	Ujung Tanah	59,40	7	Sedang
8	Wajo	35,08	5	Sedang
9	Kepulauan Sangkarrang	154,00	3	Sedang
	Total	758,02	36	

Sumber: BPBD Kota Makassar Tahun 2020

Gambar 2.7 | Peta Bahaya Gelombang Ekstrem dan Abrasi Tahun 2020 Kota Makassar



Sumber: BPBD Kota Makassar Tahun 2020

d. Kawasan Rawan Bencana Tsunami

Tsunami merupakan bencana yang terjadi karena adanya gangguan impulsif terhadap air laut akibat terjadinya perubahan bentuk dasar laut secara tiba-tiba. Faktor yang mempengaruhi tsunami adalah gempa bumi, letusan gunung api, dan longsor (*landslide*) yang terjadi di dasar laut. Penyebab utama dari ketiganya adalah gempa bumi.

Pengkajian bahaya tsunami dilakukan untuk memperoleh luas daerah terdampak serta indeks dan kelas bahaya tsunami. Parameter yang digunakan dalam menentukan kajian bahaya tsunami, yaitu ketinggian maksimum tsunami, kemiringan lereng, dan kekasaran permukaan. Berdasarkan parameter bahaya tsunami tersebut, maka dapat ditentukan kelas bahaya dan luas daerah terdampak bencana tsunami. Rekapitulasi pengkajian bahaya tsunami di Kota Makassar dapat dilihat pada Tabel berikut:

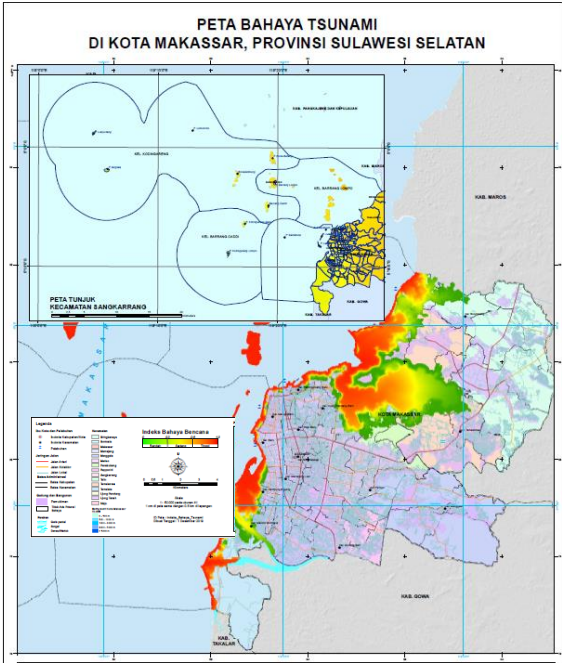
Tabel 2.6 | Potensi Luas Daerah Terdampak Bencana Tsunami Tahun 2020 Kota Makassar

No	Kecamatan	Potensi Tsunami Sedang		Potensi Tsunami Tinggi		Total Kelurahan	Total Luas (Ha)
		Jumlah Kelurahan	Luas (Ha)	Jumlah Kelurahan	Luas (Ha)		
1	Biringkanaya	-	-	3	364,86	3	364,86
2	Mamajang	-	-	1	3,96	1	3,96
3	Mariso	-	-	7	91,75	7	91,75
4	Panakkukang	1	2,79	1	238,68	2	241,47
5	Kepulauan Sangkarrang	-	-	3	154,00	3	154,00
6	Tallo	1	0,90	5	280,22	6	281,12
7	Tamalanrea	1	0,18	4	1.436,67	5	1.436,85
8	Tamalate	-	-	4	572,55	4	572,55
9	Ujung Pandang	-	-	4	39,87	4	39,87
10	Ujung Tanah	1	3,06	5	43,74	6	46,80
11	Wajo	-	-	5	33,75	5	33,75
	Grand Total	4	6,93	42	3.260,05	46	3.266,98

Sumber: BPBD Kota Makassar Tahun 2020

Gambar 2.8 | Peta Bahaya Tsunami Tahun 2020 Kota Makassar

Sumber: BPBD Kota Makassar Tahun 2020



e. Kawasan Rawan Epidemi dan Wabah Penyakit

Pengkajian bahaya epidemi dan wabah penyakit dilakukan untuk memperoleh luas daerah terdampak dan kelas bahaya epidemi dan wabah penyakit. Berdasarkan pedoman pengkajian risiko telah ditetapkan parameter yang digunakan dalam menentukan kajian bahaya epidemi dan wabah penyakit, yaitu kepadatan penduduk penderita campak, kepadatan penduduk penderita malaria, kepadatan penduduk penderita demam berdarah, kepadatan penduduk penderita HIV/AIDS, dan kepadatan penduduk.

Berdasarkan parameter bahaya epidemi dan wabah penyakit tersebut, maka dapat ditentukan kelas bahaya dan luas daerah terdampak bencana epidemi dan wabah penyakit di Kota Makassar. Adapun rekapitulasi pengkajian bahaya epidemi dan wabah penyakit di Kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut:

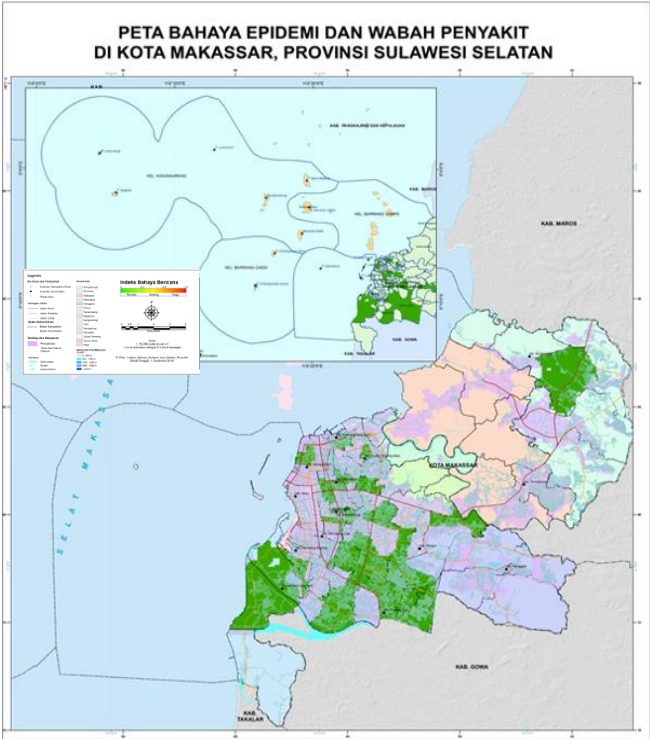
Tabel 2.7 | Potensi Luas Daerah Terdampak Bencana Epidemi dan Wabah Penyakit Kota Makassar Tahun 2020

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah Keluraha	Potensi Epidemi dan Wabah Penyakit
1	Biringkanaya	526,6	5	Rendah
2	Bontoala	86,14	10	Rendah
3	Makassar	87,96	13	Rendah
4	Mamajang	37,5	8	Rendah
5	Manggala	11,52	4	Rendah
6	Mariso	33,78	4	Rendah
7	Panakkukang	448,74	11	Rendah
8	Rappocini	792,18	10	Rendah
9	Tallo	67,68	11	Rendah
10	Tamalanrea	6,93	2	Rendah
11	Tamalate	783,13	8	Rendah
12	Ujung Pandang	1,08	3	Rendah
13	Ujung Tanah	2,88	5	Rendah
14	Wajo	54	5	Rendah
	Total	2.940,12	99	

Sumber: BPBD Kota Makassar Tahun 2020

Gambar 2.9 | Peta Bahaya Epidemi dan Wabah Penyakit Tahun 2020 Kota Makassar

Sumber: BPBD Kota Makassar Tahun 2020



Berdasarkan Tabel 2.7 dan Gambar 2.9, terlihat bahwa total luas bahaya untuk bencana epidemi dan wabah penyakit di Kota Makassar yaitu 2.940 Ha yang berada pada kelas rendah. Kecamatan Rappocini merupakan wilayah terluas terdampak bencana epidemi dan wabah penyakit di Kota Makassar yaitu 792 Ha.

2.1.3.1.6 Kawasan Ruang Evakuasi Bencana

Kawasan ruang evakuasi bencana merupakan ruang yang dipersiapkan sebagai tempat sementara evakuasi para korban bencana yang direncanakan memiliki kapasitas ruang dengan tingkat keamanan terjamin, serta mempunyai akses yang cukup baik/terjangkau oleh bala bantuan kemanusiaan. Pembangunan ruang evakuasi bencana berupa jalur dan tempat untuk berlindung dari kejadian bencana alam. Ruang evakuasi bencana ini diupayakan dengan memanfaatkan optimalisasi ruang terbuka hijau (RTH) dan ruang terbuka non hijau (RTNH) dalam wilayah kota. Rencana kawasan ruang evakuasi bencana di Kota Makassar, meliputi:

- 1) Ruang evakuasi bencana banjir yakni menempati semua lapangan-lapangan terbuka dalam kota yang diperlengkapi dengan fasilitas penampungan yang baik dan memadai;
- 2) Ruang evakuasi bencana gelombang pasang dan tsunami. Selain menempati dan memanfaatkan bangunan-bangunan tinggi berupa hotel dan sarana pendidikan (sekolah) yang tersebar dalam wilayah kota, juga memanfaatkan lapangan-lapangan terbuka yang tersedia di dalam kota.

2.1.3.1.7 Kawasan Lindung Lainnya

Kawasan lindung lainnya ditetapkan dengan tujuan untuk melindungi kelestarian dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.

Kawasan lindung lainnya meliputi:

- Kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi: Pulau Barang Lompo, Pulau Kodingareng Lompo, Pulau Barang Caddi, Pulau Lae-Lae, Pulau Bone Balang, dan Pulau Samalona di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang.
- Kawasan konservasi perairan di perairan Kawasan Spermonde.
- Kawasan konservasi dan perlindungan ekosistem pesisir berupa kawasan pantai berhutan bakau dan kawasan konservasi mangrove. Kawasan konservasi dan perlindungan ekosistem pesisir berupa kawasan hutan pantai berhutan bakau ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya, sebagian wilayah Kecamatan Tallo, dan sebagian wilayah Kecamatan Tamalanrea. Sedangkan kawasan konservasi dan perlindungan ekosistem pesisir berupa kawasan mangrove ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya dan sebagian wilayah Kecamatan Tamalanrea.
- Kawasan konservasi maritim berupa permukiman nelayan di Kawasan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.

2.1.3.2 Kawasan Budidaya

Kawasan adalah wilayah yang dilihat dari fungsi utamanya, dimana kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan Budidaya Kota Makassar meliputi :

2.1.3.2.1 Kawasan Peruntukan Perumahan

Dari rencana pengembangan kawasan permukiman dalam Tata Ruang Kota Makassar, arahan pengembangannya dikelompokkan dalam kategori pengembangan kawasan permukiman yang berkepadatan tinggi, sedang, dan rendah.

Kawasan perumahan dengan kepadatan tinggi, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontoala, sebagian wilayah Kecamatan Makassar, sebagian wilayah Kecamatan Mamajang, sebagian wilayah Kecamatan Mariso, sebagian wilayah Kecamatan Panakkukang, sebagian wilayah Kecamatan Rappocini, sebagian wilayah Kecamatan Tallo, sebagian wilayah Kecamatan Tamalate, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Pandang, sebagian wilayah Kecamatan Tamalanrea, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Tanah, sebagian wilayah Kecamatan Manggala, sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya, sebagian wilayah Kecamatan Wajo, dan sebagian wilayah Kecamatan Kepulauan Sangkarrang

Kawasan perumahan dengan kepadatan sedang, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya, sebagian wilayah Kecamatan Manggala, sebagian wilayah Kecamatan Tamalanrea, sebagian wilayah Kecamatan Mariso, sebagian wilayah Kecamatan Panakkukang, sebagian wilayah Kecamatan Rappocini, sebagian wilayah Kecamatan Tallo, sebagian wilayah Kecamatan Tamalate, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Tanah, dan sebagian wilayah Kecamatan Kepulauan Sangkarrang.

Kawasan perumahan dengan kepadatan rendah, ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya, sebagian wilayah Kecamatan Manggala, sebagian wilayah Kecamatan Tamalanrea, sebagian wilayah Kecamatan Panakkukang, sebagian wilayah Kecamatan Tallo, sebagian wilayah Kecamatan Tamalate, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Pandang, dan sebagian wilayah Kecamatan Ujung Tanah.

2.1.3.2.2 Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa

Kawasan perdagangan dan jasa bertujuan untuk menyediakan ruang bagi pengembangan sektor ekonomi melalui lapangan usaha perdagangan dan jasa. Kawasan perdagangan dan jasa terdiri atas:

- Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala pelayanan lingkungan ditetapkan di Kecamatan Tallo, Kecamatan Mariso, Kecamatan Makassar, Kecamatan Manggala, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Mamajang, Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalate, Kecamatan Wajo, Kecamatan Rappocini, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Panakkukang, dan Kecamatan Kepulauan Sangkarrang;
- Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala pelayanan kota ditetapkan di Kecamatan Wajo, Kecamatan Mamajang, Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Biringkanaya, dan Kecamatan Bontoala;
- Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala regional ditetapkan di Kecamatan Tamalate, Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Rappocini, Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Bontoala, dan Kecamatan Biringkanaya; dan
- Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala internasional, nasional dan regional ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Mariso dan sebagian wilayah Kecamatan Tamalate.

2.1.3.2.3 Kawasan Peruntukan Perkantoran

Kawasan perkantoran meliputi : kawasan peruntukan perkantoran pemerintahan di sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya, sebagian wilayah Kecamatan Tamalanrea, sebagian wilayah Kecamatan Manggala, sebagian wilayah Kecamatan Panakkukang, sebagian wilayah Kecamatan Tallo, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Tanah, sebagian wilayah Kecamatan Wajo, sebagian wilayah Kecamatan Bontoala, sebagian wilayah Kecamatan Makassar, sebagian wilayah Kecamatan Rappocini, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Pandang, sebagian wilayah Kecamatan Mamajang, sebagian wilayah Kecamatan Mariso dan sebagian wilayah Kecamatan Tamalate.

2.1.3.2.4 Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri meliputi:

1. Kawasan peruntukan industri besar merupakan kawasan industri pengolahan dan manufaktur ditetapkan di Kawasan Industri Makassar (KIMA) di sebagian wilayah

Kecamatan Biringkanaya dan sebagian wilayah Kecamatan Tamalanrea. Adapun rencana pengembangan kawasan industri besar meliputi :

- a. Pengembangan kawasan industri berteknologi tinggi yang berwawasan lingkungan;
 - b. Mengatur dan mengendalikan kegiatan industri secara terbatas terhadap kegiatan industri yang berisiko tinggi menimbulkan efek negatif terhadap perkembangan manusia dan lingkungan;
 - c. Mengarahkan pengembangan kegiatan industri yang berhubungan dengan kegiatan industri perikanan dan/atau kegiatan yang mendukung kegiatan kepelabuhanan;
 - d. Mengarahkan kegiatan industri dalam satu kawasan kegiatan pengembangan industri.
2. Kawasan peruntukan industri sedang merupakan kawasan industri pengolahan ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya dan sebagian wilayah Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Manggala, Kecamatan Makassar, Kecamatan Tallo, Kecamatan Tamalate;
 3. Kawasan peruntukan industri kecil merupakan kawasan aglomerasi industri rumah tangga direncanakan tersebar merata di seluruh kecamatan dalam wilayah kota.

2.1.3.2.5 Kawasan Peruntukan Pergudangan

Kawasan peruntukan pergudangan terdapat di Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Tamalanrea. Adapun rencana pengembangan kawasan pergudangan, terdiri atas:

1. Rencana pengembangan kawasan pergudangan pada kawasan pelabuhan meliputi: 1) mengembangkan kawasan pergudangan untuk mengantisipasi perkembangan Pelabuhan Utama Soekarno-Hatta dan menunjang kegiatan perdagangan dan jasa; dan 2) mengembangkan kawasan pergudangan yang nyaman, asri, dan tertata serta tetap terintegrasi baik dengan atmosfer kawasan pelabuhan.
2. Rencana pengembangan kawasan pergudangan pada kawasan yang mendukung kegiatan bandar udara dengan arahan rencana sebagai berikut: 1) mengarahkan pengembangan kawasan pergudangan yang dapat menunjang kegiatan industri, perdagangan, dan jasa yang ada di bandar udara; dan 2) mengarahkan pengembangan kawasan pergudangan yang lebih tertata secara bentuk dan berwawasan lingkungan.
3. Rencana pengembangan kawasan pergudangan pada kawasan maritim dengan arahan rencana sebagai berikut: 1) mengarahkan pengembangan kawasan pergudangan yang dapat menunjang kegiatan industri, perdagangan, dan jasa kemaritiman; dan 2) mengarahkan pengembangan kawasan pergudangan yang lebih tertata secara bentuk dan berwawasan lingkungan.
4. Rencana pengembangan kawasan pergudangan dengan arahan rencana sebagai berikut: 1) merelokasi kawasan pergudangan dari dalam kota; 2) menjadi pusat konsentrasi dan relokasi gudang dalam kota; dan 3) mengarahkan pengembangan kawasan pergudangan yang sejalan dengan nilai ruang rencana yang ingin dicapai.

2.1.3.2.6 Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan Pariwisata Kota Makassar Dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yang meliputi: Kawasan Pariwisata Budaya, Kawasan Pariwisata Alam dan Kawasan Pariwisata Buatan.

Kawasan Pariwisata Budaya juga sejarah merupakan kawasan yang memiliki nilai budaya atau sejarah yang menarik sehingga menjadi tujuan wisata (destinasi) para wisatawan. Kawasan wisata budaya dapat dikelompokkan ke dalam kawasan cagar budaya karena

memiliki situs/peninggalan berupa bangunan bersejarah atau warisan budaya yang hingga saat ini masih dianut. Kawasan Cagar Budaya di Kota Makassar ini terdapat di beberapa kecamatan. Adapun kawasan wisata sejarah di Kota Makassar, meliputi: 1) kawasan Benteng Fort Rotterdam dan sekitarnya terletak di Kecamatan Ujungpandang; 2) kawasan Taman Miniatur Sulawesi/Benteng Somba Opu dan sekitarnya terletak di Kecamatan Tamalate; 3) kawasan Makam Raja-Raja Tallo dan sekitarnya terletak di Kecamatan Tallo; 4) kawasan Bunker Jepang dan sekitarnya terletak di Kecamatan Tallo; 5) kawasan Makam Pangeran Diponegoro dan sekitarnya di Kecamatan Wajo; 6) kawasan Monumen Korban 40.000 Jiwa dan sekitarnya di Kecamatan Tallo; 7) kawasan Monumen Mandala dan sekitarnya di Kecamatan Ujungpandang; 8) kawasan Monumen Emmy Saelan dan sekitarnya di Kecamatan Panakkukang; 9) kawasan Museum Kota dan sekitarnya di Kecamatan Ujungpandang; 10) kawasan Masjid Raya dan sekitarnya di Kecamatan Bontoala; 11) kawasan Gereja Katedral dan sekitarnya di Kecamatan Ujungpandang; 12) kawasan Klenteng Ibu Agung Bahari dan sekitarnya di Kecamatan Wajo; dan 13) kawasan Pecinan (China Town) di Kecamatan Wajo.

Kawasan Pariwisata Alam merupakan wisata yang dikaitkan dengan kegiatan rekreasi alam. Pada Kota Makassar yang berada pada pesisir pantai sehingga wisata alam umumnya dilakukan di daerah pantai atau pulau-pulau yang mendukung untuk kegiatan kepariwisataan. Kawasan wisata maritim atau bahari yang terletak di Kota Makassar, meliputi : 1) kawasan wisata Pantai Losari dan sekitarnya di Kecamatan Ujungpandang; 2) kawasan wisata Pantai Akkarena dan sekitarnya di Kecamatan Tamalate; 3) kawasan wisata Pantai reklamasi kota di sepanjang koridor pesisir kota; 4) kawasan wisata Pulau Kayangan di Kecamatan Wajo; 5) kawasan wisata Pulau Samalona di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang; 6) kawasan wisata Pulau Kodingareng Keke di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang; 7) kawasan wisata Pulau Lanjukang di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang; 8) kawasan wisata alam Delta Lakkang dan sekitarnya di Kecamatan Tallo, Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Tamalanrea; dan 9) kawasan pendukung kegiatan wisata pulau meliputi Pulau Barrang Caddi, Pulau Barrang Lompo, Pulau Langkai, Pulau Bonetambung, Pulau Kodingareng Lompo, Pulau Lae-Lae, dan Pulau Lae-Lae kecil.

Kawasan Pariwisata Buatan di Kota Makassar mencakup semua wilayah yang menjadi wadah atau tempat wisata kuliner, konvensi, maupun belanja/rekreasi. Kawasan pariwisata buatan tersebut meliputi: 1) kawasan wisata koridor air sepanjang kawasan pesisir di sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya, sebagian wilayah Kecamatan Tamalanrea, sebagian wilayah Kecamatan Tallo, sebagian wilayah Kecamatan Panakkukang, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Pandang, sebagian wilayah Kecamatan Mariso, dan sebagian wilayah Kecamatan Tamalate; 2) kawasan wisata transportasi air Sungai Tallo di sebagian wilayah Kecamatan Tamalanrea, sebagian wilayah Kecamatan Tallo, dan sebagian wilayah Kecamatan Panakkukang; 3) kawasan wisata belanja di sebagian wilayah Kecamatan Ujung Pandang dan sebagian wilayah Kecamatan Panakkukang; 4) kawasan wisata lorong yang tersebar merata dalam wilayah kota; 5) kawasan kuliner di sebagian wilayah Kecamatan Ujung Pandang, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Tanah, dan sebagian wilayah Kecamatan Wajo; 6) kawasan wisata biringkanal di sebagian wilayah Kecamatan Ujung Tanah, sebagian wilayah Kecamatan Tallo, sebagian wilayah Kecamatan Mamajang, sebagian wilayah Kecamatan Makassar, sebagian wilayah Kecamatan Panakkukang, sebagian wilayah Kecamatan Rappocini, sebagian wilayah Kecamatan Bontoala, sebagian wilayah Kecamatan Mariso, dan sebagian wilayah Kecamatan Tamalate; dan Selanjutnya untuk arahan rencana pengembangan kawasan pariwisata ditetapkan pada kawasan bisnis dan pariwisata di Kecamatan Tamalate.

2.1.3.2.7 Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)

Ruang terbuka non hijau merupakan ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air. Ruang terbuka non hijau di Kota Makassar, meliputi;

- 1) Ruang terbuka yang mengikuti rute jalan sebagai penunjang aksesibilitas pada jaringan jalan skala tertentu. Secara linear dapat dikelompokkan, antara lain: RTNH pada jalan bebas hambatan, jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan;
- 2) Trotoar (*pedestrian way*) yang berada di sisi kiri kanan jalan pada jaringan jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan baik bagi masyarakat umum maupun penyandang cacat dengan memperhatikan hal teknis bagi pengguna tersebut;
- 3) Lapangan upacara adalah lapangan olahraga atau tempat dan/atau lapangan upacara bagi instansi khususnya instansi pemerintah provinsi dan kota;
- 4) Ruang terbuka berupa plaza/pelataran yang dapat diakses oleh publik yaitu Pelataran Bahari (anjung Pantai Losari), Pelataran Toraja-Mandar, dan Pelataran Bugis-Makassar, terletak di Kecamatan Wajo;
- 5) Ruang terbuka berupa pembatas (*buffer*), merupakan suatu bentuk ruang terbuka non hijau sebagai suatu jalur dengan fungsi utama sebagai pembatas yang menegaskan peralihan antara suatu fungsi dengan fungsi lainnya. Ruang terbuka ini meliputi jalur pembatas sepanjang Pantai Losari yang terletak di Kecamatan Wajo;
- 6) Ruang terbuka berupa pelataran parkir berupa halaman parkir, lahan parkir, dan bangunan parkir yang berada dalam wilayah kota. Pemanfaatan ruang parkir ditetapkan berdasarkan klasifikasi pemanfaatan ruang parkir, terdiri atas: Ruang parkir di kawasan kota yang sudah terbangun, berupa halaman parkir atau lahan parkir pada bangunan publik, dan halaman parkir pada bangunan privat; Ruang parkir di kawasan kota yang belum terbangun, berupa halaman parkir atau lahan parkir dan/atau bangunan parkir pada bangunan publik, dan halaman parkir pada bangunan privat; dan Ruang parkir di kawasan reklamasi, berupa lahan parkir dan bangunan parkir pada bangunan publik, dan halaman parkir pada bangunan privat;
- 7) Ruang terbuka non hijau di bawah jalan layang/jembatan yang berada dalam wilayah Kota Makassar berada di bawah *fly over* Urip Sumoharjo yang berada di Kecamatan Panakkukang;
- 8) Kawasan ruang terbuka biru yaitu permukaan sungai yang meliputi Sungai Je'neberang, Sungai Tallo, dan Sungai Pampang serta permukaan danau yang meliputi Danau Universitas Hasanuddin di Kecamatan Tamalanrea dan Danau Balang Tonjong di Kecamatan Manggala.

2.1.3.2.8 Kawasan Peruntukan Ruang bagi Sektor Informal

Dalam rencana tata ruang wilayah Kota Makassar, eksistensi sektor informal berupa pedagang kaki lima telah diakomodir sebagai salah satu bentuk pemanfaatan ruang yang mutlak untuk diberi perhatian dan arahan dalam rencana pola ruangnya. Dari kondisi eksisting menunjukkan bahwa kurang lebih 80% pedagang kaki lima di dalam kota menempati bahu jalan dan drainase sebagai tempat berjualan dengan sifat jualan yang tidak permanen kurang lebih 90%, sehingga diperlukan suatu arahan dalam penataan keberadaan bagi sektor informal. Secara ketataruangan, rencana peruntukan ruang bagi sektor informal ditetapkan berdasarkan klasifikasi peruntukan ruang sektor informal, sebagai berikut :

- 1) Peruntukan ruang sektor informal pada kawasan kota yang sudah terbangun, direncanakan alokasi luas peruntukan ruang sebesar 0 (nol) hingga 2 (dua) persen dari luas kawasan kota yang sudah terbangun. Kawasan yang sudah terbangun tersebut dimaksud sebagai kawasan yang hingga saat ini telah terbangun sejak Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar ditetapkan dan disahkan.
- 2) Peruntukan ruang sektor informal pada kawasan kota yang belum terbangun, direncanakan alokasi luas peruntukan ruang sebesar 1 (satu) hingga 2,5 (dua koma lima) persen dari luas kawasan kota yang belum terbangun. Kawasan yang belum terbangun tersebut dimaksud sebagai kawasan yang belum terbangun sejak Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar ditetapkan dan disahkan.
- 3) Peruntukan ruang sektor informal pada kawasan reklamasi, direncanakan alokasi luas peruntukan ruang sebesar 2 (dua) hingga 3 (tiga) persen dari luas kawasan reklamasi. Kawasan reklamasi tersebut dimaksud sebagai kawasan reklamasi yang direncanakan sepanjang pesisir Kota Makassar.

Selanjutnya rencana pemanfaatan ruang bagi sektor informal dipertegas dengan ketentuan pemanfaatan ruangnya, antara lain:

- Kawasan sektor informal dapat memanfaatkan luas maksimal sebesar 30 (tiga puluh) persen dari luas RTH sesuai klasifikasi pemanfaatan ruang;
- Kawasan sektor informal dapat memanfaatkan kawasan yang dipersiapkan khusus serta ruas jalan tertentu sesuai ketetapan lebih lanjut dari Walikota.

2.1.3.2.9 Kawasan Peruntukan Lainnya

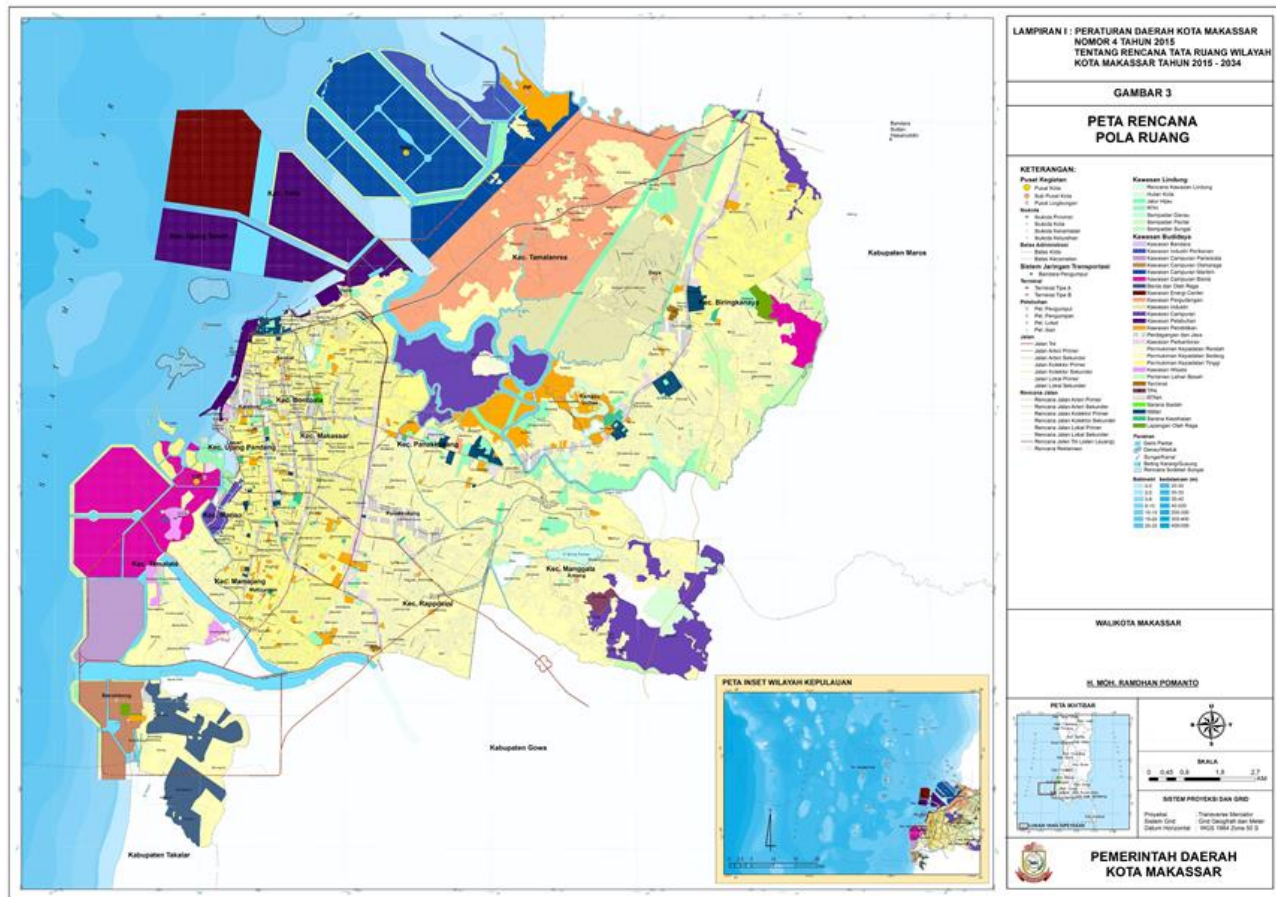
Kawasan peruntukan lainnya dalam wilayah Kota Makassar, meliputi:

- 1) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara, terdiri atas:
 - Kawasan Markas Armada Tengah Indonesia di Kecamatan Ujung Tanah dan Kecamatan Tallo;
 - Kawasan Komando Daerah Militer VII Wirabwana di Kecamatan Panakkukang;
 - Kantor Komando Rayon Militer 1408/BS Makassar di Kecamatan Mamajang;
 - Kantor Polisi Militer (PM) di Kecamatan Ujung Pandang;
 - Kawasan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) IV di Kecamatan Ujung Tanah;
 - Kantor Komando Operasi Angkatan Udara II (KOOPSAU II) di Kecamatan Biringkanaya;
 - Kantor Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional II di Kecamatan Biringkanaya;
 - Markas Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan di Kecamatan Biringkanaya;
 - Kepolisian Kota Besar (Poltabes) di Kecamatan Wajo; j. Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Makassar di Kecamatan Ujung Pandang;
 - Kepolisian Sektor (Polsek) di Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Tallo, Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Manggala, Kecamatan Mamajang, Kecamatan Makassar, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Rappocini, Kecamatan Mariso, Kecamatan Tamalate, dan Kecamatan Kepulauan Sangkarrang;
 - Batalyon Infanteri (Yonif) 700 Raider di Kecamatan Tamalanrea;
 - Batalyon Kavaleri 10 Serbu di Kecamatan Tamalanrea;
 - Batalyon Armed 6-76/TRK di Kecamatan Tamalate;
 - Batalyon Yon Zipur 8/SMG di Kecamatan Mariso; dan

- Kantor Bela Negara Wolter Monginsidi di Kecamatan Mariso.
- 2) Kawasan peruntukan pelayanan pendidikan tinggi ditetapkan di Kecamatan Tamalanrea dan Kecamatan Panakkukang.
- 3) Kawasan peruntukan pelayanan olahraga skala regional, nasional dan internasional ditetapkan di Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Mariso, dan Kecamatan Tamalate.
- 4) Kawasan peruntukan pelayanan pusat kesehatan, meliputi : Kawasan peruntukan pelayanan kesehatan berstandar internasional yang ditetapkan di Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Mamajang, Kecamatan Rappocini, Kecamatan Mariso, Kecamatan Tamalate, serta kawasan peruntukan pelayanan kesehatan skala pelayanan lingkungan berupa Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang berada di seluruh kecamatan dan/atau kelurahan.
- 5) Kawasan peruntukan perikanan terdiri atas:
 - Kawasan peruntukan perikanan tangkap ditetapkan pada wilayah perairan Selat Makassar yang meliputi : kawasan pesisir dan laut Kecamatan Kepulauan Sangkarrang;
 - Kawasan peruntukan budidaya perikanan akan dikembangkan secara terpadu dan terintegrasi sebagai kawasan minapolitan ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Tamalanrea sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya, dan sebagian wilayah Kecamatan Tallo; dan
 - Pelabuhan perikanan ditetapkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Untia di Kecamatan Biringkanaya.
- 6) Kawasan peruntukan pertanian, yang terdiri atas :
 - Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan dengan luasan 168,79 hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya; dan
 - Kawasan peruntukan usaha tanaman hias diarahkan pada koridor sempadan jalan lingkungan seperti lorong-lorong yang berada di seluruh wilayah kecamatan.
- 7) Kawasan peruntukan kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Tamalate dan sebagian wilayah Kecamatan Mariso.
- 8) Kawasan peruntukan ruang di dalam bumi ditetapkan tersebar dalam wilayah kota yang disesuaikan dengan pengaturan pemanfaatan ruang dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kawasan peruntukan ruang di dalam bumi merupakan ruang di dalam bumi yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan menjaga kepentingan publik dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- 9) Kawasan peruntukan ruang reklamasi ditetapkan di Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Tallo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Mariso, dan Kecamatan Tamalate. Kawasan peruntukan ruang reklamasi merupakan ruang hasil pelaksanaan kegiatan reklamasi yang dilakukan dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan menjaga kepentingan publik dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Secara lengkap Pola Ruang Kota Makassar dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 2.10 | Peta Pola Ruang Kota Makassar



Sumber: Perda Nomor 4 Tahun 2015 Tentang RTRW Kota Makassar 2015-2034

2.1.4 Potensi Pengembangan Wilayah

Untuk mendukung struktur ruang yang direncanakan, rencana hierarki pusat pelayanan wilayah Kota Makassar dibagi menjadi 3 hierarki. Secara struktur ruang, sistem perkotaan RTRW Kota Makassar disusun berdasarkan klasifikasi menurut sistem pusat pelayanannya sebagai berikut:

- Pusat Pelayanan Kota (PPK), untuk melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional dalam aglomerasi fasilitas pelayanan tingkat kota dan/atau regional;
- Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK), untuk melayani sub wilayah kota dalam pelayanan internal wilayah; dan
- Pusat Lingkungan (PL), untuk melayani bagian wilayah kota dalam skala lingkungan.

2.1.4.1 Pusat Pelayanan Kota (PPK)

Pusat Pelayanan Kota merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional. Adapun sistem perkotaan dalam Pusat Pelayanan Kota (PPK) Kota Makassar sebagaimana dimaksud di atas terdiri atas 4 (empat) PPK meliputi :

1. PPK I berfungsi sebagai pusat kegiatan pemerintahan kota, pusat kegiatan budaya, dan pusat perdagangan dan jasa, *landmark* kota dan ruang terbuka hijau di kawasan pusat kota dan bagian Barat Kota ditetapkan di:
 - a) Kawasan Pemerintahan Kota di Kecamatan Ujung Pandang dan Kecamatan Makassar;
 - b) Kawasan Karebosi dan sekitarnya di Kecamatan Ujung Pandang;

- c) Kawasan perdagangan dan jasa di sebagian wilayah Kecamatan Wajo, sebagian wilayah Kecamatan Bontoala, dan sebagian Kecamatan Ujung Pandang;
 - d) Kawasan Pecinan dan sekitarnya di Kecamatan Wajo;
 - e) Kawasan Benteng Fort Rotterdam di Kecamatan Ujung Pandang; dan
 - f) Kawasan Losari dan sekitarnya di Kecamatan Ujung Pandang.
2. PPK II berfungsi sebagai pusat kegiatan maritim skala internasional, nasional, dan regional ditetapkan di kawasan pengembangan pesisir bagian Utara di sebagian wilayah Kecamatan Ujung Tanah, sebagian wilayah Kecamatan Tallo, sebagian wilayah Kecamatan Tamalanrea, dan sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya dan pusat kegiatan yang menunjang dan mendukung kegiatan kebandarudaraan skala internasional, nasional, dan regional di sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya.
3. PPK III berfungsi sebagai pusat kegiatan pemerintahan provinsi di Kecamatan Panakkukang, pusat kegiatan pendidikan dan penelitian skala internasional, nasional, dan regional ditetapkan di Kecamatan Panakkukang, dan Kecamatan Tamalanrea, serta pusat kegiatan industri dan pergudangan dengan skala pelayanan tingkat internasional, nasional, dan regional ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Tamalanrea, dan sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya.
4. PPK IV berfungsi sebagai pusat kegiatan bisnis global skala internasional, nasional, dan regional ditetapkan pada kawasan pengembangan pesisir di sebagian Kecamatan Tamalate dan sebagian Kecamatan Mariso, pusat kegiatan bisnis di sebagian wilayah Kecamatan Rappocini, serta pusat kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya skala internasional, nasional, dan regional ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Mariso dan sebagian wilayah Kecamatan Tamalate.

2.1.4.2 Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK)

Sub pusat pelayanan kota merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota. Pada sub wilayah kota dilengkapi minimal fasilitas-fasilitas : permukiman, peribadatan, bina sosial, olahraga/rekreasi skala kota, pemerintahan, pariwisata, pendidikan, kesehatan, perbelanjaan/niaga, dan transportasi. Terdapat 10 (sepuluh) sub pusat pelayanan kota dalam wilayah Kota Makassar, antara lain:

- 1. Sub PPK I ditetapkan pada Kawasan Daya yang meliputi: sebagian Kecamatan Tamalanrea dan sebagian Kecamatan Biringkanaya dengan fungsi sebagai pusat kegiatan perumahan kepadatan sedang, pusat kegiatan perumahan kepadatan tinggi, pusat pelayanan penelitian dan pendidikan tinggi, pusat kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan yang mendukung kegiatan bandar udara, pusat pelayanan olahraga, pusat pelayanan kesehatan, dan pusat kegiatan industri dan pergudangan;
- 2. Sub PPK II ditetapkan pada Kawasan Untia yang meliputi: sebagian Kecamatan Tamalanrea dan sebagian Kecamatan Biringkanaya dengan fungsi sebagai pusat kegiatan perumahan kepadatan sedang, pusat kegiatan perumahan kepadatan tinggi, pusat pelayanan penelitian dan pendidikan tinggi, dan pusat kegiatan maritim;
- 3. Sub PPK III ditetapkan pada Kawasan Manggala yang meliputi: Kecamatan Manggala dengan fungsi sebagai pusat kegiatan perumahan kepadatan sedang, dan pusat kegiatan perumahan kepadatan tinggi, serta kegiatan industri;
- 4. Sub PPK IV ditetapkan pada Kawasan Tallo yang mencakup Kecamatan Tallo dan Kecamatan Ujung Tanah dengan fungsi sebagai pusat kegiatan perumahan kepadatan

sedang, pusat kegiatan perumahan kepadatan tinggi, pusat kegiatan industri, pusat pelayanan budaya, dan pusat kegiatan transportasi laut;

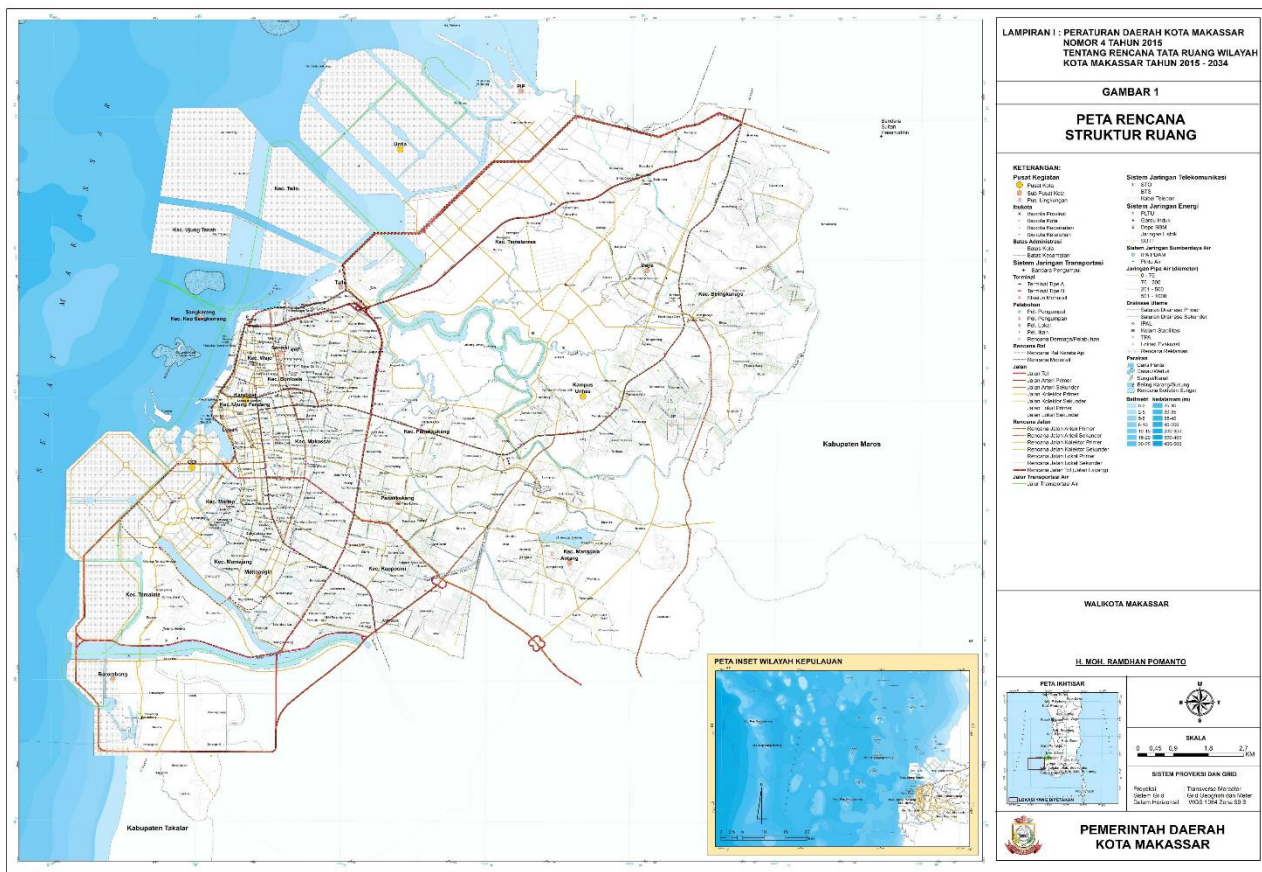
5. Sub PPK V ditetapkan pada Kawasan Panakkukang yang mencakup Kecamatan Panakkukang dan Kecamatan Rappocini dengan fungsi sebagai pusat kegiatan perumahan kepadatan sedang, pusat kegiatan perumahan kepadatan tinggi, pusat kegiatan perdagangan dan jasa, dan pusat pelayanan penelitian dan pendidikan tinggi;
6. Sub PPK VI ditetapkan pada Kawasan Losari yang mencakup Kecamatan Mariso, Kecamatan Ujung Pandang, dan Kecamatan Wajo dengan fungsi sebagai pusat kegiatan perumahan kepadatan sedang, pusat kegiatan perumahan kepadatan tinggi, pusat kegiatan perdagangan dan jasa, pusat kegiatan pariwisata, pusat kegiatan sosial budaya, pusat pelayanan kesehatan, dan pusat kegiatan transportasi laut;
7. Sub PPK VII ditetapkan pada Kawasan Sentral di Kecamatan Bontoala dengan fungsi kegiatan sebagai pusat kegiatan perumahan kepadatan sedang, pusat kegiatan perumahan kepadatan tinggi, dan pusat kegiatan perdagangan dan jasa;
8. Sub PPK VIII ditetapkan pada Kawasan Mattoanging yang mencakup Kecamatan Mamajang, dan Kecamatan Makassar dengan fungsi sebagai pusat kegiatan perumahan kepadatan sedang, pusat kegiatan perumahan kepadatan tinggi, pusat pelayanan kesehatan, pusat kegiatan olahraga, dan pusat kegiatan perdagangan dan jasa;
9. Sub PPK IX ditetapkan pada Kawasan Barombong di Kecamatan Tamalate dengan fungsi kegiatan sebagai pusat kegiatan perumahan kepadatan sedang, pusat kegiatan perumahan kepadatan tinggi, pusat kegiatan perdagangan dan jasa, pusat kegiatan pariwisata, pusat pelayanan penelitian dan pendidikan tinggi, pusat pelayanan budaya, pusat pelayanan olahraga;
10. Sub PPK X ditetapkan pada Kawasan Sangkarrang di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang dengan fungsi sebagai pusat kegiatan perumahan kepadatan sedang, dan pusat kegiatan pariwisata bahari.

2.1.4.3 Pusat Lingkungan (PL)

Pusat kegiatan lingkungan merupakan penghubung dari pusat kegiatan lokal. Zona ini menjadi *nodes* yang berperan dalam kawasan *local sprawl* di sekitarnya yang didasarkan pada radius pelayanan yang efektif dan efisien. Sementara sistem perkotaan untuk pusat lingkungan sebagaimana dimaksudkan di atas meliputi kawasan-kawasan fungsional yang berperan penting terhadap kerangka struktur ruang kota. Pusat lingkungan berfungsi sebagai pusat pelayanan lokal yang terdiri atas pusat-pusat pelayanan pada skala kecamatan dan/atau kelurahan dilengkapi fungsi pelayanan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, peribadatan, olahraga/rekreasi, perdagangan dan jasa, bina sosial, dan transportasi. Sebaran lokasi dan ketentuan pengembangan PL diatur lebih rinci dalam RDTRK. Sistem struktur ruang Kota Makassar disusun berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sistem transportasi nasional, sistem struktur Pulau Sulawesi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kawasan Perkotaan Mamminasata, RTRWP Provinsi Sulawesi Selatan, dan sistem perkotaan Kota Makassar.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Peta Rencana Struktur Ruang Kota Makassar 2015 - 2034 sebagai berikut:

Gambar 2.11 | Peta Struktur Ruang Kota Makassar



Sumber: Perda Nomor 4 Tahun 2015 Tentang RTRW Kota Makassar 2015-2034

2.1.5 Demografi

Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat dominan karena tidak saja menjadi objek tetapi juga menjadi subyek (pelaksana) dari pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu untuk menunjang keberhasilan pembangunan, perkembangan penduduk perlu diarahkan sehingga mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang mempunyai kontribusi positif bagi pembangunan. Jumlah penduduk yang besar merupakan potensi bagi kemajuan Kota Makassar bila dapat dikelola dengan baik. Pertumbuhan jumlah penduduk Makassar dapat dilihat pada tabel berikut ini :

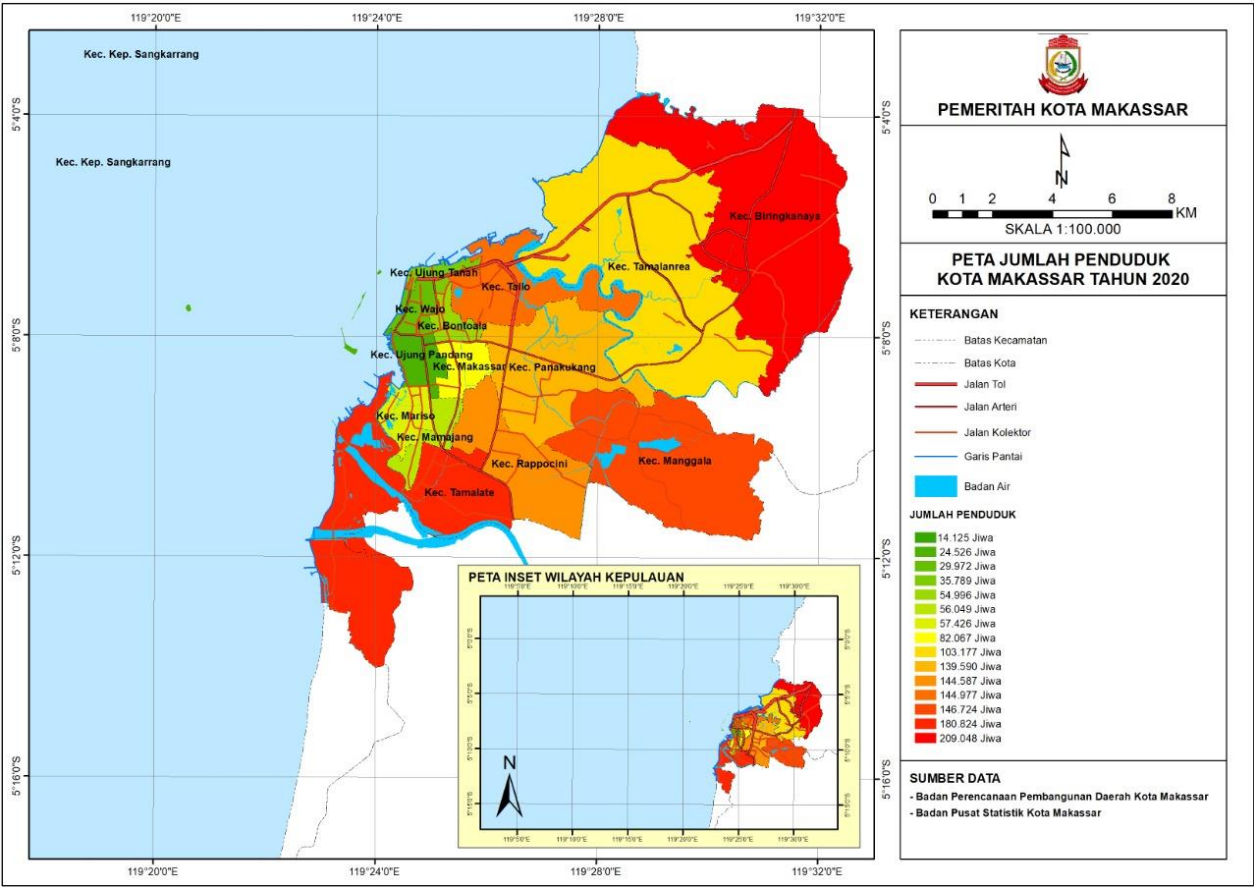
Tabel 2.8 | Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Kecamatan Kota Makassar Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Biringkanaya	202.520	208.436	214.432	220.456	209.048
2	Bontoala	56.536	56.784	57.009	57.197	54.996
3	Makassar	84.758	84.758	85.311	85.515	82.067
4	Mamajang	61.007	61.186	61.338	61.452	56.049
5	Manggala	138.659	142.252	145.873	149.487	146.724
6	Mariso	59.292	59.721	60.130	60.499	57.426
7	Panakkukang	147.783	148.482	149.121	149.664	139.590
8	Rappocini	164.563	166.480	168.345	170.121	144.587
9	Tallo	139.167	139.624	140.023	140.330	144.977
10	Tamalanrea	112.170	113.439	114.672	115.843	103.177
11	Tamalate	194.493	198.210	201.908	205.541	180.824
12	Ujung Pandang	28.497	28.696	28.883	29.054	24.526
13	Ujung tanah	49.223	49.528	35.354	35.534	35.789
14	Wajo	30.933	31.121	31.297	31.453	29.972
15	Kepulauan Sangkarrang	-	-	14.458	14.531	14.125
	Jumlah	1.469.601	1.488.717	1.508.154	1.526.677	1.423.877

Sumber: BPS Kota Makassar Tahun 2021

Pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun dipengaruhi oleh adanya mutasi penduduk berupa pindah datang dan pindah keluar, meninggal dunia, data baru serta kelahiran. Pada tahun 2020, Jumlah penduduk Kota Makassar yang terbesar ada pada Kecamatan Biringkanaya yaitu sebesar 209.048 jiwa, sedangkan jumlah penduduk yang terkecil terdapat pada Kecamatan Kepulauan Sangkarrang yaitu 14.125 jiwa. Dalam lima tahun terakhir penduduk Kota Makassar menurun dari 1.469.601 jiwa pada tahun 2016, menjadi 1.423.877 jiwa pada tahun 2020 atau menurun sebesar -3,11%. Penurunan jumlah penduduk Kota Makassar ini dimungkinkan karena adanya konsolidasi data kependudukan, dimana dengan data tunggal melalui Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) penduduk dengan data ganda tidak dimungkinkan lagi, sehingga data kependudukan yang tercatat betul-betul merupakan data bersih, dimana pembersihan data ganda, masih terus dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Penurunan jumlah penduduk ini juga disebabkan masih banyak nya data yang anomali (tidak ganda) tetapi kepala keluarga tidak jelas atau belum foto elektronik sehingga secara otomatis tidak terbaca secara agregat serta masih banyak penduduk umur 23 tahun ke atas yang belum melakukan perekaman (non aktif sementara) bahkan terdapat datanya di daerah lain.

Gambar 2.12 | Peta Kepadatan Penduduk Kota Makassar



Sumber: Bappeda Kota Makassar Tahun 2020

Selain jumlah penduduk, data demografi juga terkait data penyebaran penduduk dan kepadatan penduduk. Data sebaran penduduk dan kepadatan penduduk disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.9 | Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan Kota Makassar Tahun 2018-2020

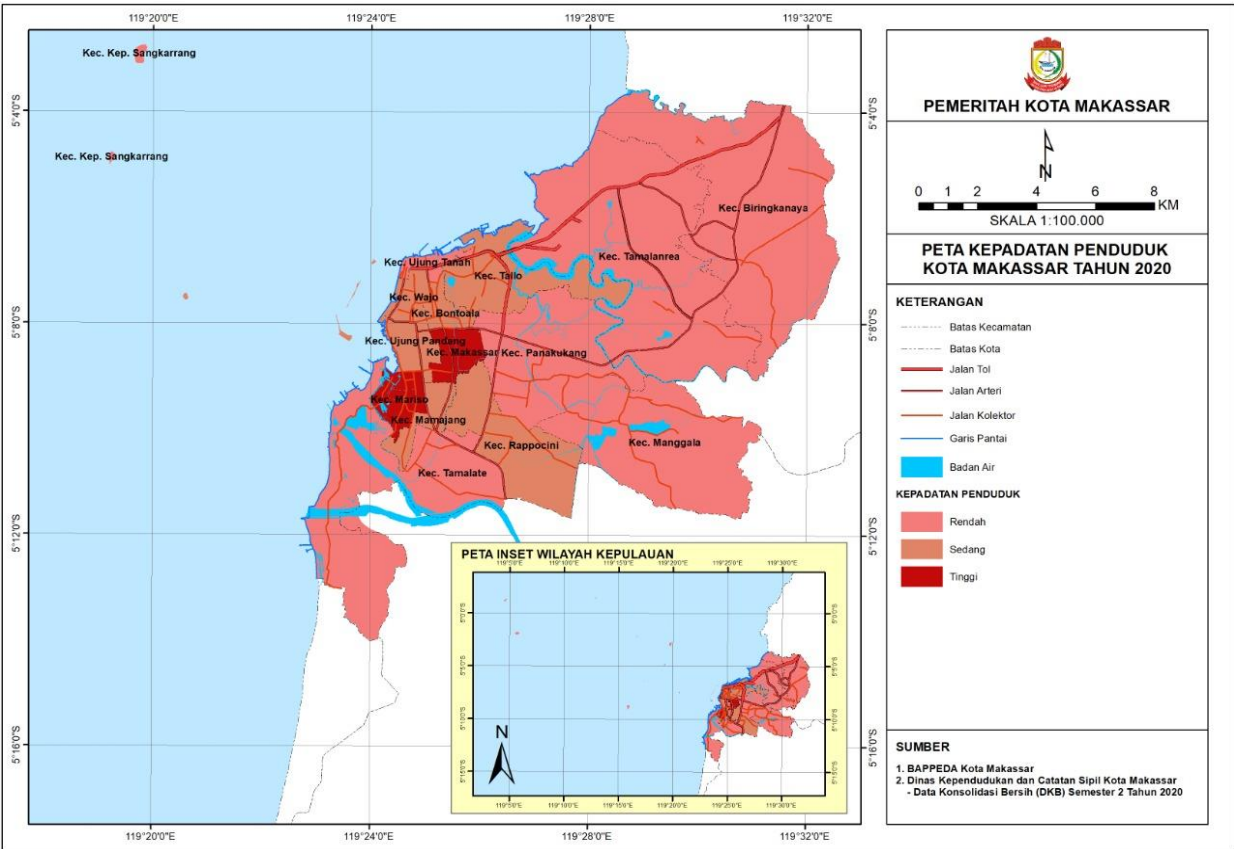
No	Kecamatan	Luas Wilayah (km2)	2018		2019		2020	
			Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)
1	Biringkanaya	48,22	214.432	4.446,95	220.456	4.572	209.048	4.335
2	Bontoala	2,10	57.009	27.147,14	57.197	27.237	54.996	26.189
3	Makassar	2,52	85.311	33.853,57	85.515	33.935	82.067	32.566
4	Mamajang	2,25	61.338	27.261,33	61.452	27.312	56.049	24.911
5	Manggala	24,14	145.873	6.042,79	149.487	6.193	146.724	6.078
6	Mariso	1,82	60.130	33.038,46	60.499	33.241	57.426	31.553
7	Panakkukang	17,05	149.121	8.746,10	149.664	8.778	139.590	8.187
8	Rappocini	9,23	168.345	18.238,89	170.121	18.431	144.587	15.665
9	Tallo	5,83	140.023	24.017,67	140.330	24.070	144.977	24.867
10	Tamalanrea	31,84	114.672	3.601,51	115.843	3.638	103.177	3.240
11	Tamalate	20,21	201.908	9.990,50	205.541	10.170	180.824	8.947
12	Ujung Pandang	2,63	28.883	10.982,13	29.054	11.047	24.526	9.325
13	Ujung Tanah	4,40	35.354	8.035,00	35.534	8.076	35.789	8.134
14	Wajo	1,99	31.297	15.727,14	31.453	15.806	29.972	15.061
15	Kepulauan Sangkarrang	1,54	14.458	9.388,31	14.531	9.436	14.125	9.172
	Jumlah	175,77	1.508.154	8.580,27	1.526.677	8.686	1.423.877	8.101

Sumber: BPS Kota Makassar Tahun 2021

Konsekuensi yang timbul dari permasalahan berkembangnya penduduk adalah bagaimana penyebarannya, apakah terkonsentrasi pada suatu wilayah atau tersebar normal merata di seluruh wilayah. Parameter sebaran dan kepadatan penduduk yang ideal sulit untuk ditentukan karena bergantung pada potensi yang dimiliki suatu wilayah serta kemampuan penduduk dalam memanfaatkan potensi yang ada. Umumnya konsentrasi penduduk yang tinggi akan sangat rawan terhadap konflik sosial, selain itu juga menyulitkan pemerintah dalam penyediaan berbagai fasilitas yang dibutuhkan masyarakat. Sebaliknya konsentrasi penduduk yang rendah akan menyebabkan penyediaan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat menjadi relatif mudah.

Jumlah penduduk Kota Makassar tahun 2020 tercatat 1.423.877 jiwa yang tersebar di 15 Kecamatan dan 153 Kelurahan. Data di atas memperlihatkan bahwa perbedaan distribusi penduduk setiap kecamatan dengan persentase luas wilayah mengakibatkan kepadatan penduduk setiap kecamatan juga berbeda-beda. Secara keseluruhan kepadatan penduduk di Kota Makassar tahun 2020 mencapai 8.101 jiwa/km², Kepadatan penduduk di 15 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Makassar 32.566 jiwa/km dan terendah di Kecamatan Tamalanrea 3.240 jiwa/km²

Gambar 2.13 | Peta Kepadatan Penduduk Kota Makassar



Sumber: Bappeda Kota Makassar Tahun 2021

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Aspek kesejahteraan masyarakat disini terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga. Dimana Pembangunan yang dilaksanakan secara berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil akan mendorong peningkatan kemampuan faktor-faktor produksi untuk memproduksi barang dan jasa sehingga dapat memacu berkembangnya perekonomian dalam skala yang lebih besar dan berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan penduduk.

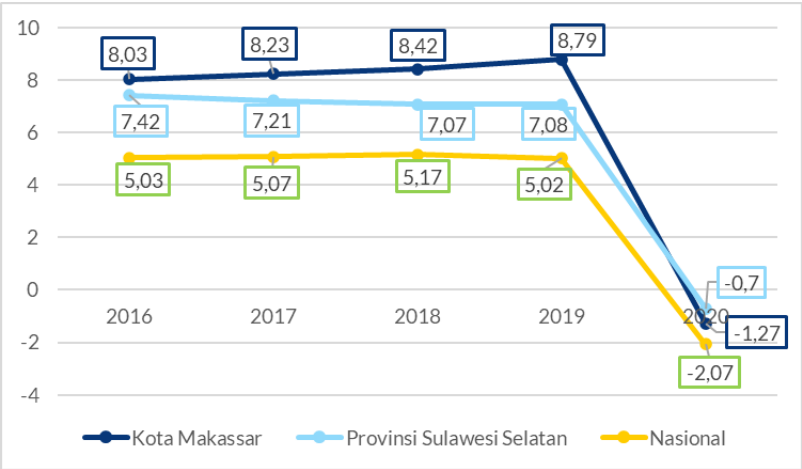
2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan kondisi utama bagi keberlangsungan pembangunan suatu daerah, sehingga harus dijaga serta dipertahankan iklim dan upaya pencapaiannya. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor meliputi tenaga kerja (kualitas Sumber Daya Manusia), modal, perubahan teknologi, kewirausahaan, ketersediaan dan kondisi infrastruktur, kebijakan pemerintah, dan stabilitas keamanan lingkungan. Salah satu pencapaian kinerja makro dan kemajuan perekonomian Kota Makassar dapat dilihat dari pertumbuhan ekonominya.

Dalam empat tahun terakhir, ekonomi Kota Makassar tumbuh konsisten diatas 8% pertahun, dan jika dilihat secara nasional, Kota Makassar termasuk salah satu kota di Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, selalu melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya rata-rata 5 persen pada tahun dan Provinsi Sulawesi Selatan yang rata-rata 7 persen per tahun.

Dari tahun 2016 sampai tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kota Makassar menunjukan tren yang terus meningkat dengan rata-rata peningkatan sebesar 3,89% pertahunnya. Kenaikan tertinggi pertumbuhan ekonomi Makassar terjadi pada tahun 2019 yang mengalami kenaikan 0,37% dari tahun 2018 dan pertumbuhan terendah adalah ditahun 2017 yang hanya mengalami kenaikan 0,20% dari tahun 2016. Dalam empat tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kota Makassar selalu di atas 8%. Pertumbuhan ekonomi Kota Makassar terutama ditopang oleh sektor perdagangan besar dan eceran, sektor konstruksi dan sektor industri. Namun pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Makassar mengalami penurunan sangat drastis sebesar 10,06% menjadi -1,27% dikarenakan pandemi *Corona Virus Disease* Tahun 2019 (Covid-19). Pertumbuhan ekonomi Kota Makassar dibandingkan dengan pertumbuhan ekomoni Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional dalam lima tahun terakhir, dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Gambar 2.14 | Grafik Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2016-2020 Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional

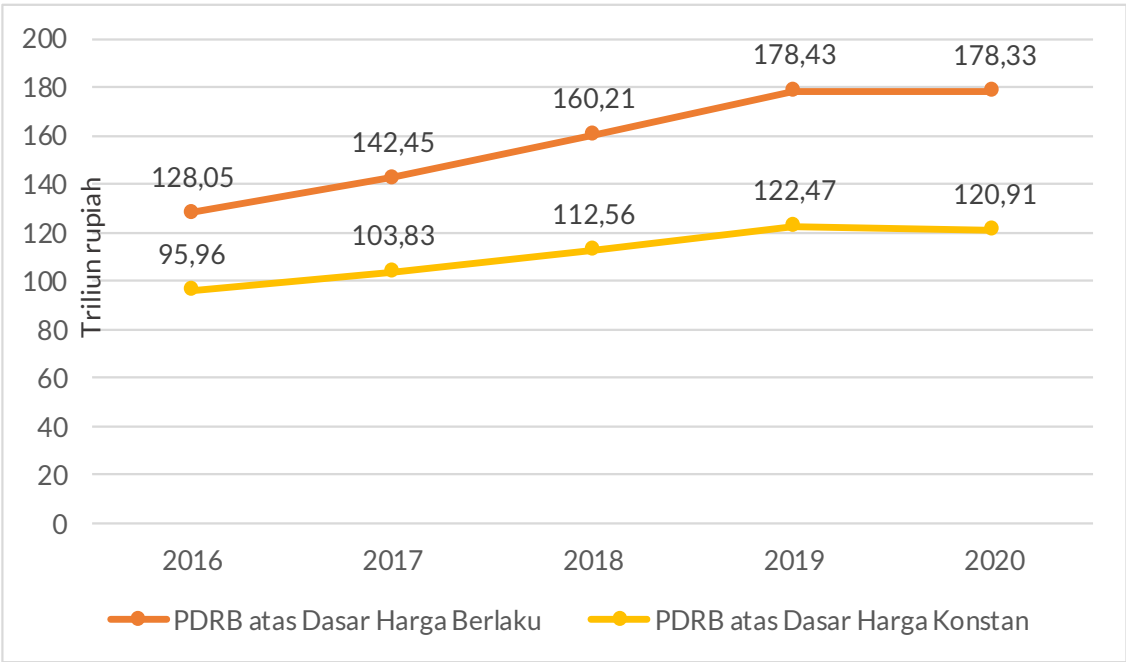


Sumber: BPS Kota Makassar Tahun 2021

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diartikan secara sederhana sebagai kenaikan output total (Produk Domestik Regional Bruto). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita suatu daerah merupakan konsep yang paling sering dipakai sebagai tolok ukur tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk daerah tersebut. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun) yang merupakan penjumlahan seluruh pendapatan yang diperoleh perekonomian suatu wilayah yang dikelompokkan dalam 17 sektor ekonomi. Terdapat 2 (dua) jenis penilaian produk domestik regional bruto (PDRB) dibedakan dalam dua jenis penilaian yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan.

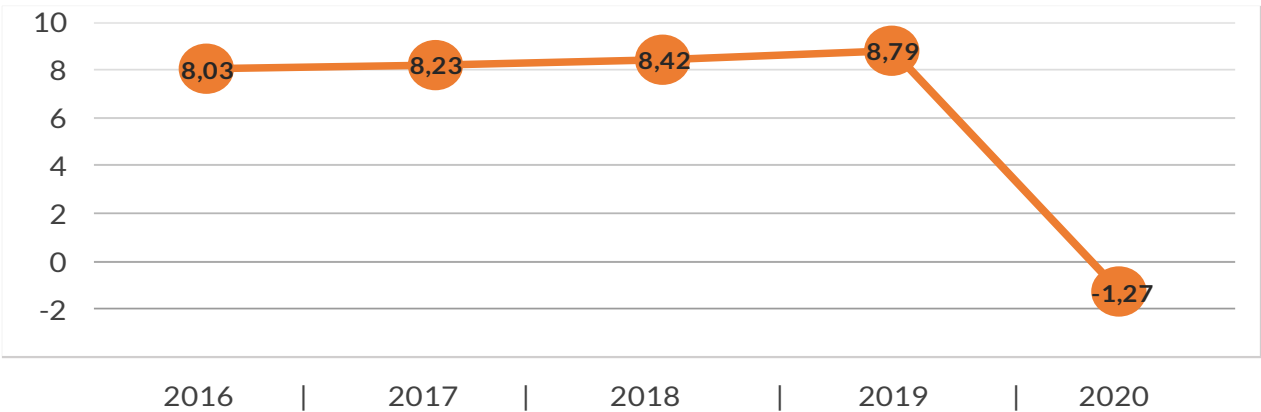
PDRB atas dasar harga berlaku Kota Makassar secara konsisten terus mengalami peningkatan dalam 4 tahun terakhir dari 128,5 triliun pada tahun 2016 menjadi 178,43 triliun pada tahun 2019 atau meningkat rata-rata 16,79% per tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan meningkat dari 95,96 triliun pada tahun 2016 menjadi 122,47 triliun pada tahun 2019 atau meningkat rata-rata 8,83% per tahun. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan PDRB atas dasar harga berlaku turun menjadi 178,33 triliun dan PDRB atas dasar harga konstan menjadi 120,91 triliun. Data PDRB Kota Makassar dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Gambar 2.15 | Grafik PDRB Kota Makassar Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2016-2020 Kota Makassar



Sumber: BPS Kota Makassar Tahun 2021

Gambar 2.16 | Grafik Pertumbuhan PDBR Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar



Sumber: BPS Kota Makassar Tahun 2021

Berdasarkan Gambar 2.16 dapat dilihat bahwa pertumbuhan PDRB Kota Makassar di Tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat drastis hingga -1,27 persen. Hal tersebut dikarenakan pada Tahun 2020 terjadi Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan semua komponen pengeluaran yang mempengaruhi pertumbuhan PDRB seperti Konsumsi Rumah Tangga, Konsumsi LNPRT, Konsumsi Pemerintah, dan Pembentukan Modal Tetap Bruto juga mengalami penurunan.

Tingkat kemajuan dan kesejahteraan penduduk suatu wilayah dipengaruhi oleh besar kecilnya nilai PDRB per kapita yang diciptakan, namun hal itu bukanlah suatu angka riil yang dinikmati oleh penduduk wilayah tersebut. Kontribusi nilai PDRB per kapita terhadap kesejahteraan penduduk dipengaruhi beberapa faktor diantaranya adalah kepemilikan faktor produksi serta kesenjangan pendapatan antara yang berpendapatan tinggi dan yang berpendapatan rendah. Kemajuan pembangunan ekonomi yang dicapai dalam kurun waktu tahun 2016-2020 Kota Makassar mendorong meningkatnya nilai PDRB yang diciptakan.

Nilai dan kontribusi sektor terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Kota Makassar serta PDRB Atas Dasar harga Konstan menurut Lapangan Usaha, dapat dilihat pada berikut ini:

Tabel 2.10 | Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 -2020 Kota Makassar

No	Sektor / Lapangan Usaha	2016		2017		2018		2019		2020	
		Triliun Rupiah	Contrib (%)	Triliun Rupiah	Contrib (%)	Triliun Rupiah	Contrib (%)	Triliun Rupiah	Contrib (%)	Triliun Rupiah	Contrib (%)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,75	0,58	0,79	0,56	0,81	0,50	0,85	0,48	0,84	0,47
2	Pertambangan dan Penggalian	0,001	0,00	0,001	0,00	0,001	0,00	0,001	0,00	-	-
3	Industri Pengolahan	26,41	20,62	28,42	19,95	29,38	18,34	32,66	18,30	31,93	17,90
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,03	0,04	0,03	0,05	0,03	0,05	0,03	0,05	0,03
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,26	0,21	0,28	0,20	0,31	0,19	0,31	0,17	0,32	0,18
6	Konstruksi	21,92	17,12	24,59	17,26	28,76	17,95	32,51	18,22	33,29	18,67
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	23,90	18,66	27,22	19,11	31,75	19,82	36,51	20,46	34,98	19,62
8	Transportasi dan Pergudangan	3,27	2,56	3,68	2,59	4,15	2,59	4,59	2,57	3,93	2,20
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,88	2,25	3,22	2,26	3,70	2,31	3,98	2,23	3,29	1,85
10	Informasi dan komunikasi	11,45	8,94	12,85	9,02	14,80	9,24	16,20	9,08	17,94	10,06
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,95	6,21	8,82	6,19	9,71	6,06	10,38	5,81	10,59	5,94
12	Real Estate	5,31	4,15	5,57	3,91	5,96	3,72	6,38	3,57	6,43	3,60
13	Jasa Perusahaan	1,49	1,16	1,66	1,17	1,90	1,18	2,16	1,21	1,96	1,10
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	4,31	3,37	4,68	3,29	5,49	3,43	6,09	3,41	6,19	3,47
15	Jasa Pendidikan	11,21	8,75	12,83	9,00	14,48	9,04	15,65	8,77	16,34	9,16
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,50	2,74	3,97	2,79	4,48	2,80	5,02	2,81	5,81	3,26
17	Jasa lainnya	3,40	2,66	3,81	2,67	4,47	2,79	5,07	2,84	4,43	2,49
	PDRB ADHB	128,05	100	142,45	100	160,21	100	178,42	100	178,33	100

Sumber: BPS Kota Makassar Tahun 2021

Secara detail tergambar pada tabel lapangan usaha yang tidak signifikan terpengaruh dengan guncangan pandemi Covid-19 adalah kategori lapangan usaha informasi dan komunikasi mencakup produksi dan distribusi informasi serta produk kebudayaan, persediaan alat untuk mengirimkan atau mendistribusikan produk-produk ini dan juga data atau kegiatan komunikasi, informasi, teknologi informasi dan pengolahan data serta kegiatan jasa informasi lainnya. Tingginya permintaan masyarakat terhadap produk telekomunikasi, terutama layanan internet menjadi penyebab bertambahnya nilai PDRB sektor informasi dan komunikasi selama lima tahun terakhir. Secara berturut-turut nilai tambah sektor informasi dan komunikasi naik mulai dari angka Rp 11,45 triliun pada tahun 2016, dan kemudian mencapai Rp 12,85 triliun di tahun 2017, Rp 14,80 di tahun 2018, Rp 16,20 di tahun 2019 dan 17,94 di tahun 2020. Tahun 2020, meski dihantam pandemik, informasi dan komunikasi diprediksi menjadi salah satu sektor yang mendapat dampak positif karena sebagian besar aktivitas masyarakat dan pemerintah daerah beralih secara virtual sehingga penggunaan internet mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Oleh sebab itu, informasi dan komunikasi menjadi tumpuan ekonomi Kota Makassar di tahun 2020 ketika sektor lain diperkirakan terkoreksi negatif.

Adapun jasa pendidikan karena aktivitas belajar-mengajar beralih secara virtual seperti yang dipraktikkan saat ini oleh para guru dan dosen di Kota Makassar. Sepanjang tahun 2016 hingga 2020, kinerja positif ditunjukkan sektor jasa pendidikan dalam menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian Kota Makassar. Tahun 2017, sektor ini tercatat menciptakan angka PDRB sektoral Rp 12,826 triliun, bertambah dari Rp 11,21 triliun pada tahun sebelumnya. Kenaikan nilai PDRB sektoral terus berlanjut di tiga tahun terakhir, dari Rp 14,484 triliun tahun 2018 menjadi Rp 15,65 triliun tahun 2019, dan akhirnya sampai pada angka Rp 16,33 triliun di tahun 2020 sekaligus menjadi nilai tertinggi selama periode ini.

Tabel 2.11 | Nilai dan Pertumbuhan Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 - 2020 Kota Makassar

No	Sektor / Lapangan Usaha	2016		2017		2018		2019		2020	
		Triliun Rupiah	Growt h (%)	Triliun Rupiah	Growt h (%)	Triliun Rupiah	Growt h (%)	Triliun Rupiah	Growt h (%)	Triliun Rupiah	Growth (%)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,50	-	0,51	1,58	0,50	(0,18)	0,53	4,22	0,51	(3,25)
2	Pertambangan dan Penggalian	0,001	-	0,001	(8,33)	0,001	(14,3)	0,001	(12,1)	-	(100,0)
3	Industri Pengolahan	19,56	-	20,81	6,38	20,86	0,24	22,73	8,97	21,77	(4,22)
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	-	0,05	6,41	0,05	9,69	0,05	9,14	0,05	(4,36)
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,20	-	0,22	6,88	0,23	6,24	0,22	(1,66)	0,24	4,99
6	Konstruksi	15,59	-	16,90	8,42	18,40	8,88	20,03	8,90	20,23	0,99
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18,27	-	20,11	10,08	22,48	11,79	25,14	11,82	23,78	(5,43)
8	Transportasi dan Pergudangan	2,31	-	2,52	8,82	2,74	8,78	3,00	9,43	2,48	(17,34)
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,18	-	2,38	8,71	2,68	12,93	2,85	6,25	2,28	(19,83)
10	Informasi dan komunikasi	11,08	-	12,17	9,81	13,74	12,88	14,92	8,60	16,49	10,53
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,52	-	5,84	5,82	6,15	5,32	6,37	3,48	6,48	1,82
12	Real Estate	3,42	-	3,50	2,30	3,65	4,34	3,84	5,11	3,84	0,09
13	Jasa Perusahaan	1,01	-	1,09	8,36	1,21	10,17	1,35	12,41	1,20	(11,37)
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	2,84	-	3,00	5,75	3,50	16,54	3,77	7,72	3,75	(0,43)
15	Jasa Pendidikan	8,60	-	9,44	9,84	10,43	10,51	11,12	6,57	11,30	1,64
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,46	-	2,71	9,88	3,00	10,84	3,29	9,48	3,68	12,02
17	Jasa lainnya	2,37	-	2,60	9,42	2,95	13,58	3,26	10,60	2,82	(13,42)
	PDRB ADHK	95,96	-	103,83	8,20	112,57	8,42	122,47	8,79	120,91	(1,27)

Sumber: BPS Kota Makassar Tahun 2021

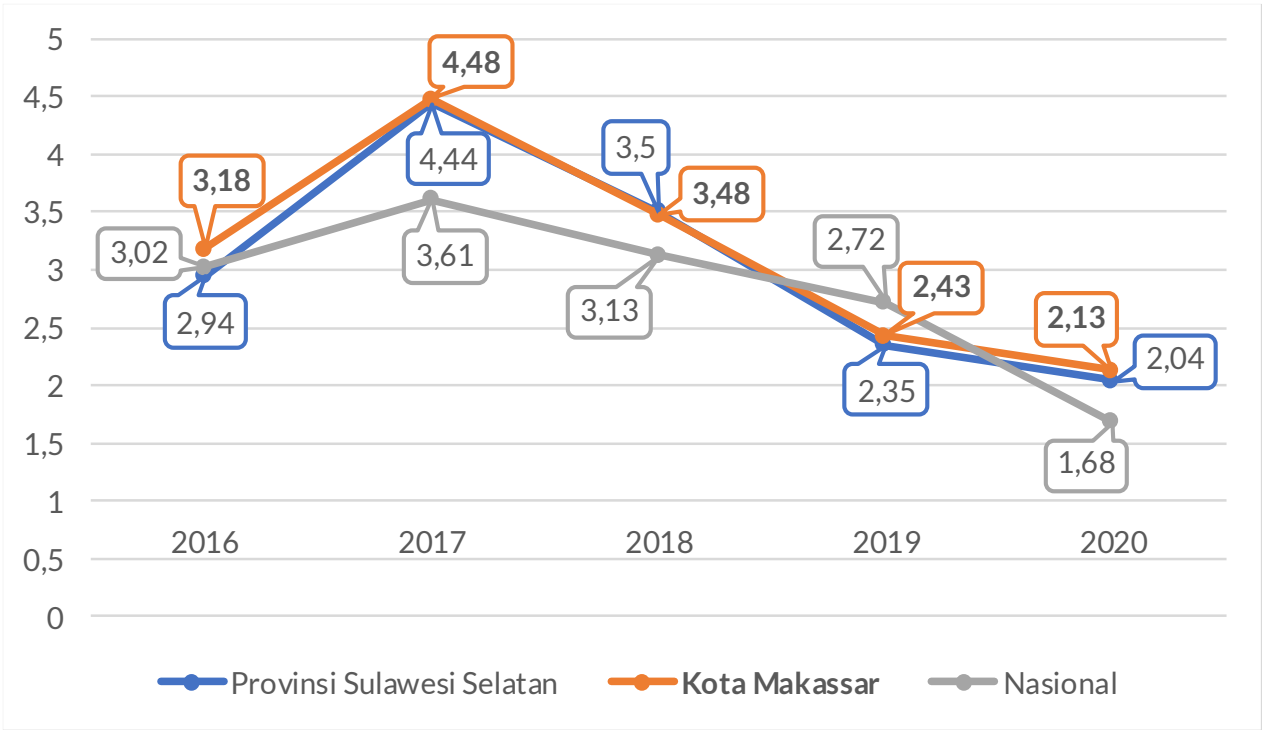
Tabel di atas memperlihatkan pembentukan struktur ekonomi Kota Makassar dalam lima tahun terakhir. Terlihat bahwa lapangan usaha Industri Pengolahan yang berkontribusi paling besar terhadap sektor ekonomi, besarnya berfluktuasi dari 20,38% pada tahun 2016 dan menurun pada tahun 2018 sebesar 18,53%. Peningkatan peran justru ditunjukkan pada lapangan usaha Perdagangan yang meningkat dari 18,27% pada tahun 2016 menjadi 19,82% pada tahun 2018. Sektor Konstruksi juga secara konsisten meningkat kontribusinya dari 17,12% pada tahun 2016 menjadi 17,95% pada tahun 2018 yang lalu atau hampir mencapai 18 persen. Sektor konstruksi tampaknya juga perlu memperoleh catatan tersendiri. Peran sektor konstruksi terhadap perekonomian Kota Makassar diperkirakan akan terus berlanjut seiring dengan posisi Kota Makassar yang masih menjadi salah satu kota paling menarik dari lima kota besar di Indonesia dalam hal investasi di bidang konstruksi.

Dengan demikian, peningkatan peran sektor konstruksi, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor kesehatan dan kegiatan penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor jasa, dan sektor jasa perusahaan yang berlangsung secara konsisten dalam lima tahun terakhir, secara perlahan telah menggeser peran sektor pengolahan dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Keenam sektor ini telah menunjukkan peningkatan peran/kontribusi terhadap PDRB selama periode 2016 – 2020.

2.2.2 Inflasi

Tingkat inflasi Kota Makassar dalam beberapa tahun terakhir cenderung turun, menunjukkan bahwa para pengambil kebijakan dapat mengendalikan laju kenaikan harga barang dan jasa. Inflasi tertinggi sepanjang lima tahun terakhir adalah 4,48 persen di tahun 2017, kemudian turun ke level 3,48 persen di tahun 2018 lalu turun menjadi 2,43 persen tahun 2019, turun lagi ke level 2,13 pada tahun 2020.

Gambar 2.17 | Grafik Laju Inflasi Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar



Sumber: BPS Kota Makassar Tahun 2021

Apabila diperbandingkan dengan inflasi Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, maka inflasi Kota Makassar memiliki tren yang hampir sama, dimana tren kenaikan harga barang di Kota Makassar juga tergambar pada kenaikan barang atau inflasi secara nasional maupun provinsi. Bila dirata-ratakan laju inflasi dalam lima tahun terakhir, maka rata-rata inflasi Kota Makassar sebesar 3,14% lebih tinggi dari rata-rata inflasi Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional yang sebesar 3,05% dan 2,83%.

Tabel 2.12 | Laju dan Rata-Rata Inflasi Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

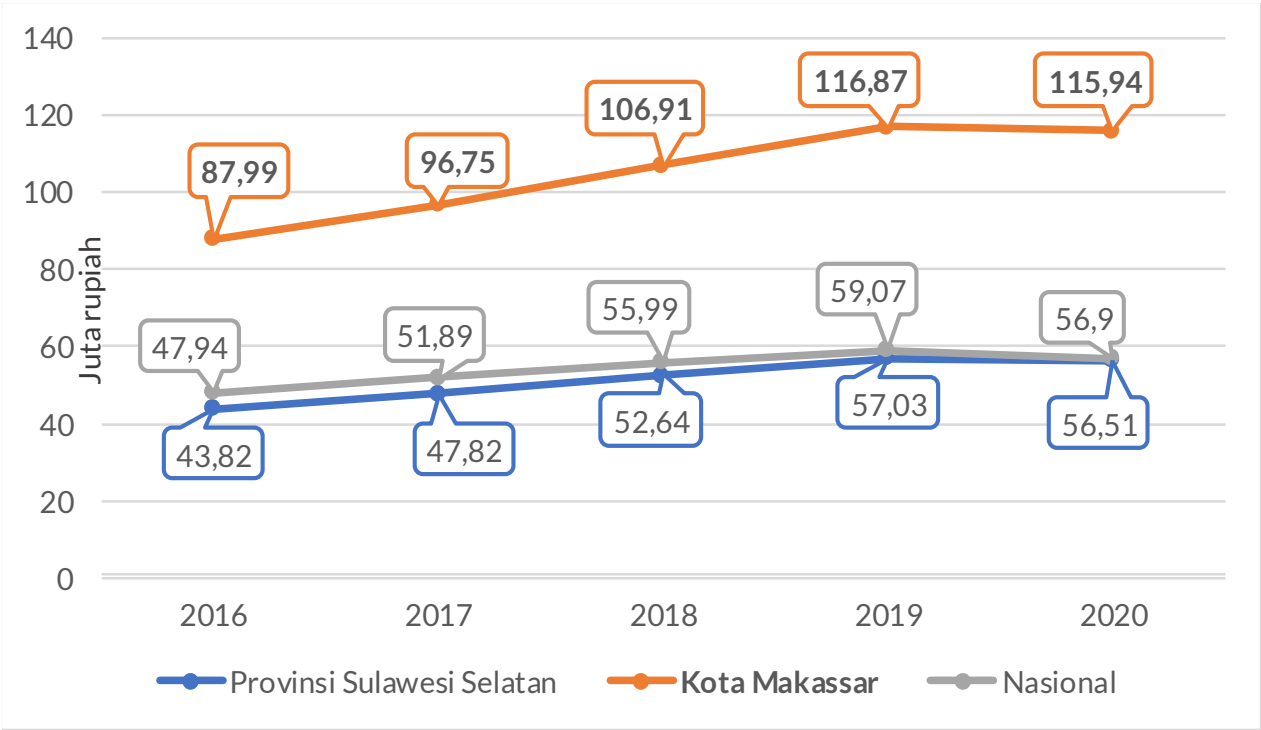
Inflasi	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata
Kota Makassar	3,18	4,48	3,48	2,43	2,13	3,14
Provinsi Sulawesi Selatan	2,94	4,44	3,5	2,35	2,04	3,05
Nasional	3,02	3,61	3,13	2,72	1,68	2,83

Sumber: BPS Kota Makassar Tahun 2021

2.2.3 PDRB Per Kapita

PDRB per kapita dihitung melalui total PDRB, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dibagi dengan total penduduk pada suatu daerah tertentu, dengan tidak membedakan distribusi pendapatan menurut kelompok pendapatan tertentu. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah.

Gambar 2.18 | Grafik PDRB Per Kapita ADHB Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar



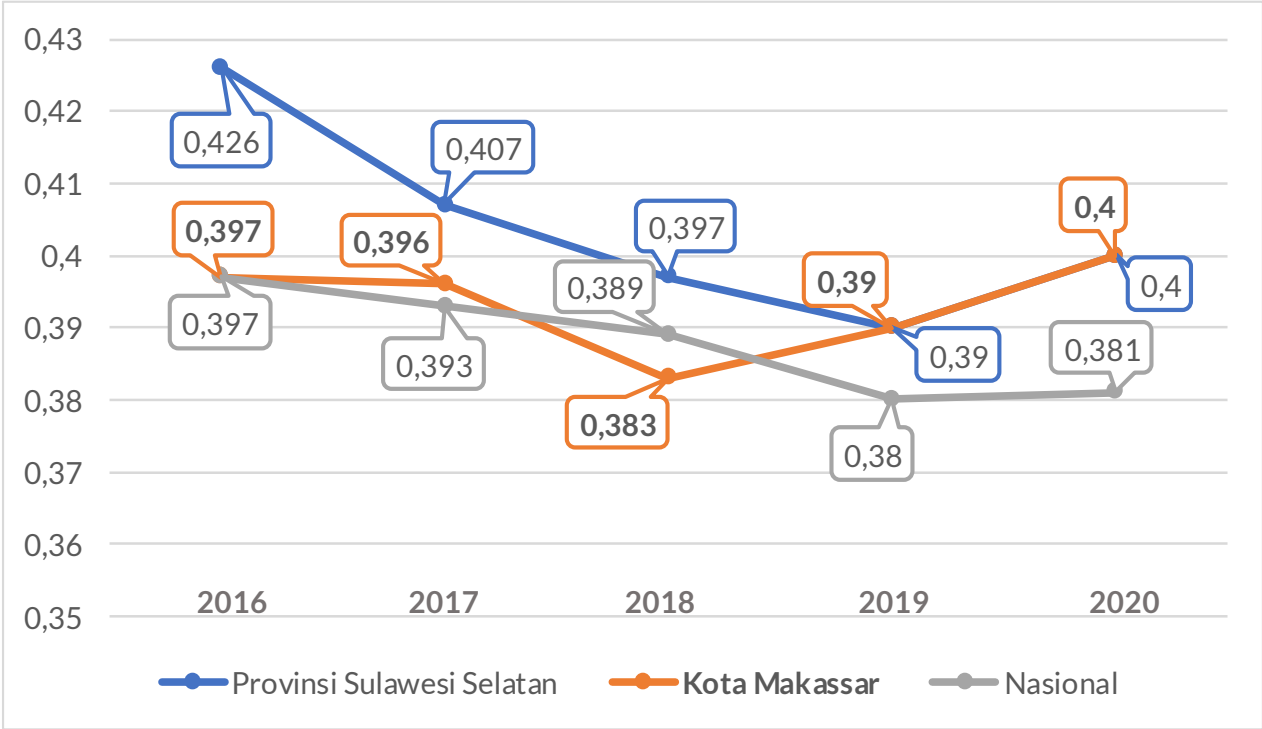
Sumber: BPS Kota Makassar Tahun 2021

Pada tahun 2020, pendapatan per kapita Kota Makassar atas dasar harga berlaku telah mencapai Rp.115,94 juta per orang per tahun. Angka ini hampir dua kali lipat dari pendapatan per kapita Provinsi Sulawesi Selatan maupun nasional yang masing-masing sebesar 56,51 juta dan 56,9 juta. PDRB per kapita Kota Makassar juga terus menunjukkan peningkatan yang konsisten. Dalam empat tahun terakhir, pendapatan per kapita Kota Makassar meningkat dari Rp.87,99 juta pada tahun 2016 menjadi Rp.116,87 pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 115,94. Sebagaimana yang tergambar sebelumnya diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kota Makassar menyebabkan nilai PDRB menurun. Sehingga secara langsung nilai PDRB per Kapita menurun.

2.2.4 Indeks Gini

Indeks gini merupakan salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan secara menyeluruh dalam suatu daerah. Indeks gini berada pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu), dimana nol menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna dan semakin mendekati 1 (satu), maka semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran. Indeks gini Kota Makassar dalam lima tahun terakhir berada di atas angka provinsi Sulawesi Selatan namun berfluktuasi untuk angka nasional, dimana tahun 2020, indeks gini Makassar sebesar 0,40, sedangkan Provinsi Sulawesi Selatan 0,389 dan nasional pada angka 0,381. Tingkat ketimpangan Kota Makassar dalam lima tahun terakhir masih masuk kategori moderat yakni dalam rentang 0,3 hingga 0,5.

Gambar 2.19 | Grafik Indeks Gini Tahun 2015 - 2019 Kota Makassar

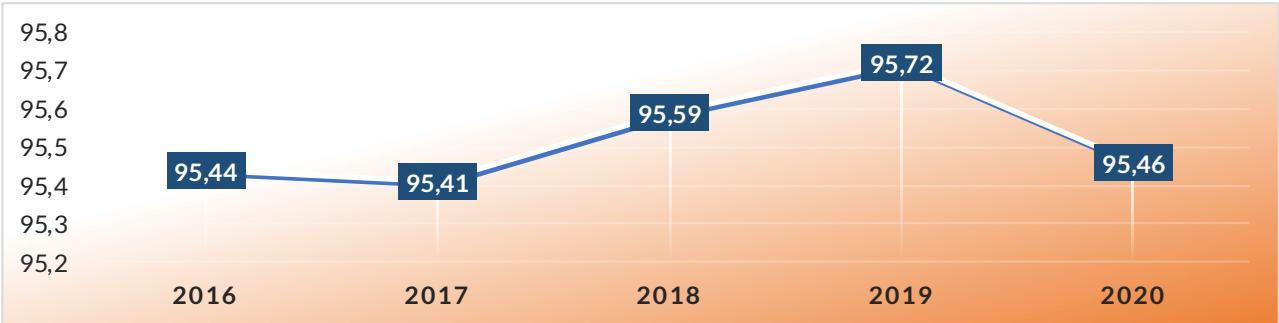


Sumber: BPS Kota Makassar Tahun 2021

2.2.5 Angka Kemiskinan

Untuk mengukur angka kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), dimana kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Standar kehidupan minimal untuk memenuhi kebutuhan dasar disebut sebagai “garis kemiskinan”. Garis kemiskinan (rupiah/per kapita/per bulan) Kota Makassar tahun 2018 sebesar Rp. 386.545 dan meningkat menjadi Rp. 418.830 pada tahun 2019 dan kembali meningkat di tahun 2020 menjadi Rp. 442.514. Jumlah penduduk miskin Makassar tahun 2019 sebanyak 63.364 jiwa, atau 4,28%. Angka ini masih rendah dibandingkan dengan angka kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan yang sebesar 8,56% dan angka nasional yang sebesar 9,22%. Sebaliknya persentase penduduk di atas garis kemiskinan dihitung menggunakan rumus 100 dikurang angka kemiskinan (100 – angka kemiskinan). Penduduk Makassar yang berada di atas garis kemiskinan dalam tiga tahun terakhir mengalami penurunan, dari 95,62% di tahun 2015 menjadi 95,72% di tahun 2019. Data penduduk yang berada di atas garis kemiskinan Kota Makassar dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Gambar 2.20 | Grafik Persentase penduduk di atas garis kemiskinan Tahun 2016 - 2020 Kota Makassar



Sumber: BPS Kota Makassar Tahun 2021

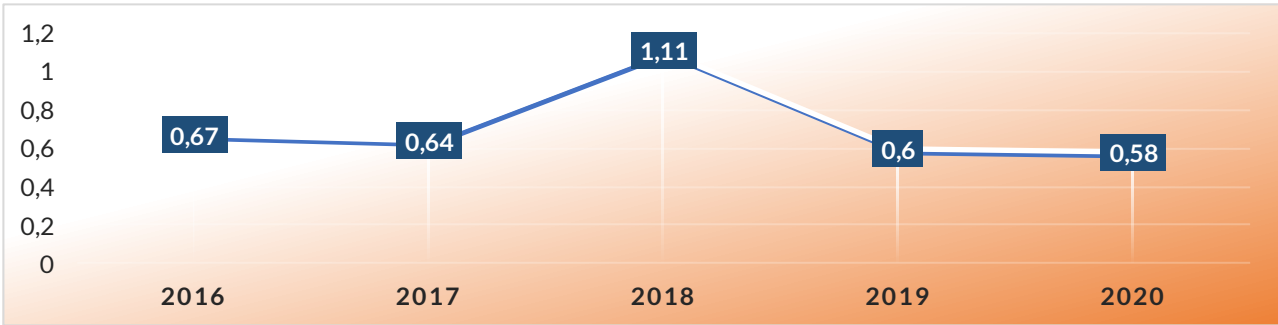
Tabel 2.13 | Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2016 - 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk Miskin Kota Makassar	66.789	68.190	66.220	65.120	69.980
Persentase Penduduk Miskin Kota Makassar	4,56	4,59	4,41	4,28	4,54
Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Selatan	9,24	9,48	8,87	8,56	8,99
Persentase Penduduk Miskin Nasional	10,70	10,12	9,66	9,22	10,19

Sumber: Diolah dari Data Susenas, BPS Kota Makassar Tahun 2021

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dalam pengukuran angka kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok non makanan (papan, sandang, sekolah, transportasi, dll.). Indeks kedalaman kemiskinan Kota Makassar cenderung fluktuatif, dimana tahun 2017 rasio kesenjangan kemiskinan Kota Makassar sebesar 0,64, dan meningkat tajam ditahun 2018 yang sebesar 1,11. Sedangkan pada dua tahun terakhir mengalami penurunan yaitu pada tahun 2019 menjadi 0,6 dan pada tahun 2020 menjadi 0,58. Indeks kedalaman kemiskinan Kota Makassar dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.21 | Grafik Indeks Kedalaman Kemiskinan Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

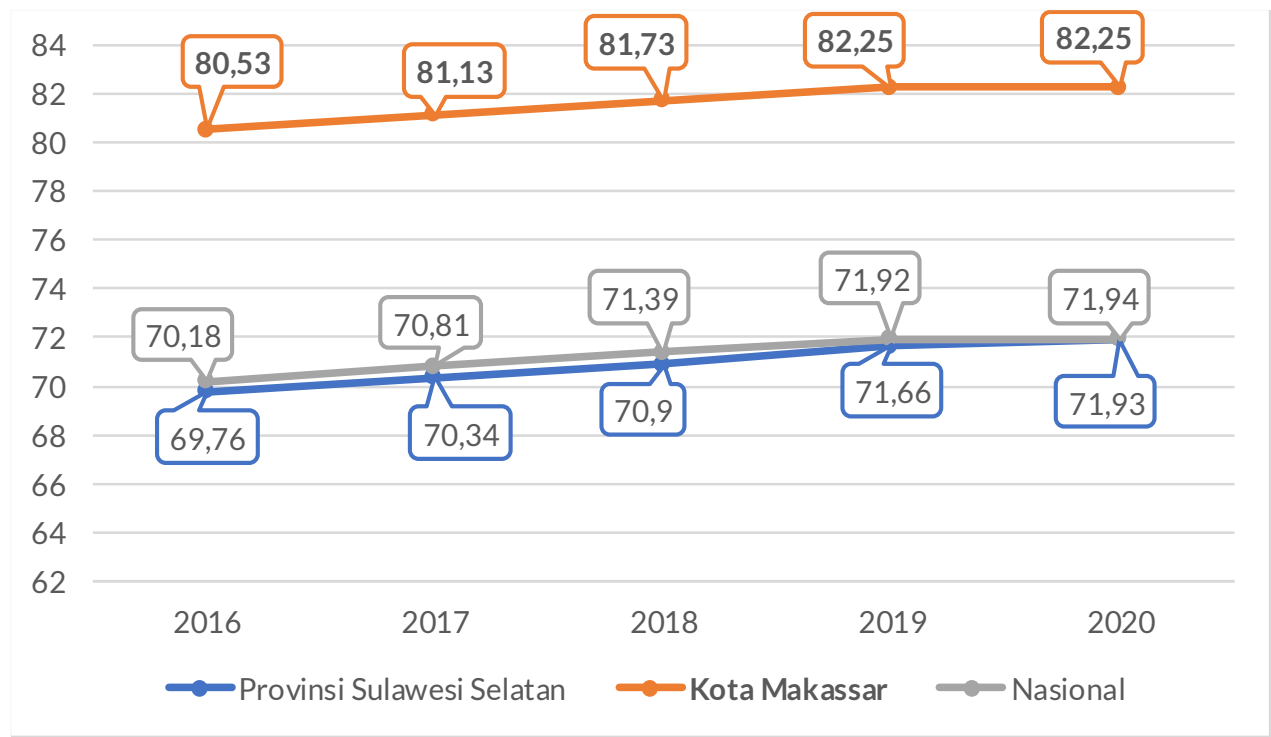


Sumber: BPS Kota Makassar Tahun 2021

2.2.6 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata geometrik dari angka usia harapan hidup, indeks pendidikan (harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah) dan indeks paritas daya beli (PPP). IPM merupakan salah satu indikator kinerja makro dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan Pendidikan. IPM juga merupakan salah satu ukuran kinerja pemerintah daerah yang digunakan untuk mengalokasikan Dana Alokasi Umum (DAU). IPM Makassar secara konsisten mengalami peningkatan dalam empat tahun terakhir dari 2016 - 2019 dan telah mencapai 82.25 ditahun 2019. Sedangkan untuk tahun 2020 IPM masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu 82,25 atau telah masuk dalam kategori sangat tinggi (> 80). IPM Makassar lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan maupun secara nasional yang masih pada angka 70. Program-program disektor Pendidikan, kesehatan maupun upaya peningkatan pendapatan masyarakat sangatlah penting untuk meningkatkan IPM suatu daerah.

Gambar 2.22 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar



Sumber: BPS Kota Makassar Tahun 2021

2.2.7 Angka Melek Huruf

Angka melek huruf menunjukkan kualitas manusia pada umumnya, aksesibilitas serta kondisi ekonomi suatu daerah. Perkembangan angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun di Kota Makassar dalam lima tahun terakhir menunjukkan angka 100% yang artinya semua penduduk Kota Makassar yang berusia 15-24 tahun dapat membaca dan menulis huruf latin maupun huruf lainnya. Angka melek huruf penduduk Kota Makassar yang berusia 15-24 tahun dalam kurun waktu 2016 s.d 2020 tersaji dalam tabel berikut ini:

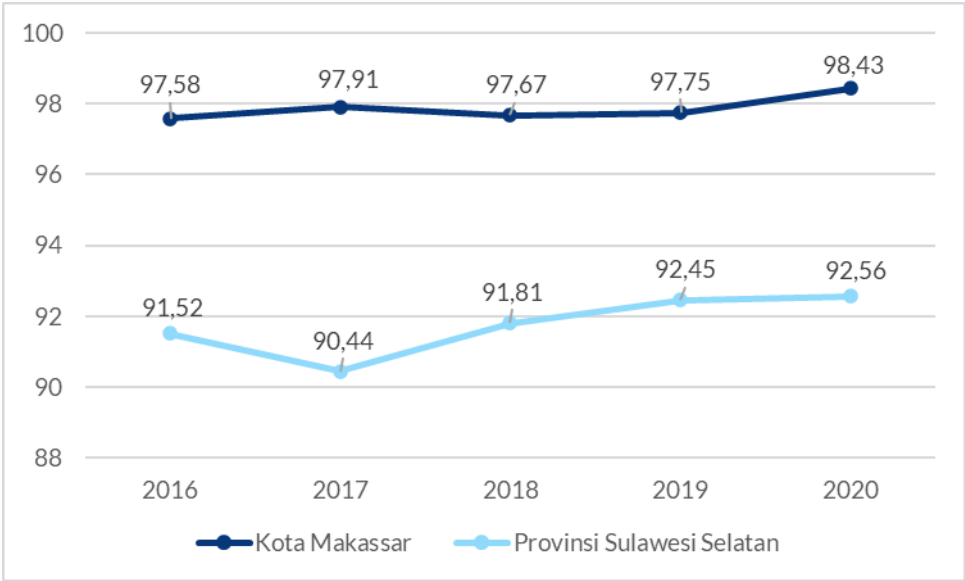
Tabel 2.14 | Angka Melek Huruf Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah penduduk usia > 15 th yang bisa membaca dan menulis	1,033,654	1,051,605	1,068,843	1,044,663	1,095,417
Jumlah penduduk usia > 15 th	1,059,289	1,074,053	1,094,341	1,068,709	1,112,889
Penduduk usia > 15 tahun yang melek huruf	97.58	97.91	97.67	97.75	98.43

Sumber: BPS Kota Makassar, 2020

Tingginya persentase AMH di Kota Makassar menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan/atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajarannya. Data angka melek huruf Kota Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan dalam 5 tahun terakhir disajikan dalam gambar berikut ini:

Gambar 2.23 | Angka Melek Huruf Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar



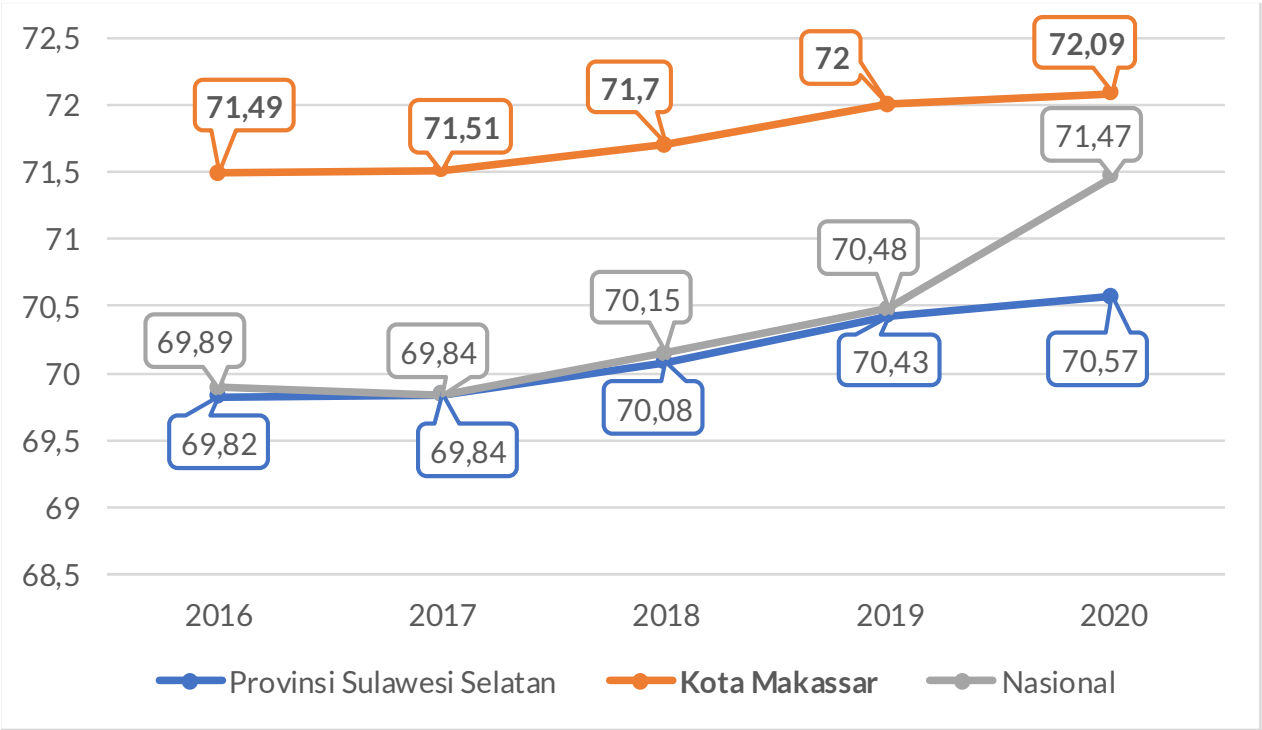
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar, 2020

2.2.8 Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan salah satu indikator yang diperhitungkan dalam menilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan dapat digunakan untuk menilai status derajat kesehatan. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Umur Harapan Hidup (UHH) dihitung dari jumlah kelahiran sampai pada kelompok umur tertentu dibagi jumlah kelahiran sampai pada kelompok umur tersebut pada pertengahan tahun.

Data menunjukkan bahwa perhitungan pencapaian Angka Harapan Hidup (AHH) tahun selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan secara signifikan, dimana pada tahun 2016 sebesar 71,49% meningkat menjadi 72,09% pada tahun 2020. Angka Harapan Hidup Kota Makassar secara konsisten selalu berada di atas angka Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Pola hidup masyarakat merupakan faktor yang besar pengaruhnya terhadap belum tercapainya usia harapan hidup yang ditargetkan 74,63% tahun pada tahun 2015. Angka Harapan Hidup Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.24 | Grafik Angka Harapan Hidup Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

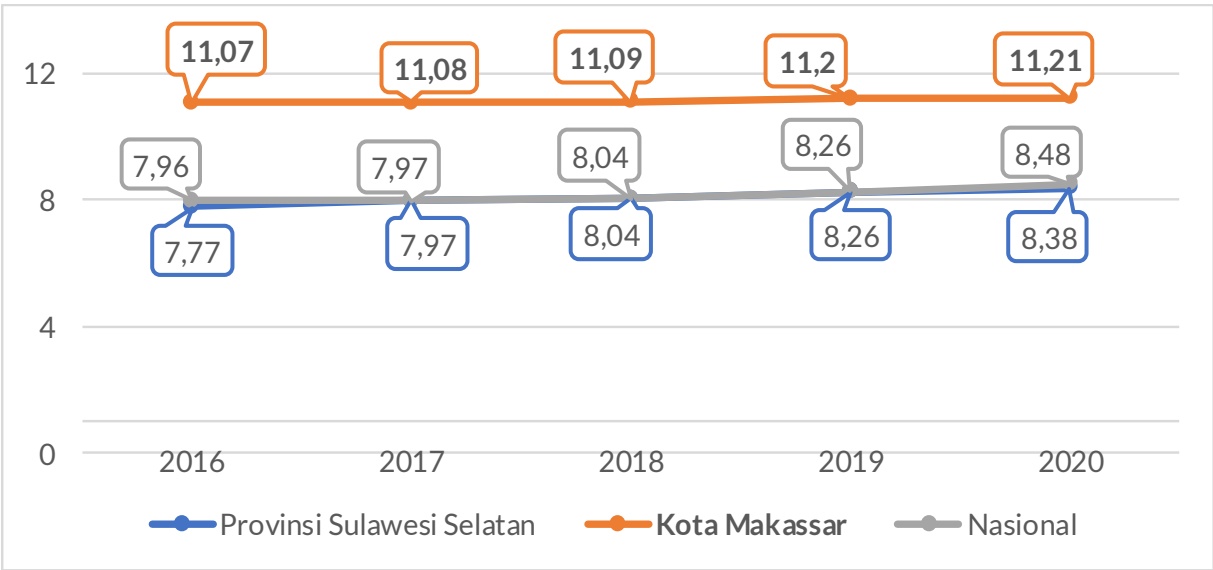


Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, BPS Kota Makassar Tahun 2021

2.2.9 Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah dilakukan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam sektor pendidikan. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah adalah dengan memperkecil angka putus sekolah atau mengembalikan anak putus sekolah ke bangku sekolah dan meningkatkan jumlah angka yang melanjutkan antar jenjang Pendidikan. Berdasarkan data menunjukkan bahwa angka rata-rata lama sekolah di Kota Makassar selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar 0,01%, mulai dari tahun 2016 yaitu 11,07% menjadi 11,21 pada tahun 2020. Angka rata-rata lama sekolah di Kota Makassar dalam 5 tahun terakhir secara konsisten selalu berada di atas angka rata-rata lama sekolah Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Data angka rata-rata lama sekolah Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional disajikan pada Tabel berikut ini:

Gambar 2.25 | Grafik Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinas Pendidikan Kota Makassar, 2021

2.2.10 Status Gizi Balita

Status gizi balita merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Gizi pada balita terutama diperlukan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangannya. Kurang terpenuhinya gizi pada anak akan menghambat sintesis protein DNA sehingga menyebabkan terhambatnya pembentukan sel otak yang selanjutnya akan menghambat perkembangan otak. *Body Mass Index* (BMI) atau yang dikenal dengan Indeks Berat Badan adalah salah satu teknik yang digunakan dalam penilaian status gizi Balita. Untuk memperoleh nilai BMI dilakukan dengan pengukuran tubuh (BB, TB) atau *anthropometri* untuk dibandingkan dengan umur, misalnya : BB/U atau yang paling sering digunakan adalah indeks Berat Badan menurut Umur (BB/U). Adapun hasil perhitungan yang diperoleh dikategorikan ke dalam 4 kelompok yaitu : gizi lebih (z-score > +2 SD); gizi baik (z-score –2 SD sampai +2 SD); gizi kurang (z-score < -2 SD sampai –3 SD); dan gizi buruk (z-score < -3SD).

Gizi pada balita terutama diperlukan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangannya. Kurang terpenuhinya gizi pada anak akan menghambat sintesis protein DNA sehingga menyebabkan terhambatnya pembentukan sel otak yang selanjutnya akan menghambat perkembangan otak.

Tabel 2.15 | Prevalensi Balita Gizi Kurang Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Balita Gizi Kurang	7.969	6.735	6.781	5.516	5.811
Jumlah Balita	104.319	97.544	99.963	82.655	90.129
Persentase Balita Gizi Kurang	7,64	6,90	6,78	6,67	6,45

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Makassar, 2021

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Prevalensi Balita Gizi Kurang di Kota Makassar pada tahun 2016 s.d 2020 mengalami penurunan dimana pada tahun 2016 Prevalensi balita gizi kurang sebesar 7,64% menjadi 6,44% pada tahun 2020 atau mengalami penurunan sebesar 1,2% selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.16 | Prevalenzi Balita Gizi Buruk Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Balita Gizi Buruk	2.145	1.977	1.965	1.578	1.445
Jumlah Balita	104.319	97.544	99.963	82.655	90.129
Persentase Balita Gizi Buruk	2,06	2,03	1,97	1,91	1,60

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Makassar, 2021

Berdasarkan tabel 2.16, menunjukkan bahwa Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kota Makassar sejak 5 tahun terakhir terus mengalami penurunan setiap tahunnya, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah adanya intervensi Pemberian Makanan Tambahan (PMT), deteksi dini meningkat melalui pemantauan pertumbuhan dan edukasi bagi petugas secara rutin dan berkala.

2.2.11 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Beberapa indikator yang dapat menggambarkan partisipasi angkatan kerja. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun atau lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.

Pada Tahun 2020, TPAK Kota Makassar mencapai 61,89 persen. Dari sebanyak 1.124.922 jiwa penduduk usia kerja (15-64 tahun), sebanyak 696.158 jiwa merupakan penduduk angkatan kerja. Dilihat perkembangan TPAK selama lima tahun mengalami kenaikan 3,78 persen dimana tercatat TPAK pada tahun 2016 tercatat 58,11 persen dan bertambah pada tahun 2020 mencapai 61,89 persen.

Tabel 2.17 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk Angkatan Kerja	593.160	613.322	671.044	661.226	696.158
Jumlah Penduduk Usia Kerja (15 - 64 Tahun)	1.020.822	1.055.099	1.102.682	1.085.328	1.124.922
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	58,11	58,13	60,86	60,92	61,89

Sumber: Hasil Sakernas BPS RI, diolah oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, 2020
Catatan: 1. Hasil Sakernas tahun 2016 tingkat Kabupaten/Kota secara Nasional tidak dirilis oleh BPS RI
2. Dalam pengumpulan data ketenagakerjaan oleh Badan Pusat Statistik, definisi penduduk usia Kerja adalah penduduk berumur 15 tahun atau lebih (termasuk usia 65+)

2.2.12 Tingkat Pengangguran Terbuka

Posisi Makassar sebagai ibukota provinsi dan salah satu kota termaju di Kawasan Timur Indonesia sedikit banyak memberi dampak pada naiknya angka pengangguran tersebut. Saat ini semakin banyak orang datang dan mempertaruhkan masa depan di Kota Makassar meskipun dengan kemampuan tidak memadai. Untuk itu, Pemerintah Kota Makassar akan untuk terus membuka peluang-peluang usaha, memberi kemudahan berusaha sekaligus menyiapkan pendampingan-pendampingan bagi UMKM dan wirausaha pemula sebagai strategi untuk menekan jumlah pengangguran tersebut.

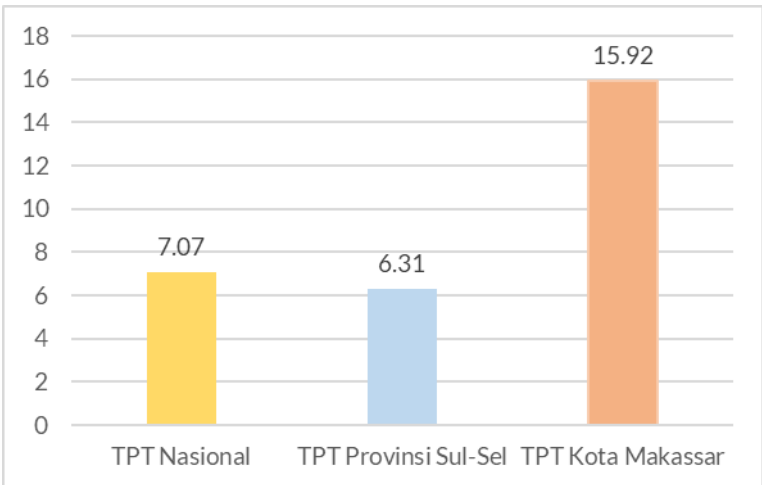
Rendahnya daya serap tenaga kerja dalam perekonomian terjadi akibat struktur perekonomian Kota Makassar yang terkonsentrasi pada sektor tersier (jasa). Sektor ini secara umum memiliki elastisitas penyerapan tenaga kerja yang relatif rendah, setidaknya jika dibandingkan dengan sektor primer dan sekunder. Pertumbuhan nilai tambah sektor tertier sering kali tidak berjalan secara paralel dengan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja di sektor tersebut. Kondisi ini telah menyebabkan pembengkakan angka pengangguran di Kota Makassar. Meskipun korelasi antara pertumbuhan ekonomi dengan penurunan angka pengangguran sering kali tidak sepenuhnya berlangsung linear, namun pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan tingkat pengangguran di Kota Makassar tampak cukup kuat. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 misalnya, yang mencapai angka dua digit, telah menyebabkan tingkat pengangguran menurun secara drastis. Ketika terjadi perlambatan ekonomi pada tahun-tahun berikutnya, angka pengangguran kembali bergerak naik.

Data yang dirilis BPS menunjukkan bahwa persentase angkatan kerja yang bekerja pada tahun 2017 sebesar 89,41 persen atau 548.368 orang. Dari angka tersebut, sebagian besar bekerja di sektor perdagangan atau mencapai 35,59 persen. Sedangkan sektor industri pengolahan hanya menyerap tenaga kerja sebesar 9,52 persen dari total angkatan kerja yang bekerja. Padahal nilai tambah sektor industri pengolahan menyumbang lebih dari seperlima terhadap pembentukan PDRB Kota Makassar. Rendahnya daya serap tenaga kerja di sektor industri pengolahan menjadi faktor yang bisa menjelaskan mengapa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Makassar cukup tinggi. Pada tahun 2017, jumlah pengangguran di Kota Makassar mencapai 64.954 orang atau sekitar 10,59% dari total angkatan kerja. Jika dibandingkan dengan kondisi pada tahun sebelumnya, angka ini relatif menurun dimana pada

tahun 2016 jumlah pengangguran di Kota Makassar mencapai 71.306 orang atau sekitar 12,02% dari total angkatan kerja. Jumlah pengangguran terendah dicapai pada tahun 2017, dimana pada tahun tersebut jumlah pengangguran mencapai 64.954 orang atau 10,59% dari total angkatan kerja. Rendahnya jumlah pengangguran pada tahun tersebut tampaknya dikontribusi oleh laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Namun penurunan laju pertumbuhan ekonomi hingga tahun 2020, memberi tekanan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Ini memberi pesan kuat bahwa untuk menurunkan angka pengangguran di Kota Makassar, pertumbuhan ekonomi harus terus dijaga agar tetap berada di kisaran 9,0%– 10,0% per tahun.

Tabel 2.18 | Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Pengangguran Terbuka Usia Angkatan Kerja	71.306	64.954	81.823	68.709	110.833
Jumlah Penduduk Angkatan Kerja	593.160	613.322	671.044	661.226	696.158
Tingkat Pengangguran Terbuka	12,02	10,59	12,19	10,39	15,92



Sumber: Hasil Sakernas BPS RI, diolah oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, 2021
Catatan: Hasil Sakernas tahun 2016 tingkat Kabupaten/Kota secara Nasional tidak dirilis oleh BPS

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kota Makassar menunjukkan angka yang cukup tinggi dimana pandemi covid-19 menjadi penyebab utama mengapa TPT Kota Makassar meningkat cukup tajam. Salah satu dampak dari pandemi Covid-19 adalah meningkatnya jumlah pekerja yang dirumahkan hingga mengalami Pemutusan Hak Kerja (PHK) dari para pemilik kerja. Kondisi ini hampir merata terjadi secara nasional termasuk di Kota Makassar. Berdasarkan angka TPT Provinsi Sulawesi Selatan, menempatkan Kota Makassar sebagai daerah yang memiliki TPT tertinggi di Sulawesi Selatan, jauh lebih tinggi dari 23 Kabupaten/Kota lainnya. Berdasarkan grafik di atas tingkat pengangguran terbuka Kota Makassar tahun 2020 sebesar 15.92 persen lebih tinggi dari tingkat pengangguran terbuka Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 6.31 persen maupun nasional sebesar 7.07 persen.

2.2.13 Rasio Penduduk Yang Bekerja

Kebalikan dari tingkat pengangguran, rasio penduduk yang bekerja memperlihatkan jumlah dan persentase penduduk yang bekerja di Kota Makassar, dengan kata lain semakin tinggi rasio penduduk yang bekerja, semakin tinggi pula penyerapan lapangan kerja terhadap angkatan kerja di daerah tersebut. Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan angkatan kerja.

Dalam lima tahun terakhir persentase penduduk yang bekerja mengalami peningkatan dan penurunan yang berada di kisaran 84% s.d 89% tiap tahunnya. Pada tahun 2016 rasio penduduk yang bekerja Kota Makassar sebesar 87,98%, membaik pada tahun 2017 menjadi sebesar 89,41% dan menurun kembali pada tahun 2018 menjadi 87,81%, dan meningkat kembali pada tahun 2019 menjadi 89,61%.

Pada tahun 2020 sebanyak 585.325 penduduk Kota Makassar yang bekerja dari 696.158 penduduk angkatan kerja sehingga dapat disimpulkan bahwa 84,08% dari angkatan kerja yang mendapat pekerjaan sedangkan sisanya masih mencari kerja atau belum mendapatkan pekerjaan. Data rasio penduduk yang bekerja Kota Makassar dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.19 | Rasio Penduduk Yang Bekerja Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020*
Penduduk Yang Bekerja	521.854	548.368	589.221	592.517	585.325
Angkatan Kerja	593.160	613.322	671.044	661.226	696.158
Rasio Penduduk Yang Bekerja	87,98	89,41	87,81	89,61	84,08

Sumber: Hasil Sakernas BPS RI, diolah oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, 2021
Catatan: * = angka sementara

2.2.14 Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survei IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Tabel 2.20 | Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Kepuasan Masyarakat	74,71	75,58	77,47	77,74	77,66

Sumber: Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Daerah Kota Makassar, 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Makassar terhadap kualitas pelayanan publik Tahun 2016 hingga 2019 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2020 menurun sebesar 0,3. Hal tersebut menunjukkan bahwa apresiasi masyarakat Kota Makassar tahun 2020 juga menurun terhadap pelayanan publik, sehingga dengan demikian diharapkan pemerintah dapat meningkatkan kembali kualitas pelayanan publik karena dengan adanya pelayanan yang baik dapat meningkatkan kepuasan masyarakat.

2.2.15 Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah tidak lepas dari peranan PAD yang merupakan sumber terbesar Pendapatan Daerah. Dengan kontribusi yang semakin meningkat, diharapkan pemerintah daerah semakin mampu membiayai keuangannya. Gambaran kemandirian keuangan daerah ini dapat diketahui melalui besarnya kemampuan sumber daya keuangan dalam membiayai pelayanan kepada masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, gambaran kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kota Makassar dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.21 | Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah
Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	971.859.753.606	1.337.231.094.232	1.185.453.010.990	1.303.316.337.554	1.116.813.266.836
Pendapatan Daerah	3.546.650.155.445	3.416.355.218.701	3.428.479.729.163	3.666.359.990.155	3.362.146.992.169
Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	27,40%	39,14%	34,58%	35,55%	33,22%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar, 2021

2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

2.3.1.1 Pendidikan

Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal. Persentase jumlah siswa pada jenjang PAUD di Kota Makassar cenderung menunjukkan angka yang fluktuatif, dimana selama lima tahun terakhir, angka tertinggi terjadi pada tahun 2018, yakni 71,02%, sampai pada tahun 2020 persentase anak usia 4 – 6 tahun yang bersekolah PAUD mencapai 50,27%. Gambaran persentase anak yang bersekolah di PAUD di Kota Makassar untuk tahun 2016 s.d 2020 secara rinci dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.22 | Persentase Angka Partisipasi Anak Usia 4 – 6 Tahun yang Mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak	16.685	25.412	37.416	25.163	26.566
Jumlah Anak Usia 4 - 6 Tahun	27.137	38.777	52.686	39.355	52.847
Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (%)	61,48%	65,53%	71,02%	63,94%	50,27%

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Makassar, 2021

Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan antara jumlah siswa, berapa pun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya.

Berdasarkan tabel 2.23 di bawah menunjukkan bahwa APK pada jenjang pendidikan SD/MI pada tahun 2020 sebesar 103,54 persen, APK pada jenjang SMP/MTs yaitu sebesar 93,77. Nilai APK untuk jenjang pendidikan SD/MI di Kota Makassar selama lima tahun terakhir selalu lebih dari 100 persen, hal ini menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa Kota Makassar mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya.

Tabel 2.23 | Angka Partisipasi Kasar Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah siswa pada jenjang pendidikan SD/MI	156.536	156.741	154.056	150.377	149.218
Jumlah penduduk usia 7 - 12 tahun	145.782	139.121	142.069	143.005	144.114
APK SD/MI (%)	107,38%	112,67%	108,44%	105,16%	103,54%
Jumlah siswa pada jenjang pendidikan SMP/MTs	74.838	76.336	76.330	73.622	72.781
Jumlah penduduk usia 13 - 15 tahun	74.268	75.479	76.071	77.137	77.615
APK SMP/ MTs (%)	100,77%	101,14%	100,34%	95,44%	93,77%

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Makassar, 2021

Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan.

Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah. Keterbatasan APM adalah kemungkinan adanya *under estimate* karena adanya siswa di luar kelompok usia yang standar di tingkat pendidikan tertentu.

Berdasarkan tabel data Angka Partisipasi Murni untuk jenjang Pendidikan SD/MI (umur 7 – 12 tahun) di Kota Makassar mengalami naik turun. Pada tahun 2020, ada 96,79% yang bersekolah dan 3,21% tidak bersekolah di jenjang SD/MI. APM untuk jenjang SMP/MTs/Paket B, juga mengalami naik turun. Pada tahun 2020, jumlah total penduduk kelompok usia 13 – 15 tahun sebanyak 77.615 orang, yang bersekolah di jenjang SMP/MTs/Paket B adalah 80,27% (62.299 orang) sedangkan yang tidak bersekolah di tingkat SMP/MTs/Paket B adalah 3,21%. Untuk lebih jelasnya, informasi jumlah siswa dan jumlah penduduk kelompok usia 7 – 12 tahun dan 13 – 15 tahun, serta persentase APM di Kota Makassar untuk masing-masing jenjang Pendidikan pada tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.24 | Angka Partisipasi Murni Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah siswa kelompok usia 7 - 12 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	145.432	139.044	141.546	139.619	139.490
Jumlah penduduk usia 7 - 12 tahun	145.782	139.121	142.069	143.005	144.114
APM SD/MI (%)	99,76%	99,94%	99,63%	97,63%	96,79%
Jumlah siswa kelompok usia 13 - 15 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	73.538	74.996	65.517	61.785	62.299
Jumlah penduduk usia 13 - 15 tahun	74.268	75.479	76.071	77.137	77.615
APM SMP/ MTs (%)	99,02%	99,36%	86,13%	80,10%	80,27%

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Makassar, 2021

Angka Partisipasi Sekolah

Salah satu indikator kemajuan pendidikan suatu daerah adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS adalah proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah.

Berdasarkan tabel 2.25 di bawah menunjukkan bahwa Pada tahun 2020 APS penduduk usia 7 – 12 tahun di Kota Makassar telah mencapai 97,84%. Pada periode 2016 s.d 2020, APS jenjang SMP/MTs/Paket B pada tahun 2020 sebesar 93,35%. Tingginya APS SD dan SMP sederajat salah satunya dipengaruhi oleh banyaknya siswa yang berasal dari luar Makassar yang bersekolah di Kota Makassar.

Tabel 2.25 | Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah siswa kelompok usia 7 - 12 tahun	160.452	153.533	153.126	150.325	140.994
Jumlah penduduk usia 7 - 12 tahun	145.782	139.121	142.069	143.005	144.114
Angka Partisipasi Sekolah 7 - 12 tahun	110,06%	110,36%	107,78%	105,12%	97,84%
Jumlah siswa kelompok usia 13 - 15 tahun	74.188	77.047	77.594	72.593	72.451
Jumlah penduduk usia 13 - 15 tahun	74.268	75.479	76.071	77.137	77.615
Angka Partisipasi Sekolah 13 - 15 tahun	99,89%	102,08%	102,00%	94,11%	93,35%

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Makassar, 2021

Angka Kelulusan

Data tabel di bawah menunjukkan bahwa Angka Kelulusan Kota Makassar untuk tingkat SD sederajat mencapai 100% dalam lima tahun terakhir yang artinya seluruh siswa SD/MI yang masuk sekolah dasar, dapat menamatkan pendidikannya. Untuk SMP sederajat, Pada tabel di atas dapat dilihat angka kelulusan tahun 2020 sebesar 100%, Ujian Nasional jenjang SMP/MTs pada tahun 2016 sampai dengan 2020 yaitu 100% menerapkan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Kelulusan untuk tingkat SMP tidak mencapai 100% dikarenakan ada siswa yang terdaftar pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) didaftar oleh sekolah sebagai peserta ujian tetapi pada saat ujian mereka tidak hadir disebabkan berapa hal diantaranya ada siswa yang sakit pada ujian utama maupun ujian susulan, adanya mutasi siswa keluar daerah menjelang usia sekolah, terdapatnya siswa yang ganda pada daftar nominasi tetap (DNT) sehingga mengurangi angka kelulusan.

Tabel 2.26 | Angka Kelulusan Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI	27.924	23.831	24.599	25.090	25.150
Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI	27.924	23.831	24.599	25.090	25.150
Angka Kelulusan SD/MI%	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs	25.059	22.810	23.586	23.010	23.349
Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs	25.067	23.451	23.609	23.293	23.349
Angka Kelulusan SMP/MTs %	100%	97%	100%	99%	100%

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Makassar, 2021

Angka Melanjutkan

Berdasarkan tabel 2.27 di bawah dapat dilihat angka melanjutkan sekolah di Kota Makassar pada tahun 2020 untuk SD/MI ke SMP/MTs 97,86% yang artinya masih ada 2,14% peserta didik SD/MI yang tidak melanjutkan sekolahnya ke jenjang pendidikan lebih tinggi SMP/MTs. Sedangkan untuk peserta didik yang melanjutkan pendidikannya dari jenjang pendidikan Menengah Pertama ke Menengah Atas mencapai angka 103,69 di tahun 2020 sudah melebihi 100%, salah satu faktor yang mendukung pencapaian ini karena banyaknya siswa dari luar Kota Makassar yang bersekolah di SMA/SMK/MA yang berada di Kota Makassar.

Tabel 2.27 | Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs dan SMP/MTs ke SMA/MA Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs	27.916	25.108	24.734	24.376	24.611
Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI	27.924	23.831	24.599	25.090	25.150
Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs (%)	100%	105%	101%	97%	98%
Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK	23.853	22.352	23.815	24.183	24.210
Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs	25.059	22.810	23.586	23.010	23.349
Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/MA (%)	95%	98%	101%	105%	104%

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Makassar, 2021

Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Angka Pendidikan yang ditamatkan digunakan untuk mengetahui tingkat kualitas pendidikan penduduk dengan menggunakan jenjang pendidikan tertentu sebagai batasan minimalnya sebagai bahan analisis pasar kerja.

Nilai angka tamat berkisar antara 0 – 100. Semakin tinggi ijazah/STTB yang dimiliki oleh sebagian besar penduduk suatu wilayah maka mencerminkan semakin tinggi taraf intelektualitas masyarakat di wilayah tersebut.

Berdasarkan tabel 2.28 di bawah menunjukkan bahwa Kota Makassar pada tahun 2016 s.d 2020, yang berpendidikan setara Sekolah Dasar terus mengalami penurunan tertinggi tahun 2016 sebanyak 15,25% dan tahun 2020 turun menjadi 11,61% , dan yang berpendidikan

tamat SMP mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebesar 17,38 % dan tahun 2020 menjadi 20,91%.

Tabel 2.28 | Angka Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Pendidikan yang ditamatkan SD/MI/Paket A (%)	15,25%	14,07%	13,84%	11,61%	11,61%
Angka Pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs/ Paket B (%)	17,38%	17,60%	19,48%	20,91%	20,91%

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Makassar, 2021

Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah (APTS) adalah proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun. Semakin tinggi angka putus sekolah menggambarkan kondisi pendidikan yang tidak baik dan tidak merata. Begitu sebaliknya jika angka putus sekolah semakin kecil maka kondisi pendidikan di suatu wilayah semakin baik.

Berdasarkan tabel 2.29 di bawah menunjukkan bahwa angka putus sekolah pada jenjang pendidikan SD/MI/Paket A di Kota Makassar pada tahun 2020 sebesar 0,45%, pada jenjang SMP/MTs/Paket B nilai APTS sebesar 1,24%.

Tabel 2.29 | Angka Putus Sekolah Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah penduduk usia 7 - 12 tahun yang tidak bersekolah lagi	44	42	133	906	639
Jumlah siswa kelompok usia 7 - 12 tahun	160.452	153.533	153.126	150.325	140.994
Angka Putus Sekolah 7 - 12 tahun (%)	0,03%	0,03%	0,09%	0,60%	0,45%
Jumlah penduduk usia 13 - 15 tahun yang tidak bersekolah lagi	28	27	417	1.362	898
Jumlah siswa kelompok usia 13 - 15 tahun	74.188	77.047	77.594	72.593	72.451
Angka Putus Sekolah 13 - 15 tahun (%)	0,04%	0,04%	0,54%	1,88%	1,24%

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Makassar, 2021

Sekolah dengan Kondisi Bangunan Baik

Kondisi sarana pendidikan yang baik dan memadai sangat mempengaruhi penyelenggaraan proses belajar mengajar, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kualitas pendidikan itu sendiri. Pada tabel 2.30 di bawah Kondisi bangunan sekolah di Kota Makassar yang berada dalam kondisi baik pada tahun 2020 mencapai 93,01% untuk SD/MI dan SMP/MTs 93,12%. Angka ini sudah cukup baik, namun perlu ditingkatkan agar kualitas proses belajar mengajar dapat berkualitas. Selanjutnya data kondisi bangunan sekolah dalam kondisi baik dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.30 | Sekolah dengan Kondisi Bangunan Baik Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah sekolah SD/MI kondisi bangunan baik	337	464	482	474	492
Jumlah seluruh sekolah SD/MI	499	568	569	526	529
Persentase sekolah SD/MI kondisi bangunan baik (%)	67,54%	81,69%	84,71%	90,11%	93,01%
Jumlah sekolah SMP/MTs kondisi bangunan baik	161	208	209	244	257
Jumlah seluruh sekolah SMP/MTs	209	266	259	271	276
Persentase sekolah SMP/MTs kondisi bangunan baik (%)	77,03%	78,20%	80,69%	90,04%	93,12%

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Makassar, 2021

Rasio Ketersediaan Sekolah Per Penduduk Usia Sekolah Tingkat Pendidikan Dasar

Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah tingkat Pendidikan Dasar di Kota Makassar terus menunjukkan perbaikan selama lima tahun terakhir, dimana terjadi penurunan rasio sejak tahun 2016 dari angka 1:292,15 hingga pada tahun 2020 menjadi rasio 1:272,43 (60 sekolah untuk 17.529 penduduk) untuk jenjang SD/MI. Angka tersebut masih harus diturunkan, karena masih cukup jauh dari angka ideal, yakni 60 sekolah untuk 10.000 penduduk usia 7 - 12 tahun. Sebaliknya untuk jenjang SMP/MTs pada tahun 2020 telah mencapai rasio 1:262,5 atau 35:9.187,5 dimana kondisi idealnya hanya 35 sekolah untuk 10.000 penduduk usia 13 - 15 tahun.

Tabel 2.31 | Rasio Ketersediaan Sekolah Per Penduduk Usia Sekolah Tingkat Pendidikan Dasar

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah penduduk usia 7 - 12 tahun	145.782	139.121	142.069	143.005	144.114
Jumlah seluruh sekolah SD/MI	499	568	569	526	529
Rasio ketersediaan sekolah SD/MI per penduduk usia 7 - 12 tahun	1:292,15	1:244,93	1:249,68	1:271,87	1:272,43
Jumlah penduduk usia 13 - 15 tahun	74.188	77.047	77.594	72.593	72.451
Jumlah seluruh sekolah SMP/MTs	209	266	259	271	276
Rasio ketersediaan sekolah SMP/MTs per penduduk usia 13 - 15 tahun	1:354,97	1:289,65	1:299,59	1:267,87	1:262,5

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Makassar, 2021

Rasio Guru Per Murid Sekolah Pendidikan Dasar

Rasio guru per murid adalah perbandingan antara jumlah murid pada suatu jenjang sekolah dengan jumlah guru sekolah yang bersangkutan. Indikator ini menggambarkan beban kerja guru dalam mengajar, melihat mutu pengajaran di kelas. Semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin berkurang tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah.

Data memperlihatkan bahwa sejak 2016 s.d 2020, rasio guru murid SD/MI di Kota Makassar telah mengalami peningkatan. Tingginya rasio guru murid ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid di bangku SD/MI sehingga mutu pengajaran cenderung semakin meningkat. Tahun 2020 rasio guru Pendidikan Dasar menunjukkan angka 539 orang per 10.000 murid, atau dengan kata lain satu orang guru berbanding 18 orang murid, angka ini sudah sesuai standar nasional yaitu satu guru untuk melayani 20 orang murid untuk Pendidikan Dasar.

Tabel 2.32 | Rasio Guru Per Murid Sekolah Pendidikan Dasar Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah murid sekolah (SD/MI + SMP/MTs)	9.666	11.281	11.832	11.764	11.989
Jumlah guru sekolah (SD/MI + SMP/MTs)	231.374	233.077	230.386	223.999	222.331
Rasio guru per murid Pendidikan Dasar	1:417,77	1:484	1:513,57	1:525,18	1:539,24

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Makassar, 2021

2.3.1.2 Kesehatan

Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1.000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama

Menurunnya AKB dalam beberapa tahun terakhir di Kota Makassar menggambarkan adanya peningkatan dalam kualitas hidup dan pelayanan kesehatan masyarakat. Pencapaian indikator angka kematian bayi di Kota Makassar menunjukkan pencapaian yang baik dengan lebih rendahnya angka kematian bayi yaitu 1,58 per 1.000 kelahiran hidup (43 kematian bayi dari 27.191 kelahiran hidup). Angka ini menurun dari tahun 2016 yaitu 2,58/1000 KH (66 kematian bayi dari 25.614 kelahiran hidup). Angka kematian bayi pada tahun 2019 meningkat secara signifikan yaitu 1,63/1000 KH (44 kematian bayi dari 26.937 kelahiran hidup).

Tabel 2.34 di bawah ini menunjukkan bahwa pada tahun 2020 Angka kematian bayi mengalami penurunan dari 1,63 ke 1,58 serta mengalami peningkatan jumlah kelahiran dari 26.937 ke 27.191 bayi. Angka kematian bayi selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.33 | Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun)	66	41	45	44	43
Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 5 tahun)	87	54	48	44	43
Jumlah Kelahiran Hidup	25.614	26.018	25.911	26.937	27.191
Angka Kematian Bayi < 1 tahun per 1.000 kelahiran hidup	2,58	1,58	1,74	1,63	1,58
Angka Kematian Bayi < 5 tahun per 1.000 kelahiran hidup	3,40	2,08	1,85	1,63	1,58

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Makassar, 2021

Angka Kematian Neonatal

Angka Kematian Neonatal (AKN) adalah banyaknya kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama (dinyatakan dengan per 1000 kelahiran hidup) setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan.

Berdasarkan Tabel 2.35 di bawah, pada periode tahun 2016 s.d 2020 AKN tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu 44 kematian sedangkan AKN terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu 33 kematian. Perhatian terhadap upaya penurunan angka kematian neonatal (umur 0 – 28 hari) menjadi penting karena kematian neonatal memberi kontribusi terhadap kematian bayi.

Untuk lebih jelasnya data jumlah kematian bayi (<1 bulan), jumlah kelahiran hidup, dan AKN per 1.000 kelahiran hidup di Kota Makassar pada tahun 2016 s.d 2020 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.34 | Angka Kematian Neonatal per 1.000 Kelahiran Hidup Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 bulan)	37	33	40	44	33
Jumlah Kelahiran Hidup	25.614	26.018	25.911	26.937	27.191
Angka kematian Neonatal per 1.000 kelahiran hidup	1,44	1,27	1,54	1,63	1,21

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Makassar, 2021

Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup.

Tabel 2.35 di bawah dapat kita lihat dalam kurun waktu periode tahun 2016 s.d 2020, jumlah kematian ibu yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas di Kota Makassar tertinggi terjadi pada tahun 2020 dengan jumlah kematian sebanyak 12 sedangkan jumlah kematian ibu yang terendah adalah pada tahun 2017 dan 2018 dengan jumlah kematian ibu masing-masing sebanyak 5. AKI tertinggi terjadi pada tahun 2019 dimana terdapat 44 kematian ibu yang disebabkan oleh kehamilan atau persalinan sampai 42 hari setelah melahirkan pada periode tersebut per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan AKI terendah terjadi pada tahun 2017 dan 2018.

Untuk lebih jelasnya data jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas, jumlah kelahiran serta nilai AKI di Kota Makassar dalam lima pada tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.35 | Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Tahun 2016 s.d 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas	6	5	5	10	12
Jumlah Kelahiran Hidup	25.614	26.018	25.911	26.937	27.191
Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	23,42	19,22	19,30	37,12	44,13

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Makassar, 2021

Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan salah satu Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) yang merupakan bentuk fasilitas pelayanan kesehatan yang dikelola oleh masyarakat.

Tabel 2.37 di bawah dapat diketahui bahwa Jumlah Posyandu di Kota Makassar pada tahun 2020 sebanyak 1.010 unit untuk melayani 140.393 balita atau dengan rasio 7.19 per-1000 bayi. Dengan kata lain ditahun 2020, satu posyandu di Kota Makassar untuk melayani rata-rata 139 (140.393/1.010) balita. Rasio Posyandu persatuan balita Kota Makassar dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.36 | Rasio Posyandu Per Satuan Balita Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Posyandu	1.000	1.000	1.010	1.010	1.010
Jumlah Balita	152.187	154.307	137.151	139.539	140.393
Rasio Posyandu Per Balita	1:152,19	1:154,31	1:135,79	1:138,16	1:139

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Makassar, 2021

Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk

Rasio Puskesmas, Poliklinik dan pustu untuk melihat fasilitas kesehatan pertama yang berfungsi sebagai pusat pembangunan kesehatan serta pembinaan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan serta pelayanan kesehatan tingkat pertama. Dengan rasio ini dapat melihat penyelenggaraan upaya kesehatan secara menyeluruh, terpadu merata dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat. Tabel di bawah menunjukkan bahwa pada tahun 2020 rasio Puskesmas, poliklinik dan pustu sebanyak 0,243 per 1.000 penduduk. Selengkapnya data rasio Puskesmas, poliklinik, pustu persatuan penduduk Tahun 2016 s.d 2020 Kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.37 | Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Puskesmas, Poliklinik, Pustu	232	306	261	262	346
Jumlah Penduduk	1.469.601	1.488.717	1.508.154	1.526.677	1.423.877
Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Penduduk	1: 6.334,49	1: 4.865,09	1: 5.778,37	1: 5.827,01	1: 4.115,25

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Makassar, 2021

Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Rasio Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk juga untuk melihat ketersediaan fasilitas layanan kesehatan untuk melayani masyarakat. Jumlah Rumah Sakit yang ada di Kota Makassar pada tahun 2020 sebanyak 50 unit baik swasta maupun pemerintah. 50 Rumah Sakit ini untuk melayani 1.423.877 orang, atau 1 : 28.477,54, atau dengan kata lain 1 Rumah Sakit untuk melayani rata-rata 28.477 orang penduduk Makassar. Selengkapnya Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk Tahun 2016 s.d 2020 Kota Makassar dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.38 | Rasio Rumah Sakit Per SatuanPenduduk Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Rumah Sakit	46	49	50	50	50
Jumlah Penduduk	1.469.601	1.488.717	1.508.154	1.526.677	1.423.877
Rasio Rumah Sakit Per Penduduk	1: 31.947,85	1: 30.381,98	1: 30.163,08	1: 30.533,54	1: 28.477,54

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Makassar, 2021

Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Rasio tenaga medis menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk. Rasio tenaga medis di Kota Makassar terus mengalami perubahan setiap tahunnya. Rasio tenaga medis tertinggi adalah pada tahun 2016 dimana 1 orang tenaga medis melayani sekitar 655 pasien. Sedangkan rasio terendah adalah pada tahun 2017, dimana 1 orang tenaga medis melayani sekitar 926 pasien. Pada tabel di bawah terlihat bahwa pada tahun 2020 adalah 1:713,01 atau rasio tenaga medis per 1.000 penduduk sebesar 1,31. Rasio tenaga medis per satuan penduduk tahun 2016 s.d 2020 di Kota Makassar dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.39 | Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Tenaga Medis	2.242,00	1.606	1.737	2.072	1.997
Jumlah Penduduk	1.469.601	1.488.717	1.508.154	1.526.677	1.423.877
Rasio Tenaga Medis Per Penduduk	1: 655,49	1: 926,97	1: 868,25	1: 736,81	1: 713,01

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Makassar, 2021

Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Sebagai suatu kebutuhan dasar, setiap individu bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga pada dasarnya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan adalah tanggung jawab setiap warganegara. Mengingat kebutuhan warga negara terhadap barang/jasa kesehatan sangat vital dan dengan karakteristik barang/jasa kesehatan yang unik dan kompleks, maka peranan pemerintah di bidang kesehatan harus distandarisasi agar warga negara dapat memenuhi kebutuhannya di bidang kesehatan sehingga pelaksanaannya melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM).

SPM sekurangnya mempunyai dua fungsi yaitu (i) memfasilitasi Pemerintah Daerah untuk melakukan pelayanan publik yang tepat bagi masyarakat dan (ii) sebagai instrumen bagi masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah di bidang pelayanan publik bidang kesehatan. Beberapa capaian SPM kesehatan di Kota Makassar selama lima tahun terakhir tergambar melalui tabel berikut:

Tabel 2.40 | Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 (%)	95,88%	95,11%	94,91%	92,71%	92,29%
2	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	97,36%	97,39%	97,53%	94,16%	97,92%
3	Cakupan pelayanan nifas (%)	91,11%	90,42%	96,02%	83,14%	85,24%
4	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)	84,53%	77,29%	81,10%	91,18%	83,23%
5	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	95,11%	100%	100%	109,73%	92,14%
6	Cakupan kunjungan bayi (%)	96,53%	96,56%	97,90%	126,9%3	88,30%
7	Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate Per 100.000 penduduk < 15 th	0,003	0,0041	0,0026	0,0026	0,001
8	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)	100%	100%	100%	100%	100%
9	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak (%)	99,18%		101,90%	102,43%	98,33%
10	Cakupan balita pneumonia yang ditangani (%)	9,12%	6,02%	6,75%	10,11%	6,69%
11	Cakupan pelayanan anak balita (%)	88,80%	90,30%	87,72%	90,42%	77,02%
12	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat (%)	96,35%	27,68%	100%	99,37%	96,31%
13	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)	100%	100%	100%	100%	100%
14	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) (%)	100%	100%	100%	100%	100%
15	Angka Kejadian Malaria per 100.000 penduduk	13,33	16,72	12,76	10,28	7,46
16	Cakupan Desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI) (%)	100%	100%	100%	100%	100%
17	Prevalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk (%)	0,30%	0,33%	0,36%	0,35%	0,21%
18	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	0,05%	0.0%7	0,05%	0,06%	0,04%

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Makassar, 2021

2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan. Jalan kondisi baik adalah semua ruas jalan dengan permukaan pengerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi baik menurut kriteria teknis. Hal ini mengindikasikan kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan. Dari menunjukkan bahwa proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik menunjukkan peningkatan selama kurun waktu tahun 2016 s.d 2020. Hal ini disebabkan karena ketersediaan Anggaran, tersedianya ruas-ruas jalan yang perlu ditangani, peralatan yang memadai dan juga didukung oleh program gerakan sapu lubang Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dimana satuan tugas (satgas) sapu lubang yang selalu siap melakukan penanganan pada jalan-jalan yang berlubang dan pemeliharaan jalan dalam kondisi apa pun.

Tabel 2.41 | Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Panjang jalan dalam kondisi baik (km)	1.515,00	1.517,00	1.543,32	1.550,40	1.552,96
Panjang seluruh jalan (km)	1.593,46	1.593,46	1.593,46	1.593,46	1.593,46
Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	95,08%	95,20%	96,85%	97,30%	97,46%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, 2021

Persentase Jalan Kota Dalam Kondisi Baik (> 40 Km/Jam)

Persentase jalan kota yang dapat dilalui kendaraan dengan kecepatan minimal 40 km/jam di Kota Makassar secara konsisten terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Panjang jalan kota dalam kondisi baik sebesar 1.099,50 pada tahun 2016 meningkat menjadi 1.418,32 di tahun 2020 atau meningkat sebesar 20,01%. Hal ini disebabkan karena perbaikan ruas jalan yang rusak yang didukung dengan dibentuknya satgas sapu lubang Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar yang selalu siap siaga melakukan pemeliharaan jalan dalam kondisi apa pun.

Tabel 2.42 | Persentase Jalan Kota Dalam Kondisi Baik (> 40 Km/Jam) Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Panjang jalan Kota dalam kondisi baik (> 40 Km/Jam) (km)	1.099,50	1.240,76	1.313,05	1.403,05	1.418,32
Panjang seluruh jalan (km)	1.593,46	1.593,46	1.593,46	1.593,46	1.593,46
Persentase Panjang jalan Kota dalam kondisi baik (> 40 Km/Jam)	69%	78%	82%	88%	89%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, 2021

Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Saluran Pembuangan Air/Drainase > 1,5 m

Trotoar dan saluran drainase merupakan bagian Ruang Milik Jalan (Rumija). Lebar minimal trotoar yaitu 1,5 m. Umumnya ruas jalan Kota Makassar dilengkapi dengan saluran drainase pada bagian kanan dan kiri jalan, termasuk jalan lingkungan. Sedangkan trotoar, tidak diterapkan pada jalan lingkungan karena dimensi ruang jalan pada jalan lingkungan relatif kecil. Dari tabel di bawah terlihat persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan (minimal 1,5 m) tahun 2016 s.d 2020 sebesar 40.28% dari total panjang jalan 1.593,46 Km, belum ada pertambahan panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase.

Tabel 2.43 | Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase > 1,5 Meter
Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase (min 1,5 m)(km)	641,21	641,21	641,21	641,21	641,92
Panjang seluruh jalan (km)	1.593,46	1.593,46	1.593,46	1.593,46	1.593,46
Persentase Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase (min 1,5 m)	4024%	40%	40%	40%	40%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, 2021

Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi, yaitu : 1) Fasilitas air bersih, 2) Pembuangan tinja, 3) Pembuangan air limbah, 4) Pembuangan sampah. Dari tabel di bawah terlihat pada tahun 2019 sebesar 389.595 rumah tinggal yang berakses sanitas dari keseluruhan rumah tinggal di Kota Makassar sejumlah 391.113, sehingga diperoleh capaian persentase rumah tinggal bersanitasi adalah sebesar 99,61 % atau sekitar 0,39 % Rumah tinggal yang belum berakses sanitasi. Akses sanitasi di Kota Makassar sebagian besar menggunakan tangki septik dan sisanya masih menggunakan IPAL komunal yang tersebar di beberapa Kecamatan Kota Makassar. Berikut adalah gambaran rumah tinggal berakses sanitasi di Kota Makassar dalam kurun waktu 2016-2020:

Tabel 2.44 | Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi	351.544	356.352	384.186	389.595	389.595
Jumlah rumah tinggal	357.311	360.884	386.167	391.113	444.154
Persentase rumah tinggal berakses sanitasi %	98%	99%	99%	100%	88%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, 2021

Persentase Sempadan Sungai yang Digunakan oleh Bangunan Liar

Sempadan Sungai adalah ruang di kiri dan kanan palung sungai di antara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggung atau di antara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggung (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.

Sempadan Sungai hanya dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, antara lain kegiatan menanam sayuran dan bangunan ketenagalistrikan. Untuk sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendalian banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan menanam tanaman selain rumput, mendirikan bangunan dan mengurangi dimensi tanggul.

Panjang seluruh sempadan sungai di Kota Makassar yaitu 23,10 km, masing-masing sempadan Sungai Tallo yang melalui wilayah Kota Makassar sepanjang 10 km dan sempadan Sungai Pampang sepanjang 13,3 km. Panjang sempadan sungai di Kota Makassar yang digunakan oleh bangunan liar terus menurun dalam lima tahun terakhir, dimana data tahun 2020 menunjukkan sepanjang 1,5 km atau 6,5% yang masih tersisa, sehingga penataan tepi sungai harus terus dilaksanakan.

Tabel 2.45 | Persentase Sempadan Sungai yang Digunakan oleh Bangunan Liar Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Panjang sempadan sungai sungai yang digunakan oleh bangunan liar (km)	2,00	2,00	2,00	1,50	1,50
Panjang seluruh sempadan sungai (km)	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10
Persentase sempadan sungan yang digunakan oleh bagunan liar (%)	9%	9%	9%	6%	6%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, 2021

Persentase Penduduk Berakses Sumber Air Minum

Persentase penduduk berakses air minum adalah proporsi jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan. Yang dimaksud akses air minum meliputi air minum yang berasal dari air mineral, air leding/PAM, pompa air, sumur, atau mata air yang terlindung dalam jumlah yang cukup sesuai standar yakni tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak mengandung logam berat.

Tabel 2.47 menjelaskan bahwa pada tahun 2020 jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan 1.074.339 jiwa dari keseluruhan penduduk Kota Makassar sejumlah 1.484.912 jiwa, sehingga diperoleh capaian persentase penduduk berakses air minum adalah sebesar 72,35%. Penyediaan air minum di Kota Makassar dibedakan atas sistem perpipaan dan non perpipaan. Sistem perpipaan sebagian besar dikelola oleh PDAM sekitar 63,57 % sedangkan 3,78 % sistem non perpipaan berupa sumur dalam yang dibiayai oleh APBD Kota Makassar. Sebagian wilayah kota belum terakses sumber air minum yaitu pada wilayah utara Kota Makassar (Kecamatan Tallo dan Kecamatan Tamalanrea) serta wilayah timur kota (Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Manggala).

Data perkembangan jumlah penduduk Kota Makassar yang berakses air minum untuk tahun 2016 s.d 2020 secara rinci disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.46 | Persentase Penduduk Berakses Sumber Air Minum Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindung dan berkelanjutan	1.087.066	1.101.568	1.257.782	968.421	1.074.339
Jumlah seluruh penduduk	1.472.441	1.491.645	1.659.777	1.480.480	1.484.912
Persentase penduduk berakses sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan (%)	74%	74%	76%	65%	72%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, 2021

Persentase Area Kawasan Kumuh

Luas kawasan permukiman kumuh Kota Makassar sesuai SK Walikota sebesar 740,10 yang tersebar pada 103 kelurahan yang terdiri dari kumuh berat 36 kelurahan, kumuh Ringan 50 kelurahan, kumuh ringan 17 kelurahan. Sepanjang empat tahun terakhir mulai tahun 2016-2019, persentase area Kawasan kumuh di Kota Makassar terus mengalami penurunan dari 650,74 Ha tahun 2016 menjadi 423,85 Ha pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020 persentase area kawasan kumuh tahun 2020 meningkat menjadi 423,85 atau 2,43%. Dalam hal pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh ada beberapa poin yang menjadi catatan sebagai berikut:

- 1. Pada Umumnya masyarakat menempati lahan ilegal pada kawasan permukiman kumuh.
- 2. Terdapat masyarakat menempati permukiman kumuh pada bantaran sungai, kanal, drainase sehingga diperlukan pembenahan, peremajaan, pemugaran, pemukiman kembali pada kawasan tersebut.
- 3. Perlunya Penataan jalan lingkungan pada daerah bantaran sungai, kanal dan drainase.
- 4. Perlunya penanganan air limbah domestik dengan menggunakan IPAL Komunal dan septik komunal agar tidak terjadi pencemaran air tanah

Tabel 2.47 | Persentase Area Kawasan Kumuh Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Luas area kawasan kumuh (Ha)	650,74	523,25	469,07	389,10	423,85
Luas wilayah (Ha)	17.577	17.577	17.577	17.577	17.577
Persentase area kawasan kumuh (%)	3,70%	2,98%	2,67%	2,21%	2,41%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, 2021

Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan

Penanganan sampah di Kota Makassar semakin meningkat setiap tahunnya, dimana sejak tahun 2017 pengelolaan sampah dipusatkan pada masing-masing Kecamatan. Penanganan sampah di Kota Makassar relatif menurun, dimana data memperlihatkan tahun 2015 penanganan sampah mencapai 92,42%, menurun menjadi 75% pada tahun 2019, walaupun secara total volume sampah yang tertangani meningkat dari 250.542 ton menjadi 426.940 Ton. Pada tahun 2020 menurun menjadi 73,46%, walaupun secara total volume sampah berkurang 63.140 ton, dari tahun 2019. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan volume yang dihasilkan oleh masyarakat lebih cepat daripada pertumbuhan kemampuan penanganan sampah itu sendiri. Adapun persentase penanganan sampah disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.48 | Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan Tahun 2016 s.d 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Volume sampah yang diguna ulang, daur ulang, pengelolaan di tempat pengelolaan sampah sebelum masuk TPA	237.851,88	290.222,36	334.194,91	320.560,05	267.265,98
Total volume sampah	257.363,79	304.722,55	386.626,00	426.940,50	363.800,57
Persentase pengurangan sampah (%)	92,42%	95,24%	86,44%	75,08%	73,46%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, 2021

Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk

Tempat Pemakaman Umum (TPU) adalah areal tempat pemakaman milik/dikuasai pemerintah daerah yang disediakan untuk umum yang berada di bawah pengawasan, pengurusan dan pengelolaan pemerintah daerah. Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman mayat yang pengelolaannya dilakukan oleh yayasan/badan sosial/badan keagamaan. Tempat Pemakaman Khusus (TPK) adalah areal tanah yang digunakan untuk pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus. Selama kurun waktu 5 tahun mulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 tidak ada penambahan tempat pemakaman umum. Sementara jumlah penduduk berfluktuasi sehingga rasio perbandingan antara daya tampung dan jumlah penduduk juga berfluktuasi. Rasio tempat pemakaman disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.49 | Rasio Tempat Pemakaman Umum Persatuan Penduduk Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah daya tampung tempat pemakaman umum	183.726	183.726	183.726	183.726	183.726
Jumlah seluruh penduduk	1.658.503	1.668.314	1.776.290	1.671.000	1.484.912
Persentase daya tampung tempat pemakaman umum (%)	11,08%	11,01%	10,34%	10,99%	12,37%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, 2021

Rasio Rumah Ibadah Per Satuan Penduduk

Tahun 2020, jumlah rumah ibadah di Kota Makassar sebanyak 1.547 unit, bertambah 56 rumah ibadah dari tahun 2016 yang berjumlah 1.491 unit. Jumlah penduduk Kota Makassar tahun 2020 sebanyak 1.423.877 orang, yang berarti 1 rumah ibadah mampu menampung rata-rata 920 orang.

Tabel 2.50 | Jumlah Rumah Ibadah Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Rumah Ibadah Umat Islam	1.323	1.358	1.365	1.365	1.370
Rumah Ibadah Umat Kristen, dan Katolik	143	146	147	147	150
Rumah Ibadah Umat Budha	23	25	25	25	25
Rumah Ibadah Umat Hindu	2	2	2	2	2
Jumlah Rumah Ibadah	1.491	1.531	1.539	1.539	1.547

Sumber: Bagian Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Kota Makassar, 2021

Rasio tempat ibadah per satuan penduduk tahun 2016 s.d 2020 cukup dinamis yang tiap tahunnya terjadi peningkatan. Hal ini terjadi karena pesngaruh pertumbuhan penduduk. Tercatat pada tahun 2020 rasio ini adalah 1:920. Data rasio tempat ibadah persatuan penduduk selama lima tahun terakhir mulai dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.51 | Rasio Rumah Ibadah Per Satuan Penduduk Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Rumah Ibadah	1.491	1.531	1.539	1.539	1.547
Jumlah Penduduk	1.469.601	1.488.717	1.508.154	1.526.677	1.423.877
Rasio rumah ibadah per satuan penduduk	1: 985,65	1: 972,38	1: 979,96	1: 991,99	1: 920,41

Sumber: Bagian Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Kota Makassar, 2021

2.3.1.4 Penataan Ruang

Luasan Ruang Terbuka Hijau dari Luas Wilayah

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Agar kegiatan budidaya tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, pengembangan ruang terbuka hijau dari luas kawasan perkotaan paling sedikit 20% (dua puluh persen) pada tahun 2030 (RTRW Kota Makassar Tahun 2015-2034).

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mensyaratkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada wilayah kota paling sedikit 30 persen dari luasan wilayah, Luasan RTH terdiri dari 20 Persen RTH Publik dan 10 Persen RTH Privat. Berdasarkan data pada tabel di atas angka persentase RTH Publik YoY, mengalami

peningkatan dari tahun 2016 – 2018, penurunan pada tahun 2019 serta peningkatan pada tahun 2020. Peningkatan persentase pada tahun 2018 sebesar (0,40%) dari dua tahun sebelumnya, penurunan terjadi pada tahun 2019 sebesar (-0,182%) dari tahun sebelumnya dan peningkatan pada tahun 2020 sebesar (0,038%).

Peningkatan yang terjadi pada 3 (tiga) tahun pertama akibat adanya lahan ruang terbuka hijau yang belum teridentifikasi serta belum terjadinya penyerahan PSU kepada Dinas Lingkungan Hidup. Sementara pada tahun 2019 terjadi penurunan dikarenakan adanya alih fungsi lahan RTH.

Tabel 2.52 | Luas Ruang Terbuka Hijau Publik Per Luas Wilayah Kota Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Luas area ruang terbuka hijau publik (Ha)	1,092.21	-	1,162.21	1,130.29	1,136.87
Luas wilayah (Ha)	17,577	17,577	17,577	17,577	17,577
Persentase luas area ruang terbuka hijau publik	0.06	-	0.07	6.43	0.06

Sumber: Dinas Penataan Ruang Kota Makassar, 2021

Rasio Bangunan ber-IMB Per Satuan Bangunan

Izin mendirikan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan adalah perbandingan jumlah bangunan ber-IMB terhadap jumlah seluruh bangunan yang ada. Data tahun 2018 menunjukkan hanya sekitar 1,3 bangunan yang ber-IMB dari setiap 100 unit bangunan.

Tabel 2.53 | Rasio Bangunan ber-IMB Per Satuan Bangunan Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah bangunan ber-IMB	4.111	5.452	4.506	4.762	5.224
Jumlah Bangunan	320.855	320.855	357.939	273.822	274.852
Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	1,28	1,70	1,26	1,74	1,90

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, 2021

Data jumlah bangunan ber-IMB dihitung berdasarkan jumlah IMB yang dikeluarkan tiap tahun. Terkait data jumlah bangunan ber-IMB keseluruhan bangunan di Kota Makassar belum pernah dilakukan pendataan.

Catatan: Jumlah bangunan tidak ada dalam data terpilah DPMPTSP Bidang Pelayanan Belakang Teknis (IMB)

Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW

Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW Tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yaitu 100. Semua program dan kegiatan yang tertuang di dalam dokumen perencanaan berpedoman kepada RTRW Kota Makassar yaitu rencana pola ruang dan rencana struktur ruang sehingga untuk kesesuaiannya mencapai 100%.

Tabel 2.54 | Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Kesesuaian program/kegiatan pembangunan terhadap pola dan struktur ruang	100	100	100	100	100
Dokumen RTRW	100	100	100	100	100
Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Penataan Ruang Kota Makassar, 2021

2.3.1.5 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rasio Rumah Layak Huni

Rasio rumah layak huni adalah perbandingan jumlah rumah layak huni dengan jumlah seluruh rumah yang ada. Pada tahun 2016 – 2020 rasio rumah layak huni di kota Makassar sebanyak 258.268 berbanding jumlah penduduk sebanyak 1.423.877 jiwa, atau dengan kata lain dari 100 penduduk Makassar, ada kurang lebih orang yang tinggal di rumah tidak layak huni dan 85 orang tinggal rumah yang layak huni (85%). Data rumah layak huni Kota Makassar tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 2.55 | Rasio Rumah Layak Huni Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah rumah layak huni (unit)	243.685	251.862	251.635	247.749	258.268
Jumlah penduduk (orang)	1.469.601	1.488.717	1.508.154	1.526.677	1.423.877
Rasio rumah layak huni	1: 6,03	1: 5,91	1: 5,99	1: 6,16	1: 5,51

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar, 2021

Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

Cakupan ketersediaan rumah layak huni selama lima tahun terakhir mulai dari 2016-2020 mengalami peningkatan dan penurunan. Persentase cakupan ketersediaan rumah layak huni tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 99,74 dan terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu 97,75.

Tabel 2.56 | Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah seluruh rumah layak huni	243.685	247.262	251.635	247.749	253.748
Jumlah seluruh rumah	249.286	252.370	252.386	252.386	254.397
Cakupan ketersediaan rumah layak huni	97,75%	97,98%	99,70%	98,16%	99,74%

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar, 2021

Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau

Jumlah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Makassar sejak tahun 2016 s.d 2020 terus mengalami peningkatan, namun jumlah Rumah Tangga yang menempati rumah layak huni juga meningkat, dimana pada tahun 2020 jumlah MBR yang telah bisa menempati rumah layak huni sudah mencapai 99,74%, dimana dari 252.748 masyarakat berpenghasilan rendah, yang telah menempati rumah layak huni dan terjangkau adalah sebanyak 254.397 MBR. Rata-rata peningkatan jumlah rumah tangga MBR di Kota Makassar sejak 5 tahun terakhir rata-rata 1.704 rumah tangga setiap tahunnya seperti yang tergambar pada tabel berikut:

Tabel 2.57 | Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau	243.685	247.262	251.635	247.749	253.748
Jumlah rumah tangga MBR	249.286	252.370	252.386	252.386	254.397
Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	97,75%	97,98%	99,70%	98,16%	99,74%

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar, 2021

Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh

Luas wilayah pemukiman kumuh Kota Makassar tahun 2016 adalah 676,31 km2 yang berarti dari luas total wilayah Kota Makassar 3,85% wilayah di Kota Makassar merupakan lingkungan permukiman kumuh. Namun jumlah itu menurun menjadi 2,17% pada tahun 2020 dimana luas pemukiman kumuh di Kota Makassar tinggal 382,29. Selengkapnya data persentase lingkungan pemukiman kumuh Kota Makassar tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.58 | Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Luasan lingkungan permukiman kumuh (Ha)	676,31	676,31	650,74	382,29	382,29
Luasan wilayah (Ha)	17.577	17.577	17.577	17.577	17.577
Persentase luasan lingkungan permukiman kumuh (%)	3,85%	3,85%	3,70%	2,17%	2,17%

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar, 2021

Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan

Data untuk luasan pemukiman kumuh yang tahun 2016 yang tertangani 63,79 ha, luas permukiman kumuh 676,31 ha. Namun data tersebut dapat menunjukkan permukiman kumuh di kota Makassar pada tahun 2020 mengalami penurunan yang besar dibandingkan dengan tahun 2018. Persentase luasan permukiman kumuh pada tahun 2016 sebesar 9,43 % mengalami peningkatan menjadi 70%. Persentase luas pemukiman kumuh di Kawasan perkotaan Kota Makassar tahun 2016-2020 tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 2.59 | Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Luasan permukiman kumuh yang tertangani (Ha)	63,79	63,79	25,57	268,46	268,46
Luasan permukiman kumuh (Ha)	676,31	676,31	650,74	382,29	382,29
Persentase lingkungan permukiman kumuh (%)	9,43%	9,43%	3,93%	70,22%	70,22%

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar, 2021

Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan

Jumlah rumah tangga kumuh perkotaan Kota Makassar pada tahun 2016 meningkat secara drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sehingga proporsi rumah tangga kumuh perkotaan di Kota Makassar meningkat menjadi 2,25%. Meski demikian rumah tangga kumuh pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 2,02%. Pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 1,05 persen . Hal ini berarti masih ada 1 persen leb1h rumah tangga di kota Makassar yang tinggal rumah yang masuk kategori tidak layak huni atau kumuh. Data proporsi

rumah tangga kumuh di kota Makassar. Data proporsi rumah tangga kumuh di Kota Makassar tahun 2016-2020 selengkapnya tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.60 | Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah rumah tangga kumuh perkotaan	5.601	5.108	4.407	2.637	2.649
Jumlah seluruh rumah	249.286	252.370	252.386	252.386	253.397
Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan (%)	2,25%	2,02%	1,75%	1,04%	1,05%

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar, 2021

2.3.1.6 Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat

Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas) pada tahun 2016 sebanyak 3.025 orang dengan wilayah pelayanan 143 kelurahan dan tahun 2017 masih dengan jumlah yang sama, yang seharusnya petugas perlindungan masyarakat bertambah seiring bertambahnya wilayah pelayanan menjadi 153 kelurahan. Dari tahun 2018-2020 petugas perlindungan masyarakat, juga masih dalam jumlah yang sama sebanyak 3.210 orang, mengalami sedikit kenaikan dari yang di targetkan 5.340 orang. Hal ini disebabkan tidak adanya fasilitas bagi petugas perlindungan masyarakat di setiap kelurahan., Tidak adanya dukungan anggaran bagi program perencanaan bidang pembinaan perlindungan masyarakat . sampai padsa tahun 2020, terdapat 300 Orang telah mendapatkan pelatihan dan telah diberdayakan, keterlibatannya dalam penanganan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Selengkapnya data cakupan petugas perlindungan masyarakat di Kota Makassar dalam lima tahun terakhir mulai dari tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.61 | Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
100 orang petugas perlindungan masyarakat di Kota Makassar	3.025	3.025	3.210	3.210	3.210
1 Wilayah kerja Kota Makassar	143	153	153	153	153
Cakupan petugas perlindungan masyarakat (%)	21,15%	19,77%	20,98%	20,98%	20,98%

Sumber: Satpol PP Kota Makassar, 2021

Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan (K3)

Jumlah pelanggaran Ketenteraman, Ketertiban dan keindahan (K3) cukup fluktuatif dengan angka tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebanyak 1.655 pelanggaran dan hanya mampu diselesaikan sebanyak 306 pelanggaran atau dengan cakupan sebesar 18%. Jumlah pelanggaran semakin menurun pada tahun 2020 dengan jumlah pelanggaran 645 dan yang terselesaikan sebanyak 534 pelanggaran. Jumlah pelanggaran K3 yang terjadi pada tahun 2016 sebanyak 1.016 dan terjadi kenaikan kasus pelanggaran pada tahun 2017 , jika di bandingkan dengan tahun 2020 sebanyak 645 pelanggaran atau penurunan sebesar 39%. atau dengan capaian penyelesaian meningkat sebesar 64,3%. Pelanggaran ini disebabkan antara lain:

- 1. Masyarakat atau pelanggar belum paham tentang Perda No.10 Tahun 1990.
- 2. Kurangnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas.

- 3. Kurangnya personil.
- 4. Banyaknya pedagang yang bukan warga Makassar sehingga sulit untuk memberikan pemahaman tentang Perda yang berlaku.
- 5. Banyaknya pedagang musiman.

Data tingkat penyelesaian pelanggaran K3 selama lima tahun terakhir mulai dari tahun 2016 – 2020 dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.62 | Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Pelanggaran K3 yang terselesaikan	177	306	316	195	534
Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol PP	1.280	1.655	1.108	1.016	645
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (%)	13,83%	18,49%	28,52%	19,19%	82,79%

Sumber: Satpol PP Kota Makassar, 2021

Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran

Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran dari tahun 2016 ke 2017 ada perbedaan jumlah kendaraan mobil pemadam kebakaran untuk 2016 jumlah 70 Unit dan Untuk 2017 jumlah 56 unit ini disebabkan karna 2017 ada kekurangan unit sekitar 14 Unit, karna 14 unit ini tidak layak pakai karna usia kendaraan yang sudah tua .untuk tahun 2018 jumlah unit kendaraan tetap jumlahnya yaitu 56 Unit ,dan ditahun 2019 jumlah kendaraan ada penurunan sekitar 55 unit ini dikarenakan ada beberapa Unit Kendaraan yang dilelang dan dihapus yaitu berjumlah 16 Unit kendaraan mobil pemadam sehingga untuk 2020 jumlah kendaraan mobil Pemadam Kebakaran 52 unit.

Cakupan pelayanan bencana kebakaran Mengalami perubahan persentase disebabkan karna adanya perubahan jumlah penduduk disertai berkurangnya jumlah armada pemadam kebakaran sehingga cakupan pelayanan bencana kebakaran ikut terjadi perubahan persentase.

Tabel 2.63 | Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran (unit)	70	56	56	53	52
Jumlah Penduduk (jiwa)	1.469.601	1.488.717	1.508.154	1.526.677	1.423.877
Cakupan pelayanan bencana kebakaran	0,0048%	0,0038%	0,0037%	0,0035%	0,3652%

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar, 2021

Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran

Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan WMK adalah rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada pemukiman, bangunan gedung, pabrik/industri dan tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada kawasan hutan dan lahan dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK dimulai saat menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba di tempat kejadian kebakaran, yang langsung melakukan tindakan pemadaman api, penyelamatan guna pengurangan risiko kebakaran dengan waktu minimal yang diperlukan.

Tingkat Waktu Tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran dalam kurun waktu tahun 2016 s.d 2020 rata-rata di atas 90%. Jangkauan kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit dari jumlah kebakaran dan tanggap waktu ditahun 2016 ke tahun 2017 tidak terjadi perubahan yang signifikan dikarenakan jumlah kasus kebakaran dan jumlah tanggap waktu tidak jauh berbeda, sementara pada tahun 2018 terjadi peningkatan jumlah kasus kebakaran sedangkan ditahun 2019 terjadi peningkatan yang sangat signifikan disebabkan karna kondisi alam yang cukup panas yang mengakibatkan terjadinya kebakaran di tempat pembuangan akhir sampah yang berulang-ulang sehingga memberikan kontribusi pada peningkatan kasus kebakaran, untuk tahun 2020 terjadi penurunan kasus kebakaran disebabkan karena antisipasi masyarakat meningkat yang lebih banyak tinggal di rumah masing-masing karena adanya Pandemi Covid-19 ,akan tetapi Persentase Response Time Rate daerah layanan terus meningkat karna terjadi perluasan jangkauan pelayanan dengan bertambahnya posko – posko di wilayah Kota Makassar.

Tabel 2.64 | Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah ketetapan waktu tindakan pemadam kebakaran (< 1 jam setelah pengaduan (kasus)	159	138	205	300	142
Jumlah kejadian kebakaran (kasus)	169	151	208	305	142
Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan WMK (%)	94,08%	91,39%	98,56%	98,36%	100,00%

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar, 2021

Persentase Penegakan PERDA

Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dengan fungsinya sangat strategis yaitu sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Pada Tahun 2020 Jumlah pelanggaran Perda sebanyak 5559 pelanggar, sedangkan Jumlah penyelesaian penegakan Perda sebanyak 4603 pelanggar sehingga persentase penegakan Perda sebesar 82, 8 %. Dari tahun 2016 sampai 2020 teridentifikasi adanya peningkatan jumlah Penegakan Peraturan Daerah berdasarkan jumlah prestasi Penegakan Perda. Hal ini disebabkan karena adanya kegiatan Penyuluhan Perda dan Peraturan Walikota kepada masyarakat Kota Makassar sehingga tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang Perda yang ada di Kota Makassar semakin baik. Faktor pendukung lainnya adalah adanya ketersediaan anggaran dalam melakukan Penegakan Peraturan Daerah, tersedianya Sarana dan Prasarana, adanya kebijakan pimpinan untuk membentuk Tim Penegakan Perda dan Perwali serta hubungan koordinasi dengan Instansi terkait telah terjalin dengan baik.

Tabel 2.65 | Persentase Penegakan PERDA Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah penyelesaian penegakan Perda	592	190	435	335	4.603
Jumlah pelanggaran Perda	908	280	484	400	5.559
Persentase penegakan Perda (%)	65,20%	67,86%	89,88%	83,75%	82,80%

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar, 2021

2.3.1.7 Sosial

Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Untuk tahun 2019 jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial telah mencapai 100% yang artinya bahwa semua PMKS yang patut mendapat bantuan, telah mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kota Makassar. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial di Kota Makassar pada tahun 2016 s.d 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.66 | Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah PMKS yang diberikan bantuan	22.180	23.992	60.301	60.928	115.988
Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan	22.180	23.992	60.301	60.928	115.988
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Sosial Kota Makassar, 2021

Persentase PMKS yang Tertangani

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang tertangani di tahun 2020 sebanyak 150.131 orang, sesuai dengan jumlah PMKS yang ada pada tahun 2020. Terjadi peningkatan jumlah PMKS yang tertangani karena adanya pandemi Covid-19 sehingga banyak masyarakat yang terkena imbas pandemi Covid-19 tersebut. Persentase PMKS Kota Makassar tahun 2016-2020 yang tertangani di Kota Makassar disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.67 | Persentase PMKS yang Tertangani Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah PMKS yang tertangani	22.180	23.992	69.495	95.720	150.131
Jumlah PMKS yang ada	22.180	23.992	69.495	95.720	150.131
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Sosial Kota Makassar, 2021

Persentase PMKS Skala yang Memperoleh Bantuan

Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, PMKS di Kota Makassar yang mendapatkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka sebanyak 115.988 orang dan semuanya telah mendapat bantuan dari Pemerintah Kota Makassar (100%). Jumlah PMKS dalam satu tahun yang memperoleh bantuan sosial terus meningkat dimana tahun 2016 hanya 3.702 PMKS yang memperoleh bantuan. Data persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar tahun 2016-2020 kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.68 | Persentase PMKS Skala yang Memperoleh Bantuan Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun	3.702	6.191	59.101	60.928	115.988
Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial	3.702	6.191	59.101	60.928	115.988
Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (%)	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Sosial Kota Makassar, 2021

Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Jumlah panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial di Makassar sebanyak 100 Panti dan semuanya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial, sehingga untuk indikator Persentase panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana kesejahteraan sosial telah mencapai 100%. Data Panti Sosial dari 100 menurun menjadi 93 Panti hal ini terjadi karena berdasarkan hasil verifikasi dan validasi panti ada 7 panti sosial yang sudah tidak memenuhi syarat lagi dalam pelaksanaan kesejahteraan sosial. Selengkapnya data persentase panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial di Kota Makassar tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.69 | Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah panti sosial dalam 1 thn yang menyediakan sarana prasarana kesejahteraan sosial	100	100	86	86	93
Jumlah panti sosial dalam 1 thn yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	100	100	86	86	93
Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana kesejahteraan sosial (%)	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Sosial Kota Makassar, 2021

Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat yang menyediakan sarana prasarana pelayanan sosial, secara konsisten mencapai 100% dalam lima tahun terakhir. Tahun 2020 jumlah Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial berjumlah 153 Wahana dan seluruhnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial sehingga persentase WKBSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial mencapai 100%. Selengkapnya data WKBSM Kota Makassar dalam lima tahun terakhir tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.70 | Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah WKBSM dalam 1 tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	100	100	143	153	153
Jumlah WKBSM dalam 1 tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	100	100	143	153	153
Persentase WKBSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (%)	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Sosial Kota Makassar, 2021

Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat

Jumlah korban bencana di Kota Makassar pada tahun 2018 mencapai 6098 KK. Dari jumlah tersebut, seluruhnya telah menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat. Dengan kata lain persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat telah mencapai 100%. Pada tahun 2018 korban bencana menurun hal ini dikarenakan frekuensi kejadian bencana menurun dibanding tahun 2019, (Genangan air / Banjir kiriman dari Kab. Gowa 11 kejadian dan Kebakaran 19 kejadian serta angin puting beliung 4 kejadian). Korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat tahun 2020 berjumlah 3.340 orang. Jumlah ini menurun dari jumlah korban bencana tahun 2019 dikarenakan jumlah kejadian bencana menurun sehingga jumlah korban bencana dan penanganan bencana juga lebih sedikit. Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat Kota Makassar pada tahun 2016 s.d 2020 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.71 | Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah korban bencana yang menerima menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	1.772	4.238	3.440	6.098	3.340
Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	1.772	4.238	3.440	6.098	3.340
Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Sosial Kota Makassar, 2021

Persentase Korban Bencana Yang Dievakuasi Dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap

Persentase korban bencana yang di evakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap hingga tahun 2019 mencapai 100% dari jumlah total korban bencana alam yang seharusnya di evakuasi. Dilihat dari jumlahnya, pada tahun 2018 jumlah korban bencana lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2019, pada tahun 2019 korban bencana yang di evakuasi adalah korban banjir/genangan air yang terjadi di kecamatan Manggala, Panakkukang dan Tamalate dengan jumlah korban 2337 KK yang di

evakuasi . Korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap pada tahun 2020 berjumlah 2037 orang. Jumlah ini menurun dari jumlah korban bencana tahun 2019 dikarenakan jumlah kejadian bencana menurun sehingga jumlah korban bencana dan penanganan bencana juga lebih sedikit, seperti yang tergambar pada tabel berikut ini:

Tabel 2.72 | Persentase Korban Bencana Yang Dievakuasi Dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	316	1.108	1.647	2.337	2.037
Jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	922	5.382	1.647	2.337	2.037
Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tangap darurat lengkap (%)	34,27%	20,59%	100%	100%	100%

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar, 2021

Persentase Penyandang Disabilitas Dan Orang Dengan Gangguan Jiwa, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial

Jumlah penyandang disabilitas dan orang dengan gangguan jiwa serta lansia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial pada tahun 2020 sebanyak 3357 orang. Jumlah tersebut berasal dari jumlah lansia sebagai KPM PKH sebanyak 2.196 orang, penyandang disabilitas sebagai KPM PKH sebanyak 293 orang, lansia penerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar lanjut usia terlantar sebanyak 212 orang, dan penyandang disabilitas terlantar serta orang dengan gangguan jiwa yang masuk sebagai penerima bantuan dalam perlindungan dan pembinaan sosial bagi penyandang disabilitas sebanyak 656 orang. Persentase penyandang disabilitas dan orang dengan gangguan jiwa serta lansia yang tidak potensial yang menerima jaminan sosial tahun 2016-2020 telah mencapai 100%, seperti yang tergambar pada tabel berikut ini:

Tabel 2.73 | Persentase Penyandang Disabilitas Dan Orang Dengan Gangguan Jiwa, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah penyandang disabilitas dan orang dengan gangguan jiwa serta lansia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	1.842	1.842	3.413	4.789	3.357
Jumlah penyandang disabilitas dan orang dengan gangguan jiwa serta lansia yang tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial	1.842	1.842	3.413	4.789	3.357
Persentase penyandang disabilitas dan orang dengan gangguan jiwa serta lansia tidak potensial yang menerima jaminan sosial (%)	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Sosial Kota Makassar, 2021

2.3.2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.3.2.1 Ketenagakerjaan

Angka Sengketa Pengusaha – Pekerja Per Tahun

Angka sengketa antara pengusaha dan pekerja memperlihatkan fluktuasi selama 5 tahun terakhir. Jumlah sengketa terbanyak terjadi pada tahun 2020 yaitu sebanyak 326 kasus. Angka ini meningkat tajam dari tahun sebelumnya Sementara yang terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 146 kasus. Rasio antara jumlah sengketa dengan jumlah perusahaan meningkat dari 2,42 di tahun 2016 menjadi 6,81 di tahun 2020.

Tabel 2.74 | Angka Sengketa Pengusaha – Pekerja Tahun 2016 – 202 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah sengketa pengusaha pekerja	146	152	231	178	326
Jumlah perusahaan	6.021	6.407	6.076	4.787	4.787
Angka sengketa Pengusaha-Pekerja pertahun (%)	2,42%	2,37%	3,80%	3,72%	6,81%

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, 2021

Besaran Kasus Ketenagakerjaan yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama

Dari jumlah sengketa yang antara pengusaha dan pekerja yang tercatat selama 5 tahun terakhir, sebagian besar dapat diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) dengan mediasi Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar. Penurunan persentase penyelesaian kasus terjadi di tahun 2016 dimana dari 146 sengketa yang ada hanya sejumlah 130 kasus yang berhasil dimediasi dan sepakati melalui Perjanjian Bersama (PB). Hal ini disebabkan banyaknya kasus yang masuk di akhir tahun, sehingga proses mediasinya menyeberang tahun. Akan tetapi dapat diselesaikan pada awal tahun berikutnya.

Dalam hal besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama persentase tertinggi pada tahun 2014 yaitu 97,04 persen. Kemudian besaran tersebut semakin menurun, tren positif kembali pada tahun 2018 dimana besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama meningkat menjadi 95,24 persen. Akan tetapi pada tahun 2019 besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama menurun kembali menjadi 70,22 persen. Hal ini banyaknya kasus yang tidak mencapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sehingga Dinas Ketenagakerjaan mengeluarkan anjuran untuk penyelesaian kasus di Pengadilan Arbitrase.

Maraknya pemutusan hubungan industrial (PHK) akibat pandemi virus Covid-19 mengakibatkan pada tahun 2020 terjadi lonjakan kasus. Tercatat pada tahun 2020 perselisihan hubungan industrial sebanyak 326 kasus dan dapat diselesaikan dengan perjanjian bersama sebanyak 190 kasus. Sebanyak 108 kasus diselesaikan dengan anjuran dan 28 kasus masih dalam proses mediasi.

Tabel 2.75 | Besaran Kasus Ketenagakerjaan yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama	130	113	220	125	190
Jumlah kasus yang dicatatkan	146	152	231	178	326
Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (%)	89,04%	74,34%	95,24%	70,22%	58,28%

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, 2021

Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan

Untuk jumlah pencari kerja terdaftar menunjukkan tren menurun dimana pada tahun 2020 tercatat jumlah pencari kerja terdaftar berjumlah 1.651 orang sedangkan tahun 2019 tercatat jumlah pencari kerja terdaftar berjumlah 3.800 orang, tahun 2018 jumlah pencari kerja terdaftar berjumlah 4.117 orang dan pada tahun 2017 jumlah pencari kerja terdaftar berjumlah 8.376 orang. Semakin menurunnya pencari kerja terdaftar disebabkan banyak perusahaan tidak menjadikan kartu AK1 (kartu pencari kerja) sebagai persyaratan administrasi. Data besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan tahun 2016-2020 Kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.76 | Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	4.940	4.099	3.462	3.199	831
Jumlah pencari kerja terdaftar	5.705	8.376	4.117	3.800	1.651
Besaran pencari kerja yang ditempatkan (%)	86,59%	48,94%	84,09%	84,18%	50,33%

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, 2021

Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek

Pekerja yang menjadi peserta program Jamsostek dari tahun 206-2017 mengalami penurunan dari 43,13% menjadi 40,91%. Pada tahun 2018 besaran pekerja buruh yang menjadi peserta Jamsostek meningkat menjadi 58,33% Hal ini terus perlu ditingkatkan agar jumlah cakupan peserta Jamsostek semakin meningkat dan mencapai 80-90 persen di tahun mendatang. Pada tahun 2019 dan 2020 pencatatan pekerja/buruh peserta Jamsostek mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena pemutakhiran data dimana tenaga kerja yang dihitung merupakan tenaga kerja formal dan peserta yang masih aktif. Sehingga pada tahun 2019 tercatat jumlah pekerja/buruh peserta Jamsostek aktif berjumlah 211.432 orang sedangkan data jumlah pekerja/buruh sektor formal berjumlah 589.221 orang. Sedangkan pada tahun 2020 tercatat jumlah pekerja/buruh peserta Jamsostek aktif berjumlah 264.739 dan jumlah pekerja/buruh sektoral formal berjumlah 565.122.

Tabel 2.77 | Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah pekerja/buruh peserta Jamsostek	230.168	273.664	343.693	211.432	264.739
Jumlah pekerja/buruh	533.678	548.368	589.221	401.827	565.122
Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (%)	43,13%	49,91%	58,33%	52,62%	46,85%

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, 2021

Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah

Gambaran umum kondisi Kota Makassar untuk perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah tidak terdapat perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah. Dimana dari pencatatan pada tahun 2019 dari 178 kasus perselisihan buruh dan pengusaha diakibatkan antara lain perselisihan kepentingan (perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama) dan perselisihan pemutusan hubungan kerja. Sedangkan pada tahun 2019 tidak ada perselisihan hak dimana perselisihan ini penyebabnya antara lain merupakan penerapan Upah Minimum Kota (UMK) yang merupakan kebijakan pemerintah daerah.

Tabel 2.78 | Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan pemda	-	-	-	-	-
Jumlah kejadian perselisihan buruh dan pengusaha	146	152	231	178	326
Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, 2021

Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi

Besaran Peningkatan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi mengalami meningkatkan dari 60,19 persen di tahun 2016 menjadi 66,85 persen di tahun 2019. Akan tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat tajam tercatat sebesar 30,43 persen.

Adanya pembatasan aktivitas sosial ekonomi di masa pandemi virus Covid-19 mengakibatkan adanya pengurangan jumlah peserta pelatihan dan beberapa kerja sama dengan *stack holder* tidak dapat dilaksanakan. Tercatat pada tahun 2019 jumlah peserta pelatihan sebanyak 2.105 orang, menurun tajam pada tahun 2020 yang hanya tercatat sebanyak 500 orang. Secara rinci perkembangan dari Tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.79 | Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	620	1.190	1.340	2.105	500
Jumlah pendaftar pelatihan berbasis kompetensi	1.030	1.786	2.037	3.149	1.643
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	60,19%	66,63%	65,78%	66,85%	30,43%

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, 2021

Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat

Peningkatan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat mengalami meningkatkan dari 59,62 persen di tahun 2016 menjadi 64,56 persen di tahun 2019. Akan tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat tajam tercatat sebesar 43,64 persen. Adanya pembatasan aktivitas sosial ekonomi di masa pandemi virus Covid-19 mengakibatkan adanya pengurangan jumlah peserta pelatihan dan beberapa kerja sama dengan *stack holder* tidak dapat dilaksanakan. Tercatat pada tahun 2019 jumlah peserta pelatihan sebanyak 512 orang, menurun pada tahun 2020 tercatat sebanyak 360 orang. Secara rinci perkembangan dari Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabe berikut:

Tabel 2.80 | Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat	202	228	400	512	360
Jumlah pendaftar pelatihan berbasis masyarakat	339	369	643	793	825
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (%)	59,59%	61,79%	62,21%	64,56%	43,64%

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, 2021

Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat mengalami peningkatan dari 60,61% ditahun 2016 menjadi 70,53% ditahun 2019. Akan tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat tercatat sebesar 25,21%. Adanya pembatasan aktivitas sosial ekonomi di masa pandemi virus Covid-19 mengakibatkan adanya pengurangan jumlah peserta pelatihan dan beberapa kerja sama dengan *stakeholder* tidak dapat dilaksanakan. Tercatat pada tahun 2019 jumlah peserta pelatihan sebanyak 512 orang, menurun pada tahun 2020 tercatat sebanyak 360 orang. Secara rinci perkembangan dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.81 | Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan	308	342	380	280	90
Jumlah pendaftar pelatihan kewirausahaan	508	503	557	397	357
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (%)	60,63%	67,99%	68,22%	70,53%	25,21%

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, 2021

Rasio Lulusan S1/S2/S3

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3. Rasio lulusan S1-S3 Kota Makassar disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.82 | Rasio Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020*
Jumlah lulusan S1/S2/S3	-	182.070	216.819	217.918	205.602
Jumlah penduduk	1.469.601	1.489.011	1.503.291	1.526.677	1.469.601
Rasio lulusan S1/S2/S3	-	12,23	14,42	14,27	13,99

Sumber: Hasil Sakernas BPS RI, diolah oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, 2021
Catatan: 1. Hasil Sakernas tahun 2016 tingkat Kabupaten/Kota secara Nasional tidak dirilis oleh BPS RI
) Data tahun 2020 angka sementara

2.3.2.2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Pekerja perempuan di lembaga pemerintahan (ASN) di Kota Makassar, sudah lebih besar dari ASN laki-laki, dimana pada tahun 2020 sebanyak 7.819 orang adalah perempuan dari 12.440 ASN atau 62,85%. Persentase partisipasi perempuan di Lembaga pemerintahan relatif konstan dalam 5 tahun terakhir yaitu rata-rata 63,7%. Data persentase perempuan di lembaga pemerintah, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.83 | Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah ASN perempuan di Lembaga pemerintah di Kota Makassar	9.171	7.514	7.174	7.819	7.819
Jumlah seluruh ASN di Lembaga pemerintah di Kota Makassar	14.442	11.622	11.021	12.440	12.440
Persentase partisipasi ASN perempuan di lembaga pemerintah di Kota Makassar (%)	63,50%	64,65%	65,09%	62,85%	62,85%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, 2021

Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan di DPRD

Pemenuhan kuota perempuan belum maksimal di Tingkat DPRD Kota Makassar. Persentase proporsi kursi yang diduduki Perempuan di DPRD Kota Makassar masih sangat kecil dibanding jumlah total kursi keanggotaan DPRD yang ada, dimana dari 50 kursi DPRD Kota Makassar sebanyak 12 kursi diduduki oleh legislator perempuan atau 24%. Jumlah ini lebih tinggi daripada periode DPRD sebelumnya yang hanya 8 orang legislator perempuan yang duduk di DPRD Kota Makassar atau hanya 8 orang. Data dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.84 | Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan di DPRD Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan	8	8	7	12	12
Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD	50	50	50	50	50
Persentase kursi yang diduduki perempuan di DPRD (%)	16,00%	16,00%	14,00%	24,00%	24,00%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, 2021

Rasio KDRT

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Rasio KDRT adalah jumlah KDRT yang dilaporkan dalam periode 1 (satu) tahun per 1.000 rumah tangga. Rasio KDRT di Kota Makassar tahun 2016 adalah 3,43 yang berarti bahwa KDRT rata-rata terjadi pada 3 rumah tangga di Makassar dari 100 rumah tangga. Dan Pada tahun 2020 meningkat menjadi 4,32 dengan jumlah kasus 1.031. Penurunan ini

mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan kekerasan semakin tinggi. Hal ini merupakan dampak dari kerja pencegahan yang dilakukan oleh shelter warga melalui kegiatan sosialisasi pada setiap kegiatan kemasyarakatan. Data rasio KDRT tahun 2016-2020 Kota Makassar dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.85 | Rasio KDRT Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah KDRT	1.174	1.406	1.300	1.351	1.034
Jumlah rumah tangga	358.054	489.727	501.911	341.460	239.072
Rasio KDRT	0,33	0,29	0,26	0,40	0,43

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, 2021

Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu

Jumlah pengaduan laporan kasus kekerasan pada perempuan dan anak cenderung meningkat di Tahun 2016 dan 2017. Dan pada tahun 2019 meningkat tajam dari tahun sebelumnya 2018 dan pada tahun 2020 menurun Kembali dengan jumlah 617 pengaduan. Hal ini disebabkan karena masyarakat sudah berani melaporkan kekerasan yang mereka alami. Selain itu karena upaya aktif Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar dalam melakukan penjangkauan langsung ke unit PPA Polres Kota Makassar. Sehingga cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu berhasil tercapai 100% dari Tahun 2016-2020. Secara rinci perkembangan dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.86 | Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu	152	235	283	725	617
Jumlah pengaduan/pelaporan yang masuk ke unit pelayanan terpadu	152	235	283	725	617
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, 2021

Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tata Laksana KTP/A Dan PPT/PKT di Rumah Sakit

Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tata laksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit Kota Makassar dari Tahun 2016-2020 berhasil dilayani secara keseluruhan sehingga capaian setiap tahunnya 100%. Secara rinci perkembangan dari Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.87 | Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tata Laksana KTP/A Dan PPT/PKT di Rumah Sakit Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tata laksana KtP/A	70	235	178	535	617
Jumlah seluruh korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan di Puskesmas	70	235	178	535	617
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih mampu tatalaksana PPT/PKT di RS	70	235	178	53	129
Jumlah seluruh korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan di RS	70	235	178	53	129
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih mampu tatalaksana PPT/PKT di RS	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, 2021

Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu

Cakupan layanan rehabilitasi yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu terlihat fluktuatif dari Tahun 2016-2020. Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial pada Tahun 2017 sebesar 32 dan pada Tahun 2019 meningkat menjadi 260, kemudian pada Tahun 2020 turun kembali menjadi 109. Sementara Cakupan layanan rehabilitasi sosial oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan pada unit pelayanan terpadu pada tahun 2020 sebesar 12,46%. Secara rinci perkembangan dari Tahun 2016 - 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.88 | Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial	67	32	109	260	109
Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang membutuhkan rehabilitasi sosial	365	271	440	810	875
Cakupan layanan rehabilitasi sosial oleh Petugas Resos terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan pada unit pelayanan terpadu (%)	18,36%	11,81%	24,77%	32,10%	12,46%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, 2021

Cakupan Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak

Data cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Makassar untuk ditahun 2019 sebesar 100% yang berarti bahwa semua kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masuk ke persidangan, semuanya diputus pengadilan dengan memakai dasar perundang-undangan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Data penegakan hukum atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.89 | Cakupan Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah perkara yang diputus pengadilan dengan dasar perundang-undangan yang terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak	238	136	150	83	85
Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan	327	152	140	83	92
Cakupan penegakan hukum atas kasus-kasus kekerasan Perempuan dan Anak (%)	72,78%	89,47%	107,14%	100,00%	92,39%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, 2021

Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum

Data Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum di Kota Makassar, terkait Jumlah perempuan dan anak yang mendapatkan layanan bantuan hukum pada Tahun 2017 sebesar 136 layanan bantuan hukum dan pada Tahun 2019 meningkat menjadi 264 layanan . Sedangkan pada Tahun 2020 mencapai angka 460 layanan sementara cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan bantuan hukum pada Tahun 2020 berada di angka 69,90%. Data perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat bantuan hukum tahun 2016-2020 Kota Makassar disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.90 | Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan bantuan hukum	328	136	235	264	460
Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang membutuhkan bantuan hukum	327	152	479	529	659
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan bantuan hukum (%)	100,31%	89,47%	49,06%	49,91%	69,80%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, 2021

Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Data cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kota Makassar selama lima tahun terakhir meningkat secara signifikan. Data dari tahun 2016-2020 mencapai 100%, dimana pada tahun 2020 dari 1.034 perempuan dan anak korban kekerasan yang tercatat di Unit Pelayanan Terpadu, semuanya mendapat pelayanan pemulangan. Secara rinci data cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.91 | Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat pelayanan pemulangan	271	440	479	1.029	1.034
Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan tercatat di UPT	271	440	479	1.029	1.034
Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%)	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, 2021

Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan

Data cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kota Makassar Tahun 2016 – 2020 cakupan berhasil mencapai 100% setiap tahunnya. Tahun 2020, korban kekerasan perempuan dan anak yang membutuhkan reintegrasi sosial sebanyak 1.034 kasus, dan semuanya mendapat reintegrasi sosial. Secara rinci data reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.92 | Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat pelayanan pemulangan	271	440	479	1.029	1.034
Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan tercatat di UPT	271	440	479	1.029	1.034
Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%)	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, 2021

2.3.2.3 Pangan

Ketersediaan Pangan Utama

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumen manusia, termasuk bahan tambahan pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan pembuatan makanan atau minuman. Untuk itu diperlukan ketersediaan pangan pada suatu wilayah ini sangat penting. Ketersediaan pangan utama Kota

Makassar dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan dan penurunan. Data persentase ketersediaan pangan tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 17,33 dan terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar 6,605. Secara rinci data ketersediaan pangan utama di Kota Makassar tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.93 | Ketersediaan Pangan Utama Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama pertahun (Kg)	9.120.967	16.691.645	11.893.331	14.271.971	10.813.378
Jumlah penduduk	1.469.601	1.488.717	1.508.154	1.526.677	1.423.877
Rasio ketersediaan pangan utama per penduduk	1:620,64	1:1121,21	1:788,6	1:934,84	1:759,43

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar, 2021

Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita

Ketersediaan energi dan protein per kapita menggambarkan tingkat pemenuhan kebutuhan energi dan protein per kapita per hari. Ketersediaan energi dan protein per kapita dihitung melalui ketersediaan pangan per kapita per hari, kandungan kalori, Bagian yang dapat dimakan (BDD), ketersediaan energi (kkal/kapita/hari), ketersediaan pangan/ kapita/ hari serta kandungan protein. Ketersediaan energi dan protein per kapita Kota Makassar tahun 2016 sebesar 51,32% meningkat di tahun 2017 menjadi 56,26% Dan pada tahun 2019, meningkat menjadi 35,93 %. Namun ditahun 2020 mengalami penurunan menjadi 7,64%. Ketersediaan energi dan protein per kapita Kota Makassar tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.94 | Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Ketersediaan pangan /kapita/hari	14.487.388	140	22441.20	410	87
Kandungan Kalori	362.20	362.20	362.20	362	361
BDD	100	100	100	100	100
Ketersediaan Energi (kkal/kapita/hari)	0,01	0,05	81.282,00	1.479,00	314,00
Ketersediaan Pangan /kapita/hari	14,487,388	139.751	22441.20	410	87
Kandungan Protein	8	8	8	8	9
BDD	100	100	100	100	100
Ketersediaan Protein (gram/kapita/hari)	51,32	56,26	1.903,01	35,93	7,64

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar, 2021

Pengawasan dan Pembinaan Ketahanan Pangan

Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan adalah untuk menjamin pangan aman bagi masyarakat Makassar dimana pangan yang sehat mencakup pangan yang bergizi dan aman di konsumsi dan dilakukan melalui uji sampel dari produk pangan di pedagang. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan Kota Makassar sudah baik dan secara konsisten meningkat, dimana rata-rata capaiannya sebesar 95,73 dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, dari 90 sampel pangan yang diperdagangkan, 89 sampel pangan tersebut sesuai dengan standar keamanan pangan. Selengkapnya data pengawasan dan pembinaan keamanan pangan Kota Makassar tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.95 | Pengawasan dan Pembinaan Ketahanan Pangan Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi di pedagang pengumpul sesuai standar yang berlaku	65	65	79	89	89
Jumlah total sampel pangan yang di perdagangkan pengumpul menurut ukuran yang telah ditetapkan	70	70	83	90	90
Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	92,86%	92,86%	95,18%	98,89%	98,89%

Sumber: Dinas Ketahanan Kota Makassar, 2021

2.3.2.4 Pertanahan

Penyelesaian Kasus Tanah Negara

Kasus tanah sebanyak 11 di tahun 2019 berasal dari pengaduan/laporan masyarakat, yang dalam hal ini penanganan penyelesaiannya melalui fasilitas dan mediasi para pihak dan telah difasilitasi sebanyak 11 kasus atau 100% tertangani. Untuk tahun 2015 s.d 2016 kasus tanah negara masih ditangani oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Makassar kemudian dilakukan perubahan struktur organisasi perangkat daerah kota Makassar menjadi Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah Kota Makassar dan selanjutnya perubahan struktur organisasi perangkat daerah Kota Makassar menjadi SKPD Dinas Pertanahan Kota Makassar pada tahun 2016.

Tabel 2.96 | Penyelesaian Kasus Tanah Negara Tahun 2016 – 2021 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah kasus yang diselesaikan		10	12	11	7
Jumlah kasus yang terdaftar		10	12	11	7
Persentase kasus tanah negara		100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Pertanahan Kota Makassar, 2021

Penyelesaian Izin Lokasi

Dinas Pertanahan Kota Makassar baru terbentuk bulan Desember tahun 2016, sehingga data izin lokasi yang tersedia adalah dari tahun 2017, dimana penanganan proses Pemberian Izin Lokasi pada Tahun 2014 s.d 2016 masih dalam kewenangan/penanganan pihak Instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional (Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Izin Lokasi). Dengan berlakunya Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka izin lokasi beralih menjadi kewenangan Daerah Pemerintah Kota Makassar pada SKPD Dinas Pertanahan Kota Makassar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) dan Peraturan Walikota Kota Makassar Nomor 107 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanahan. Tahun 2017, terdapat 3 permohonan izin lokasi yang disampaikan, namun hanya terbit 1 izin lokasi atau 33,33% dan ditahun 2018 hanya ada satu permohonan izin lokasi dan dapat diterbitkan. Tahun 2019 dan 2020 tidak ada permohonan izin lokasi yang diajukan pada pemerintah Kota Makassar.

Tabel 2.97 | Penyelesaian Izin Lokasi Tahun 2016 – 2020 Kota Makasar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah izin lokasi	-	1	2	0	0
Permohonan izin lokasi	-	3	2	0	0
Penyelesaian izin lokasi	-	33,33	100,00	0	0

Sumber: Dinas Pertanahan Kota Makassar, 2021

Persentase Luas Aset Lahan Bersertifikat

Jumlah luas lahan pada tahun 2016 data masih belum tersedia. Hal tersebut dikarenakan bahwa proses penyertifikatan dikelola oleh BPKAD Bidang Aset Pemerintah Kota Makassar. Jumlah Luas Lahan yang bersertifikat untuk tahun 2017 mencapai 112.464 m² sedangkan jumlah luas wilayah adalah 475.168 m², sehingga persentase Luas Lahan Bersertifikat untuk tahun 2017 adalah 23,66%. Tidak tercapai target di tahun 2017 disebabkan karena dalam hal penerbitan sertifikat pada Badan Pertanahan Nasional memerlukan waktu yang lama.

Jumlah Luas Lahan yang bersertifikat untuk tahun 2018 mencapai 30.684 m² dengan Jumlah Luas Wilayah adalah 362.703 m² sehingga Persentase Luas Lahan Bersertifikat untuk tahun 2018 adalah 8,459% dan tidak tercapai target di tahun 2018 disebabkan karena dalam hal penerbitan sertifikat pada Badan Pertanahan Nasional memerlukan waktu yang lama.

Jumlah Luas Lahan yang bersertifikat untuk tahun 2019 mencapai 53.913 m² dengan jumlah Luas Wilayah adalah 332.019 m². Sehingga Persentase Luas Lahan Bersertifikat untuk tahun 2019 adalah 16,23% dan tidak tercapai target di tahun 2019 disebabkan karena dalam hal penerbitan sertifikat pada Badan Pertanahan Nasional memerlukan waktu yang lama.

Pada tahun 2020 Jumlah luas lahan yang bersertifikat sebesar nol dengan jumlah luas wilayah adalah 322.019 m² . Sehingga persentase luas lahan bersertifikat untuk tahun 2020 adalah sebesar nol persen. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2020 tidak ada luas lahan bersertifikat yang diproses oleh Dinas Pertanahan.

Tabel 2.98 | Persentase Luas Lahan Bersertifikat Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah luas lahan bersertifikat Non Jalan (m ²)		112.464	45.723	53.913	53.913
Jumlah luas wilayah Non Jalan (m ²)		475.168	362.703	316.980	332.019
Persentase luas lahan bersertifikat		23,67	12,61	17,01	16,24

Sumber: Dinas Pertanahan Kota Makassar, 2021

2.3.2.5 Lingkungan Hidup

Tersusunnya RPPLH Kota

Dokumen RPPLH sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH, dimana dokumen RPPLH harus disusun secara berjenjang mulai tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota. Sedangkan Dokumen RPPLH Nasional dan Provinsi belum tersedia, sebagai acuan. Menjadi kewajiban pemerintah Kota untuk menyusun RPPLH sebagai acuan perencanaan Lingkungan Hidup tingkat Kota Makassar, namun belum ada RPPLH Provinsi sebagai acuan untuk menyusun RPPLH Kota.

Tabel 2.99 | Tersusunnya RPPLH Kota Makassar Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Tersusunnya Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (RPPHL)	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, 2021

Terintegrasinya RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kota

Belum dilaksanakan dikarenakan banyaknya item pendukung dalam penyusunan RPPLH, sehingga secara bertahap item pendukung itu yang dilakukan mengingat keterbatasan anggaran item pendukung tersebut antara lain: Daya dukung dan daya tampung lingkungan, Indeks kualitas lingkungan hidup, Informasi kinerja lingkungan hidup daerah. Perlu menyusun daya dukung dan daya tampung lingkungan, indeks kualitas lingkungan hidup.

Tabel 2.100 | Terintegrasinya RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kota Tahun 2016 - 2020

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Makassar, 2021

Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Kota

Penyusunan RPJMD tahun 2016 – 2020 Kota Makassar telah menggunakan Permendagri nomor 86 tahun 2017 yang menyaratkan penggunaan KLHS dalam penyusunan RPJMD. RPJMD tahun 2016 – 2020 Kota Makassar sudah ada KLHS-nya sebagai acuan dalam menilai daya dukung dan daya tampung lingkungan pada perencanaan pembangunan Kota Makassar.

Tabel 2.101 | Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Kota

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, 2021

Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air

Sejak tahun 2018, untuk mengetahui perkembangan status mutu air di beberapa titik badan air di kota Makassar yang berpotensi tercemar, maka dilakukan metode pengambilan dan pemeriksaan sampel. Selanjutnya dilakukan analisis dan baku mutu yang digunakan berdasarkan peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 69 Tahun 2010 Tentang baku mutu dan kriteria kerusakan lingkungan hidup berdasarkan kelas air (Kelas III). Maka didapatkan IP atau Indeks Pencemaran Tahun 2018-2020 menghitung status mutu air dengan metode IP, maka didapatkan status mutu air rata-rata cemar ringan dan cemar sedang. Namun khusus status mutu air di kanal IP pada tahun 2020 rata-rata cemar berat. Maka pada tahun 2019 dilakukanlah perhitungan untuk memperoleh data Indeks Kualitas Air dengan *base line* data IP tahun 2018. Tahun 2020, IKA Kota Makassar ada pada angka 57,11.

Tabel 2.102 | Pengukuran Indeks Kualitas Air Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	0	0	71,86	36,46	57,11

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, 2021

Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara

Untuk tahun 2016 – 2020 untuk mengetahui perkembangan status mutu udara, maka sejak tahun 2017 telah dilakukan pengukuran kualitas udara Kota Makassar. Tahun 2017 Indeks Kualitas Udara Kota Makassar adalah 64,09, tahun 2018 sebesar 72,29, tahun 2019 sebesar 78,13. Pada tahun 2020, IKU kota Makassar menurun pada angka 77,22. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa Indeks Kualitas Udara Kota Makassar Angka Indeks Kualitas Udara ini berada pada angka rentang Indeks Kualitas Udara Kota Makassar berada pada kategori baik ($90 > 1 > 70$). Data Indeks Kualitas Udara kota Makassar adalah sebagai berikut:

Tabel 2.103 | Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	64,61	64,09	79,26	78,13	77,22

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, 2021

Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Pengukuran indeks kualitas tutupan lahan dilakukan, karena mengingat *output* kegiatannya jumlah pohon yang tertanam dan terpelihara bukan berdasarkan luas wilayah yang tertanami. Adapun hasil pengukuran indeks kualitas tutupan lahan Pada tahun 2019 berada di angka 18,53, meningkat menjadi 19,29 pada tahun 2019.

Tabel 2.104 | Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	0	0	19,29	18,54	19,29

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, 2021

Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, izin PPLHD dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah.

Dari tahun 2016 Sampai dengan tahun 2020, Ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU lingkungan hidup berfluktuatif. Ketaatan penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan terhadap izin lingkungan , izin PPLH dan PUU lingkungan hidup dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal antara lain kurangnya Pejabat Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar dan sarana pengawasan penataan lingkungan hidup. Sedangkan faktor eksternal antara lain kurangnya Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup pada usaha dan / atau kegiatan, sarana pengelolaan lingkungan hidup yang dimiliki dan masih kurangnya kepedulian pelaku dan/ atau kegiatan terhadap pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Khusus untuk di tahun 2020, dengan mewabahnya Covid-19, Laboratorium yang terakreditasi di Kota Makassar dari Bulan Maret – Bulan Desember 2020 tidak menerima pengujian sampel air limbah sehingga beberapa usaha dan/atau kegiatan tidak dapat melakukan pengujian kualitas air limbah.

Tabel 2.105 | Pembinaan dan Pengawasan Ketaatan Terhadap Izin Lingkungan (PPLH dan PUULH) Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah ketaatan terhadap izin lingkungan (PPLH dan PUULH)	11	41	124	134	8
Total penanggungjawab usaha atau kegiatan yang dibina dan diawasi	120	135	331	274	30
Pembinaan dan pengawana terkait ketaatan terhadap izin lingkungan (%)	9%	30%	37%	49%	27%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, 2021

Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota

Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar memiliki 1 (satu) orang PPLH (Pejabat Pengawasan Lingkungan Hidup) Sehingga dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan LH masih membutuhkan penambahan jumlah PPLH yang bersertifikasi atau memiliki kompetensi di bidang pengawasan Lingkungan Hidup.

Tabel 2.106 | Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah PPLHD yang dilatih dan/dibina	Tidak ada	Tidak ada	1 Orang	1 Orang	1 Orang
Jumlah sarana dan Prasarana PPLHD yang memenuhi standar minimal	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, 2021

Terfasilitasinya Pendampingan Pengakuan MHA

Kegiatan mengenai MHA belum pernah dilaksanakan mengingat uraian tugas mengenai MHA baru ada berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 93 / 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup dan belum ada dalam Renstra LH. Setelah dilaksanakan revisi renstra barulah dimasukkan kegiatan MHA namun belum bisa dilaksanakan 2020 karena, kegiatan sudah berjalan beberapa lama. Pembinaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) penting guna meningkatkan peran kelompok masyarakat dalam pengendalian lingkungan, meningkatnya perlindungan terhadap sumber daya alam, meningkatnya kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup. Untuk Tahun 2020 Berdasarkan hasil survei yang dilakukan maka, dijelaskan bahwa tidak ada data MHA di Kota Makassar dan MHA hanya ada di beberapa Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 2.107 | Terfasilitasinya Pendampingan Pengakuan MHA Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Masyarakat Hukum Adat yang diakui	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, 2021

Terverifikasinya MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional

Belum ada Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional yang diverifikasi oleh Kota Makassar mengingat Urusan Lingkungan Hidup yang memuat

kewenangan kabupaten/Kota tentang MHA baru ada pada Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga Kegiatan mengenai MHA belum pernah dilaksanakan mengingat uraian tugas mengenai MHA baru ada berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 93 / 2016 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup / dan belum ada dalam Renstra LH. Untuk Tahun 2019 Berdasarkan hasil survei yang dilakukan maka, dijelaskan bahwa tidak ada data MHA di Kota Makassar dan MHA hanya ada di beberapa Kabupaten di Propinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 2.108 | Terverifikasinya MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional yang diverifikasi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, 2020

Terverifikasinya Hak Kearifan Lokal atau Hak Pengetahuan Tradisional

Belum ada Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional yang diverifikasi oleh Kota Makassar mengingat Urusan Lingkungan Hidup yang memuat kewenangan kabupaten/Kota tentang MHA baru ada pada Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga Kegiatan mengenai MHA belum pernah dilaksanakan mengingat uraian tugas mengenai MHA baru ada berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 93 / 2016 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup / dan belum ada dalam Renstra LH. Untuk Tahun 2020 Berdasarkan hasil survei yang dilakukan maka, dijelaskan bahwa tidak ada data MHA di Kota Makassar dan MHA hanya ada di beberapa Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 2.109 | Terverifikasinya Hak Kearifan Lokal atau Hak Pengetahuan Tradisional Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional yang diverifikasi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, 2021

Penetapan Hak MHA

Belum ada Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional yang diverifikasi oleh Kota Makassar mengingat Urusan Lingkungan Hidup yang memuat kewenangan kabupaten/Kota tentang MHA baru ada pada Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga Kegiatan mengenai MHA belum pernah dilaksanakan mengingat uraian tugas mengenai MHA baru ada berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 93 / 2016 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup / dan belum ada dalam Renstra LH. Untuk Tahun 2020 Berdasarkan hasil survei yang dilakukan maka, dijelaskan bahwa tidak ada data MHA di Kota Makassar dan MHA hanya ada di beberapa Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 2.110 | Penetapan Hak MHA Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah penetapan hak Masyarakat Hukum Adat	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, 2021

Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup

Secara rutin Pemerintah Kota Makassar melaksanakan pemberian penghargaan kepada masyarakat seperti pemilihan Duta Lingkungan Hidup, Lomba Makassar Bersih Lorong, Lomba Kebersihan Kelurahan serta penghargaan kepada RT/RW berupa insentif bagi mereka yang biasa memenuhi kriteria-kriteria tertentu diantaranya adalah kebersihan lingkungan.

Tabel 2.111 | Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, 2021

Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah

Pos pengaduan dan penyelesaian sengketa LH berpedoman pada Permen LHK No. P.22/MenLHK/Setjen/Set.1/3/2017 tentang tata cara pengelolaan pengaduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan LH dan/atau perusakan Hutan serta Peraturan Walikota Makassar No. 26 Tahun 2017 tentang tata cara pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan LH. Pada akhir Tahun 2019 Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar telah memiliki 1 orang pejabat pengawas lingkungan hidup. Setiap pengaduan yang masuk akan ditindak lanjuti dan diklarifikasi lebih dulu. Jika termasuk pengaduan lingkungan maka akan dilakukan Verifikasi lapangan, sedangkan yang bukan pengaduan lingkungan di teruskan ke SKPD teknis terkait. Pengaduan masyarakat dalam lima tahun terakhir secara konsisten meningkat, dimana tahun 2016 ada 39 pengaduan masyarakat, meningkat hampir 300% pada tahun 2020 menjadi 114 pengaduan. Semua pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, telah ditindak lanjuti oleh pemerintah Kota Makassar sesuai mekanisme yang ada.

Tabel 2.112 | Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani	39	57	75	93	114
Total jumlah pengaduan masyarakat yang terregistrasi	39	57	75	93	114
Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH, PUU LH (%)	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, 2021

Timbulan Sampah yang Ditangani

Volume sampah yang tertangani adalah merupakan jumlah timbulan sampah yang dikelola baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu proses pengelolaan sampah yang dari tahun ke tahun semakin meningkat penanganan yang mana pada tahun 2013 hanya sekitar 89,73% dan hingga akhir tahun 2018 telah mencapai 92,02%. Bahwa semakin besarnya laju timbulan

sampah akan berpotensi terjadinya pencemaran lingkungan antara lain : Bau, Mengganggu kesehatan, Merusak lingkungan estetika lingkungan dan Kerusakan lingkungan. Pertumbuhan penduduk dan aktivitas masyarakat kota akan mendorong laju timbulan sampah yang menjadi permasalahan kota. namun pada tahun 2019 timbunan sampah menurun hingga 79,99%.

Tabel 2.113 | Timbulan Sampah yang Ditangani Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Volume sampah yang ditangani	237.852	290.222	339.713	315.470	255.565
Total timbulan sampah	257.364	304.723	369.179	394.359	379.395
Persentase timbulan sampah yang tertangani (%)	92,42%	95,24%	92,02%	80,00%	67,36%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, 2021

Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R

Kerusakan lingkungan dapat terjadi bisa dikarenakan dari sampah yang dibiarkan menumpuk dan tidak dapat sepenuhnya diolah oleh manusia, sehingga diperlukan adanya kesadaran masyarakat untuk menerapkan konsep 3R (*Reuse, Reduce dan Recycle*) yakni Reuse (Menggunakan kembali sampah yang masih bisa digunakan atau bisa berfungsi lainnya), Reduce (Mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan atau memunculkan sampah), Recycle (Mengolah kembali sampah atau daur ulang menjadi suatu produk atau barang yang dapat bermanfaat). Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R mencapai 89.390 ton, pada tahun 2019, melalui bank sampah, daur ulang, pengomposan, dll. Pengurangan sampah melalui 3R ini harus terus digalakkan di kota Makassar dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan 3R di lingkungannya masing-masing.

Tabel 2.114 | Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Volume sampah yang ditangani	237.852	290.222	339.713	315.470	255.565
Total timbulan sampah	257.364	304.723	369.179	394.359	379.395
Persentase timbulan sampah yang tertangani (%)	92,42%	95,24%	92,02%	80,00%	67,36%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, 2021

Persentase Cakupan Area Pelayanan Pengelolaan Sampah

Bahwa luas wilayah pelayanan persampahan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan baik langsung ataupun tidak langsung. Dengan pertambahan Kecamatan Kepulauan Sangkarrang yang berada pada pulau-pulau secara operasional belum tertangani, namun demikian penanganan akan disesuaikan pada kondisi wilayah. Data persentase cakupan area pelayanan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.115 | Persentase Cakupan Area Pelayanan Pengelolaan Sampah Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Luas area pelayanan pengelolaan sampah (km2)	175,77	175,77	175,77	175,77	175,77
Luas area Kota Makassar (km2)	175,77	175,77	175,77	175,77	175,77
Persentase cakupan aera pelayanan pepengelolaan sampah (%)	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, 2021

Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani

Volume sampah yang tertangani adalah merupakan jumlah timbulan sampah yang dikelola baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu proses pengelolaan sampah yang dari tahun ke tahun semakin menurun penanganan yang mana pada tahun 2016 sebesar 94,81% dan pada tahun 2020 hanya mencapai 67,36%. Hal ini disebabkan adanya kebijakan pemerintah dalam bentuk protokol kesehatan yang bertujuan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 di Kota Makassar sehingga masyarakat membatasi aktivitasnya di luar rumah, termasuk untuk bekerja di kantor atau bersosialisasi di tempat umum dimana timbulan sampah pada titik-titik sumber sampah di area tersebut juga berkurang.

Tabel 2.116 | Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah sampah yang tertangani (ton)	237.851,88	290.222,36	339.713,00	315.469,50	255.565,00
Total jumlah sampah (ton)	257.363,79	304.722,55	369.179,25	394.359,00	379.395,00
Persentase sampah yang tertangani (%)	92,42%	95,24%	92,02%	80,00%	67,36%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, 2021

Operasional TPA/TPST/SPA

Meningkatnya kondisi titik pantau agar memenuhi kriteria kota bersih, hijau dan teduh. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup. Masih lemahnya aturan daerah untuk pemberian sanksi bagi masyarakat, pelaku usaha dan / atau kegiatan yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan, termasuk tidak membuang sampah pada tempatnya dan penebangan pohon tanpa seizin instansi terkait.

Tabel 2.117 | Operasional TPA/TPST/SPA Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai TPA (Program Adipura)	72,69	68,53	73,19	n/a	n/a

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, 2021

Persentase Izin Pengelolaan Sampah oleh Swasta yang Diterbitkan

Data ini baru disampaikan tahun ini sehingga izin Pengelolaan sampah oleh swasta ternyata telah diterbitkan sejak tahun 2015 sampai tahun 2020, data tersebut menunjukkan izin pengelolaan sampah tahun 2017 mengalami peningkatan, tahun 2018 terjadi penurunan dan tahun 2019 kembali meningkat. Adapun uraiannya sebagai berikut:

Tabel 2.118 | Persentase Izin Pengelolaan Sampah oleh Swasta yang Diterbitkan Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah izin pengelolaan sampah oleh swasta yang terbit	59,00	83,00	47,00	84,00	43,00
Jumlah izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diajukan dalam satu tahun	55,00	44,00	21,00	54,00	45,00
Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan (%)	107,27%	188,64%	223,81%	155,56%	95,56%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, 2021

Persentase Pengelolaan Sampah oleh Swasta Yang Taat Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Dari persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta di atas, yang taat terhadap Peraturan Perundang-Undangan sama besar persentasenya sehingga dapat dikatakan semua pengelola sampah taat terhadap peraturan yang berlaku.

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
jumlah izin pengelolaan sampah oleh swasta yang terbit	59,00	83,00	47,00	84,00	43,00
jumlah izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diajukan dalam satu tahun	55,00	44,00	21,00	54,00	45,00
Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan (%)	107,27%	188,64%	223,81%	155,56%	95,56%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, 2021

2.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rasio Penduduk ber-KTP Per Satuan Penduduk

Pada tahun 2020, penduduk usia >17 tahun yang ber-KTP sebanyak 971.311 dan jumlah penduduk usia >17 tahun atau telah menikah sebanyak 625.812 jiwa, dari jumlah tersebut di dapat rasio penduduk ber-KTP persatuan penduduk sebesar 155. Hal ini berarti bahwa dari jumlah penduduk 971.311 jiwa terdapat penduduk sebanyak 625.812 jiwa penduduk usia > 17 tahun yang telah menikah.

Tabel 2.119 | Rasio Penduduk ber-KTP Per Satuan Penduduk Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah penduduk usia > 17 yang ber-KTP	755.316	1.215.869	934.738	953.376	971.311
Jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah	707.116	711.811	713.376	630.530	625.812
Rasio Penduduk ber-KTP Per Satuan Penduduk	1,07	1,71	1,31	1,51	1,55

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, 2021

Namun data pendukung yang dapat menggambarkan evaluasi dan analisis pencapaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut, dimana untuk perekaman telah mencapai angka yang menggembirakan. Beberapa data pendukung yang dapat digambarkan dalam rangka memberikan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja program dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar Tahun 2016-2020 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 2.120 | Jumlah Penduduk yang Telah Melakukan Perekaman KTP Elektronik Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

No	Kecamatan	Data Penduduk KTP Elektronik				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Biringkanaya	-	60.546	39.372	39.920	40.323
2	Bontoala	-	60.635	39.948	40.420	40.717
3	Makassar	-	76.240	56.624	57.287	57.659
4	Mamajang	-	42.485	18.486	18.737	18.794
5	Manggala	-	46.053	22.683	22.750	22.657
6	Mariso	-	59.311	37.185	37.642	37.858
7	Panakkukang	-	106.381	92.694	94.219	95.538
8	Rappocini	-	54.554	23.653	24.003	24.183
9	Tallo	-	104.536	92.562	94.476	96.232
10	Tamalanrea	-	117.755	115.260	117.871	120.657
11	Tamalate	-	120.284	127.036	130.837	135.098
12	Ujung Pandang	-	96.934	94.546	97.175	100.238
13	Ujung tanah	-	110.987	100.394	101.950	103.538
14	Wajo	-	76.392	65.712	67.203	68.687
15	Kepulauan Sangkarrang	-		8.583	8.886	9.132
	Jumlah	-	1.133.093	934.738	953.376	971.311
	Target Penduduk Wajib KTP Elektronik	-	1.215.869	1.192.483	1.011.748	1.042.846
	Persentase Data Penduduk KTP Elektronik	-	93,19	78,39	94,23	93,14

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, 2021

Dari data di atas terlihat bahwa pelayanan pemerintah Kota terhadap penerbitan KTP elektronik untuk penduduk Kota Makassar sudah baik dimana di tahun 2020 menjadi

1.042.846 jiwa penduduk Makassar yang wajib KTP, sebanyak 971.311 yang telah melakukan perekaman, atau telah mencapai 93,14%. Faktor yang mempengaruhi belum tercapainya target penduduk wajib KTP elektronik antara lain yaitu faktor jaringan yang sangat mempengaruhi proses perekaman dan ketersediaan blangko KTP elektronik yang penyediaannya masih di pusatkan di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri sehingga kepemilikan KTP Elektronik secara fisik masih belum dapat di realisasikan.

Rasio Bayi Berakte Kelahiran

Pada tahun 2020, jumlah bayi di Kota Makassar sebanyak 134.258 orang dan yang memiliki akta kelahiran sebanyak 132.720 orang atau 98,85. Rasio bayi yang berakte kelahiran di Kota Makassar terus meningkat dalam lima tahun terakhir, dimana angka tersebut baru menunjukkan 86,14 di tahun 2016 atau meningkat ±12,71 dalam 5 tahun terakhir. Selengkapnya data rasio bayi yang berakte kelahiran di Kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.121 | Rasio Bayi Berakte Kelahiran Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah bayi berakte kelahiran	119.543	112.710	115.624	38.679	132.720
Jumlah bayi	138.781	130.617	130.427	39.258	134.258
Rasio bayi berakta kelahiran	0,86	0,86	0,89	0,99	0,99

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, 2021

Rasio Pasangan Berakte Nikah

Data tahun 2020, rasio pasangan berakte nikah Kota Makassar adalah 30,04% atau dengan kata lain dari 344.411 pasangan nikah hanya 103.488 yang tercatat memiliki akta nikah. Angka ini sangat rendah sekali dikarenakan kendala data yang tercatat di aplikasi SIAK, hanya mengakomodir penduduk non muslim yang ada penerbitan akta perkawinan dan perceraianya, sehingga rasio pasangan berakte nikah terdata sangat rendah sekali. Data rasio pasangan berakte nikah dalam Kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.122 | Rasio Pasangan Berakte Nikah Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah pasangan berakte nikah	57.919	44.728	58.680	138.449	103.488
Jumlah seluruh pasangan nikah	707.116	720.589	711.811	630.530	344.411
Rasio pasangan berakte nikah	0,08	0,06	0,08	0,22	0,30

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, 2021

Ketersediaan Database Kependudukan

Untuk ketersediaan database kependudukan Kota Makassar telah ada sejak tahun 2015, dimana data tersebut juga terkoneksi dengan pemerintah pusat melalui, direktorat jenderal kependudukan dan pencatatan sipil, kementerian dalam negeri. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) merupakan sistem yang dikembangkan oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan tertib administrasi dalam kependudukan.

Tabel 2.123 | Ketersediaan Database Kependudukan Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Ketersediaan database kepedudukan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, 2021

Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk secara konsisten terus mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir dimana pada tahun 2019 penerbitan Kartu Tanda Penduduk sudah mencapai 94% dari penduduk yang wajib KTP. Angka ini meningkat dari tahun 2018 yang baru mencapai 78,38%. Selengkapnya data cakupan penerbitan KTP di Kota Makassar dalam lima tahun terakhir tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 2.124 | Penerapat KTP Nasional Berbasis NIK Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, 2021

Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk

Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk secara konsisten terus mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir dimana pada tahun 2020 penerbitan Kartu Tanda Penduduk sebesar 93% dari penduduk yang wajib KTP, atau dari 1.042.846 penduduk yang sudah wajib KTP, sebanyak 971.311 orang telah memiliki KTP. Angka ini menurun dari tahun 2018 yang telah mencapai 94%. Selengkapnya data cakupan penerbitan KTP di Kota Makassar dalam lima tahun terakhir tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.125 | Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan	841.711	632.706	934.738	953.376	971.311
Jumlah penduduk wajib KTP	1.223.974	1.218.380	1.192.483	1.011.748	1.042.846
Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (%)	68,77%	51,93%	78,39%	94,23%	93,14%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, 2021

Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran

Akte kelahiran adalah bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Bayi yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam kartu keluarga dan diberi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk memperoleh pelayanan masyarakat lainnya Cakupan penerbitan akta kelahiran di Kota Makassar pada tahun 2016 s.d 2020 mengalami kenaikan dan penurunan. Tahun 2019 cakupan penerbitan akte kelahiran mencapai 98,53%, dan tahun 2020 sedikit naik pada angka 98,85%. Persentase penerbitan akte kelahiran tertinggi adalah pada tahun 2020, sedangkan persentase terendah adalah pada tahun 2017, seperti yang tergambar pada tabel berikut ini:

Tabel 2.126 | Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akte kelahiran di tahun bersangkutan	223.578	121.220	115.624	38.679	132.720
Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan	238.561	138.887	130.427	39.258	134.258
Cakupan penerbitan akte kelahiran (%)	94%	87%	89%	99%	99%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, 2021

2.3.2.7 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang Baik

Jumlah Kantor Pemerintahan Kelurahan yang baik yaitu gedung Kantor Kelurahan yang berada di Kota Makassar. Pada tahun 2017 terjadi pemekaran wilayah kelurahan dan kecamatan sesuai Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2015 dan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2015 sehingga jumlah kelurahan yang tahun sebelumnya berjumlah 143 setelah dimekarkan menjadi 153 kelurahan. Hal tersebut mempengaruhi capaiannya gedung pemerintahan kelurahan dalam kondisi baik yang mana jika dibandingkan dengan kantor kelurahan dalam kondisi yang baik 148 dan kantor kelurahan yang seharusnya menjadi 153 kelurahan sehingga capaiannya 96,73%. Hal tersebut belum tercapai dikarenakan 10 Kelurahan belum memiliki gedung Pemerintahan sehingga harus menyewa tempat/kantor untuk pelaksanaan aktivitas pemerintahan kelurahan.

Tabel 2.127 | Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang Baik Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah kantor pemerintahan kelurahan yang baik	143	143	146	148	146
Jumlah seluruh kelurahan	143	153	153	153	153
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan kelurahan dalam konsisi baik (%)	100%	93,46%	95,42%	96,73%	95,42%

Sumber: Bagian Pemberdayaan Masyarakat, Sekretariat Daerah Kota Makassar, 2021

Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Dari 153 Kelurahan di Kota Makassar semuanya telah terbentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang semuanya memiliki kelompok binaan LPM, sehingga setiap LPM memiliki kelompok binaan atau rata-rata satu LPM memiliki satu kelompok binaan masyarakat di kelurahannya. Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 2.128 | Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah kelompok binaan LPM	143	153	153	153	153
Jumlah LPM	143	153	153	153	153
Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Bagian Pemberdayaan Masyarakat, Sekretariat Daerah Kota Makassar, 2021

Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Pada tahun 2017 ada 168 PKK di seluruh kecamatan dan kelurahan di Kota Makassar, dan terdapat 152 kelompok binaan PKK pada Kelurahan, sehingga rata-rata satu kelompok PKK di Kelurahan Makassar memiliki satu kelompok binaan. Pada tahun 2019, kelompok binaan PKK di Kota Makassar meningkat lebih dari 266% atau bertambah 859 kelompok binaan sepanjang tahun 2018 – 2019. Data kelompok binaan PKK Kota Makassar dalam lima tahun terakhir tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.129 | Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah kelompok binaan PKK	158	168	320	179	734
Jumlah PKK	158	168	168	169	168
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (%)	100%	100%	190%	106%	437%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, 2021

Persentase LSM Aktif

Jumlah ORMAS/LSM Aktif Tahun 2020 sebanyak 43 ORMAS/LSM sedangkan yang aktif sebanyak 43 ORMAS/LSM dengan persentase sebesar 100% atau termasuk dalam kategori sangat tinggi.

Menurunnya jumlah Organisasi Masyarakat (ORMAS) yang mendaftar pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar disebabkan karena:

- 1. Masih kurangnya pemahaman pengurus ormas/orpol tentang penetapan aturan dan landasan hukum yang baru kepada organisasi di daerah khususnya pada proses pendaftaran organisasi di pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yakni Permendagri No.33 Tahun 2012 tentang pedoman pendaftaran organisasi ke masyarakat lingkup Kementerian Dalam Negeri maupun pemerintah Daerah.
- 2. Masih rendahnya kualitas pengurus dan anggota ormas/orpol dalam menjalankan organisasinya termasuk administrasi yang ada pada ormas/orpol tersebut.

Tabel 2.130 | Persentase LSM Aktif Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah LSM Aktif	48	20	39	56	43
Jumlah LSM	48	20	39	56	43
Persentase LSM Aktif	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar, 2021

Persentase LPM Berprestasi

Pada tahun 2019 terdapat 3 LPM Kota Makassar yang berprestasi baik tingkat Kota Makassar dari 153 LPM. Angka ini terhitung sangat rendah mengingat hanya 3 LPM atau 2% di Kota Makassar yang berprestasi. Persentase LPM Kota Makassar yang berprestasi tersaji berikut ini:

Tabel 2.131 | Persentase LPM Berprestasi Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah LPM Berprestasi	3	3	3	3	3
Jumlah LPM	143	153	153	153	153
Persentase LPM Berprestasi (%)	2,10%	1,96%	1,96%	1,96%	1,96%

Sumber: Bagian Pemberdayaan Masyarakat, Sekretariat Daerah Kota Makassar, 2021

Persentase PKK Aktif

Jumlah PKK di Kota Makassar pada tahun 2020 sebanyak 168, menurun dari tahun sebelumnya yang sebanyak 169 PKK. Semua PKK yang ada di Kota Makassar adalah organisasi yang aktif bergerak di kemasyarakatan. Data persentase PKK aktif di Kota Makassar dalam lima tahun terakhir tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 2.132 | Persentase PKK Aktif Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah PKK Aktif	158	168	168	169	168
Jumlah PKK	158	168	168	169	168
Persentase PKK Aktif (%)	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, 2021

Persentase Posyandu Aktif

Jumlah Posyandu di Kota Makassar dalam tiga tahun terakhir secara konsisten pada jumlah 1.010 posyandu yang ke semuanya adalah Posyandu aktif memberi pelayanan dimasyarakat. Persentase posyandu aktif di Kota Makassar mencapai 100%. Data persentase Posyandu Kota Makassar dalam lima tahun terakhir tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 2.133 | Persentase Posyandu Aktif Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Posyandu Aktif	1,000	1,010	1,010	1,010	1,010
Jumlah Posyandu	1,000	1,010	1,010	1,010	1,010
Persentase Posyandu Aktif	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Makassar, 20201

Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah Swadaya Masyarakat yang mendukung program pemberdayaan masyarakat tertinggi terjadi selama tiga tahun yaitu pada tahun 2016 – 2018 sebanyak 7, menurun pada tahun 2019 sebanyak 5 dan pada tahun 2020 sebanyak 3. Data swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.134 | Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Swadaya masyarakat mendukung program pemberdayaan masyarakat	7	7	7	5	3
Total program pembedayaan masyarakat	7	7	7	3	3
Persentase swadaya masyarakat mendukung program pemberdayaan masyarakat (%)	100%	100%	100%	167%	100%

Sumber: Bagian Pemberdayaan Masyarakat, Sekretariat Daerah Kota Makassar, 2021

Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat

Sepanjang tahun 2016 – 2018, program pemberdayaan masyarakat sebanyak 7 program dan keseluruhannya ada keterlibatan masyarakat dalam Program pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan dan dipelihara masyarakat, sehingga persentase pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat mencapai 100%. Pada tahun 2019, capaian tersebut menurun dimana dari 9 program pemberdayaan masyarakat, hanya 7 program yang dikembangkan dan dipelihara oleh masyarakat, atau hanya mencapai 77%. Sedangkan pada tahun 2020 program pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan dan dipelihara masyarakat sebanyak 3 program. Data persentase pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.135 | Persentase Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Program pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan dan dipelihara masyarakat	7	7	7	7	3
Total pasca program pemberdayaan masyarakat	7	7	7	9	3
Persentase pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat (%)	100%	100%	100%	77,78%	100%

Sumber: Bagian Pemberdayaan Masyarakat, Sekretariat Daerah Kota Makassar, 2021

2.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Laju Pertumbuhan Penduduks

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) adalah perubahan penduduk di suatu wilayah tertentu apakah bertambah atau berkurang dan dipengaruhi oleh Mortalitas, Fertilitas dan Urban. LPP diharapkan tiap tahun menurun. LPP di kota Makassar dalam lima tahun terakhir terus mengalami penurunan, ini sangat relevan dengan program Pemerintah Pusat untuk menekan laju pertumbuhan penduduk melalui Program KKBPK. Pertumbuhan penduduk Makassar Tahun 2019 sebesar 1,29% sedangkan LPP untuk tahun 2020 sebesar 1,23% data Badan Pusat Statistik (BPS).

Tabel 2.136 | Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (%)	1,39%	1,32%	1,29%	1,29%	1,23%

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar, 2021

Total Fertility Rate (TFR)

Realisasi indikator Total Fertility Rate (TFR) tahun 2020 dengan realisasi sebesar 2,11 atau 97,17% jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 1,99 TFR atau 102,01% mengalami peningkatan kelahiran karena target ini merupakan target menurun sebesar 4,84% dimana TFR di kota Makassar mengalami Penurunan artinya rata-rata anak yang dilahirkan pada pasangan usia subur usia 15 – 49 tahun mempunyai 2 orang atau lebih anak yang dilahirkan.

Tabel 2.137 | Total Fertility Rate Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Total Fertility Rate (TFR)	2,00	2,00	2,00	1,99	2,11

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar, 2021

Dokumen Rencana Induk Pengendalian Penduduk

Dokumen Rancangan Induk Pengendalian Penduduk dengan 5 Aspek yaitu : (1). Pengendalian Kuantitas Penduduk (2). Peningkatan kualitas penduduk (3). Pengarahan mobilitas penduduk (4). Pembangunan Keluarga (5). Pembangunan database kependudukan Pada tahun 2018 Dinas Pengendalian Penduduk telah menghasilkan 2 Dokumen Rancangan Induk Pengendalian Penduduk Yaitu (1). Grand Desain Kependudukan (2). Analisis dan Profil Kependudukan. Sedangkan untuk tahun 2019 (1). Buku profil Kependudukan (2). Buku

Analisis Parameter Kependudukan. Tahun 2019 terdapat 2 Dokumen Rencana Induk Pengendalian Penduduk, Kota Makassar. Capaian untuk tahun 2020 sama dengan capaian 2019 hal ini disebabkan pada tahun 2020 DPPKB tidak melaksanakan kegiatan Penyusunan Dokumen rancangan induk Pengendalian Penduduk dengan 5 aspek hal ini dikarenakan *refocusing* anggaran yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 sehingga masih menggunakan data 2019.

Tabel 2.138 | Dokumen Rencana Induk Pengendalian Penduduk Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Dokumen Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	-	-	2	2	2

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar, 2021

Persentase Sektor yang Tersosialisasi Konsep Pembangunan Yang Berwawasan Kependudukan dan Alat Ukurnya (IPBK/Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan)

Persentase sektor yang tersosialisasi Konsep Pembangunan yang Berwawasan Kependudukan dan Alat Ukurnya (IPBK / Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan) adapun perangkat daerah yang berpartisipasi dalam menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian penduduk adalah Bappeda kota Makassar, Dinas Kesehatan Kota Makassar, Dinas Pendidikan Kota Makassar, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Makassar serta 15 (lima belas) Kecamatan di Kota Makassar.

Tabel 2.139 | Persentase Sektor yang Tersosialisasi Konsep Pembangunan Yang Berwawasan Kependudukan dan Alat Ukurnya (IPBK/Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan) Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang Terpapar	-	-	-	20	20
Jumlah Perangkat Daerah yang Ada	-	-	-	51	51
Persentase sektor yang terisolasi konsep pembangunan berwawasan kependudukan (%)	-	-	-	39,22%	39,22%

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar, 2021

Persentase Perangkat Daerah yang Berperan Aktif dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB

Persentase perangkat daerah yang berperan aktif dalam program Kampung KB Tahun 2020 sebesar 52,94 % sama dengan capaian Tahun 2019 terdapat 27 SKPD yang terdiri dari Lima belas Kecamatan ditambah Dinas kesehatan, Dinas Kependudukan dan catatan sipil, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Koperasi, Dinas Ketahanan Pangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar, Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar serta Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Makassar dalam penggerakan dan pembangunan daerah melalui Kampung KB adalah sebagai berikut.

Tabel 2.140 | Persentase Perangkat Daerah yang Berperan Aktif dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Perangkat daerah yang berperan aktif di Kampung KB	10	22	26	27	27
Jumlah semua perangkat Daerah	52	51	51	51	51
Persentase Perangkat Daerah yang berperan aktif di Kampung KB (%)	19,23%	43,14%	50,98%	52,94%	52,94%

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar, 2021

Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk

Persentase Perangkat Daerah (Dinas/badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk pada Dinas Pengendalian penduduk dan KB Kota Makassar perangkat daerah yang berpartisipasi dalam menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian penduduk adalah Badan Perencanaan Pembangunan Kota Makassar, Dinas Kesehatan Kota Makassar, Dinas Pendidikan Kota Makassar, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Makassar serta 15 Kecamatan di Kota Makassar.

Tabel 2.141 | Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Penedalian Penduduk	-	-	-	20	20
Jumlah semua perangkat Daerah	-	-	-	51	51
Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dan menanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk (%)	-	-	-	39,22%	39,22%

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar, 2021

Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang Mengatur Tentang Pengendalian Kuantitas dan Kualitas Penduduk

Sampai dengan tahun 2019 Dinas Pengendalian penduduk Jumlah Perda/Perkada yang dihasilkan terkait kebijakan yang mengatur tentang pengendalian kualitas dan kuantitas penduduk dalam hai ini adalah Peraturan Walikota Nomor : 64 Tahun 2019 Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan.

Tabel 2.142 | Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang Mengatur Tentang Pengendalian Kuantitas dan Kualitas Penduduk Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Perda atau Perkada tentang Pengendalian Penduduk	-	-	-	1	1

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar, 2021

Capaian untuk tahun 2020 sama dengan capaian tahun 2019 hal ini disebabkan pada tahun 2020 DPPKB tidak melaksanakan kegiatan penyusunan Perda dan Perkada tentang Pengendalian Penduduk oleh karena refocusing anggaran dikarenakan pandemi Covid-19.

Jumlah Sektor Yang Menyepakati dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter dan Proyeksi Penduduk) untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan

Untuk tahun 2019 Dinas Pengendalian Penduduk Kota Makassar baru menyusun Parameter dan proyeksi penduduk sehingga belum ada sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (Parameter dan Proyeksi Penduduk untuk Perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan) Adapun sektor yang menyepakati data profil adalah Bappeda kota Makassar, Dinas Kesehatan Kota Makassar, Dinas Pendidikan Kota Makassar, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Makassar dan BPS. Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan pada tahun 2020 yaitu sejumlah 6 sektor, sama dengan tahun sebelumnya.

Tabel 2.143 | Jumlah Sektor Yang Menyepakati dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter dan Proyeksi Penduduk) untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil Kependudukan	-	-	-	6	6

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar, 2021

Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga

Relevan dengan data pertumbuhan penduduk Kota Makassar yang menunjukkan angka terus menurun, rata-rata jumlah anak per keluarga dalam lima tahun terakhir terus mengalami penurunan.

Tabel 2.144 | Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah anak	400.417	462.978	459.330	350.179	425.269
Jumlah Keluarga	243.182	285.744	289.812	285.417	285.417
Rata-rata jumlah anak per keluarga	1,65	1,62	1,58	1,23	1,49

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar, 2021

Capaian untuk tahun 2020 sama dengan capaian tahun 2019 hal ini disebabkan pada tahun 2020 DPPKB tidak melaksanakan kegiatan pendataan Keluarga (PK) dimana rata-rata jumlah anak per keluarga dapat diperoleh melalui pendataan tersebut hal ini dikarenakan adanya penundaan pendataan secara Nasional yang disebabkan adanya pandemi Covid-19.

Rasio Akseptor KB

Data sampai dengan tahun 2018 dari jumlah PUS yang ada di Kota Makassar berdasarkan laporan Pengendalian Lapangan tingkat kota jumlah peserta KB Aktif sebesar 134.476 Akseptor atau 69,68% terhadap PUS sebesar 192.984 pasangan usia subur, ini artinya dari 100 PUS yang ada di Kota Makassar terdapat 69 orang ber KB angka ini adalah angka yang cukup ideal oleh karena sebagian dari PUS yang belum ber-KB (30,32%) adalah terdiri dari PUS yang hamil, PUS yang belum mempunyai anak/Ingin anak segera (IAS), PUS ingin anak ditunda dulu (IAT), PUS tidak ingin anak lagi (TIAL), PUS yang mengalami komplikasi serta

alasan lainnya. Data rasio akseptor KB Kota Makassar dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.145 | Rasio Akseptor KB Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Akseptor KB	129.165	132.222	134.476	133.651	118.962
Jumlah pasangan usia subur	185.348	190.343	192.984	193.191	174.434
Rasio Akseptor KB	69,69	69,47	69,68	69,18	68,20

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar, 2021

Rasio Akseptor KB tahun 2020 capaian sebesar 68,20 % sedangkan pada tahun 2019 sebesar 69,18 terjadi penurunan sebesar 0,98% , berkurangnya jumlah akseptor KB tahun 2020 dikarenakan kurangnya PUS yang ingin ber KB akibat pandemi covid-19.

Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49

Contraceptive Prevalence Rate (CPR) atau angka pemakaian kontrasepsi adalah angka yang menunjukkan banyaknya PUS (Pasangan Usia Subur) yang sedang memakai kontrasepsi pada saat pencacahan. CPR untuk PUS di Kota Makassar pada tahun 2020 adalah 68,20 sedangkan pada tahun 2019 69,18% terjadi penurunan sebesar 0,98%. CPR tertinggi adalah pada tahun 2016 sedangkan CPR terendah adalah pada tahun 2020. Penggunaan Kontrasepsi pada Perempuan Menikah usia 15 – 49 tahun selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.146 | Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49 Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah peserta KB Aktif	129.165	132.222	134.476	133.651	118.962
Jumlah pasangan usia subur	185.348	190.343	192.984	193.191	174.434
Rasio Pemakai kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun	69,69	69,47	69,68	69,18	68,20

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar, 2021

Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15 – 19) Per 1.000 Perempuan Usia 15–19 Tahun

Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) dengan capaian Pada tahun 2019 mencapai 33,52 % dibandingkan tahun 2018 sebesar 35,01 terjadi peningkatan sebesar 1,49 % hal ini disebabkan adanya kesadaran remaja tentang kesehatan reproduksi sehingga kelahiran pada remaja dapat menurun (target ini merupakan target menurun).

Tabel 2.147 | Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15 – 19) Per 1.000 Perempuan Usia 15–19 Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 15-19	1.469	2.010	1.925	1.716	1.716
Jumlah penduduk perempuan kelompok umur 15-19	43.012	50.385	54.979	51.197	51.197
Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15 -19) per 1.000 perempuan usia 15-19	34,15	39,89	35,01	33,52	33,52

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar, 2021

Cakupan untuk tahun 2020 sama dengan capaian tahun 2019 sebesar 33,52 hal ini disebabkan pada tahun 2020 DPPKB tidak melaksanakan kegiatan pendataan Keluarga (PK) dimana data Angka kelahiran Remaja (perempuan usia 15 – 19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15 – 19) dapat diperoleh melalui pendataan tersebut hal ini dikarenakan adanya penundaan pendataan secara Nasional yang disebabkan adanya pandemi Covid-19.

Cakupan Pasangan Usia Subur yang Istrinya di Bawah 20 Tahun

Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah 20 tahun pada tahun 2020 sebesar 0,56 diperoleh dari Jumlah pasangan usia subur dengan istri di umur kurang 20 tahun menggunakan data tahun 2019 sebesar 983 (dikarenakan tidak dilaksanakan Pendataan Keluarga) dibagi dengan Jumlah pasangan usia subur di tahun 2020 sebesar 174.343. Cakupan pasangan usia subur di bawah 20 tahun di Kota Makassar pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.148 | Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya di Bawah 20 Tahun
Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah pasangan usia subur yang istrinya di bawah 20 tahun	1.469	2.035	1.583	983	983
Jumlah pasangan usia subur	185.348	190.343	192.984	193.191	174.434
Cakupan pasangan usia subur yang istrinya di bawah 20 Tahun	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar, 2021

Cakupan Pasangan Usia Subur yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi

Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi (*Unmeet Need*) berdasarkan capaian tahun 2020 sebesar 9,20 % dibandingkan tahun 2019 sebesar 7,93% terjadi penurunan sebesar 1,27 % capaian ini merupakan target menurun, dari data yang ada terjadi penurunan dari tahun sebelumnya (*Unmeet Need* merupakan target yang semakin rendah realisasinya dari target, semakin tinggi pencapaian kinerja). Hal ini disebabkan oleh adanya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan adanya kekawatiran PUS untuk mendapatkan Pelayanan KB.

Tabel 2.149 | Cakupan Pasangan Usia Subur yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi
Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani	13.933	13.142	13.736	15.319	16.046
Jumlah pasangan usia subur	185.348	190.343	192.984	193.191	174.434
Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi	0,075%	0,069%	0,071%	0,079%	0,092%

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar, 2021

Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang

Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) berdasarkan capaian tahun 2020 sebesar 30,68% dibandingkan tahun 2019 sebesar 37,42% terjadi penurunan 6,74%. Hal ini disebabkan oleh adanya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan adanya kekhawatiran PUS untuk mendapatkan Pelayanan KB di Pusat Pelayanan Kesehatan Maupun Pelayanan KB Mobile/Bergerak tahun 2016 sampai tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.150 | Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP	38.609	44.254	48.037	50.008	36.493
Jumlah akseptor KB	129.165	132.222	134.476	133.651	118.962
Persentase penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (%)	0,299%	0,335%	0,357%	0,374%	0,307%

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar, 2021

Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi

Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi tahun 2020 sebesar 46,63% sedangkan pada tahun 2019 sebesar 44,55% terjadi penurunan 2,08% hal ini disebabkan pandemi Covid-19 sehingga meningkatnya PUS yang tidak lagi menggunakan alat kontrasepsi. Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.151 | Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi	56.183	58.121	58.514	59.540	55.472
Jumlah akseptor KB	129.165	132.222	134.476	133.651	118.962
Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi (%)	43,50%	43,96%	43,51%	44,55%	46,63%

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar, 2021

Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita ber-KB

Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) dari tahun 2020 sebesar 75,02% mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 77,46% atau sebesar 2,44%, penurunan ini disebabkan pembatasan sosial dalam masa pandemi Covid-19. Cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) ber-KB di Kota Makassar tahun 2015 sampai tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.152 | Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita ber-KB Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB	9.544	11.586	11.957	12.290	8.840
Jumlah anggota kelompok BKB	12.647	14.797	15.410	15.867	11.783
Cakupan anggota Bina Kelompok Balita (BKB) ber-KB (%)	75,46%	78,30%	77,59%	77,46%	75,02%

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar, 2021

Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB

Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) dari tahun 2016 s.d 2020 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hal ini Dikarenakan DPPKB gencar melaksanakan pembinaan dan orientasi terhadap kelompok- kelompok BKR yang ada. Cakupan anggota BKR Kota Makassar dalam lima tahun terakhir secara konsisten membaik dimana pada tahun 2020 data menunjukkan dari 9.001 anggota BKL, sebanyak 6.386 anggota aktif ber-KB atau lebih dari 70,95%.

Tabel 2.153 | Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah anggota kelompok BKR yang ber-KB	7.047	8.466	9.017	9.342	6.386
Jumlah anggota kelompok BKR	11.154	12.480	12.941	13.210	9.001
Cakupan anggota Bina Kelompok Remaja (BKR) ber-KB (%)	63,18%	67,84%	69,68%	70,72%	70,95%

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar, 2021

Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB

Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) dari tahun 2015 s.d 2019 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hal ini dikarenakan DPPKB gencar melaksanakan pembinaan dan orientasi terhadap kelompok- kelompok BKL yang ada. Cakupan Bina Kelompok Balita pada tahun 2019 mencapai 66,96% atau dari 9.326 kelompok BKB, sebanyak 6.245 anggotanya yang memakai kontrasepsi (aktif ber-KB). Cakupan bina kelompok balita Kota Makassar secara konsisten membaik dalam lima tahun terakhir. Hal ini dapat dilihat dari data pada tabel berikut:

Tabel 2.154 | Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah anggota kelompok BKL yang ber-KB	4.558	5.564	6.001	6.245	4.641
Jumlah anggota kelompok BKL	7.541	8.524	9.040	9.326	7.501
Cakupan anggota Bina Kelompok Lansia (BKL) ber-KB (%)	60,44%	65,27%	66,38%	66,96%	61,87%

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar, 2021

Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan

Dari tahun 2016 sampai tahun 2020 Pusat Pelayanan keluarga Sejahtera (PPKS) yang baru terbina sebanyak 3 PPKS, dari 15 Kecamatan yang ada di Kota Makassar atau 20%. Kecamatan yang memiliki PPKS yaitu di Kecamatan Tallo, Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Manggala. Capaian untuk tahun 2020 sama dengan capaian tahun 2019 sebesar 20 % hal ini disebabkan pada tahun 2020 DPPKB tidak melaksanakan kegiatan Pembentukan Pusat Pelayanan Keluarga (PPKS) hal ini dikarenakan refocusing anggaran yang disebabkan oleh pandemi Covid-19, sehingga masih menggunakan data capaian 2019.

Tabel 2.155 | Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah PPKS	2	2	2	3	3
Jumlah Kecamatan	14	15	15	15	15
Pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	14,29	13,33	13,33	20,00	20,00

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar, 2021

Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa

Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa pada tahun 2020 capaian sebesar 793,33 % dibandingkan tahun 2019 sebesar 680%, terjadi peningkatan sebesar 113,33% hal ini disebabkan karena semakin bertambahnya jumlah remaja yang ingin dijangkau untuk menyebarkan informasi tentang Kesehatan Reproduksi (Kespro). Hal ini tidak terlepas dari respon yang baik dari sekolah- sekolah sebagai mitra dari kelompok PIK Remaja/mahasiswa sehingga dapat terbentuk PIK di sekolah masing-masing. Cakupan remaja dan pusat informasi dan konseling Remaja/mahasiswa tersaji dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.156 | Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa
Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah PIKR/M	63	76	87	102	119
Jumlah Kecamatan	14	15	15	15	15
Cakupan remaja dalam PIKR/M	450,00	506,67	580,00	680,00	793,33

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar, 2021

Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk

Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar 100% dikarenakan semua PKB/PLKB yang ada Pada DPPKB diberdayakan semua, atau dari 102 PKB/PLKB semuanya aktif.

Tabel 2.157 | Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk
Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah PKB/PLKB yang didayagunakan	133	127	114	135	102
Jumlah PKB/PLKB	133	127	114	135	102
Cakupan PLKB/LKB yang didayagunakan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar, 2021

Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB Mandiri

Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber-KB mandiri dari tahun 2019 sebesar 65,52 % sedangkan tahun 2020 sebesar 41,85 % terjadi penurunan persentase sebesar 23,67 %. Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB mandiri pada tahun 2020 sebanyak 927 sedangkan pada tahun 2019 hanya sebanyak 2552, sedangkan jumlah anggota kelompok UPPKS pada tahun 2019 sebanyak 3.895 sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 2.215 jadi dilihat dari segi kuantitas ada kenaikan jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber KB mandiri.

Tabel 2.158 | Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB Mandiri Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah anggota kelompok UPPKS yang berKB mandiri	2.139	2.337	2.457	2.552	927
Jumlah anggota kelompok UPPKS	3.534	3.590	3.778	3.895	2.215
Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber-KB Mandiri	60,53	65,10	65,03	65,52	41,85

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, 2021

Terjadinya Penurunan cakupan PUS Peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber KB mandiri dari tahun sebelumnya dikarenakan pada tahun 2019 dihitung semua Jumlah anggota Kelompok UPPKS yang ber KB sedangkan tahun 2020 yang dihitung Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber KB Mandiri.

Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan

Rasio Petugas pembantu pembina kelurahan di setiap kelurahan mengikuti jumlah kelurahan yang ada di Kota Makassar sebanyak 153 kelurahan sehingga jumlah kader PPKBD nya sebanyak 153 kader atau 100%.

Tabel 2.159 | Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah petugas Pembantu Pembina KB Kelurahan	143	153	153	153	153
Jumlah Kelurahan	143	153	153	153	153
Rasio petugas Pembantu Pembina KB setiap Kelurahan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, 2021

Cakupan Ketersediaan Dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi di Gudang Kabupaten / Kota

Capaian ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di Gudang KB dinas pengendalian penduduk dan KB pada tahun 2020 sebanyak 14.918 buah, sedangkan kebutuhan rata-rata pemakaian alat dan obat kontrasepsi (Pil, Kondom, Suntik) setiap bulannya hanya 3.968 buah, sehingga persediaan masih sangat memenuhi kebutuhan. Sedangkan cakupan ketersediaan dan distribusi alat kontrasepsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tahun 2020 sebesar 375,96%. Data selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.160 | Cakupan Ketersediaan Dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi di Gudang Kabupaten / Kota Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Persediaan Alat dan Obat Kontrasepsi	33.090	60.914	41.504	105.648	14.918
Rata-rata Pemakaian Alat dan Obat Kontrasepsi per Bulan	2.843	4.123	4.100	8.804	3.968
Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di Gudang	1.163,91	1.477,42	1.012,29	1.200,00	375,96

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar, 2021

Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita

Rata-rata usia kawin pertama wanita di Kota Makassar dalam rentang 20-an tahun, dimana data menunjukkan pada tahun 2020 jumlah wanita menurut usia kawin pertama sebanyak 66.523 dimana umur kawin pertama wanita di kali jumlah wanita menurut usia kawin pertama adalah 1.396.983, sehingga rata-rata usia kawin pertama wanita di Kota Makassar tahun 2019 adalah 21 tahun. Rata-rata usia kawin pertama wanita di Kota Makassar dalam lima tahun terakhir konsisten antara 20 sampai dengan 21 tahun. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya usia kawin yang telah memasuki usia matang dalam hal mental maupun fisik. Selengkapnya data rata-rata usia kawin pertama wanita tahun 2016-2020 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.161 | Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah (umur kawin pertama wanita x jumlah wanita menurut usia kawin pertama)	2.901.799	3.406.475	3.561.396	3.209.325	1.396.983
Jumlah wanita menurut usia kawin pertama	141.043	165.618	173.146	152.825	66.523
Rata-rata usia kawin pertama wanita	20,57	20,57	20,57	21,00	21,00

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar, 2021

Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD

Anggaran dari APBD yang terus bertambah dari tahun ke tahun menunjukkan kepedulian Pemerintah Kota Makassar cukup besar dalam mendukung program-program pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana. Pembiayaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga melalui APBD dilihat dari jumlah dana dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 terjadi peningkatan yang sangat signifikan kemudian turun di Tahun 2019 0,60% hal ini disebabkan kepedulian dan dukungan penuh Pemerintah Kota Makassar terhadap Program-program Kependudukan dan keluarga berencana dengan harapan agar jumlah penduduk di Kota Makassar dapat terkendalikan serta tumbuh seimbang serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa akan datang capaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.162 | Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah anggaran untuk urusan PPKB	17.382.017.000	21.228.338.000	30.442.380.400	24.369.102.000	27.439.862.000
Jumlah APBD	3.278.340.966.082	3.313.673.623.887	4.089.589.897.000	4.033.272.083.716	4.217.870.000.000
Persentase pembiayaan program kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga melalui APBD	0,53	0,64	0,74	0,6	0,65

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar, 2021

2.3.2.9 Perhubungan

Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Jumlah arus penumpang umum adalah jumlah keseluruhan penumpang yang menggunakan angkutan umum yang keluar masuk pada suatu daerah selama 1 (satu) tahun di Kota Makassar sebanyak 6.202.000 (data sementara) penumpang dari 4 moda angkutan. Jumlah penumpang ini terus meningkat dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Tetapi mengalami penurunan mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Hal ini disebabkan karena banyaknya penggunaan kendaraan atau mobil pribadi. Selain itu adanya pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi jumlah arus penumpang. Selengkapnya data arus penumpang dalam lima tahun terakhir di Kota Makassar dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 2.163 | Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah arus penumpang bis	1.269.879	732.195	678.549	874.261	-
Jumlah arus penumpang kereta api	-	-	-	-	-
Jumlah arus penumpang kapal laut	677.490	307.330	578.823	482.493	104.926
Jumlah arus penumpang pesawat udara	10.756.015	12.282.135	13.800.000	10.757.061	6.097.074
Jumlah arus penumpang angkutan umum	12.703.384	13.321.660	15.057.372	12.113.815	6.202.000

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Makassar, 2021

Rasio Izin Trayek

Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Jaringan trayek terdiri atas:

- a. jaringan trayek lintas batas negara;
- b. jaringan trayek antar kota antar provinsi;
- c. jaringan trayek antar kota dalam provinsi; dan
- d. jaringan trayek perkotaan;

Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.

Izin trayek yang dikeluarkan, dalam hal ini pete-pete semakin menurun karena sebagian kendaraan yang tidak layak jalan, tidak diperpanjang lagi izin trayeknya. Selain itu juga disebabkan karena makin berkurangnya jumlah angkutan perkotaan atau pete-pete disebabkan karena menjamurnya kendaraan-kendaraan daring. Rasio izin trayek selama lima tahun terakhir dari tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.164 | Rasio Izin Trayek Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah izin trayek yang dikeluarkan	2.541	1.795	1.211	948	502
Jumlah penduduk	1.658.503	1.668.314	1.671.001	1.480.480	1.484.912
Rasio izin trayek	1: 652,70	1: 929,42	1: 1.379,85	1: 1.561,69	1: 2.957,99

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Makassar, 2021

Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Uji KIR yang dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kota

Makassar terdiri dari : uji KIR terhadap mobil penumpang umum, bus, mobil angkutan barang, dan kereta tempelan (truk). Jumlah uji kir angkutan umum di Kota Makassar tahun 2019 sejumlah 40.152 unit, meningkat 28,5% dari jumlah kir 2018 yang sebanyak 31.242 unit kendaraan.

Tabel 2.165 | Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah uji kir angkutan umum	55.088	35.786	31.242	40.152	2.524

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Makassar, 2021

Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Jumlah yang ada di Kota Makassar sebanyak 3 pelabuhan. Yang dikelola oleh Pemerintah Kota Makassar yaitu Kayu Bangkoa. Dan yang dikelola oleh PT. Pelindo adalah Pelabuhan Soekarno Hatta dan Pelabuhan Paotere. Sedangkan jumlah terminal bis di Kota Makassar sebanyak 2 unit yaitu Terminal Mallengkeri Tipe B dan Terminal Daya Tipe A. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.166 | Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah pelabuhan laut	3	3	3	3	3
Jumlah pelabuhan udara	-	-	-	-	-
Jumlah terminal bis	2	2	2	2	2
Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis	5	5	5	5	5

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Makassar, 2021

Persentase Layanan Angkutan Darat

Jumlah angkutan darat tahun 2017 tercatat 1.795 unit sedangkan jumlah penumpang angkutan darat berjumlah 42.003.000 penumpang sehingga persentase layanan angkutan darat sebesar 1 berbanding 23.400. atau dengan kata lain 1 angkutan darat di Kota Makassar untuk melayani 23.400 penumpang. Tahun 2019 jumlah angkutan darat menurun menjadi 948 unit yang melayani 16,3 juta penumpang, sehingga secara rasio layanan angkutan darat membaik dimana satu angkutan darat untuk melayani lebih sedikit penumpang. Angka ini bukanlah angka ideal mengingat satu angkutan darat harus melayani terlalu banyak penumpang. layanan angkutan darat kota Makassar tersaji pada tabel di bawah:

Tabel 2.167 | Persentase Layanan Angkutan Darat Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah angkutan darat	2.541	1.795	1.211	948	502
Jumlah penumpang angkutan darat	59.459.400	42.003.000	49.237.011	16.381.440	939.600
Persentase layanan angkutan darat	1: 23.400,00	1: 23.400,00	1: 40.658,14	1: 17.280,00	1: 1.871,71

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Makassar, 2021

Pemasangan Rambu-Rambu Jalan

Pemasangan rambu-rambu lalu lintas pada tahun 2016 dan 2017 tidak ada. Hal ini disebabkan karena dana DAK yang direncanakan untuk membiayai pemasangan rambu-rambu ditarik kembali oleh Pemerintah Pusat akibat adanya kebijakan yang berlaku di seluruh Indonesia. Untuk tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020 pemasangan rambu dibiayai dari APBD tetapi hasilnya masih jauh dari target yaitu 3000 unit. Data persentase rambu lalu lintas yang terpasang di Kota Makassar tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.168 | Persentase Pemasangan Rambu-Rambu Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah pemasangan rambu-rambu	-	-	161	110	81
Jumlah rambu rambu yang seharusnya tersedia	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Persentase pemasangan rambu-rambu jalan	-	-	5,37	3,67	2,70

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Makassar, 2021

Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Pada tahun 2019 rasio panjang jalan per kendaraan relatif membaik menjadi 1 km jalan untuk melayani 981 kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan berfluktuasi setiap tahunnya dimana panjang jalan tidak bertambah sementara jumlah kendaraan berfluktuasi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Rasio ini bukanlah angka yang ideal dikarenakan tidak seimbangnya antara peningkatan panjang jalan dan peningkatan jumlah kendaraan, yang berakibat pada permasalahan kemacetan lalu lintas.

Tabel 2.169 | Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Panjang jalan	1.595,64	1.595,99	1.557,82	1.593,46	1.593,46
Jumlah kendaraan	1.771.095	1.779.380	1.471.876	1.562.675	1.139.068
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	1: 1.109,96	1: 1.114,91	1: 944,83	1: 980,68	1: 714,84

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Makassar, 2021

Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum

Jumlah orang yang terangkut angkutan umum setiap tahun mengalami penurunan. Hal ini disebabkan makin berkurangnya jumlah angkutan umum di Kota Makassar. Untuk jumlah barang yang terangkut angkutan umum tidak dilakukan pendataan. Jumlah orang yang terangkut angkutan umum setiap tahun selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.170 | Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	70.239.415	54.309.135	20.926.080	16.381.440	9.939.600

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Makassar, 2021

Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/ Terminal Per Tahun

Jumlah orang melalui dermaga sebanyak 50.000 jiwa dihitung berdasarkan jumlah tiket terjual. Jumlah barang melalui bandara menunggu data dari Bandara Sultan Hasanuddin. Jumlah barang melalui dermaga dan terminal tidak dilakukan pendataan. Dari data terlihat jumlah orang yang melalui dermaga jumlahnya tetap setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan tidak maksimalnya manajemen dari pengelolaan dermaga sehingga berpengaruh pada kurangnya PAD yang diterima oleh Pemerintah Kota Makassar. Selain itu dermaga yang ada (Kayu Bangkoa) masih belum mencukupi. Perlu penambahan dermaga sebagai pelabuhan rakyat untuk kebutuhan masyarakat sebagai sarana transportasi laut ke Pulau-pulau. Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.171 | Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/ Terminal Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah orang melalui dermaga	24.000	24.000	28.654	50.000	46.536
Jumlah barang melalui dermaga	-	-	-	-	-
Jumlah orang melalui bandara	10.756.015	12.282.135	13.800.000	10.757.061	6.097.074
Jumlah barang melalui bandara	-	-	36.312	76.489	38.155
Jumlah orang melalui terminal	59.459.400	42.003.000	678.549	544.431	369.719
Jumlah barang melalui terminal	-	-	-	-	-
Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis	70.239.415	54.309.135	14.543.515	11.427.981	6.551.484

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Makassar, 2021

2.3.2.10 Komunikasi dan Informatika

Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) adalah lembaga organisasi yang dibentuk oleh masyarakat dan dibina oleh Pemerintah Kota Makassar. KIM dibentuk di setiap wilayah kecamatan. KIM berfungsi untuk menyebarkan informasi dari dan ke pemerintah dan masyarakat. Di seluruh kecamatan telah terbentuk Kelompok Informasi Masyarakat yang aktif sehingga cakupan pengembangan dan pemberdayaan KIM mencapai lebih dari 100%, dimana jumlah Kelompok Informasi Masyarakat yang aktif sudah ada di setiap kecamatan. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan dari tahun 2016 – 2020 mengalami peningkatan. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.172 | Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah KIM	14	16	18	19	19
Jumlah kecamatan yang ada	14	15	15	15	15
Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat Kecamatan	100,00	106,67	120,00	126,67	126,67

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, 2021

Cakupan Layanan Telekomunikasi

Seluruh wilayah di Kota Makassar telah tercover layanan telekomunikasi sehingga cakupan layanan telekomunikasi di Kota Makassar mencapai 100%. Selengkapnya data *coverage* layanan komunikasi di Kota Makassar tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.173 | Cakupan Layanan Telekomunikasi Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Luas wilayah yang tercoverage	175,77	175,77	175,77	175,77	175,77
Luas wilayah keseluruhan	175,77	175,77	175,77	175,77	175,77
Cangkupan Layanan Telekomunikasi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, 2021

2.3.2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Persentase Koperasi Aktif

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi Aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha.

Pada Meningkatnya jumlah koperasi aktif pada tahun 2020 disebabkan karena meningkatnya kesadaran anggota untuk berkoperasi dan adanya motivasi dari pemerintah dan swasta untuk mendorong koperasi agar lebih berperan dalam pertumbuhan ekonomi khususnya ekonomi kecil dan menengah antara lain pemberian perkuatan permodalan dan perluasan kesempatan berusaha melalui koperasi dll, sehingga sampai dengan akhir tahun 2020 ada 26 unit koperasi yang baru terbentuk. Persentase Koperasi aktif sampai pada akhir 2019 jumlah koperasi aktif 1092 dan pada akhir tahun 2020 jumlah koperasi aktif meningkat menjadi 1.118 koperasi aktif dari jumlah koperasi di Kota Makassar 1.606 Koperasi atau terealisasi 69%. Persentase koperasi aktif selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.174 | Persentase Koperasi Aktif Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah koperasi aktif	729	758	1.092	1.092	1.118
Jumlah seluruh koperasi	1.529	1.558	1.580	1.580	1.606
Persentase koperasi aktif	47,68	48,65	69,11	69,11	69,61

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar, 2021

Persentase UKM Non BPR/LKM Aktif

Usaha kecil adalah peluang usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Data UKM Non BPR/LKM aktif belum tersedia.

Usaha Kecil adalah peluang ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang memiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung atau tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Usaha menengah adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan usaha perusahaan atau cabang perusahaan yang memiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Persentase UKM non-BPR mengalami penurunan namun tidak terlalu besar angka penurunannya, dimana persentase UKM non-BPR/LKM pada tahun 2016 sebanyak 99,95% sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 99,90% namun Kondisi ini menunjukkan bahwa penyerapan kredit untuk UKM masih pada angka yang sama hanya perlu upaya untuk meningkatkannya penyerapannya agar dapat mendorong aktivitas ekonomi UKM di Kota Makassar.

Tabel 2.175 | Persentase UKM non BPR/LKM Aktif Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah UKM non BPR/LKM aktif	16.221	16.418	16.855	16.418	13.265
Jumlah seluruh UKM non BPR/LKM	16.228	16.428	16.865	16.428	13.277
Persentase UKM non BPR/LKM aktif	99,96	99,94	99,94	99,94	99,91

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar, 2021

Persentase BPR/LKM Aktif

BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagaimana usaha BPR. Lembaga keuangan mikro (LKM) adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan (deposit), kredit (loan), pembayaran sebagaimana transaksi jasa (*payment service*) serta *money transfer* yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. LKM memiliki fungsi sebagai lembaga yang memberikan berbagai jasa keuangan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. Persentase BPR/LKM aktif meningkat dalam 5 tahun terakhir yaitu 17,24% pada tahun 2015 menjadi 41,37% ditahun 2019. Jumlah BPR/LKM aktif meningkat dua kali lipat yaitu dari sebanyak 5 Unit di tahun 2015 menjadi sejumlah 12 unit di tahun 2019. Persentase BPR/LKM aktif tahun 2016 – 2020 disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2.176 | Persentase BPR/LKM Aktif Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah BPR/LKM aktif	7	10	10	12	
Jumlah seluruh BPR/LKM	29	29	29	29	
Persentase BPR/LKM aktif	24,14	34,48	34,48	41,38	

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar, 2021

Persentase Usaha Mikro dan Kecil

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak lima puluh juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak tiga ratus juta rupiah. Kriteria Usaha Kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari lima puluh juta rupiah sampai dengan paling banyak lima ratus juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari tiga ratus juta rupiah sampai dengan paling banyak dua milyar lima ratus juta rupiah. Perkembangan UKM Kota Makassar dari tahun 2016 – 2020 mengalami fluktuatif dengan rata - rata persentase di atas 70%. Hal ini berarti bahwa UMKM di Kota Makassar didominasi oleh Usaha Mikro dan Kecil. Jumlah usaha mikro dan kecil yang tercatat di Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar pada tahun 2020 mencapai 75,01% dari total 13.277 UKM yang ada di Kota Makassar. Selengkapnya data UMKM Kota Makassar disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.177 | Persentase Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	13.919	14.089	14.526	16.039	9.958
Jumlah seluruh UKM	16.228	16.428	16.865	17.123	13.277
Persentase Usaha Mikro dan Kecil	85,77	85,76	86,13	93,67	75,00

Sumber: Dinas Koperasi, Usah Kecil dan Menengah Kota Makassar, 2021

2.3.2.12 Penanaman Modal

Jumlah Investor Berskala Nasional

Jumlah investor baik PMDN dan PMA dalam lima tahun terakhir yang masuk ke Kota Makassar mengalami fluktuasi dimana investasi berskala Nasional terbanyak terjadi pada tahun 2020 dengan 975 proyek investasi PMDN berskala nasional. Pada tahun 2020 jumlah proyek berskala nasional PMDN dan PMA mengalami kenaikan signifikan di angka 975 dan 339 proyek. Kenaikan angka yang signifikan pada tahun 2020 di kota Makassar terjadi pada semua aspek kinerja penanaman modal utamanya dipengaruhi oleh integrasi *Online Single Submission* (OSS) dan Laporan Kinerja Penanaman Modal (LKPM) serta eksekusi realisasi investasi di beberapa sektor bidang usaha yang mendorong kenaikan nilai investasi PMDN dan PMA Tahun 2020.

Kenaikan jumlah investor PMDN juga dipengaruhi oleh perkembangan sektor industri terutama pada sektor sarana dan prasarana seperti konstruksi, transportasi, Gudang dan telekomunikasi, perumahan serta industri kimia dan farmasi. Adapun sektor terbesar penyumbang nilai investasi dan investor PMDN berasal dari sektor transportasi, Gudang dan telekomunikasi. Diterapkannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sepertinya cukup mempengaruhi kenaikan jumlah proyek PMDN dalam 3 sektor tersebut, terlebih aktivitas masyarakat yang pada saat pandemi Covid-19 dilakukan secara online sehingga sektor usaha telekomunikasi semakin marak mendirikan perusahaan telekomunikasi dan informatika yang menjual jasa penggunaan jaringan seluler bagi masyarakat. Terlebih dalam sektor transportasi yang saat ini, masyarakat lebih memilih menggunakan transportasi roda dua untuk melakukan aktivitas yang terbatas di luar rumah di masa pandemi Covid-19. Penyumbang nilai investasi terbesar lainnya berasal dari sektor industri kimia dan farmasi yang menjadi kebutuhan utama masyarakat di masa pandemi Covid-19 untuk menyediakan berbagai bahan pembersih/bahan desinfektan serta kebutuhan alat kesehatan yang meningkat menjadi daya Tarik investor PMDN dan PMA menjalankan usaha di bidang industri kimia dan farmasi. Peningkatan jumlah minat sektor industri kimia dan farmasi juga meningkatkan jumlah tenaga kerja Indonesia terutama di bidang tenaga kesehatan dan kefarmasian.

Kenaikan jumlah investor PMA dipengaruhi beberapa sektor besar diantaranya sektor konstruksi, transportasi dan industri kimia dan farmasi. Pada sektor konstruksi terutama pada penyediaan peralatan atau mesin yang umumnya digunakan untuk proses pekerjaan perbaikan sarana dan prasarana umum. Saat ini, telah dilaksanakan beberapa proyek pembangunan sarana dan prasarana untuk memperbaiki fasilitas umum seperti jalan utama dan perbaikan saluran irigasi di sekitar jalan metro tanjung bunga. Beberapa proyek ini, juga membutuhkan beberapa peralatan yang umumnya hanya disediakan oleh perusahaan asing (PMA). Selain dalam sektor konstruksi, pada sektor transportasi juga menyediakan berbagai jenis kendaraan yang diproduksi oleh negara Eropa dan China untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat Indonesia mulai kelas menengah ke bawah hingga kelas menengah ke atas. Pada masa pandemi Covid-19 sektor industri kimia dan farmasi tidak kalah bersaingnya dengan perusahaan dalam negeri (PMDN) untuk memproduksi berbagai macam bahan kimia desinfektan dan obat-obatan untuk memulihkan kesehatan masyarakat. Beberapa perusahaan asing yang bergerak di bidang industri farmasi juga berlomba-lomba untuk berinvestasi di Kota Makassar mendistribusikan berbagai obat-obat untuk memulihkan imunitas di masa pandemi Covid-19

Potensi investasi yang saat ini menjadi daya Tarik untuk dikembangkan di Kota Makassar yaitu beberapa pembangunan lingkungan perkantoran pesisir serta tempat wisata pesisir

terutama pada wilayah sekitar pantai Losari. Pengembangan Kota Makassar menjadi kota maju dan modern tahap demi tahap mulai dijalankan salah satunya perbaikan jalan-jalan utama sebagai salah satu sarana transportasi mobilitas masyarakat sehari-hari. Pada Tahun 2021 diharapkan jumlah investor PMA/PMDN berskala nasional semakin meningkat untuk meningkatkan perekonomian Kota Makassar dan menjadikan Kota Makassar sebagai destinasi wisata ramah investasi. Selengkapnya data jumlah investor berskala nasional yang masuk di Kota Makassar dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.178 | Jumlah Investor Berskala Nasional Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah investor PMDN berskala nasional	60	47	24	687	975
Jumlah investor PMA berskala nasional	34	27	12	228	339

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, 2021

Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional

Peningkatan nilai investasi dalam suatu wilayah dapat didukung dengan adanya data potensi investasi yang tersebar di beberapa wilayah dan adanya promosi investasi yang akan menarik perhatian investor PMA dan PMDN di Kota Makassar. Investasi di suatu daerah sangat penting untuk menunjang pertumbuhan ekonomi daerah tersebut nilai investasi baik investor dalam negeri dalam bentuk rupiah maupun penanaman modal asing (PMA) dalam bentuk US \$ (dolar Amerika). Jumlah investor maupun nilai investasi masuk di Kota Makassar dalam lima tahun terakhir berfluktuasi, dimana tahun 2020 nilai investasi PMA sebesar US\$ 19.295.100 dan nilai investasi PMDN sebesar Rp. 7.453.875.500.000,-. Peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar sangat mempengaruhi nilai investasi PMA/PMDN yang berinvestasi di Kota Makassar. Peningkatan nilai investasi dan pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari laju perkembangan Perumahan Kawasan industri dan perkantoran, industri pengelolaan, perdagangan besar dan eceran, jasa konstruksi, jasa kesehatan, transportasi, perdagangan serta pendidikan.

Pada tahun 2020 kemudahan yang diberikan kepada perusahaan PMDN untuk melaporkan realisasi investasinya dengan adanya integrasi *Online Single Submission* (OSS) dan Laporan Kinerja Penanaman Modal (LKPM). Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar juga menggalakkan kerja sama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan dan Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk mengeksekusi realisasi investasi besar yang ada di kota Makassar.

Tabel 2.179 | Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah investasi PMDN (Rp.)	906.046.100	762.295.066	526.468.345	3.067.061.000.000	7.453.875.500.000
Jumlah investasi PMA (\$USD)	76.689	37.844	79.656.448	96.862.467	19.295.100

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, 2021

Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Rasio daya serap tenaga kerja merupakan perbandingan daya serap tenaga kerja terhadap nilai investasi pada PMA dan PMDN suatu daerah. Rasio daya serap tahun 2020 berada pada 3,34% dimana pencapaian jumlah tenaga kerja Indonesia dan asing yang ada pada perusahaan

PMA dan PMDN akan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah investasi PMA PMDN di Kota Makassar.

Hal Peningkatan jumlah tenaga kerja yang diserap pada Tahun 2020 terjadi seiring dengan meningkatnya realisasi nilai investasi PMA dan PMDN pada Tahun 2020. Masa pandemi Covid-19 diperkirakan beberapa sektor bidang usaha mengalami penurunan jumlah tenaga kerja karena adanya penurunan daya konsumsi masyarakat dan pembatasan sosial berskala besar yang diterapkan oleh pemerintah. Hal ini berbanding terbalik dengan realisasi jumlah tenaga kerja yang tercatat dalam laporan evaluasi kegiatan penanaman modal yang mencatat jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja pada perusahaan PMDN berada pada jumlah 3.371 tenaga kerja. Salah satu sektor usaha yang mendukung peningkatan jumlah tenaga kerja adalah sektor industri kimia dan farmasi serta industri bahan makanan beku dan siap saji. Terbatasnya aktivitas masyarakat di luar rumah membuat masyarakat lebih memilih mengonsumsi makanan yang dapat diolah di rumah atau memesan secara online. Masa pandemi Covid-19 juga mewajibkan masyarakat untuk menyediakan berbagai obat-obatan serta bahan kimia desinfektan untuk membersihkan virus Covid-19. Hal ini mendorong sejumlah investor PMA dan PMDN bersaing untuk membuka sektor usaha di bidang kesehatan dan makanan. Selengkapnya rasio daya serap tenaga kerja di Kota Makassar dalam lima tahun terakhir tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.180 | Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMDN / PMA	3.087	1.479	547	4.003	
Jumlah seluruh PMDN / PMA	3.087	1.479	547	687	
Rasio daya serap tenaga kerja	100,00	100,00	100,00	582,68	

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, 2021

Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN

Nilai Terjadi pertumbuhan yang signifikan realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tahun 2020 di kota Makassar sebesar 41,14% dari Rp. 7.453.875.500.000 sedangkan di tahun 2019 menjadi Rp 3.067.061.000.000. Peningkatan nilai investasi dan pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari laju perkembangan Perumahan Kawasan industri dan perkantoran, industri pengelolaan, perdagangan besar dan eceran, jasa konstruksi, jasa kesehatan, transportasi, pergudangan serta pendidikan. Pada tahun 2020 kemudahan yang diberikan kepada perusahaan PMDN untuk melaporkan realisasi investasinya dengan adanya integrasi *Online Single Submission* (OSS) dan Laporan Kinerja Penanaman Modal (LKPM). Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar juga menggalakkan kerja sama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan dan Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk mengeksekusi realisasi investasi besar yang ada di kota Makassar.

Untuk itu, sebagai langkah awal untuk meningkatkan nilai investasi PMA/PMDN berskala nasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyusun program dan kegiatan untuk mendukung peningkatan nilai investasi dan jumlah investor PMA/PMDN, agar dapat berjalan sesuai dengan visi dan misi SKPD dalam menciptakan iklim investasi juga diperlukan adanya penyusunan regulasi yang mendukung arah perencanaan penanaman modal. Selengkapnya data kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN di Kota Makassar dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.181 | Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	Nilai Investasi PMDN (Rp.)	Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN
2016	906.046.100	-
2017	762.295.066	-15,87
2018	526.468.345	-30,94
2019	3.067.061.000.000	582472,73
2020	7.453.875.500.000	143,03

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, 2021

2.3.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif

Organisasi pemuda adalah sekelompok pemuda yang bekerja sama dengan suatu perencanaan-perencanaan kerja dan peraturan-peraturan, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Persentase organisasi pemuda yang aktif dari Tahun 2016 – 2020 adalah 100% yaitu dari 147 organisasi pemuda yang ada (base line data 2016). Secara rinci perkembangannya dari Tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.182 | Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah organisasi pemuda yang aktif	95	109	123	147	147
Jumlah seluruh organisasi pemuda	147	147	147	147	147
Persentase organisasi pemuda yang aktif	64,63	74,15	83,67	100,00	100,00

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar, 2021

Persentase Wirausaha Muda

Jumlah seluruh wirausaha muda mengalami kenaikan pesat dari tahun 2016 sampai 2020, kenaikan hingga 400% dari jumlah tahun 2016 hingga 2020. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.183 | Persentase Wirausaha Muda Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah wirausaha muda	250	250	250	250	250
Jumlah seluruh wirausaha	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Persentase wirausaha muda	25,00	16,67	16,67	16,67	16,67

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar, 2021

Cakupan Pembinaan Olahraga

Jumlah cabang olahraga yang dibina dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuatif dengan rata-rata cakupan sekitar 46%. Angka cabang olahraga yang mendapat pembinaan tertinggi adalah pada tahun 2016-2020 dimana dari 26 cabang olahraga yang terdaftar, dilakukan pembinaan pada 14 cabor (54%). Secara rinci perkembangannya dari Tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.184 | Cakupan Pembinaan Olahraga Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah cabang olahraga yang dibina	13	13	14	14	14
Jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/ terdaftar	26	26	26	26	26
Cakupan pembinaan olahraga	50,00	50,00	53,85	53,85	53,85

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar, 2021

Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi

Jumlah pelatih yang bersertifikat di Kota Makassar dalam lima tahun terakhir cenderung stagnan jumlahnya, dimana hanya terdapat 40 pelatih yang bersertifikat dari 516 seluruh Pelatih yang ada. Jumlah pelatih yang bersertifikat secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.185 | Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah pelatih yang bersertifikasi	40	40	40	40	40
Jumlah seluruh pelatih	516	516	516	516	516
Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	7,75	7,75	7,75	7,75	7,75

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar, 2021

Cakupan Pembinaan Atlet Muda

Jumlah atlet pelajar terdiri dari atlet muda di bawah u-17, yang dibina melalui kejuaraan, pengiriman, dan bentuk pembinaan lainnya. Tahun 2020 atlet muda yang dibina sama dengan tahun sebelumnya, dimana jumlah seluruh atlet pelajar 1.400 atlet muda yang ada hanya sebanyak 208 atlet yang mendapat pembinaan (14,86%). Angka ini menurun dari tahun 2018 dimana sebanyak 491 atlet yang mendapat pembinaan dari 1.400 atlet yang ada (35%). Secara rinci data cakupan pembinaan atlet muda selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.186 | Cakupan Pembinaan Atlet Muda Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah atlet pelajar yang dibina	513	540	491	208	208
Jumlah seluruh atlet pelajar	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
Cakupan pembinaan atlet muda	39,46	41,54	35,07	14,86	14,86

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar, 2021

Jumlah Atlet Berprestasi

Atlet Kota Makassar yang memenangi kejuaraan tingkat nasional maupun internasional sangat berfluktuatif angkanya dalam lima tahun terakhir, dimana tahun 2020 hanya 19 atlet Makassar yang berprestasi nasional maupun internasional. Jumlah atlet muda yang memenangi kejuaraan taekwondo, atletik, sepakbola, tenis lapangan, balap sepeda, *bridge*, dayung, judo, karate, pencak silat dan kejuaraan lainnya di beberapa kompetisi ditingkat nasional dan internasional adalah sebagai berikut:

Tabel 2.187 | Jumlah Atlet Berprestasi Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam 1 tahun	29	33	19	19	19

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar, 2020

Jumlah Prestasi Olahraga

Jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan dihitung dari jumlah atlet yang mendapatkan juara di tiap Kejuaraan yang diselenggarakan. Pada tahun 2020, jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan dalam 1 tahun sebanyak 208 cabor, hal ini sama dengan tahun sebelumnya. Penurunan jumlah atlet yang berprestasi ini sangat signifikan, sehingga harus menjadi perhatian oleh dinas teknis terkait.

Tabel 2.188 | Jumlah Prestasi Olahraga Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan dalam 1 tahun	513	540	491	208	208

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar, 2021

2.3.2.14 Statistik

Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi

Tahun 2016 belum ada tersedia sistem data dan statistik yang terintegrasi. Tahun 2017 terbangun aplikasi Open Data, yaitu satu data Kota Makassar yang terintegrasi antar seluruh SKPD. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.189 | Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Tidak	Tidak	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, 2021

Buku “Daerah Dalam Angka”

Buku “Makassar Dalam Angka” Kota Makassar telah tersedia dari Tahun 2016 – 2020. Datanya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.190 | Ketersediaan Buku “Daerah Dalam Angka” Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Buku "Daerah dalam Angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, 2021

Buku “PDRB”

Buku “PDRB” Kota Makassar telah tersedia dari Tahun 2016 -2020. Datanya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.191 | Ketersediaan Buku “PDRB” Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Buku "PDRB"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, 2021

2.3.2.15 Kebudayaan

Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Jumlah Pelaksanaan festival seni dan budaya setiap tahun 2016-2020 terkhusus di 2016 ada 7 kali pelaksanaan festival namun tahun 2016 perlu diketahui bahwa Dinas kebudayaan masih merupakan bidang di Dinas pendidikan, kemudian pada tahun 2017 dinas kebudayaan di bentuk untuk berdiri sendiri menjadi Dinas kebudayaan. Pada tahun 2017 – 2020 pelaksanaan festival seni dan budaya terus meningkat terkhusus di 2019 ada 2 (dua) kali pelaksanaan festival seni dan budaya, kemudian di 2020 target pelaksanaannya 3 (tiga) kali pelaksanaan festival namun karena adanya refocusing sehingga pelaksanaan festival seni dan budaya hanya dilaksanakan 1 (satu) kali.

Tabel 2.192 | Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	7	1	1	2	1

Sumber: Dinas Kebudayaan Kota Makassar, 2021

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Pada tahun 2018 terdapat 6 situs dan 3 kawasan yang dilestarikan, namun belum ada benda yang dilestarikan. Kemudian pada tahun 2019 terdapat penambahan 6 benda yang dilestarikan.

Untuk tahun 2020 jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya dengan jumlah data keseluruhan yang di lestarikan sebanyak 138 termasuk benda, situs, dan kawasan, sehingga realisasi kinerja mencapai 100%. Secara rinci jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.193 | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	2	9	9	15	138
Total benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah	114	124	124	130	138
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	1,75	7,26	7,26	11,54	100,00

Sumber: Dinas Kebudayaan Kota Makassar, 2021

Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Diinventarisasi

Jumlah karya budaya yang di revitalisasi dari tahun 2016-2020 belum ada karya budaya yang direvitalisasi karena karya budaya tersebut masih sering di tampilkan.

Jumlah karya budaya yang di inventarisasi dari tahun 2016-2020 mengalami peningkatan khusus di 2020 sebanyak 50 karya budaya yang diinventarisasi secara rinci karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi dari tahun 2016-2020 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.194 | Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Diinventarisasi Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	-	45	45	50	50

Sumber: Dinas Kebudayaan Kota Makassar, 2021

2.3.2.16 Perpustakaan

Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

Berdasarkan pengunjung perpustakaan di Kota Makassar mengalami peningkatan dari Tahun 2016-2019, sedangkan pada tahun 2020 jumlah pengunjung terjadi penurunan yang signifikan yaitu dari 1.668.179 pengunjung turun menjadi 186.527 disebabkan karena terjadinya wabah pandemi Covid-19 dimana sasaran dan tolak ukur pengunjung yaitu anak sekolah dan masyarakat yang berkunjung ke perpustakaan baik perpustakaan sekolah SD, SMP, perpustakaan kelurahan dan kecamatan yang menjadi Indikator binaan perpustakaan. Sejak terbentuknya kelembagaan Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun 2017 dilihat secara persentase pada tahun 2016 jumlah pengunjung perpustakaan 439,66; tahun 2017 meningkat menjadi 1.576.009 atau 152%; pada tahun 2018 meningkat menjadi 1.610.967 atau 114,0 dan pada tahun 2019 sebesar 118,06 dan pada tahun 2020 menurun 186.527 atau 14,96 %, dimana dapat dilihat dari jumlah usia pembaca yaitu dari 1.032.922 menjadi 1.246.031 usia pembaca (5-55) atau Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani dari Jumlah Penduduk Kota Makassar Tahun 2020 sebanyak 1.484.852 Secara rinci jumlah pengunjung perpustakaan per tahun dari tahun 2016 s.d 2020 di Kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.195 | Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun	439.660	1.576.009	1.610.967	1.668.179	186.527
Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani	1.032.922	1.032.922	1.412.956	1.412.956	1.246.031
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	42,56	152,58	114,01	118,06	14,97

Sumber: Dinas Perpustakaan Kota Makassar, 2021

Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Kota Makassar mengalami peningkatan dari tahun 2016-2020 di lihat dari jumlah judul dan koleksi. Sedangkan pada tahun 2018 persentase terjadi penurunan dari 0,563% menjadi 0,443% ini disebabkan karena jumlah koleksi (buku) lebih besar dibanding jumlah judul walau pada kenyataannya koleksi dari jumlah judul bertambah dari 104.502 menjadi 106.031, pada tahun 2017 – 2018 begitu pula pada tahun 2019 menjadi 108.303 dan pada tahun 2020 kenaikan pada judul sebanyak 1116.681. Secara umum mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai 2020 ini disebabkan

adanya beberapa sumber diantaranya kegiatan pengadaan buku dan penyumbang buku dari yayasan bakti. Secara rinci perkembangannya dari tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.196 | Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah	101.543	104.502	106.031	108.303	111.681
Jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah	178.940	185.767	239.267	246.316	252.187
Rasio koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah	1: 1,76	1: 1,78	1: 2,26	1: 2,27	1: 2,26

Sumber: Dinas Perpustakaan Kota Makassar

Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk

Rasio perpustakaan persatuan penduduk didapat dari perbandingan jumlah perpustakaan dan penduduk di Kota Makassar. Jumlah perpustakaan di Kota Makassar Tahun 2016 sebanyak 109 perpustakaan, dari tahun ke tahun mengalami peningkatan menjadi 442 perpustakaan di Tahun 2020. Dari data tersebut diketahui bahwa rasio ketersediaan perpustakaan terhadap 1000 jumlah penduduk mencapai 0,285. Rasio perpustakaan terhadap jumlah penduduk Kota Makassar Tahun 2020 adalah 1:29,76, artinya rata-rata 1 perpustakaan untuk melayani 29,76 orang. Tabel di bawah ini menggambarkan rasio perpustakaan per satuan penduduk Kota Makassar tahun 2016 – 2020, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.197 | Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah perpustakaan	109	109	242	342	442
Jumlah penduduk	1.658.503	1.668.314	1.659.777	1.478.684	1.484.852
Rasio perpustakaan per satuan penduduk	1: 15.215,62	1: 15.305,63	1: 6.858,58	1: 4.323,64	1: 3.359,39

Sumber: Dinas Perpustakaan Kota Makassar, 2021

Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan per tahun di Kota Makassar dari Tahun 2016-2019 mengalami peningkatan mulai di Tahun 2016 meningkat secara signifikan hingga Tahun 2019 sebanyak 139,014%. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yakni 15,543 dikarenakan kondisi pandemi Covid-19 Tabel berikut menggambarkan jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan per tahun di Kota Makassar tahun 2016 – 2020:

Tabel 2.198 | Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah rata-rata jumlah pengunjung perpustakaan	36.600	131.300	134.200	139.014	15.543

Sumber: Dinas Perpustakaan Kota Makassar, 2021

Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai yang Memiliki Sertifikat

Data jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat di Tahun 2016-2020, mengalami perubahan dari tahun 2016 sebanyak 3 orang dan tahun 2020 menjadi 17 orang pustakawan ini di sebabkan karena ada beberapa pengelola perpustakaan mengikuti alih jalur (inpassing) menjadi Fungsional Perpustakaan dan fluktuasi kenaikan berdasarkan jumlah seluruh pustakawan naik turun dari 1,50 % di Tahun 2016, menurun di tahun 2017

yakni 0,97; tahun 2018 naik sebesar 0,99; tahun 2019 menurun yakni 0,83 dan data terakhir tahun 2020 meningkat menjadi 1,75% ini di sebabkan terdatanya jumlah tenaga pengelola perpustakaan yang mengikuti pada kegiatan pendataan dan pembinaan perpustakaan dimana di dalamnya terdapat sentuh pustaka. Dan secara rinci perkembangannya dari Tahun 2016-2020 Kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.199 | Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai yang Memiliki Sertifikat Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang bersertifikat	3	5	8	8	17
Jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis dan penilai	200	513	809	961	970
Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	1,50	0,97	0,99	0,83	1,75

Sumber: Dinas Perpustakaan Kota Makassar, 2021

2.3.2.17 Kearsipan

Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku

Data di bawah memberikan gambaran Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku setiap tahunnya dari Tahun 2016-2020 mengalami peningkatan. Di Tahun 2016 persentasenya mencapai 33% kemudian meningkat menjadi 52% di Tahun 2020. Secara rinci perkembangan persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku di Kota Makassar Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.200 | Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku	69	81	93	104	109
Jumlah perangkat daerah	209	209	209	209	209
Presentase perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	33,01	38,76	44,50	49,76	52,15

Sumber: Dinas Kearsipan Kota Makassar, 2021

Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan dari Tahun 2016 – 2020 mengalami peningkatan. Di Tahun 2016 dilaksanakan 3 Kegiatan kemudian meningkat pada tahun 2017 sampai 2019 menjadi 9 kegiatan, namun pada tahun 2020 mengalami pengurangan kegiatan pengelolaan arsip menjadi 4 kegiatan dikarenakan refocusing anggaran untuk percepatan penanganan Covid-19 dan dapat dilihat pada tabel.

Tabel 2.201 | Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah kegiatan Peningkatan SDM pengelola kearsipan	3	9	9	9	4

Sumber: Dinas Kearsipan Kota Makassar, 2021

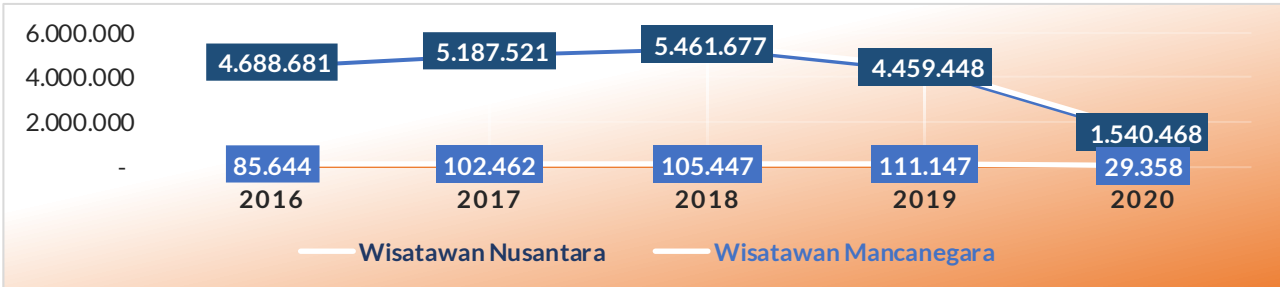
2.3.3 Layanan Urusan Pilihan

2.3.3.1 Pariwisata

Kunjungan Wisata

Berdasarkan data historis, angka kunjungan wisatawan nusantara kecenderungannya menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu, sebagaimana disajikan dalam tabel dan grafik di bawah ini :

Gambar 2.26 | Grafik Kunjungan Wisata Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar



Sumber: Dinas Pariwisata Kota Makassar, 2021

Berdasarkan grafik di atas, Jumlah wisatawan nusantara yang tiba di Kota Makassar melalui Bandara Sultan Hasanuddin Makassar selama 5 tahun terakhir (2016 – 2020) yaitu 28.744.879 wisatawan. Jumlah wisatawan nusantara terbanyak terjadi pada tahun 2018 yaitu 5.461.677 wisatawan dan terendah pada tahun 2020 Hanya sebesar 1.540.468 wisatawan. Jadi jumlah rata-rata wisatawan nusantara yang tiba di Kota Makassar melalui Bandara Sultan Hasanuddin Makassar per tahun selama 6 tahun terakhir adalah 4.184.810 wisatawan.

Tabel 2.202 | Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Nusantara Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	Kunjungan Wisatawan Nusantara	Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Nusantara
2016	4.688.681	24,33
2017	5.187.521	10,64
2018	5.461.677	5,28
2019	4.459.448	-18,35
2020	1.540.468	-65,46

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Makassar, 2021

Pada tahun 2016-2018 tercatat jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke Kota Makassar selama 3 tahun berturut-turut mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 sebanyak 4.688.681 wisatawan atau 24,33% dari tahun sebelumnya. Peningkatan terjadi kembali pada tahun 2017, tercatat sebanyak 5.187.521 wisatawan nusantara yang berkunjung ke Kota Makassar atau 10,64%. Sedangkan pada tahun 2018 tercatat jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 5.461.677 atau mengalami peningkatan 5,28%. Pada dua tahun terakhir jumlah kunjungan wisatawan mengalami penurunan yaitu pada tahun 2019 menjadi 4.459.448 atau -18,35% dan pada tahun 2020 menjadi 1.540.468 atau -65,46%.

Tabel 2.203 | Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Mancanegara Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	Kunjungan Wisatawan Nusantara	Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Mancanegara
2016	85.644	-
2017	102.462	19,64
2018	105.447	2,91
2019	111.147	5,41
2020	29.358	-73,59

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Makassar, 2021

Angka kunjungan wisatawan mancanegara yang tiba di Kota Makassar melalui pintu utama internasional (imigrasi) maupun pintu domestik selama 5 tahun terakhir sebanyak 540.425 wisatawan mancanegara atau rata-rata 90.071 wisatawan per tahun. Jumlah wisatawan terbanyak yaitu pada tahun 2020 mencapai 111.147 atau 20,57 persen dari jumlah total wisatawan selama 5 tahun terakhir. Sementara jumlah wisatawan di tahun 2020 mengalami keterpurukan akibat pandemi Covid-19 yang berdampak luas pada sektor pariwisata yang hanya mampu menarik 29.358 wisatawan.

Lama Kunjungan Wisata

Makassar sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, seperti kota-kota besar lainnya di Indonesia dimana posisi Makassar sebagai *living room* dan hubungan lalu lintas penerbangan dari kawasan barat Indonesia ke timur Indonesia yang memiliki potensi terbesar di sektor pariwisata khususnya destinasi MICE dan destinasi belanja. Untuk kedua destinasi ini, wisatawan yang datang ke Makassar hanya membutuhkan paling lama 2 sampai 3 hari untuk menetap. Lama kunjungan wisatawan nusantara di Kota Makassar Tahun 2016-2020 digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.204 | Lama Kunjungan Wisata Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Rata-rata lama kunjungan wisatawan dalam satu tahun	2-3 Hari	2-3 Hari	2-3 Hari	2-3 Hari	2-3 Hari

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Makassar, 2021

PAD Sektor Pariwisata

Sektor Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang sumbernya diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2001 Pasal 157 yakni bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Berdasarkan tabel di bawah dapat diketahui bahwa persentase PAD sektor pariwisata tahun 2016 s.d 2019 terus menunjukkan peningkatan yang signifikan, kecuali di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 10,87% dari tahun sebelumnya (2019). Hal ini disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang berimbas pada pencapaian pajak hotel dan restoran di Kota Makassar. Pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan merupakan pajak yang memiliki kontribusi terhadap PAD dari sektor pariwisata. Angka kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara berpengaruh positif terhadap tingkat hunian kamar hotel di Kota Makassar, begitu pun dengan restoran dan tempat-tempat hiburan lainnya. sehingga berdampak positif terhadap pendapatan asli daerah khususnya terhadap pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan Kota Makassar. Data persentase PAD sektor pariwisata Kota Makassar Tahun 2016 – 2020 digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.205 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pariwisata Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
PAD Sektor Pariwisata	212.764.733.670	265.411.475.470	308.136.248.827	371.044.305.957	205.968.247.154
Total PAD	3.546.650.055.445	1.112.339.255.190	1.102.668.346.363	1.073.061.660.653	868.604.339.302
Persentase PAD Sektor Pariwisata	6,00	23,86	27,94	34,58	23,71

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Makassar, 2021

2.3.3.2 Pertanian

Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB

Jumlah PDRB Sektor Pertanian/Perkebunan dari tahun 2016-2020 setiap tahun mengalami peningkatan disebabkan oleh peningkatan produktivitas (rata-rata produksi per hektar) setiap tahun serta didukung oleh harga gabah yang meningkat setiap tahun. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kota Makassar sangat kecil, mengingat memang Kota Makassar bukanlah kota yang mengandalkan sektor pertanian untuk penopang perekonomiannya, tetapi lebih ke Kota Perdagangan dan Jasa. Kontribusi sektor pertanian terhadap ekonomi kota Makassar dalam lima tahun terakhir tidak sampai 1% setiap tahunnya. Tahun 2020, dari 196 triliun PDRB Atas Harga Berlaku, sektor pertanian hanya 123,10 miliar atau 0,068%. Secara rinci perkembangan dari Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.206 | Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pertanian / perkebunan (Miliar Rp.)	113,54	148,85	151,30	157,31	123,10
Jumlah PDRB (Miliar Rp.)	128.431,59	143.128,66	160.207,66	178.430,06	178.330,06
Kontribusi sektor pertanian / perkebunan terhadap PDRB	0,09	0,10	0,09	0,09	0,07

Sumber: Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar, 2021

Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB mengalami fluktuatif setiap tahunnya dari Tahun 2016-2020. Di Tahun 2020 kontribusi palawija terhadap PDRB Kota Makassar menurun hingga 9,89% dikarenakan kontribusi terhadap PDRB berkurang karena terdapat beberapa komoditi tidak ditanam karena berfokus pada padi. Kontribusi Sektor Pertanian, khususnya palawija terhadap PDRB Kota Makassar tidak signifikan mengingat Kota Makassar adalah Kota Jasa dan Perdagangan yang tidak mengutamakan pertanian untuk penopang pertaniannya. Data sektor pertanian (palawija) dari Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.207 | Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah kontribusi sektor pertanian (palawija)	13,56	14,58	14,96	4,80	14,96
Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pertanian / perkebunan (Miliar Rp.)	113,54	148,85	151,30	157,31	123,10
Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	11,94	9,79	9,89	3,05	12,15

Sumber: Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar, 2021

Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB

Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB Kota Makassar meningkat setiap tahunnya dalam lima tahun terakhir. Di Tahun 2020, jumlah produksi padi/bahan pangan

utama lokal hasil kelompok petani sebesar 26.214 ton atau 99,09%. Hal ini menunjukkan bahwa hampir dari keseluruhan jumlah produksi padi/bahan pangan utama di Kota Makassar merupakan kontribusi kelompok petani. Secara rinci perkembangan dari Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.208 | Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah produksi padi / bahan pangan utama lokal hasil kelompok petani (ton)	21.394	26.305	26.214	27.369	26.214
Jumlah produksi padi / bahan pangan utama di daerah (ton)	22.157	26.849	26.454	27.542	26.454
Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	96,56	97,97	99,09	99,37	99,09

Sumber: Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar, 2021

Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar

Persentase produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar di Kota Makassar dari Tahun 2016-2020 mengalami peningkatan. Petani-petani mulai mengetahui usaha-usaha untuk meningkatkan produktivitas padi/bahan pangan utama lainnya. Dari 5,93% di Tahun 2016 meningkat menjadi 6,48% di Tahun 2018 dan mengalami penurunan sebesar 6,40 Tahun 2019. Produktivitas dan produksi padi mengalami peningkatan setiap tahun dari tahun 2016 - 2020 karena didukung oleh bantuan sarana dan prasarana pertanian seperti benih unggul, pupuk, pestisida yang sesuai dengan rekomendasi paket teknologi termasuk bantuan irigasi, pompa, bantuan alat mesin pertanian termasuk pembinaan dan pelatihan kelompok tani oleh petugas.

Tabel 2.209 | Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Produksi tanaman padi / bahan pangan utama lokal lainnya (ton)	21.394	26.305	26.214	27.369	
Luas areal tanaman padi / bahan pangan utama lokal lain nya (ha)	4.807	4.441	4.042	27.542	
Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	1:4,45	1:5,92	1:6,49	1:0,99	

Sumber: Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar, 2021

2.3.3.3 Perdagangan

Ekspor Bersih Perdagangan

Nilai ekspor bersih perdagangan untuk Kota Makassar cukup fluktuatif, dimana tahun 2016 ke tahun 2017 dan tahun 2018 ekspor bersih mengalami kenaikan dikarenakan nilai impor yang sangat tinggi, pada tahun 2019 dan 2020 menunjukkan nilai positif nilai ekspor bersih kita mengalami penurunan dimana nilai impor kita semakin menurun. Untuk tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan untuk nilai ekspor bersih sebesar 377.770.000 US\$. Dari segi nilai ekspor kita masih kurang masih belum mengalami peningkatan yang signifikan masih fluktuatif, sedangkan dari segi impor sudah mulai mengalami penurunan, terutama pada tahun 2020 ini karena dampak pandemi nilai impor menurun sangat signifikan

Tabel 2.210 | Ekspor Bersih Perdagangan Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai ekspor	556.630.000	350.600.000	313.910.000	335.010.000	373.090.000
Nilai Impor	739.400.000	860.450.000	1.015.810.000	866.820.000	750.860.000
Eskpor bersih perdagangan	(182.770.000)	(509.850.000)	(701.900.000)	(531.810.000)	(377.770.000)

Sumber: Dinas Perdagangan Kota Makassar, 2021

2.3.3.4 Perindustrian

Cakupan Bina Kelompok Pengrajin

Cakupan bina kelompok pengrajin pada tahun 2019 mengalami peningkatan 0,23 % dari tahun 2017, sedangkan untuk tahun 2020 tidak ada kegiatan yang sifatnya memberi bantuan baik dari pusat maupun dari Pemerintah Daerah Kota Makassar. Pada Pemerintah Kota Makassar pada tahun 2020 hanya memberikan pelatihan ke pengrajin sebanyak 200 orang dari 300 yang menjadi target kami. Untuk 100 Orang dari 300 tersebut adalah untuk bisa mendapatkan fasilitasi bantuan permodalan, tetapi tidak bisa dilaksanakan karena anggaran untuk fasilitasi di refocusing dalam rangka penanganan Covid-19.

Tabel 2.211 | Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan pemerintah daerah	350	500	1.000	250	350
Jumlah kelompok pengrajin	1.288	1.288	1.288	1.288	1.288
Cakupan bina kelompok pengrajin	27,17	38,82	77,64	19,41	27,17

Sumber: Dinas Perdagangan Kota Makassar, 2021

2.3.3.5 Kelautan dan Perikanan

Produksi Perikanan

Kota Makassar merupakan kota pesisir dengan panjang garis pantai sekitar 13,6 km, dan memiliki Sungai Tallo dan Sungai Jeneberang. Makassar juga memiliki 13 pulau dengan potensi kebaharian yang tersebar di sekitar Selat Makassar : Barrang Lompo, Barrang Caddi, Kodingareng Keke, Lae-Lae, Samalona, Lakkang, Kayangan, Bonetambung, Kayangan, Bonetambung, Lanjukang, Lumu-Lumu, Bonebattang. Produksi perikanan Kota Makassar dari Tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Produksi perikanan tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 119,95% sedangkan produksi perikanan terendah terjadi pada tahun 2017 yaitu 82,53%. Data produksi perikanan selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.212 | Produksi Perikanan Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah produksi ikan (Ton)	15.106	13.373	13.640	19.943	18.761
Target Daerah (Ton)	14.126	16.204	16.300	16.626	20.341
Produksi perikanan	106,94	82,53	83,68	119,95	92,23

Sumber: Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar, 2021

Konsumsi Ikan

Persentase konsumsi ikan di Kota Makassar selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi tetapi masih termasuk dalam jumlah yang tinggi. Cakupan tertinggi di Tahun 2019 dan 2020 yaitu 108,78%. Tahun 2020 konsumsi ikan penduduk kota Makassar sebesar 61,03 kg/kapita per tahun, meningkat 1,2% dari tahun 2019 yang sebesar 59,83 kg/kapita per tahun.

Tabel 2.213 | Konsumsi Ikan Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah konsumsi ikan (Kg/Orang/Tahun)	57,72	57,80	58,66	59,83	61,03
Target Daerah (Kg/Orang/Tahun)	55,03	60,80	50,80	55,00	56,10
Konsumsi ikan	104,89	95,07	115,47	108,78	108,79

Sumber: Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar, 2021

Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Cakupan bina kelompok nelayan dari tahun 2016 – 2020 mengalami fluktuasi, yang disebabkan beberapa kelompok yang tidak aktif lagi dan ada yang baru membentuk kelompok. Pada tahun 2019, kelompok nelayan yang ada sebanyak 73 kelompok dan sebanyak 23 kelompok mendapat bantuan atau 31,50%, namun angka itu kembali meningkat di tahun 2020, dimana kelompok nelayan yang tercatat yaitu 73 kelompok dan sebanyak 73 kelompok mendapatkan bantuan (100%). Secara rinci cakupan bina kelompok nelayan tahun 2016 – 2020 ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.214 | Cakupan Bina Kelompok Nelayan Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemma	102	140	154	23	73
Jumlah kelompok nelayan	124	165	165	73	73
Cakupan bina kelompok nelayan	82,26	84,85	93,33	31,51	100,00

Sumber: Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar, 2021

Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

Persentase produksi perikanan kelompok nelayan di Kota Makassar selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi, dimana rata-rata setiap tahunnya, jumlah produksi ikan (ton) kontribusi hasil kelompok nelayan sebesar 18,25% dari jumlah produksi ikan di Kota Makassar. Untuk tahun 2018, dari 15.022 tom produksi ikan Kota Makassar, sebanyak 2.734 Ton dikontribusi oleh Kelompok nelayan. Angka ini sedikit membaik di tahun 2020, baik dari sisi produksi ikan, maupun kontribusi kelompok nelayan, dimana dari 15.322 ton produksi ikan di Kota Makassar, sebanyak 2.788 ton merupakan kontribusi dari kelompok nelayan. Sedangkan di tahun 2020 produksi ikan menurun menjadi 18,19. Secara rinci produksi perikanan kelompok nelayan dari Tahun 2016-2020 digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.215 | Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Produksi Ikan (Ton) kontribusi hasil kelompok nelayan	2.558	2.646	2.734	2.788	2.843
Jumlah produksi ikan di daerah	15.106	13.373	15.022	15.322	15.628
Produksi perikanan kelompok nelayan	16,93	19,79	18,20	18,20	18,19

Sumber: Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar, 2021

Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman

Persentase proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman di Kota Makassar selama 5 (lima) tahun terakhir rata-rata di atas 100%, atau dengan kata lain target 80% untuk tangkapan harus memperhatikan tangkapan pada batasan biologis yang aman, maka Makassar telah dapat memenuhinya. Secara rinci perkembangan dari Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.216 | Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah tangkapan ikan	1.463	1.586	1.709	1.743	1.778
80% dari tangkapan maksimum lestari	1.170	11.269	1.392	1.246	1.270
Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam Batasan biologis yang aman	125,00	14,07	122,79	139,89	140,00

Sumber: Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar, 2021

Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Nelayan (NTN) dapat memberikan gambaran tingkat kesejahteraan keluarga nelayan dari waktu ke waktu. Dari Tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 data nilai tukar nelayan belum pernah dilakukan pendataan oleh Dinas perikanan dan Pertanian Kota Makassar namun untuk tahun 2020 akan dilaksanakan Pendataan Nilai Tukar Nelayan. Untuk data Nilai tukar nelayan, diambil dari Nilai Tukar Nelayan, provinsi Sulawesi Selatan, dimana NTN secara konsisten dalam lima tahun terakhir berada di atas 100 atau dapat diartikan pendapatan nelayan lebih besar dari pengeluaran (surplus). NTN sebesar provinsi Sulawesi Selatan dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.217 | Nilai Tukar Nelayan Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks yang diterima nelayan	127	136	141	143	104
Indeks yang dibayar nelayan	123	126	131	133	105
Nilai tukar nelayan	103,50	107,56	107,84	107,62	99,65

Sumber: Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar, 2021

2.3.4 Layanan Penunjang Urusan

2.3.4.1 Perencanaan Pembangunan

Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen perencanaan untuk jangka panjang untuk periode 20 tahun. RPJPD Kota Makassar yang berlaku saat ini adalah tahun 2005-2025. Ketersediaan dokumen perencanaan RPJPD yang ditetapkan dengan perda telah terpenuhi, dimana RPJPD Kota Makassar ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 3).

Tabel 2.218 | Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA
Tahun 2016 – 2020

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar, 2021

Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA/PERKADA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala daerah. RPJMD Kota Makassar yang berlaku saat ini adalah periodisasi 2014-2019. Ketersediaan RPJMD Kota Makassar yang ditetapkan melalui Perda telah terpenuhi sesuai peraturan perundang-undangan, dimana RPJMD Kota Makassar ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2014 -2019 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2017).

Tabel 2.219 | Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA/PERKADA
Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar, 2021

Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang Telah Ditetapkan dengan PERKADA

Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun. RKPD Kota Makassar telah sesuai dengan ketentuan yang ada dimana setiap tahunnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Tabel 2.220 | Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang Telah Ditetapkan dengan PERKADA Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar, 2021

Tersedianya Dokumen RTRW yang Telah Ditetapkan dengan PERDA

Penataan ruang adalah Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dokumen Rencana Tata Ruang adalah dokumen rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kota. RTRT Kota Makassar yang berlaku saat ini adalah Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar 2005-2015 (Lembaran daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2006). Ketersediaan dokumen RTRW Kota Makassar telah sesuai dengan ketentuan yang ada.

Tabel 2.221 | Tersedianya Dokumen RTRW yang Telah Ditetapkan dengan PERDA Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar, 2021

Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD

Untuk konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD, dimana jumlah Program yang ada di RPJMD, telah dijabarkan dan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun berkenaan, dimana rata-rata 97% Program yang ada di dalam RPJMD, telah dilaksanakan ke dalam RKPD tahun berkenaan.

Tabel 2.222 | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah program RKPD Tahun berkenaan	566	542	587	569	388
Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan	570	572	587	591	Tidak Ada
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	99,30	94,76	100,00	96,28	

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar, 2021

Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD

Untuk konsistensi Program RKPD ke dalam APBD, dimana jumlah Program yang ada di RKPD, telah dijabarkan dan dilaksanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berkenaan, dimana rata-rata telah terdapat 98% Program yang ada di dalam RKPD, telah dilaksanakan ke dalam APBD tahun berkenaan.

Tabel 2.223 | Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah program APBD Tahun berkenaan	551	551	587	584	388
Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun Berkenaan	570	572	587	591	388
Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	96,67	96,33	100,00	98,82	100,00

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar, 2021

Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW

Program dan kegiatan yang tertuang dalam RPJMD Kota Makassar sesuai dengan arahan RTRW Kota Makassar. Salah satu acuan penyusunan RPJMD yaitu RTRW, yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar Tahun 2015-2034 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2015, Nomor 4), menggantikan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang RTRW Kota Makassar Tahun 2005 – 2015.

Tabel 2.224 | Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Kesesuaian Program/kegiatan pembangunan terhadap pola dan struktur ruang	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai
Kokumen RTRW	1	1	1	1	1
Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar, 2021

2.3.4.2 Keuangan

Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 menyebutkan bahwa pemeriksaan keuangan dilakukan oleh BPK yang merupakan pemeriksaan pada Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Daerah dengan hasil pemeriksaan keuangan berupa pernyataan opini tentang “Tingkat Kewajaran Informasi” yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria ia yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. BPK dalam memberikan opini mendasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005. Aturan tersebut menganut basis Cash towards Accrual, dimana Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana diakui dengan basis akrual, sedangkan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan menggunakan

basis kas. Terdapat empat jenis opini BPK yaitu : Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP) , Tidak Menyatakan Pendapat (disclaimer) (TMP). Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Makassar dalam dua tahun terakhir telah mencapai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini merupakan sesuatu yang membanggakan dan harus terus dipertahankan.

Tabel 2.225 | Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Opini Badan Pemeriksa Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar, 2021

Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2016 hingga 2019 Pemerintah Kota Makassar mendapat WTP dan pada tahun 2020 mendapatkan opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) hal ini disebabkan bahwa pengelolaan keuangan yang belum tertib sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar.

Persentase SILPA

Persentase Sisa Lebih Penggunaan Anggaran pada tahun 2017 sebesar 8,22%, meningkat dari tahun 2016 yang sebesar 5,29%. Persentase Sisa Lebih Penggunaan Anggaran pada tahun 2018 sebesar 4,96%, menurun dari tahun 2017 yang sebesar 8,22%. Angka ini masih cukup moderat mengingat SILPA Kota Makassar masih cukup terkendali antara rentang 8% s.d 10% dalam lima tahun.

Tabel 2.226 | Persentase SILPA Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Total SILPA	173.408.850.771	272.476.856.272	174.757.015.685	253.185.861.994	592.870.317.920
Total APBD	3.278.340.966.083	3.313.673.623.887	3.526.081.002.897	3.458.231.016.379	3.008.270.709.340
Persentase SILPA	5,29	8,22	4,96	7,32	19,71

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar, 2021

Persentase Belanja Pendidikan (20%)

Belanja untuk sektor Pendidikan dipersyaratkan minimal 20% dari total anggaran Pemerintah daerah. Persentase belanja pendidikan Kota Makassar dalam lima tahun terakhir telah melebihi dari ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana tahun 2019 mencapai 24,9% meningkat dari tahun 2018 yang sebesar 22,37%. Data menunjukkan, persentase belanja untuk sektor Pendidikan dalam APBD Kota Makassar mencapai rata-rata 26,6% dalam lima tahun terakhir.

Tabel 2.227 | Persentase Belanja Pendidikan (20%) Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Belanja Bidang Urusan Pendidikan	954.695.357.786	808.523.133.124	802.644.391.835	862.300.123.978	860.797.592.650
Total APBD	3.278.340.966.083	3.313.673.623.887	3.526.081.002.897	3.458.231.016.379	3.008.270.709.340
Persentase belanja pendidikan (20%)	29,12	24,4	22,76	24,93	28,61

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar, 2021

Persentase Belanja Kesehatan (10%)

Persentase belanja kesehatan Kota Makassar telah melebihi angka 10% jika dibandingkan dengan total APBD sehingga persentase belanja kesehatan telah sesuai dengan ketentuan.

Bila dilihat dari data, alokasi untuk sektor Kesehatan pada APBD Kota Makassar dalam lima tahun terakhir mencapai 12,62%.

Tabel 2.228 | Persentase Belanja Kesehatan (10%) Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Belanja Bidang Urusan Kesehatan	434.073.695.048	402.746.664.545	421.645.984.438	430.274.111.578	375.479.075.568
Total APBD	3.278.340.966.083	3.313.673.623.887	3.526.081.002.897	3.458.231.016.379	3.008.270.709.340
Persentase belanja kesehatan (10%)	13,24	12,15	11,96	12,44	12,48

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar, 2021

Perbandingan Antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung

Perbandingan antara belanja Langsung dan Belanja tidak Langsung Kota Makassar meningkat dalam lima tahun terakhir dimana persentase belanja langsung terhadap belanja tidak langsung terjadi pada tahun 2017 yang sebesar lebih dari 67% untuk alokasi belanja langsung. Angka ini konsisten dipertahankan kan pada tahun 2019, dimana alokasi belanja langsung Kota Makassar mencapai 68,8% berbanding 31,12% untuk Belanja Tidak Langsung. Dalam lima tahun terakhir rata-rata belanja tidak langsung Kota Makassar mencapai 35,4%. Hal ini menunjukkan bahwa belanja untuk Program dan Kegiatan sudah lebih besar dari belanja untuk gaji pegawai dan belanja hibah.

Tabel 2.229 | Perbandingan Antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Belanja Langsung	1.934.785.852.824	2.252.243.130.338	2.400.203.586.070	2.381.964.436.436	1.521.641.679.153
Jumlah Belanja Tidak Langsung	1.343.555.113.259	1.061.430.493.549	1.125.877.416.827	1.076.266.579.943	1.486.629.030.187
Total APBD	3.278.340.966.083	3.313.673.623.887	3.526.081.002.897	3.458.231.016.379	3.008.270.709.340
Persentase belanja langsung	59,02	67,97	68,07	68,88	50,58
Persentase belanja tidak langsung	40,98	32,03	31,93	31,12	49,42

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Makassar, 2021

Penetapan APBD

Penetapan APBD Kota Makassar dalam lima tahun terakhir selalu tepat waktu dimana kesepakatan antara eksekutif dan legislatif terhadap RAPBD telah tercapai sebelum bulan Desember tahun berkenaan. Penetapan APBD tepat waktu tersebut sangat penting agar tahun pelaksanaan anggaran dapat berjalan di awal tahun terutama untuk kegiatan-kegiatan bersifat fisik dan memerlukan lelang.

Tabel 2.230 | Penetapan APBD Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar, 2021

2.3.4.3 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan

Gambaran umum Aparatur Sipil Negara Kota Makassar untuk persentase rata-rata lama pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan dapat dijelaskan dalam kurun waktu

selama 5 (lima) tahun terakhir yang bervariasi, hal ini disebabkan terbatasnya anggaran pada BKPSDMD di setiap tahunnya untuk menyelenggarakan kegiatan diklat, baik itu diklat teknis maupun diklat struktural. Dalam lima tahun terakhir, rata-rata pegawai mendapatkan rata-rata 12,25 jam pelajaran pertahunnya. Data rata-rata lama pegawai mendapat Pendidikan dan pelatihan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.231 | Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Rata-rata lama pegawai mendapat pendidikan dan pelatihan	28 jam	12 jam	12 jam	9,28 jam	-

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar, 2021

Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

Berdasarkan tabel 2.336 pada tahun 2016 hingga tahun 2017 jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan meningkat, dari 3.556 pegawai menjadi 3.973 pada tahun 2017 atau meningkat sebanyak 417 dari tahun sebelumnya. Pada Tahun 2017 dilakukan perubahan struktur organisasi baru dimana Badan Pendidikan dan Pelatihan bergabung dengan Badan Kepegawaian Daerah menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar. Restrukturisasi kelembagaan pemerintah daerah berdasarkan PP 18 Tahun 2017, menyebabkan berkurangnya fungsi kediklatan di Pemerintah, sehingga diklat yang dilakukan ditahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019 lebih sedikit dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan di Tahun 2020 jumlah persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal masih sama jumlahnya dengan data tahun 2019. Hal ini dikarenakan seluruh anggaran diklat tersebut dialihkan untuk penanganan pandemi Covid-19, sehingga kegiatan diklat tidak dilaksanakan.

Tabel 2.232 | Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	3.556	3.973	4.362	764	-
Jumlah total ASN	14.220	11.449	11.713	11.011	10.385
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	25,01	34,70	37,24	6,94	-

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar, 2021

Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural

Berdasarkan data pada tabel di bawah dari tahun 2015 hingga tahun 2016 pejabat ASN yang mengikuti diklat struktural meningkat cukup signifikan sebanyak 455 ASN, dari tahun 2015 ke tahun 2016. Tahun 2017 dilakukan perubahan struktur organisasi baru dimana Badan Pendidikan dan Pelatihan bergabung dengan Badan Kepegawaian Daerah menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar. Restrukturisasi kelembagaan pemerintah daerah berdasarkan PP 18 Tahun 2017, menyebabkan berkurangnya fungsi kediklatan di Pemerintah, sehingga diklat yang dilakukan ditahun 2018 dan 2019 lebih sedikit dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tahun 2019 hanya 2,46% ASN yang mengikuti diklat struktural atau 42 orang saja dari 1.709 pejabat yang ada.

Tabel 2.233 | Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural	1.069	1.117	1.165	42	-
Jumlah total jabatan	1.959	1.959	1.959	1.709	1.763
Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	54,57	57,02	59,47	2,46	-

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar, 2021

Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah

Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada Perangkat Daerah Kota Makassar pada tahun 2017 hingga 2020 tidak mengalami perubahan yaitu sebanyak 42 orang, lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2016 yang jumlahnya hanya 45 orang. Dimana data tahun 2017 hingga 2019 Jumlah pimpinan tinggi Perangkat daerah ini telah menyesuaikan dengan struktur organisasi yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Perda Kota Makassar Nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Makassar. Jumlah jabatan pimpinan tinggi ini terdiri dari 32 orang laki-laki dan 10 orang perempuan.

Tabel 2.234 | Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah jabatan pimpinan tinggi	45	42	42	42	42

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar, 2021

Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah

Jumlah jabatan administrasi pada Perangkat Daerah Kota Makassar pada tahun 2016 hingga tahun 2017 sebanyak 1.701 orang. Tahun 2018 hingga 2019 Jumlah jabatan administrasi pada Perangkat daerah telah menyesuaikan dengan struktur organisasi yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Perda Kota Makassar Nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Makassar, dimana jumlah jabatan administrasi yang ditetapkan sebanyak 1.796 jabatan administrasi. Untuk tahun 2019 dari 1601 jabatan administrasi terisi sebanyak 1.329 yang terdiri dari 719 laki-laki dan 610 perempuan. Terdapat sebanyak 272 jabatan administrasi yang masih belum terisi. Dan hingga akhir tahun 2020 Jumlah jabatan administrasi yang ada pada struktur Pemerintah Kota Makassar sebanyak 1.718.

Tabel 2.235 | Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah jabatan administrasi	1.701	1.701	1.796	1.601	1.718

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar, 2021

Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah

Pemangku jabatan fungsional di Kota Makassar cenderung menurun 4 tahun terakhir. Data pada tahun 2018 sebanyak 6.197 orang, Jika dibandingkan dengan data tahun 2016 sebanyak 8.786 mengalami angka penurunan sebanyak 589 orang. Ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya perubahan wilayah kewenangan termasuk pendidikan menengah yang dialihkan di bawah naungan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Permintaan perpindahan lokasi tugas, pemberhentian sementara, dan perpindahan ke jabatan lainnya. Memasuki tahun 2019

sejak diterapkannya Peraturan Pemerintah Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Nomor 11 Tahun 2017 mengalami peningkatan di tahun 2020, dari 6.658 tahun 2019 menjadi 6.745 di tahun 2020 dan diperkirakan akan terus meningkat ditahun-tahun berikutnya melalui Promosi Jabatan fungsional dan Inpassing/penyesuaian jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah Tahun 2016 s.d 2020 Kota Makassar.

Tabel 2.236 | Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah pemangku jabatan fungsional	6.786	6.611	6.197	6.658	6.745

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar, 2021

2.3.4.4 Penelitian dan Pengembangan

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar adalah perangkat daerah yang terbentuk pada tahun 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar. Pada pasal 39, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.

Uraian tugas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar diatur dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 112 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah. Pembentukan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar ini juga sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah.

Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan

Penyusunan menunjukkan bahwa persentase implementasi rencana kelitbangan setiap tahunnya memberikan capaian 100%. Artinya bahwa jumlah kelitbangan dalam RKPD sama dengan jumlah kelitbangan dalam RPJMD. Dalam 4 tahun terakhir sejak Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah berdiri, setiap tahunnya tetap menyesuaikan jumlah kegiatan kelitbangan yang terdapat dalam RKPD dan RPJMD menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah. Pada tahun 2017 sampai dengan 2019, jumlah kelitbangan dalam RKPD dan jumlah kelitbangan dalam RPJMD masing-masing terdiri dari 14 kegiatan kelitbangan, 18 kegiatan kelitbangan, dan 21 kegiatan kelitbangan. Sementara pada tahun 2020 tidak lagi didasarkan pada RPJMD hanya disesuaikan dengan RKPD yaitu 13 kegiatan kelitbangan, mengikuti RKPD dan anggaran yang telah ditetapkan untuk kegiatan kelitbangan. Persentase implementasi rencana kelitbangan selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.237 | Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah kelitbangan dalam RKPD	-	14	18	21	13
Jumlah kelitbangan dalam RPJMD	-	14	18	21	13
Persentase implementasi rencana kelitbangan	-	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar, 2021

Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan

Perangkat Daerah tahun 2017, 2018 dan 2019 yang dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan yang telah mencapai 100% baik pada tahun 2017, 2018 dan 2019. Terdapat 14 kegiatan penelitian pada tahun 2017 yang semuanya dimanfaatkan. Sedangkan pada tahun 2018, meningkat menjadi 18 kegiatan penelitian, dan pada tahun 2019 meningkat lagi menjadi 21 kegiatan penelitian. Hal ini disebabkan karena adanya perkembangan kebutuhan kelitbangan yang telah diakomodir dalam Renstra. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.238 | Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti	-	8	6	5	-
Jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah	-	12	8	8	14
Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	-	66,67	75,00	62,50	-

Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar, 2021

Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah

Gambaran kondisi umum Kota Makassar untuk persentase pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan data menunjukkan bahwa pada tahun 2017 terdapat 51 Perangkat Daerah dan Bagian serta UPT Rumah Sakit Umum Daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah. Pada tahun 2018, hal ini terus berlanjut dan ditambah dengan 1 Perusahaan Daerah. Pada tahun 2018, sebanyak 75 inovasi dan tahun 2019 sebanyak 109 inovasi yang diikuti dalam *Innovation Government Award* (IGA) yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah meningkat pada tahun 2019 menjadi 209,61%. Sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 117 inovasi dengan persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah sebesar 229,41%. Peningkatan penerapan inovasi daerah ini disebabkan adanya motivasi yang tinggi dari Kepala Daerah dan ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah untuk menerapkan minimal satu inovasi. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.239 | Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi	-	51	51	51	51
Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi	-	51	51	51	51
Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	-	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar, 2021

Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah

Berdasarkan tabel di bawah menunjukkan bahwa inovasi daerah yang ada di Kota Makassar setiap tahunnya mengalami peningkatan, yakni pada tahun 2017 sebanyak 114 inovasi daerah, 2018 berjumlah 185 inovasi daerah, tahun 2019 sebanyak 218 inovasi daerah, dan tahun 2020 berjumlah 214 inovasi daerah. Peningkatan tersebut oleh adanya daya dukung program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kota Makassar sebagai bentuk pendampingan bagi SKPD atau inovator. Kegiatan yang mendukung meningkatnya inovasi daerah, seperti Forum Inovasi Daerah, Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa), serta Monitoring dan Evaluasi terhadap inovasi

daerah. Begitu juga dengan kegiatan Lomba Inovasi Daerah yang diselenggarakan oleh Balitbangda Kota Makassar pada tingkat SKPD lingkup Kota Makassar.

Kegiatan forum inovasi daerah merupakan wadah bagi para pelaku inovasi dalam *sharing* pengetahuan tentang inovasi daerah. Kegiatan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) merupakan kegiatan yang mendorong lahirnya dan mempertahankan inovasi daerah. Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan yang melihat sejauh mana inovasi berkembang atau stagnan atau bahkan “mati suri”. Kegiatan-kegiatan tersebut sebagai bentuk stimulan bagi tumbuh kembangnya inovasi daerah. Namun demikian, pada tahun 2020 jumlah inovasi daerah mengalami sedikit penurunan disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19.

Tabel 2.240 | Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan	-	144	185	218	214
Jumlah inovasi yang diusulkan	-	144	185	218	214
Persentasi kebijakan inovasi yang diterapkan	-	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar, 2021

2.3.4.5 Pengawasan

Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan

Rekomendasi hasil pemeriksaan auditor (APIP) bermanfaat untuk memperbaiki kinerja organisasi audit (perangkat daerah). Tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) merupakan aktivitas audit (perangkat daerah) dalam rangka memenuhi rekomendasi auditor yang tertuang dalam hasil pemeriksaan. Penertiban LHP merupakan akhir dari kegiatan pemeriksaan, padahal hasil atau manfaat penuh dari proses audit sendiri berupa perbaikan berdasarkan kesalahan yang telah diidentifikasi akan dirasakan oleh auditor jika ditemukan audit telah ditindaklanjuti pada tahun 2015 jumlah temuan inspektorat kota Makassar sebanyak 426 temuan, dan yang ditindaklanjuti sebanyak 328 atau 71,93% dan pada tahun 2019 terdapat 883 temuan dengan jumlah temuan yang ditindaklanjuti sebanyak 471 atau persentase tindaklanjut temuan menurun menjadi 53,34%. Persentase tindaklanjut temuan APIP dalam lima tahun terakhir tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.241 | Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah temuan yang ditindak lanjuti	467	39	380	471	459
Jumlah total temuan	778	104	771	883	804
Persentase tindak lanjut temuan	60,03	37,50	49,29	53,34	57,09

Sumber: Inspektorat Daerah Kota Makassar, 2021

Persentase Pelanggaran Pegawai

Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Dalam kurun waktu 2016-2020 peraturan yang telah diterbitkan pemerintah dapat menekan pelanggaran disiplin yang dilakukan PNS. Sehingga untuk Tahun 2020 jumlah ASN yang dikenai sanksi hanya sebanyak 32 orang. Masih banyak ditemukan PNS yang tidak disiplin dalam bekerja, kurangnya kesadaran untuk menyelesaikan tugas, serta

kurangnya rasa tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Hal ini dikarenakan tidak ada kepedulian dalam rangka pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya, sehingga secara tidak langsung menimbulkan kegiatan pada instansi tersebut tidak berjalan dengan baik. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk menekan pelanggaran disiplin pegawai, dilakukan pembinaan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang lebih intensif.

Tabel 2.242 | Persentase Pelanggaran Pegawai Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah ASN yang dikenai sanksi	102	82	135	142	32
Jumlah total ASN	14.220	11.449	11.713	11.011	10.385
Persentase pelanggaran pegawai	0,72	0,72	1,15	1,29	0,31

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar, 2021

Jumlah Temuan BPK

Setiap tahun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menerbitkan ragam rekomendasi yang berisi saran perbaikan atas berbagai temuan audit, termasuk yang berpotensi merugikan keuangan negara. Temuan tersebut dapat berupa kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan, maupun penyimpangan administrasi. Tindak lanjut atas rekomendasi dapat berupa pelaksanaan seluruh atau sebagian dari rekomendasi. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2019 terdapat temuan Sistem Pengendalian Intern sebanyak 3 (tiga), Kepatuhan sebanyak 4 (empat), dan Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu sebanyak 17 (tujuh belas) sehingga total temuan pada tahun anggaran 2020 sebanyak 24 (dua puluh empat) dengan nilai Rp3.153.539.430,59. Selengkapnya data temuan BPK dalam lima tahun terakhir tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.243 | Jumlah Temuan BPK Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah temuan BPK	15	23	41	17	24

Sumber: Inspektorat Daerah Kota Makassar, 2021

2.3.4.6 Sekretariat Dewan

Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD

Rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Kota Makassar dalam lima tahun terakhir telah tersedia.

Tabel 2.244 | Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Tersedia rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar, 2021

Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)

Untuk gambaran umum kondisi Kota Makassar Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan (RKPD) dalam lima tahun terakhir telah terlaksana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 2.245 | Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)
Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Tersusun dan terintergrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan (RKPD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar, 2021

Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD

Tabel 2.246 | Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD
Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran setwan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar, 2021

2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.4.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Secara konseptual, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Dalam hal ini rumah tangga berfungsi sebagai pengguna akhir (*final demand*) dari berbagai jenis barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan.

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kota Makassar, ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Kota Makassar maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah atau luar negeri akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumah tangga. Hasil analisis konsumsi Rumah Tangga per kapita, disajikan dalam tabel berikut:

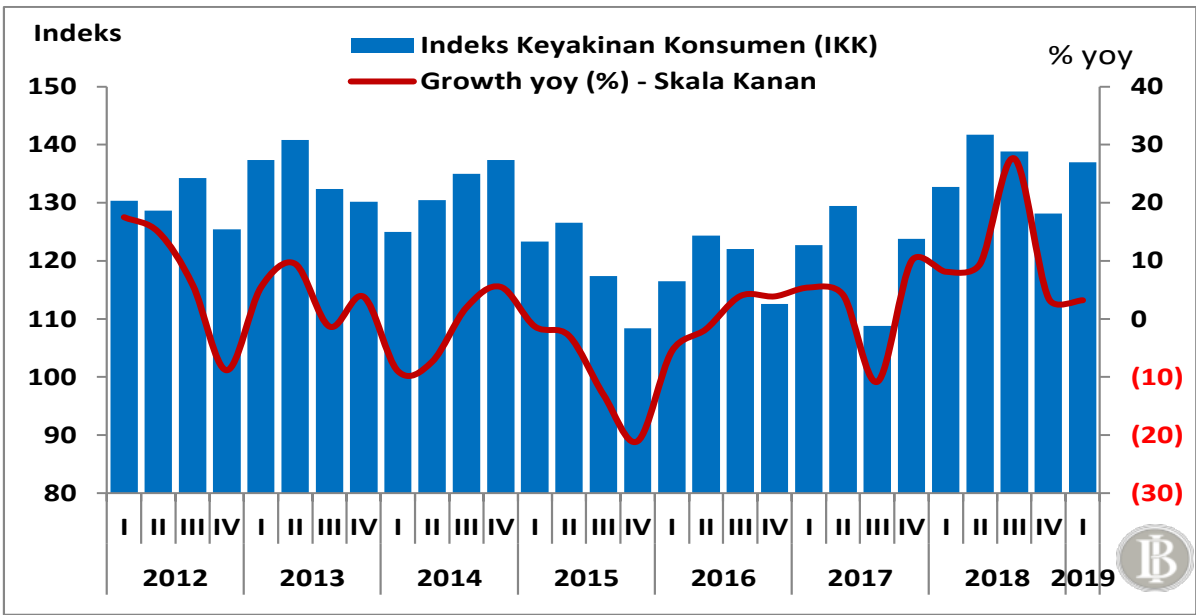
Tabel 2.247 | Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Total Pengeluaran rumah tangga	1.436.605	1.536.017	1.576.102	1.513.095	
Jumlah rumah tangga	420.976	438.720	481.053	401.958	
Pengeluaran rumah tangga per kapita	341,26	350,11	327,64	376,43	

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber, 2021

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga per kapita Kota Makassar dari tahun 2015 mengalami peningkatan yang signifikan sampai pada tahun 2018, dan mengalami penurunan pada tahun 2019 yaitu sebesar 1.513.095, namun dari rasio antara Total Pengeluaran Rumah Tangga dengan Jumlah Rumah Tangga di Kota Makassar mengalami peningkatan yaitu sebesar 3,76 persen, oleh karena adanya koreksi terhadap data jumlah Rumah Tangga di Kota Makassar sebagai hasil dari Sensus Penduduk yang diadakan oleh BPS, yang disebabkan oleh adanya perpindahan penduduk antar daerah keluar dan masuk Kota Makassar. Pada Tahun 2019 Konsumsi Rumah Tangga masih tetap kuat meskipun mengalami perlambatan, Berdasarkan data Bank Indonesia (Triwulan I, 2019) konsumsi Rumah Tangga mengalami pertumbuhan sebesar 6,8 % (YoY) melambat dibandingkan triwulan sebelumnya (Triwulan IV, 2018), namun lebih tinggi dibandingkan rata-rata 3 Tahun terakhir yaitu sebesar 5,9 % (YoY), hal ini disebabkan oleh adanya aktivitas yang cukup tinggi menjelang pesta demokrasi, potongan harga yang masih terjadi serta peningkatan UMP di tahun 2019. Penguatan ini dikonfirmasi juga oleh masih tingginya pertumbuhan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang tumbuh positif 3,2% atau 137 di triwulan I 2019.

Tabel 2.248 | Indeks Keyakinan Konsumen Kota Makassar



Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia

Dari sudut pandang sosial ekonomi, hal ini mengindikasikan bahwa semakin meningkatnya Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per kapita dari tahun ke tahun di Kota Makassar berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan Rumah Tangga, dalam artian bahwa secara umum tingkat kesejahteraan masyarakat Makassar pun semakin menunjukkan perbaikan.

2.4.2 Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) dapat memberikan gambaran tingkat kesejahteraan keluarga petani. Nilai tukar nelayan merupakan domain dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga tidak dilakukan pendataan oleh Dinas perikanan dan Pertanian Kota Makassar. Data NTN diambil dari Nilai Tukar Petani, provinsi Sulawesi Selatan, dimana NTP secara konsisten dalam lima tahun terakhir berada di atas 100 dimana hal ini menggambarkan pendapatan petani sudah lebih besar dari pengeluaran (surplus), yang berarti sektor pertanian sudah relatif dapat membawa kesejahteraan bagi keluarga petani. NTP sebesar provinsi Sulawesi Selatan dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.249 | Nilai Tukar Petani Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks yang diterima petani	130	131	138	142	103
Indeks yang dibayar petani	125	129	134	136	105
Nilai tukar petani	103,93	101,71	103,31	104,42	97,55

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2020

2.4.3 Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita

Dari sisi Pengeluaran, pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan. Oleh karena itu suatu rumah tangga bisa dikategorikan lebih sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dari persentase pengeluaran untuk bukan makanan. Artinya proporsi

alokasi pengeluaran untuk pangan akan semakin kecil dengan bertambahnya pendapatan rumah tangga, karena sebagian besar dari sisi Pengeluaran, pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan. Oleh karena itu suatu rumah tangga bisa dikategorikan lebih sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dari persentase pengeluaran untuk bukan makanan. Artinya proporsi alokasi pengeluaran untuk pangan akan semakin kecil dengan bertambahnya pendapatan rumah tangga, karena sebagian besar dari pendapatan tersebut dialokasikan pada kebutuhan non pangan, antara lain investasi dan sebagainya. Tabel di bawah ini menunjukkan Persentase konsumsi Rumah Tangga Non-Pangan dari Tahun 2015 sampai dengan 2019.

Tabel 2.250 | Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Total Pengeluaran Rumah Tangga Non Pangan	854.382	922.663	886.686	857.383	
Total Pengeluaran	1.436.605	1.536.017	1.576.102	1.513.095	
Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita	59,47	60,07	56,26	56,66	

Sumber: BPS Kota Makassar, 2020

2.4.4 Produktivitas Total Daerah

Produktivitas total daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas tiap sektor per angkatan kerja yang menunjukkan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah per sektor. Produktivitas Total Daerah dapat diketahui dengan menghitung produktivitas daerah per sektor (9 sektor) yang merupakan jumlah PDRB dari setiap sektor dibagi dengan jumlah angkatan kerja dalam sektor yang bersangkutan, dimana nilai tambah sektor mewakili komponen output dari sektor tersebut, dan jumlah tenaga kerja sebagai komponen input, dengan demikian produktivitas total ini sebagaimana yang disebutkan di atas merefleksikan dampak penggunaan input secara bersama dalam memproduksi output. Dengan kata lain indikator ini dalam skala lokal, menunjukkan seberapa besar dampak intervensi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah setempat dalam mendorong Angkatan kerja yang dimiliki sebagai salah satu komponen daya saing daerah, untuk menghasilkan produk atau komoditas pada masing-masing sektor.

Komponen pembentuk Produktivitas Total Daerah adalah Nilai Tambah masing-masing sektor pembentuk PDRB dibagi dengan Jumlah Angkatan kerja, pada tabel di bawah ini disajikan total produktivitas daerah pada masing-masing sektor.

Tabel 2.251 | Produktivitas Total Daerah Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

No	Sektor Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-	28	28	83	46
2	Pertambangan dan Penggalian	-	-	1	1	1
3	Industri Pengolahan/ Manufaktur	-	399	328	416	381
4	Pengadaan Listrik, Gas dan Air	-	58	58	23	46
5	Konstruksi	-	374	319	454	382
6	Perdagangan, Restoran dan Perhotelan	-	115	117	136	123
7	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	-	278	289	253	273
8	Jasa Keuangan dan Asuransi	-	364	334	303	334
9	Jasa Masyarakat, Sosial dan Personal	-	117	151	134	134
	Produktivitas Total Daerah	-	189,33	195,19	206,69	197,00

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, 2021

Dari data di atas menunjukkan bahwa 4 (empat) Sektor yaitu : Konstruksi, Perdagangan, Restoran dan Perhotelan, Jasa Keuangan dan Asuransi, serta Jasa Masyarakat, Sosial dan Personal (Jasa Lainnya) memiliki peningkatan produktivitas total yang cukup signifikan dari 2016 s.d 2020, sementara sektor lainnya mengalami fluktuasi bahkan penurunan pertumbuhan (kontraksi). Kondisi ini sejalan dengan laju pertumbuhan PDRB Kota Makassar pada rentang tahun 2016 s.d 2020 terutama untuk sektor Perdagangan, Restoran dan Perhotelan dan Konstruksi, melampaui pertumbuhan sektor industri pengolahan pada rentang waktu 2013 s.d 2017 yang menyumbang kontribusi terbesar pada pembentukan ekonomi Kota Makassar. Kondisi ini menandakan bahwa penyerapan Angkatan Kerja pada Ke-4 (empat) sektor tersebut cukup efektif berkontribusi pada peningkatan produksi, yang dalam hal ini merupakan PDRB Kota Makassar, yang tentunya dapat disimpulkan dalam rentang waktu 5 (lima) tahun mendatang sektor ini perlu mendapatkan perhatian berupa insentif yang dapat berupa stimulus fiskal maupun paket kebijakan untuk lebih mengoptimalkan produktivitas sektor-sektor ini. Di sisi lain Ke-5 (lima) sektor lainnya, perlu diintervensi secara lebih intensif untuk meningkatkan produktivitasnya sehingga dapat bersinergis dengan laju pertumbuhan ke-4 sektor tersebut, sehingga bermuara pada peningkatan daya saing perekonomian Kota Makassar.

2.4.5 Rasio Ekspor dan Impor Terhadap PDB

Dalam analisis makro, tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara diukur dari perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai suatu negara/daerah. Hal ini terjadi karena pada dasarnya kegiatan perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, yang diukur dengan menggunakan indikator PDB. PDB adalah salah satu faktor yang memberikan kontribusi sebagai faktor utama dalam mengukur kesehatan perekonomian suatu Negara.

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi Kota Makassar, tetapi dikonsumsi oleh pihak yang berdomisili di wilayah lain, baik itu kabupaten lain di dalam satu provinsi, provinsi lain, maupun luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

Produk Domestik Bruto merupakan nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu (biasanya per tahun). PDB berbeda dari produk nasional bruto (PNB) karena memasukkan pendapatan faktor produksi dari luar negeri yang bekerja di negara tersebut. Sehingga PDB hanya menghitung total produksi dari suatu negara atau daerah tanpa memperhitungkan apakah produksi itu dilakukan dengan memakai faktor produksi dalam negeri atau tidak.

Beberapa hasil penelitian terhadap pengaruh aktivitas ekspor dan impor terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) menunjukkan variabel ekspor berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB Indonesia, sedangkan impor berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PDB Indonesia, bahkan hasil penelitian tersebut Menunjukkan bahwa PDB Indonesia sebesar 94,64 persen dipengaruhi oleh Ekspor dan Impor.

Tabel 2.252 | Perkembangan Ekspor dan Impor Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Total Nilai Ekspor					
a. ADHB (Miliar Rp)	42.992	48.708	57.747	69.293	68.400
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	33.656,00	28.520,00	43.203,00	48.151,00	47.204,00
Total nilai Impor					
a. ADHB (Miliar Rp)	63895	68892	77684	69293	91026
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	46166	50305	53401	55631	56405
Total Nilai ekspor + impor					
a. Total Nilai Ekspor + Impor (ADHB)	106887	117600	135431	138586	159426
b. Total Nilai Ekspor + Impor (ADHK 2010)	79822	88825	96605	103783	103609
PDRB					
a. ADHB (Miliar Rp)	128045,37	142448,7	160207,66	178430,06	178332,99
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	95957,64	103826,16	112568,41	122465,83	120905,75
Persentase Ekspor + Impor terhadap PDRB					
a. ADHB (%)	83,48	82,56	84,53	77,67	89,4
b. ADHK (%)	83,18	85,55	85,82	84,74	85,69

Sumber: Tinjauan Perkembangan Ekonomi Kota Makassar, 2021

Dalam konteks perekonomian Kota Makassar secara total, sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel 2.40 dalam kurun waktu 2016-2020 nilai ekspor dan Impor barang dan jasa menunjukkan peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2016 nilai ekspor dan impor barang dan jasa atas dasar harga berlaku sebesar 106.887 rupiah meningkat hingga menjadi sebesar 159.426 miliar rupiah pada tahun 2020. Sementara itu, pada periode 2016 - 2020, proporsi ekspor dan impor barang dan jasa terhadap PDRB justru mengalami fluktuasi nilai, dimana puncaknya pada tahun 2020 sebesar 89,49%, meningkat dari tahun 2019 yang sebesar 77,67% berdasarkan atas dasar harga berlaku. Dari sisi pengeluaran (ADHK) pun mengalami penguatan hingga tahun 2020 sebesar 85,69% dari tahun 2016 yang sebesar 83,18% yang lebih disebabkan oleh karena menurunnya volume perdagangan nasional dan global akibat dampak perang dagang Amerika dan China.

2.4.6 Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di Bank Umum

Rasio Pinjaman terhadap simpanan biasa juga disebut sebagai *Loan to Deposit Ratio* (LDR), rasio ini digunakan untuk menilai likuiditas perbankan dengan cara membagi jumlah kredit yang diberikan oleh bank terhadap dana pihak ketiga. Kredit yang diberikan tidak termasuk kredit kepada bank lain sedangkan untuk dana pihak ketiga adalah giro, tabungan, simpanan berjangka, sertifikat deposito. Semakin tinggi rasio LDR maka semakin tinggi probabilitas dari sebuah bank mengalami kebangkrutan. Hal ini memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar.

Penilaian likuiditas merupakan penilaian terhadap kemampuan bank untuk memelihara tingkat likuiditas yang memadai dan kecukupan manajemen risiko likuiditas. LDR paling sering digunakan oleh analis keuangan dalam menilai suatu kinerja bank terutama dari seluruh jumlah kredit yang diberikan oleh bank dengan dana yang diterima oleh bank.

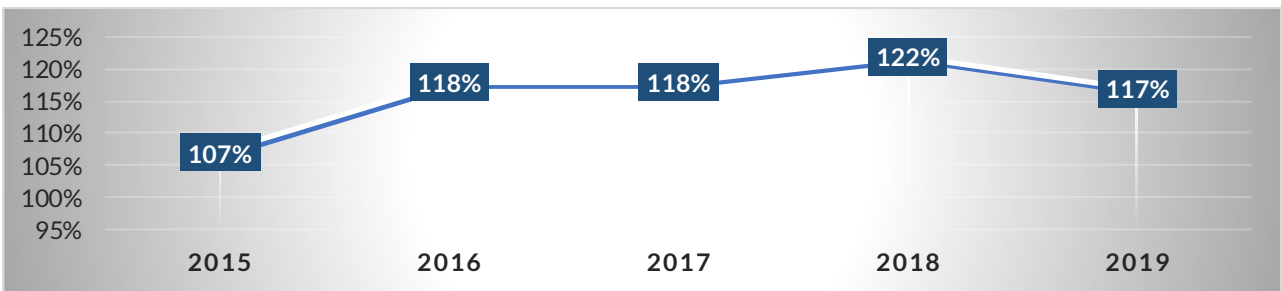
Alasan memilih variabel ini adalah dengan pertimbangan bahwa semakin besar jumlah kredit yang diberikan oleh bank maka akan semakin rendah tingkat likuiditas bank yang bersangkutan, namun dilain pihak semakin besar jumlah kredit yang diberikan diharapkan bank akan mendapatkan *return* yang tinggi pula. Hal tersebut akan mempengaruhi penilaian investor dalam mengambil keputusan investasinya sehingga secara bersamaan akan mempengaruhi permintaan dan penawaran saham di pasar modal yang pada akhirnya mempengaruhi harga saham yang akhirnya berdampak pada pertumbuhan tingkat return saham bank. Tabel 2.41 di bawah ini menunjukkan akumulasi Rasio Pinjaman terhadap simpanan pihak ketiga (LDR) di seluruh Perbankan Umum di Kota Makassar.

Tabel 2.253 | Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di Bank Umum Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Pinjaman (Rp. Triliun)	65,937	68,369	73,926	72,773	
Simpanan (Rp. Triliun)	55,888	57,828	60,516	62,251	
Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan	1,18	1,18	1,22	1,17	

Sumber: Tinjauan Perkembangan Ekonomi Kota Makassar, 2021

Tabel 2.254 | Grafik Kondisi LDR Perbankan Umum di Kota Makassar



Sumber: Bank Indonesia, 2021

Jika dilihat pada tabel dan grafik di atas maka selama 5 (lima) tahun terakhir, kondisi perbankan umum yang ada di Kota Makassar tergolong tidak sehat , yang dalam hal ini mengalami kesulitan likuiditas. Hal ini mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 antara lain: (1) Sehat → 50 % < rasio ≤ 100%; dan (2) Tidak Sehat → > 100%.

Dari sisi daya saing daerah kondisi ini , sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, bahwa akan mempengaruhi penilaian investor dalam mengambil keputusan investasinya sehingga secara bersamaan akan mempengaruhi permintaan dan penawaran saham di pasar modal, demikian

juga secara khusus terhadap pertumbuhan kredit UMKM, dimana pada beberapa penelitian terkait pengaruh LDR terhadap pertumbuhan kredit UMKM membuktikan adanya pengaruh positif LDR terhadap pertumbuhan kredit UMKM. Sebagaimana diketahui secara mendasar bahwa UMKM telah terbukti menopang menjadi penopang ekonomi Indonesia terutama misalnya, pada saat krisis moneter tahun 1997 - 1998. Mereka bertahan karena bahan baku yang digunakan adalah bahan lokal dan orientasi pasarnya adalah dalam negeri. Oleh karena itu dapat diasumsikan bahwa semakin tinggi pertumbuhan kredit terhadap UMKM di suatu daerah, yang jelas dipengaruhi oleh Rasio pinjaman terhadap simpanan Perbankan, maka semakin tinggi pula daya saing perekonomian suatu daerah dalam menghadapi suatu krisis perekonomian.

2.4.7 Angka Kriminalitas yang Tertangani

Kriminalitas adalah segala bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku serta norma-norma sosial dan agama. Angka kriminalitas merupakan suatu angka yang menunjukkan kejadian kriminalitas yang terjadi pada suatu waktu dan daerah tertentu. Tindak kejahatan/kriminalitas dapat terjadi karena adanya kepincangan sosial, tekanan mental, dan kebencian. Selain itu juga karena adanya perubahan masyarakat dan kebudayaan yang cepat tetapi tidak dapat diikuti oleh seluruh anggota masyarakat, sehingga tidak terjadi penyesuaian yang sempurna. Angka Kriminalitas di Kota Makassar selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.255 | Angka Kriminalitas Kota Makassar 2016 – 2020 Kota Makassar

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kasus narkoba	314	432	339	479	479
2	Jumlah kasus pembunuhan	12	12	22	13	9
3	Jumlah kejahatan seksual	15	33	44	39	3
4	Jumlah kasus penganiayaan	589	1.090	1.284	969	89
5	Jumlah kasus pencurian	2.483	4.090	5.286	1.268	463
6	Jumlah kasus penipuan	676	1.730	2.004	626	105
7	Jumlah kasus pemalsuan uang	-	1	-	-	1
	Jumlah tindak kriminal selama 1 tahun	4.089	7.388	8.979	3.394	1.136
	Jumlah penduduk	1.469.601	1.488.717	1.508.154	1.526.677	1.423.877
	Angka Kriminalitas yang Tertangani	0,28	0,50	0,60	0,22	0,08

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar, 2021

Berdasarkan data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar di atas, angka kriminalitas di Kota Makassar cukup rendah selama 5 tahun terakhir (2015 – 2019) berada pada kisaran 0,002 – 0,005. Jika kemudian dikonversi per 10.000 penduduk berdasarkan asumsi Badan Pusat Statistik , maka kisaran angka kriminalitasnya mengindikasikan adanya 24 – 54 kasus kriminal per 10.000 penduduk. Kecenderungan terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2018 yaitu sebesar 54 kasus per 10.000 penduduk di Kota Makassar yang didominasi oleh kasus pencurian mengindikasikan bahwa latar belakang alasan ekonomi yang menjadi faktor pemicu utama melonjaknya angka kriminalitas di Kota Makassar.

2.4.8 Rasio Ketergantungan

Perubahan struktur penduduk mempengaruhi angka beban ketergantungan, salah satunya adalah beban ketergantungan penduduk lansia dan anak di bawah usia 15 tahun .Rasio ketergantungan penduduk (*Dependency Ratio/DR*) adalah angka yang menunjukkan tingkat ketergantungan penduduk lansia dan anak-anak pada penduduk usia produktif. Angka tersebut merupakan perbandingan antara jumlah penduduk lansia (60 tahun ke atas) ditambah dengan jumlah penduduk di bawah usia 15 tahun, dibagi dengan jumlah penduduk produktif (15-59 tahun). Dari angka ini tercermin besarnya beban ekonomi yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk lansia dan anak-anak.

Semakin rendah rasio ketergantungan, mengindikasikan kondisi yang disebut oleh istilah demografi sebagai jendela kesempatan (*window of opportunity*) semakin terbuka lebar, dimana pada kondisi tersebut suatu daerah dapat memanfaatkan penduduk usia produktif untuk meningkatkan kondisi ekonomi (*economic performance*) daerah tersebut.

Tabel 2.256 | Rasio Ketergantungan Kota Makassar Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Penduduk usia < 15th + usia > 64	433.186	515.080	408.327	444.110	450.176
Penduduk usia 15-64	1.036.415	973.931	1.067.957	1.082.567	1.040.218
Rasio ketergantungan	41,80	52,89	38,23	41,02	43,28

Sumber: Hasil Sakernas BPS RI, diolah oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, 2020 akan diupdate bulan Oktober 2020

Dari tabel di atas diketahui bahwa rasio ketergantungan penduduk Kota Makassar pada tahun 2020 sebesar 43,28 persen yang artinya setiap 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) mempunyai beban tanggungan sebanyak 43 orang yang dianggap belum produktif atau sudah tidak produktif lagi. Angka ini mengalami peningkatan dari tahun 2019 dimana rasio ketergantungan sebesar 41,02 persen. kondisi ini tentu menggambarkan kondisi yang cukup memprihatinkan yaitu jumlah penduduk usia non-produktif lebih dominan dibandingkan penduduk usia produktif.

Kondisi ini tentunya menggambarkan bahwa Pemerintah Kota Makassar harus memberikan tanggungan berbentuk jaminan sosial, bantuan pensiun, serta fasilitas lainnya yang didapatkan oleh penduduk non produktif walaupun mereka tidak bekerja. Ketika Pemerintah Kota Makassar kemudian tidak mampu menyediakan fasilitas umum secara efektif dan efisien karena kekurangan dana, masyarakat yang produktif juga akan terkena imbasnya. Hal ini terjadi karena pemerintah memiliki obligasi untuk melayani seluruh rakyatnya dengan sebaik mungkin, tidak boleh hanya golongan tertentu yang diuntungkan.

Dari sudut pandang daya saing daerah terutama daya saing perekonomian semakin rendah rasio ketergantungan yang dimiliki suatu daerah maka semakin besar potensi pendapatan yang didapatkan oleh suatu daerah yang berkonsekuensi pada lebih banyak dana dari para pekerja baik secara langsung via pajak atau secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi, begitu pun sebaliknya maka semakin besar beban tanggungan Pemerintah Kota Makassar untuk menyediakan fasilitas dan jaminan sosial bagi penduduk non produktif, yang tentunya berdampak pada penurunan daya saing tersebut.

STANDAR PELAYANAN MINIMUM

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Yang dimaksud dengan Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara baik barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak. Pelaksanaan SPM didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan. Pemerintah daerah wajib menerapkan SPM yang meliputi pengumpulan data, penghitungan kebutuhan, penyusunan rencana serta pelaksanaannya.

1) SPM Bidang Urusan Pendidikan

Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam SPM Bidang Urusan Pendidikan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Makassar adalah Pelayanan Pendidikan Dasar, Pelayanan Pendidikan Kesetaraan dan Pelayanan Pendidikan Usia Dini. Adapun target dari setiap layanan SPM Pendidikan adalah 100%, dengan capaian masing-masing indikator adalah SPM Bidang Pendidikan Dasar dengan capaian sebesar 99,71%, SPM Bidang Pendidikan Kesetaraan dengan capaian 72,34% dan SPM Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dengan capaian sebesar 48,60%. SPM didukung melalui Program Pendidikan, Program Pendidikan Kesetaraan dan Program Pendidikan Usia Dini. Capaian belum mencapai target disebabkan karena selama Pandemi Covid-19 tahun 2020 banyak Orang tua yang memiliki anak usia 4 Tahun yang seharusnya berpartisipasi dalam pendidikan PAUD, namun belum memasukkan sekolah anaknya dengan pertimbangan tertentu.

2) SPM Bidang Urusan Kesehatan

Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang kesehatan yang dilaksanakan oleh Kota Makassar adalah: Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Pelayanan Kesehatan Balita, Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar, Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif, Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut, Pelayanan Kesehatan pada Penderita *Hypertensi*, Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus, Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat, Pelayanan Kesehatan Orang dengan Terduga *Tuberculosis* (TB), Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus/HIV*). Target kinerja pemerintah daerah kabupaten/Kota dalam pemberian layanan Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan adalah 100%. Adapun realisasi pencapaian SPM bidang kesehatan yang mencapai 100% adalah indikator pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan orang dengan terduga TB, pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh (HIV). Pencapaian Standar Pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan tahun 2020, terlihat dari 12 indikator SPM yang mencapai target penetapan kinerja 100%, sebanyak 3 indikator, sedangkan yang belum mencapai target sebanyak 9 Indikator tersebut adalah pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, pelayanan kesehatan balita, pelayanan kesehatan usia Pendidikan dasar, pelayanan kesehatan pada usia produktif, pelayanan kesehatan pada usia lanjut, pelayanan kesehatan penderita hipertensi, pelayanan kesehatan penderita *diabetes mellitus* dan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat.

3) SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum

SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum didukung melalui Program Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari dengan Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih yang sumber dana dari APBD, Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih (Hibah) yang sumber dana dari APBD maupun Kegiatan Sarana dan Prasarana Penugasan Air Bersih (DAK) yang sumber dana dari APBN berdasarkan kegiatan yang dikelola dalam DPA Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar ditambah dengan capaian yang dilaksanakan oleh PDAM sehingga cakupan masih 71,52 % dari penduduk Kota Makassar.

Untuk tahun 2018 kegiatan yang mendukung pencapaian SPM dilaksanakan Kegiatan Pembangunan Sarana & Pra sarana Air Bersih dengan sumber dana dari APBD, Kegiatan : Sarana dan Prasarana Penugasan Air Bersih (DAK) dengan sumber dana dari APBN

Untuk tahun 2019 untuk mendukung pencapaian SPM dilaksanakan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih yang sumber dana dari APBD, Kegiatan Sarana dan Prasarana Penugasan Air Bersih Air Bersih (DAK) yang sumber dana dari APBN.

Untuk tahun 2020 kegiatan yang mendukung pencapaian SPM adalah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih yang sumber dana dari APBD, Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih (Hibah), Kegiatan Sarana dan Prasarana Penugasan Air Bersih Air Bersih (DAK) yang sumber dana dari APBN, Program Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah dengan Kegiatan Pembangunan Jaringan IPAL Sambungan Rumah sumber dana APBD maupun kegiatan dengan sumber dana DAK (APBN) yaitu Sarana dan Prasarana Sanitasi (DAK Penugasan), Sarana dan Prasarana Sanitasi (DAK Reguler).

4) SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian SPM Tahun 2018 adalah Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam / Sosial dengan Kegiatan Pembangunan / rehabilitasi Rumah Korban Kebakaran dan Bencana Alam.

Tahun 2019 dilaksanakan Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial dengan Kegiatan Pembangunan / rehabilitasi Rumah Korban Kebakaran dan Bencana Alam.

Tahun 2020 dilaksanakan Program Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana, dengan Kegiatan Penyediaan/rehabilitasi rumah layak huni yang terkena korban bencana.

5) SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

SPM Bidang Urusan Trantibunlinmas didukung melalui Program Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Satpol PP), Program Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Program Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (BPBD), Program Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran (Dinas Pemadam Kebakaran).

6) SPM Bidang Urusan Sosial

SPM Bidang Urusan Sosial didukung melalui Program Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Luar Panti, Program Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Luar Panti, Program Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Luar Panti, Program Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Luar Panti dan Program Perlindungan Sosial Pada Saat Tanggap Dan Pasca Bencana Bagi Korban Bencana.

Capaian Kinerja SPM Kota Makassar tahun 2018 s.d 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.257 | Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimum (SPM) Tahun 2018 – 2020 Kota Makassar

N o	Bidang Urusan / Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Capaian SPM			Keterangan
				2018	2019	2020	
I	Bidang Urusan Pendidikan						
1	Pendidikan Dasar	Persentase Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100	91,62	91,49	99,71	Tidak tercapai
2	Pendidikan Kesetaraan	Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	62,58	99,54	72,34	Tidak tercapai
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100	65,27	32,24	48,6	Tidak tercapai
II	Bidang Urusan Kesehatan						
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100	94,91	100	92,3	Tidak tercapai
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100	100	100	Tercapai
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100	94,69	100	97,5	Tidak tercapai
4	Pelayanan kesehatan balita	Persentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100	87,72	100	77,76	Tidak tercapai
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100	100	25,17	Tidak tercapai
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif,	Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100	10,88	92,92	35,99	Tidak tercapai
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100	77,23	100	61,48	Tidak tercapai
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100	99,95	100	85,28	Tidak tercapai
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Persentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100	97,95	100	61,39	Tidak tercapai

No	Bidang Urusan / Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Capaian SPM			Keterangan
				2018	2019	2020	
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100	100	100	70,07	Tidak tercapai
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Persentase Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100	100	100	Tercapai
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan	Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100	100	100	Tercapai
III	Bidang Urusan Pekerjaan Umum						
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100	75,65	65,41	65,71	Tidak tercapai
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100	99,43	99,52	87,69	Tidak tercapai
IV	Bidang Urusan Perumahan Rakyat						
1	Penyediaan & rehabiitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	100	100	100	Tercapai
2	Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	100	0	0	0	Tidak tercapai

No	Bidang Urusan / Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Capaian SPM			Keterangan
				2018	2019	2020	
V	Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100			82,8	Tidak tercapai
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Persentase Warga Negara yang Memperoleh layanan informasi rawan bencana	100			80	Tidak tercapai
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100			99,04	Tidak tercapai
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100			99,85	Tidak tercapai
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100			100	Tercapai
VI	Bidang Urusan Sosial						
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	100	100	100	Tercapai
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	100	100	100	Tercapai
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlanter diluar panti	Persentase Warga Negara lanjut usia terlanter yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	100	100	100	Tercapai
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Persentase Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100	100	100	100	Tercapai
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Persentase Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100	100	100	100	Tercapai

Secara umum Kota Makassar masih menghadapi tantangan yang cukup panjang dalam menghadapi pencapaian indikator TPB. Hal ini didasarkan atas capaian jumlah indikator yang telah mencapai target nasional. Berdasarkan hasil perhitungan dan pengolahan data menunjukkan bahwa indikator TPB di Kota Makassar yang telah dilaksanakan dan mencapai target nasional baru mencapai 48 indikator (37,6%), dari total 154 indikator yang menjadi kewenangan kota. Sebanyak 64 indikator (41,5%) indikator TPB yang menjadi kewenangan Kota Makassar sudah dilaksanakan dan belum mencapai target, 32 indikator (20,8%) belum dilaksanakan dan belum mencapai target.

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan komitmen global yang tertuang dalam dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development* dan di selaraskan dengan RPJMN melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. TPB/SDGs merupakan upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yang terdiri dari:

1. *No Poverty* – Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimana pun;
2. *Zero Hunger* – Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
3. *Good Health and Well-being* – Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua;
4. *Quality Education* – Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;
5. *Gender Equality* – Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan;
6. *Clean Water and Sanitation* – Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
7. *Affordable and Clean Energy* – Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
8. *Decent Work and Economic Growth* – Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
9. *Industry, Innovation and Infrastructure* – Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;
10. *Reduced Inequalities* – Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara;
11. *Sustainable Cities and Communities* – Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
12. *Responsible Consumption and Production* – Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
13. *Climate Action* – Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;

14. *Life Below Water* – Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan;
15. *Life on Land* – Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati;
16. *Peace, Justice and Strong Institutions* – Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan;
17. *Partnerships for the Goals* – Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Dalam pencapaian TPB secara global terdapat 241 indikator yang kemudian diterjemahkan dan disesuaikan dengan kondisi di Indonesia, hingga terdapat total 319 indikator yang menjadi tolok ukur ketercapaian TPB di Indonesia. Tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia mengembangkan indikator TPB sebanyak 319 indikator dari 94 target/sasaran global dan 17 goals. Dari 319 indikator TPB Indonesia 21 indikator bersifat khusus untuk daerah tertentu dan 298 indikator bersifat umum. Setiap wilayah administrasi memiliki tanggung jawab untuk melakukan analisis TPB dengan jumlah indikator yang berbeda sesuai dengan kewenangan dan kondisi wilayahnya.. Apabila ditelaah lebih lanjut berdasarkan pembagian kewenangannya antara pemerintah pusat dan daerah, pemerintah pusat memiliki kewenangan terhadap 303 indikator, pemerintah provinsi 235 indikator, pemerintah kabupaten 220 indikator, dan pemerintah kota 222 indikator. Berdasarkan pembagian kewenangan tersebut terdapat 222 indikator yang menjadi kewenangan Kota Makassar. Dari 222 indikator tersebut, kemudian dikaji lebih lanjut lagi untuk melihat relevansi indikator dengan wilayah Kota Makassar. Berdasarkan buku metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia yang dikeluarkan oleh Bappenas Tahun 2017 dari 222 indikator hanya 154 indikator yang relevan dengan kewenangan Kota Makassar.

Kategori capaian TPB Kota Makassar berdasarkan hasil analisis data terbagi atas 4 (empat) kategori yaitu:

- 1) Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS);
- 2) Indikator TPB yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target (indikator ini dibagi lagi dalam 3 indikator yakni:
 - a. masih sekitar 50% belum tercapai (SB1)
 - b. 50 – 75% belum tercapai (SB2)
 - c. 75% belum tercapai (SB3);
- 3) Indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target (Belum Terealisasi) (NA); dan
- 4) Indikator TPB yang tidak relevan dengan wilayah kajian.

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.258 | Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kota Makassar

No	Deskripsi Tujuan	Jumlah Indikator	Capaian Indikator				
			SS	SB1	SB2	SB3	NA
1	Tanpa Kemiskinan	20	6	10	1	2	1
2	Tanpa Kelaparan	2	2	-	-	-	-
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	15	6	6	-	-	3
4	Pendidikan Berkualitas	10	5	3	-	1	1
5	Kesetaraan Gender	9	3	5	-	-	1
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	14	4	4	4	1	1
7	Energi Bersih dan Terjangkau	1	1	-	-	-	
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	15	7	2	-	4	2
9	Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	5	3	-	-	1	1
10	Berkurangnya Kesenjangan	5	2	1	-	-	2
11	Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	18	7	3		2	6
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	5	1	-	-	1	3
13	Penanganan Perubahan Iklim	2	1	1	-	-	-
16	Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh	23	6	5	1	2	9
17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	10	4	2	-	2	2
Total		154	58	42	6	16	32

Secara umum Kota Makassar masih menghadapi tantangan yang cukup panjang dalam menghadapi pencapaian indikator TPB. Hal ini didasarkan atas capaian jumlah indikator yang telah mencapai target nasional. Berdasarkan hasil perhitungan dan pengolahan data menunjukkan bahwa indikator TPB di Kota Makassar yang telah dilaksanakan dan mencapai target nasional baru mencapai 48 indikator (37,6%), dari total 154 indikator yang menjadi kewenangan kota. Sebanyak 64 indikator (41,5%) indikator TPB yang menjadi kewenangan Kota Makassar sudah dilaksanakan dan belum mencapai target, 32 indikator (20,8%) belum dilaksanakan dan belum mencapai target.

Indikator TPB yang Terlaksana dan Mencapai Target

Dari keseluruhan indikator TPB Kota Makassar yang berjumlah 154 indikator, indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional berjumlah 58 indikator. Indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional terbanyak adalah indikator TPB-8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), yaitu 7 indikator dan indikator TPB-11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan), yaitu 7 indikator. Rincian tujuan, target dan indikator TPB yang dilaksanakan dan telah mencapai target dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang Terlaksana dan Mencapai Target di Kota Makassar

Tabel 2.259 | Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang Terlaksana dan Mencapai Target di Kota Makassar

No. TPB	Target	Pilar	No Indikator	Indikator TPB	Instansi Terkait	Target (Perpres 59/2017)	Capaian Realisasi				
							2015	2016	2017	2018	2019
1. Tanpa Kemiskinan	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	SOSIAL	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Dinas Sosial	Menurun menjadi 7-8%	4,38%	4,56%	4,58%	4,41%	4,28%
	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.		1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Dinas Ketenagakerjaan	Meningkat		230.168	273.664	343.693	
	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.		1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Meningkat menjadi 65%	69,29%	69,69%	69,46%	69,68%	68,18%
			1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkat menjadi 77,4%.			86,53%	86,53%	
			1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Dinas Pekerjaan Umum	Meningkat menjadi 100%		100%	100%		

No. TPB	Target	Pilar	No Indikator	Indikator TPB	Instansi Terkait	Target (Perpres 59/2017)	Capaian Realisasi				
							2015	2016	2017	2018	2019
	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.		1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	ada	100%	100%	100%	100%	100%
2. Tanpa Kelaparan	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.		2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Dinas Kesehatan	Menurun menjadi 17%	7,88%	7,64%	6,90%	6,78%	6,60%
	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.		2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Dinas Kesehatan	Meningkat menjadi 50%		70,40%	70,40%		
	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.		3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Dinas Kesehatan	Meningkat menjadi 95%	94,84%	95,11%	100%	100%	
			3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Dinas Kesehatan	Meningkat menjadi 85 %			94,54%	94,92%	

No. TPB	Target	Pilar	No Indikator	Indikator TPB	Instansi Terkait	Target (Perpres 59/2017)	Capaian Realisasi				
							2015	2016	2017	2018	2019
	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.		3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Dinas Kesehatan	Menurun	1,20%	1,03%	0,91%	1,00%	0,97%
	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.		3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Dinas Kesehatan	Menurun menjadi 24,3%			24,28%		
	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.		3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Menurun menjadi 9,91%	8,14%	7,52%	6,90%	7,12%	7,93%
			3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Dinas Kesehatan	Meningkat menjadi minimal 95%			71,15%	96,89%	98,52%
4. Pendidikan Berkualitas	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.		4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Dinas Pendidikan	Meningkat menjadi 8,8 tahun	10,11	10,25	11,7	11,82	11,84
	Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.		4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Dinas Komunikasi dan Informatika	Meningkat	28,27%		62,22%	72,64%	76,10%

No. TPB	Target	Pilar	No Indikator	Indikator TPB	Instansi Terkait	Target (Perpres 59/2017)	Capaian Realisasi				
							2015	2016	2017	2018	2019
	Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.		4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	Dinas Pendidikan	Meningkat			98,60%	99,60%	
	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.		4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun.	Dinas Pendidikan	Meningkat menjadi 96,1%	98,26%	97,58%	98,86%	98,53%	98,78%
			4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Dinas Pendidikan	Meningkat	100%	100%	100%	100%	100%
5. Kesenjangan Gender	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.		5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkat	8,00%	22,00%	50,00%	51,00%	51,00%
	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.		5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Meningkat	69,29%	69,69%	69,46%	68,70%	69,00%

No. TPB	Target	Pilar	No Indikator	Indikator TPB	Instansi Terkait	Target (Perpres 59/2017)	Capaian Realisasi				
							2015	2016	2017	2018	2019
	Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.		5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Meningkat			80,15%	84,31%	85,84%
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	LINGKUNGAN	6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Dinas Pekerjaan Umum	Meningkat			26	37	113
			6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Dinas Pekerjaan Umum	Meningkat		100%		100%	100%
	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.		6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Dinas Pekerjaan Umum	Meningkat	100%	100%	100%	100%	100%
	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.		6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	ada	3	3	3	3	3

No. TPB	Target	Pilar	No Indikator	Indikator TPB	Instansi Terkait	Target (Perpres 59/2017)	Capaian Realisasi				
							2015	2016	2017	2018	2019
7. Energi Bersih dan Terjangkau	Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.	EKONOMI	7.1.1*	Rasio elektrifikasi	Dinas Pekerjaan Umum	Meningkat menjadi 96,6%	100%		100%	100%	
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.		8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkat			2,1	2,11	
			8.1.1.(a)	PDB per kapita.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkat menjadi lebih dari Rp 50 juta		87,99jt	96,75jt	107jt	
	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	Dinas Ketenagakerjaan	Meningkat menjadi 51%			96,87%	99,61%	93,64%
			8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Meningkat menjadi 25%			98,79%	98,64%	94,06%
	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.		8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Dinas Ketenagakerjaan	Meningkat		11.600	13.000	14.000	15.100
	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.		8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Dinas Pariwisata	Meningkat	53.879	85.644	102.462	105.447	111.147

No. TPB	Target	Pilar	No Indikator	Indikator TPB	Instansi Terkait	Target (Perpres 59/2017)	Capaian Realisasi				
							2015	2016	2017	2018	2019
			8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Dinas Pariwisata	Meningkat	3.771.006	4.688.681	5.187.521	5.461.677	4.549.726
9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.		9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Meningkat		100%	100%	100%	
			9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Dinas Komunikasi dan Informatika	Meningkat			80,15%	84,31%	85,84%
			9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	Dinas Komunikasi dan Informatika	Meningkat			53,26%	58,72%	66,36%
10. Berkurangnya Kesenjangan	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.		10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Menurun menjadi 7-8%	4,38%	4,56%	4,58%	4,41%	4,28%
	Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.		10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Dinas Ketenagakerjaan	Meningkat +		230.168	273.664	343.693	
11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.	LINGKUNGAN	11.3.2.(a)	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkat	10	10	10	10	10
	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.		11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	ada	2	2	2	3	3

No. TPB	Target	Pilar	No Indikator	Indikator TPB	Instansi Terkait	Target (Perpres 59/2017)	Capaian Realisasi				
							2015	2016	2017	2018	2019
	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.		11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Dinas Lingkungan Hidup	Meningkat menjadi 80%			95,24%	92,00%	84,75%
			11.6.1.(b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.	Dinas Lingkungan Hidup	Meningkat/ ada	2	2	2	2	2
	Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.		11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	Dinas Lingkungan Hidup	Meningkat/ ada	1.278,40	1.325,30	142,00	1.398,90	1.328,90
	Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.		11.b.1*	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Meningkat/ ada	100%	100%	100%	100%	100%
			11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	ada	100%	100%	100%	100%	100%

No. TPB	Target	Pilar	No Indikator	Indikator TPB	Instansi Terkait	Target (Perpres 59/2017)	Capaian Realisasi				
							2015	2016	2017	2018	2019
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.		12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Dinas Lingkungan Hidup	Meningkat	5,48	5,48	5,48	3.346,87	3.346,87
13. Penanganan Perubahan Iklim	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.		13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	ada	100%	100%	100%	100%	100%
16. Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	HUKUM DAN TATA KELOLA	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/ Kota)	Inspektorat	Meningkat	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
			16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Bagian Organisasi dan Tata Laksana	Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga 75%, Provinsi: 60%, Kabupaten/ Kota: 45%				60,42%	62,86%

No. TPB	Target	Pilar	No Indikator	Indikator TPB	Instansi Terkait	Target (Perpres 59/2017)	Capaian Realisasi				
							2015	2016	2017	2018	2019
			16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Bagian Organisasi dan Tata Laksana	Meningkat menjadi: Kementerian: 100%, Lembaga: 100%, Provinsi: 100%, Kabupaten/ Kota: 80%	74,00%	65,12%	67,85%	89,97%	83,75%
	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.		16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Meningkat	8,00%	22,00%	50,00%	51,00%	51,00%
	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.		16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkat menjadi 77,4%	0,37%	76,95%	93,90%	94,02%	94,95%
			16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkat menjadi 85%			93,75%	93,75%	94,80%
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.	EKONOMI	17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Dinas Komunikasi dan Informatika	Meningkat menjadi: Perkotaan 100% populasi; Perdesaan 52% populasi.		100%	100%	100%	

No. TPB	Target	Pilar	No Indikator	Indikator TPB	Instansi Terkait	Target (Perpres 59/2017)	Capaian Realisasi				
							2015	2016	2017	2018	2019
	Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.		17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Meningkat			53,26%	58,72%	66,36%
	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.		17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	Badan Pusat Statistik	Meningkat				93,75%	97,08%
	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.		17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	BADAN PUSAT STATISTIK	ada	100%	100%	100%	100%	100%

Indikator TPB yang Terlaksana dan Belum Mencapai Target

Dari keseluruhan indikator TPB untuk Kota Makassar yang berjumlah 154 indikator, indikator yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional berjumlah 64 indikator (SB). Indikator SB ini kemudian dibagi ke dalam tiga capaian yakni SB1, SB2 dan SB3.

SB1 adalah indikator adalah indikator yang lebih dari seperempat jalan menuju target SDGs, dimana setidaknya 75% capaian mengarah kepada target SDGs.

SB2 adalah indikator adalah indikator yang kurang dari seperempat jalan menuju target SDGs, dimana indikator mengarah kepada target SDGs dan mencapai setidaknya 50%-75%.

SB3 adalah indikator adalah indikator yang masih cukup jauh mencapai target SDGs, dimana masih kurang dari 50% dari target SDGs.

Indikator SB1 di Kota Makassar sudah mencapai 42 indikator, SB2 sebanyak 6 indikator dan SB3 sebanyak 16 indikator. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional ini menjadi salah satu prioritas utama dalam menentukan skenario dalam pencapaian target nasional dalam kurun waktu perencanaan RPJMD lima tahun ke depan khususnya dalam meningkatkan pencapaian pada indikator yang tergolong SB2 dan SB3.

Tabel 2.260 | Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang Terlaksana dan Belum Mencapai Target di Kota Makassar

No. TPB	Target	Pilar	No Indikator	Indikator TPB	Instansi Terkait	Target (Perpres 59/2017)	Capaian Realisasi					Status
							2015	2016	2017	2018	2019	
1. Tanpa Kemiskinan	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	SOSIAL	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Dinas Kesehatan	Meningkat menjadi 95%	23,24%			76,20%	72,97%	SB1
			1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Dinas Sosial	Menurun menjadi 2,8 juta				4,96%	4,84%	SB1
	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.		1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Dinas Kesehatan	Meningkat menjadi 70%			94,80%	90,40%		SB1
	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.		1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Dinas Pekerjaan Umum	Meningkat menjadi 100%		98,00%	98,74%	99,49%		SB1

No. TPB	Target	Pilar	No Indikator	Indikator TPB	Instansi Terkait	Target (Perpres 59/2017)	Capaian Realisasi					Status
							2015	2016	2017	2018	2019	
	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.		1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	Dinas Pendidikan	Meningkat menjadi 94,78%	100%	105%	99,94%	99,63%	97,63%	SB1
	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.		1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	Dinas Pendidikan	Meningkat menjadi 82,2%	100%	81,10%	99,36%	86,13%	80,10%	SB1
	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.		1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Menurun					16.676 jiwa	SB1
			1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Menurun menjadi 118,6	144,4	144,4	131,78	131,78		SB1

No. TPB	Target	Pilar	No Indikator	Indikator TPB	Instansi Terkait	Target (Perpres 59/2017)	Capaian Realisasi					Status
							2015	2016	2017	2018	2019	
			1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Menurun	Rp. 3,61 M	Rp. 35 Jt		Rp. 3,36 M	Rp. 3,44 M	SB1
	Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.		1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Meningkat			98,36%	98,36%	96,09%	SB1
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	SOSIAL	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Dinas Kesehatan	Menurun	87 kejadian	196 kejadian	249 kejadian			SB1
	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.		3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤ 18 tahun.	Dinas Kesehatan	Menurun menjadi 5,4%		6,40%	5,90%			SB1
			3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun.	Dinas Kesehatan	Menurun	15,40%	15,40%	15,40%			SB1
	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.		3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Dinas Kesehatan	Meningkat	23,24%			76,20%	72,97%	SB1

No. TPB	Target	Pilar	No Indikator	Indikator TPB	Instansi Terkait	Target (Perpres 59/2017)	Capaian Realisasi					Status
							2015	2016	2017	2018	2019	
	Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.		3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Dinas Kesehatan	Menurun			22,40%		23,43%	SB1
	Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.		3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Dinas Kesehatan	Meningkat	1,12	1,55	1,09	1,16		SB1
4. Pendidikan Berkualitas	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	SOSIAL	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Dinas Kesehatan	Meningkat menjadi 114,09%				98,92	103,67	SB1
			4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Dinas Kesehatan	Meningkat menjadi 106,94%				92,25	91,93	SB1
	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.		4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Dinas Kesehatan	Meningkat menjadi 77,2%		61,48%	65,53%			SB1
5. Kesenjangan Gender	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	SOSIAL	5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Menurun menjadi kurang dari 20,48%	212	271	440	479	725	SB1

No. TPB	Target	Pilar	No Indikator	Indikator TPB	Instansi Terkait	Target (Perpres 59/2017)	Capaian Realisasi					Status
							2015	2016	2017	2018	2019	
			5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Menurun					117	SB1
			5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkat menjadi 70%	10,25	11,75	14,06	13	0,537	SB1
	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.		5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Menurun		79,00%	107,00%			SB1
	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.		5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkat		16,00%	16,00%	14,00%		SB1
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	LINGKUNGAN	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Dinas Pekerjaan Umum	Meningkat menjadi 118,6 m3/detik			94.359.166 m3	90.770.340 m3		SB1

No. TPB	Target	Pilar	No Indikator	Indikator TPB	Instansi Terkait	Target (Perpres 59/2017)	Capaian Realisasi					Status
							2015	2016	2017	2018	2019	
	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.		6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Dinas Pekerjaan Umum	Meningkat menjadi 100%		98,00%	98,74%	99,49%		SB1
	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.		6.3.2.(a)	Kualitas air danau.	Dinas Lingkungan Hidup	Meningkat	Kelas III	Kelas III	Kelas III	Kelas III	Kelas III	SB1
	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.		6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Dinas Lingkungan Hidup	Meningkat	Kelas III	Kelas III	Kelas III	Kelas III	Kelas III	SB1
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	EKONOMI	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Dinas Ketenagakerjaan	Menurun	12,02%		10,59%	12,19%		SB1

No. TPB	Target	Pilar	No Indikator	Indikator TPB	Instansi Terkait	Target (Perpres 59/2017)	Capaian Realisasi					Status
							2015	2016	2017	2018	2019	
	Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.		8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Dinas Ketenagakerjaan	Meningkat			98,88%	98,42%	97,03%	SB1
10. Berkurangnya Kesenjangan	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	EKONOMI	10.1.1*	Koefisien Gini.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Menurun menjadi 0,36	39,45%	39,69%	39,61%	38,30%		SB1
11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	LINGKUNGAN	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Menurun					16.676 jiwa	SB1
	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.		11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Menurun menjadi 30%	144,4	144,4	131,78	131,78		SB1
	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.		11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Menurun	Rp. 3,61 M	Rp. 35 Jt		Rp. 3,36 M	Rp. 3,44 M	SB1

No. TPB	Target	Pilar	No Indikator	Indikator TPB	Instansi Terkait	Target (Perpres 59/2017)	Capaian Realisasi					Status
							2015	2016	2017	2018	2019	
	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.		11.6.1.(b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.	Dinas Lingkungan Hidup	Meningkat/ ada	2 kota	2 kota	2 kota	2 kota	2 kota	SB1
	Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.		11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	Dinas Lingkungan Hidup	meningkat/ ada	7,31%	7,58%	8,00%	8,01%	7,59%	SB1
13. Penanganan Perubahan Iklim	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	LINGKUNGAN	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Menurun					16.676 jiwa	SB1
16. Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	HUKUM DAN TATA KELOLA	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Menurun		24 kasus	13 kasus	29 kasus		SB1
			16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Menurun	212	271	440	479	725	SB1
	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.		16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Menurun	212	271	440	479	725	SB1
	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.		16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkat		16,00%	16,00%	14,00%		SB1

No. TPB	Target	Pilar	No Indikator	Indikator TPB	Instansi Terkait	Target (Perpres 59/2017)	Capaian Realisasi					Status
							2015	2016	2017	2018	2019	
	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.		16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkat		86,14%	86,29%	88,65%		SB1
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.	EKONOMI	17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Bagian Perekonomian dan Kerja Sama	ada	43	50	47	29		SB1
	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.		17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	Badan Pusat Statistik	Meningkat				98,18%	98,12%	SB1
1. Tanpa Kemiskinan	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	SOSIAL	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Dinas Pekerjaan Umum	Meningkat menjadi 100%			37,50%	27,02%	62,50%	SB2
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	LINGKUNGAN	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Dinas Pekerjaan Umum	Meningkat menjadi 100%			37,50%	27,02%	62,50%	SB2

No. TPB	Target	Pilar	No Indikator	Indikator TPB	Instansi Terkait	Target (Perpres 59/2017)	Capaian Realisasi					Status
							2015	2016	2017	2018	2019	
	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	LINGKUNGAN	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Dinas Pekerjaan Umum	Meningkat menjadi 100%					62,50%	SB2
	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	LINGKUNGAN	6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Dinas Pekerjaan Umum	Meningkat		98,00%	80,00%	78,00%	67,00%	SB2
	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	LINGKUNGAN	6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	Dinas Pekerjaan Umum	Meningkat		98,00%	80,00%	78,00%	67,00%	SB2
16.Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	HUKUM DAN TATA KELOLA	16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Menjadi menjadi 80%	0,048	15,38%	15,69%	27,45%	52,90%	SB2

No. TPB	Target	Pilar	No Indikator	Indikator TPB	Instansi Terkait	Target (Perpres 59/2017)	Capaian Realisasi					Status
							2015	2016	2017	2018	2019	
1. Tanpa Kemiskinan	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	SOSIAL	1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	Dinas Sosial	Meningkat menjadi 18,6 juta		2,25%	0,02%	1,75%		SB3
	Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.	SOSIAL	1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkat					26,99%	SB3
4. Pendidikan Berkualitas	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.	SOSIAL	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Dinas Pendidikan	Meningkat	0,6	0,64	0,81	0,61	0,42	SB3
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	LINGKUNGAN	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Dinas Pekerjaan Umum	Meningkat menjadi 45.000 (skala nasional)		13 kelurahan		15 kelurahan	4 kelurahan	SB3

No. TPB	Target	Pilar	No Indikator	Indikator TPB	Instansi Terkait	Target (Perpres 59/2017)	Capaian Realisasi					Status
							2015	2016	2017	2018	2019	
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.	EKONOMI	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkat			11,74%	11,69%		SB3
	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	EKONOMI	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Dinas Ketenagakerjaan	Meningkat			0,00%	31,87%	0	SB3
	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	EKONOMI	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Dinas Ketenagakerjaan	Meningkat				3,06%		SB3
	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	EKONOMI	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Dinas Pariwisata	Meningkat menjadi 8%	2,34%	2,26%	2,24%	2,31%		SB3

No. TPB	Target	Pilar	No Indikator	Indikator TPB	Instansi Terkait	Target (Perpres 59/2017)	Capaian Realisasi					Status
							2015	2016	2017	2018	2019	
9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	EKONOMI	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Dinas Perindustrian	Lebih tinggi dari pertumbuhan PDB		20,62%	19,95%	18,34%		SB3
11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	LINGKUNGAN	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	3,7 juta rumah tangga	100 rumah tangga	160 rumah tangga	273 rumah tangga	0	211 rumah tangga	SB3
	Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.	LINGKUNGAN	11.2.1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	Dinas Perhubungan	Meningkat menjadi 32%	2,23%	2,36%	3,06%	3,96%	3,38%	SB3
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	LINGKUNGAN	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Dinas Lingkungan Hidup	20 ton per hari (skala nasional)	0,64 ton	2,35 ton	3,42 ton	0		SB3
16. Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	HUKUM DAN TATA KELOLA	16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Bagian Hukum	Meningkat	12,99%	89,90%	18,50%	28,51%	19,19%	SB3

No. TPB	Target	Pilar	No Indikator	Indikator TPB	Instansi Terkait	Target (Perpres 59/2017)	Capaian Realisasi					Status
							2015	2016	2017	2018	2019	
	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	HUKUM DAN TATA KELOLA	16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Inspektorat	Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/ Kota: 50%					11,70%	SB3
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	EKONOMI	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Badan Pendapatan Daerah	Meningkat			2,40%	2,10%		SB3
	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	EKONOMI	17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	Badan Pusat Statistik	Meningkat	9602 pengunjung	29225 pengunjung	32436 pengunjung	23844 pengunjung	5304 pengunjung	SB3

Indikator TPB yang Belum Terealisasi

Dari keseluruhan indikator TPB untuk Kota Makassar yang berjumlah 154 indikator, indikator yang belum terealisasi sehingga belum memiliki data (NA) berjumlah 32 indikator. Paling banyak adalah indikator TPB-16 sebanyak 9 indikator dan indikator TPB-11 sebanyak 6 indikator. Indikator TPB yang belum terealisasi ini perlu juga menjadi prioritas dalam menentukan skenario dalam pencapaian target nasional dalam kurun waktu perencanaan RPJMD lima tahun ke depan. Rincian tujuan, target dan indikator TPB yang belum terealisasi dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.261 | Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang Belum Terealisasi di Kota Makassar

No. TPB	Target	Pilar	No Indikator	Indikator TPB	Instansi Terkait	Target (Perpres 59/2017)
1. Tanpa Kemiskinan	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	SOSIAL	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Meningkat menjadi 39 daerah
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.		3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	DINAS KESEHATAN	Menurun menjadi angka 0,02%
			3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	DINAS KESEHATAN	Menurun
	Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait kekeleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.		3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	DINAS KESEHATAN	Meningkat
4. Pendidikan Berkualitas	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.		4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	DINAS PENDIDIKAN	Meningkat

No. TPB	Target	Pilar	No Indikator	Indikator TPB	Instansi Terkait	Target (Perpres 59/2017)
5. Kesenjangan Gender	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.		5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	bertambah sebanyak 16
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	LINGKUNGAN	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	DINAS PEKERJAAN UMUM	Meningkat
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	EKONOMI	8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	DINAS KETENAGAKERJAAN	Menurun
	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.		8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	BADAN PERENCANA PEMBANGUNAN DAERAH	Menurun (mendekat)
9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.		9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	DINAS PERINDUSTRIAN	Meningkat
10. Berkurangnya Kesenjangan	Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.		10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	BAGIAN HUKUM DAN HAM	Menurun
	Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.		10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	BAGIAN HUKUM DAN HAM	ada

No. TPB	Target	Pilar	No Indikator	Indikator TPB	Instansi Terkait	Target (Perpres 59/2017)
11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	LINGKUNGAN	11.1.1.(b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	12 kawasan perkotaan metropolitan (skala nasional)
			11.1.1.(c)	Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Paling sedikit 20 kota sedang dan 10 kota baru (skala nasional)
	Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.		11.2.1.(b)	Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar.	DINAS PERHUBUNGAN	ada
	Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.		11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJA SAMA	Ada
	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.		11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Meningkat
	Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.		11.7.2 (a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Meningkat

No. TPB	Target	Pilar	No Indikator	Indikator TPB	Instansi Terkait	Target (Perpres 59/2017)
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.		12.4.1 (a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking Biru.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Meningkat
	Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.		12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	DINAS PERDAGANGAN	Meningkat
	Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.		12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Meningkat
16. Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	HUKUM DAN TATA KELOLA	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Menurun
	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyalahgunaan terhadap anak.		16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Menurun
			16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Menurun

No. TPB	Target	Pilar	No Indikator	Indikator TPB	Instansi Terkait	Target (Perpres 59/2017)
	Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.		16.3.1 (a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Meningkat
			16.3.1 (b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Litigasi 3.021 orang, non-litigasi 3.654 orang
	Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.		16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	BADAN PERENCANA PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkat menjadi 4,0
	Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.		16.10.2 (b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	BAGIAN HUKUM DAN HAM	ada
			16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Meningkat
	Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.		16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	BAGIAN HUKUM DAN HAM	ada

No. TPB	Target	Pilar	No Indikator	Indikator TPB	Instansi Terkait	Target (Perpres 59/2017)
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.	EKONOMI	17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Meningkat menjadi: Perkotaan (20 Mbps) 71% rumah tangga dan 30% populasi; Perdesaan (10 Mbps) 49% rumah tangga dan 6% populasi
	Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.		17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJA SAMA	ada

Tabel 2.262 | Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

No	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN KINERJA PER TAHUN					Standar	Keterangan: Belum Tercapai (<); Tercapai (=); Melampaui (>)	
		2016	2017	2018	2019	2020			
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)	128.05	142.45	160.21	178.43	122.47	178.33	178.33	=
	Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan(Juta Rupiah)	95.96	103.83	112.56			120.91	120.91	
2	Laju Inflasi (%)	3,18	4,48	3,48	2,43		2,13	4	>
3	PDRB Per Kapita	87.99	96,75	106,91	116,87		115,94	117,7	<
4	Pertumbuhan Ekonomi	8,03	8,23	8,42	8,79		-1,27	8,25	<
5	Indeks Gini	0,397	0,396	0,383	0,39		0,4	0,4	=
6	Presentase penduduk diatas garis kemiskinan	95,44	95,41	95,59	95,72		95,46	97,1	<
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	80,53	81,13	81,73	82,25		82,25	82,25	=
8	Angka Melek Huruf	97,58	97,91	97,67	97,75		98,43	98,44	>
9	Angka rata-rata lama sekolah	11,07	11,08	11,09	11,2		11,21	11,24	<
10	Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per hari.	4,54	4,59	4.41	4.28		3	3	=
11	Angka usia harapan hidup	71,49	71,51	71,7	72		72,09	72	>
12	Persentase balita gizi buruk	2,06	2,03	1,97	1,91		1,6	1,52	<
13	Prevalensi balita gizi kurang	7,64	6,9	6,78	6,67		6,44	6,44	=
14	Cakupan Desa Siaga Aktif	100	100	100	100		100	100	=
15	Angka partisipasi angkatan kerja	-	55,23	59,49	57,77		57	57	=
16	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	58,11	58,13	60,86	60,92		61,89	59,2	<
17	Tingkat pengangguran terbuka	12.02	10,59	12,19	10,39		15.91	10,02	<
18	Rasio penduduk yang bekerja	87,98	89,41	87,81	89,61		84.08	84.08	=
19	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja	18,39	18,93	19,1	20,67		20,66	20,66	=
20	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	87,98	89,41	87,81	89,61		84,08	84,08	=

No	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN KINERJA PER TAHUN					Standar	Keterangan: Belum Tercapai (<); Tercapai (=); Melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
21	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	31,14	31,87	34,97	32,18	32,54	32,54	=
22	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	40,33	32,44	31,76	31,86	31,86	31,86	=
23	Indeks Kepuasan Masyarakat	74,71	75,58	77,47	77,74	77,66	77,66	=
24	Persentase PAD terhadap pendapatan	27,4	39,15	34,57	35,53	33,21	33,21	=
25	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP	<
26	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	80	82	85	88	78,8	78,8	=
28	Penguatan cadangan pangan (%)	-	5	5	5	5	5	=
29	Penanganan daerah rawan pangan	-	-	26,38%	58%	60,10%	60,10%	=
30	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	0,088	0,104	0,094	0,088	0,068	0,068	=
31	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	11,93	9,79	9,89	0,31	9,89	9,89	=
32	Produksi sektor pertanian	21.942,30	31.643	36.216,85	12.655	36.216,85	36.216,85	=
35	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	96,56	97,97	99,09	99,37	99,09	99,09	=
38	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	2,26	2,24	2,31	2,23	1,01	1,01	=
40	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	18,9	19,49	19,97	20,53	19,67	19,67	=
41	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	20.38	20.03	18.53	18.56	18	18	=

No	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN KINERJA PER TAHUN					Standar	Keterangan : Belum Tercapai (<); Tercapai (=); Melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
ASPEK PELAYANAN UMUM								
A.	Layanan Urusan Wajib Dasar							
1	Pendidikan							
1.1	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	61,48	65,53	71,02	63,94	50,27	50,27	=
1.2.1	Angka pendidikan yang ditamatkan SD/MI/Paket A	15,25	14,07	13,84	11,61	11,61	11,61	=
1.2.2	Angka pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs/Paket B	17,38	17,6	19,48	20,91	20,91	20,91	=
1.3	APK							
1.3.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	107,38	112,67	108,44	105,16	103,54	112,18	>
1.3.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	100,77	101,14	100,34	95,44	93,77	105,06	<
1.4	APM							
1.4.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	99,76	99,94	99,63	97,63	96,79	96,79	=
1.4.3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	99,02	99,36	86,13	80,1	80,27	100	<
1.5	APS							
1.5.1	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	110,06	110,36	107,78	105,12	97,84	99,61	<
1.5.2	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	99,89	102,08	102	94,11	93,35	96,67	<
1.6	Angka Putus Sekolah							
1.6.1	Angka Putus Sekolah SD/MI	0,001	0,03	0,09	0,6	0,43	0	<
1.6.2	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,001	0,04	0,55	1,85	1,23	0	<
1.7	AL							
1.7.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	100	100	100	100	100	=
1.7.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99,97	97,27	99,9	98,79	100	100	=

No	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN KINERJA PER TAHUN					Standar	Keterangan : Belum Tercapai (<); Tercapai (=); Melampaui
		2016	2017	2018	2019	2020		
1.8	AM							
1.8.1	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	92,34	99,97	100.55	97.15	97.86	100	<
1.8.2	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	95,19	97,99	100,97	105.1	103.69	103.69	=
1.9	Fasilitas Pendidikan							
1.9.1	Persentase Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	67,54	81,69	84,71	90,11	93,01	94,36	<
1.9.2	Persentase Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	77,03	78,2	80,69	90,04	93,12	98,24	<
1.10	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	31,36	38,86	37.96	36.2	36.31	48,77	<
1.12	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	417,77	484	513.57	525.18	539.24	539.24	=
1.16	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	110,43	107,22	110.06	110.63	107.84	107.84	=
1.17	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun perempuan dan laki-laki	100	100	100	100	107.84	107.84	=
1.18	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	98,86	98,53	98,78	97,75	98,43	98,43	=
1.19	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	92,95	94,73	93,3	96,13	95,59	96,67	<
2	Kesehatan							
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	2,58	1,58	1,74	1,63	1,58	1,58	=
2.2	Angka kelangsungan hidup bayi	997,42	998,42	98,26	998,37	998,37	997	<
2.3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	3,4	2,08	1,85	1,63	1,58	1,58	=
2.4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	1,44	1,27	1,54	1,63	1,21	1,21	=
2.5	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	23,42	19,21	19,29	37,12	44,13	44,13	=

No	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN KINERJA PER TAHUN					Standar	Keterangan : Belum Tercapai (<); Tercapai (=); Melampaui
		2016	2017	2018	2019	2020		
2.6	Rasio posyandu per satuan balita	6,57	6,54	7,36	7,23	7,19	7,19	=
2.7	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0,134	0,183	0,175	0,173	0,226	0,226	=
2.8	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,032	0,033	0,034	0,033	0,032	0,032	=
2.9	Rasio dokter per satuan penduduk	0,37	0,35	0,34	0,39	0,44	0,39	>
2.10	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	1,55	1,09	1,16	1,37	1,31	1,31	=
2.11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	97,36	97,39	97,53	94,16	97,92	99,5	>
2.12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	95,11	100	100	109,73	92,14	99	<
2.13	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100	100	100	100	100	100	=
2.14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100	100	=
2.16	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	99,18	-	101,9	102,43	98,33	98,33	=
2.17	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	0,003	0,0041	0,0026	0,0026	0,001	0,001	=
2.18	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	9,12	6,02	6,75	10,11	6,69	6,69	=
2.19	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	51,73	46,66	44,47	44,62	25,73	80,6	>
2.2	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	0,3	0,33	0,36	0,35	0,21	0,21	=
2.2	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	3,9	1	5,1	3,98	0,01	0,01	=
2.22	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	78,97%	-	79,47%	100%	100%	100%	=
2.23	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	75,59	67,94	67,27	51,92	30,5	100	<
2.24	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100	100	100	=

No	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN KINERJA PER TAHUN					Standar	Keterangan : Belum Tercapai (<); Tercapai (=); Melampaui
		2016	2017	2018	2019	2020		
2.25	Penderita diare yang ditangani	100	100	100	100	100	100	=
2.26	Angka kejadian Malaria	13,33	16,72	12,76	10,28	7,46	7,46	=
2.30	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	0.05	0.07	0,05	0,057	0,044	0,044	=
2.33	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	304,05	422,9	100	126,93	50,09	50,09	=
2.34	Cakupan kunjungan bayi	96,53	96,56	97,9	126,93	88,3	88,3	=
2.35	Cakupan puskesmas	328,58	306,66	313,33	313,33	313,33	313,33	=
2.36	Cakupan pembantu puskesmas	26,58	23,53	20,91	20,91	21,57	21,57	=
2.37	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	95,88	95,11	94,91	92,71	92,29	92,29	=
2.38	Cakupan pelayanan nifas	91,11	90,42	96,02	83,14	85,24	85,24	=
2.39	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	84,53	77,29	81,1	91,18	83,23	83,23	=
2.40	Cakupan pelayanan anak balita	88,8	90,3	87,72	90,42	77,02	77,02	=
2.41	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	100	100	100	100	100	100	=
2.42	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	96,35	27,68	100	99,37	96,31	96,31	=
2.43	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	61,55	86,41	100	126,93	50,09	50,09	=
2.44	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	100	100	100	100	100	100	=
2.45	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100	100	100	100	100	100	=

No	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN KINERJA PER TAHUN					Standar	Keterangan : Belum Tercapai (<); Tercapai (=); Melampaui
		2016	2017	2018	2019	2020		
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
3.1	Pekerjaan Umum							
3.1.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	95,07	95,2	96,85	97,3	97,46	97,46	=
3.1.2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	1 : 1041	1 : 1041	1 : 1042	1 : 929	1 : 932	1 : 932	=
3.1.4	Persentase jalan kota dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) (%)	69	77,87	79,74	88,05	89,01	89,01	=
3.1.5	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) (%)	40,23	40,23	40	40,23	40,28	40,28	=
3.1.7	Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)	98	98,74	99,49	99,61	87,72	87,72	=
3.1.8	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (%)	8,66	8,66	8,66	6,5	6,5	6,5	=
3.1.9	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)	61,37	71,61	72,01	80,6	81,33	81,33	=
3.1.10	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun (%)	59	59	55	73,04	12,24	12,24	=
3.1.11	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor (%)	-	10,14	5,07	5,67	0	0	=
3.1.14	Persentase penduduk berakses air minum (%)	73,83	73,85	75,78	65,41	72,35	72,35	=
3.1.15	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan	73,83	73,85	75,78	65,41	72,35	72,35	=
3.1.16	Persentase areal kawasan kumuh (%)	3,7	2,98	2,67	2,21	2,43	2,43	=
3.1.17	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan (%)	94,81	95,24	86,44	75,08	-	-	-
3.1.18	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	9,03	9,08	10,34	109,9	123,73	123,73	=

No	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN KINERJA PER TAHUN					Standar	Keterangan : Belum Tercapai (<); Tercapai (=); Melampaui
		2016	2017	2018	2019	2020		
3.1.19	Total Rumah Ibadah	1491	1531	1539	1539	1547	1547	=
3.1.20	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	0,9	0,92	0,93	1,03	1.01	1.01	=
3.2	Penataan Ruang							
3.2.2	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan (%)	6,21	-	6,61	6,43	6,648	6,648	=
3.2.3	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	0,013	0,017	0,013	0,017	0,019	0,019	=
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							
4.1	Rasio rumah layak huni	1 : 6,81	1 : 6,62	1 : 6,60	1 : 5,927	1 : 5,75	1 : 5,75	=
4.3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	97,75	97,98	99,7	98,95	99,74	99,74	=
4.4	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	97,75	97,98	99,7	99,7	99,74	99,74	=
4.6	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	3,85	3,85	3,85	2,17	2,17	2,17	=
4.7	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	9,43	9,43	9,43	70	70	70	=
4.8	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	2,25	0,02	1,75	0,01	1,05	1,05	=
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							
5.1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	21,15	19,77	20,98	20,98	20,98	20,98	=
5.2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	14	18	28,52	19,19	82,79	82,79	=
5.3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota (%)	0,0042	0,0032	0,0032	0,0036	32,5	32,5	=
5.4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (%)	94,08	91,39	98,55	98,36	100	82	>
5.5	Persentase Penegakan PERDA	65	68	89	83,75	82,8	82,8	=

No	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN KINERJA PER TAHUN					Standar	Keterangan : Belum Tercapai (<); Tercapai (=); Melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
6	Sosial							
6.1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	100	100	100	100	100	100	=
6.2	Persentase PMKS yang tertangani	100	100	100	100	100	100	=
6.3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	100	100	100	100	100	100	=
6.5	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	100	100	100	100	100	100	=
6.6	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	100	100	100	100	100	100	=
6.7	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	100	100	100	100	100	=
6.8	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	34,27	20,58	100	100	100	100	=
6.9	Persentase Penyandang Disabilitas Dan Orang Dengan Gangguan Jiwa Serta Lansia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial	100	100	100	100	100	100	=
B	Layanan Urusan Wajib Non Dasar							
1	Tenaga Kerja							
1.1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	2,42	2,37	3,8	3,72	6,81	140	>
1.2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	89,04	74,34	95,24	70,22	58,28	58,28	=
1.3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	86,59	48,94	84,09	84,18	50,33	100	<

No	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN KINERJA PER TAHUN					Standar	Keterangan : Belum Tercapai (<); Tercapai (=); Melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
1.5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	43,13%	40,91	58,33	52,62%	25%	25%	=
1.6	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	0	0	0	0	0	0	=
1.9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	60,19	66,63	65,78%	66,85	30,43	30,43	=
1.10	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	59,62	61,82	62,21	64,56	43,64	43,64	=
1.11	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	60,61	67,97	68,22	70,53	25,21	25,21	=
1.12	Rasio lulusan S1/S2/S3	-	12,23	14,42	14,27	13,63	-	-
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
2.1	Persentase partisipasi ASN perempuan di lembaga pemerintah Kota Makassar	63,5	64,65	65,09	62,85	62,85	65	<
2.2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	16	16	14	24	24	24	=
2.4	Rasio KDRT	3,28	2,87	2,59	3,95	4,32	1	<
2.7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100	100	100	100	100	100	=
2.8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana PPT/PKT di Rumah Sakit	100	100	100	100	100	100	=
2.9	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	18,35	11,8	24,77	27,03	12,46	12,46	=

No	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN KINERJA PER TAHUN					Standar	Keterangan : Belum Tercapai (<); Tercapai (=); Melampaui
		2016	2017	2018	2019	2020		
2.10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	72,78	89,47	107,14	100	-	-	-
2.11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	72,78	89,47	49,06	49,9	69,9	69,9	=
2.12	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100	100	100	100	100	100	=
2.13	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100	100	133,33	100	100	100	=
3	Pangan							
3.1	Ketersediaan pangan utama	6,6	11,32	8,06	17,33	7,08	7,08	=
3.2	Ketersediaan energi dan protein perkapita	51.32	56.26	1,903,01	35,93	7,64	7,64	=
3.3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	92,86	92,86	95,19	98,89	98,89	98,89	=
4	Pertanahan							
4.1	Persentase luas lahan bersertifikat	-	23,36	8,459	16,23	0	0	=
4.2	Penyelesaian kasus tanah Negara	-	100	100	100	100	100	=
4.3	Penyelesaian izin lokasi	-	33,33	100	0	0	0	=
5	Lingkungan Hidup							
5.1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ada	<
5.2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ada	<
5.3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
5.4	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
5.5	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	Tidak	Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	=
5.6	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	Tidak	Tidak	Tidak	Ada	-	-	-

No	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN KINERJA PER TAHUN					Standar	Keterangan : Belum Tercapai (<); Tercapai (=); Melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
5.7	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	9,16	30,37	37,47	48,9	26,67	26,67	=
5.8	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
5.9	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	=
5.10	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	=
5.11	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	=
5.12	Penetapan hak MHA	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	=
5.13	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	=
5.14	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	=
5.15	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	=
5.16	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
5.17	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	100	100	100	100	-	-	-
5.18	Timbulan sampah yang ditangani	94,81	95,24	92,02	79,99	67,36	67,36	=
5.19	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	-	-	0.26	0,22	0,15	0,15	=

No	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN KINERJA PER TAHUN					Standar	Keterangan : Belum Tercapai (<); Tercapai (=); Melampaui
		2016	2017	2018	2019	2020		
5.20	Persentase cakupan area pelayanan	100	100	100	100	100	100	=
5.21	Persentase jumlah sampah yang tertangani	94,81	95,24	92,02	79,99	67,36	67,36	=
5.22	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	72,69	68,53	73,19	-	-	73,19	<
5.23	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	93,2	53,01	44,7	64,28	95,5	95,5	=
5.24	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	93,2	53,01	44,7	64,28	95,5	95,5	=
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
6.1	Rasio penduduk ber- KTP per satuan penduduk	106	170	131	151	155	155	=
6.2	Rasio bayi berakte kelahiran	86,14	86,29	88,65	98,53	98,85	98,85	=
6.3	Rasio pasangan berakte nikah	8,19	6,21	8,24	22	30,04	30,04	=
6.4	Ketersediaan database kependudukan	ada	ada	ada	ada	ada	ada	=
6.5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	=
6.6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	68,76	98,93	78,38	94	93	93	=
6.7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	93,72	87,27	88,65	98,652	98,85	98,85	=
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
7.1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	100	93,46	95,42	96,73	95,42	95,42	=
7.2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	100	100	100	100	100	60	=
7.3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	1	1	1,905	6,98	43,71	43,71	=
7.4	Persentase LSM aktif	100	100	100	100	100	100	=
7.5	Persentase LPM Berprestasi	2,98	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	=
7.6	Persentase PKK aktif	100	100	100	100	100	100	=
7.7	Persentase Posyandu aktif	100	100	100	100	-	-	-

No	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN KINERJA PER TAHUN					Standar	Keterangan : Belum Tercapai (<); Tercapai (=); Melampaui
		2016	2017	2018	2019	2020		
7.8	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	100	100	100	100	100	100	=
7.9	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	100	100	100	77	100	100	=
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
8.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	1,39	1,32	1,29	1,29	1,23	1,23	=
8.2	Total Fertility Rate (TFR)	2,002	2,002	2,002	1,99	2,11	2,11	=
8.3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	15,38	43,13	50,98	52,94	52,94	52,94	=
8.4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	-	-	-	39,21	39,21	39,21	=
8.5	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	-	-	-	1	1	1	=
8.6	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	-	-	-	6	6	6	=
8.7	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	-	-	2	8	8	8	=
8.8	Rata-rata jumlah anak per keluarga	1,65	1,62	1,59	1,22	1,49	2	>
8.9	Ratio Akseptor KB	69,69	69,47	69,68	69,18	68,2	68,2	=
8.10	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	69,69	69,47	69,68	69,18	68,2	68,2	=

No	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN KINERJA PER TAHUN					Standar	Keterangan : Belum Tercapai (<); Tercapai (=); Melampaui
		2016	2017	2018	2019	2020		
8.11	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	34,15	39,98	35,01	33,52	33,52	33,52	=
8.12	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	0,79	1,07	0,82	0,51	0,56	0,56	=
8.13	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	7,52	6,9	7,12	7,93	9,2	9,2	=
8.14	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	29,89	33,47	35,72	37,42	30,68	30,68	=
8.15	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	43,5	43,96	43,51	44,55	46,63	46,63	=
8.16	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	75,46	78,3	77,6	77,46	75,02	75,02	=
8.17	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	63,18	67,84	69,67	70,72	70,95	70,95	=
8.18	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	60,44	65,27	66,38	66,96	61,87	61,87	=
8.19	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	14,28	13,33	13,33	20	20	20	=
8.20	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	450	506,67	580	680	793,33	793,33	=
8.21	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	100	100	100	100	100	100	=
8.22	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	60,53	65,1	65,03	65,52	38,33	38,33	=

No	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN KINERJA PER TAHUN					Standar	Keterangan : Belum Tercapai (<); Tercapai (=); Melampaui
		2016	2017	2018	2019	2020		
8.23	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	100	100	100	100	100	100	=
8.24	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	1.163,91	1.477,42	10.212,19	1.200	39,04	39,04	=
8.25	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	98,98	72,72	75	94,39	97,32	97,32	=
8.26	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	100	99,99	100	100	100	100	=
8.28	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	100	100	100	100	100	100	=
8.29	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	27,39	59,73	86,41	72,07	69,59	69,59	=
8.30	Rata-rata usia kawin pertama wanita	21	21	21	21	21	21	=
8.31	Persentase Pembiayaan Program kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	0,53	0,64	0,74	0,6	0,65	0,65	=
9	Perhubungan							
9.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	11.433.505	13.321.660	15.057.372	12.113.815	6.202.000	6.202.000	=
9.2	Rasio ijin trayek	1 : 652,70	1 : 929,42	1 : 1379,9	1 : 1562	1 : 958	1 : 958	=
9.3	Jumlah uji kir angkutan umum	55.088	35.786	31.242	40.152	2.524	2.524	=
9.4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	5	5	5	5	5	5	=
9.5	Persentase layanan angkutan darat	1 : 23.400	1 : 23.400	1:22.922	1 : 17.280	1 : 1.872	1 : 1.872	=

No	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN KINERJA PER TAHUN					Standar	Keterangan : Belum Tercapai (<); Tercapai (=); Melampaui
		2016	2017	2018	2019	2020		
9.7	Pemasangan Rambu- rambu	-	-	5.3	3,7	2,7	2,7	=
9.8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	1 : 1.119	1 : 1.115	1 : 945	1 : 981	1 : 714	1 : 714	=
9.9	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	70.239.415	54.309.135	20.926.080	16.381.440	9.939.600	9.939.600	=
9.10	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	70.239.415	54.309.135	14.543.515	11.427.981	6.551.484	6.551.484	=
10	Komunikasi dan Informatika							
10.1	Cakupan pengembangan an pengembangan dan pemberdayaan	100	106,7	120	127	127	127	=
10.2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	100	100	100	100	100	100	=
11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							
11.1	Persentase koperasi aktif	47,68	48,65	69,11	69,1	69,61	88,02	<
11.2	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	99,95	99,93	99,94	99,93	99,9	99,9	=
11.3	Persentase BPR/LKM Aktif	17,24	24,14	34,48	34,48	41,37	41,37	=
11.4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	85,77	85,76	86,13	93,66	75,01%	75,01%	=
12	Penanaman Modal							
12.1	Jumlah investor PMDN berskala nasional	60	47	24	687	975	975	=
12.2	Jumlah investor PMA berskala nasional	34	27	12	228	339	339	=
12.3	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	PMDN: Rp. 906.046.100,00; PMA : \$ 76.688,50	PMDN: Rp. 762.295.066,47; PMA : \$ 37.844,10	PMDN : Rp. 526.468.345,27; PMA : US\$ 79.656.448	PMDN : Rp. 3.067.061.000.000; PMA : US\$ 96.862.466,67	PMDN : Rp. 7.453.875.500.000; PMA : US\$19.295.100	PMDN : Rp. 7.453.875.500.000; PMA : US\$19.295.100	=
12.4	Rasio daya serap tenaga kerja	51,45	31,47	23,78	5,82	3,34	3,34	=
12.5	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	5,83%	-15,90%	-30,94%	482,57%	41,14%	41,14%	=
13	Kepemudaan dan Olah Raga							
13.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	64	74	84	100	100	100	=
13.2	Persentase wirausaha muda	25	17	17	17	17	17	=
13.3	Cakupan pembinaan olahraga	50	50	54	54	54	54	=
13.4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	7.75	7.75	7.75	7,75%	7,75%	7,75%	=

No	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN KINERJA PER TAHUN					Standar	Keterangan : Belum Tercapai (<); Tercapai (=); Melampaui
		2016	2017	2018	2019	2020		
13.5	Cakupan pembinaan atlet muda	39,5	41.5	35	14,86	14,86	14,86	=
13.6	Jumlah atlet berprestasi	29	33	19	19	19	19	=
13.7	Jumlah prestasi olahraga	513	540	491	208	208	208	=
14	Statistik							
14.1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Tidak	Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	=
14.2	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
14.3	Buku "PDRB"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
15	Persandian							
15.1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	-	-	39.22%	100%	100	100	=
16	Kebudayaan							
16.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	7	1	1	2	1	1	=
16.2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	1,75	7,2	7,2	11,5	138	138	=
16.3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	-	Diinventarisasi 45	Diinventarisasi 45	Diinventarisasi 50	Diinventarisasi 50	Diinventarisasi 50	=
17	Perpustakaan							
17.1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	439.66	1.576.009	1.610.967	1.668.179	186.527	186.527	=
17.2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	0,567	0,563	0,443	0,439	0,442	0,442	=
17.3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	0,65	0,65	0,14	0.23	0,297	0,297	=
17.4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	36.600	131.300	134.200	139.014	15.543	15.543	=
17.5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	101.543	104.502	106.031	108,303	111.681	111.681	=

No	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN KINERJA PER TAHUN					Standar	Keterangan : Belum Tercapai (<); Tercapai (=); Melampaui
		2016	2017	2018	2019	2020		
17.6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	1,5	0.97	0,99	0,83	1,75	1,75	=
18	Kearsipan							
18.1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	33	38	44	50	52	52	=
18.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	3	9	9	9	4	2	>
C	Layanan Urusan Pilihan							
1	Pariwisata							
1.1	Kunjungan wisata (%)	132,47	132,07	113,26	99,49	26,48	100	=
1.2	Lama kunjungan Wisata	2-3 Hari	2-3 Hari	2-3 Hari	2-3 Hari	2-3 Hari	2-3 Hari	=
1.3	PAD sektor pariwisata	5,99%	23,86%	27,94%	34,58%	23,71%	23,71%	=
2	Pertanian							
2.1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	0.088	0.104	0.094	0.088	0,068	0,068	=
2.2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	11,93	9,79	9,89	0,31	9,89	9,89	=
2.4	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	96,56	97,97	99,09	99,37	99,09	99,09	=
2.5	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	5,93	6,17	6,48	99,37	-	-	-
3	Perdagangan							
3.1	Ekspor Bersih Perdagangan	-182.770.000	-509.850.000	-701.900.000	-531.810.000	-377.770.000	-377.770.000	=
4	Perindustrian							
4.1	Cakupan bina kelompok pengrajin	27,17	38,82	77,64	19,41	27,17	27,17	=
5	Kelautan dan Perikanan							
5.1	Produksi perikanan	106,94	82,53	83,68	119,95	92,23	92,23	=
5.2	Konsumsi ikan	104,88	95,06	86,6	108,78	108,78	108,78	=

No	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN KINERJA PER TAHUN					Standar	Keterangan : Belum Tercapai (<); Tercapai (=); Melampaui
		2016	2017	2018	2019	2020		
5.3	Cakupan bina kelompok nelayan	82,25	84,84	93,33	31,5	100	100	=
5.4	Produksi perikanan kelompok nelayan	16,93	19,78	18,19	18,2	18,19	18,19	=
5.5	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	125	125	122,79	139,88	140	140	=
5.7	Nilai tukar nelayan	103.48	107.57	107.83	107.62	99.644	99.644	=
D	Penunjang Urusan							
1	Perencanaan Pembangunan							
1.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	ada	ada	ada	ada	=
1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ada	ada	ada	ada	Tidak ada	ada	<
1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada	ada	=
1.4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	ada	ada	ada	ada	=
1.5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	konsisten	konsisten	konsisten	konsisten	Tidak ada	ada	<
1.6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	konsisten	konsisten	konsisten	konsisten	konsisten	konsisten	=
1.7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai	=
2	Keuangan							
2.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP	<
2.2	Persentase SILPA	5,29	8,22	4,96	7.32	1,97	1,97	=
2.5	Persentase belanja pendidikan (20%)	29,12	24,4	22.76	24.93	28,61	28,61	=
2.6	Persentase belanja kesehatan (10%)	13,24	12,15	11.96	12.44	12,48	12,48	=

No	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN KINERJA PER TAHUN					Standar	Keterangan : Belum Tercapai (<); Tercapai (=); Melampaui
		2016	2017	2018	2019	2020		
2.7	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	40,98	32,03	31,93	31.12	49,42	49,42	=
2.9	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	=
3	Kepegawaian serta Pendidikan dan pelatihan							
3.1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	28 Jam	12 Jam	12 jam	9,28 jam	0	0	=
3.2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	25,01	34,7	37,24	6,94	0	0	=
3.3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	54,57	57,01	59,47	2,46	0	0	=
3.4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	45	42	42	42	42	42	=
3.5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	1.701	1.701	1.796	1.601	1.718	1.718	=
3.6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	6.786	6.611	6.197	6.658	6.745	6.745	=
4	Penelitian dan Pengembangan							
4.1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	0	0	0	0	0	0	
4.2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	- (*)	66,67%	75,00%	62,50%	35,70%	35,7%	=
	Penerapan SIDA:							
4.3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	-	101,96%	103,92%	103,92%	103,92%	103,92%	=
4.4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	-	100%	100%	100%	100%	100%	=
5	Pengawasan							
5.1	Persentase tindak lanjut temuan	60,03	37,5	49.3	883	57,19	57,19	=
5.2	Persentase pelanggaran pegawai	0,72	0,72	1,15	1,29	0,31	0,31	=

No	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN KINERJA PER TAHUN					Standar	Keterangan : Belum Tercapai (<); Tercapai (=); Melampaui
		2016	2017	2018	2019	2020		
5.3	Jumlah temuan BPK	15	23	41	17	24	24	=
6	Sekretariat Dewan							
6.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	ada	ada	ada	ada	ada	ada	=
6.2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	ada	ada	ada	ada	ada	ada	=
6.3	Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	ada	ada	ada	ada	ada	ada	=
ASPEK DAYA SAING DAERAH								
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	3,41	3,50	3,28	3,76	-	-	-
2	Nilai tukar petani	103,93	101,71	103,31	104,42	97,56	97,56	=
3	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	59	60	56	57	-	62,97	-
4	Produktivitas total daerah	-	189,333	195,193	206,687	197	197	=
6	Persentase Ekspor + Impor terhadap PDRB ADHB	83,49	82,56	84,53	77,67	-	-	-
	Persentase Ekspor + Impor terhadap PDRB ADHK	83,13	85,55	85,82	84,74			
7	Rasio pinjaman terhadap Simpanan di bank umum	1,18	1,18	1,22	1,17	-	-	=
8	Rasio pinjaman terhadap simpanan di BPR	-	-	-	-	-	-	-
9	Angka kriminalitas yang tertangani	0,0023	0,0044	0,0054	0,0023	0,00076	0,00076	=
10	Rasio ketergantungan	41,8	52,89	38,23	41,02	43,28	41	<

III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Pengelolaan keuangan daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai kepada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Makassar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Keuangan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, harus dikelola dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan sub sistem dari pengelolaan keuangan negara, pada dasarnya adalah bagian dari sistem keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pada sisi pengeluaran, diberikannya kewenangan fiskal kepada sebuah daerah otonom didasarkan kepada prinsip agar alokasi sumber daya lebih efektif dan efisien. Pemerintah Daerah yang lebih dekat ke masyarakat diasumsikan lebih tahu kebutuhan masyarakat dibandingkan dengan Pemerintah Pusat. Sehingga alokasi sumber daya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah akan lebih responsif dan menjawab kebutuhan masyarakat. Sedangkan pada sisi penerimaan, diberikannya kewenangan perpajakan kepada daerah dimaksudkan agar partisipasi masyarakat untuk mendanai pelayanan publik lebih tinggi karena masyarakat dapat merasakan langsung manfaat dari pembayaran pajak/retribusi tersebut.

Analisis pengelolaan keuangan daerah Kota Makassar dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah. Analisis pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan dari Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar terlebih dahulu harus disajikan jenis obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan, susunan/struktur masing-masing APBD.

Selanjutnya, analisis dilakukan terhadap penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pembiayaan daerah. Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Berbagai objek penerimaan daerah akan dianalisis untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan selama ini. Untuk lebih mendapat gambaran yang lengkap, akan disajikan perkembangan kinerja keuangan dan kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu sebagai dasar dalam melakukan penyesuaian perkiraan kondisi keuangan daerah lima tahun ke depan, tahun 2021 s.d tahun 2026.

3.1 KINERJA KEUANGAN MASA LALU TAHUN 2016 – 2020

Kinerja keuangan adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan pemerintah daerah untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas dari aktivitas pemerintah daerah yang dilaksanakan pada periode waktu tertentu. Penilaian kinerja keuangan masa lalu dilakukan melalui peninjauan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disertai

dengan kondisi neraca. Tinjauan terhadap kinerja keuangan masa lalu dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan gambaran terhadap perkembangan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Makassar. Sedangkan tinjauan terhadap neraca difokuskan pada perkembangan aset dan hutang daerah serta ekuitas dana.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 - 2020 menunjukkan tingkat realisasi atau penyerapan APBD setiap tahunnya, sebagai stimulus kinerja pembangunan daerah dalam mendukung pencapaian target-target indikator kinerja utama sesuai yang ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Makassar tahun 2016 – 2020. Pengelolaan keuangan daerah dalam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 - 2020 menggunakan pendekatan kinerja, dimana penganggaran berfokus pada belanja / pengeluaran yang terukur.

Analisis kinerja pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 – 2020 dapat diketahui dari kinerja pendapatan daerah dan pembiayaan daerah sebagai berikut:

3.1.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua Penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pengelolaan Pendapatan Daerah dilakukan dengan menggali potensi sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Artinya perlu dilakukan peningkatan dan perluasan basis PAD dan mengupayakan secara optimal Pendapatan Transfer yang bersumber dari Dana Perimbangan, agar bagian daerah dapat diperoleh secara proporsional. Untuk itu, ditempuh berbagai upaya seperti peningkatan pengawasan, koordinasi dan penyederhanaan proses administrasi pemungutan.

Selain itu, untuk peningkatan pendapatan daerah juga memerlukan Kebijakan Pendapatan Daerah guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah, mengurangi ketergantungan fiskal, serta meningkatkan ruang fiskal daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi obyek untuk tujuan tersebut, selain menggambarkan kapasitas fiskal daerah juga berpotensi meningkatkan ruang fiskal daerah untuk kebutuhan alokasi belanja.

Pada Periode Tahun 2016 – 2020 Pendapatan Daerah Kota Makassar secara umum mengalami fluktuasi dari segi target maupun realisasi pendapatan. Rata-rata realisasi dari segi Pendapatan Daerah Kota Makassar mencatat angka persentase sebesar 92,91 % dengan rata-rata akumulasi pertumbuhan secara periode mengalami kenaikan sebesar 3,09%.

Tabel 3.1 | Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Bertambah / (Berkurang)	Pertumbuhan (%)
2016	3.875.920.136.000	3.546.650.155.445	91,50	(329.269.980.555)	20,12
2017	3.517.452.010.000	3.416.355.218.701	97,13	(101.096.791.299)	-3,67
2018	3.892.235.958.000	3.428.479.729.163	88,09	(463.756.228.837)	0,35
2019	4.055.576.463.716	3.666.359.990.155	90,40	(389.216.473.561)	6,94
2020	3.469.163.140.080	3.362.146.992.169	96,92	(107.016.147.911)	-8,30

Sumber: Data Perda Pertanggungjawaban APBD Kota Makassar Tahun 2016 – 2020

Berdasarkan pada tabel 3.1 di atas realisasi pendapatan daerah Kota Makassar selama 5 tahun rata-rata sebesar 92,91% dengan rata-rata akumulasi pertumbuhan mengalami kenaikan sebesar 3,09%, Realisasi pada tahun 2020 mengalami penurunan diakibatkan terjadinya bencana non alam yakni pandemi Covid-19 dimana yang sangat berdampak pada penerimaan pemerintah Kota Makassar.

Tabel 3.2 | Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

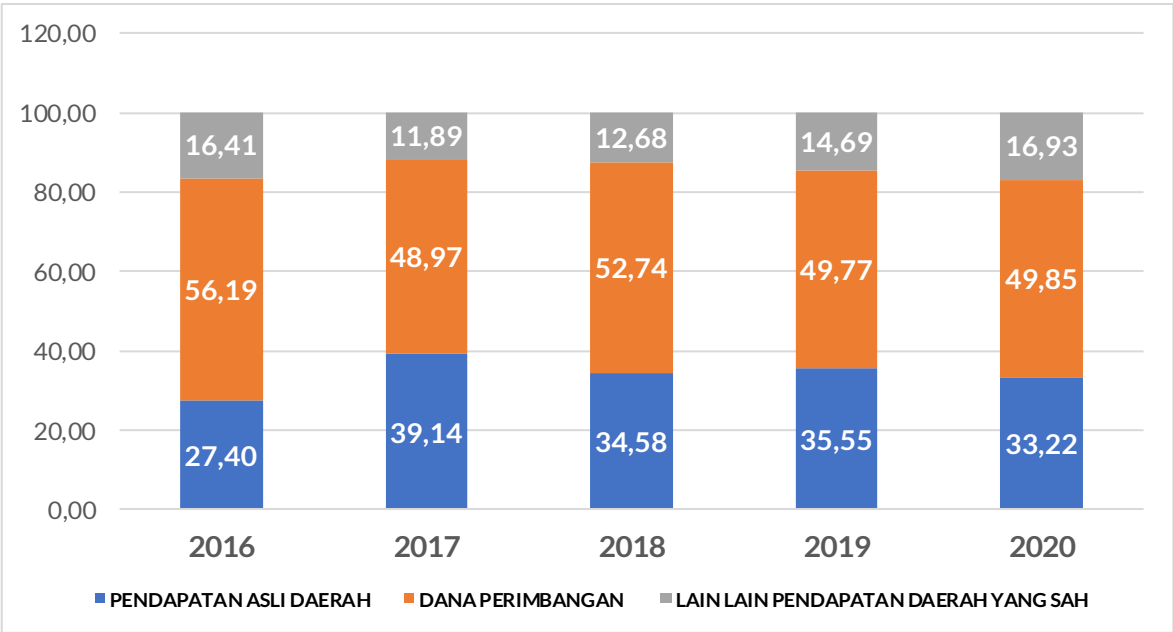
No.	URAIAN	TAHUN					Rata Rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	3.546.650.155.445	3.416.355.218.701	3.428.479.729.163	3.666.359.990.155	3.362.146.992.169	3,09
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	971.859.753.606	1.337.231.094.232	1.185.453.010.990	1.303.316.337.554	1.116.813.266.836	7,83
1.1.1	Pajak daerah	752.142.501.993	938.796.384.191	942.551.891.961	1.067.323.035.834	864.313.239.515	7,55
1.1.2	Retribusi daerah	128.471.643.140	72.788.075.038	57.277.225.805	68.097.361.545	67.204.193.741	(7,11)
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	15.562.590.482	45.023.066.147	49.463.120.625	18.225.557.959	31.875.688.804	45,43
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	75.683.017.991	280.623.568.856	136.160.772.598	149.670.382.217	153.420.144.776	49,77
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.992.747.630.282	1.672.967.166.403	1.808.260.589.494	1.824.567.795.448	1.676.121.523.287	5,37
1.2.1	Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak	117.149.109.244	118.716.849.140	107.280.350.505	77.673.025.393	118.785.692.342	18,35
1.2.2	Dana alokasi umum	1.324.023.135.000	1.300.764.306.000	1.299.554.321.692	1.379.148.200.000	1.249.647.391.000	1,06
1.2.3	Dana alokasi khusus	551.575.386.038	253.486.011.263	401.425.917.297	367.746.570.055	307.688.439.945	56,53
1.3	LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	582.042.771.557	406.156.958.066	434.766.128.679	538.475.857.153	569.212.202.046	(2,58)
1.3.1	Hibah	235.845.582.414	15.000.000.000	128.588.743.987	132.401.628.152	165.818.274.714	138,36
1.3.2	Dana darurat	-	-	-	-	-	0,00
1.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	304.485.818.811	366.638.439.266	272.000.033.019	356.994.230.001	302.750.607.332	5,07
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	7.500.000.000	17.875.000.000	31.415.999.000	74.623.320.000	50,32
1.3.5	Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya**)	41.711.370.332	17.018.518.800	16.302.351.673	17.664.000.000	26.020.000.000	(6,91)

Sumber: Data Perda Pertanggungjawaban APBD Kota Makassar Tahun 2016 – 2020

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel 3.2 secara keseluruhan nominal realisasi Pendapatan Daerah Kota Makassar dari tahun 2016 s.d tahun 2020 mengalami fluktuatif pada total keseluruhan pendapatan yang dimana angka-angka rata pertumbuhan untuk total pendapatan menunjukkan nilai positif berada di 3,09 persen. Melihat secara rinci dan detail tentunya Pendapatan Daerah Kota Makassar lebih cenderung fluktuatif pada Komponen Dana Perimbangan. Angka realisasi secara statistik tersebut menggambarkan pola kondisi di Tahun tertentu dimana pada Tahun 2017 pendapatan transfer yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik berjumlah Rp. 253.486.011.263,00 mengalami penurunan sebesar 54% Tahun sebelumnya dengan jumlah Rp. 551.575.386.038,00. Begitu pula di tahun yang sama Dana Alokasi Umum (DAU) turun sebesar 2%. Penurunan kedua jenis pendapatan pada Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) disebabkan turunnya Penerimaan Dalam Negeri (PDN) neto yang menjadi dasar penghitungan DAU Nasional dan Dana Alokasi Khusus, selain itu terjadi perubahan formula DAU untuk alokasi setiap daerah dengan memperhatikan ruang fiskal tiap daerah.

Akan tetapi secara keseluruhan pendapatan mengalami pertumbuhan secara akseleratif selama lima tahun terakhir pada jenis Pendapatan Asli daerah (PAD) yaitu sebesar 13,36 persen per tahun. Peningkatan tersebut hal ini tentu menjadi pencapaian positif dimana progres tersebut seiring dengan bergeliatnya aktivitas ekonomi.

Gambar 3.1 | Postur Pendapatan Daerah Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar



Sumber: Data Perda Pertanggungjawaban APBD Kota Makassar Tahun 2016 – 2020

Dari gambar 3.1 dapat dilihat bahwa proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total Pendapatan Daerah masih relatif kecil, yang berarti sumber Pendapatan yang dominan bagi APBD Kota Makassar dalam 5 (lima) tahun terakhir berasal Dana Perimbangan yang bersumber besar dari Dana alokasi umum (DAU). Sekalipun demikian proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan tren peningkatan pada komponen Pendapatan Daerah. dapat dilihat pada Tahun 2016 proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sebesar 27,40 persen, terjadi peningkatan di tahun beberapa tahun berikutnya yaitu pada tahun 2017 dengan proporsi sebesar 39,14, Tahun 2018 dengan proporsi sebesar 34,58 persen Tahun 2019 dengan proporsi sebesar 35,55 persen dan Tahun 2020 dengan proporsi sebesar 33,22 persen. Pemerintah Kota Makassar terus berupaya untuk terus melakukan peningkatan PAD untuk memperkecil celah fiskal yang ada. Pemerintah Kota Makassar berupaya menjadikan komponen PAD sebagai sumber dana yang terus ditingkatkan penerimaannya guna lebih memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta

menciptakan kemandirian daerah dalam pembiayaannya. Oleh karena itu pemerintah daerah selalu dan terus meningkatkan hasil PAD setiap tahunnya dalam rangka mendukung sektor belanja APBD untuk memenuhi berbagai kebutuhan pemerintah dan masyarakat.

Untuk mengetahui secara terperinci komponen Pendapatan Daerah berdasarkan sumber-sumbernya, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur tingkat ketergantungan suatu daerah kepada pemerintah daerah. Pada prinsipnya, semakin besar sumbangan PAD kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan menunjukkan semakin kecilnya tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur tingkat ketergantungan suatu daerah kepada pemerintah daerah. Pada prinsipnya, semakin besar sumbangan PAD kepada APBD akan menunjukkan semakin kecilnya tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

Dalam rangka implementasi Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 maka salah satu faktor yang harus dipersiapkan oleh pemerintah daerah adalah kemampuan keuangan daerah, sedangkan indikator yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan keuangan daerah tersebut ialah rasio PAD dibandingkan dengan total penerimaan APBD. Dalam perkembangan selama ini terlihat bahwa di antara semua komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pajak daerah dan retribusi daerah merupakan penyumbang terbesar, sehingga muncul anggapan bahwasanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) identik dengan pajak daerah dan retribusi daerah. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa pada umumnya pemerintah daerah lebih cenderung untuk menggenjot secara optimal sumber-sumber PAD daerahnya yang diperoleh dari sumber pajak daerah dan retribusi daerah dibandingkan dengan sumber-sumber PAD lainnya, termasuk laba badan usaha milik daerah, meskipun sumber-sumber lainnya tersebut memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan di daerah bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Berdasarkan rata-rata pertumbuhan realisasi Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan yang signifikan selama periode tahun 2016 – 2020. Komponen Pendapatan Asli Daerah dari penerimaan Pajak Daerah secara konsisten terjadi peningkatan setiap tahunnya sebagai penyumbang utama dalam pembentukan Pendapatan Daerah, namun demikian diperlukan usaha yang lebih maksimal dalam pencapaian target yang direncanakan. Sementara pada komponen Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah mengalami pasang surut. Namun demikian diharapkan ke depan dapat menjadi andalan yang potensial untuk digali dimasa mendatang dengan memperbaiki tata kelola sehingga kontribusinya dapat lebih ditingkatkan.

Secara nominal, PAD Kota Makassar antara Tahun Anggaran 2016 s.d 2020, meningkat sebesar Rp. 144.95 Milyar lebih, dengan rata-rata peningkatan sebesar 5,47% per tahun, dengan rincian Pajak Daerah mengalami peningkatan sebesar Rp.112.17 Milyar lebih,

dengan rata-rata peningkatan sebesar 4,86% per tahun. Sementara untuk Retribusi Daerah mengalami penurunan sebesar Rp.61,26 Milyar lebih dalam kurun waktu lima tahun terakhir atau 11,77 persen. Untuk Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan meningkat sebesar Rp.16,31 Milyar lebih, atau rata-rata pertumbuhan sebesar 52,73% per tahun. Dan komponen PAD yang terakhir yaitu Lain-lain PAD Yang Sah terjadi peningkatan sebesar Rp. .77,37 Milyar lebih atau rata-rata pertumbuhan sebesar 57,93%. Secara berturut-turut pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut:

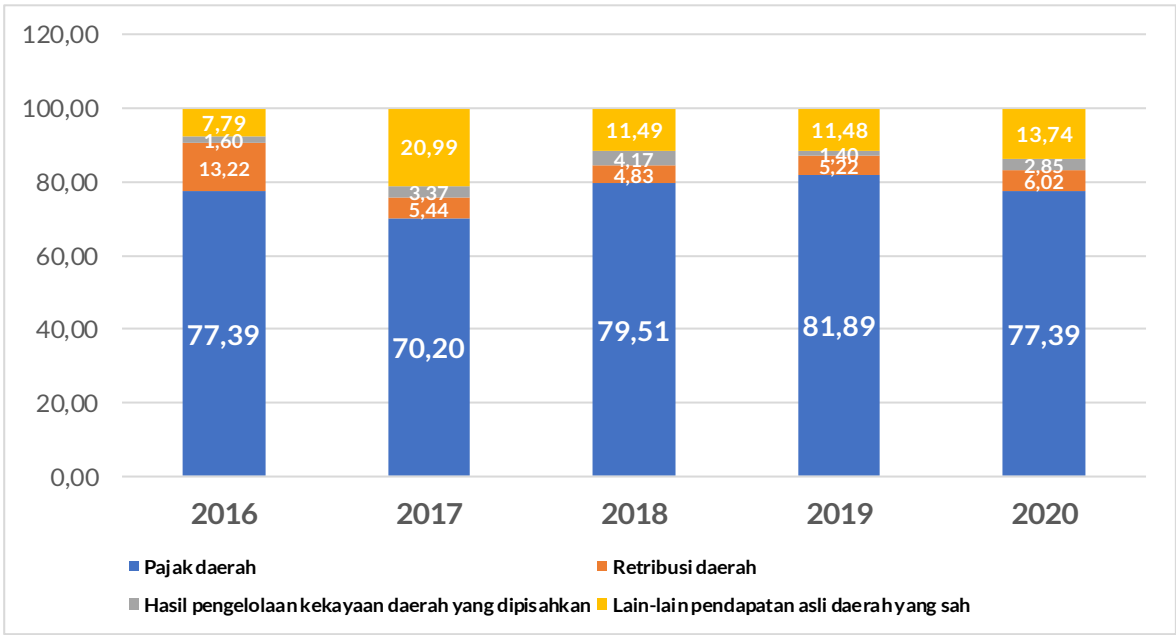
Tabel 3.3 | Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Bertambah / (Berkurang)	Pertumbuhan (%)
2016	1.286.067.656.000	971.859.753.606	75,57	(314.207.902.394)	17,25
2017	1.484.865.937.000	1.337.231.094.232	90,06	(147.634.842.768)	37,60
2018	1.503.411.219.000	1.185.453.010.990	78,85	(317.958.208.010)	-11,35
2019	1.624.776.235.586	1.303.316.337.554	80,22	(321.459.898.032)	9,94
2020	1.144.166.180.881	1.116.813.266.836	97,61	(27.352.914.045)	-14,31

Sumber: Data Perda Pertanggungjawaban APBD Kota Makassar Tahun 2016 – 2020

Berdasarkan tabel 3.3 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari Tahun 2016 sampai Tahun 2020 belum pernah terealisasi sesuai dengan target yang direncanakan. Rata-rata realisasinya hanya sebesar 84.46 persen. Kondisi tersebut diakibatkan karena minimnya penerimaan pendapatan pajak daerah seperti penurunan transaksi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pajak parkir yang belum maksimal yang disebabkan oleh pengelolaan retribusi yang saling tumpang tindih dan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang masih rendah serta penerapan sistem pajak online (e-tax) yang masih minim. Secara nominal PAD Kota Makassar yang dapat direalisasikan hanya berkisar pada angka 75,57%, 90,06%, 78,85%, 79,97% dan 97,61 dari target yang ditetapkan. Tidak optimalnya realisasi PAD akan berkontribusi pada menurunnya Pendapatan daerah secara keseluruhan dan mempengaruhi postur anggaran untuk membiayai pembangunan setiap tahunnya. Hal ini menjadi catatan bagi semua pihak yang melakukan pengelolaan pendapatan daerah.

Gambar 3.2 | Postur Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar



Sumber: Data Perda Pertanggungjawaban APBD Kota Makassar Tahun 2016 – 2020

Dapat dilihat pada gambar 3.2 pembentukan Nilai pada Pendapatan Daerah (PAD) Kota Makassar dalam periode Tahun 2016 s.d 2020 cenderung didominasi oleh Pajak Daerah dengan rata-rata pada 77,28% dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan nilai akumulatif sebesar 13,10%. Performa kinerja Penerimaan pada sektor Pajak Daerah Kota Makassar dalam 5 (lima) tahun terakhir mencatat nilai dengan rata-rata 84.92% dimana pada Tahun 2020 data realisasi Pajak Daerah menyentuh angka penerimaan 102,08% dari target Anggaran. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kota Makassar memiliki kewenangan atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerimaan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan(PBBP2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yaitu pelimpahan sebagian urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Pusat kepada Daerah Otonom berdasarkan asas otonom. Otonomi daerah berlaku untuk seluruh daerah di Indonesia, namun untuk Aceh dan Papua dapat keistimewaan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat untuk melaksanakan Pemerintahan yang sedikit berbeda dari daerah yang lainnya. Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud meliputi :

- 1. Dana Bagi Hasil;
- 2. Dana Alokasi Umum;
- 3. Dana Alokasi Khusus.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Tujuan Dana Perimbangan adalah untuk membantu daerah dalam mendanai Kewenangannya serta bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan

Pemerintah Antara Pusat dan Daerah dan untuk mengurangi kesenjangan pendanaan Pemerintah antar Daerah.

Dalam Komposisi Dana Perimbangan, Dana Bagi Hasil (DBH) diberikan kepada daerah berdasarkan persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi, Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan pengalokasian dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dan Dana Alokasi Khusus (DAK) bertujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas Nasional. Dapat dilihat pada Tabel 3.4 performa Dana Perimbangan Kota Makassar pada Periode Tahun 2016 – 2020.

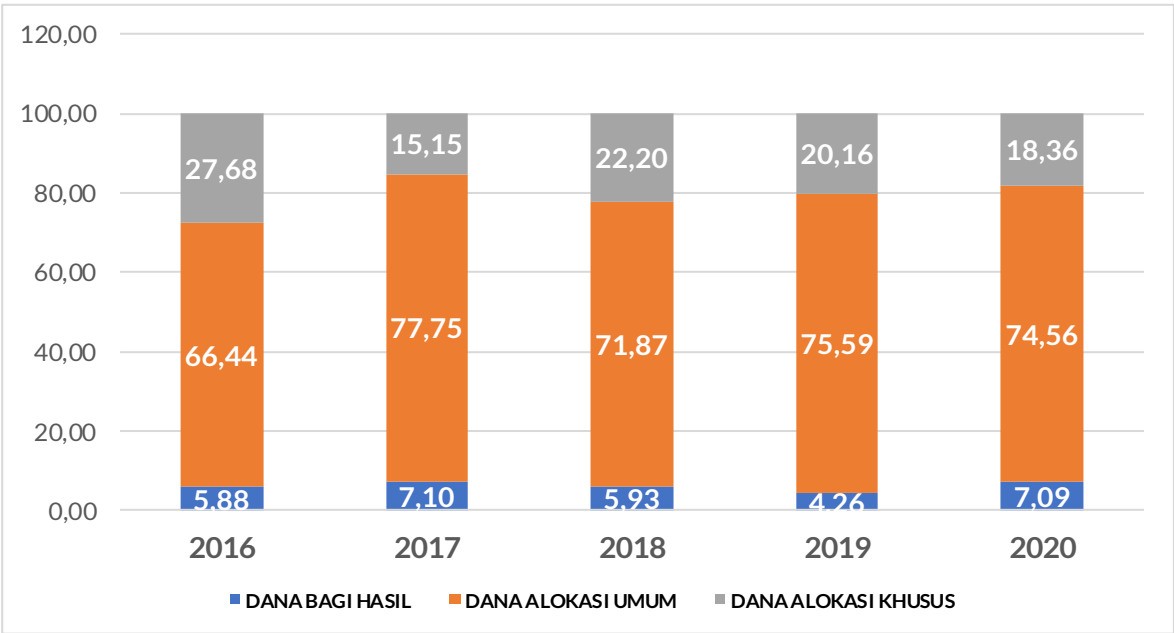
Tabel 3.4 | Target dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Bertambah / (Berkurang)	Pertumbuhan (%)
2016	2.123.710.842.000	1.992.747.630.282	93,83	(130.963.211.718)	42,06
2017	1.691.800.649.000	1.672.967.166.403	98,89	(18.833.482.597)	-16,05
2018	1.878.090.139.000	1.808.260.589.494	96,28	(69.829.549.506)	8,09
2019	1.889.026.545.464	1.824.567.795.448	96,59	(64.458.750.016)	0,90
2020	1.712.913.222.000	1.676.121.523.287	97,85	(36.791.698.713)	-8,14

Sumber: Data Perda Pertanggungjawaban APBD Kota Makassar Tahun 2016 – 2020

Pada tabel 3.4, Performa Penerimaan Pendapatan Transfer memiliki catatan yang positif secara periodik dengan rata-rata realisasi penerimaan sebesar 97,98% dari target Tahunan yang dibukukan pada APBD di tahun berkenaan. Berbeda untuk angka rata-rata pertumbuhan Penerimaan pendapatan Transfer yang justru menunjukkan penurunan negatif senilai 2,96% yang juga lebih didominasi oleh Dana Transfer Umum (DAU) dan Dana Transfer Khusus.

Gambar 3.3 | Postur Dana Perimbangan Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar



Sumber: Data Perda Pertanggungjawaban APBD Kota Makassar Tahun 2016 – 2020

Sesuai dengan gambar 3.3 pada Postur Dana Perimbangan Kota Makassar Periode Tahun 2016-2020, pembentukan Dana Perimbangan lebih kepada Dana Alokasi Umum (DAU) dengan rata-rata pada 73,24% dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan nilai akumulatif sebesar 20,71%.

Kebijakan dana perimbangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat harus diperhitungkan secara matang dikarenakan baik DAU dan DAK bersifat earmarked, yaitu dana yang telah ditentukan besaran alokasinya. Besaran komponen anggaran tersebut ditentukan sepenuhnya oleh Pemerintah Pusat sehingga Pemerintah Daerah hanya menerima transfer ke daerah dari Pusat. Selain itu dana tersebut angkanya baru terkonfirmasi secara jelas setelah turunnya Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Sementara untuk komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang dimaksud meliputi:

- 1) Hibah;
- 2) Dana Darurat; dan/atau
- 3) Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya;
- 4) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus;
- 5) Bantuan Keuangan dari Provinsi Pemerintah daerah lainnya**)

Tabel 3.5 | Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Bertambah / (Berkurang)	Pertumbuhan (%)
2016	278.247.182.000	277.556.952.746	99,75	(690.229.254)	-61,5
2017	26.520.000.000	32.018.518.800	120,73	5.498.518.800	-88,46
2018	150.568.600.000	144.891.095.660	96,23	(5.677.504.340)	352,52
2019	150.468.600.000	150.065.628.152	99,73	(402.971.848)	3,57
2020	213.073.815.199	191.838.274.714	90,03	(21.235.540.485)	27,84

Sumber: Data Perda Pertanggungjawaban APBD Kota Makassar Tahun 2016 – 2020

Sebagaimana data tersaji dalam tabel 3.5 dapat kita lihat bahwa untuk pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, Performa rata-rata Realisasi pada periode Tahun Anggaran 2016 s.d 2020 secara akumulatif 5 (lima) Tahun membukukan pada angka 101,30%. Dengan angka pertumbuhan mengalami fluktuatif dengan catatan minor pada tahun 2016 sebesar -61,50% dan tahun 2017 -88,46% serta catatan positif di bukukan pada tahun berikut di Tahun 2018 sebesar 352,52%, Tahun 2019 sebesar 3,57% dan di Tahun 2020 sebesar 27,84%.

Upaya peningkatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, retribusi daerah dan pengelolaan Perusahaan daerah (Perusda). Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan peningkatan pendapatan daerah yang berasal dari sumber-sumber PAD, meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta, baik dalam pembiayaan maupun kegiatan pembangunan, meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD, dan mengoptimalkan perolehan Dana Perimbangan yang lebih proporsional. Adapun upaya intensifikasi pajak dan retribusi daerah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar melalui :

- 1. Penyederhanaan proses administrasi pemungutan dan penyempurnaan sistem pelayanan pajak dan retribusi daerah seperti pelayanan perizinan satu atap.

2. Optimalisasi pelaksanaan landasan hukum yang berkaitan dengan penerimaan daerah seperti merevisi kembali Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah, baik langsung maupun melalui media massa, seperti pemasangan papan himbauan, spanduk, dan pemberian penghargaan.
4. Peningkatan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pemungutan penerimaan daerah seperti melakukan uji petik terhadap objek-objek retribusi daerah.
5. Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan kerja terkait, seperti menginventarisasi dan menertibkan objek-objek pajak dan retribusi.
6. Optimalisasi penagihan piutang pajak seperti penyelenggaraan bulan bakti PBB, menjalin kerja sama dengan Kantor Pelayanan Pajak Sulawesi Selatan.

Sementara upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar dalam ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah melalui :

1. Merevisi peraturan daerah tentang pajak dan retribusi baru yang tidak kontra produktif terhadap perekonomian daerah.
2. Pengkajian jenis retribusi yang tidak layak dan perlu disempurnakan.
3. Pengkajian mekanisme pajak dan retribusi daerah untuk target grup baru.
4. Mengupayakan peningkatan bagi hasil pajak melalui koordinasi ke Pemerintah Pusat.
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dan perusahaan daerah (Perusda) dalam pembangunan daerah.

3.1.1.2 Belanja Daerah

Selain mengukur kinerja APBD dari sumber Pendapatan, juga dilakukan pada sisi realisasi Belanja Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan memprioritaskan Pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar serta Urusan Pemerintah Pilihan sesuai dengan Prioritas dan Potensi yang dimiliki Daerah.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah, yang mengurangi ekuitas dana lancar, dimana merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Secara umum Klasifikasi Belanja Daerah terdiri dari:

1. Belanja Tidak Langsung
2. Belanja Langsung

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari: Belanja pegawai; Bunga; Subsidi; Hibah; Bantuan Sosial; Belanja bagi Hasil; Bantuan Keuangan; dan Belanja Tidak Terduga.

Pengukuran kinerja suatu daerah juga dapat dilihat dari seberapa besar realisasi belanja yang telah terserap, semakin besar realisasi belanja semakin bagus kinerja suatu daerah. Alokasi belanja daerah sebagian besar dialokasikan untuk pelayanan kepada masyarakat sehingga bisa menggerakkan perekonomian sektor riil yang berakibat pada peningkatan pendapatan masyarakat. Pertumbuhan pendapatan yang telah dicapai menjadi dasar dalam pengelolaan belanja daerah, baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Besarnya realisasi belanja tersebut diprioritaskan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat melalui program-program yang berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran. Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016-2020, disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, dengan memperhatikan kinerja Perangkat Daerah (PD) dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan integrasi perencanaan terhadap penganggaran daerah, serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan sesuai agenda strategis yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026.

Tabel 3.6 | Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Bertambah / (Berkurang)	Pertumbuhan (%)
2016	3.905.887.927.000	3.278.340.966.083	83,93	(627.546.960.917)	7,06
2017	3.686.860.860.000	3.313.623.623.887	89,88	(373.237.236.113)	1,08
2018	4.089.589.897.000	3.526.081.002.897	86,22	(563.508.894.103)	6,41
2019	4.155.029.099.401	3.549.123.220.749	85,42	(605.905.878.652)	0,65
2020	3.708.157.175.171	3.008.270.709.340	81,13	(699.886.465.831)	-15,24

Sumber: Data Perda Pertanggungjawaban APBD Kota Makassar Tahun 2016 – 2020

Pada Tabel 3.6, Performa Realisasi Belanja Daerah Kota Makassar hanya mencatat rata-rata sebesar 85,22%. Pencatatan hasil realisasi tersebut cenderung dipengaruhi Belanja Modal pada Tahun berkenang. Penambahan Laju pertumbuhan pada Belanja Daerah juga tidak signifikan dan cenderung mengalami fluktuatif.

Tabel 3.7 | Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

No.	URAIAN	TAHUN					Rata Rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	3.278.340.966.083	3.313.623.623.887	3.526.081.002.897	3.549.123.220.749	3.008.270.709.340	-0,01
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.343.555.113.259	1.078.628.779.064	1.125.877.416.827	1.076.266.292.943	1.486.629.030.187	5,1
2.1.1	Belanja pegawai	1.265.416.038.170	992.802.177.373	984.940.957.967	1.016.693.100.943	1.176.839.033.927	0,53
2.1.2	Belanja bunga	583.283.989	254.324.108	-	-	-	-43,77
2.1.3	Belanja subsidi	-	-	-	-	-	0
2.1.4	Belanja hibah	76.328.270.950	76.924.413.515	137.256.266.580	55.552.460.000	185.766.766.000	62,44
2.1.5	Belanja bantuan sosial	47.161.000	-	465.000.000	2.870.000.000	1.260.000.000	72,22
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	-	-	-	-	-	0
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	1.097.743.000	1.091.333.000	3.094.538.000	1.116.584.000	1.169.896.000	24,77
2.1.8	Belanja tidak terduga	82.616.150	7.556.531.068	120.654.280	34.148.000	121.593.334.260	72950,96
2.2	BELANJA LANGSUNG	1.934.785.852.824	2.234.994.844.823	2.400.203.586.070	2.472.856.927.806	1.521.641.679.153	-1,11
2.2.1	Belanja Pegawai	185.063.908.996	200.355.517.782	223.251.786.100	195.613.821.282	41.541.803.375	-10,85
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.115.184.992.271	1.409.619.453.504	1.430.119.739.515	1.393.040.321.842	1.188.897.135.243	4,95
2.2.3	Belanja Modal	634.536.951.557	625.019.873.537	746.832.060.455	884.202.784.683	291.202.740.535	-7,28

Sumber: Data Perda Pertanggungjawaban APBD Kota Makassar Tahun 2016 – 2020

Dijelaskan berdasarkan pada Tabel 3.7 diperoleh gambaran Belanja Daerah Kota Makassar periode Tahun 2016-2020 bahwa realisasi pertumbuhan Belanja Daerah secara rata-rata akumulasi mengalami penurunan sebesar 1,17%, penurunan performa pada Belanja Daerah baik pada Target maupun realisasi pada umumnya juga mengalami fluktuatif secara tahunan (yoy). Komponen Penurunan Belanja Daerah menggambarkan performa secara akumulatif serapan kepada komponen Belanja Operasi yang bersifat wajib dan mengikat, Belanja Modal, Belanja tidak terduga dan Belanja Transfer. Pada Komponen Belanja Tidak Terduga, Laju rata-rata pertumbuhan mengalami peningkatan sebesar 91213% yang dipengaruhi besar peningkatan (yoy) dalam periode Tahun 2020 khususnya pada Belanja Tidak Terduga dalam penanganan wabah Covid-19 dalam mengintervensi langsung pada Sektor Kesehatan, Jaring Pengaman Sosial dan Recovery Ekonomi di Kota Makassar.

3.1.1.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Pada Penerimaan Pembiayaan dirinci menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Jenis, Objek dan Rincian Obyek Pembiayaan Daerah. Serta Pembiayaan Daerah bersumber dari : a). SilPA; b). Pencairan Dana Cadangan; c). Hasil Penjualan Kekayaan Daerah dipisahkan). Penerimaan Pinjaman Daerah; e). penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan/atau f). penerimaan pembiayaan lainnya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk pembiayaan : a). pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; b). penyertaan modal daerah; c). pembentukan dana cadangan; d). pemberian pinjaman daerah; dan/atau e). pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Secara garis besarnya, Data Analisa Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran secara umum dari pengaruh kebijakan daerah terhadap Surplus/defisit antara Penerimaan Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah sebagai acuan dasar dalam menentukan Kebijakan Pembiayaan di masa akan datang untuk menghitung Kapasitas Pendanaan Pembangunan Daerah.

Tabel 3.8 | Rata-Rata Pertumbuhan Pembiayaan Neto Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

No.	URAIAN	TAHUN					Rata Rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
	PEMBIAYAAN NETO	(94.900.338.592)	169.622.344.606	272.358.289.419	121.757.265.685	238.994.035.091	-44,29
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	144.735.329.987	173.412.430.771	272.358.289.419	174.757.265.685	238.994.035.091	19,45
3.1.1	Sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SILPA)	144.731.959.987	173.408.850.771	272.353.939.419	174.757.015.685	238.994.035.091	19,45
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	0
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan daerah Yang dipisahkan	-	-	-	-	-	0
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	0
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	0
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan	3.370.000	3.580.000	4.350.000	250.000	-	-41,63
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	239.635.668.579	3.790.086.165	-	53.000.000.000	-	-74,6
3.2.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	3.790.086.165	3.790.086.165	-	-	-	-25
3.2.2	Penyertaan Modal Daerah	235.845.582.414	-	-	53.000.000.000	-	-25
3.2.3	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	0
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	0
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan	-	-	-	-	-	0

Sumber: Data Perda Pertanggungjawaban APBD Kota Makassar Tahun 2016 – 2020

3.1.2 Neraca Daerah

Laporan keuangan merupakan informasi bagi Pemerintah Daerah dan pengguna lainnya untuk menilai akuntabilitas keuangan daerah dan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca merupakan bagian dari komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. LRA menyajikan ikhtisar, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Sedangkan Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan entitas pada tanggal tertentu. Neraca Daerah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas.

Perkembangan neraca daerah Kota Makassar selama periode pencatatan tahun 2016 – 2020 sebagai berikut:

Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah.

Adapun rata-rata pertumbuhan Aset Daerah Kota Makassar dalam kurun waktu 5 (lima) tahun tersaji dalam tabel 3.9 sebagai berikut:

Tabel 3.9 | Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

URAIAN	TAHUN					Rata Rata Pertumbuhan (%)
	2016	2017	2018	2019	2020	
ASET LANCAR	484.646.191.338	574.687.715.429	708.477.735.911	769.201.156.578	1.119.480.048.412	23,99
Kas	175.186.878.326	273.234.364.352	175.186.658.860	239.168.886.533	593.326.141.527	51,17
Piutang	268.877.675.329	243.332.437.189	472.166.013.672	483.210.137.261	456.106.546.658	20,32
Persediaan	40.581.637.683	58.120.913.888	61.125.063.379	46.822.132.785	70.047.360.226	18,65
Investasi Jangka Panjang	706.906.953.541	743.190.974.479	740.892.292.396	722.610.453.340	744.676.329.434	1,35
Investasi Non Permanen	958.662.250	442.993.850	443.186.850	10.520.500	9.140.000	-41,12
Investasi Permanen	705.948.291.291	742.747.980.629	740.449.105.546	722.599.932.840	744.667.189.434	1,39
ASET TETAP	26.641.398.721.661	25.037.408.151.902	25.445.272.602.925	27.034.458.722.847	27.658.184.792.261	1,04
Tanah	24.340.598.682.282	23.986.237.821.604	23.993.422.804.804	23.990.517.029.435	24.703.407.489.751	0,38
Peralatan dan Mesin	1.118.037.141.063	1.200.061.657.748	1.346.950.372.809	1.373.090.121.546	1.486.522.288.757	7,44
Gedung dan Bangunan	1.437.977.544.676	1.250.123.287.292	1.362.148.058.674	1.387.780.352.960	1.469.105.671.249	0,91
Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.640.934.358.539	4.937.756.486.230	5.265.522.861.236	5.831.425.014.789	5.876.666.696.904	6,14
Aset Tetap Lainnya	69.248.788.776	70.228.511.237	75.431.771.390	27.134.424.750	31.986.182.851	-9,33
Konstruksi Dalam Pengerjaan	25.002.383.541	60.468.734.918	218.728.851.207	109.882.231.921	180.137.807.010	104,44
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(4.990.400.177.216)	(6.467.468.347.126)	(6.816.932.117.195)	(5.685.370.452.556)	(6.089.641.344.262)	6,38
ASET LAINNYA	160.382.182.274	167.841.985.974	165.710.712.726	391.109.381.200	376.504.033.853	33,92
Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	-	-	-	0
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian	212.703.538	196.140.507	-	614.923.500	6.469.482.632	211,07
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	146.194.292.815	157.439.639.815	157.439.639.815	157.439.639.815	157.439.639.815	1,92
Aset Tak Berwujud	23.060.348.851	23.060.348.851	23.926.318.851	24.316.081.151	24.490.081.151	1,52
Akumulasi Amortisasi	(16.312.541.670)	(19.288.331.810)	(21.460.690.650)	(22.745.750.710)	(23.770.635.770)	10
Aset Lain-Lain	7.227.378.740	6.434.188.610	5.805.444.710	231.484.487.444	211.875.466.025	964,54
JUMLAH ASET	27.993.334.048.814	26.523.128.827.784	27.060.353.343.958	28.917.379.713.965	29.898.845.203.960	1,76

Sumber: Data Perda Pertanggungjawaban APBD Kota Makassar Tahun 2016 – 2020

Pada Tabel 3.9 pertumbuhan nilai Aset Pemerintah Kota Makassar selama periode Tahun 2016-2020 mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,76%, dengan rata-rata pertumbuhan untuk masing-masing jenis aset antara lain Aset Lancar naik sebesar 23,99%, Investasi Jangka Panjang rata-rata naik sebesar 1,35%, Sedangkan Aset Tetap yang merupakan kekayaan daerah berwujud juga mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,04% dan Aset Lainnya mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 33,92%

Kewajiban dan Ekuitas Dana

Kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban dikelompokkan menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Sementara yang dimaksud dengan ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan.

Adapun rata-rata pertumbuhan Kewajiban dan Ekuitas Dana Daerah Kota Makassar dalam kurun waktu 5 (lima) tahun tersaji dalam tabel 3.10 sebagai berikut:

Tabel 3.10 | Rata-Rata Pertumbuhan Kewajiban dan Ekuitas Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

URAIAN	TAHUN					Rata Rata Pertumbuhan (%)
	2016	2017	2018	2019	2020	
KEWAJIBAN	141.411.479.164	111.121.128.236	184.477.439.366	107.722.354.716	128.881.162.380	5,66
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	62.403.218.851	32.499.660.631	105.855.971.762	29.100.887.112	50.259.694.776	44,5
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	547.385.487	240.154.711	318.013.683	405.045.393	0,92
Utang Bunga	52.809.547	-	-	-	-	-25
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	3.790.086.166	-	-	-	-	-25
Pendapatan Diterima Dimuka	6.252.019.618	10.375.061.778	9.243.306.961	5.146.944.694	22.921.092.755	89,01
Utang Belanja	33.561.404.337	14.737.858.180	20.495.213.413	17.957.148.026	26.927.671.628	5,14
Utang Kepada Pihak Ketiga	18.741.014.184	6.833.470.186	75.871.411.678	5.672.895.709	-	213,56
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.885.000	5.885.000	5.885.000	5.885.000	5.885.000	0
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	79.008.260.313	78.621.467.604	78.621.467.604	78.621.467.604	78.621.467.604	-0,12
Utang Dalam Negeri – Sektor Perbankan	-	-	-	-	-	0
Utang Dalam Negeri – Obligasi	-	-	-	-	-	0
Utang Pemerintah Pusat	79.008.260.313	78.621.467.604	78.621.467.604	78.621.467.604	78.621.467.604	-0,12
Premium (Diskonto) Obligasi	-	-	-	-	-	0
Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-	-	0
EKUITAS	27.851.922.569.651	26.412.007.699.548	26.875.875.904.592	28.809.657.359.250	29.769.964.041.579	1,78
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	27.993.334.048.814	26.523.128.827.784	27.060.353.343.958	28.917.379.713.966	29.898.845.203.960	1,76

Sumber: Data Perda Pertanggungjawaban APBD Kota Makassar Tahun 2016 – 2020

Berdasarkan Tabel 3.10. tersebut, Pertumbuhan Kewajiban dan Ekuitas Dana Kota Makassar, Kewajiban Pemerintah Kota Makassar selama periode Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 mengalami kenaikan dengan rata-rata 5,66%, Kewajiban Jangka Pendek mengalami kenaikan dengan rata-rata sebesar 44,50%, sedangkan Kewajiban Jangka Panjang tidak mengalami peningkatan. Kewajiban jangka panjang Pemerintah Kota Makassar merupakan utang kepada Pemerintah Pusat yang saat ini sedang dalam proses administrasi untuk Penghapusan secara Mutlak yang ditetapkan oleh Presiden sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah. Selanjutnya Ekuitas yang merupakan kekayaan bersih Pemerintah mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar 1,78%.

Tabel 3.11 | Analisa Rasio Keuangan Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

	Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
A	Rasio Likuiditas					
1	Rasio Lancar (Current Ratio)	7,77	17,68	6,69	26,43	18,89
2	Rasio Quick (Quick Ratio)	7,12	15,89	6,12	24,82	17,71
B	Rasio Solvabilitas					
1	Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
2	Rasio Total Hutang Terhadap Ekuitas	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00

Sumber: Data Perda Pertanggungjawaban APBD Kota Makassar Tahun 2016 – 2020

Dapat disampaikan pada Tabel 3.11 Analisa Rasio Keuangan dalam menilai kinerja keuangan yang digunakan adalah Rasio Likuiditas dan Solvabilitas karena tidak tersedianya informasi laba pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Rasio Likuiditas baik itu Rasio Lancar (*Current Ratio*) maupun Rasio Cepat (*Quick Ratio*) terlihat cenderung meningkat kecuali pada tahun 2018 dan 2020 mengalami penurunan. Hal tersebut disebabkan karena nilai kewajiban jangka pendek (utang) mengalami kenaikan pada tahun tersebut, namun Pemerintah Kota Makassar memiliki aset lancar yang cukup untuk melunasi Kewajiban (utang) tersebut. Sedangkan Nilai Untuk Rasio Solvabilitas yang positif menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Makassar mampu dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang.

Tingkat kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat diketahui berdasarkan analisis rasio atau perbandingan antara kelompok/elemen laporan keuangan yang satu dengan kelompok yang lain. Beberapa rasio yang dapat diterapkan di sektor publik adalah rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio utang. Rasio likuiditas antara lain rasio lancar (*current ratio*) dan rasio cepat (*quick ratio*). Rasio cepat (*quick ratio*) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset yang lebih lancar. Dalam rasio ini komponen aset lancar dikurangi oleh persediaan, karena meskipun persediaan masuk dalam kategori aset lancar, namun memerlukan tahap untuk menjadi kas. Apalagi persediaan di pemerintah daerah bukan merupakan barang dagangan, sehingga untuk mendapatkan rasio aset cepat persediaan menjadi komponen pengurang aset lancar. Hasil analisis rasio menunjukkan bahwa rasio cepat Pemerintah Kota Makassar selama kurun waktu tahun 2016-2020 juga mempunyai nilai lebih dari satu, yang berarti bahwa Pemerintah Kota Makassar dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo.

Rasio solvabilitas, yaitu perbandingan total aset dengan total utang, dapat digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Tabel 3.11 menunjukkan bahwa rasio utang terhadap total aset dan rasio utang terhadap ekuitas sangat rendah dan cenderung stabil dari tahun 2019 ke 2020, hal ini menunjukkan bahwa total kewajiban Pemerintah Kota Makassar dapat ditutupi oleh total aset ataupun oleh modal Pemerintah Kota Makassar

3.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN TAHUN 2016 – 2020

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah APBD disusun sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi Kewenangan Daerah dan Kemampuan Pendapatan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi Otorisasi adalah anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun berkenaan.
2. Fungsi Perencanaan adalah anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun berkenaan.
3. Fungsi Pengawasan adalah anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
4. Fungsi Alokasi adalah anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi Distribusi adalah anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi Stabilitas adalah anggaran Pemerintah Daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus APBD yang pelaksanaannya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah telah menyampaikan pertanggungjawaban yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Dalam Periode Tahun 2016-2020, arah kebijakan Pendapatan Daerah Kota Makassar diarahkan pada:

1. Arah Kebijakan Peningkatan Pendapatan Daerah (PAD)
 - a. Optimalisasi Penerimaan PAD melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang sah
 - b. Upaya Normatif berupa pembuatan peraturan daerah maupun peraturan Walikota terhadap sumber-sumber pendapatan tertentu, dalam rangka penguatan landasan hukum dalam pengelolaan pendapatan daerah
 - c. Upaya Kelembagaan berupa kerja sama antar instansi internal Pemerintah Kota dalam melakukan penyamaan basis data terpadu melalui Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)

- d. Peningkatan Kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak melalui implementasi kebijakan laskar pajak dalam melakukan pendampingan pada Wajib Pajak agar tepat waktu serta jumlah terhadap pajak yang disetorkan ke kas daerah
- e. Peningkatan kapasitas SDM Pengelola Pendapatan melalui pendidikan dan pelatihan teknis pendapatan daerah

2. Arah Kebijakan Peningkatan Dana Perimbangan

- a. Peningkatan Koordinasi dan perhitungan lebih intensif bersama dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- b. Peningkatan koordinasi dalam upaya peningkatan Dana Bagi Hasil dengan Pihak Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan proporsi realisasi belanja.

Tabel 3.12 | Analisis Proporsi Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

Tahun	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Belanja Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Persentase (%)
2016	1.265.416.038.170	3.517.976.634.662	35,97
2017	992.802.177.373	3.317.413.710.052	29,93
2018	984.940.957.967	3.526.081.002.897	27,93
2019	1.016.693.100.943	3.602.123.220.749	28,22
2020	1.176.839.033.927	3.008.270.709.340	39,12

Sumber: Data Perda Pertanggungjawaban APBD Kota Makassar Tahun 2016 – 2020

Dari tabel 3.12 dapat dilihat bahwa rata-rata pertumbuhan realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur adalah 0,84% dimana dari belanja tidak langsung mengalami peningkatan rata-rata 4,60% dan belanja langsung mengalami peningkatan rata-rata 3,13%. Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir secara umum mengalami penurunan. Belanja pemenuhan kebutuhan aparatur diantaranya meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai, Belanja Modal untuk kendaraan dinas operasional termasuk diantaranya kendaraan untuk pengelolaan persampahan, serta peralatan dan perlengkapan kantor yang menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Di masa yang akan datang perlu disusun efisiensi anggaran Belanja Aparatur yang ideal dan ditunjang dengan pengaturan tambahan penghasilan dengan sistem yang semakin baik, sehingga dapat meningkatkan motivasi kerja dan sekaligus didapat penghematan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan aparatur yang kemudian digunakan untuk menyediakan utilitas perkotaan bagi kepentingan publik antara lain berupa sarana dan prasarana jalan, jembatan, saluran drainase, dan lain-lain.

3.2.2 Analisis Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Jika pendapatan daerah lebih kecil daripada belanja daerah, maka terjadi defisit yang harus ditutup oleh pembiayaan penerimaan daerah. Sebaliknya jika pendapatan daerah lebih besar dari belanja daerah maka akan terjadi surplus. Analisis pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Defisit Riil adalah realisasi pendapatan daerah dikurangi realisasi belanja daerah ditambah dengan pengeluaran pembiayaan daerah. Defisit riil APBD Pemerintah Kota Makassar selama kurun waktu tahun 2016 s.d 2020 tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.13 | Defisit Riil Anggaran Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Pendapatan Daerah	3.546.650.155.445	3.416.355.218.701	3.428.479.729.163	3.666.359.990.155	3.362.146.992.169
Belanja Daerah	3.278.340.966.083	3.313.623.623.887	3.526.081.002.897	3.549.123.220.749	3.008.270.709.340
Surplus (Defisit)	268.309.189.362	102.731.594.814	(97.601.273.734)	117.236.769.406	353.876.282.830
Penerimaan Pembiayaan Daerah	144.735.329.987	173.412.430.771	272.358.289.419	174.757.265.685	238.994.035.091
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	239.635.668.579	3.790.086.165	-	53.000.000.000	-
Pembiayaan Netto	(94.900.338.592)	169.622.344.606	272.358.289.419	121.757.265.685	238.994.035.091
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	173.408.850.771	272.353.939.419	174.757.015.685	238.994.035.091	592.870.317.920

Sumber: Data Perda Pertanggungjawaban APBD Kota Makassar Tahun 2016 – 2020

Dari tabel 3.13 di atas dapat dilihat bahwa realisasi antara pendapatan dan belanja daerah mengalami surplus pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, kecuali pada tahun 2018 yang mengalami defisit. Defisit yang timbul dari selisih antara realisasi pendapatan dan belanja daerah ditutupi dengan Pembiayaan Neto sehingga menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Berkenaan.

Tabel 3.14 | Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	144.731.959.987	173.408.850.771	272.353.939.419	174.757.015.685	238.994.035.091
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-
Penerimaan Pembayaran ASKES	-	-	-	-	-
Penerimaan Pembayaran Pihak ke III	-	-	-	-	-
Penerimaan Piutang Pihak ke III	-	-	-	-	-
Penerimaan kembali Pinjaman Modal/ Dana Bergulir	3.370.000	3.580.000	4.350.000	250.000	-
Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	144.735.329.987	173.412.430.771	272.358.289.419	174.757.265.685	238.994.035.091

Sumber: Data Perda Pertanggungjawaban APBD Kota Makassar Tahun 2016 – 2020

Dari tabel 3.14 terlihat bahwa dari kurun waktu tahun 2016 s.d 2020 Realisasi Penerimaan Pembiayaan terjadi kecenderungan peningkatan setiap tahunnya. Realisasi Penerimaan Pembiayaan dari Tahun 2016 s.d. 2020 diantaranya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya dengan rata-rata peningkatan sebesar 19,45% dan Penerimaan kembali Pinjaman Modal/Dana Bergulir dengan rata-rata peningkatan sebesar 41,63%.

Tabel 3.15 | Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2016 – 2020 Kota Makassar

URAIAN	TAHUN									
	2016	% dari SiLPA	2017	% dari SiLPA	2018	% dari SiLPA	2019	% dari SiLPA	2020	% dari SiLPA
Jumlah SiLPA	173.408.850.771	100	272.353.939.419	100	174.757.015.685	100	238.994.035.091	100	592.870.317.920	100
Pelampauan penerimaan PAD		-		-		-		-		-
Pelampauan penerimaan dana perimbangan		-		-		-		-		-
Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah		-	65.371.534.066	24		-		-		-
Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	173.408.850.771	100	206.982.405.353	76	174.757.015.685	100	238.994.035.091	100	592.870.317.920	100
Kewajiban kpd pihak ketiga sampai dgn akhir tahun blm terselesaikan		-		-		-		-		-
Kegiatan lanjutan		-		-		-		-		-

Sumber: Data Perda Pertanggungjawaban APBD Kota Makassar Tahun 2016 – 2020

Pada Tabel 3.15 realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Berkenaan Kota Makassar Periode Tahun 2016 – 2020 cenderung mengalami peningkatan khususnya pada Tahun 2020 sehubungan dengan adanya pandemi Covid-19 yang mempengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2020. Pada tahun berikutnya diperlukan monitoring dan evaluasi secara periodik atas capaian realisasi Belanja pada masing-masing SKPD dan Unit Kerja agar penyerapan anggaran dapat semakin optimal pada tahun-tahun yang akan datang sehingga nilai SiLPA di akhir tahun anggaran diharapkan berada pada posisi yang ideal sebagai sumber pembiayaan untuk Belanja Daerah pada awal tahun anggaran berikutnya.

3.3 KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2021 – 2026

Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional. Selain itu, penyusunan kerangka pendanaan ini dimaksudkan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas proses penyusunan rencana kerja daerah.

Analisis kerangka pendanaan selama pandemi Covid-19, pemerintah Kota Makassar mengalokasikan dana APBD pada setiap OPD untuk penanganan dan pencegahan penyebaran virus Covid-19 yang dilanjutkan dengan pemulihan ekonomi.

Dalam menyusun analisis kerangka Pendanaan tersebut diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi. Dalam melakukan analisis pengelolaan keuangan daerah, terlebih dahulu dilakukan analisis mengenai pendapatan daerah yang dilakukan dengan kerangka pemikiran sebagaimana disajikan pada gambar berikut.

Gambar 3.4 | Analisis Proyeksi Pendapatan



Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

3.3.1 Asumsi Ekonomi, Sosial dan Fiskal

Asumsi makro ekonomi daerah Kota Makassar mempunyai peran dan nilai yang strategis sebagai Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, yang dapat memberikan efek secara multi dimensi kepada semua elemen penghidupan masyarakat.

Namun, dengan adanya pandemi Covid-19, menyebabkan dampak negatif terhadap sektor-sektor perekonomian di Kota Makassar. Untuk mencegah perekonomian semakin terpuruk, pemerintah Kota Makassar akan menyiapkan sejumlah kebijakan dan upaya agar dunia usaha dan industri kecil menengah tetap bertahan dan semakin membaik. Adanya pandemi Covid-19 mengakibatkan asumsi-asumsi ekonomi makro mengalami penyesuaian, termasuk pendapatan

Proyeksi pendapatan dan belanja daerah didasarkan atas asumsi makro ekonomi daerah tahun 2021-2026. Ketiga asumsi ini memiliki korelasi secara langsung dan secara tidak langsung pada keuangan daerah ke depan, baik dari sisi pendapatan daerah maupun belanja daerah. Artinya, asumsi tersebut, selain akan menuntun proyeksi besaran pendapatan daerah, juga akan menentukan besarnya kebutuhan belanja daerah untuk jangka waktu lima tahun ke depan.

Tabel 3.16 | Asumsi Indikator Makro Ekonomi Tahun 2022 - 2026 Kota Makassar

URAIAN	TAHUN				
	2022	2023	2024	2025	2026
Tingkat pengangguran terbuka (%)	12,50%	11,50%	11%	10,50%	10%
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,00	4,90	5,80	6,70	7,60
PDRB Per Kapita (Juta)	125,4	131,3	137,3	143,35	149,45
PDRB HB (Triliun)	197,7	211,3	227,8	247,6	271,4
PDRB HK (Triliun)	129,6	135,9	143,8	153,5	165,1
Inflasi (%)	2,10	2,00	2,00	1,95	1,85
Gini Ratio	0,395	0,392	0,39	0,388	0,386

Sumber: Data hasil proyeksi, 2021

Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

Memasuki tahun 2019 yakni kondisi dimana Kota Makassar sebelum terpapar pandemi Covid-19, angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Makassar mencapai 10,39 persen. Akan tetapi di tahun 2020 pasca merebaknya pandemi Covid-19, angka TPT Kota Makassar naik cukup signifikan menjadi 15,92 persen, seiring dengan meningkatnya angka PHK dan pengangguran. Hal ini tentunya dapat menjadi asumsi dalam menentukan TPT Kota Makassar di tahun mendatang. Di tengah kondisi perekonomian yang tidak menentu, tentu menurunkan angka TPT bukanlah hal yang mudah, namun angka TPT di tahun 2022 diupayakan dapat terkoreksi menjadi 10,31%. Selanjutnya angka TPT dari tahun ke tahun diproyeksikan menurun sebesar 0,5% hingga 1%, dari tahun 2023 sampai 2026, dimana pada akhir periode RPJDM TPT Kota Makassar diharapkan berada pada angka 7,81%. Hal ini diasumsikan bahwa terjadi transformasi perbaikan kesehatan masyarakat di tengah pandemi Covid-19, sehingga perekonomian juga secara perlahan kembali membaik dan membawa dampak baik bagi penurunan angka TPT di Kota Makassar. Untuk itu, diharapkan dengan adanya perbaikan penghidupan sosial dan ekonomi yang baik, mampu menurunkan TPT yang lebih progresif dari tahun ke tahun, sehingga memasuki tahun kelima tepatnya pada tahun 2026, angka TPT ditargetkan berada diangka 7,81%.

Pertumbuhan Ekonomi (%)

Untuk proyeksi pertumbuhan ekonomi Kota Makassar untuk 5 (lima) tahun dapat dikatakan merupakan tantangan bagi pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19. Di satu sisi, pemerintah harus mampu menjaga stabilitas ekonomi masyarakatnya, di tengah kondisi yang tidak menentu ini. Belajar dari tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kota Makassar mengalami kontraksi cukup tajam, dengan pertumbuhan -1,27%, untuk itu pertumbuhan ekonomi daerah Kota Makassar dalam lima tahun ke depan diharapkan dapat berangsur-angsur tumbuh positif, dengan pelonggaran kembali pembatasan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.

Upaya ini, tentunya juga sejalan dengan penegakan keprotokol kesehatan yang baik serta berjalannya program vaksinasi oleh pemerintah pusat, sehingga diharapkan nantinya proses tatanan kehidupan dan aktivitas masyarakat secara bertahap dapat berjalan normal kembali. Dengan optimisme tersebut diharapkan untuk tahun 2022 proyeksi pertumbuhan ekonomi Kota Makassar bertumbuh sebesar 4%, dengan asumsi bahwa kondisi penanganan pandemi Covid-19 di Kota Makassar jauh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Di awal tahun 2021, tampak aktivitas ekonomi masyarakat mulai berjalan kembali, meski belum sepenuhnya normal. Hal ini menjadi gambaran untuk tahun 2022 bahwa perekonomian Kota Makassar terlihat sudah mulai bergerak secara perlahan dan diyakini akan lebih baik dibandingkan dengan tahun 2021. Sejalan dengan tahun 2023, dimana pertumbuhan ekonomi Makassar diproyeksi naik sebesar 4,9%, dengan asumsi bahwa sektor-sektor penggerak ekonomi Makassar telah kembali pulih, misalnya sektor perdagangan sudah mulai berjalan kembali. Demikian halnya untuk sektor konstruksi, akomodasi, makan minum dan komunikasi yang juga punya peran besar bagi pertumbuhan ekonomi Kota Makassar. Memasuki tahun 2024 proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8%. Hal ini didasarkan pada kondisi ekonomi kota Makassar sudah mulai berangsur pulih, sehingga sektor-sektor penggerak ekonomi kota Makassar juga ikut bergerak secara impresif. Untuk tahun 2025 sampai tahun 2026 diproyeksikan bertumbuh pada angka normal, yakni mencapai angka 6,7% untuk tahun 2025 dan 7,6% untuk tahun 2026.

PDRB Per Kapita

Memasuki masa pandemi Covid-19, memicu anjloknya pertumbuhan PDRB per kapita Kota Makassar yang terjadi ditahun 2020, sehingga memicu penurunan daya beli masyarakat sebagai akibat dari perlambatan ekonomi. Pandemi Covid-19 yang mendisrupsi aktivitas ekonomi Kota Makassar berdampak besar terhadap PDRB per kapita Kota Makassar, dimana pada tahun 2020 menyentuh angka 115,4 juta rupiah. Hal ini tentunya menggambarkan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di Kota Makassar, yang notabene lebih rendah setelah pandemi berlangsung. Hal ini menjadi akan menjadi tantangan dalam menggerakkan kembali PDRB per kapita Kota Makassar ke depannya. Akan tetapi, seiring dengan dibukanya kembali aktivitas perekonomian, maka PDRB per kapita Kota Makassar diproyeksikan kembali bergerak ke angka yang lebih baik. Ditahun 2022 PDRB per kapita Kota Makassar diproyeksikan bertumbuh diangka 125,4 juta rupiah. Hal ini didasarkan pada asumsi kebijakan penanganan kesehatan masyarakat dan pemulihan ekonomi nasional, ikut menggerakkan perekonomian kota ini, sehingga akan lebih baik dari tahun 2020 dan 2021. Sedangkan proyeksi PDRB per kapita Kota Makassar ditahun 2023 hingga 2026 diproyeksi terus bertumbuh dari tahun ke tahun, seiring dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Kota Makassar yang digambarkan membaik secara perlahan dari waktu ke waktu, dimana pada akhir periode RPJMD diharapkan mencapai 149,45 juta.

PDRB ADHB (Triliun)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB Kota Makassar juga ikut berkontraksi pasca pandemi Covid-19 berlangsung di kota ini. Jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari kegiatan perekonomian di Kota Makassar ikut terpukul oleh pandemi ini. Hal ini tentunya menjadi gambaran dalam menyusun basis asumsi untuk memproyeksi (PDRB) ADHB Kota Makassar, dengan memperhitungkan proyeksi variabel inflasi yang terjadi di Kota Makassar ke depannya. Di tahun 2022 (PDRB) ADHB Kota Makassar diproyeksi bertumbuh diangka 197,7 triliun, dan pada tahun 2026, pada akhir periode RPJMD diproyeksi naik menjadi 271,4 triliun. Pertumbuhan PDRB berbanding lurus dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi, dengan mempertimbangkan variabel inflasi yang terjadi. Jika pemerintah Kota Makassar mampu mengendalikan inflasi dengan baik ke depannya, maka PDRB ADHB Kota

Makassar diasumsikan akan bertumbuh lebih akseleratif dari tahun ke tahun. Di tengah situasi yang tidak menentu pasca pandemi Covid-19, menjadi tantangan tersendiri ke depannya untuk meningkatkan akumulasi nilai tambah barang dan jasa di kota ini. Di saat yang sama, pemerintah Kota Makassar juga perlu menjaga tekanan inflasi yang terjadi dimasa-masa mendatang. Selain itu, peningkatan pendapatan dan menjaga pertumbuhan konsumsi rumah tangga, juga ikut menjadi kunci dari proses ini. Untuk itu, pertumbuhan (PDRB) ADHB Kota Makassar ke depannya, sangat bergantung dari proses tersebut.

PDRB ADHK (Triliun)

Tren pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK juga mengalami penurunan pasca pandemi Covid-19. Meningkatkan nilai tambah barang dan jasa di Kota Makassar ke depannya, membutuhkan kerja keras dan upaya kolektif pemerintah, mengingat sektor-sektor penggerak utama Kota Makassar, banyak mengalami pertumbuhan minus. Akan tetapi, dengan adanya kebijakan *economic recovery* pemerintah Kota Makassar, dengan terbukanya kembali kran-kran produksi dan aktivitas ekonomi lainnya dipercaya akan ikut berkontribusi meningkatkan (PDRB) ADHK kota ini ke depannya. Di tahun 2022, angka (PDRB) ADHK bertumbuh diangka 129,6 triliun rupiah dan pada tahun 2023 angka ini diproyeksi dapat meningkat menjadi sebesar 135,9 rupiah. Mengingat roda perekonomian Kota Makassar diperkirakan akan lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana pemerintah semakin adaptif dan lebih progres menangani pandemi yang terjadi, serta diharapkan pemerintah mampu menggerakkan sektor-sektor pertumbuhan andalan yang selama ini ikut terpukul pasca pandemi Covid-19 di kota ini. Hingga akhirnya pada tahun kelima, tepatnya ditahun 2026 angka (PDRB) ADHK diproyeksi akan lebih tinggi jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yakni sebesar 165,1 triliun rupiah. Angka ini jauh lebih optimis dibandingkan tahun sebelumnya, dengan asumsi bahwa performa perekonomian telah berangsur kembali normal, sehingga aktivitas sosial ekonomi masyarakat juga semakin menggeliat.

Inflasi (%)

Memasuki triwulan pertama tahun 2020, pandemi Covid-19 mulai merebak. Situasi ini cukup menghambat perekonomian secara keseluruhan. Inflasi tahunan di Kota Makassar justru menunjukkan tren penurunan hingga triwulan ke empat. Hal ini merupakan imbas dari pandemi Covid-19. Dimana hal ini menjadi gambaran untuk memproyeksi inflasi dimasa-masa mendatang bahwa pandemi Covid-19 berkontribusi terhadap inflasi yang terjadi di kota Makassar, ditahun 2022 angka inflasi di proyeksi mencapai 2,10. Hal ini berdasarkan pada asumsi bahwa pemerintah dari tahun ke tahun cukup mampu mengendalikan inflasi di Kota Makassar, meskipun di tengah pandemi. Berdasarkan pada kondisi sebelum dan sesudah pandemi, inflasi Kota Makassar mampu diturunkan dari angka 2,43% tahun 2019 dan menurun menjadi 2,13% di tahun 2020. Hal ini menandakan pemerintah cukup mampu berkoordinasi dalam menurunkan tingkat inflasi. Untuk itu, hal ini menjadi optimisme bagi pemerintah untuk menargetkan penurunan angka inflasi sebesar 2,10 di tahun 2022, dan tren itu terus diupayakan berlanjut dari tahun 2026. Namun demikian, angka inflasi ini pada umumnya bersifat fluktuatif mengingat tekanan inflasi hampir terjadi di setiap tahun. Tekanan inflasi hampir terjadi di tiap triwulan ke empat, yang diakibatkan momentum hari raya natal dan masa transisi menuju tahun baru. Untuk itu ditahun 2026 angka inflasi ditargetkan berada di kisaran 1,85% untuk menjaga daya beli masyarakat. Pada sisi konsumsi, diangka tersebut diasumsikan harga-harga tetap terkendali di Kota Makassar dan memastikan membaiknya daya beli masyarakat di tahun-tahun mendatang. Pada sisi produsen, para produsen dapat mendapatkan laba yang lebih baik, sehingga angka inflasi tersebut diasumsikan cukup relevan bagi perekonomian, baik dari sisi konsumen maupun produsen. Untuk itu Pemerintah Kota

Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan, perlu melakukan konsolidasi secara rutin, utamanya dalam meningkatkan kapasitas produksi dan memperhatikan kelancaran distribusi barang dari daerah penyangga, sehingga inflasi di kota ini dapat dikendalikan.

Gini Ratio

Menurunkan angka gini rasio memang tidak mudah karena hal ini bertujuan untuk memperkecil kesenjangan antara pendapatan orang miskin dan orang kaya di Kota Makassar. Sebagai gambaran, sebelum pandemi Covid-19 terjadi di Kota Makassar, tingkat gini rasio sebesar 0,390 pada tahun 2019, menunjukkan ketimpangan pendapatan relatif semakin melebar dibandingkan Provinsi Sulawesi Selatan, bahkan nasional. Hingga tahun 2019, ketika gini ratio Kota Makassar naik, gini rasio provinsi dan nasional turun masing-masing menjadi 0,389 dan 0,382. Namun pasca pandemi Covid-19 merebak di Kota Makassar, angka gini rasio kota ini menembus angka 0,40 ditahun 2020. Dengan demikian, terjadi kenaikan gini rasio sebesar 0,1 sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. Dengan demikian, tingkat ketimpangan semakin melebar pasca pandemi terjadi, sehingga momentum ini akan menjadi tantangan ke depannya untuk menurunkan angka gini rasio. Kondisi tersebut, dapat menjadi dasar untuk menargetkan penurunan angka gini rasio ditahun mendatang. Ditahun 2022 angka gini rasio ditargetkan menurun sebesar 0,395 dengan asumsi bahwa di tengah perbaikan ekonomi yang berlangsung secara bertahap, terus membaik dari waktu ke waktu. Sementara, ditahun 2023 hingga 2026 angka gini rasio ditargetkan menurun pada kisaran 0,002 setiap tahunnya. Dengan asumsi bahwa pemerintah Kota Makassar mampu memperkuat ekonomi Kota Makassar dengan pertumbuhan yang lebih impresif dan inklusif. Perekonomian Kota Makassar diharapkan tidak hanya dinikmati manfaatnya oleh segelintir kelompok masyarakat, dengan, agenda pembangunan ke depan harusnya tidak lagi berfokus pada kuantitas pertumbuhan ekonomi, tapi mulai mengedepankan kualitas (distribusi pendapatan)

Beberapa indikator makro ekonomi yang disebutkan di atas bukan saja akan sangat berpengaruh terhadap proporsi Belanja Daerah, namun lebih jauh diharapkan mampu menjadi daya ungkit dalam memberikan *impact* peningkatan pada kapasitas fiskal daerah serta memberikan *domino effect* kepada aktivitas perekonomian secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Tabel 3.17 | Asumsi Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2022 – 2026 Kota Makassar

URAIAN	2022	2023	2024	2025	2026
Pertumbuhan PAD	-0,35	10,69	12,19	13,54	16,09
Pertumbuhan Dana Perimbangan	-2,49	0,90	0,92	0,94	0,96
Pertumbuhan Dana Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pertumbuhan Dana Alokasi Umum	-3,20	1,20	1,23	1,25	1,28
Pertumbuhan Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Data hasil proyeksi, 2021

Pada Tabel 3.17 Asumsi Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Kota Makassar pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar diproyeksikan dapat tumbuh kembali sejalan dengan perbaikan kondisi dan jalannya aktivitas perekonomian di Kota Makassar. Untuk itu pada Tahun 2021 pertumbuhan PAD Kota Makassar sekiranya dapat tumbuh 47,39 % mengingat pada kondisi di Tahun 2020 Pada sektor PAD mengalami penurunan 36% dari Target Pokok Pendapatan.

Selanjutnya untuk di tahun 2023 – 2026, pertumbuhan PAD Kota Makassar akan ditargetkan dapat dengan tren positif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 13,13%.

3.3.2 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

3.3.2.1 Pendapatan

Dengan melihat Performa pada Pendapatan Daerah Kota Makassar Tahun 2016 – 2020, diharapkan pada masa akan datang performa Pendapatan Daerah Kota Makassar memiliki Performa yang maksimal dari segi potensi, Penetapan Target hingga Realisasi dengan catatan ada upaya yang konkret mengenai sistem dan regulasi dalam mencapai target dan realisasi dalam 5 (lima) tahun ke depan nantinya. Kebijakan pendapatan daerah diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan pada sektor Pendapatan Asli Daerah yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi, hasil-hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sektor Pendapatan Transfer yang meliputi transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah serta pada sektor Lain –lain pendapatan yang sah meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan yang sah.

Selanjutnya, analisis untuk mengidentifikasi proyeksi pendapatan daerah. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun ke depan. Analisis dilakukan berdasarkan pada data dan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah, antara lain: (1) Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu; (2) Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi); (3) Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah; dan (4) Kebijakan di bidang keuangan negara.

Seperti yang disajikan sebelumnya pada Tabel 3.2 rata-rata pertumbuhan pada Pendapatan Daerah pada periodik Tahun 2016-2020 mengalami perlambatan dan berada diangka -1,17%. Tentunya berbicara Pendapatan Daerah jika dilihat sisi kapasitas fiskal daerah, Pendapatan asli daerah menjadi salah satu sumber utama penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Besar dan atau kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dapat meningkatkan atau mengurangi ketergantungan pusat. Kinerja Rata-rata pertumbuhan pendapatan asli daerah Kota Makassar secara akumulatif menunjukkan di tren positif pada sisi akumulatif pada rata-rata pertumbuhan akan tetapi pada sisi Target Penerimaan dan realisasi tidak menunjukkan performa yang cukup memuaskan dalam tahunan dan tentunya penerimaan pendapatan asli daerah akan sangat berpengaruh dengan kebijakan belanja yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam mencapai tujuan pembangunan.

Dengan melihat Performa Pendapatan Daerah Kota Makassar Tahun 2016 – 2020, pada masa yang akan datang tentunya harapan Pemerintah Kota Makassar dapat meningkat lebih tinggi dalam sisi rencana hingga realisasi nantinya dengan catatan perlu dilakukan berbagai upaya-upaya yang konkret untuk dapat mencapai performa yang terbaik dalam sisi Perencanaan Pendapatan Daerah. Kebijakan Pendapatan Daerah dari sisi kewenangan daerah nantinya diarahkan kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah serta Pendapatan Transfer Pusat pada Dana Perimbangan khususnya dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, sebagai berikut :

1. Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah;
3. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;

4. Meningkatkan koordinasi dalam peningkatan pendapatan daerah dengan instansi/lembaga terkait di tingkat kota dan provinsi;
5. Menyusun strategi optimalisasi pengelolaan piutang pajak daerah, melalui inventarisasi piutang pajak daerah. Piutang pajak yang terdapat unsur kesalahan administrasi dilakukan koreksi akuntansi, piutang pajak yang memenuhi syarat penghapusan piutang pajak dilakukan penghapusan piutang pajak, dan piutang pajak yang wajib pajaknya dapat ditelusuri dilakukan upaya penagihan;
6. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah;
7. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;
8. Meningkatkan dan pengembangan aset pemerintah daerah secara profesional;
9. Meningkatkan koordinasi dan perhitungan lebih intensif, bersama antara pusat dan daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan dari dana perimbangan dan non perimbangan.

Tabel 3.18 | Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2022 – 2026 Kota Makassar

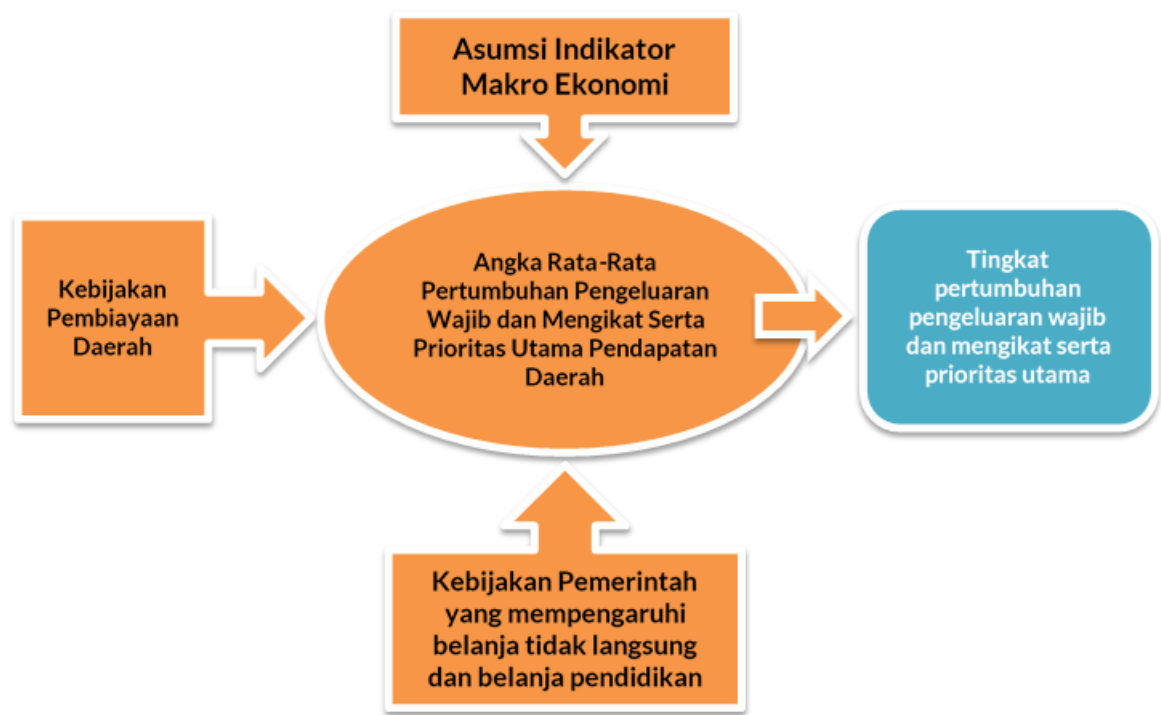
No.	URAIAN	TAHUN				
		2022	2023	2024	2025	2026
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		4.069.838.878.500	4.270.603.326.576	4.563.020.804.903	4.905.416.386.289	5.361.403.327.326
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.840.064.535.500	2.025.675.565.996	2.302.436.558.903	2.628.662.524.289	3.067.956.457.326
111	Pajak daerah	1.435.757.294.000	1.636.763.315.160	1.882.277.812.434	2.183.442.262.423	2.576.461.869.660
112	Retribusi daerah	179.041.982.500	172.832.950.833	198.757.893.458	230.559.156.411	272.059.804.565
113	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	88.098.282.000	74.871.308.003	75.972.995.011	64.829.688.455	65.002.829.101
114	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	137.166.977.000	141.207.992.000	145.427.858.000	149.831.417.000	154.431.954.000
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.047.368.943.000	2.062.522.360.580	2.078.178.846.000	2.094.348.462.000	2.111.041.470.000
12.1	Transfer Pemerintah Pusat	1.690.912.943.000	1.706.066.360.580	1.721.722.846.000	1.737.892.462.000	1.754.585.470.000
12.11	Dana Perimbangan	1.690.912.943.000	1.706.066.360.580	1.721.722.846.000	1.737.892.462.000	1.754.585.470.000
12.111	Dana Transfer Umum	1.357.950.937.000	1.373.104.354.580	1.388.760.840.000	1.404.930.456.000	1.421.623.464.000
12.1111	Dana Bagi Hasil	100.280.058.000	100.280.058.000	100.280.058.000	100.280.058.000	100.280.058.000
12.1112	Dana Alokasi Umum	1.257.670.879.000	1.272.824.296.580	1.288.480.782.000	1.304.650.398.000	1.321.343.406.000
12.112	Dana Transfer Khusus	332.962.006.000	332.962.006.000	332.962.006.000	332.962.006.000	332.962.006.000
12.112.1	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	63.569.083.000	63.569.083.000	63.569.083.000	63.569.083.000	63.569.083.000
12.112.2	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	269.392.923.000	269.392.923.000	269.392.923.000	269.392.923.000	269.392.923.000
12.12	Dana Insentif Daerah (DID)					
12.13	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-
12.14	Dana Keistimewaan	-	-	-	-	-
12.15	Dana Desa/Dana Kelurahan	-	-	-	-	-
12.2	Transfer Antar-Daerah	356.456.000.000	356.456.000.000	356.456.000.000	356.456.000.000	356.456.000.000
12.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	324.200.000.000	324.200.000.000	324.200.000.000	324.200.000.000	324.200.000.000
12.2.2	Bantuan Keuangan	32.256.000.000	32.256.000.000	32.256.000.000	32.256.000.000	32.256.000.000
1.3	LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	182.405.400.000	182.405.400.000	182.405.400.000	182.405.400.000	182.405.400.000
13.1	Hibah	36.000.000.000	36.000.000.000	36.000.000.000	36.000.000.000	36.000.000.000
13.2	Dana darurat	-	-	-	-	-
13.3	Lain Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	146.405.400.000	146.405.400.000	146.405.400.000	146.405.400.000	146.405.400.000

Sumber: Data Hasil Kajian Potensi Pendapatan, 2021

3.3.2.2 Belanja

Analisis mengenai belanja daerah, didasarkan pada kondisi perekonomian yang digambarkan melalui serangkaian asumsi indikator makro ekonomi, juga mengacu pada kebijakan pemerintah, serta mempertimbangkan kebijakan pembiayaan daerah, yang kemudian diformulasikan sehingga diperoleh angka rata-rata pertumbuhan pengeluaran wajib, dan mengikat, serta prioritas utama. Dari rata-rata tersebut, akan diperoleh tingkat pertumbuhan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama, yang digunakan sebagai gambaran dasar untuk memperhitungkan bagian dari belanja daerah yang harus dipenuhi di masa yang akan datang, sebagaimana gambar berikut.

Gambar 3.5 | Analisis Proyeksi Belanja Daerah



Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Proyeksi Belanja Daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pada Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Dalam menentukan proyeksi belanja dilakukan berdasarkan metode yang berbeda untuk setiap jenis belanja, sebagai berikut:

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi di rinci atas jenis:
 - Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kompensasi yang dimaksud diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan / anggota DPRD, dan Pegawai ASN. Kebijakan Belanja Pegawai dianggarkan pada SKPD bersangkutan sebagai bentuk pemenuhan kinerja yang dihasilkan, selain itu kebijakan belanja Pegawai ASN dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
 - Belanja barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga. Kebijakan Belanja

Barang dan Jasa dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan SKPD diselenggarakan untuk sebesar-besarnya kemanfaatan masyarakat.

- Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman. Kebijakan Belanja Bunga diberikan dalam bentuk belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi.
 - Belanja Subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Kebijakan Belanja Subsidi diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas.
 - Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan Belanja Hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Kebijakan Belanja Bantuan Sosial bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.
2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja Modal di rinci atas jenis:
- Belanja Modal Tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Kebijakan Belanja Modal Tanah ditujukan dalam pemenuhan infrastruktur pembangunan Pemerintah Kota Makassar dan disesuaikan dengan pengadaan barang milik daerah
 - Belanja Modal Peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Kebijakan Belanja Modal Peralatan dan Mesin menunjang pemenuhan kebutuhan operasional pemerintahan.
 - Belanja Modal Gedung dan Pemerintahan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam

kondisi siap dipakai. Kebijakan Belanja Modal Gedung dan Pemerintahan ditujukan dalam pembangunan infrastruktur Pemerintah Kota Makassar, terutama dalam pemenuhan pelayanan kepada masyarakat.

- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Air digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Kebijakan Belanja jalan, irigasi dan jaringan air ditujukan dalam pemenuhan infrastruktur pembangunan Pemerintah Kota Makassar.
 - Belanja Aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Kebijakan Belanja aset tetap lainnya ditujukan dalam pemenuhan belanja aset pemerintah Kota Makassar yang perlu dianggarkan di luar kebutuhan belanja modal aset tetap.
 - Belanja Modal Aset tidak berwujud digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap. Kebijakan Belanja Modal Aset tidak berwujud harus disajikan di pos aset lainnya sesuai nilai tercatatnya.
3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Kebijakan belanja tidak terduga dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan
 4. Belanja Transfer terdiri merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja Transfer dirinci atas:
 - Belanja bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota, yang terdiri dari hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, hasil penerimaan Pajak Rokok dan hasil penerimaan Pajak Air Permukaan.
 - Belanja Bantuan Keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Belanja Daerah Kota Makassar diarahkan untuk memenuhi kebutuhan Belanja wajib dan serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Belanja Prioritas dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah serta belanja penyelenggaraan urusan pemerintah lainnya dengan arah kebijakan, sebagai berikut:

1. Mengupayakan atau membelanjakan Sumber Daya Daerah yang lebih efisien, efektif, dan optimal dalam rangka mencapai tujuan pembangunan ;
2. Penganggaran belanja langsung diprioritaskan untuk menunjang pelayanan dasar masyarakat;

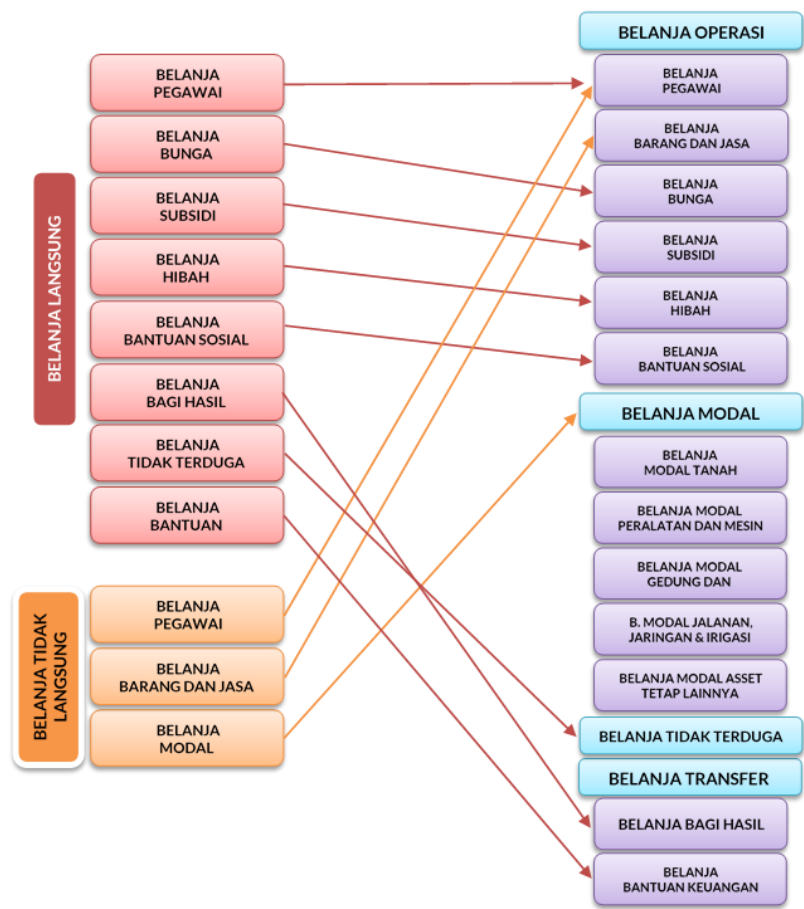
3. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan dalam upaya memenuhi kewajiban daerah;

4. efisiensi pengeluaran belanja yang bersifat umum dalam kegiatan pada masing-masing perangkat daerah;

5. Melakukan analisis mengenai kesesuaian program dan kegiatan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dengan pertimbangan manfaat yang akan didapatkan bagi masyarakat.

Pada Klasifikasi Belanja Daerah terdahulu sebagaimana pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana di ubah terakhir pada Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa Belanja Menurut kelompok dibagi atas 2 (dua) yang terdiri atas : Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan Program dan kegiatan sedangkan kelompok pada belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan Pelaksanaan Program dan kegiatan. Dengan berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta efektifnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Klasifikasi Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja tidak terduga dan Belanja Transfer. Tentu dengan perubahan klasifikasi dan atau kelompok Belanja Daerah yang disesuaikan dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku yang dimaksud, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menyusun dokumen Perencanaan Tahunan (RKPD) dan 5 (lima) tahunan (RPJMD) agar dapat berkewajiban memedomani hal tersebut.

Gambar 3.6 | Pemetaan Klasifikasi / Belanja Daerah



Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

Pada gambar 3.6 dapat dijelaskan untuk Pemetaan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut :

1. Pemetaan Belanja Pegawai ditempatkan dalam sub kegiatan Gaji dan Tunjangan ASN , Sub Kegiatan gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD.
2. Pemetaan Belanja bunga ditempatkan dalam sub kegiatan Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah. Pemetaan belanja subsidi ditempatkan dalam pada sub kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi.
3. Pemetaan belanja hibah berupa uang ditempatkan dalam sub kegiatan di masing-masing SKPD sesuai dengan kewenangannya yang salah satu pencapaian outputnya melalui pemberian hibah berupa uang.
4. Pemetaan belanja Bantuan Sosial terencana berupa uang ditempatkan dalam sub kegiatan di masing-masing SKPD sesuai dengan kewenangannya yang salah satu pencapaian outputnya melalui pemberian bantuan sosial berupa uang. Pemetaan belanja Bantuan Sosial tidak terencana berupa uang ditempatkan dalam belanja tidak terduga pada sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan mendesak.
5. Pemetaan belanja Bantuan Keuangan pada kelompok belanja tidak langsung ditempatkan dalam sub kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Umum.
6. Pemetaan belanja tidak terduga pada kelompok belanja tidak langsung dipetakan pada sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak.
7. Pemetaan belanja Dana Bagi Hasil pada kelompok belanja tidak langsung ditempatkan dalam sub kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi/Kabupaten/Kota.

Tabel 3.19 | Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2022 - 2026 Kota Makassar

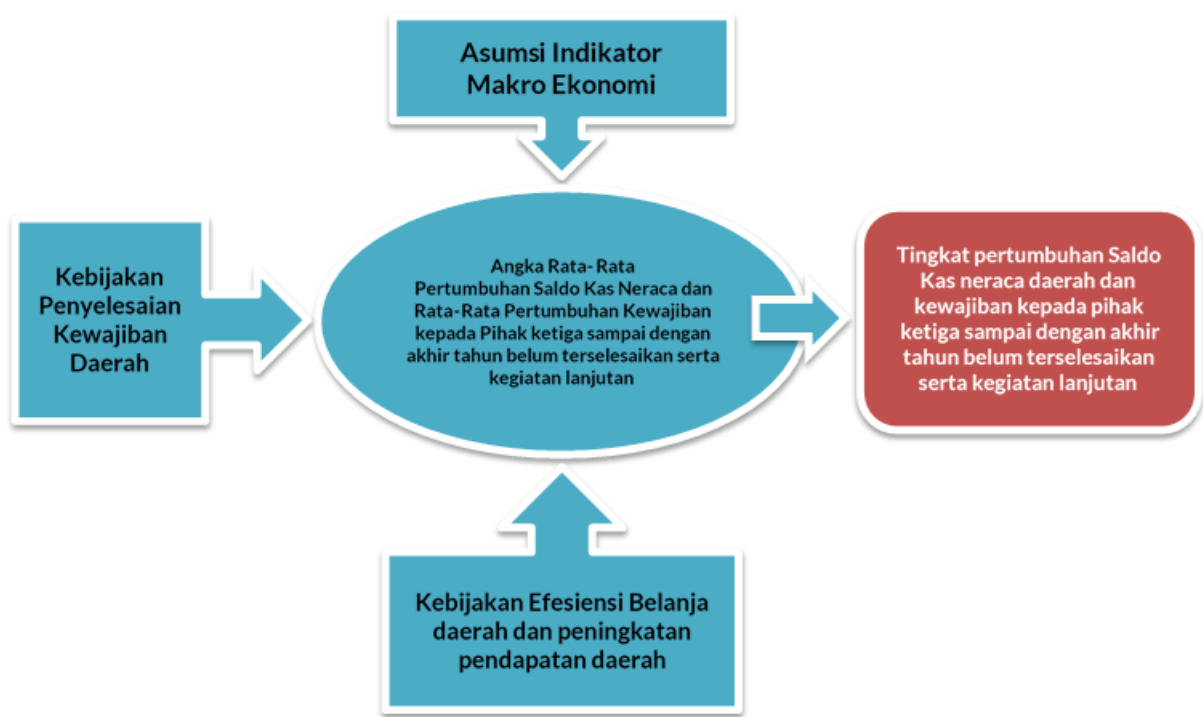
No.	URAIAN	TAHUN				
		2022	2023	2024	2025	2026
JUMLAH BELANJA DAERAH		4.212.338.878.500	4.370.603.326.576	4.613.020.805.415	4.955.416.386.452	5.411.403.327.451
2.1	BELANJA OPERASI	3.282.996.151.270	3.314.349.046.576	3.406.766.525.415	3.539.162.106.452	3.581.741.718.346
2.11	Belanja Pegawai	1.469.293.450.175	1.483.024.251.721	1.509.978.103.214	1.514.700.868.259	1.535.776.775.000
2.12	Belanja Barang dan Jasa	1.705.890.980.420	1.716.805.143.855	1.756.748.915.000	1.788.633.470.725	1.844.348.915.611
2.13	Belanja Bunga	0	0	0	0	0
2.14	Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
2.15	Belanja Hibah	107.041.720.675	113.749.651.000	139.269.507.201	235.057.767.468	200.846.027.735
2.16	Belanja Bantuan Sosial	770.000.000	770.000.000	770.000.000	770.000.000	770.000.000
2.2	BELANJA MODAL	829.342.727.230	1.006.254.280.000	1.156.254.280.000	1.366.254.280.000	1.779.661.609.105
2.2.1	Belanja Modal Tanah	0	0	0	0	0
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0	0	0
2.2.3	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	0	0	0	0	0
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Air	0	0	0	0	0
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0	0
2.2.6	Belanja Aset Tidak Berwujud	0	0	0	0	0
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	100.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
2.4	BELANJA TRANSFER	0	0	0	0	0
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	0	0	0	0	0
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	0	0	0	0	0

Sumber: Data Hasil Kajian Belanja Daerah, 2021

3.3.2.3 Pembiayaan

Proyeksi Pembiayaan Tahun 2021-2026 Dalam menganalisis pembiayaan daerah, didasarkan pada kondisi perekonomian di lapangan yang ditunjukkan melalui asumsi indikator makro ekonomi, juga mengacu pada kebijakan penyelesaian kewajiban daerah. Selain itu, juga perlu memperhatikan kebijakan efisiensi belanja daerah dan peningkatan pendapatan daerah, sebagai komponen pembentuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Dari rumusan tersebut, akan diperoleh angka rata-rata pertumbuhan kewajiban kepada pihak ketiga yang belum terselesaikan, serta kegiatan lanjutan yang harus diselesaikan, juga dapat dilihat angka pertumbuhannya sebagai gambaran besaran kewajiban yang harus diselesaikan di masa yang akan datang.

Gambar 3.7 | Analisis Proyeksi Pembiayaan Daerah



Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Tabel 3.20 | Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2022 – 2026 Kota Makassar

No	URAIAN	TAHUN				
		2022	2023	2024	2025	2026
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	150.000.000.000	100.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.500.000.000	-	-	-	-
PEMBIAYAAN NETTO		142.500.000.000	100.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000

Sumber: Data Hasil Kajian, 2021

3.3.3 Perhitungan Kerangka Pendanaan Tahun 2022 – 2026

Hasil perhitungan proyeksi pendapatan, perhitungan proyeksi sisa lebih perhitungan anggaran, perhitungan proyeksi belanja tidak langsung dan perhitungan proyeksi pengeluaran pembiayaan dapat diproyeksikan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah pada tahun 2021-2026 untuk mendanai pembangunan Kota Makassar.

Berdasarkan Perda No.1 tahun 2021 tentang Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023 bahwa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai 3 kelompok prioritas sebagai berikut :

Prioritas Pertama untuk membiayai belanja wajib yang ketentuannya diatur dalam perundang-undangan, antara lain : Belanja fungsi Pendidikan, Belanja fungsi Kesehatan, Belanja infrastruktur, belanja moda transportasi, dan belanja yang bersumber dari pajak rokok. Sedangkan, belanja mengikat (*Mandatory Expenditure*), digunakan untuk: Belanja pegawai, belanja JKN, Belanja DAK BOS, Belanja Operasional Kantor, dan Belanja Fungsional.

Prioritas Kedua untuk memenuhi belanja dalam rangka menjalankan visi misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

Prioritas Ketiga untuk membiayai prioritas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Lainnya.

Adapun proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kota Makassar Periode Tahun 2021-2026, tersajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.21 | Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2022 – 2026 Kota Makassar

NO	URAIAN	PROYEKSI				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Pendapatan	4.069.838.878.500	4.270.603.325.996	4.563.020.804.903	4.905.416.386.290	5.361.403.327.326
2	Pencairan Dana Cadangan (sesuai perda)	-	-	-	-	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	150.000.000.000	100.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
Total Penerimaan		4.219.838.878.500	4.370.603.325.996	4.613.020.804.903	4.955.416.386.290	5.411.403.327.326
	Dikurangi					
4	Pengeluaran Pembiayaan	7.500.000.000				
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	4.212.338.878.500	4.370.603.325.996	4.613.020.804.903	4.955.416.386.290	5.411.403.327.326

Sumber: Data Hasil Kajian, 2021

Tabel 3.22 | Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2022 – 2026 Kota Makassar

NO	URAIAN	PROYEKSI				
		2022	2023	2024	2025	2026
	KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH	4.212.338.878.500	4.370.603.325.996	4.613.020.804.903	4.955.416.386.290	5.411.403.327.326
1	PRIORITAS I	2.286.250.099.467	2.269.136.345.378	2.336.918.984.658	2.399.309.195.363	2.497.183.996.334
2	PRIORITAS II	1.474.723.757.134	1.530.131.535.892	1.615.000.969.620	1.734.872.355.274	1.894.511.642.208
3	PRIORITAS III	451.365.021.899	571.335.444.726	661.100.850.625	821.234.835.653	1.019.707.688.784

Sumber: Data Hasil Kajian, 2021

3.3.4 Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pendapatan Tahun 2020

Adanya pandemi Covid-19 memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor sehingga perekonomian terpuruk, selain itu pendapatan asli daerah juga mengalami penurunan. Kurangnya pendapatan ini menghambat pembiayaan atau belanja kegiatan, sehingga pembayaran pajak perlu dioptimalkan.

Pada APBD tahun 2020 telah ditetapkan target pendapatan asli daerah sebesar Rp.1.144.166.180.881 dan terealisasi sebesar Rp. 1.116.813.2.66.836.

IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, yang dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal. Data dan fakta yang dipaparkan pada bab Gambaran Umum Kondisi Daerah menunjukkan sejumlah persoalan yang belum terselesaikan pada periode perencanaan sebelumnya dan menjadi bagian dari permasalahan pembangunan daerah yang akan diselesaikan pada pelaksanaan RPJMD Tahun 2021 – 2026.

4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1.1 Permasalahan Pembangunan Untuk Penentuan Prioritas Daerah

Permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dirumuskan dengan menggunakan tiga tingkatan masalah, yaitu masalah pokok, masalah, dan akar masalah. Masalah pokok adalah masalah yang bersifat makro bagi daerah, dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan, dan sasaran. Sementara masalah adalah uraian atas beberapa penyebab dari munculnya masalah pokok, yang dipecahkan melalui rumusan strategi. Tingkatan terakhir yaitu akar masalah yang merupakan uraian yang lebih rinci dari penyebab masalah dan dipecahkan melalui arah kebijakan. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional atau provinsi yang bersifat mandatory. Adapun permasalahan pembangunan daerah di Kota Makassar yang terkait dengan prioritas dan sasaran pembangunan adalah:

1. Belum Maksimalnya Tata Kelola Pemerintahan
2. Menurunnya Pertumbuhan Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19
3. Naiknya Angka Kemiskinan
4. Bertambahnya Jumlah Pengangguran
5. Naiknya Tingkat Ketimpangan Pendapatan Masyarakat
6. Terbatasnya Ketersediaan Infrastruktur Perkotaan

Permasalahan pembangunan daerah di Kota Makassar dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1.1.1 Belum Maksimalnya Tata Kelola Pemerintahan

Penyelenggaraan pelayanan publik dan pemerintahan di Kota Makassar sejatinya telah berjalan cukup baik, ditandai dengan diraihnya beberapa penghargaan seperti Parasamya Purnakarya Nugraha di tahun 2019 dan Top Inovasi Pelayanan Publik di tahun 2018. Namun demikian masih terdapat beberapa area pelayanan publik lainnya yang memerlukan peningkatan diantaranya adalah pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi yang pada tahun 2020 berada pada kategori B dengan nilai 63,23 pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan belum terdapat perbaikan yang signifikan dalam penerapan agenda reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Makassar. Beberapa catatan penting terkait pelaksanaan tata kelola

birokrasi di Kota Makassar berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan reformasi birokrasi belum sepenuhnya optimal baik di tingkat Pemda maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
- 2) Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 belum tersusun;
- 3) Kemampuan asesor Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Makassar masih rendah;
- 4) Penerapan E-Government di lingkungan Pemerintah Kota Makassar belum terintegrasi sepenuhnya;
- 5) Pengelolaan sistem manajemen SDM belum berjalan optimal, antara lain assessment pegawai belum dilakukan secara menyeluruh, evaluasi jabatan belum berdasarkan standar kompetensi jabatan.

Sementara itu pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pemerintahan atau akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Makassar masih berada pada predikat B yang ditandai dengan nilai SAKIP sebesar 68,82 pada tahun 2020, atau naik sedikit dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 68,69. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Makassar masih belum akseleratif sebagaimana yang diharapkan. Masih banyak catatan pada komponen penyusunan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja maupun evaluasi internal yang belum berjalan maksimal.

Pada dimensi kepuasan masyarakat terhadap pemberian pelayanan publik, Pemerintah Kota Makassar masih berada pada kategori baik yaitu berdasarkan pencapaian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2020 sebesar 77,66 atau mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 77,74. Dalam kurun lima tahun terakhir nilai IKM Pemerintah Kota Makassar berada pada rentang 74 s.d 77 atau bergerak dari mutu layanan C atau kurang baik (65,00 - 76,60) ke mutu layanan B atau baik (76,61 - 88,30). Masih diperlukan lompatan yang akseleratif untuk mencapai mutu layanan A atau sangat baik di rentang interval (88,31 - 100,00).

Aspek keuangan daerah juga memunculkan beberapa permasalahan pembangunan utamanya pada pengelolaan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum optimal. Pada tahun 2020, rasio PAD terhadap total Pendapatan Daerah sebesar 33,18 persen atau sedikit menurun dari tahun sebelumnya yaitu 35,55 persen. Terjadinya pandemi Covid-19 memberikan dampak yang cukup signifikan pada pencapaian PAD selama tahun 2020, utamanya pada penarikan pajak-pajak daerah pada sektor yang terkena dampak langsung dari pembatasan mobilitas warga seperti pajak perhotelan dan pajak restoran. Sebagai gambaran, realisasi pajak daerah pada tahun 2020 adalah sebesar Rp.864,31 Miliar atau menurun sebesar 19,02 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp.1,06 Triliun. Permasalahan-permasalahan pembangunan tersebut dipicu oleh beberapa akar masalah, seperti yang bisa dideskripsikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1 | Pemetaan Permasalahan Belum Maksimalnya Tata Kelola Pemerintahan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum maksimalnya tata kelola pemerintahan	Belum optimalnya pelaksanaan agenda reformasi birokrasi	Belum tersusunnya Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024
		Masih rendahnya kemampuan asesor Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Makassar
		Belum optimalnya pengelolaan sistem manajemen SDM aparatur
		Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pemberian layanan publik
	Masih rendahnya akuntabilitas kinerja	Belum maksimalnya penyusunan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja maupun evaluasi internal
		Masih rendahnya budaya manajemen kinerja, utamanya aspek pemantauan dan evaluasi pencapaian target kinerja
	Masih rendahnya kemandirian keuangan daerah	Masih rendahnya realisasi PAD
		Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan PAD
		Belum optimalnya penggalian potensi-potensi PAD yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah
		Belum optimalnya kinerja perusahaan daerah dalam memberikan dividen ke Pemerintah Kota Makassar

4.1.1.2 Menurunnya Pertumbuhan Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19

Terjadinya pandemi covid-19 sejak awal tahun 2020 telah membawa pengaruh yang fundamental terhadap perekonomian Kota Makassar. Kinerja pertumbuhan ekonomi yang impresif beberapa tahun sebelumnya di rentang 7,55 s.d 8,79 persen kemudian berkontraksi cukup dalam sebesar 1,27 pada tahun 2020. Angka ini walaupun masih lebih baik dari perekonomian nasional yang berkontraksi 2,07 persen, tetapi masih di bawah perekonomian Sulawesi Selatan yang hanya berkontraksi sebesar 0,7 persen di tahun yang sama.

Menurunnya pertumbuhan ekonomi Kota Makassar pada tahun 2020 terutama dikontribusi oleh beberapa lapangan usaha yang secara substansial menurun kinerjanya akibat terbatasnya mobilitas orang dan barang selama terjadinya pandemi. Dari sisi lapangan usaha, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 19,83 persen. Kontraksi yang cukup dalam juga terjadi pada lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 17,34 persen, diikuti oleh lapangan usaha Jasa Lainnya sebesar 13,42 persen dan lapangan usaha Jasa Perusahaan sebesar 11,39 persen. Sementara itu, sektor Industri Pengolahan dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran yang selama ini secara konsisten menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi Kota Makassar juga mengalami pertumbuhan negatif yaitu masing-masing sebesar 4,22 persen dan 5,43 persen.

Hal tersebut di atas terkonfirmasi dengan banyaknya usaha di sektor perhotelan, hiburan, maupun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang harus tutup atau melakukan pengurangan tenaga kerja secara signifikan. Ekonomi daerah yang berkontraksi kemudian mempengaruhi aspek-aspek perekonomian daerah lainnya seperti naiknya tingkat kemiskinan dan bertambahnya jumlah pengangguran. Oleh sebab itu, pemulihan ekonomi menjadi permasalahan daerah yang sentral yang diharapkan sejalan dengan upaya pemulihan kesehatan masyarakat sebagai akibat terjadinya pandemi covid-19.

Tabel 4.2 | Pemetaan Permasalahan Melambatnya Pertumbuhan Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Melambatnya pertumbuhan ekonomi akibat pandemi covid-19	Terkontraksinya aktivitas ekonomi pada sejumlah lapangan usaha	Terkontraksinya lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
		Terkontraksinya lapangan usaha Penyediaan Transportasi dan Pergudangan
		Terkontraksinya lapangan usaha Jasa Lainnya
		Terkontraksinya lapangan usaha Jasa Perusahaan
		Terkontraksinya lapangan usaha Industri Pengolahan
		Terkontraksinya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran

4.1.1.3 Naiknya Angka Kemiskinan

Berdasarkan data BPS pada tahun 2020, angka kemiskinan Kota Makassar mengalami peningkatan dari 4,28 persen menjadi 4,54 persen. Jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Sulawesi Selatan (8,99 persen) maupun tingkat kemiskinan nasional (10,19 persen), tingkat kemiskinan di Kota Makassar secara relatif masih lebih baik. Walaupun demikian, jumlah penduduk miskin di Kota Makassar tidak pernah berkurang secara signifikan walaupun tingkat pertumbuhan ekonomi secara konsisten naik sebelum terjadinya pandemi. Hal ini menandakan pertumbuhan ekonomi yang dicapai selama ini belum cukup inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat pada kategori kelompok miskin. Salah satu faktor utama yang menyebabkan masih tingginya angka kemiskinan adalah kualitas sumber daya manusia di kelompok penduduk miskin masih rendah, baik yang terkait dengan kualitas hidup di bidang kesehatan dan pendidikan maupun kualitas keterampilan berusaha yang dimiliki. Terjadinya pandemi covid-19 juga menjadi faktor utama terhadap naiknya angka kemiskinan di Kota Makassar.

Selain itu, masih banyak permasalahan yang terjadi pada implementasi program penanganan kemiskinan yang belum berjalan efektif. Upaya penanganan kemiskinan sejatinya membutuhkan keterlibatan multipihak dan koordinasi lintas sektor. Namun yang masih sering terjadi adalah tumpang tindihnya program pengentasan kemiskinan, tidak tersedianya database tunggal kemiskinan, hingga integrasi kebijakan yang belum efektif. Salah satu gambaran dari belum efektifnya koordinasi program pengentasan kemiskinan adalah munculnya sejumlah masalah ketika dilakukan pemberian bantuan sosial terhadap warga miskin saat terjadinya pembatasan sosial di Kota Makassar. Sejumlah warga tidak menerima bantuan sementara di sisi lain ada sekelompok warga yang tidak berhak namun tetap menerima bantuan dari pemerintah.

Tabel 4.3 | Pemetaan Permasalahan Naiknya Angka Kemiskinan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Naiknya angka kemiskinan	Belum inklusifnya pertumbuhan ekonomi daerah	Masih rendahnya kualitas manusia penduduk miskin
		Menurunnya aktivitas ekonomi akibat pandemi
	Belum efektifnya program penanganan kemiskinan	Tumpang tindihnya pendataan dan program penanganan kemiskinan
		Masih lemahnya koordinasi lintas sektor yang terlibat

4.1.1.4 Bertambahnya Jumlah Pengangguran

Masih tingginya jumlah pengangguran telah menjadi permasalahan mendasar di Kota Makassar bahkan sebelum terjadinya pandemi covid-19. Dalam rentang waktu 2016-2019 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Makassar selalu di atas dua digit atau di rentang 10,39 s.d 12,19 persen. Jika dibandingkan dengan posisi relatif Kota Makassar terhadap Provinsi Sulawesi Selatan (6,31 persen) dan Nasional (7,07 persen), angka TPT Kota Makassar cukup tinggi dan kembali mengkonfirmasi bahwa ada permasalahan pada dimensi kualitas dari pertumbuhan ekonomi yang cukup baik selama ini. Pertumbuhan ekonomi yang secara konsisten naik ternyata tidak mampu menyediakan kesempatan kerja yang cukup di Kota Makassar.

Salah satu penyebab masih tingginya angka pengangguran di Kota Makassar adalah masih rendahnya tingkat pendidikan dan kompetensi angkatan kerja. Selain itu *link and match* antara kebutuhan dunia industri dan penyediaan pendidikan bagi tenaga kerja masih rendah. Hal ini ditandai dengan jumlah penganggur terdidik di Kota Makassar yang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penganggur yang berpendidikan rendah. Selain itu, posisi sentral Kota Makassar sebagai pusat aktivitas bisnis dan perekonomian tidak hanya di Sulawesi Selatan tetapi juga di Kawasan Timur Indonesia (KTI), menjadikan kota ini sebagai tujuan bagi para pencari kerja yang berasal dari kawasan sekitarnya. Jumlah angkatan kerja di Kota Makassar terus naik selama beberapa tahun terakhir dan mencapai angka 585 ribu di tahun 2020 yang lalu. Pandemi covid-19 semakin meningkatkan jumlah pengangguran di Kota Makassar, dimana berdasarkan catatan Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar lebih dari 9 ribu tenaga kerja dirumahkan dan ratusan perusahaan harus tutup sementara maupun permanen.

Tabel 4.4 | Pemetaan Permasalahan Bertambahnya Jumlah Pengangguran

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Bertambahnya jumlah pengangguran	Belum maksimalnya penyerapan tenaga kerja	Rendahnya tingkat pendidikan dan kompetensi angkatan kerja
		Rendahnya Link and match antara kebutuhan dunia industri dan pendidikan tenaga kerja
		Tingginya angka urbanisasi pencari kerja dengan tingkat kualifikasi yang rendah
		Belum efektifnya penciptaan lapangan kerja baru yang berbasis kewirausahaan
		Belum optimalnya pengelolaan destinasi pariwisata lokal

4.1.1.5 Naiknya Tingkat Ketimpangan Pendapatan Masyarakat

Sebelum terjadinya pandemi covid-19, tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat di Kota Makassar, yang diukur dengan Indeks Gini, senantiasa lebih rendah jika dibandingkan dengan Indeks Gini Provinsi Sulawesi Selatan. Namun untuk tahun 2020, Indeks Gini Makassar mencapai 0,400 atau lebih tinggi dari Indeks Gini Provinsi Sulawesi Selatan yaitu sebesar 0,389 maupun Indeks Gini Nasional yaitu sebesar 0,381. Seperti halnya beberapa permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, naiknya ketimpangan pendapatan masyarakat menunjukkan dua hal penting yaitu : 1) pertumbuhan ekonomi Kota Makassar belum cukup inklusif untuk mencapai perbaikan-perbaikan capaian indikator-indikator makro perekonomian lainnya; dan 2) pandemi covid-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap menurunnya kinerja perekonomian di daerah.

Masih tingginya ketimpangan pendapatan di Kota Makassar dipengaruhi oleh masih lebih tingginya aktivitas perekonomian pada kegiatan ekonomi yang padat modal dibandingkan

dengan sektor-sektor yang menyerap lebih banyak tenaga kerja. Walaupun nilai PDRB per kapita di Kota Makassar relatif cukup tinggi yaitu mencapai Rp.115 juta pada tahun 2020, distribusi pendapatan masih belum merata dan lebih banyak dinikmati oleh segelintir penduduk saja. Hal ini menegaskan bahwa pembangunan yang inklusif harus menjadi fokus utama bagi Pemerintah Kota Makassar ke depannya.

Tabel 4.5 | Pemetaan Permasalahan Naiknya Tingkat Ketimpangan Masyarakat

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Naiknya tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat	Belum meratanya distribusi pendapatan masyarakat	Kegiatan ekonomi lebih dominan pada sektor padat modal
		Belum optimalnya realisasi investasi

4.1.1.6 Terbatasnya Ketersediaan Infrastruktur Perkotaan

Ketersediaan infrastruktur perkotaan di Kota Makassar masih mengalami sejumlah keterbatasan, diantaranya yaitu masih rendahnya jumlah jalan yang berkualitas baik. Hal ini disebabkan karena jumlah jalan yang memiliki fasilitas penunjang seperti trotoar dan saluran drainase masih rendah yaitu hanya sebesar 40,28 persen. Dalam lima tahun terakhir juga tidak terjadi penambahan jalan baru, sehingga total keseluruhan jalan yang di bawah kewenangan Pemerintah Kota Makassar hanya berjumlah 1.593,46 km. Selain itu, dibanyak lokasi masih banyak ditemukan fasilitas pejalan kaki yang dialih fungsikan menjadi lokasi berjualan oleh pedagang kaki lima.

Masalah lain yang terkait dengan terbatasnya ketersediaan infrastruktur perkotaan adalah belum tersedianya sistem transportasi massal yang efektif. Moda transportasi massal yang beroperasi di Kota Makassar saat ini hanyalah Bus Rapid Transit (BRT) Mamminasata yang berada di bawah kendali Pemprov Sulawesi Selatan dan PT. Damri. Pemerintah Kota belum memiliki unit kerja yang secara khusus menangani persoalan transportasi publik di wilayah Kota Makassar.

Selain permasalahan jalan dan transportasi publik, ketersediaan air minum yang sesuai standar masih menjadi permasalahan bagi kota yang terus bertumbuh seperti Kota Makassar. Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, pada tahun 2020 jumlah penduduk yang memiliki akses terhadap air minum yang terlindung adalah sebesar 1.074.339 jiwa dari jumlah keseluruhan 1.484.912 penduduk, atau 72,35 persen. Hal ini berarti ada lebih dari 1/4 penduduk yang belum memiliki akses terhadap air bersih. Masih tingginya tingkat kebocoran pada sistem perpipaan PDAM berkorelasi langsung terhadap rendahnya aksesibilitas warga terhadap pemanfaatan air bersih.

Menurunnya kemampuan fasilitas pengolahan persampahan juga menjadi permasalahan pembangunan yang terkait dengan terbatasnya ketersediaan infrastruktur perkotaan. Pada saat tengah terus meningkatnya jumlah sampah yang dihasilkan masyarakat, jumlah timbulan sampah yang tertangani terus menurun dalam beberapa tahun terakhir, yaitu dari 92,02 persen pada tahun 2018 menjadi 67,36 persen pada tahun 2020. Begitu juga dengan jumlah sampah yang dikurangi melalui kegiatan 3R (*Reuse, Reduce, and Recycle*) terus menurun, dari 958,87 ton pada tahun 2018 menjadi 579,16 ton pada tahun 2020. Sementara itu, pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayah Kota Makassar juga belum berjalan

Tabel 4.6 | Pemetaan Permasalahan Terbatasnya Ketersediaan Infrastruktur Perkotaan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Terbatasnya ketersediaan Infrastruktur perkotaan	Masih rendahnya jumlah jalan yang berkualitas baik	Masih rendahnya jalan yang memiliki trotoar dan saluran drainase
		Tidak adanya pembangunan jalanan baru
		Tingginya alih fungsi pedestrian menjadi lokasi usaha pedagang kaki lima
	Belum tersedianya sistem transportasi massal yang efektif	Belum adanya unit kerja yang khusus menangani transportasi publik
		Belum tersusunnya perencanaan transportasi massal perkotaan berbasis rel
		Rendahnya penggunaan kendaraan umum
	Masih rendahnya tingkat ketersediaan air minum	Belum adanya dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Minum (RISPAM)
		Rendahnya penambahan jaringan perpipaan baru
		Masih tingginya tingkat kebocoran sistem perpipaan PDAM
	Menurunnya kemampuan fasilitas pengolahan sampah	Meningkatnya volume sampah yang dihasilkan masyarakat
		Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah
		Sistem pengolahan sampah menjadi energi listrik belum berjalan

4.1.2 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

4.1.2.1 Pendidikan

- 1. Rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- 2. Masih rendahnya Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SMP/MTs;
- 3. Meningkatnya Angka Putus Sekolah (APS) jenjang SMP/MTs;
- 4. Masih ada bangunan sekolah dalam kondisi rusak;
- 5. Belum meratanya ketersediaan sekolah di setiap kecamatan, utamanya di pulau-pulau.

4.1.2.2 Kesehatan

- 1. Masih tingginya potensi penyebaran Covid-19;
- 2. Meningkatnya Angka Kematian Ibu (AKI);
- 3. Menurunnya rasio posyandu terhadap jumlah balita yang dilayani;
- 4. Rendahnya cakupan pelayanan terhadap balita penderita pneumonia;
- 5. Rendahnya penanganan penderita penyakit TBC BTA;
- 6. Meningkatnya jumlah pasien tuberkulosis yang meninggal;
- 7. Menurunnya cakupan pelayanan ibu nifas;
- 8. Menurunnya rasio tenaga medis;
- 9. Menurunnya pertolongan persalinan oleh bidan.

4.1.2.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 1. Masih rendahnya proporsi panjang jalan dibandingkan dengan jumlah penduduk
- 2. Masih rendahnya jalan yang memiliki trotoar dan drainase yang baik
- 3. Masih rendahnya rumah tinggal yang memiliki akses layanan sanitasi
- 4. Masih rendahnya drainase dalam kondisi baik
- 5. Masih tingginya daerah yang rawan genangan

6. Masih rendahnya pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai yang rawan longsor
7. Masih rendahnya penduduk dengan akses air minum
8. Masih tingginya luas kawasan permukiman kumuh
9. Masih kurangnya fasilitas pengurangan sampah
10. Masih sangat kurangnya luas RTH Publik
11. Masih rendahnya rasio bangunan ber-IMB

4.1.2.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Masih rendahnya rasio rumah layak huni terhadap jumlah penduduk;
2. Masih tingginya persentase lingkungan pemukiman kumuh dibandingkan dengan luas wilayah Kota Makassar;
3. Meningkatkan proporsi rumah tangga kumuh perkotaan.

4.1.2.5 Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1. Masih terdapat potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
2. Terbatasnya sarana dan prasarana petugas perlindungan masyarakat;
3. Terbatasnya ketersediaan armada pemadam kebakaran;
4. Meningkatkan jumlah pelanggaran Perda.

4.1.2.6 Sosial

1. Meningkatkan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
2. Belum optimalnya pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
3. Meningkatkan jumlah penyandang disabilitas, orang dengan gangguan jiwa, serta lansia terlantar.

4.1.2.7 Tenaga Kerja

1. Meningkatkan jumlah sengketa antara pengusaha dan pekerja;
2. Menurunnya jumlah perusahaan yang berdampak pada menurunnya ketersediaan lapangan kerja;
3. Menurunnya persentase jumlah sengketa kerja yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB);
4. Menurunnya besaran pencari kerja yang ditempatkan;
5. Rendahnya besaran pekerja yang menjadi peserta program Jamsostek;
6. Masih rendahnya jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi;
7. Masih rendahnya jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat;
8. Masih rendahnya jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan;
9. Meningkatkan jumlah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pandemi;
10. Rendahnya rasio lulusan S1/S2/S3 terhadap jumlah keseluruhan penduduk.

4.1.2.8 Pemberdayaan Perempuan

1. Meningkatkan rasio kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
2. Meningkatkan kasus kekerasan pada perempuan dan anak;

3. Menurunnya cakupan layanan rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
4. Masih rendahnya cakupan layanan bantuan hukum sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

4.1.2.9 Pangan

1. Masih rendahnya ketersediaan pangan utama;
2. Menurunnya ketersediaan protein per kapita;
3. Masih rendahnya pengawasan, pengendalian dan pembinaan keamanan pangan.

4.1.2.10 Pertanian

1. Masih rendahnya luas lahan bersertifikat;
2. Menurunnya permohonan izin lokasi;
3. Belum adanya dokumen perencanaan pengadaan tanah.

4.1.2.11 Lingkungan Hidup

1. Belum tersusunnya dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
2. Belum dilaksanakannya pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan;
3. Status mutu air di kanal IP rata-rata cemar berat;
4. Menurunnya tingkat ketaatan terhadap izin lingkungan (PPLH dan PUU LH);
5. Terbatasnya jumlah Pejabat Pengawasan Lingkungan Hidup;
6. Tidak terlaksananya pelatihan masyarakat untuk pelestarian lingkungan hidup;
7. Meningkatnya jumlah aduan masyarakat terkait pemberian izin lingkungan;
8. Masih rendahnya jumlah timbulan sampah yang tertangani;
9. Masih rendahnya jumlah sampah yang dikurangi melalui pemilahan.

4.1.2.12 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Masih rendahnya rasio pasangan berakta nikah;
2. Meningkatnya jumlah perpindahan penduduk yang masuk ke wilayah Kota Makassar;
3. Belum memadainya sarana dan prasarana penunjang pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

4.1.2.13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Rendahnya jumlah LPM berprestasi;
2. Menurunnya swadaya masyarakat dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat.

4.1.2.14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Masih rendahnya jumlah perangkat daerah yang berperan aktif dalam program kampung KB;
2. Menurunnya angka rata-rata jumlah anak per keluarga;
3. Meningkatnya jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani;

4. Masih rendahnya penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
5. Terbatasnya ketersediaan Pusat Pelayanan keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan;
6. Tidak tersedianya data jumlah remaja yang terkena infeksi menular seksual;
7. Masih rendahnya keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.

4.1.2.15 Perhubungan

1. Berkurangnya jumlah angkutan perkotaan (pete-pete) yang layak;
2. Berkurangnya jumlah angkutan darat yang tersedia;
3. Menurunnya daya tampung angkutan umum sementara jumlah penumpang terus meningkat;
4. Belum akuratnya pendataan kendaraan umum perkotaan;
5. Masih rendahnya ketersediaan rambu-rambu lalu lintas;
6. Masih rendahnya rasio panjang jalan per jumlah kendaraan;
7. Masih banyaknya titik-titik kemacetan di lokasi-lokasi strategis;
8. Terbatasnya gedung parkir dan kantong parkir di lokasi-lokasi strategis.

4.1.2.16 Komunikasi dan Informatika

1. Masih rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pemberian layanan publik;
2. Terbatasnya kemampuan aparatur dalam memanfaatkan teknologi informasi.

4.1.2.17 Koperasi dan UKM

1. Masih rendahnya persentase koperasi aktif;
2. Masih rendahnya persentase BPR/LKM aktif;
3. Masih rendahnya kualitas produk yang dihasilkan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM);
4. Banyaknya UMKM yang harus tutup, baik sementara maupun permanen, akibat terjadinya pandemi.

4.1.2.18 Penanaman Modal

1. Masih rendahnya rasio daya serap tenaga kerja pada proyek investasi PMDN/PMA;
2. Tidak tersedianya peta potensi investasi;
3. Masih rendahnya koordinasi antar unit kerja yang terkait di bidang penanaman modal dan perizinan.

4.1.2.19 Kepemudaan dan Olahraga

1. Masih rendahnya cakupan pembinaan cabang olahraga;
2. Menurunnya jumlah atlet berprestasi;
3. Masih rendahnya jumlah wirausaha muda;
4. Masih rendahnya cakupan pelatih yang bersertifikat;
5. Masih rendahnya cakupan pembinaan atlet pelajar.

4.1.2.20 Statistik

1. Belum maksimalnya penyusunan dokumen statistika dari sisi waktu rilis dan kedalaman data yang disajikan.

4.1.2.21 Persandian

1. Masih rendahnya pemahaman pemerintah daerah untuk mengelola risiko keamanan informasi.

4.1.2.22 Kebudayaan

1. Minimnya penyelenggaraan festival seni dan budaya;
2. Minimnya benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan;
3. Minimnya jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi;
4. Masih rendahnya jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu.

4.1.2.23 Perpustakaan

1. Masih rendahnya rasio perpustakaan persatuan penduduk;
2. Masih rendahnya jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang bersertifikat.

4.1.2.24 Kearsipan

1. Masih rendahnya persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku;
2. Masih kurangnya SDM pengelola kearsipan.

4.1.2.25 Pariwisata

1. Menurunnya angka kunjungan wisatawan akibat pandemi;
2. Masih rendahnya rata-rata lama kunjungan wisatawan;
3. Masih rendahnya persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari kegiatan pariwisata;
4. Masih rendahnya kualitas dan daya saing destinasi pariwisata;
5. Belum optimalnya pengelolaan destinasi wisata kepulauan;
6. Masih rendahnya kualitas produk ekonomi kreatif yang dikembangkan.

4.1.2.26 Pertanian, Perikanan

1. Rendahnya kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB Kota Makassar;
2. Masih kurangnya ketersediaan bibit unggul untuk peningkatan produksi perikanan, pertanian dan peternakan;
3. Terbatasnya lahan untuk mengembangkan pertanian di wilayah perkotaan.

4.1.2.27 Perdagangan dan Perindustrian

1. Masih tingginya nilai impor barang antar daerah;
2. Rendahnya cakupan bina kelompok pengrajin industri kecil;
3. Masih rendahnya kualitas produk IKM yang dihasilkan;
4. Belum optimalnya pengendalian harga kebutuhan pokok dan upaya menjaga ketersediaannya.

4.1.2.28 Perencanaan Pembangunan

1. Belum maksimalnya perencanaan pembangunan daerah yang menggunakan pendekatan berbasis Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS);
2. Belum optimalnya ketersediaan dan akurasi data pembangunan daerah;
3. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah;
4. Masih rendahnya penguasaan teknologi informasi dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah.

4.1.2.29 Keuangan

1. Masih tingginya persentase Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA);
2. Masih rendahnya persentase belanja modal terhadap total belanja daerah;
3. Belum optimalnya penataan aset daerah;
4. Belum optimalnya realisasi PAD, khususnya yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Masih rendahnya kontribusi dividen perusahaan daerah terhadap realisasi PAD.

4.1.2.30 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

1. Masih rendahnya rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan;
2. Masih rendahnya persentase ASN yang mengikuti diklat formal dan diklat struktural.

4.1.2.31 Penelitian dan Pengembangan

1. Masih rendahnya persentase pemanfaatan hasil kelitbangan;
2. Belum tersedianya SDM fungsional peneliti maupun perekayasa sehingga pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan kajian masih bekerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian lainnya.

4.1.2.32 Pengawasan

1. Masih rendahnya persentase tindak lanjut temuan;
2. Masih tingginya jumlah dan nilai temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
3. Belum optimalnya kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);
4. Masih rendahnya peran APIP dalam koordinasi dan sinergitas bersama Aparat Penegak Hukum maupun pengawas eksternal lainnya.

4.1.2.33 Sekretariat Dewan

1. Belum tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD.

4.1.2.34 Kesatuan Bangsa dan Politik

1. Masih tingginya angka kriminalitas;
2. Meningkatnya kasus kejahatan dan kekerasan;
3. Meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang

4.2 ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokrasi. Isu strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah atau masyarakat dimasa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Penentuan isu strategis Kota Makassar dilakukan dengan mempertimbangkan permasalahan utama dan hasil telaah terhadap isu strategis global, nasional dan regional yang relevan untuk pembangunan Kota Makassar tahun 2021-2026. Faktor penting lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu-isu strategis adalah telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah. Hal tersebut bertujuan agar rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah.

4.2.1 Isu Strategis Global

4.2.1.1 Pandemi *Corona Virus Disease-2019 (Covid-19)*

Pandemi Covid-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit *corona virus 2019* di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh corona virus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah Corona Virus Disease 2019 pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau *World Health Organization* pada tanggal 11 Maret 2020. Hingga 17 Mei 2021 berdasarkan data Worldometers total kasus infeksi virus corona di seluruh dunia telah mencapai 163.694.333 kasus. Dari jumlah tersebut sebanyak 3.392.634 orang meninggal dunia dan 142.144.554 orang dinyatakan pulih. Indonesia pertama kali mengkonfirmasi kasus COVID-19 pada Senin 2 Maret 2020. Saat itu, Presiden Joko Widodo mengumumkan ada dua orang Indonesia positif terjangkit virus Corona.

Merebaknya pandemi Covid-19, memunculkan permasalahan baru bagi seluruh dunia termasuk Indonesia termasuk Kota Makassar sebagai kota jasa dan perdagangan. Kasus penyebaran covid-19 di Kota Makassar berdasarkan data terkini tanggal 20 Mei 2021 dari Dinas Kesehatan Kota Makassar konfirmasi aktif 128 orang, 29.359 orang sembuh dan meninggal sebanyak 537 orang sehingga total sebanyak 30.024 orang. Pandemi ini telah mengubah tatanan sosial ekonomi dan lingkungan. Salah satu dampak akibat covid-19 pada aspek ketenagakerjaan dimana terjadi lonjakan kasus pemutusan hubungan industrial (PHK) yang menyebabkan angka pengangguran melonjak tajam. Tercatat pada tahun 2020 perselisihan hubungan industrial sebanyak 326 kasus dan dapat diselesaikan dengan perjanjian bersama sebanyak 190 kasus. Sebanyak 108 kasus diselesaikan dengan anjuran dan 28 kasus masih dalam proses mediasi. Kondisi ini pada akhirnya berdampak pula terhadap peningkatan jumlah penduduk miskin di Kota Makassar, dimana pada tahun 2019 jumlah

penduduk miskin sebanyak 65.120 bertambah 4.860 jiwa pada tahun 2020 sehingga jumlah penduduk miskin Kota Makassar pada tahun 2020 sebesar 69.980 jiwa.

4.2.1.2 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs) menjadi agenda pembangunan global yang untuk melanjutkan upaya dan pencapaian *Millennium Development Goals* (MDGs) yang berakhir akhir pada tahun 2015. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau yang disingkat TPB adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030. TPB merupakan kesepakatan global tentang pembangunan berdasarkan hak asasi manusia yang bertujuan pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau “*No-one Left Behind*”. TPB mencakup 17 tujuan yaitu: 1) Tanpa Kemiskinan, 2) Tanpa Kelaparan, 3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera, 4) Pendidikan Berkualitas, 5) Kesenjangan Gender, 6) Air Bersih dan Sanitasi Layak, 7) Energi Bersih dan Terjangkau, 8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, 9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur, 10) Berkurangnya Kesenjangan, 11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan, 12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, 13) Penanganan Perubahan Iklim, 14) Ekosistem Lautan, 15) Ekosistem Daratan, 16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh, 17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Upaya pencapaian target TPB menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Target-target TPB/SDGs di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya. TPB sebagai penyempurnaan dari konsep sebelumnya jauh lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak negara baik negara maju maupun berkembang, memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia, inklusif dengan pelibatan. Dalam pencapaian TPB secara global terdapat 241 indikator yang kemudian diterjemahkan dan disesuaikan dengan kondisi di Indonesia, hingga terdapat total 319 indikator yang menjadi tolok ukur ketercapaian TPB di Indonesia. Tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia mengembangkan indikator TPB sebanyak 319 indikator dari 94 target/sasaran global dan 17 goals. Dari 319 indikator TPB Indonesia 21 indikator bersifat khusus untuk daerah tertentu dan 298 indikator bersifat umum, sehingga setiap daerah memiliki jumlah indikator yang berbeda sesuai dengan kewenangan dan kondisi wilayahnya. Setiap wilayah administrasi memiliki tanggung jawab untuk melakukan analisis TPB dengan jumlah indikator yang berbeda. Apabila ditelaah lebih lanjut berdasarkan pembagian kewenangannya antara pemerintah pusat dan daerah, pemerintah pusat memiliki kewenangan terhadap 303 indikator, pemerintah provinsi 235 indikator, pemerintah kabupaten 220 indikator, dan pemerintah kota 222 indikator.

Berdasarkan pembagian kewenangan tersebut terdapat 222 indikator yang menjadi kewenangan Kota Makassar. Dari 222 indikator tersebut, kemudian dikaji lebih lanjut lagi untuk melihat relevansi indikator dengan wilayah Kota Makassar. Berdasarkan buku metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia yang dikeluarkan oleh Bappenas Tahun 2017 dari 222 indikator hanya 154 indikator yang relevan dengan kewenangan Kota Makassar.

4.2.1.3 Perubahan Iklim

Berdasarkan publikasi dari World Economic Forum (WEF) yang berjudul *The Global Risks Report 2020*, melaporkan isu lingkungan adalah lima besar risiko global 2020, antara lain: cuaca ekstrem, kegagalan pencegahan perubahan iklim, kepunahan keanekaragaman hayati, dan bencana lingkungan yang disebabkan oleh manusia. Masih dalam laporan yang sama, WEF mencatat pada 2018, sekurangnya dunia kehilangan US\$165 miliar akibat disrupsi lingkungan. Informasi terbaru menyatakan bahwa iklim saat ini berpotensi menyebabkan suhu akan naik lebih dari 3 derajat di abad ini, hal tersebut merupakan kondisi yang sangat berbahaya bagi dunia secara keseluruhan. Oleh karena itu akselerasi dalam perbaikan lingkungan adalah suatu hal yang wajib dilakukan secara global. Meskipun upaya pengurangan emisi global telah mulai dilakukan sejak satu dekade terakhir tetapi hasil yang diharapkan masih belum optimal. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan oleh PBB, masih terjadi kesenjangan emisi yang signifikan antara apa yang dibutuhkan dengan apa yang dicapai. Bila ingin mencapai target 2030 maka mulai saat ini perlu mengurangi emisi sebesar 7,6% setiap tahun selama 10 tahun ke depan untuk membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat (unfoundation.org, 2020).

Untuk mengantisipasi perubahan iklim dan meminimalisasi dampaknya maka Pemerintah Kota Makassar melakukan tiga pendekatan yaitu antisipasi, adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim. Antisipasi dampak perubahan iklim dilakukan pada tataran penyusunan rencana, kebijakan dan program dengan mempertimbangkan isu dampak perubahan iklim dalam pengambilan keputusan. Pada sisi mitigasi, komitmen Pemerintah Kota Makassar tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar tahun 2015-2034, dimana dalam regulasi tersebut kesesuaian program dan kegiatan pembangunan terhadap pola ruang yang berfungsi distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya serta terhadap struktur ruang yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

Sejalan dengan itu, dari sisi adaptasi perlu pula dilakukan penguatan kapasitas kepada masyarakat baik individu maupun kelembagaan dalam menghadapi dampak perubahan iklim khususnya pada titik lokasi yang rentan. Pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tidak dapat dilakukan semata oleh Pemerintah Kota Makassar oleh karena itu diperlukan pelibatan secara aktif pihak swasta, organisasi sosial kemasyarakatan (CSO), dan pemerintah kabupaten tetangga sebagai *hinterland* Kota Makassar.

4.2.1.4 Transformasi Digital

Transformasi digital adalah merupakan penggunaan teknologi untuk mentransformasi proses analog menjadi digital. Saat ini dunia sedang memasuki era revolusi industri 4.0 yang mempengaruhi berbagai kehidupan masyarakat. Sejarah menunjukkan bahwa kemajuan teknologi pada revolusi industri 1, 2, dan 3 secara umum telah membuat hidup manusia menjadi lebih mudah dalam melakukan berbagai pekerjaan. Revolusi industri 4.0 memberikan dampak efisiensi dalam proses bisnis dan cara baru di setiap *value chain* dari suatu produk, walaupun juga menimbulkan disrupsi di berbagai industri. Revolusi Industri 4.0 kini telah masuk seiring dengan transformasi proses bisnis yang cepat ke arah ekonomi digital. Indonesia menjadi salah satu target bagi para pemain industri dunia yang tengah berebut masuk pasar Indonesia. Salah satu transformasi model bisnis di era Industri 4.0 adalah penggunaan platform *e-commerce* oleh pelaku ekonomi. Melalui *e-commerce*, segala aktivitas transaksi jual-beli barang, promosi, dan pembayaran dilakukan dengan menggunakan elektronik yang terhubung dengan internet.

E-commerce mengalami perkembangan cepat dengan kemudahan yang ditawarkan. Kecanggihan teknologi komunikasi dan informasi mampu memangkas keterbatasan sarana, jarak dan waktu antara penjual dan pembeli. Saat ini telah banyak bermunculan *startup e-commerce* dan *marketplace* yang memudahkan konsumen untuk berbelanja.

Perkembangan *e-commerce* sejatinya dapat dinikmati oleh segenap masyarakat, termasuk pelaku usaha. Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi bagian penting dalam perekonomian di Indonesia. Tahun 2020 menjadi tahun yang menantang bagi sektor UMKM sehingga perlu untuk dicari solusi-solusi yang tepat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik hanya 45 persen pelaku UMKM mampu bertahan selama 3 (tiga) bulan di masa pandemi. Sementara merujuk survei Asian Development Bank terkait dengan dampak pandemi terhadap UMKM di Indonesia, 88 persen usaha mikro kehabisan kas atau tabungan, dan lebih dari 60 persen usaha mikro kecil ini sudah mengurangi tenaga kerjanya. Percepatan transformasi digital sektor UMKM menjadi tumpuan untuk menekan jumlah pengangguran.

Perkembangan UKM Kota Makassar dari tahun 2016 – 2020 mengalami fluktuatif dengan rata - rata persentase di atas 70%. Hal ini berarti bahwa UMKM di Kota Makassar didominasi oleh Usaha Mikro dan Kecil. Jumlah usaha mikro dan kecil yang tercatat di Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar pada tahun 2020 mencapai 75,01% dari total 13.277 UKM yang ada di Kota Makassar. Pemerintah Kota Makassar memiliki strategi pengembangan digitalisasi UMKM dalam empat tahap. Tahap pertama, meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dengan mempersiapkan pelaku usaha UMKM agar kapasitasnya bisa meningkat. Kedua, mengintervensi perbaikan proses bisnis yang diturunkan ke dalam beberapa program. Ketiga, perluasan akses pasar yang bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) agar pelaku UMKM bisa menjadi vendor pengadaan barang dan jasa pemerintah. Keempat, mengglorifikasi pahlawan lokal pelaku UMKM, yaitu pelaku UMKM yang memenuhi syarat sebagai pemantik, pemberdaya, punya brand yang kuat, dan secara keseluruhan mampu mengagregasi usaha mikro dan kecil untuk berlabuh ke platform digital ataupun ke pasar internasional atau ekspor.

4.2.2 Isu Strategis Nasional

4.2.2.1 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal disusun sebagai alat Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib. Dalam penyusunan SPM ditetapkan jenis pelayanan dasar, indikator SPM dan batas waktu pencapaian SPM. Pelayanan dasar merupakan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Sedangkan jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal. Dalam melaksanakan pelayanan dasar, yang tidak kalah penting yang harus diperhatikan adalah mutu pelayanan dasar yang diberikan. Mutu pelayanan dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak. SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran dan ketepatan sasaran. Penerapan SPM didasarkan pada pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang terdiri atas: 1) Pendidikan, 2) Kesehatan, 3) Pekerjaan umum dan penataan ruang, 4) Perumahan rakyat dan kawasan permukiman, 5) Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, 6) Sosial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal telah dijelaskan bahwa target pencapaian setiap indikator adalah 100% (seratus persen), dengan 29 Jenis Pelayanan. Pencapaian SPM Bidang Pendidikan secara umum terkendala masih belum meratanya fasilitas proses belajar mengajar yang belum merata dimana masih banyak sekolah yang belum mendapat fasilitas yang memadai. Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Anak Usia Dini masih rendah ini disebabkan karena selama Pandemi Covid-19 tahun 2020 banyak Orang tua yang memiliki anak usia 4 Tahun yang seharusnya berpartisipasi dalam pendidikan PAUD, namun belum memasukkan sekolah anaknya dengan pertimbangan tertentu. Kendala pencapaian SPM Kesehatan secara umum adalah efek pandemi Covid-19 diawal tahun 2020 sampai saat ini, dimana kegiatan pencapaian SPM Sebagian besar membutuhkan kegiatan lapangan dengan melibatkan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan *surveillance* serta pelayanan kesehatan dasar. Kendala pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum diantaranya adalah tidak tersedianya lahan fasum/fasos untuk pembangunan sarana dan prasarana air bersih dan IPAL komunal serta tidak tersedianya lahan warga untuk pembangunan tangki septik individual. Kendala pencapaian SPM Bidang trantibumlinmas diantaranya adalah belum memadainya PPNS dalam penegakan Perda, belum tersedianya saran dan prasarana untuk siding Tipiring di tempat serta masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

4.2.2.2 Bonus Demografi

Indonesia saat ini telah memasuki fenomena kependudukan yang disebut bonus demografi dimana jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) proporsinya lebih dari 50 persen dibandingkan dengan kelompok usia non produktif (0-14 tahun dan > 65 tahun), hal ini memberi keuntungan ekonomi berupa percepatan pertumbuhan ekonomi karena menurunnya rasio ketergantungan. Bonus demografi menjadi peluang yang menguntungkan di daerah, diperlukan upaya serius semua pihak terutama yang menyangkut peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyiapan tenaga kerja berkualitas dan pembangunan kependudukan. Ketidakmampuan menyiapkan lapangan kerja dan peningkatan kualitas SDM seperti pendidikan yang tinggi dan pelayanan kesehatan dan gizi yang memadai, maka akan terjadi permasalahan, yaitu terjadinya pengangguran yang besar dan akan menjadi beban daerah. Jumlah penduduk usia kerja Kota Makassar tahun 2020 sebanyak 1.124.922 jiwa merupakan angkatan kerja dalam jumlah yang besar yang berpotensi meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Ketersediaan sumber daya manusia usia produktif yang melimpah tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kualitas dari sisi pendidikan dan keterampilan, termasuk kaitannya dalam menghadapi keterbukaan pasar tenaga kerja.

4.2.2.3 Kawasan Perkotaan Mamminasata

Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar selanjutnya disebut Kawasan Perkotaan Mamminasata adalah satu kesatuan kawasan perkotaan yang terdiri atas Kota Makassar sebagai kawasan perkotaan inti, Kawasan Perkotaan Maros di Kabupaten Maros, Kawasan Perkotaan Sungguminasa di Kabupaten Gowa, Kawasan Perkotaan Takalar di Kabupaten Takalar, sebagai kawasan perkotaan di sekitarnya, yang membentuk kawasan metropolitan. Pengelolaan wilayah Mamminasata diarahkan dengan upaya-upaya pemanfaatan ruang, pemanfaatan sumber daya alam dan daya dukung lingkungan secara efisien dan berdaya guna, melalui keseimbangan antar wilayah dan antar sektor serta pencegahan kerusakan fungsi dan tatanan lingkungan hidup. Mamminasata adalah kawasan metropolitan baru yang disiapkan menjadi kawasan percontohan pengembangan tata ruang terpadu. Rancangan kota ini dibangun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun

2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar. Kawasan perkotaan Mamminasata mencakup 46 (empat puluh enam) Kecamatan, dimana seluruh wilayah kota Makassar masuk di dalamnya.

Rencana struktur ruang Kawasan Perkotaan Mamminasata terdiri atas rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana. Dalam rencana sistem pusat permukiman, Kota Makassar masuk dalam Pusat Kegiatan di Kawasan Perkotaan Inti yang meliputi: pusat pemerintahan provinsi dan kota, pusat perdagangan dan jasa, pusat pelayanan Pendidikan tinggi, pusat pelayanan olahraga, pusat pelayanan kesehatan, pusat kegiatan industri manufaktur, pusat kegiatan industri perikanan, pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan barang, pusat pelayanan transportasi laut dan udara, Pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara, pusat kegiatan pariwisata, dan pusat kegiatan pertemuan, pameran dan sosial budaya. Sedangkan untuk jaringan prasarana, Makassar termasuk dalam semua jaringan prasarana, yang meliputi transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana perkotaan.

4.2.3 Isu Strategis Daerah

4.2.3.1 Isu Strategis Provinsi Sulawesi Selatan

4.2.3.1.1 Mendekatkan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat

Syarat pokok pelayanan kesehatan yang baik berkualitas adalah pelayanan kesehatan tersebut harus tersedia di masyarakat (*available*) serta bersifat berkesinambungan (*continously*). Artinya semua jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak sulit ditemukan, serta keberadaannya dimasyarakat senantiasa tersedia setiap saat bila dibutuhkan. Syarat pelayanan kesehatan yang baik lainnya adalah yang mudah dicapai (*accessible*) oleh masyarakat. Pengertian ketercapaian yang di maksud di sini terutama dari sudut lokasi. Dengan demikian untuk dapat mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik, maka kehadiran dan pengaturan distribusi sarana kesehatan yang berkualitas menjadi sangat penting. Meskipun pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin telah tersedia, belum semua penduduk miskin memanfaatkan pelayanan ini karena mereka tidak mampu menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan akibat kendala biaya, faktor jarak dan transportasi. Untuk itu dibutuhkan rumah sakit regional yang secara jarak dapat dijangkau oleh masyarakat dan memberi pelayanan kesehatan antar wilayah kabupaten/kota sehingga Kota Makassar tidak lagi selalu dijadikan rujukan dalam pelayanan kesehatan. Rumah sakit regional tersebut harus didukung SDM yang memadai, dan layanan yang ramah anak dan disabilitas.

4.2.3.1.2 Peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan harus memastikan perekonomian dapat terus bertumbuh positif. Posisi Sulawesi Selatan yang secara historis menjadi penghubung Kawasan Timur Indonesia menjadi kekuatan yang tidak dimiliki daerah lain. Namun hal tersebut tidaklah cukup, kemudahan dalam berinvestasi, pengurusan perijinan, dan kondisi yang stabil serta kondusif menjadi prasyarat utama sebuah perekonomian yang dinamis dan mendatangkan kesejahteraan bagi warganya. Kondisi Pemerintahan yang cenderung birokratis, tidak melayani, dan kaku membuat Sulawesi Selatan tidak menjadi pilihan utama untuk membuka usaha. Dalam survei tahun 2017 yang dibuat oleh lembaga penelitian *Asia Competitiveness Institute*, Sulawesi Selatan berada di Posisi ke-9 terkait kemudahan berbisnis, tertinggal dari provinsi lain seperti Jawa Timur, Jawa Barat dan DKI Jakarta. Selain kondisi ekonomi, hal lain yang juga mempengaruhi adalah faktor pendidikan dan kesehatan. Demikian juga hak atas rasa aman (perlindungan) bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk

perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan lainnya, sesuai posisi geografis Provinsi Sulawesi Selatan yang dapat menjadi rujukan wilayah lainnya di Indonesia khususnya Kawasan Timur Indonesia. Jika faktor-faktor tersebut dapat diciptakan, akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan memperkuat posisi Sulawesi Selatan sebagai pusat pertumbuhan untuk wilayah Sulawesi dan Kawasan Timur Indonesia.

4.2.3.1.3 Kualitas infrastruktur yang menunjang kegiatan perekonomian

Untuk menunjang perekonomian, dibutuhkan interkoneksi antar daerah yang ditunjang oleh Infrastruktur yang mumpuni. Saat ini di Sulawesi Selatan terdapat 109 Pelabuhan Laut dan 11 Pelabuhan Udara, namun karena kualitas yang kurang baik di kabupaten/kota lain, satu-satunya yang menjadi tumpuan untuk pertumbuhan ekonomi adalah Kota Makassar. Selain itu, keberadaan infrastruktur berkualitas di bidang sumber daya air juga masih sangat dibutuhkan, mengingat Sulawesi Selatan sampai saat ini masih menjadi provinsi yang rawan terdampak bencana banjir. Di samping itu kondisi infrastruktur jalan yang belum optimal, dimana cakupan jaringan jalan dalam kondisi baik masih rendah, sedangkan pada kondisi jalan rusak cenderung mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena ada peralihan kewenangan beberapa ruas jalan kabupaten menjadi ruas jalan provinsi dengan kondisi rusak parah yang berakibat menurunnya capaian kinerja ruas jalan provinsi secara akumulasi. Masih rendahnya persentase jalan provinsi dalam kondisi baik antara lain dikarenakan masih terdapat jalan provinsi dengan pengerasan berupa kerikil sepanjang 152,6 Km (7,59%) dan pengerasan berupa tanah sepanjang 211,52 Km (10,53%). Kondisi jalan ini terdapat di Kabupaten Pinrang, Luwu Utara, Luwu Timur, Luwu, Toraja Utara, Tana Toraja, Enrekang, Barru, Soppeng, Bone, Sinjai, dan Bulukumba. Tentunya dengan hal ini perlunya adanya penanganan terhadap jalan yang rusak ini dapat segera diperbaiki agar tidak membahayakan para pengguna jalan dan menunjang arus perekonomian antar daerah/wilayah.

4.2.3.1.4 Pemerataan Pendapatan bagi warga Sulawesi Selatan

Selain fokus terhadap pertumbuhan ekonomi, sebuah pemerintahan tidak bisa melupakan pemerataan pendapatan warganya. Pemerataan dilakukan terhadap pendapatan per kapita maupun pemerataan terhadap pembangunan wilayah. Pendapatan per kapita masyarakat Sulawesi Selatan saat ini telah meningkat mencapai 44 juta per tahunnya, tetapi jika dianalisa lebih mendalam, pendapatan ini belum dirasa oleh semua warga Sulawesi Selatan. Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS, pada tahun 2017 Sulawesi Selatan menjadi Provinsi yang memiliki ketimpangan pendapatan warga tertinggi kedua di Indonesia (0,429). Selain itu, jumlah orang miskin di Sulawesi Selatan masih cukup tinggi sebesar 9,48 % pada tahun 2016, di atas target yang ingin dicapai oleh Pemprov Sulawesi Selatan pada akhir masa periode tiga RPJPD, yaitu 6%.

4.2.3.1.5 Keberadaan Sumberdaya Manusia (SDM) yang berkualitas

Untuk mengakselerasi pembangunan, kunci utama yang harus dimiliki adalah keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Sulawesi Selatan seperti Indonesia pada umumnya, memiliki potensi pertumbuhan yang sering dinamakan oleh bonus demografi, di mana mayoritas warga berada pada usia produktif. Di Sulawesi Selatan pada tahun 2016, jumlah penduduk yang berada pada usia produktif (15-64 Tahun) berada di angka 5,6 Juta, atau 65% dari total warga Sulawesi Selatan. Data tersebut menunjukkan sebuah potensi besar dari sisi kuantitas sumber daya manusia, jika dibarengi oleh kualitas SDM tersebut. Namun IPM Sulawesi Selatan tahun 2019 berada di angka 71,66 yang artinya Sulawesi Selatan berada diperingkat 14 dibandingkan Provinsi lain di Indonesia. Lebih dalam lagi, angka rata-rata lama

sekolah di Sulawesi Selatan tahun 2019 adalah 8,26 tahun, yang artinya rata-rata anak sekolah di Sulawesi Selatan hanya bersekolah sampai sekolah menengah pertama dan menemui hambatan mengenyam sekolah menengah atas. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, laki-laki hanya sampai kelas 3 SMP sedangkan perempuan kelas 2 SMP.

4.2.3.1.6 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam

Letak geografis yang strategis dan kondisi biofisik wilayah yang mendukung menyebabkan Sulawesi Selatan memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Potensi sumber daya alam yang menjadi unggulan di Sulawesi Selatan antara lain; di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, kelautan/perikanan, pariwisata, energi dan pertambangan. Untuk sektor pangan, surplus hasil pertanian (padi/beras) selama 2 dekade terakhir memantapkan status Sulawesi selatan sebagai salah satu lumbung pangan nasional dan penghasil tanaman pangan terbesar di wilayah Indonesia Timur. Potensi sumber daya alam sektor perikanan/kelautan juga menjadi sektor unggulan Sulawesi Selatan. Komoditi unggulan untuk sektor perikanan/kelautan antara lain; ikan laut, udang tambak dan rumput laut. Produksi rumput laut Sulawesi selatan mampu memenuhi 30% dari kebutuhan nasional. Sektor pariwisata juga menjadi sektor yang perlu dioptimalkan pengelolannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Namun demikian, sumber daya alam yang dimiliki belum dimanfaatkan dan dikelola dengan baik. Hasil produksi sumber daya alam sebagian besar dikirim/ekspor dalam kondisi bahan mentah/bahan baku (belum diolah), padahal ada potensi pengolahan yang dapat memberikan nilai tambah (*added value*) dan meningkatkan pendapatan masyarakat di Sulawesi Selatan. Tantangan lain terkait sumber daya alam adalah bagaimana menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam memberikan manfaat secara ekonomi namun tetap memperhatikan kemampuan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup sehingga kelestarian lingkungan tetap terjaga. Kebijakan pembangunan ekonomi harus berjalan bersama dengan upaya menjaga kelestarian sumber daya alam sehingga pembangunan berkelanjutan dapat diwujudkan dengan menjamin akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat sumber daya alam bagi semua lapisan masyarakat, baik berdasarkan jenis kelamin, usia, status sosial, wilayah, dan kebutuhan yang berbeda.

4.2.3.1.7 Revitalisasi Paradigma pengelolaan Komoditi (Petik, Olah, Jual)

Industri merupakan salah satu komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, perlu terus dilakukan berbagai upaya strategis untuk meningkatkan daya saing industri nasional, sebagai katalis utama dalam pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Dengan demikian peningkatan nilai tambah industri lokal untuk mendorong daya saing ekonomi seharusnya menjadi salah satu fokus untuk lebih ditingkatkan. Akselerasi industrialisasi dilaksanakan melalui lima strategi utama, yaitu: 1) hilirisasi komoditi pertanian sebagai bahan mentah menjadi produk yang bernilai tambah di dalam negeri. 2) mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing industri dalam negeri. 3) mendorong partisipasi dunia usaha dalam pembangunan infrastruktur. 4) percepatan proses pengambilan keputusan untuk menyelesaikan hambatan birokrasi (*Debottlenecking*). 5) meningkatkan integrasi pasar domestik. Hilirisasi komoditi bertujuan untuk meningkatkan produksi, meningkatkan kapasitas pengolahan, dan meningkatkan kapasitas pasar. Dengan demikian akan menghasilkan nilai tambah, memperkuat struktur industri, serta menyediakan lapangan kerja dan peluang usaha. Hilirisasi komoditas yang akan dikembangkan adalah program hilirisasi berbasis sektor pertanian meliputi pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan. Dengan program hilirisasi ini diharapkan dapat mengembalikan

kejayaan Sulawesi Selatan pada sektor produksi, industri pengolahan berbasis pertanian dan keunggulan pemasaran hasil, baik untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.

4.2.3.1.8 Sulawesi Selatan sebagai poros maritim

Sulawesi Selatan sebagai provinsi yang wilayahnya berbatasan dengan laut memiliki garis pantai sepanjang 1.973,7 km serta luas wilayah laut dan pesisir kurang lebih 60.000 km² diyakini memiliki kekayaan maritim yang besar. Potensi ekonomi yang terkandung di dalam laut dan sepanjang pesisir Sulawesi Selatan bila dikelola secara bijak akan mendatangkan devisa daerah. Sulawesi Selatan memiliki pulau-pulau kecil yang tersebar dari Pangkep hingga Selayar dan sepanjang Teluk Bone yang merupakan destinasi wisata bahari yang tak kalah dengan destinasi pulau yang lain. Pembangunan infrastruktur konektivitas pendukung seperti *shortsea shipping* untuk mempercepat konektivitas antar pulau di Sulawesi Selatan. Untuk dapat menjadi poros utama pertumbuhan maritim di nusantara, Sulawesi Selatan harus membangun dan meningkatkan daya dukung sistem pelayaran, menghidupkan pelabuhan-pelabuhan perikanan yang terbengkalai di Selayar hingga Palopo, perbaikan tata kelola kepelabuhanan dan memodernisasinya sesuai standar internasional, perbaikan pelayanan dan akses di seluruh Pelabuhan yang ada. Dengan memaksimalkan hal tersebut, akan menguatkan posisi Sulawesi Selatan sebagai poros maritim dan pusat konektivitas kawasan timur Indonesia. Aspek sosial dan budaya bagi masyarakat maritim sangat diperlukan dalam mempercepat pembangunan kemaritiman secara komprehensif dan terpadu. Tantangannya adalah mengubah kebiasaan masyarakat maritim yang tertutup, berpikir sempit dan tidak berkembang menjadi masyarakat maritim yang dinamis, kreatif dan produktif sehingga taraf hidup masyarakat lebih baik tanpa meninggalkan jati dirinya sebagai masyarakat maritim dan nilai – nilai positif yang selama ini telah ada. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Sulawesi Selatan memprioritaskan proses pada sektor sosial dan budaya dalam membangun kemaritiman. Selain itu jasa kelautan merupakan salah satu sektor yang berpotensi menjadi sumber penerimaan devisa negara melalui beberapa kegiatan yang menunjang dan memperlancar kegiatan pengangkutan sebagai upaya membangun jasa kelautan yang efektif dan efisien di Sulawesi Selatan.

4.2.3.2 Isu Strategis Kota Makassar

Isu-isu Strategis pembangunan Kota Makassar merupakan kristalisasi dari permasalahan pembangunan yang dielaborasi dengan dinamika isu-isu strategis di level internasional, nasional dan regional Sulawesi Selatan. Isu Strategis merupakan jangkar sebagai pengendali, dan sekaligus sebagai petunjuk arah yang menggerakkan dan mengarahkan pembangunan Kota Makassar pada pencapaian visi pembangunan lima tahun ke depan. Ketepatan dalam perumusan Isu Strategis sangat menentukan dalam penentuan Arah Kebijakan RPJMD. Isu Strategis Kota Makassar dalam RPJMD Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut:

4.2.3.2.1 Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul

Konsep pembangunan yang berpusat pada manusia mendasari isu ini, mengingat investasi pada sumber daya manusia memiliki dampak positif yang besar dalam jangka panjang pada seluruh aspek secara berkelanjutan. Di Kota Makassar pada tahun 2020 mayoritas warganya berada pada usia produktif diangka 1,12 juta atau 75,76 % dari total jumlah penduduk. Data tersebut menunjukkan sebuah potensi yang sangat besar dari sisi kuantitas sumber daya manusia jika dibarengi oleh kualitas SDM tersebut. Peningkatan kualitas SDM menjadi hal yang sangat penting agar masyarakat Kota Makassar mampu bersaing secara global. Namun saat ini masih terkendala dengan beberapa permasalahan terkait perkembangan SDM

diantaranya masih rendahnya pelayanan pendidikan yang ditunjukkan dengan adanya fluktuasi rasio ketersediaan sekolah / penduduk usia sekolah jenjang pendidikan dasar. Untuk menjaga kualitas pendidikan di Kota Makassar diperlukan ukuran agar dapat lebih unggul dibandingkan dengan daerah lainnya berupa pengembangan kurikulum mandiri. Menyederhanakan kurikulum secara mandiri berarti sekolah berhak menentukan apa saja dan seberapa banyak materi yang diajarkan. Dengan tidak adanya kewajiban standar capaian tertentu untuk kenaikan kelas dan kelulusan, sekolah dapat mendesain kurikulumnya sendiri sesuai dengan karakteristik peserta didik dan kebutuhan. Selain itu dalam hal penyediaan infrastruktur sekolah yang ramah disabilitas masih perlu ditingkatkan. Pemerintah Kota Makassar mempunyai kewajiban memperlakukan orang berkebutuhan khusus dengan secara optimal. Penyandang disabilitas memiliki hak untuk mengenyam pendidikan hingga ke jenjang yang tinggi dengan membuka sekolah inklusi seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas yang Layak bagi Peserta Didik Disabilitas.

4.2.3.2.2 Peningkatan imunitas kesehatan

Status Kota Makassar sebagai ibukota provinsi dan pusat perekonomian menarik masyarakat untuk mencari kesempatan kerja di Kota Makassar. Hal tersebut perlu diimbangi dengan pelayanan kesehatan yang memadai untuk mengakomodasi kebutuhan jumlah penduduk yang kian bertambah. Dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia, kesehatan adalah salah satu komponen utama selain pendidikan dan pendapatan. Menjaga Kesehatan dimasa pandemi dengan pola hidup sehat menjadi sangat penting dalam melawan covid-19. Sistem imunitas atau daya tahan tubuh merupakan sistem kerja tubuh untuk melawan penyakit. Sistem ini akan melindungi tubuh dari serangan organisme atau kuman yang dapat menyebabkan penyakit. Pemerintah Kota Makassar dalam meningkatkan imunitas kesehatan di tengah pandemi covid-19 agar tetap tinggal di rumah dengan menerapkan protokol kesehatan berupa gerakan 3 M yaitu; mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Sebagai implementasi visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2021-2026 disusun sebuah inovasi yang merupakan strategi dalam penanggulangan covid-19 secara komprehensif melalui Makassar Recover.

4.2.3.2.3 Peningkatan ekonomi yang kuat

Kinerja perekonomian Kota Makassar pada tahun 2020 masih lambat dampak dari pandemi. Semua indikator ekonomi makro terkoreksi negatif di akibat pandemi Covid-19. Diperkirakan pertumbuhan ekonomi akan melambat tajam akibat terjadinya kontraksi pada sejumlah sektor ekonomi, terutama industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, penyediaan akomodasi dan makan minum, dan transportasi dan pergudangan. Padahal sebagian besar sektor ini merupakan penopang utama pertumbuhan ekonomi Kota Makassar selama ini. Pertumbuhan ekonomi yang melambat tersebut akan memberi efek lanjutan terhadap indikator ekonomi makro lainnya.

Perekonomian Kota Makassar diprediksi mulai memasuki fase pemulihan. Meski pandemi Covid-19 belum usai, namun upaya pemulihan mulai digerakkan. Pemerintah Kota Makassar mulai fokus pada beberapa perbaikan antara lain pada sektor pariwisata, usaha mikro kecil menengah, padat karya investasi. Perbaikan pada sektor tersebut menyusul adanya sejumlah pelonggaran yang dibuat untuk kembali menggerakkan aktivitas perekonomian.

4.2.3.2.4 Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah ruang terbuka hijau di perkotaan yang terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat berupa area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang Terbuka Hijau ditetapkan dengan tujuan meningkatkan mutu lingkungan perkotaan yang nyaman, segar, indah, bersih dan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan. Luasan Ruang Terbuka Hijau Kota Makassar pada tahun 2019 tercatat sebesar 7,59%, masih sangat jauh dari angka ideal yang ditetapkan undang-undang yang sebesar 30% dari luas wilayah kota. Pesatnya pembangunan di Kota Makassar menjadi pemicu terjadinya perubahan lahan. Sebagai salah satu contoh pembangunan jalan tol layang AP.Pettarani, pembangunan infrastruktur mengubah median sepanjang jalan AP.Pettarani sebagai salah satu bagian RTH kota Makassar menjadi area terbangun. Untuk menambah luasan RTH, Pemerintah Kota Makassar mengalami kendala kurangnya lahan untuk dijadikan RTH, serta kurangnya pohon dan tanaman hijau yang mengakibatkan rendahnya kualitas tutupan lahan. Selain itu masih rendahnya kepatuhan privat sektor untuk menyediakan RTH privat seperti Kawasan perumahan, perkantoran, perdagangan, dll.

4.2.3.2.5 Kemacetan dan Transportasi Publik

Menurut survei yang dilakukan, saat ini masalah utama yang ada di Kota Makassar yang paling dikeluhkan oleh masyarakat adalah kemacetan. Tingginya volume lalu lintas disebabkan tidak ada pembatasan jumlah kendaraan, menyebabkan masalah terhadap kapasitas jalan dan lalu lintas itu sendiri, terutama pada jalan-jalan utama. Selain itu juga adanya aktivitas sampingan pada jalan juga menimbulkan masalah tersendiri. Kurangnya transportasi publik yang aman, nyaman dan terjangkau sehingga masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi yang berimbas pada tingginya ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi baik roda dua maupun roda empat. Hal ini juga menyebabkan sulitnya membentuk budaya penggunaan angkutan umum di masyarakat. Pembangunan transportasi publik masal yang paling ideal adalah yang berbasis rel, namun ini membutuhkan anggaran yang besar baik konstruksinya maupun operasionalnya, dimana badan atau lembaga yang khusus menangani transportasi publik (Perusda, PT) belum ada.

4.2.3.2.6 Cadangan Air Baku, Air Bersih dan Sanitasi Layak

Terdapat beberapa hal yang harus menjadi perhatian Pemerintah Kota Makassar terhadap isu ini. Mendorong konservasi sumber-sumber air baku untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas air baku, mengingat untuk kebutuhan air baku Kota Makassar, masih tergantung pada suplai dari bendungan Lelopancing di Kabupaten Maros dan bendungan Bili-Bili di Kabupaten Gowa. Konservasi dan pelestarian terhadap *chacment area*, embung, kolam regulasi, sumur resapan, bio pori, kolam retensi penampungan air hujan harus terus ditingkatkan. Tingginya eksploitasi dan penggunaan air bawah tanah terutama oleh dunia usaha, yang menyebabkan Intrusi air laut. Meningkatkan cakupan pelayanan air bersih, mengingat masih rendahnya cakupan dan kapasitas sarana pengelolaan air minum perpipaan PDAM serta target *universal coverage* dan TPB. Meningkatkan kapasitas untuk perubahan perilaku hidup bersih termasuk Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dan Stop Buang Air Besar Sembarangan di masyarakat. Peningkatan sarana pengelolaan air Buangan dan tinja. Masih rendahnya cakupan dan kapasitas sarana pengolahan air limbah baik tingkat kota maupun tingkat komunal. Masih rendahnya kepedulian dan partisipasi masyarakat yang telah mendapat prasarana IPAL dalam mengelola IPAL komunalnya.

4.2.3.2.7 Persampahan

Persampahan di Kota Makassar salah satu disebabkan tingginya pertumbuhan penduduk yang menyebabkan jumlah timbunan sampah juga bertambah, dimana merujuk angka nasional setiap orang memproduksi 0,5 kg sampah per hari. Faktor lain dalam isu persampahan adalah ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dalam penanganan persampahan, seperti petugas sampah, truk sampah, motor sampah, dll. Salah satu permasalahan yang dihadapi kota Makassar adalah ketersediaan lahan adalah keberadaan Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA). Kapasitas dan daya tampung fasilitas tersebut akan berakhir dan harus segera digantikan dengan fasilitas baru. Catatan lain adalah pola-pola inovasi dan pengembangan pengelolaan sampah baru pernah dilakukan, namun masih cenderung sporadis, belum masif dan belum menjadi prioritas. Persoalan lain adalah perilaku masyarakat, dimana masih banyak masyarakat belum peduli tentang pengelolaan sampah.

BAB 5

VISI, MISI, TUJUAN,
DAN SASARAN



V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1 VISI

Visi pembangunan daerah merupakan rumusan umum mengenai kondisi masa depan Kota Makassar yang ingin dicapai pada akhir periode 2021-2026 yang menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.

Oleh karena itu Visi Kepala Daerah terpilih dijabarkan melalui proses perencanaan pembangunan untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif, yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Visi Kota Makassar dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Visi (RPJPD) 2005 – 2025 adalah: “Makassar sebagai Kota Maritim, Niaga, Pendidikan, Budaya dan Jasa yang Berorientasi Global, Berwawasan Lingkungan dan Paling Bersahabat”. Terhadap Visi Kota Makassar, perhatian difokuskan pada prioritas kebijakan yang menjadi arah RPJPD untuk periode 2020-2025 yang hendak diwujudkan adalah masyarakat Kota Makassar yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui akselerasi pembangunan pada berbagai bidang sehingga tercapai struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh SDM berkualitas tinggi. Pada tahapan ini, identitas sebagai kota maritim, niaga, pendidikan dan jasa yang berorientasi global, berwawasan lingkungan dan bersahabat diharapkan memanifestasikan kehidupan masyarakat yang mandiri, maju, adil dan makmur tersebut. Berdasarkan pemahaman dan dengan memperhatikan Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih maka Visi Pembangunan Daerah Kota Makassar untuk periode RPJMD 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia yang “Sombere’ dan Smart City”
dengan Imunitas Kota Yang Kuat untuk Semua

Visi Pemerintah Kota Makassar 2026 ini memiliki konsistensi dengan Visi Kota Makassar 2025, khususnya dengan penekanan pada “berorientasi global”, yang dalam visi RPJMD dirumuskan sebagai “**Mewujudkan Makassar Kota Dunia**”, serta penekanan “berwawasan lingkungan” dan “paling bersahabat” dirumuskan sebagai “**Sombere’ dan Smart City**” dengan **Imunitas Kota yang Kuat untuk Semua**. Pokok Visi Kota Makassar “kota maritim, niaga, pendidikan, budaya dan jasa” pada visi RPJPD, dalam Visi RPJMD 2021 – 2026 ditempatkan sebagai bagian dari substansi “**Kota Dunia**”.

Rumusan Visi Pemerintah Kota Makassar merupakan gambaran kondisi yang ingin dicapai Kota Makassar pada tahun 2026. Rumusan Visi ini mengandung 2 (dua) penjelasan umum dan

3 (tiga) Pokok Visi. Kedua penjelasan umum tersebut merupakan kalimat yang menjelaskan dengan penjelasan umum dan penjelasan masing-masing Pokok Visi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1 | Penjelasan Visi RPJMD Tahun 2021 – 2026 Kota Makassar

Visi	Penjelasan Umum	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia yang “Sombere’ dan Smart City” dengan Imunitas Kota Yang Kuat Untuk Semua	Percepatan mengandung makna bahwa Pemerintah Kota Makassar akan melakukan akselerasi-tidak sekedar secara normal saja (business as usual) dalam menjalankan Pemerintahan dalam semua aspek	Kota Dunia	Makassar sebagai Kota pelayanan publik (<i>public services</i>) standar dunia yang aman, nyaman dan berdaya saing tinggi dengan konektivitas dan kontribusi hingga ke jaringan internasional (<i>global chain</i>) terhadap arus orang/barang, jasa, dan keuangan dengan fasilitas infrastruktur (<i>infrastructures</i>) yang unggul bagi kesejahteraan warga Kota Makassar
		Sombere’ dan Smart City	Perwujudan dari nilai-nilai luhur budaya etnis “Bugis Makassar” yang ramah tamah dan santun serta bersahabat dan didukung pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan. Sombere’ berkaitan dengan Heartware atau “Perangkat Hati”, sedangkan Smart City berkaitan dengan Hardware dan Software atau “Perangkat Keras” dan “Perangkat Lunak”. Diharapkan dengan Sombere’ dan Smart City menjadikan Makassar Kota cerdas yang berbasis teknologi serta berkarakter budaya lokal
		Imunitas Kota Yang Kuat	Perwujudan Makassar sebagai resilient city yang tangguh yang memiliki kemampuan mempersiapkan diri, menghadapi dan memulihkan diri ketika menghadapi bencana/guncangan di masa depan (ekonomi, lingkungan, sosial & kesehatan) guna mendorong pembangunan berkelanjutan, serta tangguh terhadap kemungkinan/ancaman bencana, termasuk dampak perubahan iklim dan semakin berkembangnya jumlah penduduk yang tinggal diperkotaan
		Untuk Semua	Kota Makassar sebagai kota inklusif yang dapat dinikmati dan dirasakan seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi berdasarkan jenjang umur, jenis kelamin, status sosial termasuk kelompok difabel serta memperkecil disparitas sosial dan ekonomi, sehingga tercipta kesetaraan dan inklusivitas

5.2 MISI

Untuk mewujudkan Visi tersebut, disusun Misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan. Misi merupakan penggambaran Visi yang ingin dicapai dan disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan untuk mencapai Visi tersebut. Rumusan Misi RPJMD Kota Makassar 2021 – 2026 adalah:

1. **Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM Kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi**

Misi ini mencakup “8 (delapan) Program Strategis Makassar Dua Kali Terus Tambah Baik”, yaitu: 1). Meningkatkan kualitas pendidikan melalui gerakan “semua harus sekolah”, 2). Perkuat keimanan umat, 3). 1000 beasiswa “Anak Lorong Berprestasi”, 4). 10.000 skill training gratis, 5). Percepatan tata kelola pemerintahan “Sombere’ dan Smart” bersih dari indikasi korupsi, 6). Menuju PAD Rp. 2 Triliun, 7). Menuju insentif kinerja RT/RW Rp. 2 Juta dan perkuat fungsi RT/RW dan penasihat Walikota serta para *Local Influencer*, 8). Kelurahan menjadi pusat pelayanan publik yang “Sombere’ dan Smart”.

2. **Rekonstruksi Kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi dan kesehatan kota yang kuat untuk semua**

Misi ini mencakup “8 (delapan) Program Strategis Makassar Dua Kali Terus Tambah Baik”, yaitu: 1). Gerakan masyarakat perkuat imunitas kesehatan dan ekonomi, 2). Perkuat fasilitas dan pelayanan kesehatan masyarakat, 3). Penyediaan dengan kemudahan akses 100.000 peluang kerja dan peluang bisnis baru, 4). Penataan total sistem BUMD dan pembentukan Makassar Incorporation, 5) Pembuatan Peraturan Daerah (Perda) Omnibus “Makassar Kota Dunia”, 6). Percepatan program Jagai Ana’ Ta dan program Smart Millenial serta Mitigasi Sosial, 7). Penataan total destinasi budaya dan sejarah, 8). Penguatan City Branding dan peningkatan festival dan MICE bulanan dalam skala nasional dan internasional.

3. **Restorasi ruang kota yang inklusif menuju kota nyaman kelas dunia yang “sombere’ dan smart city” untuk semua**

Misi ini mencakup “8 (delapan) Program Strategis Makassar Dua Kali Terus Tambah Baik”, yaitu: 1). Penataan total sistem persampahan, 2). Pembenahan total sistem penanganan banjir dan penanganan kemacetan, 3). Pembangunan infrastruktur dan kawasan “waterfront city” berbasis mitigasi dan adaptasi lingkungan, 4). Peningkatan jejaring smart pedestrian dan koridor hijau kota, 5). Peningkatan Lorong Garden dan pembentukan 5000 lorong wisata, 6). Percepatan pembangunan sistem dan infrastruktur “Sombere’ dan Smart” yang inklusif, 7). Percepatan Makassar menjadi *Livable City* dan *Resilient City*, 8). Pembangunan Gedung “Sombere’ dan Smart” New Balai Kota dan New DPRD.

Rumusan misi dalam dokumen perencanaan dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Oleh karena itu, pernyataan misi menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas dan mudah dipahami tanpa mengurangi maksud yang ingin dijelaskan. Keterkaitan antara Pokok-Pokok Visi dengan Penjelasan Misi RPJMD Tahun 2021-2026 Kota Makassar dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.2 | Perumusan Penjelasan Misi RPJMD Tahun 2021 – 2026 Kota Makassar

Pernyataan Visi: Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia Yang “Sombere’ dan Smart City” dengan Imunitas Kota Yang Kuat Untuk Semua				
Misi		Penjelasan Misi	Pokok Visi	
Misi 1	Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM Kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Efektif, serta Meningkatkan Pembinaan Umat Beragama	Kota Dunia	Untuk Semua
Misi 2	Rekonstruksi kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi dan kesehatan kota yang kuat untuk semua.	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Mitigasi Sosial, Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan Realisasi Investasi, serta Meningkatkan Citra Kota Makassar (City Branding) Sebagai Destinasi Wisata Gastronomi, Sejarah, Budaya dan MICE	Sombere’ dan Smart City	
Misi 3	Restorasi ruang kota yang inklusif menuju kota nyaman kelas dunia yang sombere’ dan smart city untuk semua.	Mewujudkan Makassar menjadi "Livable City" dan "Resilient City" dan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Kota Yang Nyaman dan Inklusif, serta Meningkatkan Tata Kelola Lingkungan Hidup yang lestari	Imunitas Kota Yang Kuat	

Selain Visi dan Misi di atas, Pemerintah Kota Makassar juga menggaungkan slogan dan *tagline* sebagai penyemangat seluruh elemen masyarakat dan stakeholder bagi kemajuan Kota Makassar. *Tagline* tersebut adalah “Makassar Terus Dua Kali Tambah Baik”. *Tagline* ini diusung oleh Walikota dan Wakil Walikota Makassar, Bapak Ir. Moh. Ramdhan Pomanto dan Fatmawati Rusdi, dimana Bapak Ir. Moh Ramdhan Pomanto menjabat kembali sebagai Walikota Makassar untuk periode kedua. Makassar terus dua kali tambah baik adalah tekad perubahan progresif yang terukur sekaligus menjadi target pencapaian dalam 5 (lima) tahun di segala bidang di seluruh Kota Makassar dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Diharapkan pada akhir masa pemerintahan Bapak Ir. Ramdhan Pomanto dan Fatmawati Rusdi, seluruh aspek kehidupan (*quality of life*) warga Makassar menjadi 2 kali tambah baik, baik pada aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum maupun aspek daya saing daerah.

5.3 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Visi dan Misi Kota Makassar dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran, adalah sebagai berikut:

Tujuan dan sasaran merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi pembangunan daerah kota Makassar selama 5 (lima) tahun mendatang.

Pengertian tujuan dalam RPJMD ini adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan diturunkan secara operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi. Sasaran diartikan sebagai hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional untuk jangka waktu lima tahun ke depan. Suatu sasaran dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan, dimana untuk mencapai suatu tujuan dapat melalui beberapa sasaran dan memperhatikan relevansinya dengan isu-isu strategis daerah, sehingga tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai pedoman perencanaan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran yang merupakan pengejawantahan visi dan misi kepala daerah menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Penjabaran secara sistematis untuk menciptakan keselarasan visi dan misi yang diturunkan menjadi tujuan dan indikator tujuan serta sasaran dan indikator sasaran, RPJMD tahun 2021 – 2026 Kota Makassar, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Misi 1: Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM Kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi

Dalam upaya pencapaian Misi 1, diterjemahkan dalam 2 (dua) Tujuan dengan 2 (dua) indikator Tujuan yang dijabarkan ke dalam 4 (empat) Sasaran dengan 4 (empat) indikator Sasaran. Pencapaian Misi 1 dapat diukur melalui capaian masing-masing indikator kinerja Tujuan dan Sasaran tersebut. Uraian Tujuan dan Sasaran pada masing-masing Misi 1, dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.3 | Tujuan dan Sasaran Misi 1 RPJMD Tahun 2021 – 2026 Kota Makassar

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	1.1.1 Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan
			1.1.2 Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Perkapita
1.2	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Efektif	Indeks Reformasi Birokrasi	1.2.1 Terwujudnya pelayanan publik yang Sombere’ dan Smart	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
			1.2.2 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Status Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

Misi 2: Rekonstruksi kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi dan kesehatan kota yang kuat untuk semua

Dalam upaya pencapaian Misi 2, diterjemahkan dalam 2 (dua) Tujuan dengan 2 (dua) Indikator Tujuan yang dijabarkan ke dalam 4 (empat) sasaran dengan 6 (enam) indikator sasaran. Pencapaian Misi 2 dapat diukur melalui capaian masing-masing indikator kinerja tujuan dan sasaran tersebut. Uraian Tujuan dan Sasaran pada masing-masing Misi 2, dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.4 | Tujuan dan Sasaran Misi 2 RPJMD Tahun 2021 – 2026 Kota Makassar

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
2.1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Mitigasi Sosial	Indeks Kesehatan	2.1.1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Usia Harapan Hidup
			2.1.2 Meningkatnya Perlindungan Masyarakat Miskin	Angka Kemiskinan
2.2	Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Secara Merata	Pertumbuhan Ekonomi	2.2.1 Tersedianya Kemudahan Akses Peluang Kerja dan Peluang Bisnis Baru	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
			2.2.2 Terwujudnya Gerakan Masyarakat Memperkuat Ketahanan Ekonomi	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita
				Rasio Gini

Misi 3: Restorasi ruang kota yang inklusif menuju kota nyaman kelas dunia yang sombere’ dan smart city untuk semua

Dalam upaya pencapaian Misi 3, diterjemahkan dalam 1 (satu) Tujuan dengan 1 (satu) indikator Tujuan yang dijabarkan ke dalam 2 (dua) Sasaran dengan 2 (dua) indikator Sasaran.

Pencapaian Misi 3 dapat diukur melalui capaian masing-masing indikator kinerja Tujuan dan Sasaran tersebut. Uraian Tujuan dan Sasaran pada masing-masing Misi 2, dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.5 | Tujuan dan Sasaran Misi 3 RPJMD Tahun 2021 – 2026 Kota Makassar

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
3.1	Mewujudkan Makassar menjadi "Livable City" dan "Resilient City"	Indeks Kota Nyaman (Livable City Index)	3.1.1 Tersedianya Infrastruktur Menuju Kota Nyaman	Indeks Layanan Infrastruktur
			3.1.2 Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan Hidup yang Lestari	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa Visi dan Misi pemerintah Kota Makassar dijabarkan ke dalam 5 (lima) Tujuan dengan 5 (lima) indikator Tujuan yang dijabarkan menjadi 10 (sepuluh) Sasaran dengan 12 (dua belas) indikator Sasaran. Untuk indikator Sasaran Indeks Layanan Infrastruktur merupakan sigma dari indikator *outcome* Jalan, Air Bersih, Sanitasi, Persampahan dan Kawasan Kumuh di Kota Makassar. Masing-masing indikator *outcome* dari program infrastruktur tersebut dilakukan pembobotan dengan rincian sebagai berikut : Jalan: 20%, Air Bersih: 30%, Sanitasi: 30%, Persampahan: 10% dan Kawasan Kumuh: 10%.

Indikator Tujuan dan Sasaran yang berjumlah 17 (tujuh belas) inilah yang akan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Walikota Makassar 2021-2026. Dalam upaya pencapaian visi dan misi, akan dilaksanakan program-program pada beberapa Perangkat Daerah guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di atasnya. Penjabaran Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan 2021 – 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.6 | Penjabaran Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021 – 2026 Kota Makassar

Visi: Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia Yang "Sombere' dan Smart City" dengan Imunitas Kota Yang Kuat Untuk Semua									
No	Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2020)	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	Misi 1: Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM Kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi								
1.1	Tujuan: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	82,25	82,95	83,3	83,67	84,05	84,45	84,45
1.1.1	Sasaran: Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	0,818	0,837	0,847	0,856	0,865	0,875	0,875
1.1.2	Sasaran: Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Per kapita	16,89 jt	17,94 jt	18,26 jt	18,58 jt	18,91 jt	19,23 jt	19,23 jt
1.2	Tujuan: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Efektif	Indeks Reformasi Birokrasi	63,23	64,33	64,71	65,80	66,03	66,10	66,10
1.2.1	Sasaran: Terwujudnya Pelayanan Publik yang Sombere' dan Smart.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,66	79,5	80	80,5	81	82,5	82,5
1.2.2	Sasaran: Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Status Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	Misi 2: Rekonstruksi Kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi dan kesehatan kota yang kuat untuk semua.								
2.1	Tujuan: Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Mitigasi Sosial	Indek Kesehatan	0,800	0,804	0,806	0,808	0,810	0,812	0,812
2.1.1	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Usia Harapan Hidup (Tahun)	72.09 th	72.1 th	72.2 th	72.3 th	72.4 th	72.5 th	72.5 th
2.1.2	Sasaran: Meningkatnya Perlindungan Masyarakat Miskin	Angka Kemiskinan (%)	4,54%	4,40%	4,43%	4,20%	4,10%	4,00%	4,00%

Visi: Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia Yang "Sombere' dan Smart City" dengan Imunitas Kota yang Kuat untuk Semua									
No	Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2020)	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	Misi 2: Rekonstruksi Kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi dan kesehatan kota yang kuat untuk semua.								
2.2	Tujuan: Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Secara Merata	Pertumbuhan Ekonomi	-1,27%	4,00%	4,90%	5,80%	6,70%	7,60%	7,60%
2.2.1	Sasaran: Tersedianya kemudahan akses peluang kerja dan peluang bisnis baru	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	15,92%	12,50%	11,50%	11,00%	10,50%	10,00%	10,00%
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	58,05%	59,52%	60,28%	61,04%	61,81%	62,59%	62,59%
2.2.2	Sasaran: Terwujudnya gerakan masyarakat memperkuat ketahanan ekonomi	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per kapita	116,87 jt	125,4 jt	131,3 jt	137,3 jt	143,35 jt	149,45 jt	149,45 jt
		Rasio Gini	0,4	0,395	0,392	0,39	0,388	0,386	0,386
	Misi 3: Restorasi ruang kota yang inklusif menuju kota nyaman kelas dunia yang “sombere’ dan smart city” untuk semua.								
3.1	Tujuan: Mewujudkan Makassar Menjadi "Livable City" dan "Resilient City"	Indeks Kota Nyaman (<i>Livable City Index</i>)	55,7	59,83	60,22	60,22	60,22	60,61	60,61
3.1.1	Sasaran: Tersedianya Infrastruktur Menuju Kota Nyaman	Indeks Layanan Infrastruktur	72,8	74,22	75,03	76,27	77,21	78,56	78,56
3.1.2	Sasaran: Meningkatkan Tata Kelola Lingkungan Hidup yang Lestari	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Makassar	53,052	57,97	58,47	58,97	59,47	59,77	59,77

5.4 KETERKAITAN RPJMD KOTA MAKASSAR DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINYA

5.4.1 Hubungan Antara RPJMD Kota Makassar dengan RPJMN Tahun 2020 – 2024

Pola Hubungan antara RPJMN dan RPJMD Kab/Kota sebagaimana yang ditampilkan pada gambar diatas menunjukkan bahwa dalam Penyusunan RPJMD Kota Makassar harus memperhatikan RPJMN Tahun 2020 – 2024. Hasil analisa terhadap RPJMD Kota Makassar dengan RPJMN menunjukkan adanya keselarasan. Keselarasan ini meliputi keselarasan visi dan pokok visi RPJMD Tahun 2021 – 2026 Kota Makassar dengan agenda pembangunan (Prioritas Nasional) RPJMN Tahun 2020 – 2024, dan keselarasan Misi RPJMD Kota Makassar dengan Misi Presiden Republik Indonesia. Hasil identifikasi hubungan visi dan misi RPJMD Tahun 2021 – 2026 Kota Makassar dengan Agenda pembangunan serta Misi RPJMN dapat dilihat pada Tabel dan gambar berikut:

Tabel 5.7 | Hubungan Visi RPJMD Tahun 2021 – 2026 Kota Makassar dengan Agenda Pembangunan (Prioritas Nasional) Tahun 2020 – 2025

DESKRIPSI		PENJELASAN	AGENDA PEMBANGUNAN (PRIORITAS NASIONAL)
Visi	Pokok Visi		
Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia yang “Sombere’ dan Smart City” dengan Imunitas Kota yang Kuat untuk Semua	Kota Dunia	Makassar sebagai Kota pelayanan publik (<i>public services</i>) standar dunia yang aman, nyaman dan berdaya saing tinggi dengan konektivitas dan kontribusi hingga ke jaringan internasional (<i>global chain</i>) terhadap arus orang/barang, jasa, dan keuangan dengan fasilitas infrastruktur (<i>infrastructures</i>) yang unggul bagi kesejahteraan warga Kota Makassar	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (1)
			Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya saing (3)
	Sombere’ dan Smart City	Perwujudan dari nilai-nilai luhur budaya etnis “Bugis Makassar” yang ramah tamah dan santun serta bersahabat dan didukung pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan. Sombere’ berkaitan dengan Heartware atau “Perangkat Hati”, sedangkan Smart City berkaitan dengan Hardware dan Software atau “Perangkat Keras” dan “Perangkat Lunak”. Diharapkan dengan Sombere’ dan Smart City menjadikan Makassar Kota cerdas yang berbasis teknologi serta berkarakter budaya lokal	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (4)
			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (5)
	Imunitas Kota Yang Kuat	Perwujudan Makassar sebagai resilient city yang tangguh yang memiliki kemampuan mempersiapkan diri, menghadapi dan memulihkan diri ketika menghadapi bencana/guncangan di masa depan (ekonomi, lingkungan, sosial & kesehatan) guna mendorong pembangunan berkelanjutan, serta tangguh terhadap kemungkinan/ancaman bencana, termasuk dampak perubahan iklim dan semakin berkembangnya jumlah penduduk yang tinggal diperkotaan	Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan (2)
			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim (6)
	Untuk Semua	Kota Makassar sebagai kota inklusif yang dapat dinikmati dan dirasakan seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi berdasarkan jenjang umur, jenis kelamin, status sosial termasuk kelompok difabel serta memperkecil disparitas sosial dan ekonomi, sehingga tercipta kesetaraan dan inklusivitas	Memperkuat Stabilitas Pohukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik (7)

Tabel 5.8 | Keterkaitan Antara Misi RPJMD Tahun 2021 – 2026 Kota Makassar dengan Misi RPJMN Tahun 2020 – 2024

Misi RPJMD Tahun 2021 - 2026 Kota		Misi RPJMN Tahun 2020 - 2024	
No	Deskripsi	No	Deskripsi
1	Revolusi Sumber Daya Manusia(SDM) dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM Kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi	1	Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
		6	Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
		8	Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
		9	Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan
		7	Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada
2	Rekonstruksi Kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi dan	2	Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3	Restorasi Ruang Kota yang Inklusif menuju Kota Nyaman Kelas Dunia yang "Sombere' dan Smart City" Untuk Semua	3	Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
		4	Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
		5	Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Keberibadian Bangsa

5.4.2 Hubungan Antara RPJMD Kota Makassar dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023

Penyusunan RPJMD Tahun 2021 – 2026 Kota Makassar sebagai satu kesatuan dokumen perencanaan pembangunan dan kewilayahan harus memedomani RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil analisa terhadap penyelarasan Misi RPJMD Tahun 2021 – 2026 Kota Makassar dengan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023 dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Tabel 5.9 | Keterkaitan Antara Misi RPJMD Tahun 2021 – 2026 Kota Makassar dengan Misi RPJMD Tahun 2018 – 2023 Provinsi Sulawesi Selatan

Misi RPJMD Tahun 2021 - 2026 Kota Makassar		Misi RPJMD Tahun 2018-2023 Provinsi Sulawesi Selatan	
No	Deskripsi	No	Deskripsi
1	Revolusi Sumber Daya Manusia(SDM) dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM Kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari	1	Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif
		4	Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter
2	Rekonstruksi Kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi dan kesehatan kota yang kuat untuk semua	2	Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel
		5	Meningkatkan Produktifitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan
3	Restorasi Ruang Kota yang Inklusif menuju Kota Nyaman Kelas Dunia yang "Sombere' dan Smart City" Untuk Semua	3	Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan ekonomi baru yang Produktif

5.4.3 Hubungan Antara RPJMD Kota Makassar dengan RPJPD Kota Makassar Tahun 2005 – 2025

Dokumen perencanaan jangka menengah merupakan penjabaran dari Periode Perencanaan jangka panjang yang tertuang dalam RPJPD, dimana dalam penyusunan RPJMD Tahun 2021 – 2026 Kota Makassar harus memedomani RPJPD Kota Makassar Tahun 2005 – 2025. Hasil identifikasi dan analisis terhadap hubungan Misi RPJPD Kota Makassar dengan Misi RPJMD Tahun 2021 – 2026 Kota Makassar secara detail dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.10 | Keterkaitan antara Misi RPJMD Tahun 2021 – 2026 dengan Misi RPJPD Tahun 2005 – 2025 Kota Makassar

Misi RPJMD Tahun 2021 - 2026 Kota Makassar		Misi RPJPD Tahun 2005 - 2025 Kota Makassar	
No	Deskripsi	No	Deskripsi
1	Revolusi Sumber Daya Manusia(SDM) dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM Kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi	4	Memantapkan dan memanfaatkan ruang dan lingkungan hidup yang nyaman, tertib dan berkesinambungan
		6	Meningkatkan apresiasi budaya, agama, penegakan hukum dan kepedulian terhadap lingkungan
		7	Mengembangkan sistem pemerintahan yang baik
2	Rekonstruksi Kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi dan kesehatan kota yang kuat untuk semua	3	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara layak dan
		2	Memberdayakan kekuatan ekonomi masyarakat dan penguatan daya saing ekonomi kota
3	Restorasi Ruang Kota yang Inklusif menuju Kota Nyaman Kelas Dunia yang "Sombere' dan Smart City" Untuk Semua	1	Mengembangkan kultur maritim dan memanfaatkan sumberdaya laut secara
		4	Memantapkan dan memanfaatkan ruang dan lingkungan hidup yang nyaman, tertib dan berkesinambungan
		6	Meningkatkan apresiasi budaya, agama, penegakan hukum dan kepedulian terhadap lingkungan
		5	Mengembangkan manajemen pembangunan kota yang berbudaya dan berwawasan masa depan

5.4.4 Hubungan Antara RPJMD Kota Makassar dengan RTRW Kota Makassar Tahun 2018 – 2023

Dalam penyusunannya, RPJMD Tahun 2021 – 2026 Kota Makassar juga memperhatikan kesesuaian dan keselarasan aspek spasial melalui penyelarasan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar Tahun 2015 – 2034. Penyelarasan dilakukan terhadap perumusan sasaran jangka menengah dengan Kebijakan Strategi yaitu Struktur ruang dan Pola Ruang RTRW.

Secara detail kesesuaian antara Kebijakan Strategi RTRW Kota Makassar Tahun 2015 – 2034 dengan Sasaran RPJMD Tahun 2021 – 2026 Kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.11 | Hubungan antara Kebijakan Strategi Struktur Ruang Tahun 2015 – 2034 Kota Makassar dengan Sasaran RPJMD Tahun 2021 – 2026 Kota Makassar

Kebijakan Strategi RTRW Tahun 2015 - 2034 Kota Makassar	Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 Kota Makassar
STRUKTUR RUANG	
Strategi peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah	
Meningkatkan interkoneksi antar Kawasan perkotaan dalam wilayah Mamminasata sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), antar kawasan dalam Pusat-Pusat Kegiatan Lokal (PKL) perkotaan, maupun antara kawasan perkotaan dengan wilayah sekitarnya, termasuk dengan pulau-pulau kecil	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
	Meningkatnya kualitas perlindungan dan pelayanan kesehatan masyarakat dan keluarga berencana
	Tersedianya kemudahan akses peluang kerja dan peluang bisnis baru
Mendorong pengembangan peran yang lebih optimal dari pusat-pusat pertumbuhan kota di wilayah bagian barat, bagian utara, bagian timur, dan bagian selatan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang ada	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan
	Terwujudnya Kelurahan menjadi pusat pelayanan publik yang "Sombere' dan Smart".
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
	Meningkatnya kualitas perlindungan dan pelayanan kesehatan masyarakat dan keluarga berencana
Mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan, khususnya daerah pantai bagian barat dan utara kota serta sungai-sungai dalam kota	Tersedianya kemudahan akses peluang kerja dan peluang bisnis baru
	Meningkatnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
	Meningkatnya fasilitas pelayanan kesehatan dan Mitigasi Bencana
	Meningkatnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
Mendorong pengembangan pusat-pusat kawasan pertumbuhan ekonomi dalam kawasan perkotaan agar lebih produktif, kompetitif dan lebih kondusif untuk hidup dan berkehidupan secara berkelanjutan, serta lebih efektif dalam mendorong pengembangan wilayah sekitarnya	Terwujudnya Makassar sebagai Resilient City didukung penyediaan fasilitas pemerintahan
	Meningkatnya Kompetensi angkatan kerja dan pemuda
	Tersedianya kemudahan akses peluang kerja dan peluang bisnis baru
	Terwujudnya gerakan masyarakat memperkuat ketahanan ekonomi dan industri kreatif
Strategi peningkatan derajat kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana telekomunikasi, sumber daya air, energi, dan infrastruktur perkotaan lainnya secara terpadu dan merata di seluruh wilayah kota	Terciptanya iklim dan kepastian hukum berusaha yang kondusif dan kemudahan investasi untuk peningkatan perekonomian kota
Mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan yang masih terisolir	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan
	Terwujudnya Kelurahan menjadi pusat pelayanan publik yang "Sombere' dan Smart".
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Kebijakan Strategi RTRW Tahun 2015 - 2034 Kota Makassar	Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 Kota Makassar
Meningkatkan jaringan energi dengan sistem kemandirian energi area mikro, serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik	Terwujudnya Makassar sebagai Liveable City berbasis lorong dan komunitas
Mengembangkan sistem energi alternatif untuk mencukupi kebutuhan maksimal kota pada pusat-pusat pelayanan kota, sub pusat pelayanan kota serta pusat lingkungan	
Mengembangkan sistem jaringan air bersih “mandiri” untuk setiap kawasan	Meningkatnya upaya promotif dan preventif kesehatan melalui gerakan masyarakat perkuat imunitas
	Meningkatnya kualitas perlindungan dan pelayanan kesehatan masyarakat dan keluarga berencana
Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terhadap pengadaan jaringan air bersih	Meningkatnya kualitas perlindungan dan pelayanan kesehatan masyarakat dan keluarga berencana
	Terwujudnya Makassar sebagai Liveable City berbasis lorong dan komunitas
Mengembangkan sistem IPAL kota dan IPAL kawasan secara terukur dan terpadu	Terwujudnya Makassar sebagai Liveable City berbasis lorong dan komunitas
	Meningkatnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
Meningkatkan dan mengembangkan sistem jaringan drainase kota	Meningkatnya kualitas sistem drainase dan penanganan banjir
Mengembangkan rencana pengelolaan prasarana kawasan reklamasi secara mandiri, meliputi : prasarana tata air, pengolahan limbah dan sampah, sistem pengerukan sungai/kanal, dan prasarana lainnya	Terwujudnya Makassar sebagai Liveable City berbasis lorong dan komunitas
	Meningkatnya sistem penanganan persampahan dan penerapan 3R
	Meningkatnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
Mengembangkan sistem jaringan Closed Circuit Television (CCTV) kota pada sudut-sudut strategis dan penting kota	Terwujudnya ketentraman umum dan ketertiban masyarakat
Mengembangkan konsep Smart City yang terpadu dan terintegrasi	Terwujudnya Kelurahan menjadi pusat pelayanan publik yang “Sombere’ dan Smart”.
Strategi penyebaran pusat-pusat kegiatan perkotaan yang lebih tematik dan terpadu	
Mengembangkan kawasan-kawasan tematik berdasarkan karakteristik daya dukung, daya tampung, daya tumbuh, dan daya saing yang terpadu dan terakumulasi baik antarkawasan dalam ruang wilayah kota, maupun terpadu dalam kawasan dengan fungsi perumahan yang sesuai serta fungsi-fungsi pendukung lainnya dalam membentuk kawasan-kawasan yang anatomis dan prospektif yang tersebar merata dalam suatu bentuk "compact city"	Terwujudnya Makassar sebagai Liveable City berbasis lorong dan komunitas
Mengembangkan dan meningkatkan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana yang terpadu baik dalam kawasan maupun antar kawasan dengan standar global	Terwujudnya Makassar sebagai Liveable City berbasis lorong dan komunitas
Mengembangkan atmosfir karakter arsitektur masing-masing kawasan dengan kekhasan masing-masing sebagai sub karakter untuk membangun ruang wilayah kotayang berciri Makassar yang kuat.	Terlaksananya penataan destinasi budaya dan sejarah

Kebijakan Strategi RTRW Tahun 2015 - 2034 Kota Makassar	Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 Kota Makassar
Strategi pengembangan jaringan prasarana kota standar global meliputi : jalan layang, tol, dan jaringan perkeretaapian perkotaan	
Mengembangkan sistem jalan layang pada simpul-simpul penting kota	Tersedianya jaringan jalan dalam kondisi baik yang didukung perlengkapan jalan
Mengembangkan sistem jaringan prasarana jalan baru	
Mengembangkan sistem jaringan perkeretaapian perkotaan yang mengintegrasikan seluruh kawasan dalam wilayah kota secara terpadu	
Meningkatkan prasarana jalan tol beserta kelengkapannya	Tersedianya jaringan jalan dalam kondisi baik yang didukung perlengkapan jalan
Mengembangkan sistem pengarah publik pada semua sudut-sudut penting dan strategis kota	
Mengembangkan sistem jaringan pedestrian terpadu untuk pejalan kaki, disabilitas, dan sepeda pada jaringan jalan arteri dan kolektor	Tersedianya jaringan pedestrian yang nyaman dan didukung koridor hijau dan median jalan sebagai konektivitas pejalan kaki dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Strategi pengembangan sistem jaringan transportasi air dan sistem jaringan transportasi darat yang terpadu	
Mengembangkan sistem transportasi air pada sungai-sungai dalam kota hingga pesisir barat dan utara kota	Meningkatnya kualitas sistem drainase dan penanganan banjir
Memanfaatkan fungsi kolam retensi di koridor air ruang reklamasi dalam penanggulangan banjir	
Mengembangkan sistem terminal dan halte terpadu serta hijau pada semua terminal kota	Tersedianya jaringan jalan dalam kondisi baik yang didukung perlengkapan jalan
	Tersedianya jaringan pedestrian yang nyaman dan didukung koridor hijau dan median jalan sebagai konektivitas pejalan kaki dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Mengembangkan sistem terminal dan dermaga laut terpadu serta hijau pada pesisir kota;	Meningkatnya kualitas sistem drainase dan penanganan banjir
	Tersedianya jaringan pedestrian yang nyaman dan didukung koridor hijau dan median jalan sebagai konektivitas pejalan kaki dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Mengembangkan pusat-pusat kegiatan pesisir yang turistik, berwawasan lingkungan, dan produktif	Tersedianya kemudahan akses peluang kerja dan peluang bisnis baru
	Terlaksananya penataan destinasi budaya dan sejarah
	Meningkatnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
Mengembangkan sistem moda transportasi laut yang sesuai dengan karakteristik laut Makassar	

Kebijakan Strategi RTRW Tahun 2015 - 2034 Kota Makassar	Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 Kota Makassar
Strategi pengembangan sistem intermoda transportasi yang terpadu dan hierarkhis	
Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan sistem transportasi darat, laut, dan udara	Tersedianya jaringan jalan dalam kondisi baik yang didukung perlengkapan jalan
Mengembangkan sistem transportasi massal terpadu berbasis bis dan transpotasi rel dalam kota yang melayani seluruh wilayah kota	
Mengembangkan sistem angkutan umum massal dengan moda angkutan kota sebagai feeder dari bagian-bagian ruang kawasan, dan moda becak sebagai moda angkutan masyarakat antar lingkungan kawasan	
Mengembangkan dan menyempurnakan keseimbangan sistem transportasi antara koridor utara-selatan dan koridor timur-barat serta kemungkinan pengembangan alternatif diagonal kota	
Membatasi dan mengendalikan penggunaan kendaraan bermotor	Meningkatnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
Mengarahkan secara bertahap seluruh moda transportasi kota berbahan bakar gas dan hybrid	
POLA RUANG	
KAWASAN LINDUNG	
Strategi pemulihan, peningkatan dan pemeliharaan fungsi pelestarian sistem ekologi wilayah	
Menetapkan kawasan terumbu karang di pesisir dan pulau-pulau dalam wilayah Kota sebagai kawasan lindung	Meningkatnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah	
Strategi penguatan kegiatan mitigasi dan adaptasi lingkungan di kawasan pesisir dan sungai-sungai dalam kota	
Membentuk kembali pantai bagian barat dan bagian utara kota menjadi bentuk baru garis pantai melalui kegiatan pengembangan kawasan pesisir yang terencana, terukur, terkendali, dan terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai usaha mitigasi dan adaptasi gelombang pasang dan banjir	Meningkatnya fasilitas pelayanan kesehatan dan Mitigasi Bencana
	Terwujudnya Makassar sebagai Resilient City didukung penyediaan fasilitas pemerintahan
	Meningkatnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
	Meningkatnya fasilitas pelayanan kesehatan dan Mitigasi Bencana
	Terwujudnya Makassar sebagai Resilient City didukung penyediaan fasilitas pemerintahan
	Meningkatnya kualitas sistem drainase dan penanganan banjir
	Meningkatnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan

Kebijakan Strategi RTRW Tahun 2015 - 2034 Kota Makassar	Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 Kota Makassar
Mengembangkan sistem jaringan prasarana drainase tangkap di sepanjang kawasan pesisir pantai bagian barat dan utara kota serta sungai dalam wilayah kota dari mitigasi pencemaran	Meningkatnya fasilitas pelayanan kesehatan dan Mitigasi Bencana
	Terwujudnya Makassar sebagai Resilient City didukung penyediaan fasilitas pemerintahan
	Meningkatnya kualitas sistem drainase dan penanganan banjir
	Meningkatnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
Mengembangkan ruang-ruang muka tepian air dalam bentuk kota tepian sungai dan kota tepian pantai yang terpadu dengan ruang terbuka hijau yang mengkonservasi daerah aliran sungai dan	Tersedianya jaringan pedestrian yang nyaman dan didukung koridor hijau dan median jalan
Strategi pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup terutama sektor kehutanan, dan kelautan	Meningkatnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
Menyelenggarakan upaya terpadu pelestarian fungsi sistem ekologi wilayah	Meningkatnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
Melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya	
Melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menetralsir, menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya	
Mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan	
Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan	
Mengelola sumber daya alam tidak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana, termasuk revitalisasi fungsi sistem ekologi lokal serta pembangunan sumber daya baru untuk diwariskan kepada generasi penerus dan menjaga kelestarian lingkungan	
Mengelola sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya	
Mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya antisipatif dan adaptasi bencana terhadap kenaikan muka air laut, sedimentasi, abrasi, banjir, tsunami pada kawasan rawan ancaman bencana	Meningkatnya fasilitas pelayanan kesehatan dan Mitigasi Bencana
	Terwujudnya Makassar sebagai Resilient City didukung penyediaan fasilitas pemerintahan
	Meningkatnya kualitas sistem drainase dan penanganan banjir
	Meningkatnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan

Kebijakan Strategi RTRW Tahun 2015 - 2034 Kota Makassar	Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 Kota Makassar
Strategi peningkatan derajat kualitas hijau ruang wilayah kota dengan rasio tutupan hijau	
Mewujudkan kawasan tutupan hijau dalam satu wilayah pulau sebesar 60% (enam puluh persen) dari luas wilayah daratan pulau tersebut	
Mengembangkan gerakan sadar hijau kota satu orang satu pohon dengan koefisien tutupan hijau di atas 50% (lima puluh persen)	Tersedianya jaringan pedestrian yang nyaman dan didukung koridor hijau dan median jalan sebagai konektivitas pejalan kaki dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Menetapkan ruang terbuka hijau kawasan baru hasil pengembangan kawasan pesisir paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dengan tingkat tutupan hijau paling sedikit 50% (lima puluh persen)	
Menetapkan dan mengembangkan kawasan taman mangrove baru pada Kawasan maritim di pesisir bagian Utara kota hingga muara Sungai Tallo	Meningkatnya kualitas sistem drainase dan penanganan banjir
	Meningkatnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
Strategi peningkatan luas ruang terbuka kota menjadi ruang terbuka hijau	
Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam gerakan Makassar hijau di ruang-ruang terbuka milik publik	Tersedianya jaringan pedestrian yang nyaman dan didukung koridor hijau dan median jalan sebagai konektivitas pejalan kaki dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Meningkatkan tutupan hijau pada ruang-ruang terbuka kota	
Strategi perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budidaya	
Menetapkan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis kota dan memanfaatkan sumber daya alam di ruang darat, laut dan udara, termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah	Terwujudnya gerakan masyarakat memperkuat ketahanan ekonomi dan industri kreatif
Mengembangkan kegiatan budidaya unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan, termasuk laut dan pulau-pulau kecil dengan pendekatan gugus pulau untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan pengembangan ekonomi kawasan	
Mengembangkan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek politik, pertahanan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi	
Mendukung kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan yang bernilai ekonomi tinggi di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) di Selat Makassar	
Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan	
Mengendalikan perkembangan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana alam untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana	Meningkatnya fasilitas pelayanan kesehatan dan Mitigasi Bencana
	Terwujudnya Makassar sebagai Resilient City didukung penyediaan fasilitas pemerintahan
	Meningkatnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan

Kebijakan Strategi RTRW Tahun 2015 - 2034 Kota Makassar	Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 Kota Makassar
Memanfaatkan ruang kawasan pusat kota dengan mengoptimalkan pembangunan gedung secara vertikal dengan roof garden, agar	Tersedianya jaringan pedestrian yang nyaman dan didukung koridor hijau dan median jalan sebagai konektivitas pejalan kaki dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Mengembangkan RTH dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah kota	
Memanfaatkan ruang di dalam bumi untuk prasarana jaringan dan fungsi perkotaan beserta fasilitasnya secara terpadu, dengan memperhatikan struktur geologi dan geohidrologi serta keterpaduan antar bangunan bawah tanah maupun bangunan di atasnya	Meningkatnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
Mengembangkan pemanfaatan guna ruang di dalam bumi berdasarkan ketentuan bangunan dan batasa intensitas bangunan dengan pola pengaturan yang lebih rinci akan diatur tersendiri	
Mengembangkan kegiatan budidaya kelautan dengan mempertahankan keberadaan terumbu karang yang ada di 12 (dua belas) pulau dan 1 (satu) gusung	Terwujudnya gerakan masyarakat memperkuat ketahanan ekonomi dan industri kreatif
	Meningkatnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
Strategi pemantapan fungsi ruang kota sebagai kota maritim, niaga, pendidikan, pariwisata dan budaya	
Mengembangkan kawasan-kawasan terpadu yang mengakomodir dan memperkuat posisi utama kota sebagai kota maritim, niaga, pendidikan, pariwisata, dan budaya sesuai dengan daya dukung, daya tampung dan daya tumbuh serta daya saing	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan
	Terciptanya iklim dan kepastian hukum berusaha yang kondusif dan kemudahan investasi untuk peningkatan perekonomian kota
	Terlaksananya penataan destinasi budaya dan sejarah
Mengembangkan kawasan-kawasan terpadu yang mendukung dan melengkapi anatomi posisi utama kota guna menciptakan ruang yang lebih tertata dengan keterpaduan kawasan pergudangan, kawasan industri, kawasan pelabuhan, kawasan bandara, kawasan bisnis global, kawasan pendidikan dan penelitian, kawasan budaya, kawasan bisnis dan pariwisata, kawasan olahraga, kawasan perumahan, kawasan maritim, dan kawasan pusat kota	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan
	Terciptanya iklim dan kepastian hukum berusaha yang kondusif dan kemudahan investasi untuk peningkatan perekonomian kota
	Terlaksananya penataan destinasi budaya dan sejarah
	Meningkatnya pelaksanan Festival dan MICE skala Nasional dan Internasional
Strategi penguatan atmosfir tata ruang yang berciri “Makassar” yang kuat	
Mendorong keterpaduan percepatan pembukaan, pengembangan dan pengendalian ruang-ruang tepian air dan pulau-pulau dalam suatu sistem pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu berbasis mitigasi dan adaptasi yang diatur dalam pengaturan topologi kawasan	Meningkatnya fasilitas pelayanan kesehatan dan Mitigasi Bencana
	Meningkatnya kualitas sistem drainase dan penanganan banjir
	Meningkatnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
Merevitalisasi dan mengintegrasikan semua situs peninggalan sejarah lokal, nasional, nusantara, dan global dalam suatu sistem yang	Terlaksananya penataan destinasi budaya dan sejarah

Kebijakan Strategi RTRW Tahun 2015 - 2034 Kota Makassar	Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 Kota Makassar
Mengembangkan dan menyebarkan sentra-sentra kuliner Makassar secara terpadu	Tersedianya kemudahan akses peluang kerja dan peluang bisnis baru
	Terwujudnya gerakan masyarakat memperkuat ketahanan ekonomi dan industri kreatif
	Terlaksananya penataan destinasi budaya dan sejarah
Menetapkan dan mempertahankan kawasan yang memiliki ciri khas dan berkarakter dengan mengakomodasi nilai-nilai budaya	Terlaksananya penataan destinasi budaya dan sejarah
Strategi pengembangan fungsi tematik ruang yang berdaya saing tinggi berstandar global	
Mengembangkan keterpaduan kawasan-kawasan cepat tumbuh yang memiliki keunggulan strategis untuk membangun dan memperkuat posisi kota baik dalam perannya di Pulau Sulawesi, Indonesia Timur, nusantara dan	Terciptanya iklim dan kepastian hukum berusaha yang kondusif dan kemudahan investasi untuk peningkatan perekonomian kota
Mengembangkan seluruh kawasan ruang wilayah kota dengan konsep koefisien tutupan hijau (<i>green coverage ratio</i>) yang tinggi walaupun dengan KDH yang tersedia cukup rendah untuk	Tersedianya jaringan pedestrian yang nyaman dan didukung koridor hijau dan median jalan sebagai konektivitas pejalan kaki dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Mengembangkan kawasan-kawasan pariwisata ekowisata laut tropis (<i>thetropical marine ecotourism</i>) dan ekowisata taman sungai tropis (<i>the tropical riverpark ecotourism</i>) sebagai kawasan pendorong pertumbuhan ekonomi	Terwujudnya gerakan masyarakat memperkuat ketahanan ekonomi dan industri kreatif
	Terlaksananya penataan destinasi budaya dan sejarah
Strategi pengembangan kawasan pesisir bagian barat dan utara kota secara terencana, terukur, terkendali, dan terbatas	
Mengembangkan kawasan reklamasi dengan sistem pulau yang terintegrasi dengan kawasan sekitarnya dan dapat diakses oleh publik	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
	Meningkatnya kualitas perlindungan dan pelayanan kesehatan masyarakat dan keluarga berencana
	Tersedianya kemudahan akses peluang kerja dan peluang bisnis baru
Mendukung penetapan kawasan terpadu pusat bisnis, sosial, budaya, dan pariwisata <i>Centerpoint of Indonesia</i> (bisnis global) sebagai kawasan strategis provinsi	Meningkatnya pelaksanaan Festival dan MICE skala Nasional dan Internasional
Mengembangkan kawasan-kawasan prospektif di wilayah pesisir kota yang mendorong peran kota sebagai kota dunia yang nyaman untuk semua	Tersedianya kemudahan akses peluang kerja dan peluang bisnis baru
Mengembangkan kawasan reklamasi dengan konsep ruang terbuka hijau yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini	Tersedianya jaringan pedestrian yang nyaman dan didukung koridor hijau dan median jalan sebagai konektivitas pejalan kaki dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Mengembangkan kawasan reklamasi sebagai bagian dari kegiatan mitigasi dan adaptasi bencana	Meningkatnya fasilitas pelayanan kesehatan dan Mitigasi Bencana
	Terwujudnya Makassar sebagai Resilient City didukung penyediaan fasilitas pemerintahan
	Meningkatnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan

Kebijakan Strategi RTRW Tahun 2015 - 2034 Kota Makassar	Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 Kota Makassar
Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara	
Mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan negara	
Mendukung penetapan kawasan pesisir utara kota sebagai ruang wilayah armada tengah Indonesia	
Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan	
Mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan negara	
Turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI dan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan negara	

5.4.5 Hubungan Antara RPJMD Kota Makassar dengan RPJMD Kabupaten Di Sekitar

Penyusunan RPJMD Kota Makassar juga memperhatikan dokumen RPJMD kabupaten lain yang secara administrasi berbatasan dengan Kota Makassar yaitu :

- RPJMD Tahun 2021 – 2024 Kabupaten Gowa
- RPJMD Tahun 2017 – 2022 Kabupaten Takalar
- RPJMD Tahun 2021 – 2026 Kabupaten Maros

Sinergitas antara dokumen RPJMD Kota Makassar dengan RPJMD lainnya dimaksudkan agar tercipta keterpaduan pembangunan jangka menengah antar daerah khususnya keterpaduan pembangunan wilayah *hinterland* Kota Makassar.

Tabel 4.7 | Sinergitas antara Dokumen RPJMD Kota Makassar dengan RPJMD Daerah Lain

Pemerintah Daerah	Periodisasi RPJMD	Kebijakan Terkait	Keterangan
Kabupaten Gowa	2021-2024	Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup	Perbaikan kualitas lingkungan di Kabupaten Gowa utamanya pada kawasan perbatasan akan membantu penanganan banjir di Kota Makassar
		Peningkatan aktivitas kegiatan ekonomi	Meningkatnya aktivitas perekonomian di Kabupaten Gowa akan berpengaruh pada berkurangnya jumlah pencari kerja di Kota Makassar
		Pengembangan pangan berbasis sumber daya lokal	Peningkatan ketersediaan pangan di Kabupten Gowa akan membantu ketersediaan pangan di Kota Makassar
Kabupaten Takalar	2017-2022	Optimalisasi pengembangan sektor ungg ulan pertanian, tanaman pangan, peternakan dan perikanan serta perdagangan dan jasa berbasis jaringan	Peningkatan ketersediaan pangan di Kabupten Takalar akan membantu ketersediaan pangan di Kota Makassar
Kabupaten Maros	2021-2026	Mengoptimalkan Lapangan usaha pada sektor unggulan Daerah yang memiliki pertumbuhan yang cepat, dapat memperluas lapangan kerja (formal dan non formal), meningkatkan kompetensi serta produktivitas tenaga kerja serta dapat menjadi pemicu bagi perkembangan sektor lainnya yang disertai dengan pembentukan dan pengembangan kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat serta peningkatan jangkauan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial dengan mendorong partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat	Meningkatnya aktivitas perekonomian di Kabupaten Maros akan berpengaruh pada berkurangnya jumlah pencari kerja di Kota Makassar
		Meningkatkan kualitas aksesibilitas antar ruang yang mampu mengakselerasi peningkatan usaha ekonomi kecil dan menengah terutama ekonomi produktif masyarakat miskin serta perkembangan ekonomi kreatif, baik melalui pembiayaan Daerah maupun melalui kerjasama dengan swasta/dunia usaha atau kerjasama dengan lembaga/pemerintah lainnya	Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten maros berpotensi untuk dikerjasamakan dengan rencana pembangunan pariwisata di Kota Makassar
		Mengintegrasikan upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta penguatan kelembagaan dan penegakan hukum bidang lingkungan hidup	Penguatan lingkungan hidup di Kabupaten Maros mempengaruhi ketersediaan air bersih di Kota Makassar.

VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Pemerintah Daerah (Pemda) menyusun perencanaan pembangunan daerah, dimana perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pengelolaan pembangunan daerah perlu adanya manajemen strategis yang menetapkan tujuan pemerintah daerah serta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang ada. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

6.1 STRATEGI

Strategi merupakan ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam memajemen setiap program kegiatannya dengan merintis cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah. Guna mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan, dilaksanakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

Dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Makassar, dilaksanakan program-program prioritas pada SKPD yang merupakan perwujudan dari tujuan dan sasaran serta strategi pada masing-masing misi yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 6.1 | Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kota Makassar Tahun 2021-2026

No	Visi/ Misi/Tujuan/Sasaran/ Pembangunan Daerah	Strategi
Visi: Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia Yang “Sombere’ dan Smart City” dengan Imunitas Kota Yang Kuat Untuk Semua		
Misi 1: Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM Kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi		
1.1	Tujuan: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	
1.1.1	Sasaran: Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Peningkatan kualitas sarana, prasarana, kurikulum dan tenaga pendidik baik pada tingkatan usia dini, maupun pada tingkatan dasar, disertai dengan upaya pemerataan layanan.
1.1.2	Sasaran: Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengendalian Inflasi serta Peningkatan kesempatan berusaha dengan melibatkan dunia usaha melalui <i>link and match</i> dunia industri serta menciptakan iklim investasi yang kondusif
1.2	Tujuan: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Efektif	
1.2.1	Sasaran: Terwujudnya Pelayanan publik yang “Sombere’ dan Smart”	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan, utamanya di kecamatan dan kelurahan, melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan standar layanan.
1.2.2	Sasaran: Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Penguatan agenda reformasi birokrasi, keuangan daerah dan peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah melalui pemanfaatan TIK, penggalian sumber PAD dan peningkatan kualitas pengelolaan sistem manajemen aparatur
Misi 2: Rekonstruksi Kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi dan kesehatan kota yang kuat untuk semua.		
2.1	Tujuan: Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Mitigasi Sosial	
2.1.1	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Penguatan upaya promotif dan preventif kesehatan melalui gerakan masyarakat perkuatan imunitas (Makassar Recover) serta peningkatan kapasitas dan pemerataan tenaga medis
2.1.2	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Perlindungan Masyarakat Miskin	Perluasan perlindungan bagi masyarakat miskin melalui kepesertaan jaminan sosial, jaminan kesehatan dan jaminan pendidikan, yang tepat sasaran
2.2	Tujuan: Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Secara Merata	
2.2.1	Sasaran: Tersedianya kemudahan akses peluang kerja dan peluang bisnis baru	Pemulihan ekonomi melalui perluasan lapangan usaha berbasis kewirausahaan dan ekonomi digital.
2.2.2	Sasaran: Terwujudnya Gerakan Masyarakat Memperkuat Ketahanan Ekonomi	Penguatan aktifitas ekonomi pada sektor-sektor utama penunjang ekonomi daerah Kota Makassar.
Misi 3: Restorasi ruang kota yang inklusif menuju kota nyaman kelas dunia yang “sombere’ dan smart city” untuk semua		
3.1	Tujuan: Mewujudkan Makassar menjadi “Livable City” dan “Resilient City”	
3.1.1	Sasaran: Tersedianya Infrastruktur Kota Menuju Kota Nyaman	Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan dan dan fasilitas pemerintahan yang modern serta pembangunan infrastruktur baru
3.1.2	Sasaran: Meningkatkan Tata Kelola Lingkungan Hidup yang Lestari	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang adaptif dan berkelanjutan

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA MAKASSAR

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Makassar dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 6.2 | Arah Kebijakan Pembangunan Kota Makassar Tahun 2021 - 2026 Kota Makassar

Visi: Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia Yang “Sombere’ dan Smart City” dengan Imunitas Kota yang Kuat untuk Semua							
No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan				
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Misi 1: Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM Kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia							
1.1	Tujuan: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)						
1.1.1	Sasaran: Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Peningkatan kualitas sarana, prasarana, kurikulum dan tenaga pendidik baik pada tingkatan usia dini, maupun pada tingkatan dasar, disertai dengan upaya pemerataan layanan.	1. Peningkatan sarana prasarana pendidikan yang menjamin semua anak bersekolah	1. Akselerasi pemenuhan sarana prasarana pendidikan	1. Pemenuhan sarana prasarana pendidikan yang menjamin semua anak bersekolah	1. Pemantapan ketersediaan sarana prasarana pendidikan	1. Pemantapan ketersediaan sarana prasarana pendidikan
			2. Peningkatan aksesibilitas pendidikan melalui pemberian beasiswa berkolaborasi dengan dunia usaha	2. Peningkatan aksesibilitas pendidikan melalui pemberian beasiswa berkolaborasi dengan dunia usaha	2. Peningkatan aksesibilitas pendidikan melalui pemberian beasiswa berkolaborasi dengan dunia usaha	2. Peningkatan aksesibilitas pendidikan melalui pemberian beasiswa berkolaborasi dengan dunia usaha	2. Peningkatan aksesibilitas pendidikan melalui pemberian beasiswa berkolaborasi dengan dunia usaha
			3. Peningkatan tata kelola pendidikan dan efektifitas pemanfaatan anggaran pendidikan	3. Peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan	3. Pemenuhan SDM pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas	3. Pemenuhan SDM pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas	3. Pemenuhan SDM pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas
1.1.2	Sasaran: Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengendalian inflasi dan Peningkatan kesempatan berusaha dengan melibatkan dunia usaha serta menciptakan iklim investasi yang kondusif	Pengendalian harga khususnya untuk komoditas utama melalui intervensi aktif pada sektor-sektor utama perdagangan	Peningkatan daya saing UMKM lokal melalui pembinaan dan pengembangan secara intensif dan percepatan layanan perizinan berusaha	Peningkatan rasio penggunaan produk UMKM lokal dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan	Optimalisasi jaringan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri serta lembaga pelatihan kerja	Optimalisasi jaringan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri serta lembaga pelatihan kerja

Visi: Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia Yang “Sombere’ dan Smart City” dengan Imunitas Kota yang Kuat untuk Semua							
No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan				
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Misi 1: Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM Kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia							
1.2	Tujuan: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Efektif						
1.2.1	Sasaran: Terwujudnya Pelayanan publik yang “Sombere’ dan Smart”	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan, utamanya di kecamatan dan kelurahan, melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan standar layanan.	1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan	1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan	1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan	1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan	1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan
			2. Peningkatan kapasitas SDM aparatur pemerintahan dan standarisasi layanan publik	2. Peningkatan kapasitas SDM aparatur pemerintahan dan standarisasi layanan publik	2. Peningkatan kapasitas SDM aparatur pemerintahan dan standarisasi layanan publik	2. Peningkatan kapasitas SDM aparatur pemerintahan dan standarisasi layanan publik	2. Peningkatan kapasitas SDM aparatur pemerintahan dan standarisasi layanan publik
			3. Optimalisasi pelayanan publik berbasis e-government	3. Optimalisasi pelayanan publik berbasis e-government	3. Optimalisasi pelayanan publik berbasis e-government	3. Optimalisasi pelayanan publik berbasis e-government	3. Optimalisasi pelayanan publik berbasis e-government
1.2.2	Sasaran: Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Penguatan agenda reformasi birokrasi, keuangan daerah dan peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1. Penyusunan road map reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas asesor internal	1. Penyusunan road map reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas asesor internal	1. Penyusunan road map reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas asesor internal	1. Penyusunan road map reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas asesor internal	1. Penyusunan road map reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas asesor internal
			2. Peningkatan kapasitas perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	2. Peningkatan kapasitas perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	2. Peningkatan kapasitas perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	2. Peningkatan kapasitas perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	2. Peningkatan kapasitas perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah
			3. Peningkatan kapabilitas SDM serta digitalisasi pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah	3. Peningkatan kapabilitas SDM serta digitalisasi pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah	3. Peningkatan kapabilitas SDM serta digitalisasi pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah	3. Peningkatan kapabilitas SDM serta digitalisasi pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah	3. Peningkatan kapabilitas SDM serta digitalisasi pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah

Visi: Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia Yang “Sombere’ dan Smart City” dengan Imunitas Kota yang Kuat untuk Semua							
No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Pembangunan Daerah	Strategi	Arah Kebijakan				
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Misi 2: Rekonstruksi Kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi dan kesehatan kota yang kuat untuk semua							
2.1	Tujuan: Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Mitigasi Sosial						
2.1.1	Sasaran: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan	Penguatan upaya promotif dan preventif kesehatan melalui gerakan masyarakat perkuatan imunitas (Makassar Recover)	1. Penanganan pandemi covid-19 melalui protokol kesehatan yang ketat	Pemulihan kesehatan dan pemantapan imunitas pasca pandemi covid-19	Pemulihan kesehatan dan pemantapan imunitas pasca pandemi covid-19	Pemulihan kesehatan dan pemantapan imunitas pasca pandemi covid-19	Pemulihan kesehatan dan pemantapan imunitas pasca pandemi covid-19
			2. Peningkatan kualitas layanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit umum daerah	2. Peningkatan kualitas layanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit umum daerah	2. Peningkatan kualitas layanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit umum daerah	2. Peningkatan kualitas layanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit umum daerah	2. Peningkatan kualitas layanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit umum daerah
			3. Peningkatan Kapasitas dan Kualitas serta pemerataan tenaga medis	3. Peningkatan Kapasitas dan Kualitas serta pemerataan tenaga medis	3. Peningkatan Kapasitas dan Kualitas serta pemerataan tenaga medis	3. Peningkatan Kapasitas dan Kualitas serta pemerataan tenaga medis	3. Peningkatan Kapasitas dan Kualitas serta pemerataan tenaga medis
2.1.2	Sasaran: Meningkatkan Kualitas Perlindungan Masyarakat Miskin	Perluasan perlindungan bagi masyarakat miskin melalui kepesertaan jaminas sosial, jaminan kesehatan dan jaminan pendidikan, yang tepat sasaran	Konsolidasi Data Masyarakat Miskin	Penyediaan peluang kerja dan peluang bisnis baru bagi masyarakat miskin serta perluasan perlindungan sosial melalui kepesertaan jaminas sosial, jaminan kesehatan dan jaminan	Penyediaan peluang kerja dan peluang bisnis baru bagi masyarakat miskin serta perluasan perlindungan sosial melalui kepesertaan jaminas sosial, jaminan kesehatan dan jaminan	Penyediaan peluang kerja dan peluang bisnis baru bagi masyarakat miskin serta perluasan perlindungan sosial melalui kepesertaan jaminas sosial, jaminan kesehatan dan jaminan	Penyediaan peluang kerja dan peluang bisnis baru bagi masyarakat miskin serta perluasan perlindungan sosial melalui kepesertaan jaminas sosial, jaminan kesehatan dan jaminan
			Penyediaan peluang kerja dan peluang bisnis baru bagi masyarakat miskin serta perluasan perlindungan sosial, yang tepat sasaran				
2.2	Tujuan: Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Secara Merata						
2.2.1	Sasaran: Tersedianya kemudahan akses peluang kerja dan peluang bisnis baru	Pemulihan ekonomi melalui perluasan lapangan usaha berbasis kewirausahaan dan ekonomi digital	Pengembangan ekonomi kreatif dan usaha rintisan (startup) yang berbasis lorong	Pengembangan ekonomi kreatif dan usaha rintisan (startup) yang berbasis lorong	Pengembangan ekonomi kreatif dan usaha rintisan (startup) yang berbasis lorong	Pengembangan ekonomi kreatif dan usaha rintisan (startup) yang berbasis lorong	Pengembangan ekonomi kreatif dan usaha rintisan (startup) yang berbasis lorong
2.2.2	Sasaran: Terwujudnya Gerakan Masyarakat Memperkuat Ketahanan Ekonomi	Penguatan aktifitas ekonomi pada sektor-sektor utama penunjang ekonomi daerah Kota Makassar	Penguatan city branding (citra kota) dan pengelolaan pariwisata berbasis kearifan lokal	Penguatan city branding (citra kota) dan pengelolaan pariwisata berbasis kearifan lokal	Penguatan city branding (citra kota) dan pengelolaan pariwisata berbasis kearifan lokal	Penguatan city branding (citra kota) dan pengelolaan pariwisata berbasis kearifan lokal	Penguatan city branding (citra kota) dan pengelolaan pariwisata berbasis kearifan lokal
			Peningkatan kinerja perusahaan daerah melalui pembentukan Makassar Incorporation	Peningkatan kinerja perusahaan daerah melalui pembentukan Makassar Incorporation	Peningkatan kinerja perusahaan daerah melalui pembentukan Makassar Incorporation	Peningkatan kinerja perusahaan daerah melalui pembentukan Makassar Incorporation	Peningkatan kinerja perusahaan daerah melalui pembentukan Makassar Incorporation

Visi: Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia Yang “Sombere’ dan Smart City” dengan Imunitas Kota yang Kuat untuk Semua							
No	Misi/Tujuan/Sasaran/ Pembangunan Daerah	Strategi	Arah Kebijakan				
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Misi 3: Restorasi ruang kota yang inklusif menuju kota nyaman kelas dunia yang “sombere’ dan smart city” untuk semua							
3.1	Tujuan: Mewujudkan Makassar menjadi "Livable City" dan "Resilient City"						
3.1.1	Sasaran: Tersedianya Infrastruktur Kota Menuju Kota Nyaman	Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan dan fasilitas pemerintahan yang modern.	1. Revitalisasi fasilitas pengolahan sampah, pedestrian, dan saluran drainase perkotaan	1. Revitalisasi fasilitas pengolahan sampah, pedestrian, dan saluran drainase perkotaan	1. Revitalisasi fasilitas pengolahan sampah, pedestrian, dan saluran drainase perkotaan	1. Revitalisasi fasilitas pengolahan sampah, pedestrian, dan saluran drainase perkotaan	1. Revitalisasi fasilitas pengolahan sampah, pedestrian, dan saluran drainase perkotaan
			2. Penyusunan rencana pembangunan transportasi massal perkotaan berbasis rel	2. Penyusunan rencana pembangunan transportasi massal perkotaan berbasis rel	2. Penyusunan rencana pembangunan transportasi massal perkotaan berbasis rel	2. Penyusunan rencana pembangunan transportasi massal perkotaan berbasis rel	2. Penyusunan rencana pembangunan transportasi massal perkotaan berbasis rel
			3. Penyediaan fasilitas pemerintahan yang Sombere’ dan Smart (New Balaikota dan New DPRD)	3. Penyediaan fasilitas pemerintahan yang Sombere’ dan Smart (New Balaikota dan New DPRD)	3. Penyediaan fasilitas pemerintahan yang Sombere’ dan Smart (New Balaikota dan New DPRD)	3. Penyediaan fasilitas pemerintahan yang Sombere’ dan Smart (New Balaikota dan New DPRD)	3. Penyediaan fasilitas pemerintahan yang Sombere’ dan Smart (New Balaikota dan New DPRD)
			4. Peningkatan pemenuhan kebutuhan air minum dan peningkatan cakupan pelayanan sanitasi	4. Peningkatan pemenuhan kebutuhan air minum dan peningkatan cakupan pelayanan sanitasi	4. Peningkatan pemenuhan kebutuhan air minum dan peningkatan cakupan pelayanan sanitasi	4. Peningkatan pemenuhan kebutuhan air minum dan peningkatan cakupan pelayanan sanitasi	4. Peningkatan pemenuhan kebutuhan air minum dan peningkatan cakupan pelayanan sanitasi
3.1.2	Sasaran: Meningkatkan Tata Kelola Lingkungan Hidup yang Lestari	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang adaptif dan berkelanjutan.	Peningkatan lorong produktif berbasis lingkungan hidup	Peningkatan lorong produktif berbasis lingkungan hidup	Peningkatan lorong produktif berbasis lingkungan hidup	Peningkatan lorong produktif berbasis lingkungan hidup	Peningkatan lorong produktif berbasis lingkungan hidup
			Pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat dan early learning system	Pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat dan early learning system	Pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat dan early learning system	Pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat dan early learning system	Pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat dan early learning system
			Mendorong pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang	Mendorong pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang	Mendorong pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang	Mendorong pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang	Mendorong pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang

6.2 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam pengelolaan pembangunan daerah perlu adanya manajemen strategis yang menetapkan tujuan pemerintah daerah serta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang ada. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD. Suatu program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara spesifik langsung mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Selain dalam rangka menjawab isu strategis daerah, program pembangunan daerah juga dilaksanakan untuk menjawab program prioritas kepala daerah yang telah disampaikan pada proses politik. Adapun program prioritas Walikota Makassar dan Wakil Walikota Makassar dapat dipetakan pada tabel berikut:

Tabel 6.3 | Pemetaan 8 (delapan) Program Strategis “Makassar Dua Kali Terus Tambah Baik” dengan Nomenklatur Program Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020

Misi	No	Program Walikota Terpilih (8 Program Strategis)	Nomenklatur Program berdasarkan Kepmen 050-3708 Tahun 2020	SKPD Penanggung Jawab
Misi 1: Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM Kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi	1.1	Meningkatkan kualitas pendidikan melalui gerakan "semua harus sekolah"	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
			Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan
	1.2	Perkuatan keimanan umat	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesra, Sekretariat Daerah
	1.3	1.000 beasiswa "Anak Lorong Berprestasi"	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
	1.4	10.000 skill training gratis	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Ketenagakerjaan
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Pemuda dan Olahraga
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi UMKM
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan dan Pertanian
	1.5	Percepatan tata kelola pemerintahan "Sombere' dan Smart" bersih dari indikasi korupsi	Program Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	1.6	Menuju PAD Rp. 2 Triliun	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	1.7	Menuju insentif kinerja RT/RW Rp. 2 Juta dan perkuat fungsi RT/RW dan penasehat Walikota serta para Local Influencer	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Seluruh Kecamatan
	1.8	Kelurahan menjadi pusat pelayanan publik yang "Sombere' dan Smart".	Program Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Seluruh Kecamatan
			Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Misi	No	Program Walikota Terpilih (8 Program Strategis)	Nomenklatur Program berdasarkan Kepmen 050-3708 Tahun 2020	SKPD Penanggung Jawab
Misi 2: Rekonstruksi Kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi dan kesehatan kota yang kuat untuk semua	2.1	Gerakan masyarakat perkuat imunitas kesehatan dan ekonomi	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
	2.2	Perkuat fasilitas dan pelayanan kesehatan masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
	2.3	Penyediaan dengan kemudahan akses 100.000 peluang kerja dan peluang bisnis baru	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Ketenagakerjaan
			Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas Perdagangan
			Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi UMKM
	2.4	Penataan total sistem BUMD dan pembentukan <i>Makassar Incorporation</i>	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Hukum, Sekretariat Daerah
			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Program Perekonomian dan Pembangunan	Bagian Perekonomian, Sekretariat Daerah
	2.5	Pembuatan Peraturan Daerah (Perda) Omnibus “Makassar Kota Dunia”	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	2.6	Percepatan program Jagai Ana’ Ta dan program Smart Millenial serta Mitigasi Sosial	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
			Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
	2.7	Penataan total destinasi budaya dan sejarah	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Kebudayaan
			Program Pengelolaan Permuseuman	Dinas Kebudayaan
	2.8	Penguatan City Branding dan peningkatan festival dan MICE bulanan dalam skala nasional dan internasional	Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata
			Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Kebudayaan

Misi	No	Program Walikota Terpilih (8 Program Strategis)	Nomenklatur Program berdasarkan Kepmen 050-3708 Tahun 2020	SKPD Penanggung Jawab
Misi 3: Restorasi ruang kota yang inklusif menuju kota nyaman kelas dunia yang “sombere’ dan smart city” untuk semua	3.1	Penataan total sistem persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Seluruh Kecamatan
	3.2	Pembenahan total sistem penanganan banjir dan penanganan kemacetan	Program pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Dinas Perhubungan
	3.3	Pembangunan infrastruktur dan kawasan "waterfront city" berbasis mitigasi	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Penataan Ruang
			Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum
	3.4	Peningkatan jejaring smart pedestrian dan koridor hijau kota	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Dinas Lingkungan Hidup
	3.5	Peningkatan Lorong Garden dan pembentukan 5.000 lorong wisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
			Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Perikanan dan Pertanian
	3.6	Percepatan pembangunan sistem dan infrastruktur "Sombere’ dan Smart" yang inklusif	Program Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
	3.7	Percepatan Makassar menjadi Livable City dan Resilient City	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum
			Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran
			Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Seluruh Kecamatan
	3.8	Pembangunan Gedung “Sombere’ dan Smart” New Balaikota dan New DPRD	Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kerjasama, Sekretariat Daerah

Dalam menentukan program pembangunan, Pemerintah Kota Makassar juga harus memperhatikan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) seperti yang diamanahkan dalam pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bahwa pemenuhan SPM merupakan prioritas belanja daerah, dimana SPM merupakan urusan pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri atas:

- I. Bidang Urusan Pendidikan;
- II. Bidang Urusan Kesehatan;
- III. Bidang Urusan Pekerjaan Umum;
- IV. Bidang Urusan Perumahan Rakyat;
- V. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
- VI. Bidang Urusan Sosial

Penerapan SPM dalam RPJMD merupakan bagian dari program pembangunan daerah Kota Makassar, dimana dari hasil pemetaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan Nomenklatur Program Kepmendagri 050-3708, Program Pembangunan dalam rangka pelaksanaan SPM terdiri dari 10 (sepuluh) Program pada 8 (delapan) SKPD Kota Makassar. Adapun program pembangunan untuk pelaksanaan SPM dapat dipetakan adalah sebagai berikut:

Tabel 6.4 | Pemetaan Standar Pelayanan Minimal dengan Nomenklatur Program
Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Nomenklatur Program Pembangunan SKPD	SKPD Penanggung Jawab
I	Bidang Urusan Pendidikan			
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang parpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
II	Bidang Urusan Kesehatan			
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Nomenklatur Program Pembangunan SKPD	SKPD Penanggung Jawab
II	Bidang Urusan Kesehatan			
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia Pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif,	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
III	Bidang Urusan Pekerjaan Umum			
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Nomenklatur Program Pembangunan SKPD	SKPD Penanggung Jawab
IV	Bidang Urusan Perumahan Rakyat			
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
V	Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran
VI	Bidang Urusan Sosial			
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial

Selain prioritas kepala daerah yang disampaikan pada proses politik serta SPM, prioritas pembangunan Kota Makassar juga diarahkan untuk menjawab isu pembangunan berkelanjutan, yang merupakan Isu Strategis KLHS RPJMD Kota Makassar yang terdiri dari:

1. Peningkatan kualitas Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Dasar sebagai bagian dari peningkatan kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan, untuk mendukung indikator-indikator TPB yaitu:
 - Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat
 - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat
2. Peningkatan cadangan air baku dan peningkatan kapasitas sanitasi sebagai pemenuhan hak dasar warga Kota Makassar, untuk mendukung indikator-indikator TPB yaitu:
 - Mendorong konservasi sumber-sumber air baku untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas air baku
 - Peningkatan akses terhadap layanan air minum dan sanitasi layak.
 - Meningkatkan kapasitas untuk perubahan perilaku hidup bersih termasuk Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) di masyarakat.
 - Peningkatan sarana pengelolaan air Buangan dan tinja.
3. Makassar Kota Inklusif yang berkelanjutan dan berkeadilan, untuk mendukung pencapaian indikator-indikator TPB yaitu:
 - Mengupayakan terdapatnya peningkatan serapan tenaga kerja dalam industri manufaktur.
 - Mendorong upaya pengurangan tingkat pengangguran setengah terbuka
 - Mendorong terdapatnya moda transportasi massal yang layak dan aman
 - Mendorong upaya pemilahan sampah dari tingkat rumah tangga untuk meningkatkan jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.
4. Makassar tangguh bencana beradaptasi terhadap perubahan Iklim, untuk mendukung pencapaian indikator-indikator TPB yaitu:
 - Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).
 - Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk

Adapun program pembangunan untuk mendukung pencapaian Isu Strategis KLHS RPJMD dapat dipetakan adalah sebagai berikut:

Tabel 6.5 | Pemetaan Isu Strategis KLHS RPJMD dengan Nomenklatur Program
Keppmendagri 050-3708 Tahun 2020

No	Isu Strategis KLHS	Indikator TPB	Nomenklatur Program Pembangunan SKPD	SKPD Penanggung Jawab
1	Peningkatan kualitas Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Dasar sebagai bagian dari peningkatan kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat		
2	Peningkatan cadangan air baku dan penikatan kapasitas sanitasi sebagai pemenuhan hak dasar warga Kota Makassar	Mendorong konservasi sumber-sumber air baku untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas air baku	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum
		Peningkatan akses terhadap layanan air minum dan sanitasi layak	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum
		Meningkatkan kapasitas untuk perubahan perilaku hidup bersih termasuk Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) dimasyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Peningkatan sarana pengelolaan air buangan dan tinja	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum
3	Makassar Kota Inklusif yang berkelanjutan dan berkeadilan	Mengupayakan terdapatnya peningkatn serapan tenaga kerja dalam industri manufaktur	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Ketenagakerjaan
			Program Pengembangan Kapasitas dan Daya Saing Kepemudaan	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Mendorong upaya pengurangan tingkat pengangguran setengah terbuka	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Ketenagakerjaan
			Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas Perdagangan
			Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi UKM
		Mendorong terdapatnya moda transportasi massal yang layak dan aman	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
		Mendorong upaya pemilahan sampah dari tingkat rumah tangga untuk meningkatkan jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Seluruh Kecamatan

No	Isu Strategis KLHS	Indikator TPB	Nomenklatur Program Pembangunan SKPD	SKPD Penanggung Jawab
4	Makassar tangguh bencana beradaptasi terhadap perubahan Iklim	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non	Dinas Pemadam Kebakaran
		Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulanga n Bencana
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Seluruh Kecamatan

Program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Program pembangunan daerah Kota Makassar Tahun 2022-2026, merupakan sekumpulan program prioritas yang secara spesifik langsung terkait dengan pencapaian tujuan dan sasaran, program untuk menjawab prioritas kepala daerah yang telah disampaikan pada proses politik, program yang terkait penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta isu strategis KLHS RPJMD. Adapun program pembangunan daerah (program prioritas) Kota Makassar selama kurun waktu lima tahun mendatang, tercantum pada tabel berikut:

Tabel 6.6 | Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Tahun 2022 – 2026 Kota Makassar

Visi: Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia Yang “Sombere’ dan Smart City” dengan Imunitas Kota yang Kuat untuk Semua																		
Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025					Tahun 2026	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
I			Misi 1: Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM Kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi															
1,1			Tujuan: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	82,25	82,95		83,3		83,67		84,05		84,45				
1.1.1			Sasaran: Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	0,818	0,837		0,847		0,856		0,865		0,875				
1	01	2	Program Pengelolaan Pendidikan	Jumlah Penerima Beasiswa "Anak Lorong Berprestasi"	400 org	400 org	268.563.431.000	400 org	278.653.797.000	400 org	294.109.456.000	400 org	315.939.353.000	400 org	345.011.427.000	2.400 org	1.502.277.464.000	Dinas Pendidikan
			Angka Harapan Lama Sekolah	15,56 Tahun	15,96 Tahun	16,16 Tahun		16,36 Tahun		16,56 Tahun		16,76 Tahun						
			Angka Rata-Rata Lama Sekolah	11,2 Tahun	11,5 Tahun	11,8 tahun		12 tahun		12,2 tahun		12,4 tahun						
			Angka Partisipasi Murni (PAUD, SD Dan SMP)	PAUD= 21.1	PAUD= 30,26	PAUD= 36,93		PAUD= 46,33		PAUD= 59,63		PAUD= 78,64		PAUD= 78,64				
				SD= 96.79	SD= 100%	SD=100%		SD=100%		SD=100%		SD=100%		SD=100%				
				SMP= 80.27	SMP= 100%	SMP= 100%		SMP= 100%		SMP= 100%		SMP= 100%		SMP= 100%				
			Angka Partisipasi Kasar (PAUD, SD Dan SMP)	PAUD= 24,72	PAUD= 33,25	PAUD= 40,59		PAUD= 50,91		PAUD= 65,52		PAUD= 80,42		PAUD= 80,42				
				SD= 103.54	SD= 100%	SD=100%		SD=100%		SD=100%		SD=100%		SD=100%				
				SMP= 93.77	SMP= 100%	SMP=100%		SMP=100%		SMP=100%		SMP=100%		SMP=100%				
			Persentase Sarana Dan Prasarana Pendidikan (PAUD, SD, SMP) Dalam Kondisi Baik	PAUD= 70%	PAUD= 72%	PAUD= 74%		PAUD= 76%		PAUD= 78%		PAUD= 80%		PAUD= 80%				
				SD= 70%	SD= 72%	SD=74%		SD=76%		SD=78%		SD=80%		SD=80%				
				SMP= 75%	SMP = 87%	SMP=89%		SMP=91%		SMP=92%		SMP=94%		SMP=94%				
			Persentase Ketuntasan Pendidikan Kesetaraan (A, B, C)	84,26%	88,26%	90,26%		92,26%		94,26%		96,26%		96,26%				

Visi: Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia Yang “Sombere’ dan Smart City” dengan Imunitas Kota yang Kuat untuk Semua																		
Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	1	4	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio Guru-Murid (PAUD, SD, SMP)	PAUD= 1 : 23	PAUD= 1 : 21	92.448.000	PAUD=1 : 20	95.921.000	PAUD=1 : 19	101.242.000	PAUD=1 : 18	108.756.000	PAUD=1 : 16	118.767.000	PAUD=1 : 16	517.134.000	Dinas Pendidikan
					SD= 1 : 44	SD= 1 : 40		SD=1 : 36		SD=1 : 33		SD=1 : 30		SD=1 : 28		SD=1 : 28		
					SMP= 1 : 35	SMP= 1 : 34		SMP=1 : 33		SMP=1 : 33		SMP=1 : 32		SMP=1 : 30		SMP=1 : 30		
				Persentase Guru Yang Bersertifikasi (PAUD, SD, SMP)	PAUD= 35.49%	PAUD= 36.49%		PAUD= 37,49%		PAUD=38.49%		PAUD=39.49%		PAUD=40.5%		PAUD=40.5%		
					SD= 40.53%	SD= 42.18%		SD= 43,83%		SD=45.83%		SD=47.83%		SD=50%		SD=50%		
					SMP= 44.66%	SMP= 45.43%		SMP= 46,23%		SMP=47.03%		SMP= 47,88%		SMP=48.73%		SMP=48.73%		
2	23	2	Program Pembinaan Perpustakaan	Angka Budaya Baca Kota Makassar	44,81%	50%	785.895.000	55%	1.315.422.000	60%	1.388.382.000	65%	1.491.433.000	70%	1.628.672.000	70%	6.609.804.000	Dinas Perpustakaan
				Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per tahun	186,527	500.000 orang/tahun		520.000 orang/tahun		540.000 orang/tahun		560.000 orang/tahun		580.000 orang/tahun		580.000 orang/tahun		
				Jumlah Koleksi Judul Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah	26.212	27.712		29.212		30.712		32.212		33.712		33.712		
				Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat	7 Pustakawan, 133 Tenaga teknis	12 Pustakawan, 138 Tenaga Teknis		17 Pustakawan, 141 Tenaga Teknis		22 Pustakawan, 144 Tenaga Teknis		27 Pustakawan, 147 Tenaga Teknis		32 Pustakawan, 150 Tenaga Teknis		32 Pustakawan, 150 Tenaga Teknis		
8	1	2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Kelompok Masyarakat Yang Mendapat Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	2,10%	32%	1.198.667.000	48% (46.083)	1.243.704.000	64% (61.444)	1.312.687.000	80%	1.410.120.000	96% (92.166)	1.539.876.000	96% (92.166)	6.705.054.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Poitik

Visi: Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia Yang “Sombere’ dan Smart City” dengan Imunitas Kota yang Kuat untuk Semua																			
Kode				Misi /Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target
1.1.2				Sasaran: Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Perkapita	16.89 jt	17.94 jt		18.26 jt		18.58 jt		18.91 jt		19.23 jt				
2	18	4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Pelayanan Perizinan	85,49%	100%	672.441.000	100%	697.705.000	100%	736.404.000	100%	791.062.000	863.854.000	100%	3.761.466.000	Dinas Penanaman Modan dan PTSP		
3	30	7	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal	400	500	511.573.000	500	530.793.000	500	560.233.000	500	601.816.000	657.194.000	2900	2.861.609.000	Dinas Perdagangan		
2	17	8	Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro Dan Kecil	75%	79%	1.211.719.000	79%	1.257.245.000	81%	1.326.979.000	81%	1.425.472.000	1.556.641.000	82% (13.177/15.877 x 100)	6.778.056.000	Dinas Koperasi UKM		
				Jumlah Wirausaha Baru (Start-Up)	0 UMKM	10 UMKM	10 UMKM	10 UMKM	10 UMKM	10 UMKM	50 UMKM								
3	25	2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap	18.761 Ton	19,518 Ton	1.236.064.000	19.909 Ton	1.278.589.000	20.307 Ton	1.344.120.000	20.713 Ton	1.444.222.000	21.127 Ton	1.578.234.000	21.127 Ton	6.881.229.000	Dinas Perikanan dan Pertanian	
				Cakupan Bina Kelompok Nelayan	44,79% (73 Kelompok)	14,7% (113 Kelompok)		15,9% (123 Kelompok)		17,2 % (143 Kelompok)		18,9% (153 Kelompok)		20,4% (163 Kelompok)		20,4% (163 Kelompok)			

Visi: Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia Yang “Sombere’ dan Smart City” dengan Imunitas Kota yang Kuat untuk Semua																		
Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025					Tahun 2026	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
1,2			Tujuan: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Efektif	Indeks Reformasi Birokrasi	63,23	64,33		64,71		65,8		66,03		66,1		66,1		
1.2.1			Sasaran: Terwujudnya Pelayanan Publik yang “Sombere’ dan Smart”	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,66	79,5		80		80,5		81		82,5		82,5		
2	16	3	Program Aplikasi Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (Opd) Yang Terhubung Dengan Akses Internet Yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo	100%	100%	21.626.122.000	100%	22.438.650.000	100%	23.683.220.000	100%	25.441.077.000	100%	27.782.111.000	100%	120.971.180.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi	30%	32,87%		49,31%		65,75%		95,89%		100%		100%			
2	12	2	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Anak Usia 1-17 Tahun Kurang 1 (Satu) Hari Yang Memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)	13%	45%	4.057.731.000	60%	4.210.186.000	75%	4.443.706.000	80%	4.773.535.000	100%	5.212.785.000	100%	22.697.943.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	93,14%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Di Tingkat Kecamatan	100%	100%	102.515.439.000	100%	106.367.113.000	100%	112.266.812.000	100%	120.599.674.000	100%	131.697.000.000	100%	573.446.038.000	Seluruh Kecamatan

Visi: Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia Yang “Sombere’ dan Smart City” dengan Imunitas Kota yang Kuat untuk Semua																		
Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1.2.2			Sasaran: Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Status Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Sangat Tinggi (3,4216)	Sangat Tinggi		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi		
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik di Kecamatan	100%	100%	156.801.963.000	100%	162.693.269.000	100%	171.717.121.000	100%	184.462.606.000	100%	201.436.462.000	100%	877.111.421.000	Seluruh Kecamatan
5	1	2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda	Tidak Ada	Ada	4.778.112.000	Ada	4.957.633.000	Ada	5.376.938.000	Ada	5.976.982.000	Ada	7.102.227.000	Ada	28.191.892.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Yang Telah Ditetapkan Dengan Perkada	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada						
				Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada						

Visi: Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia Yang “Sombere’ dan Smart City” dengan Imunitas Kota yang Kuat untuk Semua																		
Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1.2.2			Sasaran: Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Status Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Sangat Tinggi (3,4216)	Sangat Tinggi		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi				
5	2	2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WDP	WTP	122.481.710.000	WTP	127.083.547.000	WTP	134.132.294.000	WTP	144.088.092.000	WTP	157.346.773.000	WTP	685.132.416.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)	30%	43,60%	31.240.980.000	46.34%	32.414.755.000	49,91%	34.212.655.000	53,04%	36.752.045.000	56,69%	40.133.890.000	56,69%	174.754.325.000	Badan Pendapatan Daerah
				Deviasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran PAD dalam APBD	102%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Visi: Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia Yang “Sombere’ dan Smart City” dengan Imunitas Kota yang Kuat untuk Semua																	
Kode			Misi /Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab	
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025					Tahun 2026
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target
II			Misi 2: Rekonstruksi kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi dan kesehatan kota yang kuat untuk semua														
2.1			Tujuan: Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Mitigasi Sosial	Indeks Kesehatan	0,8	0,804		0,806		0,808		0,81		0,812			
2.1.1			Sasaran: Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan	Usia Harapan Hidup	72,09	72,1		72,2		72,3		72,4		72,5			
1	2	2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan ibu	92,38%	100%	343.943.101.000	100%	356.865.604.000	100%	376.659.317.000	100%	404.616.373.000	100%	441.848.316.000	1.923.932.711.000	Dinas Kesehatan
			Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan	97,5%	100%	100%		100%		100%		100%					
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	77,76%	100%	100%		100%		100%		100%					
			Persentase Balita yang mendapat layanan kesehatan	25,17%	100%	100%		100%		100%		100%					
			Persentase Warga Negeran usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	35,99%	100%	100%		100%		100%		100%					
			Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	61,48%	100%	100%		100%		100%		100%					

Visi: Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia Yang “Sombere’ dan Smart City” dengan Imunitas Kota yang Kuat untuk Semua																			
Kode				Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Persentase Warga Degara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	85,28%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				Persentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	61,39%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				Persentase Warga Negara penderita Diabetes Melitus yang mendapat pelayanan kesehatan	70,07%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				Persentase Warga Negara dengan Gangguan Jiwa Berat yang terlayani kesehatan	20,52%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				Persentase Warga Negara terduga Tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatann	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				Persentase Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan	20,52%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			

Visi: Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia Yang “Sombere’ dan Smart City” dengan Imunitas Kota yang Kuat untuk Semua																		
Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Bayi Mendapat Asi Eksklusif	69	100	7.818.287.000	100	8.112.033.000	100	8.561.971.000	100	9.197.472.000	100	10.043.804.000	100	43.733.567.000	Dinas Kesehatan
				Persentase Posyandu Aktif	40	45		50		55		60		65		65		
2.1.2			Sasaran: Meningkatnya Kualitas Perlindungan Masyarakat Miskin	Angka Kemiskinan (%)	4,54%	4,40%		4,30%		4,20%		4,10%		4,00%		4,00%		
1	6	4	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	3.341.673.000	100%	3.467.225.000	100%	3.659.536.000	100%	3.931.160.000	100%	4.292.897.000	100%	18.692.491.000	Dinas Sosial
				Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase gelandangan/pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial tuna sosial di luar panti		100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Visi: Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia Yang “Sombere’ dan Smart City” dengan Imunitas Kota yang Kuat untuk Semua																		
Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	6	5	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Perentase Rumah Tangga Yang Memperoleh Perlindungan Dan Jaminan Sosial	100%	100%	1.682.010.000	100%	1.745.205.000	100%	1.842.004.000	100%	1.978.724.000	2.160.802.000	100%	9.408.745.000	Dinas Sosial	
2	8	6	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Kelurahan Ramah Anak	30%	39.87% (61 Kelurahan)	477.497.000	54.9% (84 Kelurahan)	495.437.000	69.93% (107 Kelurahan)	522.917.000	84.97% (130 Kelurahan)	561.730.000	100% (153 Kelurahan)	613.419.000	100% (153 Kelurahan)	2.671.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
2	9	4	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	29,41%	23,52%	169.182.000	17,64%	175.539.000	11,76%	185.275.000	11,76%	199.027.000	5,88%	217.341.000	5,88%	946.364.000	Dinas Ketahanan Pangan
5	5	2	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	54,55%	70%	1.860.217.000	80%	1.930.109.000	85%	2.037.163.000	90%	2.188.369.000	100%	2.389.738.000	100%	10.405.596.000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan		100%	100%	100%		100%		100%		100%						
		Persentase SKPD Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah		100%	100%	100%		100%		100%		100%						
		Persentase Kebijakan Inovasi Yang Diterapkan Di Kota Makassar		44,08%	66,67%	75,47%		89,29%		94,93%		100%		100%				

Visi: Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia Yang “Sombere’ dan Smart City” dengan Imunitas Kota yang Kuat untuk Semua																		
Kode				Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab	
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025					Tahun 2026
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target
2,2				Tujuan: Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Secara Merata	Pertumbuhan Ekonomi (%)	-1,27%	4,00%		4,90%		5,80%		6,70%		7,60%			
2.2.1				Sasaran: Tersedianya kemudahan akses peluang kerja dan peluang bisnis baru	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	15,92%	10,31%		9,81%		8,81%		8,31%		7,81%			
					Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	58,05%	59,52%		60,28%		61,04%		61,81%		62,59%		62,59%	
2	7	4	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kota Makassar	50,33%	55%	1.616.611.000	60%	1.677.350.000	63%	1.770.385.000	65%	1.901.789.000	75%	2.076.788.000	75%	9.042.923.000	Dinas Ketenagakerjaan
		Jumlah Peluang Kerja dan Peluang Bisnis Baru		4.292	820	864		956		975		1.010		14.917				
2	7	3	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0,40%	0,58%	3.599.480.000	0,70%	3.734.718.000	1,03%	3.941.866.000	1,03%	4.234.446.000	1,20%	4.624.090.000	4,94%	20.134.600.000	Dinas Ketenagakerjaan
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja		20,66%	21,00%	21,50%		22,00%		22,50%		23,00%		23,00%				
		Jumlah Peserta Pelatihan Skill Training Gratis Sektor Ketenagakerjaan		840 orang	1060 orang	1000 orang		1190 orang		1230 orang		1210 orang		6530 orang				

Visi: Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia Yang “Sombere’ dan Smart City” dengan Imunitas Kota yang Kuat untuk Semua																		
Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	19	2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	50%	60%	3.775.277.000	70%	3.917.120.000	80%	4.134.385.000	90%	4.441.255.000	100%	4.849.929.000	100%	21.117.966.000	Dinas Pemudaaan Olahraga
				Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan Dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	35,40%	48,10%		60,75%		73,41%		86,07%		100%		100%		
2	17	7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatnya Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha	89,02% (4.137/4.647 x 100)	89,99% (4.722/5.247 x 100)	3.375.471.000	89,99% (4.992/5.547 x 100)	3.502.293.000	90,98% (5.320/5847 x 100)	3.696.549.000	91,99% (5.701/6.197 x 100)	3.970.921.000	91,99% (6.023/6.547 x 100)	4.336.317.000	91,99% (6.023/6.547 x 100)	18.881.551.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah
				Jumlah Peserta Pelatihan Skill Training Gratis Sektor UMKM	0	1260 UMKM		1260 UMKM		1260 UMKM		1260 UMKM		1260 UMKM		1260 UMKM		
3	26	5	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Peserta Pelatihan Skill Training Gratis Sektor Pariwisata	200 Orang	750 Orang	2.427.804.000	800 Orang	2.519.020.000	850 Orang	2.658.739.000	900 Orang	2.856.080.000	950 Orang	3.118.891.000	950 Orang	13.580.534.000	Dinas Pariwisata
				Persentase SDM Pariwisata Yang Mendapat Sertifikasi	(400 / 6.165) x	(400 / 6.165) x		6,4% = (400 / 6.165) x 100%		6,4% = (400 / 6.165) x 100%		6,4% = (400 / 6.165) x 100%		6,4% = (400 / 6.165) x 100%		6,4% = (400 / 6.165) x 100%		
				Persentase Sdm Ekonomi Kreatif Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Tidak Ada	(100 / 1.000) x		10% = (100 / 1.000) x 100%		10% = (100 / 1.000) x 100%		10% = (100 / 1.000) x 100%		10% = (100 / 1.000) x 100%		10% = (100 / 1.000) x 100%		
2	8	4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) yang mendapat pemberdayaan	5,51%	23,33%	664.673.000	46,67%	689.646.000	64,16%	727.897.000	81,67%	781.925.000	100%	853.876.000	100%	3.718.017.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Visi: Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia Yang “Sombere’ dan Smart City” dengan Imunitas Kota yang Kuat untuk Semua																		
Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
4	1	3	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi Yang Dibawa Ke Tahun Berikutnya Yang Ditandatangani Pada Kuartal Pertama	0%	10%	9.844.374.000	15%	10.214.243.000	15%	10.780.780.000	20%	11.580.970.000	20%	12.646.626.000	20%	55.066.993.000	Sekretariat Daerah
				Persentase Jumlah Pengadaan Yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase Perusahaan Daerah Yang Berkinerja Baik	83,33% (5 perusda baik, 1 kurang baik)	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase Penyerapan realisasi anggaran melalui Sistem Monitoring Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (SISMONTEPRA)	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
2	22	5	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan	4.94% (8 dari 162 Cagar Budaya)	19,70%	744.891.000	32 Cagar Budaya	772.878.000	32 Cagar Budaya	815.746.000	32 Cagar Budaya	876.293.000	32 Cagar Budaya	956.928.000	100%	4.166.736.000	Dinas Kebudayaan
2	22	6	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Koleksi Museum Kota Makassar Yang Terawat Dengan Baik	60,17% (dari 693 koleksi yang terawat dengan baik 417 koleksi)	56 Koleksi pertahun	1.813.407.000	56 Koleksi pertahun	1.881.540.000	56 Koleksi pertahun	1.985.900.000	56 Koleksi pertahun	2.133.301.000	56 Koleksi pertahun	2.329.603.000	56 Koleksi pertahun	10.143.751.000	Dinas Kebudayaan
				Jumlah Pengunjung Museum Kota Makassar	3.364 orang	4.000 orang		4.500 orang		5.200 orang		5.800 orang		6.400 orang		6.400 orang		

Visi: Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia Yang “Sombere’ dan Smart City” dengan Imunitas Kota yang Kuat untuk Semua																			
Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab	
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target
3	26	2	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Tingkat Hunian Akomodasi	34% = 1.341.260 / 3. 960.560 x 100%	43% = (1.788.193/ 4.158.588) x 100%	8.282.089.000	48% (1.996.122/ 4.158.588) x 100%	8.593.261.000	51% = (2.120.880 / 4.158.588) x 100%	9.069.891.000	54% = (2.245.638/ 4.158.588) x 100%	9.743.092.000	60% = (2.495.153/ 4.158.588) x 100%	10.639.630.000	60% = (2.495.153/ 4.158.588) x 100%	46.327.963.000	Dinas Pariwisata	
		Jumlah Destinasi Wisata yang berstandar Nasional		0	1 Destinasi (Paropo)	1 Destinasi (Lantebung)		1 Destinasi (Pantai Biru/ Tanjung Bayam)		1 Destinasi (Samalona)		1 Destinasi (Lakkang)		5 Destinasi					
2,2,2			Sasaran: Terwujudnya gerakan masyarakat memperkuat	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per kapita	115,4jt	125,4jt		131,3jt		137,3jt		143,35jt		149,45jt		149,45jt			
				Rasio Gini	0,4	0,395		0,392		0,39		0,388		0,386		0,386			
3	31	2	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Pertambahan Jumlah Industri Kecil Dan Menengah Di Kota Makassar	1215 data hasil monev	360	2.107.705.000	360	2.186.895.000	360	2.308.193.000	360	2.479.516.000	360	2.707.675.000	360	11.789.984.000	Dinas Perdagangan	
		Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri		0 (RPIK belum ada)															
		Jumlah Peserta Pelatihan Skill Training Gratis Sektor Perindustrian		0	250	250		250		250		250		1250					
3	26	4	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	PAD Sektor Ekonomi Kreatif	Tidak Ada	15.1% = (260.080.914.535/ 1.721.935.816.478) x 100%	5.266.403.000	15.17% = (290.978.527.182/ 1.978.742.431.378) x 100%	5.464.270.000	15.57% = (330.202.432.646 / 2.121.425.495.798) x 100%	5.767.349.000	17.15% = (381.449.850.193 / 2.224.225.997.905) x 100%	6.195.423.000	18.78% = (448.127.284.007 / 2.385.791.372.427) x 100%	6.765.512.000	18.78% = (448.127.284.007 / 2.385.791.372.427) x 100%	29.458.957.000	Dinas Pariwisata	
		Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang difasilitasi Mendapatkan HAKI		Tidak ada	75	100		125		150		200		200					

Visi: Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia Yang “Sombere’ dan Smart City” dengan Imunitas Kota yang Kuat untuk Semua																		
Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	22	2	Program Pengembangan Kebudayaan	Cakupan Objek Pemajuan Kebudayaan Yang Dilestarikan	44,4% (100 OPK dari 225 OPK)	46,6% (5 OPK)	2.721.099.000	48,8%(5 OPK)	2.823.335.000	51,2%(5 OPK)	2.979.933.000	53,3%(5 OPK)	3.201.114.000	55,5% (5 OPK)	3.495.674.000	55,50%	15.221.155.000	Dinas Kebudayaan
3	27	2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	(0,1 %) 205, 04 Milyar	(0,1%) 205,09 Milyar	1.221.463.000	(0,1%) 209,16 Milyar	1.267.356.000	(0,1%) 211,25 Milyar	1.337.650.000	(0,1) 213,36 Milyar	1.436.935.000	(0,1%) 215,20 Milyar	1.569.159.000	(0,1 %) 215,20 Milyar	6.832.563.000	Dinas Perikanan dan Pertanian
				Produktivitas Pertanian Per Hektar Pertahun	6,6 Ton Per hektar	6,8 Ton Per hektar		6,9 Ton Per hektar		7,0 Ton Per hektar		7,1 Ton Per hektar		7,2 Ton Per hektar		7,2 Ton Per hektar		
				Cakupan Pengawasan Mutu Pakan dan Produksi Benih/Bibit Ternak	230 Sampel, 500 ekor	300 Sampel (25%) ; 200 ekor (0,5 %)		350 Sampel (29 %); 250 ekor (0,69 %)		400 Sampel (33 %) ; 300 ekor (0,8)		450 Sampel (38 %) 350 ekor (0,96 %)		500 Sampel (42 %) ; 400 ekor (1,1 %)		500 Sampel (42 %) ; 400 ekor (1,1 %)		
2	9	3	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan Energi Dan Protein Perkapita	Energi: 2.523 Protein: 125,78	Energi: 2600 Protein: 126	4.551.546.000	Energi: 2600 Protein: 126	4.722.554.000	Energi: 2700 Protein: 127	4.984.493.000	Energi: 2700 Protein: 128	5.354.461.000	Energi: 2700 Protein: 129"	5.847.167.000	Energi: 2700 Protein: 129	25.460.221.000	Dinas Ketahanan Pangan
				Jumlah Lorong Garden dan Lorong Wisata	43 Klp	500 Lorong Garden dan Lorong Wisata		500 Lorong Garden dan Lorong Wisata		500 Lorong Garden dan Lorong Wisata		500 Lorong Garden dan Lorong Wisata		2.00 Lorong Garden dan Lorong Wisata				
				Skor Pola Pangan Harapan	78,8	80		82		85		88		90		90		

Visi: Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia Yang “Sombere’ dan Smart City” dengan Imunitas Kota yang Kuat untuk Semua																		
Kode				Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab	
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025					Tahun 2026
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target
III				Misi 3: Restorasi ruang kota yang inklusif menuju kota nyaman kelas dunia yang “sombere’ dan smart city” untuk semua														
3,1				Tujuan: Mewujudkan Makassar menjadi "Livable City" dan "Resilient City"	Indeks Kota Nyaman (Livable City Index)	55,7	59,83		60,22		60,22		60,22		60,61			
3.1.1				Sasaran: Tersedianya Infrastruktur Menuju Kota Nyaman	Indeks Layanan Infrastruktur	72,8	74,22		75,03		76,27		77,21		78,56			
1	3	10	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kota	89,01%	90,51%	306.927.098.000	92,01%	317.458.850.000	93,01%	335.066.848.000	96,01%	359.936.757.000	96,01%	393.057.377.000	96,01%	1.712.446.930.000	Dinas Pekerjaan Umum
				Persentase Panjang Trotoar terhadap Panjang Jalan	3,37%	4%		4,57%		5%		6%		7%		7%		
1	3	3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapat Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga Di Seluruh Kota	49,34%	100%	22.294.832.000	100%	23.132.485.000	100%	24.415.540.000	100%	26.227.751.000	100%	28.641.174.000	100%	124.711.782.000	Dinas Pekerjaan Umum

Visi: Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia Yang “Sombere’ dan Smart City” dengan Imunitas Kota yang Kuat untuk Semua																	
Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab	
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025					Tahun 2026
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target
1	3	2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir Yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir Di Wilayah Sungai Kewenangan Kota	71,57%	77,43%	14.218.092.000	83,29%	14.752.289.000	89,15%	15.570.532.000	95,00%	16.726.234.000	100%	18.265.348.000	79.532.495.000	Dinas Pekerjaan Umum
				Rasio Luas Kawasan Permukiman Sepanjang Pantai Rawan Abrasi Erosi Dan Akresi Yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengaman Pantai Di Wilayah Sungai Kewenangan Kota	96,37%	96,87%		97,37%	97,87%		98,37%	98,87%	98,87%	98,87%			
1	3	6	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	81,25%	87,05%	88.699.046.000	89,45%	92.031.614.000	92,65%	97.136.189.000	94,85%	104.345.999.000	97,00%	113.947.697.000	496.160.545.000	Dinas Pekerjaan Umum
				Persentase Titik Genangan Yang Dikurangi	73,53 %	78,82%			84,12%		89,41%		94,71%	100,00%	100,00%	100%	
1	3	5	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	87,69%	100%	16.647.307.000	100%	17.272.773.000	100%	18.230.815.000	100%	19.583.974.000	100%	21.386.051.000	93.120.920.000	Dinas Pekerjaan Umum
2	11	11	Program Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kota Makassar	85%	99%	32.847.703.000	99%	34.081.845.000	99%	35.972.210.000	100%	38.642.202.000	100%	42.197.975.000	183.741.935.000	Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase Sampah Yang Terkurangi Melalui 3r	13,08%	26%			27%		28%		30%	30%	30%	30%	

Visi: Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia Yang “Sombere’ dan Smart City” dengan Imunitas Kota yang Kuat untuk Semua																		
Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	4	4	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha Di Kota Makassar Yang Ditangani	0% dari 5000 Unit	20% (1000 Unit)	215.659.000	40% (2000 unit)	223.762.000	60% (3000 unit)	236.173.000	80% (4000 unit)	253.703.000	100% (5000 unit)	277.048.000	100% (5.000 Unit)	1.206.345.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	2	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni	100	100	2.172.083.000	100	2.063.572.000	100	2.169.562.000	100	2.325.204.000	100	2.537.329.000	100	11.267.750.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Persentase Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni	100	100		100		100		100						
1	4	5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Perumahan Yang Sudah Dilengkapi Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	(5590 dari 15	38.4% (5990 dari 15.600)	637.604.000	40.96% (6390 dari 15.600)	661.560.000	43.53% (6790 dari 15.600)	698.254.000	46.09% (7190 dari 15.600)	750.081.000	"46.09% (7190 dari 15.600)"	819.101.000	46,09%	3.566.600.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Visi: Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia Yang “Sombere’ dan Smart City” dengan Imunitas Kota yang Kuat untuk Semua																		
Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025					Tahun 2026	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
2	15	2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio Konektivitas Kota	0%	20% Penyusunan rencana induk jaringan lalu lintas	95.431.335.000	40% Penyusunan rencana induk jaringan Jalan Kota Makassar	99.016.846.000	60% Rencana Jaringan antar kecamatan lalu lintas Kota Makassar	104.508.860.000	80% Jaringan lalu lintas	112.265.896.000	100%	122.596.367.000	100%	533.819.304.000	Dinas Perhubungan
		Pemasangan Rambu-Rambu		93,20%	2,96%	10,71%		12,50%		14,28%		17,85%		17,85%				
		Persentase Layanan Angkutan Darat		11,17%	12%	13%		14%		15%		16%		16%				
		Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan		0,10%	0,10%	0,11%		0,12%		0,13%		0,14%		0,14%				
1	3	12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Ketaatan terhadap RTRW	80%	85,00%	4.171.898.000	85%	4.328.643.000	85%	4.568.733.000	90%	4.907.841.000	90%	5.359.450.000	90%	23.336.565.000	Dinas Penataan Ruang
1	3	8	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Kebutuhan Gedung Pemerintah Yang Terbangun	27,41%	48,22%	281.622.051.000	58,37%	292.203.051.000	68,52%	308.410.225.000	88,83%	331.301.580.000	89%	361.787.251.000	89%	1.575.324.158.000	Dinas Pekerjaan Umum

Visi: Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia Yang “Sombere’ dan Smart City” dengan Imunitas Kota yang Kuat untuk Semua																		
Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	5	2	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100	100	24.654.476.000	100	25.580.784.000	100	26.999.634.000	100	29.003.648.000	100	31.672.502.000	100	137.911.044.000	Satuan Polisi Pamong Praja
				Persentase Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Dapat Diselesaikan	82,7	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Perda Dan Perkada Yang Ditegakkan	82,8	100		100		100		100		100		100		
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lingkup Kecamatan Yang Dapat Diselesaikan	100%	100%	7.418.082.000	100%	7.696.792.000	100%	8.123.696.000	100%	8.726.670.000	100%	9.529.678.000	100%	41.494.918.000	Seluruh Kecamatan
1	5	4	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	100%	18.538.507.000	100%	19.235.029.000	100%	20.301.908.000	100%	21.808.792.000	100%	23.815.590.000	100%	103.699.826.000	Dinas Pemadam Kebakaran
				Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	100%	15 menit		15 menit		15 menit		15 menit		15 menit				

Visi: Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia Yang “Sombere’ dan Smart City” dengan Imunitas Kota yang Kuat untuk Semua																			
Kode				Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	5	3	Program Penanggulangan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	80%	100	7.619.231.000	100	7.905.498.000	100	8.343.980.000	100	8.963.301.000	100	9.788.085.000	100	42.620.095.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
				Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	99,04%	100		100		100		100		100		100			
				Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	99,85%	100		100		100		100		100		100			
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik	95%	95%	73.381.867.000	95%	76.138.944.000	95%	80.362.024.000	95%	86.326.793.000	95%	94.270.404.000	95%	410.480.032.000	Seluruh Kecamatan	
				Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			

Visi: Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia Yang “Sombere’ dan Smart City” dengan Imunitas Kota yang Kuat untuk Semua																	
Kode			Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab	
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025					Tahun 2026
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target
3.1.2			Sasaran: Meningkatkan Tata Kelola Lingkungan Hidup yang Lestari	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Makassar	53.052	58,08		58,38		59,08		59,58		60,08			
2	11	3	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air Dan Indeks Kualitas Udara	IKA = 57,11	IKA = 58,10	1.760.553.000	IKA = 58,6	1.826.700.000	IKA = 59,1	1.928.019.000	IKA = 59,6	2.071.124.000	IKA = 60,1	2.261.704.000	9.848.100.000	Dinas Lingkungan Hidup
					IKU = 77,22	IKU = 78,22		IKU = 78,72		IKU = 79,22		IKU = 79,72		IKU = 80,22			
2	11	4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	19,29	20,79	51.139.213.000	21,29	53.060.597.000	21,79	56.003.627.000	22,29	60.160.425.000	22,79	65.696.260.000	286.060.122.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Ketaatan Penanggung-jawab Usaha Dan/Atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Kota Makassar	20%	20,50%	1.148.434.000	21%	1.191.582.000	21,50%	1.257.674.000	22%	1.351.023.000	23%	1.475.341.000	6.424.054.000	Dinas Lingkungan Hidup

Selain Program Pembangunan Daerah (Program Prioritas), yang diproyeksikan dibiayai oleh APBD Kota Makassar seperti di atas, berikut merupakan program strategis lainnya yang dibiayai di luar APBD Kota Makassar, antara lain yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Sulawesi Selatan, KPBU dan Swasta.

Tabel 6.7 | Rencana Strategis Tahun 2022 – 2026 Kota Makassar

No	Kegiatan	Sumber Anggaran					Target
		APBN	Pemda	KPBU	BUMN	Swasta	
1	Pengembangan Wilayah Metropolitan	✓	✓	✓		✓	(2020 - 2024)
2	Kereta api Makassar - Parepare	✓		✓			2024 Full Operasional
3	Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu	✓			✓	✓	2023
4	Sistem Angkutan Umum Massal	✓	✓			✓	2023
5	Rumah Susun Perkotaan	✓			✓		2024
6	Pengembangan Bandara Hasanuddin	✓			✓		
7	Penyediaan air baku di Kawasan DPP Baru Makassar – Selayar – Toraja dan sekitarnya	✓					
8	Pembangunan Infrastruktur jaringan gas bumi untuk rumah tangga			✓			
9	Pembangunan Instalasi PSEL		✓				
10	Pembangunan PLTS Rooftop	✓					
11	Perjanjian Kerjasama penyelesaian permasalahan pelayanan public di Kawasan Mamminasata	✓					
12	Pembangunan Pusat Pengembangan Keahlian	✓					
13	Pembangunan dan Peningkatan SPAM	✓					
14	Pembangunan SPALD-T Skala Kota/Regional	✓	✓			✓	
15	Pembangunan SPALD-T Skala Permukiman	✓	✓			✓	
16	Pembangunan SPALD-S Skala Kota (IPLT)	✓					
17	Pembangunan TPA	✓	✓	✓			
18	Pembangunan TPST (skala kawasan)	✓					

VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN

Analisis keuangan Daerah dilakukan untuk menghitung proyeksi kapasitas riil keuangan Daerah, kerangka pendanaan dan pendanaan indikatif. Kapasitas riil keuangan Daerah diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional. Kapasitas riil keuangan daerah dihitung dengan mengurangi total penerimaan Daerah dengan pengeluaran pembiayaan dan belanja tidak langsung. Kapasitas riil keuangan Daerah dialokasikan ke dalam prioritas pertama, prioritas kedua, dan prioritas ketiga, dimana prioritas pertama dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar, prioritas kedua dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah, sedangkan prioritas dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

7.1.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Kebijakan pendapatan daerah diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan pada sektor Pendapatan Asli Daerah yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi, hasil-hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sektor Pendapatan Transfer yang meliputi transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah serta pada sektor lain-lain pendapatan yang sah meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan yang sah.

Selanjutnya, dilakukan analisis untuk mengidentifikasi proyeksi pendapatan daerah, dimana analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun ke depan. Analisis dilakukan berdasarkan pada data dan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah, antara lain: 1). Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu, 2). Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi), 3) Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah; dan 4). Kebijakan di bidang keuangan negara.

Rata-rata pertumbuhan pada Pendapatan Daerah pada periodik Tahun 2016-2020 mengalami perlambatan dan berada diangka -1,17%. Tentunya jika dilihat dari sisi kapasitas fiskal daerah, Pendapatan asli daerah menjadi salah satu sumber utama penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Besar atau kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dapat meningkatkan atau mengurangi ketergantungan pusat. Kinerja rata-rata pertumbuhan pendapatan asli daerah Kota Makassar secara akumulatif menunjukkan tren positif pada sisi akumulatif pada rata-rata pertumbuhan akan tetapi pada sisi Target Penerimaan dan realisasi tidak menunjukkan performa yang cukup memuaskan dari sudut pandang tahunan dan tentunya penerimaan pendapatan asli daerah akan sangat berpengaruh dengan kebijakan belanja yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam mencapai tujuan pembangunan.

Dengan melihat Performa Pendapatan Daerah Kota Makassar Tahun 2016-2020, pada masa yang akan datang tentunya harapan Pemerintah Kota Makassar dapat meningkat lebih tinggi dalam sisi rencana hingga realisasi nantinya, dengan catatan perlu dilakukan berbagai upaya-upaya yang konkret untuk dapat mencapai performa yang terbaik dalam sisi Perencanaan Pendapatan Daerah. Kebijakan Pendapatan Daerah dari sisi kewenangan daerah nantinya diarahkan kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah serta Pendapatan Transfer Pusat pada Dana Perimbangan khususnya dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

Analisis mengenai belanja daerah, didasarkan pada kondisi perekonomian yang digambarkan melalui serangkaian asumsi indikator makro ekonomi, juga mengacu pada kebijakan pemerintah, serta mempertimbangkan kebijakan pembiayaan daerah, yang kemudian diformulasikan sehingga diperoleh angka rata-rata pertumbuhan pengeluaran wajib, dan mengikat, serta prioritas utama. Dari rata-rata tersebut, akan diperoleh tingkat pertumbuhan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama, yang digunakan sebagai gambaran dasar untuk memperhitungkan bagian dari belanja daerah yang harus dipenuhi di masa yang akan datang.

Tabel 7.1 | Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2022 – 2026 Kota Makassar

No.	URAIAN	TAHUN PROYEKSI					Rata Rata Pertumbuhan (%)
		2022	2023	2024	2025	2026	
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.840.064.535.500	2.025.675.565.996	2.302.436.558.903	2.628.662.524.289	3.067.956.457.326	13,66
1.1.1	Pajak daerah	1.435.757.294.000	1.636.763.315.160	1.882.277.812.434	2.183.442.262.423	2.576.461.869.660	15,75
1.1.2	Retribusi daerah	179.041.982.500	172.832.950.833	198.757.893.458	230.559.156.411	272.059.804.565	11,38
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	88.098.282.000	74.871.308.003	75.972.995.011	64.829.688.455	65.002.829.101	-6,99
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	137.166.977.000	141.207.992.000	145.427.858.000	149.831.417.000	154.431.954.000	3,01
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.047.368.943.000	2.062.522.360.580	2.078.178.846.000	2.094.348.462.000	2.111.041.470.000	0,77
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1.690.912.943.000	1.706.066.360.580	1.721.722.846.000	1.737.892.462.000	1.754.585.470.000	0,93
1.2.1.1	Dana Perimbangan	1.690.912.943.000	1.706.066.360.580	1.721.722.846.000	1.737.892.462.000	1.754.585.470.000	0,93
1.2.1.1.1	Dana Transfer Umum	1.357.950.937.000	1.373.104.354.580	1.388.760.840.000	1.404.930.456.000	1.421.623.464.000	1,15
1.2.1.1.1.1	Dana Bagi Hasil	100.280.058.000	100.280.058.000	100.280.058.000	100.280.058.000	100.280.058.000	0
1.2.1.1.1.2	Dana Alokasi Umum	1.257.670.879.000	1.272.824.296.580	1.288.480.782.000	1.304.650.398.000	1.321.343.406.000	1,24
1.2.1.1.2	Dana Transfer Khusus	332.962.006.000	332.962.006.000	332.962.006.000	332.962.006.000	332.962.006.000	0
1.2.1.1.2.1	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	63.569.083.000	63.569.083.000	63.569.083.000	63.569.083.000	63.569.083.000	0
1.2.1.1.2.2	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	269.392.923.000	269.392.923.000	269.392.923.000	269.392.923.000	269.392.923.000	0
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)						0
1.2.1.3	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	0
1.2.1.4	Dana Keistimewaan	-	-	-	-	-	0
1.2.1.5	Dana Desa/Dana Kelurahan	-	-	-	-	-	0
1.2.2	Transfer Antar-Daerah	356.456.000.000	356.456.000.000	356.456.000.000	356.456.000.000	356.456.000.000	0
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	324.200.000.000	324.200.000.000	324.200.000.000	324.200.000.000	324.200.000.000	0
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	32.256.000.000	32.256.000.000	32.256.000.000	32.256.000.000	32.256.000.000	0
1.3	LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	182.405.400.000	182.405.400.000	182.405.400.000	182.405.400.000	182.405.400.000	0
1.3.1	Hibah	36.000.000.000	36.000.000.000	36.000.000.000	36.000.000.000	36.000.000.000	0
1.3.2	Dana darurat	-	-	-	-	-	0
1.3.3	Lain Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	146.405.400.000	146.405.400.000	146.405.400.000	146.405.400.000	146.405.400.000	0
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		4.069.838.878.500	4.270.603.326.576	4.563.020.804.903	4.905.416.386.289	5.361.403.327.326	7,14

No.	URAIAN	TAHUN PROYEKSI					Rata Rata Pertumbuhan (%)
		2022	2023	2024	2025	2026	
2.1	BELANJA OPERASI	3.282.996.151.270	3.314.349.046.576	3.406.766.525.415	3.539.162.106.452	3.581.741.718.346	2,21
2.11	Belanja Pegawai	1.469.293.450.175	1.483.024.251.721	1.509.978.103.214	1.514.700.868.259	1.535.776.775.000	1,11
2.12	Belanja Barang dan Jasa	1.705.890.980.420	1.716.805.143.855	1.756.748.915.000	1.788.633.470.725	1.844.348.915.611	1,97
2.13	Belanja Bunga						0
2.14	Belanja Subsidi						0
2.15	Belanja Hibah	107.041.720.675	113.749.651.000	139.269.507.201	235.057.767.468	200.846.027.735	20,73
2.16	Belanja Bantuan Sosial	770.000.000	770.000.000	770.000.000	770.000.000	770.000.000	0
2.2	BELANJA MODAL	829.342.727.230	1.006.254.280.000	1.156.254.280.000	1.366.254.280.000	1.779.661.609.105	21,16
2.2.1	Belanja Modal Tanah						0
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin						0
2.2.3	Belanja Modal Bangunan dan Gedung						0
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Air						0
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya						0
2.2.6	Belanja Aset Tidak Berwujud						0
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	100.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	-12,5
2.4	BELANJA TRANSFER	0	0	0	0	0	0
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	0	0	0	0	0	0
JUMLAH BELANJA DAERAH		4.212.338.878.500	4.370.603.326.576	4.613.020.805.415	4.955.416.386.452	5.411.403.327.451	6,48

No.	URAIAN	TAHUN PROYEKSI					Rata Rata Pertumbuhan (%)
		2022	2023	2024	2025	2026	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	150.000.000.000	100.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	
3.11	Sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SILPA)	150.000.000.000	100.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	
3.12	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	
3.13	Hasil Penjualan Kekayaan daerah Yang dipisahkan	-	-	-	-	-	
3.14	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	
3.15	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	
3.16	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan	-	-	-	-	-	
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.500.000.000	0	0	0	0	
3.2.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	
3.2.2	Penyertaan Modal Daerah	7.500.000.000	-	-	-	-	
3.2.3	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan	-	-	-	-	-	
JUMLAH BELANJA PEMBIAYAAN NETO		142.500.000.000	100.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	

7.1.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Tabel 7.2 | Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Tahun 2022 – 2026 Kota Makassar

NO	URAIAN	PROYEKSI				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Pendapatan	4.069.838.878.500	4.270.603.325.996	4.563.020.804.903	4.905.416.386.290	5.361.403.327.326
2	Pencairan Dana Cadangan (sesuai perda)	-	-	-	-	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	150.000.000.000	100.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
Total Penerimaan		4.219.838.878.500	4.370.603.325.996	4.613.020.804.903	4.955.416.386.290	5.411.403.327.326
	Dikurangi					
4	Pengeluaran Pembiayaan	7.500.000.000				
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	4.212.338.878.500	4.370.603.325.996	4.613.020.804.903	4.955.416.386.290	5.411.403.327.326

7.1.3 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil

Tabel 7.3 | Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2022 – 2026 Kota Makassar

NO	URAIAN	PROYEKSI				
		2022	2023	2024	2025	2026
KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH		4.212.338.878.500	4.388.603.325.996	4.613.020.804.903	4.955.416.386.290	5.411.403.327.326
1	PRIORITAS I	2.186.250.099.467	2.219.136.345.378	2.286.918.984.658	2.349.309.195.363	2.447.183.996.334
2	PRIORITAS II	1.472.013.273.534	1.527.319.214.998	1.612.032.662.083	1.731.683.728.899	1.890.120.690.504
3	PRIORITAS III	554.075.505.499	642.147.765.619	714.069.158.161	874.423.462.028	1.074.098.640.487

Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah dapat didorong oleh pertumbuhan pendapatan daerah, melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan dana perimbangan, dan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kebijakan daerah terkait intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah diharapkan tidak membebani masyarakat dan dunia usaha. Pemerintah Daerah juga dituntut untuk dapat menyusun dan melaksanakan program pembangunan yang dapat mendorong peningkatan daya saing daerah serta penciptaan iklim investasi yang kondusif.

7.2 PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Penyusunan Program Perangkat Daerah dan Pendanaan Daerah merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan, sesuai arsitektur perencanaan, dimana program dikategorikan ke dalam 2 (dua), yaitu program untuk perencanaan strategis dan program untuk perencanaan operasional. Program yang dikategorikan strategis (program pembangunan daerah), menjadi tanggung jawab bersama Kepala SKPD dan Kepala Daerah pada tingkat kebijakan. Program SKPD, indikator kinerja *outcome* serta pagu indikatif setiap program disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7.4 | Program dan Pagu Indikatif SKPD Tahun 2022 - 2026 Kota Makassar

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		SKPD Penanggung Jawab	
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
				Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)		
1			URUSAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR														
1	1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				928.511.000		962.396.673		1.015.776.444		1.091.171.146		1.191.578.417		5.189.433.680
1	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%	90%	659.697.072	90%	683.482.968	90%	721.392.660	90%	774.937.108	90%	846.245.184	90%	3.685.754.992
				Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%					
				Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90%	90%		90%		90%		90%		90%			
1	1	2	Program Pengelolaan Pendidikan	Jumlah Penerima Beasiswa "Anak Lorong Berprestasi"	400 org	400 org	268.563.431	400 org	278.653.797	400 org	294.109.456	400 org	315.939.353	400 org	345.011.427	2,4 Orang	1.502.277.464
				Angka Harapan Lama Sekolah	15,56 Tahun	15,96 Tahun		16,16 Tahun		16,36 Tahun		16,56 Tahun		16,76 Tahun			
				Angka Rata-Rata Lama Sekolah	11,2 Tahun	11,5 Tahun		11,8 tahun		12 tahun		12,2 tahun		12,4 tahun			
				Angka Partisipasi Murni (PAUD, SD Dan SMP)	PAUD= 21,10	PAUD= 30,26		PAUD= 36,93		PAUD= 46,33		PAUD= 59,63		PAUD= 78,64			
					SD= 96,79	SD= 100%		SD= 100%		SD= 100%		SD= 100%		SD= 100%			
					SMP= 80,27	SMP= 100%		SMP= 100%		SMP= 100%		SMP= 100%		SMP= 100%			
				Angka Partisipasi Kasar (PAUD, SD Dan SMP)	PAUD= 24,72	PAUD= 33,25		PAUD= 40,59		PAUD= 50,91		PAUD= 65,52		PAUD= 80,42			
					SD= 103,54	SD= 100%		SD= 100%		SD= 100%		SD= 100%		SD= 100%			
					SMP= 93,77	SMP= 100%		SMP= 100%		SMP= 100%		SMP= 100%		SMP= 100%			
				Persentase Sarana Dan Prasanan Pendidikan (PAUD, SD, SMP) Dalam Kondisi Baik	PAUD= 70%	PAUD= 72%		PAUD= 74%		PAUD= 76%		PAUD= 78%		PAUD= 80%			
					SD= 70%	SD= 72%		SD= 74%		SD= 76%		SD= 78%		SD= 80%			
					SMP= 75%	SMP= 87%		SMP= 89%		SMP= 91%		SMP= 92%		SMP= 94%			
				Persentase Ketuntasan Pendidikan Kesetaraan (A, B, C)	84,26%	88,26%		90,26%		92,26%		94,26%		96,26%			

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 Kota Makassar

Kode			Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		SKPD Penanggung Jawab						
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026										
						Target	Rp. (000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)									
1	1	3	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Kebutuhan Kurikulum Yang Dikembangkan	0%	45%	83.999	60%	87.155	75%	91.989	90%	98.816	100%	107.910	100%	469.869							
1	1	4	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rasio Guru-Murid (PAUD, SD, SMP)	PAUD= 1:23	PAUD= 1:21	92.448	PAUD= 1:20	95.921	PAUD= 1:19	101.242	PAUD= 1:18	108.756	PAUD= 1:16	118.767	PAUD= 1:16	517.134							
					SD= 1:44	SD= 1:40		SD= 1:36		SD= 1:33		SD= 1:30		SD= 1:28		SD= 1:28								
					SMP= 1:35	SMP= 1:34		SMP= 1:33		SMP= 1:33		SMP= 1:32		SMP= 1:30		SMP= 1:30								
				Persentase Guru Yang Bersertifikasi (PAUD, SD, SMP)	PAUD= 35,49%	PAUD= 36,49%	PAUD= 37,49%	PAUD= 38,49%	PAUD= 39,49%	PAUD= 40,50%	PAUD= 40,50%													
					SD= 40,53%	SD= 42,18 %	SD= 43,83%	SD= 45,83 %	SD= 47,83 %	SD= 50%	SD= 50%													
					SMP= 44,66%	SMP= 45,43%	SMP= 46,23%	SMP= 47,03%	SMP= 47,88%	SMP= 48,73%	SMP= 48,73%													
					1	1	5	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Lembaga Pendidikan Yang Diawasi Perizinannya	6,79%	14,63%	74.050	22,47%	76.832	30,31%	81.097	38,15%		87.113	46%	95.129	46%	414.221	
					1	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				492.412.470		510.913.210		539.251.246		579.276.477			632.580.273		2.754.433.676		
					1	2	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%	90%	139.247.376	90%	144.479.127	90%	152.492.728	90%		163.811.305	90%	178.884.875	90%	778.915.411	
Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%					100%	100%														
Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90%	90%	90%	90%					90%	90%														
				Persentase ibu hamil mendapat layanan kesehatan ibu hamil	92,38%	100%		100%		100%		100%		100%		100%								
				Persentase ibu bersalin mendapat layanan kesehatan	97,50%	100%		100%		100%		100%		100%										
				Persentase Bayi Baru Lahir mendapatkan layanan kesehatan bayi baru lahir	97,76%	100%		100%		100%		100%		100%										
				Persentase Balita yang mendapat layanan kesehatan	25,17%	100%		100%		100%		100%		100%										
				Persentase Warga Negeran usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	35,99%	100%		100%		100%		100%		100%										
				Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	61,48%	100%		100%		100%		100%		100%										

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 Kota Makassar

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		SKPD Penanggung Jawab	
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
				Target	Rp. (000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)				
			Persentase Warga Degara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	85,28%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Persentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	61,39%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Persentase Warga Negara penderita <i>Diabetes Melitus</i> yang mendapat pelayanan kesehatan	70,07%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Persentase Warga Negara dengan Gangguan Jiwa Berat yang terlayani kesehatan	20,52%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Persentase Warga Negara terduga <i>Tuberkulosis</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Persentase Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan	75%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1	2	3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Yang Mendapat Pendidikan Dan Pelatihan Teknis	75	85	267.541	90	277.593	95	292.991	100	314.737	100	343.698	100	1.496.560
1	2	4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Ketersediaan Kebutuhan Farmasi Pada RSUD Dan Puskesmas	100	100	1.136.165	100	1.178.853	100	1.244.239	100	1.336.590	100	1.459.580	100	6.355.427
				Persentase Ketersediaan Kebutuhan Alat Kesehatan Pada RSUD	56,6	60		62		64		66		68		68	
1	2	5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Bayi Mendapat Asi Eksklusif	69	100	7.818.287	100	8.112.033	100	8.561.971	100	9.197.472	100	10.043.804	100	43.733.567
				Persentase Posyandu Aktif	40	45		50		55		60		65		65	
1	3		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				788.136.164		817.747.726		863.104.474		927.167.299		1.012.483.279		4.408.638.942
1	3	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%	90%		90%		90%		90%		90%		90%	
				Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	56.274.354	100%	58.388.674	100%	61.627.229	100%	66.201.430	100%	72.293.147	100%	314.784.834
				Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90%	90%		90%		90%		90%		90%		90%	

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 Kota Makassar

Kode			Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)			
1	3	2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir Yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir Di Wilayah Sungai Kewenangan Kota	71,57%	77,43%		83,29%		89,15%		95%		100%	100%	79.532.495		
			Rasio Luas Kawasan Permukiman Sepanjang Pantai Rawan Abrasi Erosi Dan Akresi Yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengaman Pantai Di Wilayah Sungai Kewenangan Kota	96,37%	96,87%	14.218.092	97,37%	14.752.289	15.570.532	16.726.234	18.265.348	98,87%						
1	3	3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapat Akses Terhadap Air Minum Melalui Spam Jaringan Perpipaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga Di Seluruh Kota	49,34 %	100%	22.294.832	100%	23.132.485	100%	24.415.540	100%	26.227.751	100%	28.641.174	100%	124.711.782	
1	3	5	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	87,69 %	100%	16.647.307	100%	17.272.773	100%	18.230.815	100%	19.583.974	100%	21.386.051	100%	93.120.920	
1	3	6	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	81,25 %	87,05%	88.699.046	89,45%	92.031.614	92,65%	97.136.189	94,85%	104.345.999	97%	113.947.697	97%	496.160.545	
			Persentase Titik Genangan Yang Dikurangi	73,53 %	78,82%	84,12%		89,41%		94,71%		100%		100%				
1	3	8	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Kebutuhan Gedung Pemerintah Yang Terbangun	27,41%	48,22%	281.622.051	58,37%	292.203.051	68,52%	308.410.225	88,83%	331.301.580	89%	361.787.251	89%	1.575.324.158	
1	3	9	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase Bangunan Dan Lingkungannya Yang Tertata	0	-	0	1,02%	1.000.000	2,03%	1.055.465	3,05%	1.133.806	4,06%	1.238.136	4,06%	4.427.407	
1	3	10	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kota	89,01%	90,51%	306.927.098	92,01%	317.458.850	93,01%	335.066.848	94,01%	359.936.757	96,01%	393.057.377	96,01%	1.712.446.930	
			Persentase Panjang Trotoar terhadap Panjang Jalan	3,37%	4%	4,57%		5%		6%		7%		7%				
1	3	11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	8,72%	21,44%	1.453.384	25,44%	1.507.990	29,44%	1.591.631	33,44%	1.709.768	37,44%	1.867.098	37,44%	8.129.871	

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 Kota Makassar

Kode			Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)			
1	3		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				19.233.000		19.955.616		21.062.463		22.625.797		24.707.775	107.584.651		
1	3	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%	90%	14.353.586	90%	14.892.874	90%	15.718.914	90%	16.885.630	90%	18.439.410	90%	80.290.414	Dinas Penataan Ruang
				Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%				
				Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90%	90%		90%		90%		90%		90%				
1	3	8	Program Penataan Bangunan Gedung Kota	Rasio Kepatuhan IMB Kota	0,09%	0,09%	707.516	0,10%	734.099	0,20%	774.816	0,30%	832.326	0,40%	908.915	0,4%	3.957.672	
1	3	12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Ketaatan terhadap RTRW	80%	85,00%	4.171.898	85%	4.328.643	85%	4.568.733	90%	4.907.841	90%	5.359.450	90%	23.336.565	
1	4		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				14.227.000		14.761.532		15.580.287		16.736.714		18.276.790	79.582.323		
1	4	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%	90%	10.950.623	90%	11.362.056	90%	11.992.257	90%	12.882.367	90%	14.067.775	90%	61.255.078	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%				
				Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90%	90%		90%		90%		90%		90%				
1	4	2	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni	100	100	2.172.083	100	2.063.572	100	2.169.562	100	2.325.204	100	2.537.329	100	11.267.750	
				Persentase Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni	100	100		100		100		100		100				
1	4	3	Program Kawasan Permukiman	Persentase Permukiman Yang Tertata	0%	20%	251.031	40%	260.462	60%	274.909	80%	295.314	100%	322.488	100%	1.404.204	
1	4	4	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha Di Kota Makassar Yang Ditangani	0%	20%	215.659	40%	223.762	60%	236.173	80%	253.703	100%	277.048	100%	1.206.345	
1	4	5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Perumahan Yang Sudah Dilengkapi Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	35.83%	38,40%	637.604	40,96%	661.560	43,53%	698.254	46,09%	750.081	46,09%	819.101	46,09%	3.566.600	

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 Kota Makassar

Kode			Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)			
1	4	6	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase orang/badan yang mendapat pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman sesuai standar	0	5%	0	10%	190.120	15%	209.132	20%	230.045	25%	253.049	25%	882.346	
1	5		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				36.411.492		37.779.530		39.874.989		42.834.660		46.776.214		203.676.885	
1	5	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%	90%	11.757.016	90%	12.198.746	90%	12.875.355	90%	13.831.012	90%	15.103.712	90%	65.765.841	Satuan Polisi Pamong Praja
				Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%				
				Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90%	90%		90%		90%		90%		90%				
1	5	2	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	80%	100%	24.654.476	100%	25.580.784	100%	26.999.634	100%	29.003.648	100%	31.672.502	100%	137.911.044	
				Persentase Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Dapat Diselesaikan	82,7%	100%		100%		100%		100%		100%				
				Persentase Perda Dan Perkada Yang Ditegakkan	82,8%	100%		100%		100%		100%		100%				
1	5		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				16.326.000		16.939.395		17.878.946		19.205.987		20.973.282		91.323.610	
1	5	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%	90%	8.706.769	90%	9.033.897	90%	9.534.966	90%	10.242.686	90%	11.185.197	90%	48.703.515	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%				
				Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90%	90%		90%		90%		90%		90%				
1	5	3	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	80%	100%	7.619.231	100%	7.905.498	100%	8.343.980	100%	8.963.301	100%	9.788.085	100%	42.620.095	
				Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	99,04%	100%		100%		100%		100%		100%				

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 Kota Makassar

Kode			Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		SKPD Penanggung Jawab		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)			
				Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	99,85%	100%	100%		100%		100%		100%					
1	5		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				40.116.000		41.623.224		43.931.874		47.192.662		51.535.230	224.398.990		
1	5	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%	90%	21.577.493	90%	90%	23.629.966	90%	25.383.870	90%	27.719.640	90%	120.699.164	Dinas Pemadam Kebakaran	
				Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		100%	100%		100%		100%					
				Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90%	90%		90%	90%		90%		90%					
1	5	4	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	100%	18.538.507	100%	19.235.029	100%	20.301.908	100%	21.808.792	100%	23.815.590	103.699.826		
				Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15 Menit	15 menit		15 menit		15 menit		15 menit		15 menit				
1	6		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				17.637.553		18.300.225		19.315.254		20.748.904		22.658.174	98.660.110		
1	6	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%	90%	9.675.978	90%	10.039.521	90%	10.596.367	90%	11.382.869	90%	12.430.296	90%	54.125.031	
				Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%				
				Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90%	90%		90%		90%		90%		90%				
1	6	2	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Masyarakat Miskin Yang Mendapat Pemberdayaan Sosial	50%	60%	1.364.291	60%	1.415.549	70%	1.494.063	70%	1.604.958	75%	1.752.643	75%	7.631.504	
				Persentase penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%		100%		100%		100%		100%				

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 Kota Makassar

Kode			Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)			
				Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%		100%		100%		100%		100%				
				Persentase lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%		100%		100%		100%		100%				
				Persentase gelandangan/pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial tuna sosial diluar panti	100%	100%		100%		100%		100%		100%				
1	6	5	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Perentase Rumah Tangga Yang Memperoleh Perlindungan Dan Jaminan Sosial	100%	100%	1.682.010	100%	1.745.205	100%	1.842.004	100%	1.978.724	100%	2.160.802	100%	9.408.745	
1	6	6	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam/Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kota	100%	100%	1.113.611	100%	1.155.452	100%	1.219.539	100%	1.310.058	100%	1.430.607	100%	6.229.267	
1	6	7	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Yang Mendapat Pengelolaan Secara Baik	100%	100%	459.990	100%	477.273	100%	503.745	100%	541.135	100%	590.929	100%	2.573.072	
2			URUSAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR															
2	7		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				18.052.000		18.730.243		19.769.125		21.236.462		23.190.597		100.978.427	
2	7	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%	90%		90%		90%		90%		90%		90%		
				Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	11.897.169	100%	12.344.165	100%	13.028.840	100%	13.995.889	100%	15.283.761	100%	66.549.824	
				Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90%	90%		90%		90%		90%		90%		90%		

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 Kota Makassar

Kode			Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)			
2	7	2	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja	91,67%	93,55%	113.740	93,55%	118.013	96,77%	124.559	96,77%	133.804	100,00%	146.117	100,00%	636.233	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan P
2	7	3	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0,40%	0,58%	3.599.480	0,70%	3.734.718	1,03%	3.941.866	1,03%	4.234.446	1,20%	4.624.090	4,94%	20.134.600	
				Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	20,66%	21,00%		21,50%		22,00%		22,50%		23,00%		23,00%		
				Jumlah Peserta Pelatihan Skill Training Gratis Sektor Ketenagakerjaan	840 orang	1060 orang		1000 orang		1190 orang		1230 orang		1210 orang		6,53 orang		
2	7	4	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kota Makassar	50,33%	55%	1.616.611	60%	1.677.350	63%	1.770.385	65%	1.901.789	75%	2.076.788	75%	9.042.923	
				Jumlah Peluang Kerja dan Peluang Bisnis Baru	4,292	8.200		8.640		9.555		9.745		10.100		46.240		
2	7	5	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	26,95%	33,69%	825.000	38,50%	855.997	44,27%	903.475	51,01%	970.534	59,67%	1.059.841	59,67%	4.614.847	
				Angka sengketa perusahaan-pekerja per tahun	6,28%	4,81%		4,14%		3,66%		3,27%		2,5%		2,5%		
				Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	50,9%	69%		74%		79%		84%		89%		89%		
2	8		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				12.503.500		12.973.276		13.692.845		14.709.181		16.062.687	69.941.489		
2	8	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%	90%	6.715.608	90%	6.967.924	90%	7.354.403	90%	7.900.275	90%	8.627.241	90%	37.565.451	
				Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90%	90%		90%		90%		90%		90%		90%		
2	8	2	Program Pengarus Utama Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD	10,56%	50	3.117.415	60	3.234.541	70	3.413.947	80	3.667.342	85	4.004.804	85	17.438.049	
2	8	3	Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan-termasuk TPPO-per 100.000 penduduk perempuan	88,04	85,04	1.173.537	82,84	1.217.629	81,18	1.285.165	79,56	1.380.555	77,97	1.507.590	77,97	6.564.476	
2	8	4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) yang mendapat pemberdayaan	5,51%	23,33%	664.673	46,67%	689.646	64,16%	727.897	81,67%	781.925	100%	853.876	100%	3.718.017	

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 Kota Makassar

Kode			Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.(000)	
						Target	Rp. (000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)			
2	8	5	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase data indikator Pengarusutamaan Gender yang tersedia	78,57%	83,57%	246.255	85,57%	255.507	87,57%	269.679	89,57%	289.696	91,57%	316.353	91,57%	1.377.490	Dinas Ketahanan Pangan
			Persentase data komponen Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang tersedia	94,47%	94,49%	94,51%		94,53%		94,55%		95%		95%				
			Persentase data komponen Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang tersedia	78,32%	78,82%	79,02%		83,02%		83,94%		83,96%		83,96%				
2	8	6	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Kelurahan Ramah Anak	30%	39,87%	477.497	54,90%	495.437	69,93%	522.917	84,97%	561.730	100%	613.419	100%	2.671.000	
2	8	7	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	96,20%	96,81%	108.515	97,24%	112.592	97,58%	118.837	97,84%	127.658	98,05%	139.404	98,05%	607.006	
2	9		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				12.570.000		13.042.275		13.765.670		14.787.410		16.148.116	70.313.471		
2	9	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%	90%	7.400.652	90%	7.678.707	90%	8.104.609	90%	8.706.164	90%	9.507.287	90%	41.397.419	Dinas Ketahanan Pangan
				Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%				
				Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90%	90%		90%		90%		90%		90%				
2	9	2	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	85%	90%	193.000	91%	200.251	92%	211.358	93%	227.046	94%	247.938	94%	1.079.593	
2	9	3	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan Energi Dan Protein Perkapita	Energi: 2,523 Protein: 125,78	Energi: 2,6 Protein: 126	4.551.546	Energi: 2,6 Protein: 126	4.722.554	Energi: 2,7 Protein: 127	4.984.493	Energi: 2,7 Protein: 128	5.354.461	Energi: 2,7 Protein: 129	5.847.167	Energi: 2,7 Protein: 129	25.460.221	
				Jumlah Lorong Garden dan Lorong Wisata	43 Klp	500 Lorong		500 Lorong		500 Lorong		500 Lorong		2500 Lorong				
				Skor Pola Pangan Harapan	78,8	80		82		85		88		90		90		
2	9	4	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	29,41%	23,52%	169.182	17,64%	175.539	11,76%	185.275	11,76%	199.027	5,88%	217.341	5,88%	946.364	
2	9	5	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan	98,89%	99,36%	255.620	100%	265.224	100%	279.935	100%	300.712	100%	328.383	100%	1.429.874	

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 Kota Makassar

Kode		Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		SKPD Penanggung Jawab		
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.(000)			
					Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)					
2	10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				11.296.999		11.721.447		12.371.582		13.289.847		14.512.751	Target	Rp.(000)	63.192.626		
2	10	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%	90%	6.135.464	90%	6.365.984	90%	6.719.076	90%	7.217.791	90%	7.881.957	90%	34.320.272	Dinas Pertanahan	
				Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			100%
				Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90%	90%		90%		90%		90%		90%		90%			90%
2	10	2	Program Pengelolaan Izin Lokasi	Persentase Pemanfaatan Tanah Yang Sesuai Dengan Peruntukannya	100%	100%	19.308	100% (3 Lokasi)	20.034	100% (3 Lokasi)	21.145	100% (3 Lokasi)	22.714	100% (3 Lokasi)	24.805	100% (3 Lokasi)	108.006		
2	10	4	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Penanganan Sengketa Tanah Garapan Yang Dilakukan Melalui Mediasi	100%	100%	99.138	100%	102.863	100%	108.568	100%	116.627	100%	127.358	100%	554.554		
2	10	5	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Yang Diselesaikan	24%	25%	218.456	25%	226.664	25%	239.236	25%	256.993	25%	280.641	100%	1.221.990		
2	10	10	Program Penatagunaan Tanah	Persentase Aset Tanah Pemerintah Kota Yang Disertifikatkan	32%	40,2%	4.824.633	48%	5.005.902	56%	5.283.557	65%	5.675.722	72%	6.197.990	72%	26.987.804		
				Persentase Tanah Pemerintah Kota Yang Diamankan	37,16%	46,00%		55%		64%		73%		82%		82%			
2	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				114.086.999		118.373.435		124.939.070		134.212.514		146.562.465		638.174.483			
2	11	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%	90%	25.258.380	90%	26.207.379	90%	27.660.983	90%	29.714.084	90%	32.448.311	90%	141.289.137		
				Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
				Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90%	90%		90%		90%		90%		90%		90%		90%	
2	11	2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Tersusunnya Dokumen RPPLH Kota Makassar	Tidak ada	Ada	400.000	Ada	415.029	Ada	438.048	Ada	470.562	Ada	513.862	Ada	2.237.501		
				Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan Kota Makassar	Tidak ada	Tidak ada		Tidak ada		Ada		Ada		Ada		Ada			
2	11	3	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air Dan Indeks Kualitas Udara	IKA = 57,11	IKA = 58,10	1.760.553	IKA = 58,6	1.826.700	IKA = 59,1	1.928.019	IKA = 59,6	2.071.124	IKA = 60,1	2.261.704	IKA = 60,1	9.848.100		
					IKU = 77,22	IKU = 78,22		IKU = 78,72		IKU = 79,22		IKU = 79,72		IKU = 80,22		IKU = 80,22			

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 Kota Makassar

Kode			Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	
2	11	4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	19,29	20,79	51.139.213	21,29	53.060.597	21,79	56.003.627	22,29	60.160.425	22,79	65.696.260	22,79	286.060.122	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) Yang Ditangani	0,30%	0,36%	730.752	0,42%	758.208	0,49%	800.262	0,57%	859.660	0,68%	938.764	0,68%	4.087.646	
2	11	6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Ketaatan Penanggungjawab Usaha Dan/Atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Kota Makassar	20%	20,5%	1.148.434	21%	1.191.582	21,5%	1.257.674	22%	1.351.023	23%	1.475.341	23%	6.424.054	
2	11	8	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Terlaksananya Pendidikan Dan Pelatihan Masyarakat	3 Kali	6 kali	445.500	6 kali	462.238	6 kali	487.876	6 kali	524.088	6 kali	572.314	33 Kali	2.492.016	
				Terlaksananya pemberian penghargaan kepada masyarakat	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada				
2	11	10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Kota Makassar, Lokasi Usaha Dan Dampaknya Di Kota Makassar	100%	100%	356.464	100%	369.857	100%	390.371	100%	419.346	100%	457.934	100%	1.993.972	
2	11	11	Program Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kota Makassar	85%	99%	32.847.703	99%	34.081.845	99%	35.972.210	100%	38.642.202	100%	42.197.975	100%	183.741.935	
				Persentase Sampah Yang Terkurangi Melalui 3R	13,08%	26%		27%		28%		30%		30%				

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 Kota Makassar

Kode		Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		SKPD Penanggung Jawab	
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
					Target	Rp. (000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)		
2	12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					17.534.878		18.193.692		19.202.813		20.628.119		22.526.273		98.085.775	
																		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%	90%	12.608.197	90%	13.081.908	90%	13.807.501	90%	14.832.346	90%	16.197.187	90%	70.527.139	
				Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%				
				Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90%	90%		90%		90%		90%		90%				
2		2	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Anak Usia 1-17 Tahun Kurang 1 (Satu) Hari Yang Memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)	13%	45%	4.057.731	60%	4.210.186	75%	4.443.706	80%	4.773.535	100%	5.212.785	100%	22.697.943	
				Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	93,14%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
2	12	3	Program Pencatatan Sipil	Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran	98,85%	100%	565.870	100%	587.131	100%	619.696	100%	665.693	100%	726.948	100%	3.165.338	
				Rasio Pasangan Berakte Nikah	30%	35		45%		50%		55%		60%				
2	12	4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase OPD Yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama	1,96%	20	284.569	30%	295.261	50%	311.638	70%	334.769	100%	365.573	100%	1.591.810	
2	12	5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Profil Kependudukan yang dikelola	100%	100%	18.511	100%	19.206	100%	20.272	100%	21.776	100%	23.780	100%	103.545	
2	13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					12.270.648		12.731.675		13.437.843		14.435.250		15.763.550		68.638.966	
2			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	100%	100%	12.270.648	100%	12.731.675	100%	13.437.843	100%	14.435.250	100%	15.763.550	100%	68.638.966	Bagian Pemberdayaan Masyarakat, Sekretariat Daerah
				Persentase PKK Aktif	100%	100%		100%		100%		100%		100%				

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 Kota Makassar

Kode		Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja		Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025				
								Target	Rp. (000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	
2	14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						21.704.000		22.519.454		23.768.506		25.532.693		27.882.157	121.406.810	
2	14	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%	90%	10.881.734	90%	11.290.578	90%	11.916.815	90%	12.801.326	90%	13.979.277	90%	60.869.730	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%				
				Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90%	90%		90%		90%		90%		90%				
2	14	2	Program Pengendalian Penduduk	Persentase SKPD yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	39,21%	41,17%	400.885	43,13%	415.947	45,09%	439.018	47,05%	471.603	50,98%	514.999	50,98%	2.242.452	
				Rata-Rata Jumlah Anak Perkeluarga	1,49 anak	2 anak		2 anak		2 anak		2 anak		2 anak				
2	14	3	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rasio Akseptor KB	68,20%	68,25%	9.492.021	68,30%	9.848.651	68,35%	10.394.911	68,40%	11.166.460	68,45%	12.193.974	68,45%	53.096.017	
				Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	46,63%	47,56%		48,51%		49,48%		50,47%		51,48%				
2	14	4	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Yang Ber-KB	75,02%	76,22%	929.360	76,82%	964.278	77,14%	1.017.762	77,74%	1.093.304	78,34%	1.193.907	78,34%	5.198.611	
				Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Yang Ber-KB	70,95%	72,15%		72,80%		73,40%		74,0%		74,60%				
				Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Yang Ber-KB	61,87%	62,87%		63,47%		64,07%		64,67%		65,27%				
				Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Peserta KB Anggota Usahan Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Yang Ber-KB Mandiri	38,33%	38,37%	38,39%	38,41%	38,43%	38,45%								

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 Kota Makassar

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		SKPD Penanggung Jawab	
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.(000)		
				Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)				
2 15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			117.621.000		122.040.213		128.809.229		138.369.928		151.102.438		657.942.808		
2 15 1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%	90%	21.101.515	90%	21.894.334	90%	23.108.713	90%	24.823.927	90%	27.108.173	90%	118.036.662	Dinas Perhubungan
			Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%				
			Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90%	90%		90%		90%		90%		90%				
2 15 2		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio Konektivitas Kota	0%	20%	95.431.335	40%	99.016.846	60%	104.508.860	80%	112.265.896	100%	122.596.367	100%	533.819.304	
			Kinerja Lalu Lintas Kota	0,65	0,5 - 0,45		0,45 - 0,40		0,40 - 0,35		0,35 - 0,30		0,30 - 0,20		0,30 - 0,20		
2 15 3		Program Pengelolaan Pelayaran	Jumlah Orang Yang Melalui Dermaga Pertahun	46766 orang	50	1.088.150	55	1.129.033	60	1.191.656	60	1.280.105	60	1.397.898	285	6.086.842	
			Jumlah Barang Yang Melalui Dermaga Pertahun	3.585.902 ton	3.735.902		4.235.902		4.735.902		5.235.902		5.735.902		23.679.510		
2 16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			43.512.313		45.147.141		47.651.248		51.188.102		55.898.322		243.397.126		
2 16 1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%	90%	13.080.733	90%	13.572.198	90%	14.324.986	90%	15.388.240	90%	16.804.233	90%	73.170.390	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%				
			Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90%	90%		90%		90%		90%		90%				
2 16 2		Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Kota Makassar	75,30%	77,5%	8.805.458	80%	9.136.293	82,50%	9.643.042	85%	10.358.785	85,50%	11.311.978	85,50%	49.255.556	
			Persentase Peningkatan Pengunjung Pertahun Pada Website Pemerintah Kota Makassar	40%	50%		70%		80%		90%		100%		100%		
			Persentase Peningkatan Data Pertahun Yang Ter-Update Pada Open Data Pemerintah Kota Makassar	3,92%	21,56%		40%		60%		80%		100%		100%		

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 Kota Makassar

Kode			Usuran / Bidang Usuran Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)			
2	16	3	Program Aplikasi Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Yang Terhubung Dengan Akses Internet Yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo	100%	100%	21.626.122	100%	22.438.650	100%	23.683.220	100%	25.441.077	100%	27.782.111	100%	120.971.180	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi	30%	32,87%		49,31%		65,75%		95,89%		100%		100%			
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				17.399.579		18.053.309		19.054.643		20.468.950		22.352.461	97.328.942		
2	17	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%	90%	8.646.744	90%	8.971.616	90%	9.469.231	90%	10.172.072	90%	11.108.085	90%	48.367.748	
				Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%						
				Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90%	90%		90%		90%		90%						
2	17	2	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase BPR/LKM Aktif	41,37%	44,82%	465.853	48,27%	483.356	58,62%	510.165	65,51%	548.032	72,41%	598.461	72,41%	2.605.867	
2	17	3	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Yang Diawasi Dan Diperiksa	73%	11,18%	1.127.328	13,05%	1.169.683	13,95%	1.234.560	15,20%	1.326.194	16,27%	1.448.228	16,27%	6.305.993	
2	17	4	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase KSP/USO yang sehat	59,60%	61,58%	675.057	64,23%	700.420	67,54%	739.269	72,84%	794.140	76,15%	867.215	76,15%	3.776.101	
2	17	5	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Koperasi Yang Mendapat Pendidikan Dan Pelatihan	0,30%	1,14%	577.340	1,62%	599.032	1,79%	632.257	1,95%	679.186	2,13%	741.683	2,13%	3.229.498	
2	17	6	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Meningkatnya Koperasi Yang Berkualitas	13,41%	18,78%	1.320.067	25,13%	1.369.664	26,83%	1.445.633	28,17%	1.552.933	30,41%	1.695.831	30,41%	7.384.128	
2	17	7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatnya Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha	89,02%	89,99%	3.375.471	89,99%	3.502.293	90,98%	3.696.549	91,99%	3.970.921	91,99%	4.336.317	91,99%	18.881.551	
				Jumlah Peserta Pelatihan Skill Training Gratis Sektor UMKM	0	520 UMKM		520 UMKM		520 UMKM		520 UMKM		2.600 UMKM				
2	17	8	Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro Dan Kecil	75%	79%	1.211.719	79%	1.257.245	81%	1.326.979	81%	1.425.472	82%	1.556.641	82%	6.778.056	
				Jumlah Wirausaha Baru (Start-Up)	0 UMKM	10 UMKM		10 UMKM		10 UMKM		10 UMKM		50 UMKM				

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 Kota Makassar

Kode		Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.(000)	
2	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					14.366.000		14.905.754		15.732.509		16.900.234		18.455.357	Target	Rp.(000)
2	18	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%	90%		90%		90%		90%		90%		90%	
				Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	12.253.046	100%	12.713.413	100%	13.418.568	100%	14.414.545	100%	15.740.940	100%	68.540.512
				Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90%	90%		90%		90%		90%		90%		90%	
2	18	2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investasi Di Kota Makassar	143,03%	100%	176.826	100%	183.470	100%	193.646	100%	208.019	100%	227.160	100%	989.121
2	18	3	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	975 PMDN dan 339 investor PMA	230 PMDN dan 75 investor PMA	378.908	250 PMDN dan 85 investor PMA	393.144	280 PMDN dan 90 investor PMA	414.950	300 PMDN dan 100 investor PMA	445.749	340 PMDN dan 120 investor PMA	486.766	340 PMDN dan 120 investor PMA	2.119.517
				Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Rp. 7.453.875.500.000 dan US\$ 19.295.100	Rp. 1,8 Triliun dan US\$ 68 juta		Rp. 1,9 Triliun dan US\$ 75 juta		Rp. 2,1 Triliun dan US\$ 82 juta		Rp. 2,3 Triliun dan US\$ 90 juta		Rp. 2,6 Triliun dan US\$ 99 juta		Rp. 2,6 Triliun dan US\$ 99 juta	
2	18	4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Pelayanan Perizinan	85,49%	100%	672.441	100%	697.705	100%	736.404	100%	791.062	100%	863.854	100%	3.761.466
2	18	5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)	Rp. 4,3 Triliun	Rp. 1,8 Triliun	754.908	Rp. 1,9 Triliun	783.271	Rp. 2,1 Triliun	826.716	Rp. 2,3 Triliun	888.078	Rp. 2,6 Triliun	969.797	Rp. 2,6 Triliun	4.222.770
2	18	6	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Ketersediaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	85,49%	100%	129.871	100%	134.751	100%	142.225	100%	152.781	100%	166.840	100%	726.468
2	19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					38.851.000		40.310.695		42.546.545		45.704.509		49.910.142		217.322.891
2	19	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%	90%		90%		90%		90%		90%		90%	
				Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	8.211.619	100%	8.520.143	100%	8.992.716	100%	9.660.189	100%	10.549.100	100%	45.933.767
				Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90%	90%		90%		90%		90%		90%		90%	

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 Kota Makassar

Kode			Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		SKPD Penanggung Jawab	
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						Target	Rp. (000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)		
2	19	2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	50%	60%	3.775.277	70%	3.917.120	80%	4.134.385	90%	4.441.255	100%	4.849.929	100%	21.117.966		
				Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan Dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	35,4%	48,10%		60,75%		73,41%		86,07%		100%		100%			
2	19	3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan Pembinaan Olahraga	20,31%	29,68%	26.364.104	39,06%	27.354.646	48,43%	28.871.884	57,8%	31.014.863	78,12%	33.868.785	78,12%	147.474.282		
					Cakupan Pembinaan Atlet Muda	17,9%		17,9%		34,3%		50,7%		67,16%		83,5%			83,5%
					Peningkatan Prestasi Olahraga	246 atlet berprestasi 13 cabang olahraga		256 atlet berprestasi 19 cabang olahraga		306 atlet berprestasi 25 cabang olahraga		356 atlet berprestasi 31 cabang olahraga		406 atlet berprestasi 37 cabang olahraga		456 atlet berprestasi 43 cabang olahraga			456 atlet berprestasi 43 cabang olahraga
2	19	4	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Cakupan Pembinaan Pramuka	52,7%	(450 binaan pramuka/853 gugus depan)	500.000	71,51%	518.786	80,89%	547.560	90,26 %	588.202	99,64%	642.328	99,64%	2.796.876		
					Jumlah Prestasi Pramuka	60 orang (Pramuka Garuda) 1 prestasi (kwartir tergiat)		70 orang (Pramuka Garuda) 1 prestasi (kwartir tergiat)		80 orang (Pramuka Garuda) 1 prestasi (kwartir tergiat)		90 orang (Pramuka Garuda) 1 prestasi (kwartir tergiat)		100 orang (Pramuka Garuda) 1 prestasi (kwartir tergiat)		100 orang (Pramuka Garuda) 1 prestasi (kwartir tergiat)			
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				463.634		481.053		507.735		545.421		595.610		2.593.453		
2	20	2	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan	49,00%	58,82%	463.634	68,62%	481.053	78,43%	507.735	88,23%	545.421	100%	595.610	100%	2.593.453	Dinas Komunikasi dan Informatika	
					Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	19,60%		49,00%		58,82%		78,43%		88,23%		100%			100%
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				392.836		407.596		430.203		462.135		504.659		2.197.429		
2	21	2	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	29,55%	35,23%	392.836	40,91%	407.596	46,59%	430.203	52,27%	462.135	57,95%	504.659	57,95%	2.197.429	Dinas Komunikasi dan Informatika	
					Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah	100%		100%		100%		100%		100%		100%			

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 Kota Makassar

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		SKPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.(000)			
				Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)					
2	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				15.559.031		16.143.609		17.039.021		18.303.720		19.987.990		87.033.371		
2	22	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%	90%		90%	90%		90%		90%		90%		Dinas Kebudayaan	
				Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	9.239.632	100%	9.586.780	100%	10.118.515	100%	10.869.549	100%	11.869.742	100%		51.684.218
				Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90%	90%		90%		90%		90%		90%		90%		
2	22	2	Program Pengembangan Kebudayaan	Cakupan Objek Pemajuan Kebudayaan Yang Dilestarikan	44,4%	46,6%	2.721.099	48,8%	2.823.335	51,2%	2.979.933	53,3%	3.201.114	55,5%	3.495.674	55,5%		15.221.155
2	22	3	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya	2 Festival	4 Festival	342.893	4 Festival	355.776	5 Festival	375.509	5 Festival	403.381	23 Festival	440.499	23 Festival		1.918.058
2	22	4	Program Pembinaan Sejarah	Persentase Sejarah Lokal Yang Dilestarikan	16,67%	35,7%	697.109	57,14	723.300	78,57	763.418	100	820.082	100	895.544	100		3.899.453
2	22	5	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan	4,94%	19,7% (32 Cagar Budaya)	744.891	39,5% (32 Cagar Budaya)	772.878	59,2% (32 Cagar Budaya)	815.746	79% (32 Cagar Budaya)	876.293	98,70% (32 Cagar Budaya)	956.928	98,7% (160 Cagar Budaya)		4.166.736
2	22	6	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Koleksi Museum Kota Makassar Yang Terawat Dengan Baik	60,17% (dari 693 koleksi yang terawat dengan baik 417 koleksi)	68,25% (56 Koleksi pertahun)	1.813.407	76,33%	1.881.540	84,44%	1.985.900	92,49%	2.133.301	100%	2.329.603	100%	10.143.751	
				Jumlah Pengunjung Museum Kota Makassar	3.364 orang	4.000 orang		4.500 orang		5.200 orang		5.800 orang		6.400 orang		6.400 orang		
2	23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				6.546.000		7.291.943		7.696.394		8.267.649		9.028.421		38.830.407		
2	23	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%	90%		90%		90%		90%		90%		90%		Dinas Perpustakaan
				Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	5.507.875	100%	5.714.815	100%	6.031.790	100%	6.479.492	100%	7.075.721	100%	30.809.693	
				Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90%	90%		90%		90%		90%		90%		90%		
2	23	2	Program Pembinaan Perpustakaan	Angka Budaya Baca Kota Makassar	44,81%	50%		55%		60%		65%		70%		70%		
				Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pertahun	186.527 orang/ tahun	500.000 orang/tahun		520.000 orang/tahun		540.000 orang/tahun		560.000 orang/tahun		580.000 orang/tahun		580.000 orang/tahun		
				Jumlah Koleksi Judul Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah	26.212 (perpustakaan umum (fisik dan digital)	27,712	785.895	29,212	1.315.422	30,712	1.388.382	32,212	1.491.433	33,712	1.628.672	33,712	6.sasaran meningkatkan609,804	
				Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat	7 Pustakawan, 133 Tenaga teknis	12 Pustakawan, 138 Tenaga Teknis		17 Pustakawan, 141 Tenaga Teknis		22 Pustakawan, 144 Tenaga Teknis		27 Pustakawan, 150 Tenaga Teknis		32 Pustakawan, 150 Tenaga Teknis		32 Pustakawan, 150 Tenaga Teknis		

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 Kota Makassar

Kode			Usuran / Bidang Usuran Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		SKPD Penanggung Jawab		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025					Tahun 2026	
						Target	Rp. (000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)			
2	23	3	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Jumlah Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno Yang Dilestarikan	703 Judul Koleksi	704 Judul Koleksi	252.230	705 Judul Koleksi	261.706	706 Judul Koleksi	276.222	707 Judul Koleksi	296.724	708 Judul Koleksi	324.028	4.233 Judul Koleksi	1.410.910	
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				8.536.000		8.856.710		9.347.951		10.041.792		10.965.817		47.748.270	
2	24	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%	90%	7.460.728	90%	7.741.039	90%	8.170.398	90%	8.776.837	90%	9.584.463	90%	41.733.465	Dinas Kearsipan
		Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah		100%	100%	100%		100%		100%								
		Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas		90%	90%	90%		90%		90%								
2	24	2	Program Pengelolaan Arsip	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti Yang Sah Dan Pertanggungjawaban Nasional	69%	74,1%	405.272	79,2%	420.499	84,3%	443.822	89,4%	476.764	94,%%	520.635	94,%%	2.266.992	
		Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku		50,98% (26 SKPD)	60,78% (31 SKPD)		70,59% (36 SKPD)		80,39% (41 SKPD)		90,20% (46 SKPD)		100% (51 SKPD)					
		Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan		21 Orang	31 Orang		41 Orang		51 Orang		61 Orang		71 Orang					
2	24	3	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan	1141 (box arsip statis)	1151 (box arsip statis)	500.000	1161 (1 box arsip statis per SKPD)	518.785	1171 (1 box arsip statis per SKPD)	547.561	1181 (1 box arsip statis per SKPD)	588.202	1191 (1 box arsip statis per SKPD)	642.328	1191 (1 box arsip statis per SKPD)	2.796.876	
2	24	4	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Persentase Izin Penggunaan Arsip yang diterbitkan	100%	100%	170.000	100%	176.387	100%	186.170	100%	199.989	100%	218.391	100%	950.937	
3			URUSAN PILIHAN															
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				28.849.221		29.933.134		31.593.390		33.938.367		37.061.303		161.375.415	
3	25	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%	90%	26.541.412	90%	27.538.616	90%	29.066.057	90%	31.223.449	90%	34.096.564	90%	148.466.098	Dinas Perikanan dan Pertanian
		Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah		100%	100%	100%		100%		100%								
		Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas		90%	90%	90%		90%		90%								
3	25	2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap	18.761 Ton	19,518 Ton		19.909 Ton		20.307 Ton		20.713 Ton		21.127 Ton		21.127 Ton		
		Cakupan Bina Kelompok Nelayan		44,79% (73 Kelompok)	14,7% (113 Kelompok)	1.236.064	15,9% (123 Kelompok)	1.278.589	17,2% (143 Kelompok)	1.344.120	18,9% (150 Kelompok)	1.444.222	20,4% (163 Kelompok)	1.578.234	20,4% (163 Kelompok)	6.881.229		
3	25	3	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya	1.447,16 Ton	1.490,90 Ton	802.302	1.513,26 Ton	832.446	1.535,96 Ton	878.619	1.559 Ton	943.832	1.582,39 Ton	1.030.682	1.582,39 Ton	4.487.881	
3	25	4	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	Persentase Jumlah Kelompok unit usaha yang diawasi	100%	100%	138.780	100%	147.910	100%	161.501	100%	173.151	100%	187.966	100%	809,31	

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 Kota Makassar

Kode			Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		SKPD Penanggung Jawab	
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						Target	Rp. (000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)		
3	25	5	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	25.1 Ton	26,7 Ton	130.663	27,1 Ton	135.573	27,5 Ton	143.093	27,9 Ton	153.713	28,35 Ton	167.857	28,35 Ton	730.899		
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			32.107.000		33.313.312		35.161.052		37.770.835		41.246.426		179.598.625			
3	26	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%	90%		90%		90%		90%		90%		90%		63.584.676	Dinas Pariwisata
				Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	11.367.087	100%	11.794.167	100%	12.448.336	100%	13.372.298	100%	14.602.788	100%			
				Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90%	90%		90%		90%		90%		90%		90%			
3	26	2	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Tingkat Hunian Akomodasi	34%	43%	8.282.089	48%	8.593.261	51%	9.069.891	54%	9.743.092	60%	10.639.630	60%	46.327.963		
				Jumlah Destinasi Wisata yang berstandar Nasional	0	1 Destinasi		1 Destinasi		1 Destinasi		1 Destinasi		1 Destinasi		5 Destinasi			
3	26	3	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara	-65,46%	5%	4.763.617	6,5%	4.942.594	8%	5.216.737	8,5%	5.603.942	10%	6.119.605	10%	26.646.495		
				Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara	2,49%	3%		3,5%		4%		4,5%		5%		5%			
3	26	4	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	PAD Sektor Ekonomi Kreatif	Tidak Ada	15,10%	5.266.403	15,17%	5.464.270	15,57%	5.767.349	17,15%	6.195.423	18,78%	6.765.512	18,78%	29.458.957		
				Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang difasilitasi Mendapatkan HAKI	Tidak ada	75		100		125		150		200		200			
3	26	5	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Peserta Pelatihan Skill Training Gratis Sektor Pariwisata	200 Orang	750 Orang	2.427.804	800 Orang	2.519.020	850 Orang	2.658.739	900 Orang	2.856.080	950 Orang	3.118.891	950 Orang	13.580.534		
				Persentase SDM Pariwisata Yang Mendapat Sertifikasi	6,4%	6,4%		6,4%		6,4%		6,4%		6,4%					
				Persentase Sdm Ekonomi Kreatif Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Tidak Ada	10%		10%		10%		10%		10%					

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 Kota Makassar

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.(000)	
				Target	Rp. (000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)			
3 25 5	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	25.1 Ton	26,7 Ton	130.663	27,1 Ton	135.573	27,5 Ton	143.093	27,9 Ton	153.713	28,35 Ton	167.857	28,35 Ton	730.899	
3 26	URUSAN PEMERINTAHAN	BIDANG PARIWISATA		32.107.000		33.313.312		35.161.052		37.770.835		41.246.426		179.598.625		
3 26 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%	90%	11.367.087	90%	11.794.167	90%	12.448.336	90%	13.372.298	90%	14.602.788	90%	63.584.676	Dinas Pariwisata
		Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90%	90%		90%		90%		90%		90%		90%		
3 26 2	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Tingkat Hunian Akomodasi	34%	43%	8.282.089	48%	8.593.261	51%	9.069.891	54%	9.743.092	60%	10.639.630	60%	46.327.963	
		Jumlah Destinasi Wisata yang berstandar Nasional	0	1 Destinasi		1 Destinasi		1 Destinasi		1 Destinasi		1 Destinasi		5 Destinasi		
3 26 3	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara	-65,46%	5%	4.763.617	6,5%	4.942.594	8%	5.216.737	8,5%	5.603.942	10%	6.119.605	10%	26.646.495	
		Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara	2,49%	3%		3,5%		4%		4,5%		5%		5%		
3 26 4	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	PAD Sektor Ekonomi Kreatif	Tidak Ada	15,10%	5.266.403	15,17%	5.464.270	15,57%	5.767.349	17,15%	6.195.423	18,78%	6.765.512	18,78%	29.458.957	
		Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang difasilitasi Mendapatkan HAKI	Tidak ada	75		100		125		150		200		200		
3 26 5	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Peserta Pelatihan Skill Training Gratis Sektor Pariwisata	200 Orang	750 Orang	2.427.804	800 Orang	2.519.020	850 Orang	2.658.739	900 Orang	2.856.080	950 Orang	3.118.891	950 Orang	13.580.534	
		Persentase SDM Pariwisata Yang Mendapat Sertifikasi	6,4%	6,4%		6,4%		6,4%		6,4%		6,4%				
		Persentase Sdm Ekonomi Kreatif Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Tidak Ada	10%		10%		10%		10%		10%		10%		

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 Kota Makassar

Kode			Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		SKPD Penanggung Jawab		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025					Tahun 2026	
						Target	Rp. (000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)			
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				3.053.778		3.168.516		3.344.259		3.592.485		3.923.054		17.082.092	Dinas Pertanian dan Perikanan
3	27	2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	(0,1 %) 205, 04 Milyar	(0,1 %) 205,09 Milyar	1.221.463	(0,1 %) 209,16 Milyar	1.267.356	(0,1 %) 211,25 Milyar	1.337.650	(0,1) 213,36 Milyar	(0,1 %) 215,20 Milyar	1.569.159	(0,1 %) 215,20 Milyar	6.832.563		
			Produktivitas Pertanian Per Hektar Pertahun	6,6 Ton Perhektar	6,8 Ton Perhektar	6,9 Ton Perhektar		7,0 Ton Perhektar		7,1 Ton Perhektar		7,2 Ton Perhektar						
			Cakupan Pengawasan Mutu Pakan dan Produksi Benih/Bibit Ternak	230 Sampel, 500 ekor	300 Sampel (25%) ; 200 ekor (0,5 %)	350 Sampel (29 %) ; 250 ekor (0,69 %)		400 Sampel (33 %) ; 300 ekor (0,8)		450 Sampel (38 %) ; 350 ekor (0,96 %)		500 Sampel (42 %) ; 400 ekor (1,1 %)	500 Sampel (42 %) ; 400 ekor (1,1 %)					
3	27	3	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan Prasarana Pertanian yang disediakan	0	3 Prasarana 1UPT Pembibitan dan 2 BPP	700.000	1 Prasrana Lab Pakan Peternakan	726.300	1 Prasarana Penyuluhan	766.585	1 Prasarana UPT Puskesmas	823.483	1 Prasarana UPT Rumah Potong Hewan	899.259	3.915.627		
3	27	4	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	0 kasus	100% (0 Kasus)	1.039.767	100% (0 Kasus)	1.078.833	100% (0 Kasus)	1.138.671	100% (0 Kasus)	1.223.187	100% (0 Kasus)	1.335.742	100% (0 Kasus)	5.816.200	
				Cakupan Produksi Peternakan Dan Hasil Turunannya Yang Aman, Sehat, Utuh Dan Halal (Asuh)	11,38% 4.552 Ton	14,5 %		14,75 %		15%		15,25 %		15,15 %				
3	27	5	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Bencana Pertanian yang dikendalikan	5%	5%	25.000	5%	25.939	5%	27.378	5%	29.410	5%	32.118	5%	139.845	
3	27	6	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Perizinan Usaha Pertanian Yang Dibina Dan Diawasi	25 Unit Usaha	100%	7.882	100%	8.179	100%	8.633	100%	9.274	100%	10.126	100%	44.094	
3	27	7	Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan Bina Kelompok Petani	100%	100%	59.666	100%	61.909	100%	65.342	100%	70.196	100%	76.650	100%	333.763	
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				15.957.477		17.057.025		18.003.100		19.339.358		21.118.926		91.475.886	
3	30	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%	90%	14.065.186	90%	14.593.637	90%	15.403.082	90%	16.546.355	90%	18.068.916	90%	78.677.176	
				Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%						
				Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90%	90%		90%		90%		90%						
3	30	2	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Dengan Ketentuan	38,23%	45%	343.407	50%	356.310	65%	376.073	75%	403.987	95%	441.161	95%	1.920.938	

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 Kota Makassar

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.(000)	
				Target	Rp. (000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)			
3 30 3	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar Rakyat Standar Nasional Indonesia (SNI)	0			1 pasar		1 Pasar		1 Pasar		1 Pasar		4 Pasar	Dinas Perdagangan	
		Persentase Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat yang mendapat pembinaan	0			83,33 %	500.000	100%	527.732	100%	566.903	100%	619.068	100%		2.213.703
3 30 4	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Barang Kebutuhan Pokok Dengan Harga Stabil	26%	33,33%	352.655	33,33%	365.905	33,33%	386.200	33,33%	414.865	33,33%	453.040	33,33%		1.972.665
		Persentase Barang Penting Dengan Harga Stabil	16%	33,33%		33,33%		33,33%		33,33%		33,33%				
3 30 5	Program Pengembangan Ekspor	Peningkatan Hasil ekspor	373.090.000 US\$	402.937.200	456.379	463.377.780	473.526	579.222.225	499.790	724.027.781	536.886	905.034.726	586.290	905.034.726		2.552.871
3 30 6	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Alat-Alat Ukur, Takaran, Timbangan Dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Terakebudayaan Sah Yang Berlaku	31,25 % (625 dari 2000 UTTP)	35%	228.277	45%	236.854	70%	249.990	80%	268.546	100%	293.257	100%	1.276.924	
3 30 7	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal	400	500	511.573	500	530.793	500	560.233	500	601.816	500	657.194	2,9	2.861.609	
3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				2.520.523		2.615.223		2.760.278		2.965.156		3.238.003		14.099.183	
3 31 2	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Pertambahan Jumlah Industri Kecil Dan Menengah Di Kota Makassar	1215	360	2.107.705	360	2.186.895	360	2.308.193	360	2.479.516	360	2.707.675	360	11.789.984	
		Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri	0 (RPIK belum ada)	10%		20%		40%		60%		80%				
		Jumlah Peserta Pelatihan Skill Training Gratis Sektor Perindustrian	0	250		250		250		250		1250				
3 31 3	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan Dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil Dan Industri Menengah Yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait	(65 izin yang keluar dari 106 pemohon)	50%	344.144	75%	357.074	85%	376.879	95%	404.852	100%	442.106		1.925.055	
3 31 4	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Ketersediaan Informasi Industri Secara Lengkap Dan Terkini	0 (Ketersediaan data Sistem kemetrian perindustrian/SINAS)	100	68.674	100	71.254	100	75.206	100	80.788	100	88.222		384.144	

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 Kota Makassar

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		SKPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.(000)			
				Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)					
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4	1	UNSUR SEKRETARIAT DAERAH				165.818.284		172.048.349		181.591.087		195.069.453		213.019.334		927.546.507	Sekretariat Daerah	
4	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks kepuasan pelayanan yang difasilitasi dan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah	100%	100%	132.607.089	100%	137.589.360	100%	145.220.815	100%	155.999.650	100%	170.354.414	100%		703.051.890
				Persentase Pengelolaan BMD dan Aset Lainnya yang mendukung Produktivitas Sekretariat Daerah.	60%	70%		80%		85%		90%		100%				
				Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, Laporan Kinerja dan keuangan Perangkat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%				
				Persentase Peningkatan Kapasitas ASN Perangkat Daerah	20,75%	30%		40%		50%		60%		70%				
				Persentase penataan organisasi dan ketatalaksanaan	100%	100%		100%		100%		100%		100%				
				Cakupan pelayanan kedinasan Pimpinan	100%	100%		100%		100%		100%		100%				
4	1	2	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Pembinaan dan Pelayanan Kegiatan Keagamaan	80%	100%	22.944.619	100%	23.806.687	100%	25.127.133	100%	26.992.158	100%	29.475.916	100%		158.144.104
				Cakupan Penataan Administrasi Tata Pemerintahan	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi		Sangat Tinggi						
				Cakupan Produk Hukum Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%				
				Persentase Perjanjian Kerjasama Daerah Yang Direalisasikan	56% (25 MOU dari total 14)	75%		90%		95%		100%		100%				
4	1	3	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi Yang Dibawa Ke Tahun Berikutnya Yang Ditandatangani Pada Kuartal Pertama	0%	10%	10.266.576	15%	10.652.302	15%	11.243.139	20%	12.077.645	20%	13.189.004	20%		55.066.993
				Persentase Jumlah Pengadaan Yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	100%	100%		100%		100%		100%		100%				
				Persentase Perusahaan Daerah Yang Berkinerja Baik	83,33%	100%		100%		100%		100%		100%				
				Persentase Penyerapan realisasi anggaran melalui Sistem Monitoring Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (SISMONTEPRA)	100%	100%		100%		100%		100%		100%				

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 Kota Makassar

Kode		Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		SKPD Penanggung Jawab	
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.(000)		
4	2				Target	Rp. (000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)				Target
4	2		UNSUR SEKRETARIAT DPRD					185.034.497		191.986.545		202.635.167		217.675.502		237.705.542	1.035.037.253	
4	2	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%	90%	128.005.335	90%	132.814.704	90%	140.181.332	90%	150.586.112	90%	164.442.728	90%	716.030.211	Sekretariat DPRD
				Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%				
				Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90%	90%		90%		90%		90%		90%				
4	2	3	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD Kota Makassar	ADA	ADA	57.029.162	ADA	59.171.841	ADA	62.453.835	ADA	67.089.390	ADA	73.262.814	319.007.042		
				Tersusun Dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda , Dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	ADA	ADA		ADA		ADA		ADA		ADA				
				Terintegrasinya Program-Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda Dan Anggaran Ke Dalam Dokumen Perencanaan Dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	ADA	ADA		ADA		ADA		ADA		ADA				

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 Kota Makassar

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		SKPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.(000)			
				Target	Rp. (000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)					
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5	1		UNSUR PERENCANAAN				33.691.777		34.957.631		36.896.572		39.635.174		43.282.318		188.463.472	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%	90%	21.006.662	90%	21.795.916	90%	22.470.509	90%	23.288.392	90%	25.171.541	90%	113.733.020	
				Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%				
				Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90%	90%		90%		90%		90%		90%				
5	1	2	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda	Tidak Ada	Ada	4.778.112	Ada	4.957.633	Ada	5.376.938	Ada	5.976.982	Ada	7.102.227	Ada	28.191.892	
				Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Yang Telah Ditetapkan Dengan Perkada	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada				
				Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	100%	100%		100%		100%		100%		100%				
5	1	3	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam Renstra SKPD	100%	100%	7.907.003	100%	8.204.082	100%	9.049.125	100%	10.369.800	100%	11.008.550	100%	46.538.560	
				Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam Renja SKPD	100%	100%		100%		100%		100%		100%				
5	2		UNSUR KEUANGAN				151.015.301		156.689.191		165.380.031		177.655.149		194.002.600		844.742.272	
5	2	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%	90%	23.698.533	90%	24.588.925	90%	25.952.762	90%	27.879.071	90%	30.444.445	90%	132.563.736	
				Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%				
				Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90%	90%		90%		90%		90%		90%				
5	2	2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WDP	WTP	122.481.710	WTP	127.083.547	WTP	134.132.294	WTP	144.088.092	WTP	157.346.773	WTP	685.132.416	
5	2	3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Diyakini Kewajaranya Oleh BPK	95%	95%	4.835.058	100%	5.016.719	100%	5.294.975	100%	5.687.986	100%	6.211.382	100%	27.046.120	

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 Kota Makassar

Kode		Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		SKPD Penanggung Jawab	
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
5	2	UNSUR KEUANGAN				121.028.422		125.575.658		132.540.771		142.378.438		155.479.801	Target	Rp.(000)		
5	2	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%	90%	89.787.442	90%	93.160.903	90%	98.328.116	90%	105.626.393	90%	115.345.911	90%	502.248.765	Badan Pendapatan Daerah
				Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%				
				Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90%	90%		90%		90%		90%		90%				
5	2	4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)	30%	43,60%%	31.240.980	46,34%%	32.414.755	49,91%	34.212.655	53,04%	36.752.045	56,69%	40.133.890	56,69%	174.754.325	
				Deviasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran PAD dalam APBD	102%	100%		100%		100%		100%		100%				
5	3	UNSUR KEPEGAWAIAN				21.078.526		21.870.481		23.083.538		24.796.883		27.078.639		117.908.067		
5	3	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%	90%	17.247.920	90%	17.895.953	90%	18.888.561	90%	20.290.539	90%	22.157.631	90%	96.480.604	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
				Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%				
				Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90%	90%		90%		90%		90%		90%				
5	3	2	Program Kepegawaian Daerah	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi Dan Menengah/Dasar (%) (PNS Tidak Termasuk Guru Dan Tenaga Kesehatan)	65,22%	65,21%	3.830.606	64,92%	3.974.528	64,69%	4.194.977	64,48%	4.506.344	64,21%	4.921.008	64,21%	21.427.463	
				Rasio Pegawai Fungsional (PNS Tidak Termasuk Guru Dan Tenaga Kesehatan)	4,37%	7,24%		7,64%		8,24%		8,56%		9,08%				
				Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS Tidak Termasuk Guru Dan Tenaga Kesehatan)	4,37 %	7,24%		7,64%		8,24%		8,56%		9,08%				

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 Kota Makassar

Kode			Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		SKPD Penanggung Jawab		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
						Target	Rp. (000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)			
5	4		UNSUR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						7.572.474		7.856.984		8.292.775		8.908.296		9.728.019		42.358.548	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan Dan Pelatihan	20 Jam Pelajaran	20 JP		20 JP		20 JP		20 JP		20 JP		20 JP		20 JP	42.358.548	
5	4	2		Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal	0,72 %	2,16 %	7.572.474	2,86 %	7.856.984	3,55 %	8.292.775	4,24 %	8.908.296	5,00 %	9.728.019	5,00 %				
				Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Struktural	85%	91%		94%		97%		100%		100%		100%				
5	5		UNSUR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						8.694.000		9.020.648		9.520.983		10.227.665		11.168.793		48.632.089	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%	90%		90%		90%		90%		90%		90%		90%	38.226.493	
5	5	1		Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	6.833.783	100%	7.090.539	100%	7.483.820	100%	8.039.296	100%	8.779.055	100%				
				Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90%	90%		90%		90%		90%		90%		90%				
			Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	54,55%	70%		80%		85%		90%		100%		100%	10.405.596			
5	5	2		Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%				
				Persentase SKPD Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	100%	100%	1.860.217	100%	1.930.109	100%	2.037.163	100%	2.188.369	100%	2.389.738	100%				
				Persentase Kebijakan Inovasi Yang Diterapkan Di Kota Makassar	44,08%	66,67%		75,47%		89,29%		94,93%		100%		100%				

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 Kota Makassar

Kode			Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		SKPD Penanggung Jawab			
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Target	Rp.(000)	
						Target	Rp. (000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)				
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																
6	1		INSPEKTORAT DAERAH					23.564.000		24.449.337		25.805.435		27.720.807		30.271.617		131.811.196	
6	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%	90%	22.043.243	90%	22.871.444	90%	24.140.019	90%	25.931.781	90%	28.317.969	90%	123.304.456	Inspektorat Daerah	
				Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%					
				Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90%	90%		90%		90%		90%		90%					
6	1	2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	Level 3	Level 3	792.832	Level 3	822.619	Level 3	868.248	Level 3	932.691	Level 4	1.018.515	Level 4	4.434.905		
				Persentase Tindak Lanjut Temuan	64,60%	66,60%		69,60%		72,60%		75,60%		78,60%		78,60%			
				Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
7			UNSUR KEWILAYAHAN																
7	1		KECAMATAN					46.461.000		48.206.616		50.880.417		54.656.951		59.686.367		259.891.351	
7	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%	90%	17.228.811	90%	17.876.125	90%	18.867.632	90%	20.268.058	90%	22.133.082	90%	96.373.708	Kecamatan Biringkanaya	
				Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%					
				Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90%	90%		90%		90%		90%		90%					
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Di Kecamatan	100%	100%	12.388.192	100%	12.853.637	100%	13.566.569	100%	14.573.531	100%	15.914.556	100%	69.296.485		
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik	95%	95%	5.381.552	95%	5.583.746	95%	5.893.451	95%	6.330.885	95%	6.913.439	95%	30.103.073		
				Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 Kota Makassar

Kode			Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lingkup Kecamatan Yang Dapat Diselesaikan	100%	100%	132.000	100%	136.959	100%	144.556	100%	155.285	100%	169.574	100%	738.374	Kecamatan Bontoala
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Di Tingkat Kecamatan	100%	100%	11.330.445	100%	11.756.149	100%	12.408.209	100%	13.329.192	100%	14.555.716	100%	63.379.711	
7	1		KECAMATAN				33.499.001		34.757.612		36.685.457		39.408.390		43.034.666	187.385.126		
7	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%	90%	14.524.244	90%	15.069.943	90%	15.905.804	90%	17.086.393	90%	18.658.646	90%	81.245.030	
				Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%				
				Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90%	90%		90%		90%		90%		90%				
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Di Kecamatan	95%	95%	8.827.123	100%	9.158.772	100%	9.666.767	100%	10.384.270	100%	11.339.809	100%	49.376.741	
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik	100%	100%	4.699.996	100%	4.876.583	100%	5.147.064	100%	5.529.099	100%	6.037.875	100%	26.290.617	
				Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan	12,30%	86%		87%		88%		89%	90%	90%				
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lingkup Kecamatan Yang Dapat Diselesaikan	86,91%	89%	144.000	91,5%	149.410	92%	157.697	93%	169.402	95%	184.990	95%	805.499	
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Di Tingkat Kecamatan	98,32%	100%	5.303.638	100%	5.502.904	100%	5.808.125	100%	6.239.226	100%	6.813.346	100%	29.667.239	

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 Kota Makassar

Kode		Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		SKPD Penanggung Jawab	
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.(000)		
					Target	Rp. (000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)				
7	1	KECAMATAN				44.544.000		46.217.591		48.781.070		52.401.783		57.223.684		249.168.128	Kecamatan Makassar	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%	90%	18.129.938	90%	18.811.110	90%	19.854.476	90%	21.328.149	90%	23.290.720	90%	101.414.393		
7	1		Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%							
			Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90%	90%		90%		90%		90%							
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Di Kecamatan	90%	92%	11.714.269	94%	12.154.393	95%	12.828.542	96%	13.780.724	98%	15.048.797	98%		65.526.725
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik	95%	95%	6.237.781	95%	6.472.145	95%	6.831.125	95%	7.338.157	95%	8.013.399	95%		34.892.607
				Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan	89%	92%		94%		95%		96%		98%		98%		
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lingkup Kecamatan Yang Dapat Diselesaikan	80%	84%	655.020	86%	679.630	88%	717.326	90%	770.569	92%	841.475	92%	3.664.020	
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Di Tingkat Kecamatan	90%	93%	7.806.992	95%	8.100.313	97%	8.549.601	99%	9.184.184	100%	10.029.293	100%	43.670.383	
7	1	KECAMATAN				37.971.000		39.397.633		41.582.840		44.669.273		48.779.644		212.400.390		
7	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%	90%	15.884.745	90%	16.481.560	90%	17.395.717	90%	18.686.892	90%	20.406.420	90%	88.855.334	
				Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%				
				Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90%	90%		90%		90%		90%		90%				

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 Kota Makassar

Kode			Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)			
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Di Kecamatan	90,52%	95%	8.657.398	95%	8.982.671	95%	9.480.899	95%	10.184.606	95%	11.121.772	95%	48.427.346	
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik	23%	95%		95%		95%		95%		95%		95%	35.428.729	
				Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan	100%	100%	6.333.624	100%	6.571.589	100%	6.936.085	100%	7.450.907	100%	8.136.524	100%		
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lingkup Kecamatan Yang Dapat Diselesaikan	100%	100%	997.361	100%	1.034.834	100%	1.092.231	100%	1.173.301	100%	1.281.265	100%	5.578.992	
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Di Tingkat Kecamatan	89,96%	90%	6.097.872	90%	6.326.979	90%	6.677.908	90%	7.173.567	90%	7.833.663	90%	34.109.989	
7	1		KECAMATAN				36.559.000		37.932.581		40.036.529		43.008.189		46.965.712		204.502.011	
7	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%	90%	12.245.385	90%	12.705.464	90%	13.410.178	90%	14.405.531	90%	15.731.098	90%	68.497.656	
				Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%				
				Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90%	90%		90%		90%		90%		90%				

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 Kota Makassar

Kode			Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Di Kecamatan	95%	95%	12.984.500	95%	13.472.348	95%	14.219.598	95%	15.275.029	95%	16.680.605	95%	72.632.080	
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik	95%	95%	3.960.495	95%	4.109.297	95%	4.337.221	95%	4.659.146	95%	5.087.871	95%	22.154.030	
				Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lingkup Kecamatan Yang Dapat Diselesaikan	100%	100%	96.000	95%	99.607	95%	105.132	95%	112.935	95%	123.327	95%	537.001	
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Di Tingkat Kecamatan	95%	95%	7.272.620	95%	7.545.865	95%	7.964.400	95%	8.555.548	95%	9.342.811	95%	40.681.244	
7	1		KECAMATAN				30.557.000		31.705.076		33.463.613		35.947.407		39.255.211		170.928.307	
7	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%	90%	12.697.443	90%	13.174.507	90%	13.905.237	90%	14.937.336	90%	16.311.838	90%	71.026.361	Kecamatan Mariso
				Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%				
				Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90%	90%		90%		90%		90%		90%				
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Di Kecamatan	95%	95%	7.831.104	95%	8.125.331	95%	8.576.006	95%	9.212.549	95%	10.060.268	95%	43.805.258	
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik	95%	95%	4.379.617	95%	4.544.166	95%	4.796.211	95%	5.152.203	95%	5.626.298	95%	24.498.495	
				Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan	100%	100%		100%		100%		100%		100%				

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 Kota Makassar

Kode			Usuran / Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)			
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lingkup Kecamatan Yang Dapat Diselesaikan	95%	95%	632.400	95%	656.160	95%	692.555	95%	743.959	95%	812.416	95%	3.537.490	Kecamatan Parakkukang
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Di Tingkat Kecamatan	95%	95%	5.016.436	95%	5.204.912	95%	5.493.604	95%	5.901.360	95%	6.444.391	95%	28.060.703	
7	1		KECAMATAN				49.950.001		51.826.703		54.701.294		58.761.428		64.168.531	279.407.957		
7	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%	90%	17.011.428	90%	17.650.575	90%	18.629.572	90%	20.012.329	90%	21.853.821	90%	95.157.725	
				Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%				
				Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90%	90%		90%		90%		90%		90%				
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Di Kecamatan	89,56%	90%	17.406.084	95%	18.060.059	98%	19.061.768	100%	20.476.603	100%	22.360.817	100%	97.365.331	
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik	100%	100%	5.451.223	100%	5.656.034	100%	5.969.748	100%	6.412.845	100%	7.002.942	100%	30.492.792	
				Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan	100%	100%		100%		100%		100%		100%				
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lingkup Kecamatan Yang Dapat Diselesaikan	63%	70%	876.473	70%	909.403	75%	959.844	75%	1.031.087	80%	1.125.965	80%	4.902.772	
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Di Tingkat Kecamatan	89,56%	90%	9.204.793	95%	9.550.632	98%	10.080.362	100%	10.828.564	100%	11.824.986	100%	51.489.337	

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 Kota Makassar

Kode		Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		SKPD Penanggung Jawab	
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.(000)		
					Target	Rp. (000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)				
7	1	KECAMATAN				44.100.000		45.756.909		48.294.834		51.879.459		56.653.297		246.684.499	Kecamatan Rappocini	
7	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%	90%	15.593.638	90%	16.179.517	90%	17.076.921	90%	18.344.434	90%	20.032.449	90%		87.226.959
				Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%				
				Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90%	90%		90%		90%		90%		90%				
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Di Kecamatan	90%	95%	12.308.447	95%	12.770.895	95%	13.479.238	95%	14.479.718	95%	15.812.111	95%		68.850.409
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik	90%	95%	5.330.963	95%	5.531.256	95%	5.838.049	95%	6.271.371	95%	6.848.450	95%		29.820.089
				Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan	90%	95%		95%		100%		100%		100%				
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lingkup Kecamatan Yang Dapat Diselesaikan	86%	90%	617.790	90%	641.001	95%	676.554	95%	726.771	95%	793.647	95%	3.455.763	
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Di Tingkat Kecamatan	100%	100%	10.249.162	100%	10.634.240	100%	11.224.072	100%	12.057.165	100%	13.166.640	95%	57.331.279	
7	1	KECAMATAN				45.234.000		46.933.515		49.536.704		53.213.503		58.110.096		253.027.818		
7	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%	90%	18.302.130	90%	18.989.771	90%	20.043.048	90%	21.530.717	90%	23.511.928	90%	102.377.594	
				Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%				
				Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90%	90%		90%		90%		90%		90%				

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 Kota Makassar

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		SKPD Penanggung Jawab	
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.(000)		
				Target	Rp. (000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)				
7 1		KECAMATAN			44.100.000		45.756.909		48.294.834		51.879.459		56.653.297		246.684.499		
7 1 2		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Di Kecamatan	97,89%	95%	9.985.584	95%	10.360.759	95%	10.935.423	95%	11.747.091	95%	12.828.033	95%	55.856.890	Kecamatan Tallo
7 1 3		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik	100%	100%	7.399.012	100%	7.677.005	100%	8.102.814	100%	8.704.234	100%	9.505.180	95%	41.388.245	
7 1 3			Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan	80%	90%		90%		90%		95%		95%		100%		
7 1 4		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lingkup Kecamatan Yang Dapat Diselesaikan	100%	100%	632.400	100%	656.160	100%	692.554	100%	743.959	100%	812.416	95%	3.537.489	
7 1 5		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Di Tingkat Kecamatan	100%	100%	8.914.874	100%	9.249.820	100%	9.762.865	100%	10.487.502	100%	11.452.539	95%	49.867.600	
7 1		KECAMATAN			38.682.000		40.135.346		42.361.470		45.505.697		49.693.035		216.377.548		
7 1 1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%	90%	13.807.948	90%	14.326.735	90%	15.121.373	90%	16.243.738	90%	17.738.453	90%	77.238.247	Kecamatan Tamalae
7 1 1			Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%				
7 1 1			Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90%	90%		90%		90%		90%		90%				
7 1 2		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Di Kecamatan	95%	95%	13.246.612	95%	13.744.309	95%	14.506.643	95%	15.583.380	95%	17.017.330	95%	74.098.274	
7 1 3		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik	95%	95%	3.911.546	95%	4.058.509	95%	4.283.616	95%	4.601.562	95%	5.024.988	95%	21.880.221	
7 1 3			Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan	40 Kelompok	100%		100%		100%		100%		100%				

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 Kota Makassar

Kode			Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)			
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lingkup Kecamatan Yang Dapat Diselesaikan	100%	100%	656.514	100%	681.180	100%	718.962	100%	772.327	100%	843.394	95%	3.672.377	Kecamatan Tamalate
7	1	5	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Di Tingkat Kecamatan	100	100	7.059.380	100	7.324.613	100	7.730.876	100	8.304.690	100	9.068.870	95%	39.488.429	
7	1	KECAMATAN					47.789.500		49.585.029		52.335.285		56.219.805		61.393.032		267.322.651	
7	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%	90%	17.362.525	90%	18.014.864	90%	19.014.066	90%	20.425.361	90%	22.304.859	90%	97.121.675	
				Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%				
				Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90%	90%		90%		90%		90%		90%				
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Di Kecamatan	95%	95%	13.052.663	95%	13.543.073	95%	14.294.245	95%	15.355.218	95%	16.768.172	95%	73.013.371	
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik	95%	95%	5.754.036	95%	5.970.224	95%	6.301.366	95%	6.769.076	95%	7.391.952	95%	32.186.654	
				Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan	40 kelompok	100%		100%		100%		100%		100%				
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lingkup Kecamatan Yang Dapat Diselesaikan	100%	100%	146.400	100%	151.900	100%	160.326	100%	172.226	100%	188.074	95%	818.926	
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Di Tingkat Kecamatan	100%	100%	11.473.876	100%	11.904.968	100%	12.565.282	100%	13.497.924	100%	14.739.975	95%	64.182.025	

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 Kota Makassar

Kode		Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		SKPD Penanggung Jawab		
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.(000)			
7	1	KECAMATAN				35.445.000		36.776.728		38.816.565		41.697.674		45.534.605		198.270.572			
7	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%	90%	13.587.666	90%	90%	14.098.177	90%	14.880.138	90%	15.984.596	90%	17.455.465	90%	76.006.042	Kecamatan Ujung Pandang
				Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		100%	100%		100%		100%		100%				
				Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90%	90%		90%	90%		90%		90%		90%				
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Di Kecamatan	95%	95%	12.753.991	95%	13.233.180	95%	13.967.164	95%	15.003.859	95%	16.384.482	95%	71.342.676		
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik	100%	100%	4.883.319	100%	5.066.793	100%	5.347.825	100%	5.744.761	100%	6.273.381	95%	27.316.079		
				Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan	30 Kelompok	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lingkup Kecamatan Yang Dapat Diselesaikan	95%	95%	659.482	95%	684.260	95%	722.213	95%	775.818	95%	847.207	95%	3.688.980		
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Di Tingkat Kecamatan	95%	95%	3.560.542	95%	3.694.318	95%	3.899.225	95%	4.188.640	95%	4.574.070	95%	19.916.795		
7	1	KECAMATAN				29.107.000		30.200.599		31.875.688		34.241.619		37.392.461		162.817.367			
7	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%	90%	11.956.306	90%	12.405.525	90%	13.093.603	90%	14.065.458	90%	15.359.732	90%	66.880.624		
				Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90%	90%		90%		90%		90%		90%		90%			

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 Kota Makassar

Kode			Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Di Kecamatan	100%	100%	7.953.734	100%	8.252.569	100%	8.710.301	100%	9.356.812	100%	10.217.805	95%	44.491.221	Kecamatan Ujung Tanah
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik	100%	100%	4.496.023	100%	4.664.946	100%	4.923.689	100%	5.289.144	100%	5.775.840	95%	25.149.642	
				Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan	100%	100%		100%		100%		100%		100%				
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lingkup Kecamatan Yang Dapat Diselesaikan	75,64%	80%	718.003	83%	744.980	85%	786.300	87%	844.662	90%	922.387	95%	4.016.332	
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Di Tingkat Kecamatan	100%	100%	3.982.934	100%	4.132.579	100%	4.361.795	100%	4.685.543	100%	5.116.697	95%	22.279.548	
7	1		KECAMATAN				26.600.000		27.599.406		29.130.200		31.292.372		34.171.830		148.793.808	
7	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%	90%	11.727.288	90%	12.167.902	90%	12.842.780	90%	13.796.039	90%	15.065.521	90%	65.599.530	
				Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%				
				Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90%	90%		90%		90%		90%		90%				

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 Kota Makassar

Kode			Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp. (000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Di Kecamatan	95%	95%	6.904.462	95%	7.163.874	95%	7.561.222	95%	8.122.444	95%	8.869.854	95%	38.621.856	
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik	100%	100%	3.909.407	100%	4.056.290	100%	4.281.274	100%	4.599.046	100%	5.022.241	95%	21.868.258	
				Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan	100%	100%		100%		100%		100%		100%				
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lingkup Kecamatan Yang Dapat Diselesaikan	82,92%	100%	418.239	100%	433.953	100%	458.022	100%	492.018	100%	537.293	95%	2.339.525	
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Di Tingkat Kecamatan	89,62%	100%	3.640.604	100%	3.777.387	100%	3.986.902	100%	4.282.825	100%	4.676.921	95%	20.364.639	

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026 Kota Makassar

Kode			Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		SKPD Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	
7	1		KECAMATAN				11.221.000		11.642.593		12.288.354		13.200.440		14.415.117		62.767.504	Kecamatan Kepulauan Sangkarrang
7	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%	90%	7.542.656	90%	7.826.044	90%	8.260.122	90%	8.873.216	90%	9.689.712	90%	42.191.750	
				Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%				
				Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90%	90%		90%		90%		90%		90%				
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Di Kecamatan	100%	100%	787.800	100%	817.399	100%	862.736	100%	926.772	100%	1.012.051	95%	4.406.758	
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Sarana Dan Prasarana Lingkup Kelurahan Dalam Kondisi Baik			1.253.273		1.300.361		1.372.486		1.474.357		1.610.024	95%	7.010.501	
				Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat Lingkup Kelurahan Yang Mendapat Pemberdayaan	100%	100%		100%		100%		100%						
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lingkup Kecamatan Yang Dapat Diselesaikan	100%	100%	36.000	100%	37.355	100%	39.424	62208%	42.351	100%	46.248	95%	201.378	
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Di Tingkat Kecamatan	100%	100%	1.601.271	100%	1.661.434	100%	1.753.586	100%	1.883.744	100%	2.057.082	95%	8.957.117	

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 Kota Makassar

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		SKPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.(000)			
				Target	Rp. (000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)					
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM															
8	1		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				18.357.000		19.046.703		20.103.137		21.595.266		23.582.417		102.684.523	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%	90%	7.049.102	90%	7.313.948	90%	7.719.619	90%	8.292.597	90%	9.055.665	90%	39.430.931	
				Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%				
				Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90%	90%		90%		90%		90%		90%				
8	1	2	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Kelompok Masyarakat Yang Mendapat Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	2,1%	32%	1.198.667	48%	1.243.704	64%	1.312.687	80%	1.410.120	96%	1.539.876	96%	6.705.054	
8	1	3	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Partai Politik yang mendapat Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	100%	100%	2.618.590	100%	2.716.974	100%	2.867.672	100%	3.080.522	100%	3.363.985	100%	14.647.743	
8	1	4	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Terdaftar Dan Mendapat Pembinaan	10%	100%	6.473.008	100%	6.716.209	100%	7.088.727	100%	7.614.879	100%	8.315.584	100%	36.208.407	
8	1	5	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Kelompok Masyarakat Yang Mendapat Pembinaan Dan Pengembangan Katahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	0%	100%	395.449	100%	410.307	100%	433.065	100%	465.208	100%	508.016	100%	2.212.045	
8	1	6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial Yang Diselesaikan	100%	100%	622.184	100%	645.561	100%	681.367	100%	731.940	100%	799.291	100%	3.480.343	

VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja dapat didefinisikan sebagai keluaran atau hasil atau dampak dari kegiatan/program/sasaran yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Untuk mendapatkan ukuran sejauh mana pencapaian kinerja yang telah direncanakan, keberhasilan maupun kegagalannya, dalam periode waktu tertentu perlu ditetapkan suatu indikator kinerja. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja Kota Makassar terdiri dari Indikator Kinerja Utama (termasuk indikator kinerja makro daerah dan TPB), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah atau Indikator Kinerja Kunci (IKK).

8.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Berdasarkan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama (IKU) didefinisikan sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Target IKU pembangunan Kota Makassar merupakan ukuran pencapaian Visi dan Misi Walikota Makassar dan Wakil Walikota Makassar (*impact based*) untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Makassar tahun 2022-2026. Target IKU Kota Makassar selama kurun waktu lima tahun mendatang, tercantum pada tabel berikut:

Tabel 8.1 | Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 – 2026 Kota Makassar

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
		2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	82,25	82,95	83,3	83,67	84,05	84,45	84,45
2	Indeks Pendidikan	0,818	0,837	0,847	0,856	0,865	0,875	0,875
3	Pengeluaran Perkapita	16,89 jt	17,94 jt	18,26 jt	18,58 jt	18,91 jt	19,23 jt	19,23 jt
4	Indeks Reformasi Birokrasi	63,23	64,33	64,71	65,8	66,03	66,1	66,1
5	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,66	79,5	80	80,5	81	82,5	82,5
6	Status Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
7	Indek Kesehatan	0,8	0,804	0,806	0,808	0,81	0,812	0,812
8	Usia Harapan Hidup (Tahun)	72.09 th	72.1 th	72.2 th	72.3 th	72.4 th	72.5 th	72.5 th
9	Angka Kemiskinan (%)	4,54%	4,40%	4,30%	4,20%	4,10%	4,00%	4,00%

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2020)	Target Kinerja					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
10	Pertumbuhan Ekonomi (%)	-1,27%	4,00%	4,90%	5,80%	6,70%	7,60%	7,60%
11	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	15,92%	12,50%	11,50%	11,00%	10,50%	10,00%	10,00%
12	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	58,05%	59,52%	60,28%	61,04%	61,81%	62,59%	62,59%
13	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per kapita (juta)	115.4 jt	125,4 jt	131,3 jt	137,3 jt	143,35 jt	149,45 jt	149,45 jt
14	Rasio Gini	0,4	0,395	0,392	0,39	0,388	0,386	0,386
15	Indeks Kota Nyaman (<i>Livable City Index</i>)	55,7	59,83	60,22	60,22	60,22	60,61	60,61
16	Indeks Layanan Infrastruktur	72,8	74,22	75,03	76,27	77,21	78,56	78,56
17	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Makassar	53,52	57,97	58,47	58,97	59,47	59,77	59,77

8.2 INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pemenuhan pelayanan dasar merupakan prioritas belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Target SPM Kota Makassar selama kurun waktu lima tahun mendatang, tercantum pada tabel berikut:

Tabel 8.2 | Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2022 – 2026 Kota Makassar

No	Bidang Urusan / Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir Periode RPJMD
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
I	Bidang Urusan Pendidikan								
1.	Pendidikan Dasar	Persentase Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	99,71%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Pendidikan Kesetaraan	Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	72,34%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	48,60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Bidang Urusan / Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir Periode RPJMD
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
II	Bidang Urusan Kesehatan								
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	92,30%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	97,50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	77,76%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Pelayanan kesehatan balita	Persentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	25,17%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	35,99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	61,48%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	85,28%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	61,39%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Persentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	70,07%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan angguan jiwa berat	Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	20,52%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Persentase Warga Negara terduga <i>tuberculosis</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan	Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Bidang Urusan / Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir Periode RPJMD
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
III	Bidang Urusan Pekerjaan Umum								
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	65,71%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	87.69%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
IV	Bidang Urusan Perumahan Rakyat								
1.	Penyediaan & rehatiitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
V	Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat								
1.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban Umum	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh informasi rawan bencana	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	99.04%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	99.85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Bidang Urusan / Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir Periode RPJMD
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
VI	Bidang Urusan Sosial								
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Persentase Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Persentase Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

8.3 INDIKATOR KINERJA KUNCI

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk mengetahui capaian indikator kinerja dari setiap aspek, fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. IKK meliputi 3 (tiga) aspek utama, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Target Kota Makassar selama kurun waktu lima tahun mendatang, tercantum pada tabel berikut:

Tabel 8.3 | Indikator Kinerja Kunci Tahun 2022 – 2026 Kota Makassar

No	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal (2020)	Target Kinerja					Kondisi Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
I	Aspek Kesejahteraan Masyarakat							
1.1	Pertumbuhan PDRB PDRB ADHB (Triliun) PDRB ADHK (Triliun)	178,33 120,91	197,728 129,640	211,371 135,992	227,858 143,879	247,682 153,519	271,459 165,187	271,459 165,187
1.2	Laju Inflasi (%)	2,13	2,10%	2,00%	2,00%	1,95%	1,85%	1,85%
1.3	PDRB Per Kapita (juta)	115,4	125,4 jt	131,3 jt	137,3 jt	143,35 jt	149,45 jt	149,45 jt
1.4	Pertumbuhan Ekonomi (%)	-1,27%	4,00%	4,90%	5,80%	6,70%	7,60%	7,60%
1.5	Indeks Gini	0,4	0,395	0,392	0,390	0,388	0,386	0,386
1.6	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan (%)	95,46%	95,57%	95,58%	95,58%	95,59%	95,60%	95,60%
1.7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	82,25	82,95	83,3	83,67	84,05	84,45	84,45
1.8	Angka Melek Huruf (%)	98,43%	98,75%	98,9%	99,06%	99,22%	99,37%	99,37%
1.9	Angka rata-rata lama sekolah (Tahun)	11,21 th	11,89 th	12,28 th	12,66 th	13,03 th	13,34 th	13,34 th
1.10	Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per hari (%)	3%	4,43%	4,42%	4,42%	4,41%	4,40%	4,40%
1.10	Angka usia harapan hidup (Tahun)	72,09 th	72,52 th	72,68 th	72,85 th	73,02 th	73,19 th th	73,19
1.11	Persentase balita gizi buruk (%)	1,60%	1,64%	1,54%	1,43%	1,32%	1,22%	1,22%
1.12	Prevalensi balita gizi kurang (%)	6,44%	6,05%	5,79%	5,51%	5,26%	4,99%	4,99%
1.13	Cakupan Desa Siaga Aktif (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.14	Angka Partisipasi Angkatan Kerja (%)	57%	58,61%	58,79%	58,97%	59,15%	59,33%	59,33%
1.15	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	61,89%	63,16%	64,15%	64,41%	65,1%	65,45%	65,45%
1.16	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	15,91%	12,5%	11,5%	11%	10,5%	10%	10%
1.17	Rasio penduduk yang bekerja	84,08	85,22	86,50	87,01	88,22	89,43	90,64
1.18	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja	20,66	21,11	21,71	22,30	22,90	23,49	23,49
1.19	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	84,08	85,22	86,50	87,01	88,22	89,43	90,64
1.20	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	32,56	32,86	33,15	33,45	33,74	33,97	33,97
1.21	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	31,86	29,32	28,95	27,57	27,11	25,82	25,82
1.22	Indeks Kepuasan Masyarakat	77,66	79,63	80,44	81,25	82,06	82,86	82,86
1.23	Persentase PAD terhadap pendapatan (%)	33,21	36,76	37,52	38,28	39,04	39,79	39,79
1.24	Opini BPK	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
1.25	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	78,8	80	82	85	88	90	90
1.26	Penguatan cadangan pangan (Ton)	5 Ton	5 Ton	5 Ton	5 Ton	5 Ton	5 Ton	5 Ton
1.27	Penanganan daerah rawan pangan (%)	60,1	66,02	69,22	72,42	72,85	75,63	75,63
1.28	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%)	0,068	0,071	0,069	0,063	0,060	0,058	0,058
1.29	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB (%)	9,89	5,72	4,58	4,36	3,15	3,00	3,00

1.30	Produksi sektor pertanian (Ton)	36.216	35.260	34.405	34.304	33.497	32.588	32.588
1.33	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB (%)	99,09%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.37	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB (%)	1,01	1,09	1,15	1,32	1,33	1,39	1,39
1.38	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	19,67%	20,07%	20,31%	20,56%	20,80%	20,87%	20,87%
1.39	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	18%	16,76%	16,14%	15,52%	14,89%	14,27%	14,27%
II	Aspek Daya Saing							
2.1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Jt)	-	17,94 Jt	18,26 Jt	18,58 Jt	18,91 jt	19,23 Jt	19,23 Jt
2.2	Nilai tukar petani (%)	97,56%	98,87%	99,23% %	100,97 %	102,03%	103,08 %	104,14%
2.3	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan per kapita (%)	-	59	60	61	62	63	64
2.4	Produktivitas total daerah	197	198,77	200,5	202,22	203,95	205,67	205,67
2.6	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi)	-	82,07 85,39	82,84 85,62	82,91 85,84	83,62 85,84	83,72 86,07	83,72 86,07
2.7	Rasio pinjaman terhadap Simpanan di bank umum	-	1,174	1,173	1,172	1,171	1,17	1,17
2.9	Angka kriminalitas yang tertangani (%)	0,00076 %	0,0006 %	0,0005 %	0,0004 %	0,0003%	0,0004 %	0,0004%
2.10	Rasio ketergantungan (%)	43.28%	41%	40,03%	39,17%	38,31%	37,45%	37,45%
III	Aspek Layanan Umum							
A	Layanan Urusan Wajib Dasar							
1	Pendidikan							
1.1	Pendidikan Anak Usia Dini PAUD (%)	50,27%	52,50%	52,87%	54,79%	55,27%	57,67%	57,67%
1.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A (%)	103,54%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B (%)	93,77%	96,32%	98,29%	100%	100%	100%	100%
1.4	Angka Partisipasi Murni (PAUD) (%)	21,10%	30,26%	36,93%	46,33%	59,63%	78,64%	78,64%
1.5	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%)	96,79%	97,1%	97,5%	97,93%	98,37%	99,23%	99,23%
1.6	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%)	80,27%	80,90%	85,50%	90,09%	94,64%	99,28%	99,28%
1.7	Angka pendidikan yang ditamatkan SD/MI/Paket A	11,61	11,91	12,30	13,28	14,25	15,22	15,22
1.8	Angka pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs/Paket B	20,91	22,41	23,39	24,38	25,37	26,35	26,35
1.9	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A (%)	97,84%	99,51%	99,76%	100%	100%	100%	100%
1.10	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B (%)	93,35%	95,04%	95,37%	96,18%	97,58%	98,29%	98,29%
1.11	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%)	0,43%	0,23%	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.12	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	1,23%	0,74%	0,31%	0,27%	0,20%	0,13%	0,13%
1.13	Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.14	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.15	Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs (%)	97,86%	98,31%	99,08%	99,22%	99,87%	100%	100%
1.16	Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/MA (%)	103,69%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.17	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (%)	93,01%	94,69%	94,78%	95,28%	99,78%	99,86%	99,86%
1.19	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (%)	93,12%	93,80%	94,56%	97,02%	97,77%	98,74%	98,74%
1.20	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	36,31	37,59	38,31	39,03	39,76	39,99	39,99

1.23	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	539,24	552,78	566,80	581,19	592,37	609,6	609,6
1.24	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar (%)	107.84	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.25	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun perempuan dan laki-laki (%)	107.84%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.26	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%)	98,43%	98,63%	98,79%	99,47%	99,63%	100%	100%
1.27	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)	95,59%	96.54%	97.21%	97.59%	97.88%	98.26%	98.26%
2	Kesehatan							
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup (%)	1,58%	1,43%	1,39%	1,32%	1,24%	1,19%	1,19%
2.2	Angka kelangsungan hidup bayi (1/1.000)	998,37	998,91	999,09	999,28	999,46	999,65	999,65
2.3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	1,58	1,29	1,25	0,91	0,88	0,86	0,86
2.4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup (1/1.000)	1,21	1,031	0,925	0,820	0,714	0,61	0,61
2.5	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	44,13	42,17	35,40	28,63	21,87	19,21	19,21
2.6	Rasio posyandu per satuan balita	7,19	7,45	7,56	7,63	7,75	7,81	7,81
2.7	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0,226	0,249	0,253	0,266	0,279	0,283	0,283
2.8	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,032	0,032	0,033	0,033	0,034	0,034	0,034
2.9	Rasio dokter per satuan penduduk	0,44	0,46	0,48	0,49	0,51	0,53	0,53
2.10	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	1,31	1,336	1,346	1,355	1,366	1,374	1,374
2.11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	97,92%	97,34%	97,55%	97,76%	97,87%	97,96%	97,96%
2.12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	92,14%	93,71%	94,07%	94,43%	94,79%	95,14%	95,14%
2.13	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.16	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak (%)	98,33%	99,50%	99,53%	99,55%	99,58%	99,61%	99,61%
2.17	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk (1/100.000)	0,0010	0	0	0	0	0	0
2.18	Cakupan balita pneumonia yang ditangani (%)	6,69%	10,38%	11,38%	12,39%	13,40%	14,41%	14,41%
2.19	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)	25,73%	26,789 %	28,138 %	30,59%	32,202%	33,812 %	33,812%
2.20	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) (1/100.000)	0,21	0,20	0,20	0,188	0,185	0,180	0,180
2.21	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.23	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	30,50	35,725	34,024	26,784	24,574	23,404	23,404
2.24	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.25	Penderita diare yang ditangani (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.26	Angka kejadian Malaria (%)	7,46%	6,724%	6,656%	5,26%	4,997%	4,838	4,838%

2.30	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi (%)	0,044%	0,041%	0,038%	0,035%	0,032%	0,029%	0,029%
2.33	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	50,09	65,607	120,405	200,794	281,183	282,183	282,183
2.34	Cakupan kunjungan bayi (%)	88,30%	99,853%	100%	100%	100%	100%	100%
2.35	Cakupan puskesmas (%)	313,33%	316,174%	319,472%	319,812%	315,046%	317,429%	317,429%
2.36	Cakupan pembantu puskesmas (%)	21,57%	22,70%	22,199%	22,532%	23,964%	25,228%	25,228%
2.37	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 (%)	92,29%	93,41%	94,18%	94,42%	94,42%	95,14%	95,14%
2.38	Cakupan pelayanan nifas (%)	85,24%	86,338%	87,284%	88,24%	89,186%	91,088%	91,088%
2.39	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)	83,23%	84,595%	85,724%	86,853%	87,763%	87,982%	87,982%
2.40	Cakupan pelayanan anak balita (%)	77,02%	77,648%	78,219%	79,820%	79,992%	80,446%	80,446%
2.41	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.42	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat (%)	96,31%	100%	100%	100%	100%	100%	100
2.43	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%)	50,09%	83,236%	84,996%	86,756%	88,516%	90,276%	90,276%
2.44	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.45	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Pekerjaan Umum							
3.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	97,46%	98,44%	98,89%	99,13%	99,58%	99,82%	99,82%
3.2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	1 : 932	1 : 964	1 : 997	1 : 1030	1 : 1063	1 : 1100	1 : 1100
3.4	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) (%)	89,01%	91,77%	92,72%	95,98%	96,79%	99,24%	99,24%
3.5	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) (%)	40,28%	40,36%	40,37%	40,38%	40,39%	40,40%	40,40%
3.7	Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)	87,72%	89,52%	90,81%	91,49%	92,77%	93,45%	93,45%
3.8	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (%)	6,50%	5,89%	5,59%	5,24%	4,98%	4,59%	4,59%
3.9	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)	81,33%	86,42%	88,06%	90,97%	91,07%	92,95%	92,95%
3.10	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun(%)	12,24	18,37	19,86	25,00	26,32	27,81	27,81
3.113.12	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor (%)	0%	2,24%	2,27%	2,39%	3,69%	3,88%	3,88%
3.15	Persentase penduduk berakses air minum (%)	72,35%	73,02%	73,38%	74,21%	74,52%	75,41%	75,41%
3.16	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan (%)	72,35%	73,02%	73,38%	74,21%	75,41%	76,61%	76,61%
3.17	Persentase areal kawasan kumuh (%)	2,43%	2,09%	1,99%	1,81%	1,76%	1,67%	1,67%
3.18	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan (%)	-	89,07%	89,96%	91,29%	94,69%	95,86%	95,86%

3.19	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	123,73	147,89	151,48	170,48	174,03	183,19	183,19
3.20	Total Rumah Ibadah	1547	1556	1565	1577	1578	1589	1589
3.21	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	1.01	1,03	1,06	1,08	1,09	1,12	1,12
3	Penataan Ruang							
3.1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	-	2675,13	2785,74	2896,35	3006,95	3117,56	3117,56
3.2	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan (%)	6,648%	6,943%	7,031%	7,119%	7,207%	7,295%	7,295%
3.3	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	0,019	0,020	0,021	0,022	0,023	0,024	0,024
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							
4.1	Rasio rumah layak huni	1 : 5,75	1 : 6,06	1 : 6,34	1 : 6,62	1 : 6,81	1 : 6,90	1 : 6,90
4.3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	99,74 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.4	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau(%)	99,74%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.6	Persentase lingkungan pemukiman kumuh (%)	2,17%	1,98%	1,78%	1,69%	1,68%	1,67%	1,67%
4.7	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	70%	51,83%	33,66%	15,49%	14,23%	13,15%	13,15%
4.8	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	1,05	0,88	0,84	0,78	0,65	0,62	0,62
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							
5.1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) (%)	20,98%	21,12%	21,21%	21,29%	21,38%	21,47%	21,47%
5.2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) (%)	82,79%	88,01%	90,57%	100%	100%	100%	100%
5.3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota (%)	32,5%	33,42%	34,08%	35,97%	36,10%	37,15%	37,15%
5.4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMMK) (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.5	Persentase Penegakan PERDA (%)	82,8%	83,40%	87,64%	87,98%	91,89%	93,12%	93,12%
6	Sosial							
6.1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.2	Persentase PMKS yang tertangani (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.5	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.6	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.7	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.8	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	prasarana tanggap darurat lengkap (%)							
6.9	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
B	Layanan Urusan Wajib Non Dasar							
1	Tenaga Kerja							
1.1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (per 1.000)	6,81	4,84	3,82	2,81	1,79	1,51	1,51
1.2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (%)	58,28%	63,15%	63,41%	64,29%	66,47%	69,97%	69,97%
1.3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	50,33%	55,91%	59,20%	59,64%	62,74%	63,37%	63,37%
1.5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (%)	25%	29,27%	31,72%	34,18%	36,47%	36,63%	36,63%
1.6	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah(%)	0	0	0	0	0	0	0
1.9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	30,43%	33,26%	34,26%	35,01%	36,49%	38,61%	38,61%
1.10	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (%)	43,64%	43,76%	46,04%	46,52%	46,68%	48,96%	48,96%
1.11	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (%)	25,21%	27,34%	28,78%	31,21%	33,82%	35,6%	35,6%
1.12	Rasio lulusan S1/S2/S3 (Per 10.000)	13,63	13,85	14,05	14,17	14,23	14,37	14,37
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	62,85%	63,48%	63,79%	64,09%	64,41%	64,50%	64,50%
2.2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR (%)	24%	28%	31%	33%	36%	38%	38%
2.3	Rasio KDRT (%)	4,32%	3,718%	3,402%	3,08%	2,77%	2,51%	2,51%
2.4	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.5	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.6	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu (%)	12,46%	17,61%	17,94%	18,19%	18,27%	18,54%	18,54%
2.7	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (%)	-	92,45%	96,79%	97,17%	97,32%	97,57%	97,57%
2.8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (%)	69,90%	76,59%	86,96%	91,87%	96,71%	97,33%	97,33%

2.9	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.10	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Pangan							
3.1	Ketersediaan pangan utama (%)	7,08%	90%	91%	92%	93%	94%	94%
3.2	Ketersediaan energi dan protein per kapita	Energi : 2.523 Protein : 125,78	Energi : 2.600 Protein : 126	Energi : 2.700 Protein : 129	Energi : 2.700 Protein : 129	Energi : 2.700 Protein : 128	Energi : 2.700 Protein : 129	Energi : 2.700 Protein : 129
3.3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	98,89%	99,36%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Pertanahan							
4.1	Persentase luas lahan bersertifikat (%)	0	2,67%	4,49%	5,79%	7,46%	8,89%	8,89%
4.2	Penyelesaian kasus tanah Negara(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.3	Penyelesaian izin lokasi (%)	0	6,46%	6,80%	13,34%	15,96%	16,8%	16,8%
5	Lingkungan Hidup							
5.1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.4	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.5	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.6	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	19,29	20,79	21,29	21,79	22,19	27,79	27,79
5.7	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	26,67	29,58	30,52	31,99	34,39	35,87	35,87
5.8	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.9	Terfasilitasinya Pendampingan Pengakuan MHA	Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.10	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
5.11	Terverifikasinya hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
5.12	Penetapan hak MHA	Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.13	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.14	Terfasilitasinya penyediaan sarana/prasarana	Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.15	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.16	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.17	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota (%)							
5.18	Timbulan sampah yang ditangani (%)	67,36%	70,34%	71,86%	73,85%	78,87%	80,89%	80,89%
5.19	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R (%)	13,08%	26%	27%	28%	30%	30%	30%
5.20	Persentase cakupan area pelayanan (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.21	Persentase jumlah sampah yang tertangani (%)	67,36%	68,93%	70,34%	71,85%	74,93%	78,87%	78,87%
5.22	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	-	71,57	71,62	71,67	71,72	71,77	71,77
5.23	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan (%)	95,5%	97,94%	99,45%	100%	100%	100%	100%
5.24	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang- undangan (%)	95,5%	97,94%	99,45%	100%	100%	100%	100%
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
6.1	Rasio penduduk ber- KTP per satuan penduduk (%)	155	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.2	Rasio bayi berakte kelahiran (%)	98,85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.3	Rasio pasangan berakte nikah	30,04	36,37	38,27	38,73	42,02	44,23	44,23
6.4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi (%)	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
6.5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
6.6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (%)	93%	99,68%	100%	100%	100%	100%	100%
6.7	Cakupan penerbitan akta kelahiran (%)	98,85%	99,53%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
7.1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (%)	95,42	95,84	96,21	96,43	96,79	97,01	97,01
7.2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	43,71	50,10	51,58	52,35	54,61	55,14	55,14
7.4	Persentase LSM aktif (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.5	Persentase LPM Berprestasi	1,96	2,02	2,12	2,16	2,36	2,58	2,58
7.6	Persentase PKK aktif (%)	100	100	100	100	100	100	100
7.7	Persentase Posyandu aktif (%)	-	100	100	100	100	100	100
7.8	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.9	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
8.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	1,23	1,22	1,21	1,21	1,20	1,20	1,20
8.2	Total Fertility Rate (TFR)	2,11	2,10	2,09	2,08	2,07	2,06	2,06
8.3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB (%)	52,94%	54,90%	56,86%	58,82%	60,78%	62,74%	62,74%
8.4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk (%)	39,21%	41,17%	43,13%	45,09%	47,05%	50,98%	50,98%

8.5	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	1	1	1	1	1	1	1
8.6	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	6	21	22	23	24	25	25
8.7	Jumlah kerja sama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	8	9	13	16	18	20	20
8.9	Rata-rata jumlah anak per keluarga (orang)	1,49	2	2	2	2	2	2
8.10	Ratio Akseptor KB (%)	68,20%	68,25%	68,30%	68,35%	68,40%	68,45%	68,45%
8.11	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	68,20%	68,25%	68,30%	68,35%	68,40%	68,45%	68,45%
8.12	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19) (%)	33,52%	31,52%	29,53%	27,50%	25,59%	23,40%	23,40%
8.13	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah 20 tahun (%)	0,56%	0,55%	0,54%	0,53%	0,52%	0,51%	0,51%
8.14	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) (%)	9,20%	8,70%	8,30%	7,90%	7,50%	7,10%	7,10%
8.15	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (%)	30,68%	32,88%	33,44%	33,98%	34,54%	35,09%	35,09%
8.16	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi (%)	46,63%	47,56%	48,51%	49,48%	50,47%	51,48%	51,48%
8.17	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%)	75,02%	76,22%	76,82%	77,14%	77,74%	78,34%	78,34%
8.18	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB (%)	70,95%	72,15%	72,80%	73,40%	74,00%	74,60%	74,60%
8.19	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB (%)	61,87%	62,87%	63,47%	64,07%	64,67%	65,27%	65,27%
8.21	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa (%)	793,33%	813,33 %	833,33 %	853,33 %	873,33%	893,33 %	893,33
8.22	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.23	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri (%)	38,33%	38,37%	38,39%	38,41%	38,43%	38,45%	38,45%
8.24	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.25	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat (%)	39,04%	39,25%	39,43%	39,64%	39,80%	40,00%	40,00%
8.26	Persentase Faskes dan jejaringnya (di seluruh	97,32%	97,34%	97,36%	97,38%	97,40%	97,42%	97,42%

	tingkatan wilayah) yang bekerja sama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan (%)							
8.27	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.28	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga(%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.29	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak (%)	69,59%	69,89%	70,19%	70,49%	70,79%	71,09%	71,09%
8.30	Rata-rata usia kawin pertama Wanita (Tahun)	21 tahun	21	21	21	21	21	21
8.31	Persentase Pembiayaan Program kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	0,65%	0,692%	0,712%	0,732%	0,734%	0,752%	0,752%
9	Perhubungan							
9.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum (orang)	6.202.000	6.956.000	6.955.970	8.123.170	8.123.800	9.291.000	9.291.000
9.2	Rasio ijin trayek	1 : 958	1 : 900	1 : 850	1 : 800	1 : 750	1 : 700	1 : 700
9.3	Jumlah uji kir angkutan umum (kir)	2.254	2.500	2.860	3.120	3.225	3.345	3.350
9.4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis (Unit)	5	5	5	5	5	5	5
9.5	Persentase layanan angkutan darat	1 : 1.872	1 : 1.956	1 : 2.125	1 : 2.258	1 : 2.581	1 : 3.015	1 : 3.015
9.6	Pemasangan Rambu-rambu (%)	2,7%	3,10%	3,45%	3,85%	4,15%	4,25	4,25%
9.7	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	1 : 714	1 : 746	1 : 773	1 : 836	1 : 926	1 : 1015	1 : 1015
9.8	Jumlah orang/ barang yangangkut angkutan umum	9.939.600	14.270.663	18.505.000	29.331.013	34.358.000	44.391.363	44.391.363
9.9	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun (orang)	6.551.484	7.024.364	8.673.137	10.321.909	11.970.683	13.619.455	13.619.455
10	Komunikasi dan Informatika							
10.1	Cakupan pengembangan an pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan (%)	127%	128,68 %	132,65 %	139,63 %	143,05%	150,58 %	150,58%
10.2	Cakupan Layanan Telekomunikasi (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							
11.1	Persentase koperasi aktif (%)	69,61%	73,69%	76,19%	80,12%	81,47%	86,56%	86,56%
11.2	Persentase UKM non BPR/LKM aktif (%)	99,90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11.3	Persentase BPR/LKM Aktif (%)	41,37%	42,15%	43,51%	43,86%	44,15%	45,85%	45,85%
11.4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil (%)	75,01%	75,91%	77,09%	77,14%	78,37%	78,45%	78,45%
12	Penanaman Modal							
12.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (investor)	PMDN : 975 PMA : 339	PMDN : 1205 PMA : 414	PMDN : 1455 PMA : 499	PMDN : 1735 PMA : 589	PMDN : 2035 PMA : 689	PMDN : 2375 PMA : 809	PMDN : 2375 PMA : 809

12.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	PMDN : Rp. 7.453.87 5.500.00 0; PMA : US\$19.2 95.100	PMDN : Rp.1.80 0.000.0 0.000; PMA : US\$68. 000.00 0.000	PMDN : Rp.1.90 0.000.0 0.000; PMA : US\$75. 000.00 0.000	PMDN : Rp.2.10 0.000.0 0.000; PMA : US\$82. 000.00 0.000	PMDN : Rp.2.300. 000.00.0 00; PMA : US\$90.0 00.000.0 00	PMDN : Rp.2.60 0.000.0 0.000; PMA : US\$99. 000.00 0.000	PMDN : Rp.2.60 0.000.00 .000; PMA : US\$99.0 00.000.0 00
12.3	Rasio daya serap tenaga kerja	3,34	4,25	4,89	5,36	5,76	5,94	5,94
12.4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) (%)	41,14%	46,69%	56,69%	69,73%	82,73%	90,17%	90,17%
13	Kepemudaan dan Olah Raga							
13.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13.2	Persentase wirausaha muda (%)	17%	17%	17%	17%	17%	17%	17%
13.3	Cakupan pembinaan olahraga (%)	54%	56%	57%	57%	58%	59%	59%
13.4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi (%)	7,75%	7,75%	7,75%	7,75%	7,75%	7,75%	7,75%
13.5	Cakupan pembinaan atlet muda (%)	14,86%	15,64%	18,41%	21,19%	23,97%	26,74%	26,74%
13.6	Jumlah atlet berprestasi (Atlet)	19 Atlet	19 Atlet	19 Atlet	19 Atlet	19 Atlet	19 Atlet	19 Atlet
13.7	Jumlah prestasi olahraga (Cabor)	13 Cabor	19 Cabor	25 Cabor	31 Cabor	37 Cabor	43 Cabor	43 Cabor
14	Statistik							
14.1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
14.2	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
14.3	Buku "PDRB"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
15	Persandian							
15.1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	Kebudayaan							
16.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (Festival)	2 Festival	2 Festival	4 Festival	4 Festival	5 Festival	5 Festival	5 Festival
16.2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (unit)	138 unit	153 unit	161 unit	172 unit	180 unit	189 unit	189 unit
16.3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Diinventarisasi 50	Diinventarisasi 53	Diinventarisasi 55	Diinventarisasi 56	Diinventarisasi 58	Diinventarisasi 59	Diinventarisasi 59
16.4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu (cagar)	-	53 cagar	55 cagar	56 cagar	58 cagar	59 cagar	59 cagar
17	Perpustakaan							
17.1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (orang)	186.527 orang	520 orang	540 orang	560 orang	580 orang	600 orang	600 orang
17.2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	0,442	0,492	0,529	0,566	0,601	0,604	0,604
17.3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk (per 1.000)	0,297	0,392	0,479	0,505	0,587	0,618	0,618
17.4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun (orang)	15.543	57.430	60.526	63.622	66.718	69.814	69.814
17.5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan (judul)	111.681	116.043	118.451	120.858	123.266	125.674	125.674
17.6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat (%)	1,75%	1,88%	1,94%	1,98%	2,1%	2,2%	2,2%
18	Kearsipan							
18.1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (%)	52%	56,73%	58,4%	59,72%	61,48%	63,4%	63,4%

18.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan (orang)	4 orang	7 orang	7 orang	7 orang	8 orang	8 orang	8 orang
C	Layanan Urusan Pilihan							
1	Pariwisata							
1.1	Kunjungan wisata (%)	26,48%	48,50%	51,84%	76,30%	100%	100%	100%
1.2	Lama kunjungan Wisata (hari)	2 Hari	3 Hari	3,25 Hari	3,5 Hari	3,75 Hari	4 Hari	4 Hari
1.3	PAD sektor pariwisata (%)	18.45%	24.30%	24.48%	24.57%	27.07%	29.65%	29.65%
2	Pertanian							
2.1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%)	0,068%	0,075%	0,081%	0,087%	0,093%	0,099%	0,099%
2.2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB (%)	9,89%	10,71%	11,07%	11,63%	12,20%	12,82%	12,82%
2.3	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB (%)	99,09%	99,26%	99,38%	99,65%	99,78%	99,83%	99,83%
2.4	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	-	55,23%	57,55%	62,26%	69,28%	71,59%	71,59%
5	Perdagangan							
5.1	Ekspor Bersih Perdagangan (US \$)	377.770.000	1.198.523	1.386.945	1.578.694	1.849.249	2.170.505	2.170.505
6	Perindustrian							
6.1	Cakupan bina kelompok pengrajin (%)	27,17%	30,28%	32,22%	34,16%	36,10%	38,04%	38,04%
7	Kelautan dan Perikanan							
7.1	Produksi perikanan (%)	92,23%	96,27%	97,06%	97,86%	98,67%	99,47%	99,47%
7.2	Konsumsi ikan (%)	108,78	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.3	Cakupan bina kelompok nelayan (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.4	Produksi perikanan kelompok nelayan (%)	18,19%	18,35%	18,45%	18,54%	18,63%	18,72%	18,72%
7.5	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	140	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.6	Nilai tukar nelayan	99.644	100,65 %	101,41 %	102,18 %	102,94%	103,70 %	103,70%
D	Penunjang Urusan							
1	Perencanaan Pembangunan							
1.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Keuangan							
2.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.2	Persentase SILPA (%)	19,97%	2.30%	3.05%	3.81%	3.99%	4.04%	4.04%
2.3	Persentase belanja pendidikan (20%)	28,99%	20%	20%	20%	20%	20%	20%

2.4	Persentase belanja kesehatan (10%)	12,64%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
2.5	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
3	Kepegawaian serta Pendidikan dan pelatihan							
3.1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan (JPL)	0	6 Jpl	12 Jpl	18 Jpl	23 Jpl	24 Jpl	24 Jpl
3.2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (%)	0	5,22%	9,85%	13,00%	20,78%	28,56%	28,56%
3.3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (%)	0	4,49%	17,41%	18,33%	32,97%	34,70%	34,70%
3.4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah (orang)	42 orang	43 orang	44 orang	45 orang	46 orang	47 orang	47 orang
3.5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah (orang)	1.718 orang	1.736 orang	1.743 orang	1.749 orang	1.756 orang	1.762 orang	1.762 orang
3.6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah (orang)	6.745 orang	6.847 orang	6.850 orang	6.854 orang	6.857 orang	6.861 orang	6.861 orang
4	Penelitian dan Pengembangan							
4.1	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (%)	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.2	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	103,92	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.3	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.4	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Pengawasan							
5.1	Persentase tindak lanjut temuan (%)	57,19%	57,84%	57,87%	57,91%	57,94%	57,97%	57,97%
5.2	Persentase pelanggaran pegawai (%)	0,31%	0,30%	0,29%	0,28%	0,27%	0,26%	0,26%
5.3	Jumlah temuan BPK (temuan)	24 Temuan	23 Temuan	22 Temuan	21 Temuan	20 Temuan	19 Temuan	19 Temuan
6	Sekretariat Dewan							
6.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
6.2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
6.3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada

IX PENUTUP

9.1 KAIDAH PELAKSANAAN

RPJMD adalah landasan yuridis formal pelaksanaan pembangunan yang berisi isu-isu/program-program strategis yang dilaksanakan dan dicapai dalam 5 tahun mendatang, cara mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan, sasaran, dan target yang telah ditetapkan.

RPJMD menempatkan program pelaksanaan pembangunan sesuai dengan prioritas yang diamanatkan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan skala prioritas yang dimulai dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, dan urusan pilihan.

Dokumen RPJMD ini merupakan pedoman bagi pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Kota Makassar periode Tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Dengan adanya dokumen ini maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. RPJMD Tahun 2021-2026 Kota Makassar merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kota Makassar. Renstra adalah dokumen indikatif yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Renstra perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kota Makassar harus konsisten dan sinergis dengan dokumen RPJMD Tahun 2021 – 2026 Kota Makassar. Renstra yang mengatur perencanaan pembangunan lima tahunan perangkat daerah akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah.
2. RPJMD Tahun 2021-2026 Kota Makassar merupakan perencanaan pembangunan lima tahunan di Kota Makassar yang akan dijabarkan menjadi rencana pembangunan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar. Selanjutnya RKPD akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
3. RPJMD harus benar-benar diperhatikan, dipedomani dan dilaksanakan oleh pemerintah kota dalam melaksanakan pembangunan di berbagai aspek, karena setiap ketidaksesuaian, baik yang menyangkut kebijakan maupun pelaksanaannya dapat dinyatakan sebagai ketidakpatuhan bahkan pelanggaran.
4. Dalam pelaksanaan program/kegiatan, selain menggunakan anggaran Pemerintah Kota Makassar, dapat pula menggunakan anggaran yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, skema kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), *Corporate Social Responsibility* (CSR), hibah/bantuan dalam dan luar negeri, serta swadaya masyarakat dan/atau sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
5. Pasca penetapan RPJMD, apabila terjadi perubahan struktur organisasi perangkat daerah maka struktur/kelembagaan baru tersebut harus menyesuaikan antara urusan pemerintahan yang diampunya dengan urusan pemerintahan yang tercantum dalam RPJMD ini dan harus membuat renstra baru.

6. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan program/kegiatan dalam renstra/renja serta konsistensinya dengan RPJMD dilakukan pengendalian, monitoring, dan evaluasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. RPJMD Tahun 2021 – 2026 Kota Makassar dimungkinkan diubah apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan, hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan terjadi perubahan yang mendasar seperti: terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, dan/atau perubahan kebijakan nasional.
8. Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD Kota Makassar tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

9.2 PEDOMAN TRANSISI

RPJMD Tahun 2021 – 2026 Kota Makassar adalah penjabaran Visi dan Misi, Walikota dan Wakil Walikota Makassar hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020, yakni Bapak Ir. Moh. Ramdhan Pomanto dan Ibu Fatmawati Rusdi. Sesuai ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, masa jabatan kepala daerah adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan. Walikota dan Wakil Walikota Makassar dilantik pada tanggal 26 Februari 2021, sehingga sesuai ketentuan ini masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Makassar terpilih adalah 26 Februari 2026. Namun sesuai dengan ketentuan pasal 201, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka periode masa jabatan Walikota/Wakil Walikota Makassar adalah 2021 – 2024 dan akan berakhir pada September 2024. Namun demikian berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640, tanggal 4 Januari 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020, periodisasi RPJMD Kota Makassar berdasarkan masa jabatan dan bukan berdasarkan waktu menjabat sehingga periodisasi RPJMD Kota Makassar adalah tahun 2021-2026.

Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Makassar, maka Penjabat Walikota Makassar maupun Walikota dan Wakil Walikota Makassar Definitif yang akan terpilih pada periode selanjutnya (2026 – 2030) dalam melakukan penyusunan RKPD Kota Makassar Tahun 2025 dan 2026 tetap berpedoman pada arah kebijakan dalam dokumen RPJMD ini, termasuk penyelesaian target kinerja RPJMD 2025-2026 yang belum tercapai, dan menjaga keselarasan program dan kegiatan pembangunan Kota Makassar dengan pembangunan Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan, serta mengantisipasi perkembangan pembangunan yang akan mempengaruhi kinerja Pemerintah Kota Makassar.

WALIKOTA MAKASAR,

ttd.

MOH. RAMDHAN POMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum dan HAM
Pada Sekretariat Daerah Kota Makassar



Andi Hikma Rezkiani Nur, SH. M.SP
NIP: 19861125 201001 2 022